



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

**“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Wilayah
yang Andal untuk Percepatan Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

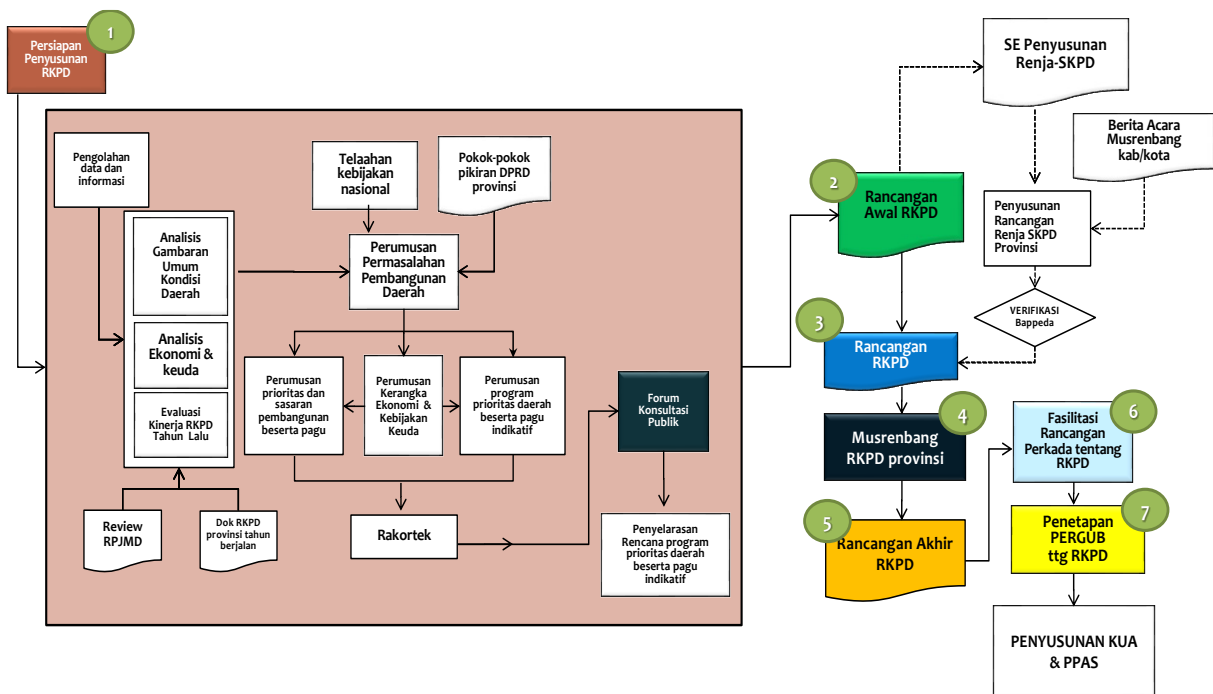
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah periode 2024-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2024 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD 2024 juga mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

Dokumen RKPD Tahun 2024 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD 2024 akan difokuskan pada upaya penguatan resiliensi perekonomian daerah melalui diversifikasi ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan diiringi penguatan daya saing sumber daya manusia, aksesibilitas dan konektivitas layanan infrastruktur yang andal, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.



Gambar 1.1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024

Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) melalui 8 (delapan) tahapan yang dapat dilihat pada Gambar I.1, yakni sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;

3. Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
4. Penyusunan Rancangan RKPD;
5. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
6. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
7. Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
8. Penetapan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.2.1 Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

1.2.2 Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

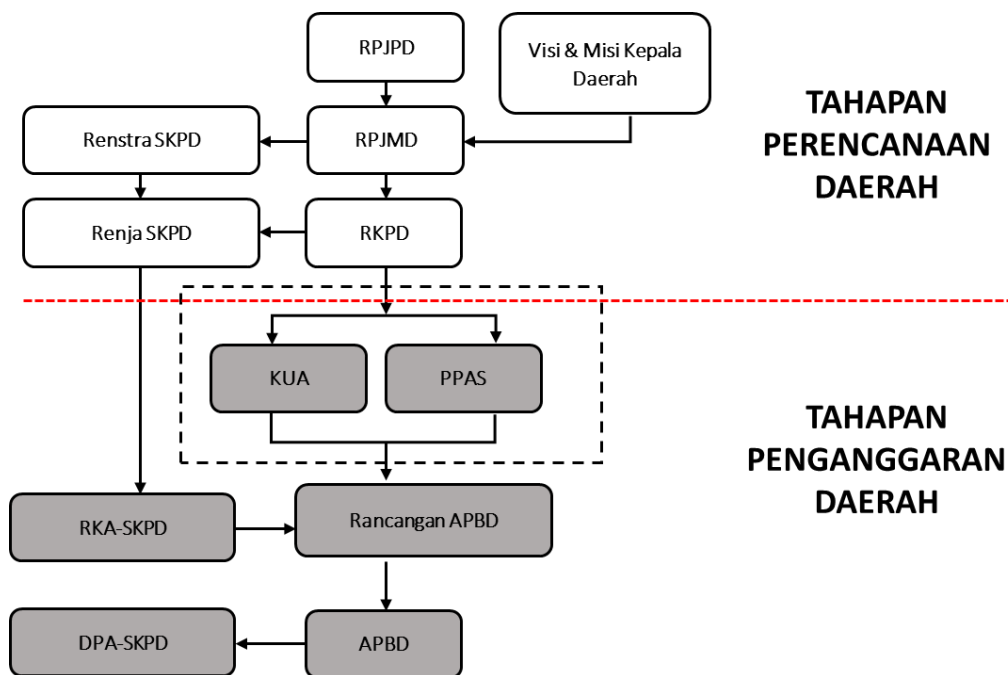
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1); dan
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan merupakan rangkaian dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang sinergis antara nasional dan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RKPD 2024 berpedoman pada :

- a. Kebijakan tahapan pelaksanaan RPD 2024-2026 tahun pertama, yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, serta penyelarasan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota;
- b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan, program dan kegiatan tahunan daerah dengan Tema, agenda pembangunan, sasaran pengembangan wilayah dan program strategis nasional dalam RKP Tahun 2024.

Selanjutnya RKPD 2024 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja -PD), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Adapun hubungan keterkaitan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Sistem ini dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Selanjutnya hasil perencanaan ini dijadikan sebagai acuan pada tahap penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2024.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, yaitu:

- a. Menyelaraskan dan mensinergikan program pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam

pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta penyajian aspirasi dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi yang nantinya akan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan rencana kerja yang berisi tentang seluruh rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan RKPD, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mengemukakan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII. Penutup

Mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD yang diantaranya meliputi peran dokumen RKPD dalam pelaksanaan pembangunan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Proses pengembangan hilirisasi industri di Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya transformasi ekonomi dari basis sektor ekonomi yang semula bersifat *unrenewable resources* menjadi *renewable resources* perlu mendapatkan perhatian besar. Sektor industri pengolahan dapat menjadi penopang ekonomi yang *sustainable* bagi daerah untuk menggeser dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian. Besarnya potensi keanekaragaman SDA, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan dapat dioptimalkan sebagai sumber bahan baku industri. SDA yang tidak terbarukan diantaranya berupa tambang batubara dan minyak bumi. Sedangkan SDA terbarukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, peternakan dan pariwisata. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai tambah produk, diperlukan hilirisasi industri yang dapat menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan isu strategis yang berkembang dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan perumusan strategi.

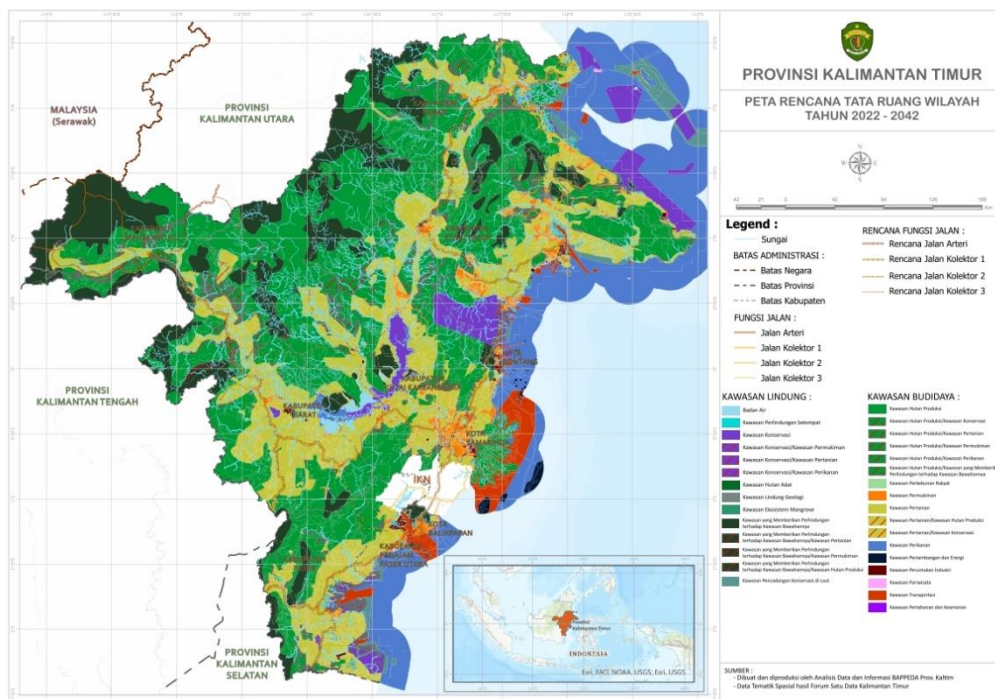
2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara $2^{\circ} 37' 12.99''$ Lintang Utara (LU) dan $-2^{\circ} 28' 19.31''$ Lintang Selatan (LS), $113^{\circ} 50' 3.61-119^{\circ} 14' 13.06''$ Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;

2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Selat Makassar; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 15.344.552 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.446.112 ha dan wilayah laut yang mencapai 2.898.439 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

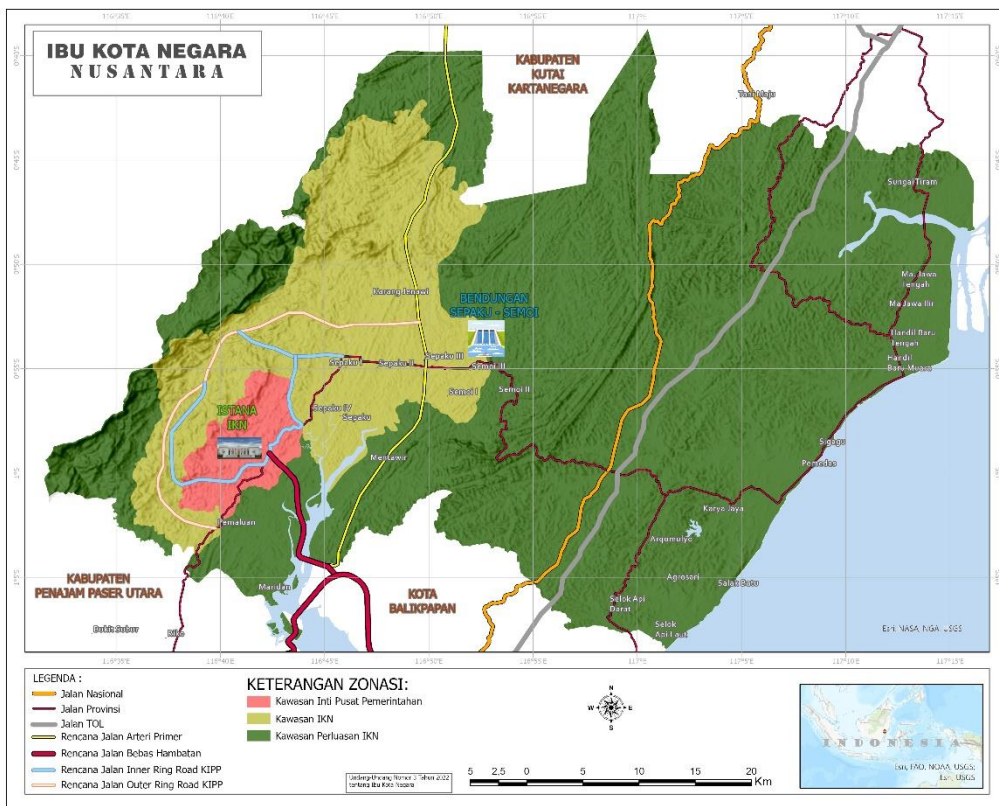


Gambar II.1
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, Kalimantan Timur terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.974.766 Ha dan Kawasan Budidaya seluas 12.369.786 Ha. Kawasan Lindung terdiri dari Badan Air, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Hutan Adat, Kawasan Lindung Geologi dan Kawasan

Ekosistem Mangrove sedangkan Kawasan Budidaya terdiri dari Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

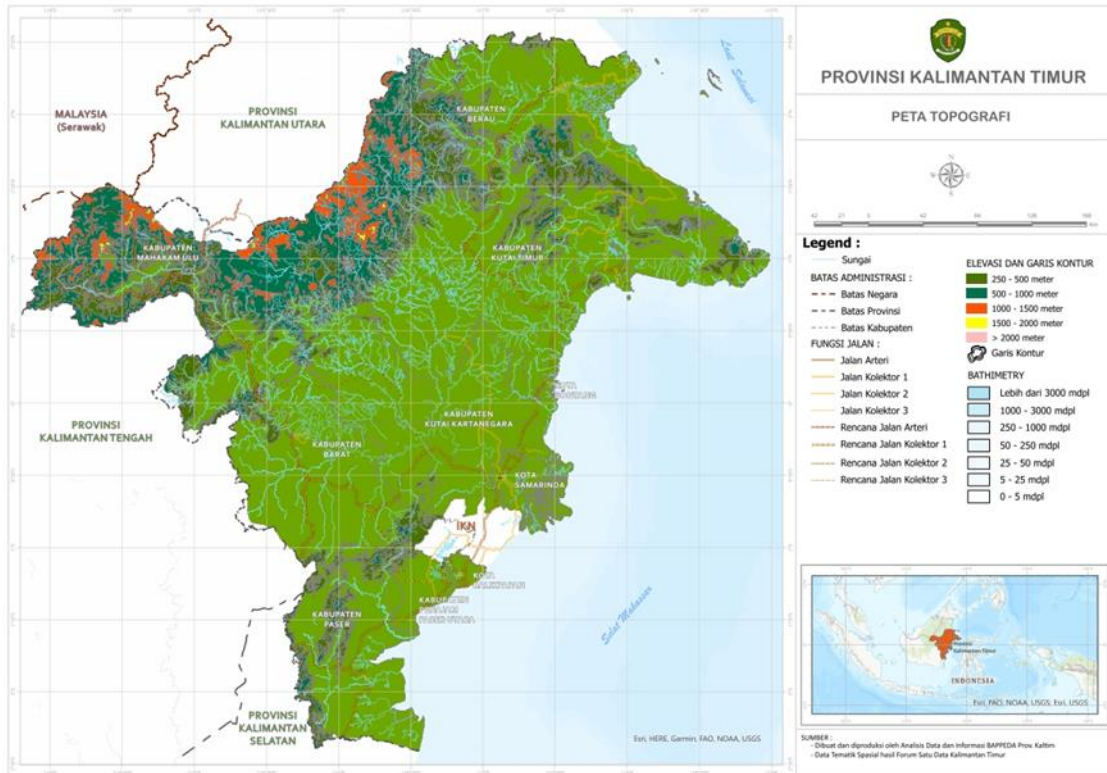
Setelah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui undang – undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi berkurang. Luas wilayah IKN Nusantara mencapai 324.331 Ha yang terdiri dari luas wilayah daratan mencapai 256.142 ha dan wilayah laut mencapai 68.189 ha. Sehingga luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur setelah ditetapkannya IKN Nusantara mencapai 16.407.734 ha dengan luasan wilayah daratan mencapai 12.478.550 ha dan wilayah laut mencapai 3.929.184 ha.



Gambar II.2
Peta Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

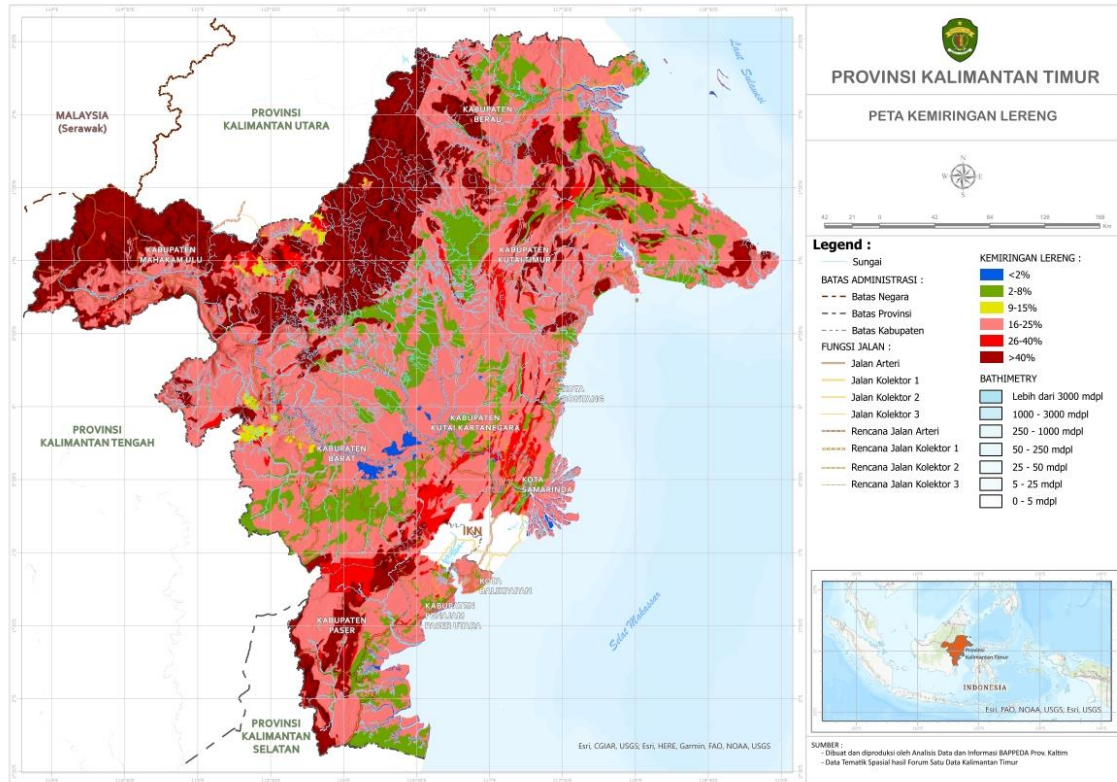
Topografi Provinsi Kalimantan Timur bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada Kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat

laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.



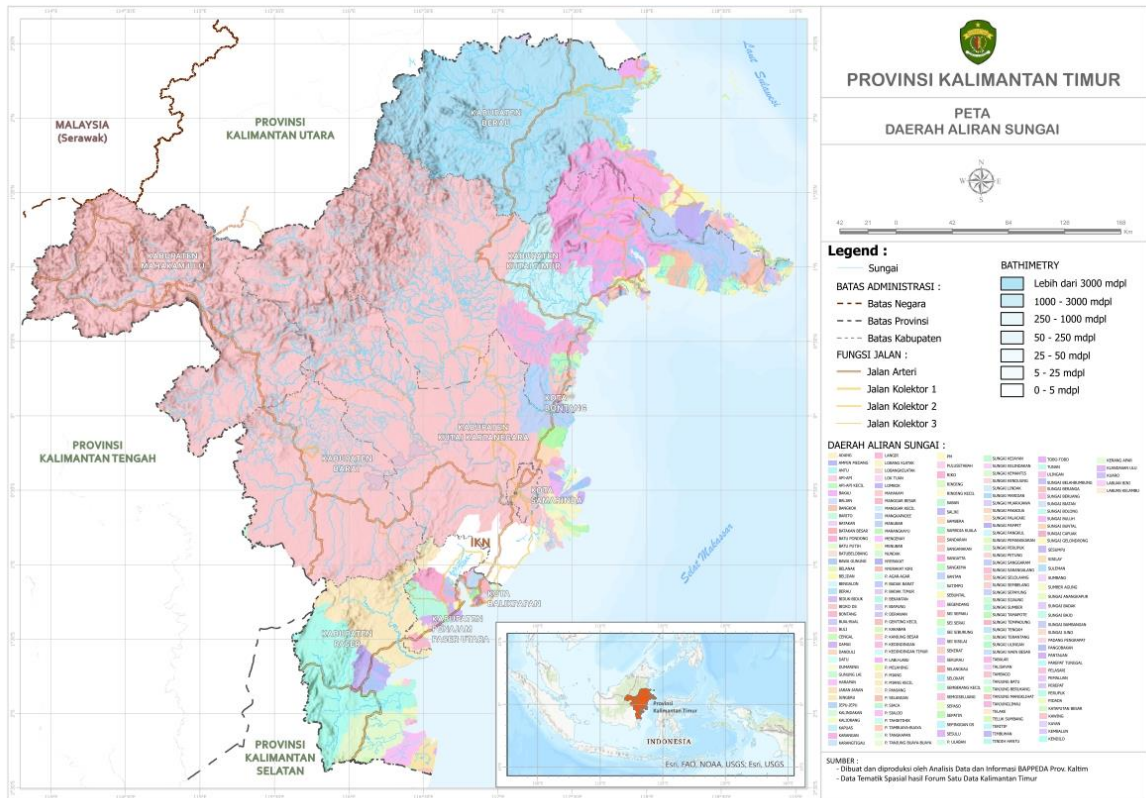
Gambar II.3
Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggi adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.



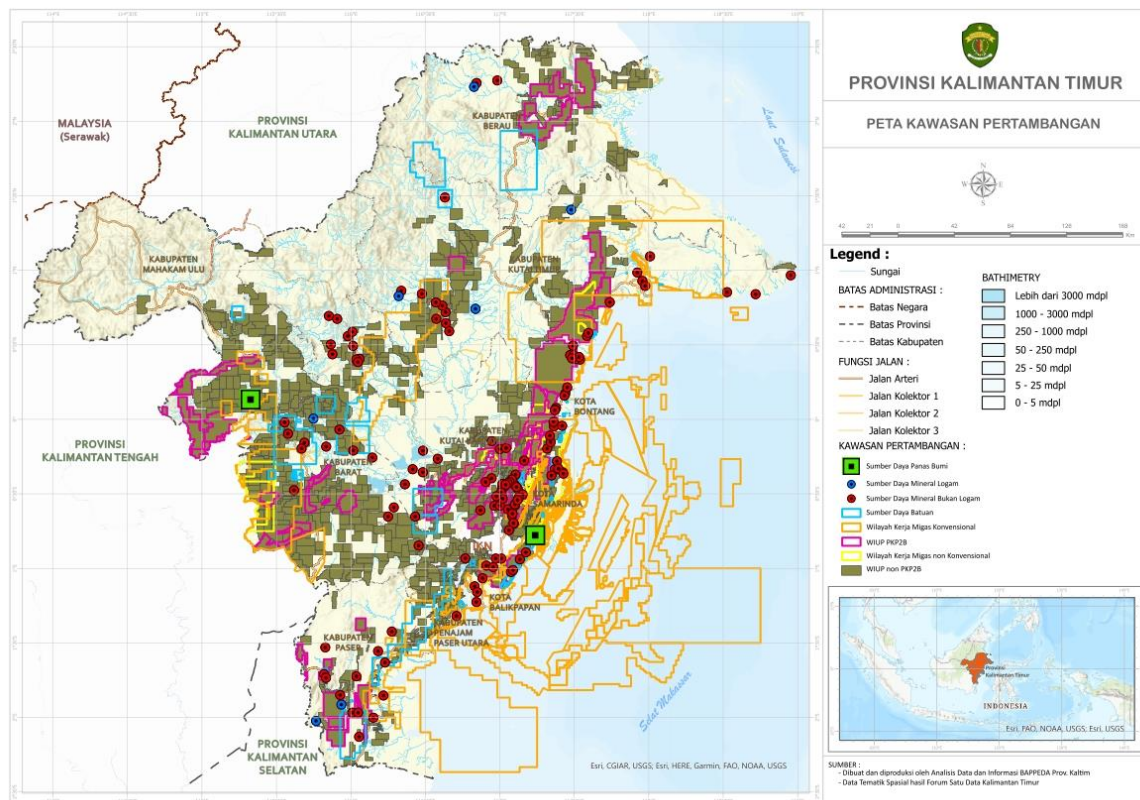
Gambar II.4
Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25 persen seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya, luas wilayah pada kemiringan diatas 40 persen (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15 persen sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai). Beberapa sungai yang ada di wilayah Kalimantan Timur adalah Sungai Berau, Sungai Kelay, Sungai Dondang, Sungai Mahakam, Sungai Belayan, Sungai Jembayan, Sungai Karang Mumus, Sungai Kaso, Sungai Kedang Pahu, Sungai Lawa, Sungai Loa Haur, Sungai Telen.



Gambar II.5
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Aktivitas geologi yang telah berlangsung di wilayah Kalimantan Timur menghasilkan berbagai jenis batuan. Jenis batuan yang terbentuk berupa sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik ditemukan berbagai kandungan mineral baik logam (mineral logam) dan non-logam (*mineral industry*) serta bahan konstruksi yang memiliki nilai ekonomis sebagai potensi bahan galian tambang yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Pada praktiknya keberadaan bahan galian tambang yang berlimpah, menarik orang untuk mengeksploitasi secara berlebihan sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Perlu dilakukan pertambangan berkelanjutan sesuai kaidah “*Good Mining Practice*” yang berwawasan lingkungan. Potensi kawasan tambang Provinsi Kalimantan Timur tersebar di berbagai daerah yang disajikan pada gambar dibawah ini.



Gambar II.6
Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

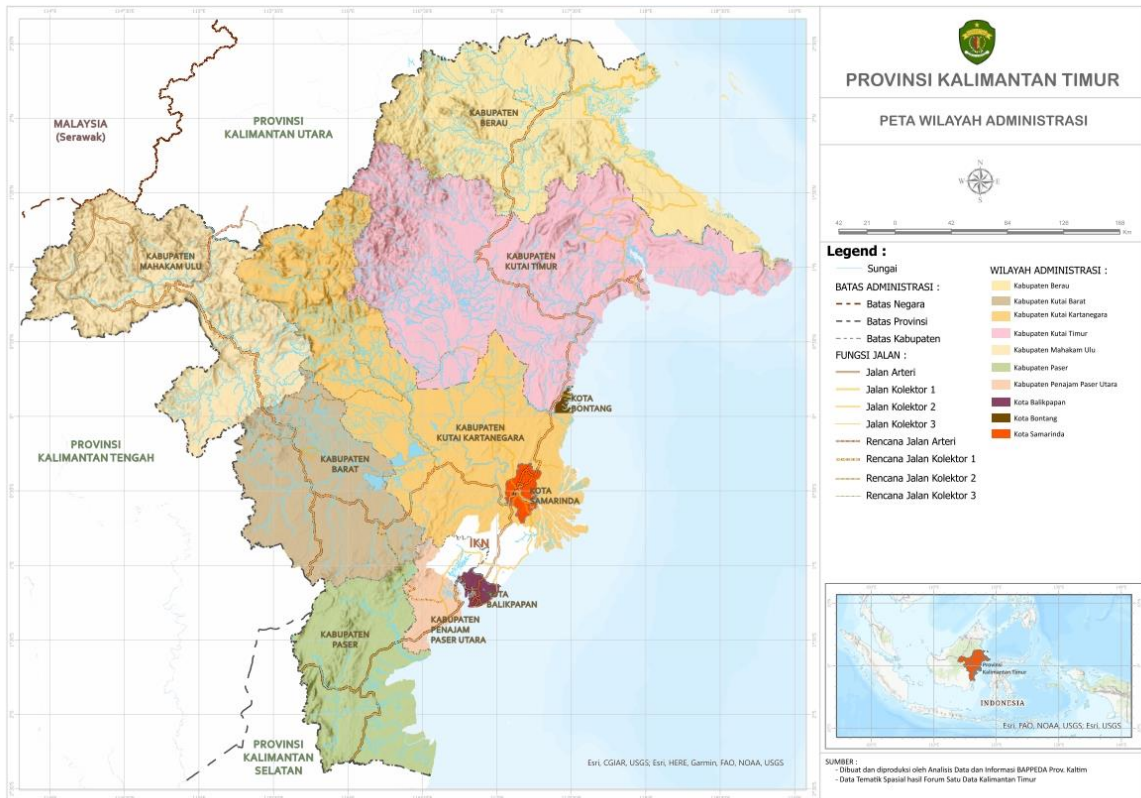
Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel II.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

| No | Kabupaten/Kota | Luas wilayah (Ha) | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa dan Kelurahan |
|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | Paser | 1.104.644 | 10 | 144 |
| 2 | KUBAR | 1.361.117 | 16 | 194 |
| 3 | KUKAR | 2.529.239 | 20 | 237 |
| 4 | KUTIM | 3.122.720 | 18 | 141 |
| 5 | Berau | 2.137.135 | 13 | 110 |
| 6 | PPU | 203.254 | 4 | 54 |
| 7 | MAHULU | 1.849.224 | 5 | 50 |
| 8 | Balikpapan | 51.023 | 6 | 34 |
| 9 | Samarinda | 71.678 | 10 | 59 |
| 10 | Bontang | 16.077 | 3 | 15 |
| Luas Wilayah Laut 12 Mil | | 2.898.439 | - | - |
| Kalimantan Timur | | 15.344.552 | 105 | 1.038 |

Sumber: RTRW Provinsi KALTIM 2023-2042

Gambaran mengenai wilayah administratif disajikan dalam bentuk Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur seperti gambar II.7.



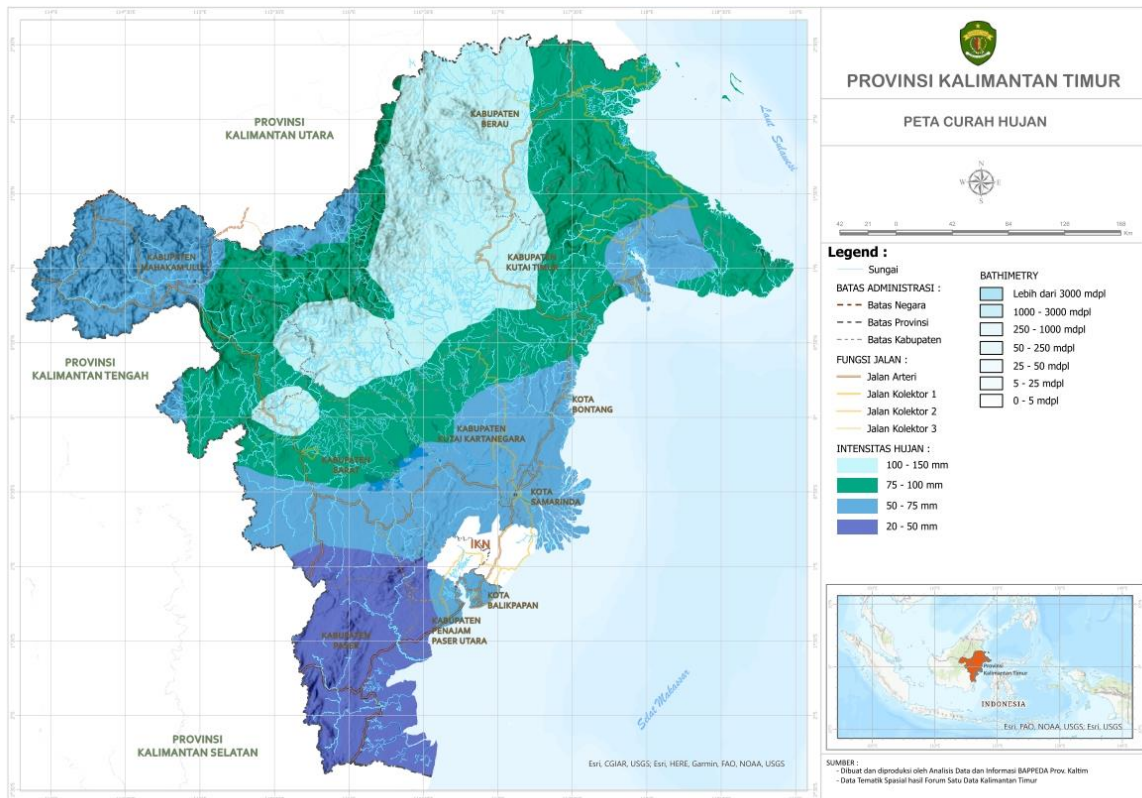
Gambar II.7
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. Tabel II.2 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

Tabel II.2
Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

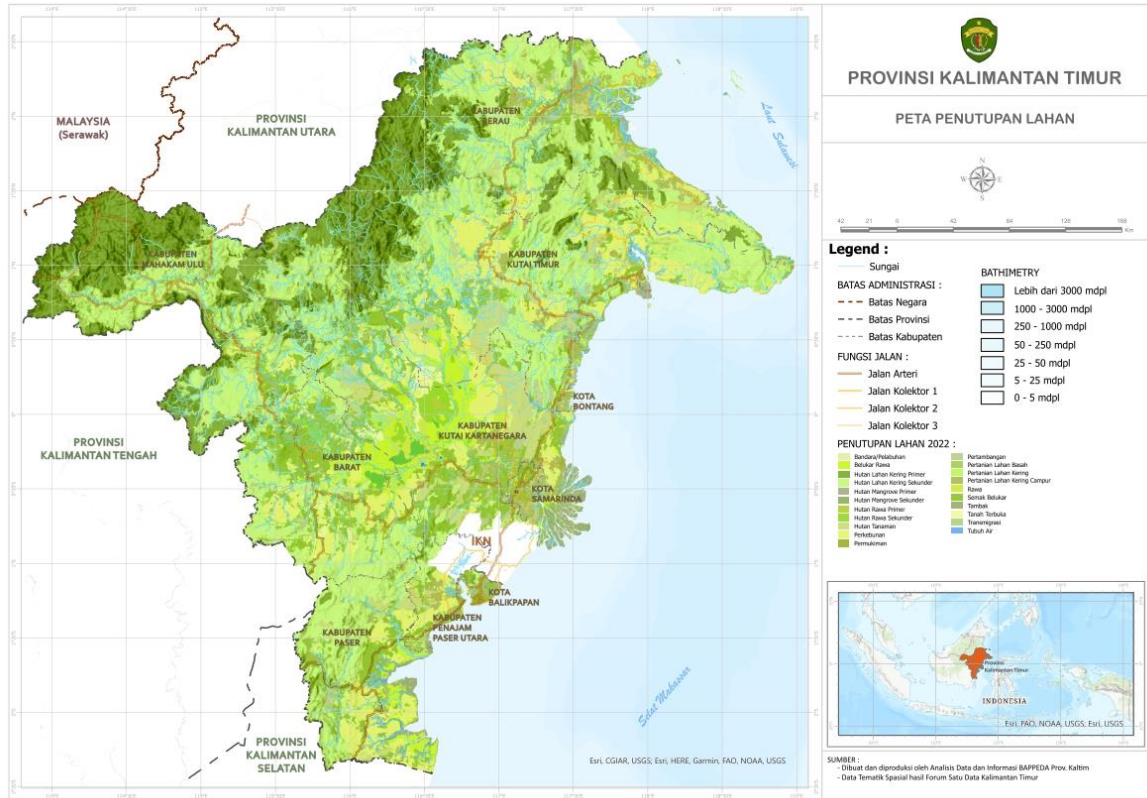
| No | Uraian | Stasiun | | |
|----|-------------------------|-----------|------------|---------------|
| | | Samarinda | Balikpapan | Tanjung Redeb |
| 1 | Suhu Udara (°C) | | | |
| | - Minimum | 24,50 | 24,20 | 23,50 |
| | - Maksimum | 32,30 | 31,10 | 32,70 |
| 2 | Kelembaban (%) | 82 | 83,30 | 87 |
| 3 | Tekanan Udara (Mbs) | 1.011,60 | 1.010,10 | 1.011,50 |
| 4 | Kecepatan Angin (Knot) | 4,00 | 3,00 | 3,50 |
| 5 | Curah Hujan (mm) | 2.599 | 2.947 | 2.312 |
| 6 | Penyinaran Matahari (%) | 42 | 46 | 49 |

Sumber: BMKG Wilayah KALTIM, 2023



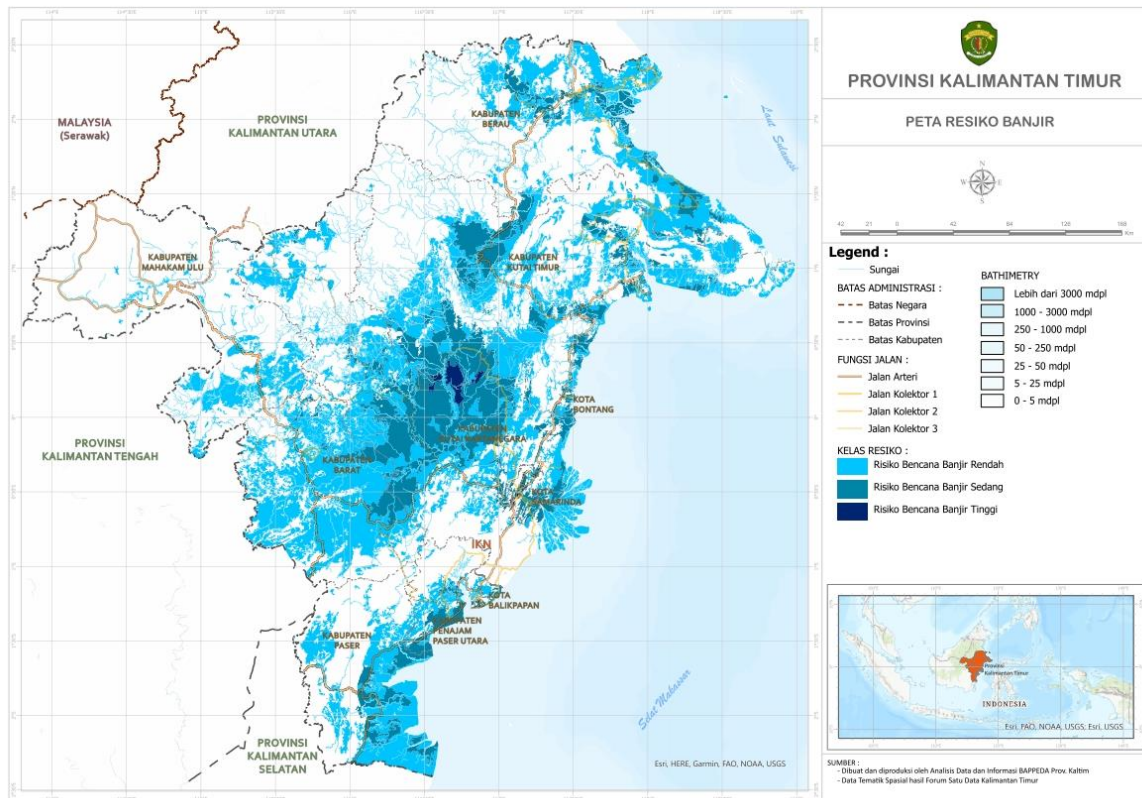
Gambar II.8
Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar II.9
Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas daerah. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan.



Gambar II.10

Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Timur

(Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kaltim, diolah Bappeda Prov Kaltim 2022)

Aktivitas Manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana Banjir yakni: pembudidayaan daerah dataran Banjir; peruntukan tata ruang di dataran Banjir yang tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran Banjir; permukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak memadai; terbatasnya tindakan mitigasi Banjir; kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan di daerah hulu; terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali Banjir; dan elevasi bangunan tidak memperhatikan peil Banjir.

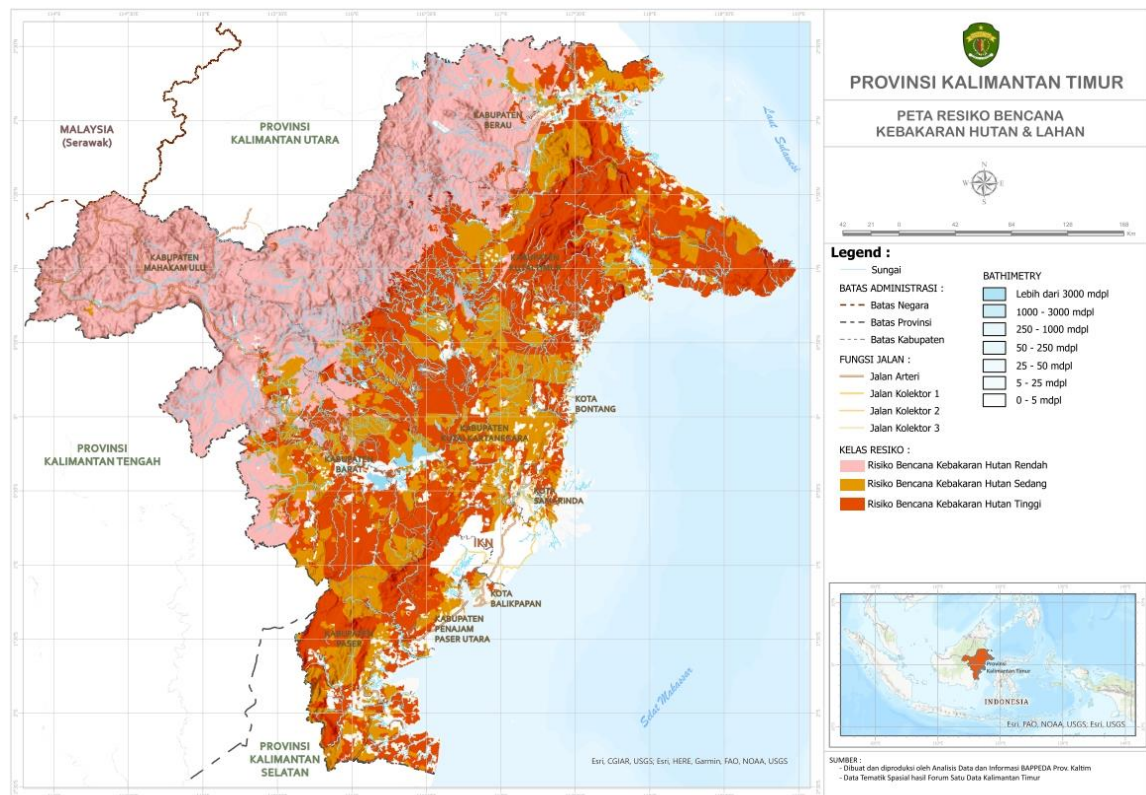
Terjadinya bencana Banjir tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya bencana Banjir, antara lain:

- Buruknya saluran air/drainase. Kota-kota besar hampir setiap tahun mengalami Banjir karena tidak terawatnya saluran air. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran air sangat rendah sehingga saluran air dipenuhi sampah dan akhirnya jalan untuk lalu lintas air menjadi kecil. Selain sampah, juga banyaknya bangunan-bangunan yang menyebabkan saluran air tertutup beton bangunan sehingga saluran dalam

arti air tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya, air menggenang di jalan dan lama-lama menyebabkan Banjir.

- Daerah resapan air yang kurang. Daerah resapan air merupakan suatu daerah yang ditanami pohon atau mempunyai danau yang berfungsi sebagai tampungan atau menyerap air ke dalam lapisan tanah kemudian disimpan sebagai cadangan air tanah. Masalah yang terjadi pada dewasa ini adalah semakin banyaknya bangunan yang didirikan terutama di kota-kota besar sehingga fungsi lahan hijau sebagai tempat resapan air mulai tergeser oleh adanya beton-beton bangunan yang berakibat terhambatnya air meresap ke dalam tanah, sehingga membentuk genangan dan akhirnya terjadi Banjir.
- Penebangan pohon secara liar. Selain memiliki fungsi untuk mencegah longsor dengan mempertahankan kontur tanah tetap pada posisinya, pohon juga berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah melalui akar-akarnya. Dewasa ini, penebangan pohon secara liar kerap kali dilakukan sehingga ketika terjadi hujan deras air tidak mampu terserap ke tanah namun mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah seperti daerah pada hilir, perkotaan atau pedesaan yang menyebabkan Banjir.

Sungai yang tidak terawat. Sungai memiliki peranan yang sangat besar ketika berbicara tentang Banjir karena semestinya menjadi tempat untuk mengalirnya air dari air hujan menuju ke laut. Ketika sungai tidak terawat, rusak atau menjadi tercemar maka keberlangsungan fungsi sungai juga kan terganggu. Dewasa ini, kerusakan sungai pada umumnya disebabkan karena pembuangan sampah sembarangan, atau tercemar karena adanya limbah pabrik yang menyebabkan terjadinya pendangkalan, bahkan ekosistem sungai itu sendiri menjadi rusak. Selain itu, warga sering menyalahgunakan sempadan atau bantaran sungai untuk dijadikan pemukiman.



Gambar II.11
Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Provinsi Kalimantan Timur

(Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi KALTIM, Diolah Bappeda Prov Kaltim 2022)

Faktor utama penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan adalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat rawan terjadinya kebakaran, seperti El Nino yang didukung oleh kondisi lingkungan yang terdegradasi dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kerawanan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan tertinggi terjadi pada musim kemarau dimana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi. Kondisi ini pada umumnya terjadi antara bulan Juni hingga Oktober dan kadang pula terjadi pada bulan Mei sampai November. Kerawanan kebakaran semakin tinggi jika ditemukan adanya gejala El Nino.

Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan lahan berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat, sebagai berikut:

- Rusaknya siklus hidrologi (menurunkan kemampuan intersepsi air hujan ke dalam tanah, mengurangi transpirasi vegetasi, menurunkan kelembaban tanah, dan meningkatkan jumlah air yang mengalir di permukaan (surface run

off). Kondisi demikian menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah terbakar, terjadinya sedimentasi dan perubahan kualitas air serta turunnya populasi dan keanekaragaman ikan di perairan. Selain itu kerusakan hidrologi di lahan gambut akan menyebabkan jangkauan intrusi air laut semakin jauh ke darat.

- Hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan (berladang, beternak, berburu/menangkap ikan)
- Penurunan produksi kayu, terganggunya kegiatan transportasi, dan meningkatnya pengeluaran akibat biaya untuk pemadaman.

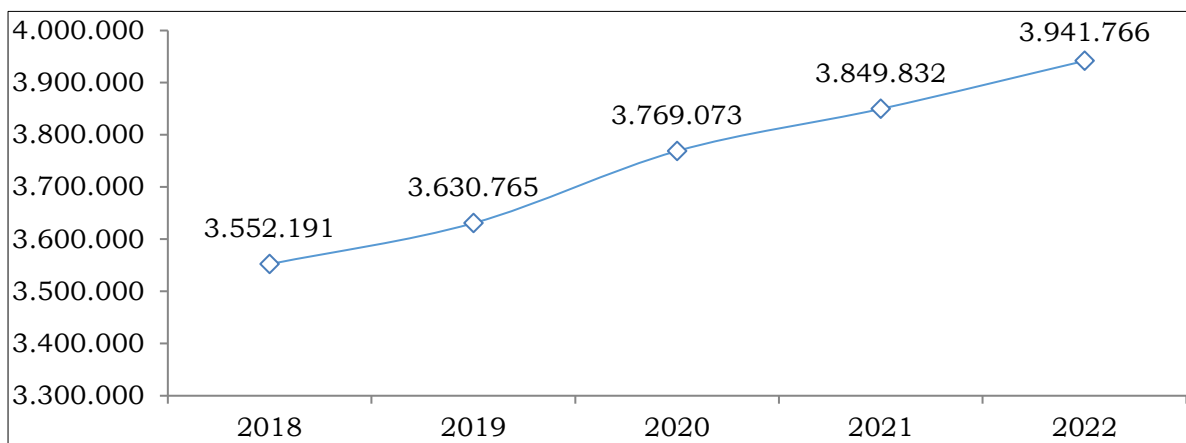
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas untuk melakukan penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dokumen informasi kebencanaan dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai dokumen rencana aksi penanggulangan bencana yang menjadi salah satu parameter dalam penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB).

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Di Tahun 2021 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memiliki indeks 153,28 dan ditahun 2022, Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan risiko bencana menjadi 146,47, atau penurunan sebesar 6.81 poin dari tahun 2021, tetapi Provinsi Kalimantan Timur masih berada dalam zona yang memiliki risiko yang tinggi. Capaian penurunan Indeks Risiko Bencana provinsi kalimantan Timur merupakan sebuah keberhasilan pemerintah daerah dalam peningkatan Ketahanan Daerah. Ketahanan Daerah merupakan sebuah ukuran keberhasilan, yang

ditandai dengan meningkatnya sebuah kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan menjadi salah satu parameter penting untuk menentukan tingkat risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; Penanganan tematik kawasan rawan bencana; Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan Pengembangan sistem pemulihan bencana.

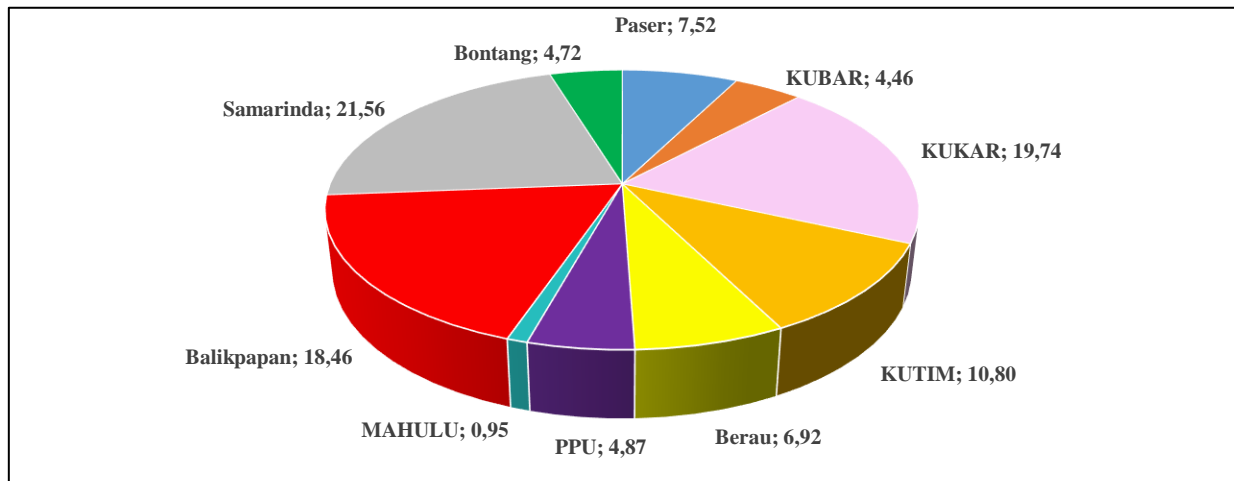
Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 3.552.191 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.941.766 jiwa pada tahun 2022.



Gambar II.12
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022
(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023)

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,56 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus

perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima persen terdapat di Kota Bontang (4,72%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,87%), Kabupaten Kutai Barat (4,46%), dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,95%).



Gambar II.13
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023)

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 1,98 persen selama lima tahun sejak tahun 2018–2022. Kabupaten Mahakam Ulu menjadi kabupaten yang paling tinggi laju pertumbuhannya hingga mencapai 4,39 persen dalam lima tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Kutai Timur dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,20 persen.

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018-2022

| No | Kab/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Laju Pertumbuhan Penduduk (2018-2022) (%) |
|----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 1 | Paser | 259.417 | 265.148 | 277.401 | 288.225 | 296.582 | 2,26 |
| 2 | KUBAR | 162.200 | 164.048 | 165.938 | 170.871 | 175.610 | 1,33 |
| 3 | KUKAR | 677.755 | 696.784 | 734.485 | 753.862 | 778.096 | 2,33 |
| 4 | KUTIM | 420.760 | 422.905 | 424.334 | 424.743 | 425.787 | 0,20 |
| 5 | Berau | 224.654 | 232.189 | 251.439 | 263.150 | 272.887 | 3,29 |
| 6 | PPU | 170.475 | 173.671 | 181.349 | 186.801 | 191.967 | 2,00 |
| 7 | MAHULU | 28.833 | 30.321 | 35.010 | 35.274 | 37.318 | 4,39 |
| 8 | Balikpapan | 649.806 | 670.505 | 697.079 | 710.293 | 727.665 | 1,90 |

| No | Kab/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Laju Pertumbuhan Penduduk (2018-2022) (%) |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 9 | Samarinda | 778.883 | 793.576 | 817.254 | 831.220 | 849.717 | 1,46 |
| 10 | Bontang | 179.408 | 181.618 | 184.784 | 185.393 | 186.137 | 0,62 |
| Kalimantan Timur | | 3.552.191 | 3.630.765 | 3.769.073 | 3.849.832 | 3.941.766 | 1,98 |

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

Kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur terdapat di Kota Balikpapan mencapai 1.428,08 per km². Sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 2,02 per km². Dimana total kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 31,68 per km².

Berdasarkan *Sex Ratio*, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

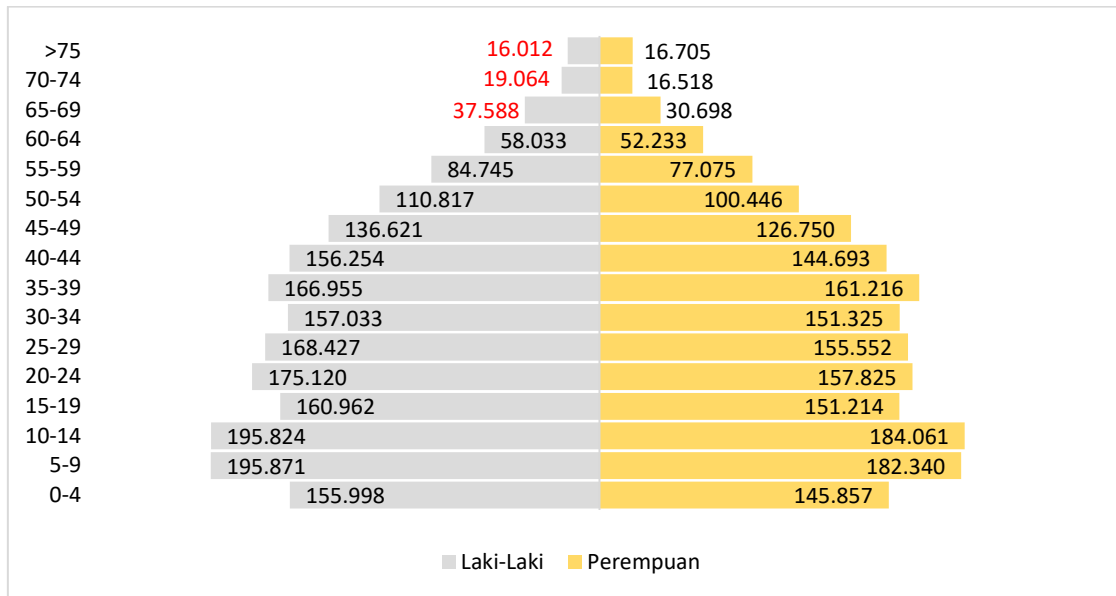
Tabel II.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

| No | Kab/Kota | Penduduk | | | Sex Ratio | Kepadatan Penduduk (Per Km ²) |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | | |
| 1 | Paser | 153.455 | 143.127 | 296.582 | 107,22 | 26,85 |
| 2 | KUBAR | 92.207 | 83.403 | 175.610 | 110,56 | 12,90 |
| 3 | KUKAR | 405.154 | 372.942 | 778.096 | 108,64 | 30,76 |
| 4 | KUTIM | 227.438 | 198.349 | 425.787 | 114,67 | 13,64 |
| 5 | Berau | 144.720 | 128.167 | 272.887 | 112,92 | 12,77 |
| 6 | PPU | 99.423 | 92.544 | 191.967 | 107,43 | 94,45 |
| 7 | MAHULU | 19.920 | 17.398 | 37.318 | 114,50 | 2,02 |
| 8 | Balikpapan | 371.777 | 355.888 | 727.665 | 104,46 | 1.426,15 |
| 9 | Samarinda | 432.306 | 417.411 | 849.717 | 103,57 | 1.185,46 |
| 10 | Bontang | 96.433 | 89.704 | 186.137 | 107,50 | 1.157,78 |
| Kalimantan Timur | | 2.042.833 | 1.898.933 | 3.941.766 | 107,58 | 31,67 |

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

Dari sisi struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) yang mencapai 68,92 persen dari total penduduk Kalimantan Timur, sebagaimana tampak pada piramida penduduk. Sehingga rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 tercatat sebesar 45,16 persen. Artinya

setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang tidak dan belum produktif.



Gambar II.14
 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021
 (Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022)

Rata-rata usia penduduk pada usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi di Kalimantan Timur pada tahun 2022 pada laki-laki dan perempuan mengalami penurunan menjadi sebesar 0,42 persen jika dibanding dengan tahun 2021 yaitu sebesar 0,36 persen. Sedangkan untuk usia anak 13-15 tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,05 persen jika dibanding dengan tahun 2021 sebesar 0,58 persen. Untuk usia 16-18 tahun, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,35 persen jika dibanding dengan tahun 2021 sebesar 0,06 persen, dan pada kategori penduduk usia 19-24 tahun sebesar 0,38 persen pada tahun 2022 yang berarti meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 0,02 persen. Dengan demikian secara umum, hanya pada kategori 13-15 tahun yang mengalami penurunan pada tahun 2022.

Tabel II.5
 Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki+Perempuan) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022

| Kelompok Usia Sekolah | Tidak / Belum Pernah Bersekolah | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 7-12 | 0,24 | 0,16 | 0,12 | 0,36 | 0,42 |
| 13-15 | 0,25 | 0,19 | 0,05 | 0,58 | 0,05 |
| 16-18 | 0,38 | 0,09 | 0,17 | 0,06 | 0,35 |
| 19-24 | 0,38 | 0,35 | 0,12 | 0,02 | 0,38 |
| 7-24 | 0,31 | 0,21 | 0,12 | 0,23 | 0,33 |
| Masih Bersekolah | | | | | |

| Kelompok Usia Sekolah | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 7-12 | 99,67 | 99,68 | 99,73 | 99,60 | 99,57 |
| 13-15 | 98,89 | 98,83 | 99,07 | 98,90 | 28,74 |
| 16-18 | 81,55 | 81,81 | 81,88 | 82,01 | 81,43 |
| 19-24 | 29,84 | 29,89 | 29,71 | 29,86 | 29,33 |
| 7-24 | 74,46 | 74,34 | 73,63 | 73,88 | 74,02 |
| Kelompok Usia Sekolah | Tidak Bersekolah Lagi | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 7-12 | 0,00 | 0,16 | 0,14 | 0,04 | 0,01 |
| 13-15 | 0,86 | 0,98 | 0,88 | 0,52 | 1,21 |
| 16-18 | 18,07 | 18,10 | 17,95 | 17,93 | 18,22 |
| 19-24 | 69,78 | 69,76 | 70,17 | 70,12 | 70,29 |
| 7-24 | 25,23 | 25,45 | 26,25 | 25,88 | 25,65 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dilihat dari jumlah penduduk menurut agama, maka mayoritas penduduk Kalimantan Timur memeluk agama Islam sebesar 87,4 persen dari jumlah penduduk Kalimantan Timur.

Tabel II.6
Jumlah Penduduk Menurut Agama
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

| No | Kab/Kota | Islam | Kristen | Katholik | Hindu | Budha | Kong Huchu | Lainnya | Jumlah |
|------------------|------------|-----------|---------|----------|-------|--------|------------|---------|-----------|
| 1 | Paser | 272.788 | 9.769 | 9.299 | 488 | 530 | 0 | 5 | 292.879 |
| 2 | KUBAR | 82.408 | 54.238 | 36.078 | 141 | 36 | 1 | 99 | 173.001 |
| 3 | KUKAR | 706.546 | 41.426 | 14.400 | 2.569 | 254 | 6 | 83 | 765.284 |
| 4 | KUTIM | 345.969 | 41.996 | 34.964 | 2.522 | 133 | 6 | 23 | 425.613 |
| 5 | Berau | 224.748 | 24.263 | 15.961 | 224 | 649 | 22 | 8 | 265.875 |
| 6 | PPU | 179.143 | 7.046 | 2.603 | 91 | 39 | 0 | 1 | 188.923 |
| 7 | MAHULU | 8.528 | 5.422 | 22.137 | 60 | 3 | 0 | 3 | 36.153 |
| 8 | Balikpapan | 648.261 | 49.750 | 13.041 | 1.390 | 5.935 | 31 | 15 | 718.423 |
| 9 | Samarinda | 766.265 | 42.477 | 21.141 | 825 | 7.880 | 284 | 63 | 838.935 |
| 10 | Bontang | 167.023 | 15.248 | 3.221 | 298 | 138 | 0 | 0 | 185.928 |
| Kalimantan Timur | | 3.401.679 | 291.635 | 172.845 | 8.608 | 15.597 | 350 | 300 | 3.891.014 |

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam mensukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan tren yang meningkat dari komposisi sektor non migas dan batubara sedangkan dari sektor dengan migas dan non migas mengalami sedikit penurunan di tahun 2020. Nilai PDRB dengan migas Tahun 2020 tercatat sebesar Rp 607,59 triliun, sedangkan nilai PDRB non migas sebesar Rp 505,55 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 314,89 triliun. Penurunan Nilai PDRB pada tahun 2020 dikarenakan terjadi anomali dimana karena dampak Pandemi COVID-19 yang sangat signifikan khususnya dalam hal ekspor. Akan tetapi pada tahun 2022 nilai PDRB kembali meningkat seiring dengan mulai pulihnya perekonomian Kalimantan Timur dengan berkurangnya dampak Pandemi COVID-19, nilai PDRB migas mencapai Rp 921,33 triliun, nilai PDRB non migas sebesar Rp 792,53 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 381,97 triliun.

Tabel II.7

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

| Tahun | Migas | Non Migas | Non Migas dan Batubara |
|-------|-------------|-------------|------------------------|
| 2018 | 636.454.483 | 518.074.570 | 291.567.584 |
| 2019 | 652.158.057 | 539.448.590 | 310.699.091 |
| 2020 | 607.744.486 | 505.786.456 | 315.126.677 |
| 2021 | 696.584.498 | 584.205.939 | 338.613.743 |
| 2022 | 921.332.980 | 792.531.260 | 381.969.993 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Mayoritas lapangan usaha utama Tahun 2022 mengalami perbaikan ekonomi. Dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku, kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 53,24 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp 490,50 triliun pada tahun 2022 dimana nilai ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai PDRB mencapai Rp 314,20 triliun dan kontribusi sebesar 45,11 persen.

Tabel II.8
 Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur
 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022

| Kategori | Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 50.147.994 (7,89) | 51.567.377 (7,91) | 53.455.323 (8,80) | 59.089.937 (8,48) | 64.891.735 (7,04) |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 296.725.329 (46,69) | 297.371.390 (45,60) | 250.845.967 (41,27) | 314.198.045 (45,11) | 490.501.116 (53,24) |
| C | Industri Pengolahan | 115.272.211 (18,14) | 116.204.903 (17,82) | 115.564.453 (19,02) | 123.816.183 (17,77) | 138.636.144 (15,05) |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 315.059 (0,05) | 344.961 (0,05) | 385.062 (0,06) | 395.471 (0,06) | 422.609 (0,05) |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 288.891 (0,05) | 307.667 (0,05) | 326.534 (0,05) | 348.377 (0,05) | 379.899 (0,04) |
| F | Konstruksi | 53.500.578 (8,42) | 58.472.319 (8,97) | 58.308.248 (9,59) | 62.313.147 (8,95) | 70.945.215 (7,70) |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 35.227.602 (5,54) | 38.245.238 (5,86) | 39.053.042 (6,43) | 41.474.909 (5,95) | 47.547.015 (5,16) |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 22.990.716 (3,62) | 24.172.248 (3,71) | 22.067.334 (3,63) | 23.218.927 (3,33) | 28.980.671 (3,15) |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6.106.132 (0,96) | 6.691.563 (1,03) | 6.479.402 (1,07) | 6.707.636 (0,96) | 7.520.922 (0,82) |
| J | Informasi dan Komunikasi | 7.988.163 (1,26) | 8.708.382 (1,34) | 9.390.805 (1,55) | 10.206.752 (1,47) | 11.087.181 (1,20) |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 9.717.119 (1,53) | 10.216.630 (1,57) | 10.490.249 (1,73) | 11.244.159 (1,61) | 13.379.873 (1,45) |
| L | Real Estate | 5.574.934 (0,88) | 5.768.853 (0,88) | 5.868.848 (0,97) | 5.891.471 (0,85) | 6.152.947 (0,67) |
| M,N | Jasa Perusahaan | 1.299.480 (0,20) | 1.346.710 (0,21) | 1.334.744 (0,22) | 1.384.556 (0,20) | 1.516.507 (0,16) |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 12.337.921 (1,94) | 13.019.826 (2,00) | 12.750.605 (2,10) | 13.198.181 (1,89) | 14.448.961 (1,57) |
| P | Jasa Pendidikan | 10.107.377 (1,59) | 10.995.564 (1,69) | 11.724.048 (1,93) | 12.340.328 (1,77) | 13.132.703 (1,43) |

| Kategori | Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 3.905.167 (0,61) | 4.289.673 (0,66) | 5.331.020 (0,88) | 6.205.096 (0,89) | 6.692.400 (0,73) |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 3.994.008 (0,63) | 4.434.754 (0,68) | 4.368.801 (0,72) | 4.551.864 (0,65) | 5.097.080 (0,55) |
| PDRB | | 635.498.680 (100,00) | 652.158.057 (100,00) | 607.744.486 (100,00) | 696.584.498 (100,00) | 921.332.980 (100,00) |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

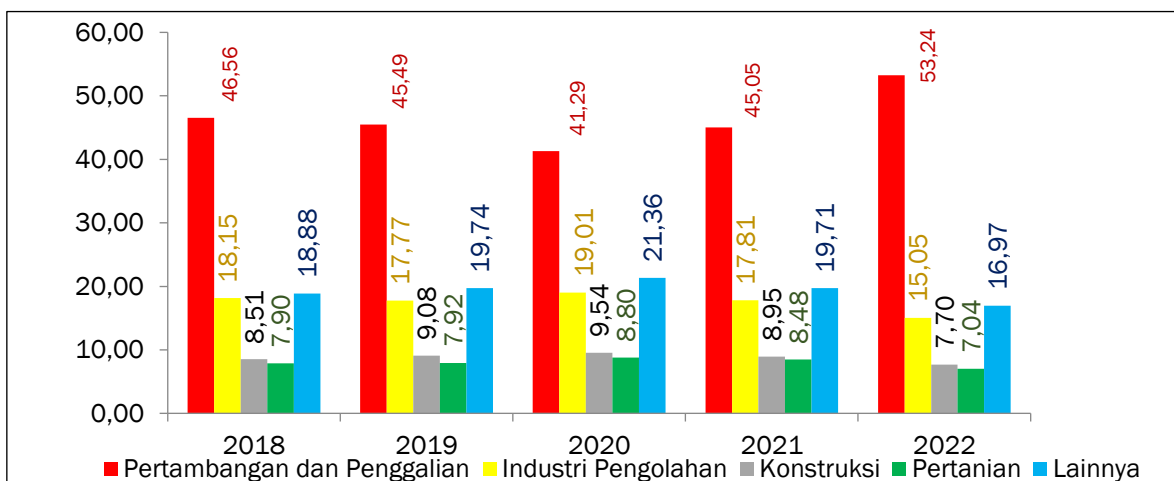
Tabel II.9
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur
 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022

| Kategori | Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 32.140.165 (6,92) | 33.396.194 (6,86) | 33.026.690 (6,99) | 33.001.680 (6,81) | 33.649.338 (6,75) |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 218.686.722 (47,06) | 233.762.253 (48,03) | 222.909.197 (47,17) | 227.991.366 (47,07) | 235.949.043 (46,72) |
| C | Industri Pengolahan | 96.797.539 (20,83) | 96.824.494 (19,89) | 93.909.767 (19,90) | 96.208.521 (19,86) | 99.651.978 (19,70) |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 261.834 (0,06) | 284.529 (0,06) | 317.368 (0,07) | 324.789 (0,07) | 337.250 (0,06) |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 224.574 (0,05) | 235.440 (0,05) | 247.995 (0,05) | 258.504 (0,05) | 278.099 (0,06) |
| F | Konstruksi | 33.754.000 (7,26) | 35.682.996 (7,33) | 35.601.166 (7,49) | 37.005.238 (7,63) | 39.887.735 (7,68) |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 25.678.998 (5,53) | 27.025.570 (5,55) | 27.069.910 (5,76) | 28.216.889 (5,83) | 30.137.130 (5,94) |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 13.937.815 (3,00) | 14.264.273 (2,93) | 13.281.104 (2,83) | 13.667.051 (2,83) | 15.301.391 (3,00) |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4.080.239 (0,88) | 4.340.118 (0,89) | 4.108.417 (0,87) | 4.193.399 (0,86) | 4.577.468 (0,90) |
| J | Informasi dan Komunikasi | 7.295.360 (1,57) | 7.795.537 (1,60) | 8.338.485 (1,76) | 8.994.261 (1,86) | 9.712.239 (1,92) |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 6.751.780 (1,45) | 6.966.068 (1,43) | 7.137.891 (1,51) | 7.320.021 (1,51) | 8.012.391 (1,58) |
| L | Real Estate | 4.227.269 (0,91) | 4.316.690 (0,89) | 4.321.113 (0,91) | 4.290.183 (0,89) | 4.397.865 (0,88) |
| M,N | Jasa Perusahaan | 896.170 (0,19) | 914.126 (0,19) | 889.600 (0,19) | 911.510 (0,19) | 960.338 (0,19) |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7.941.460 (1,71) | 8.252.791 (1,70) | 7.951.124 (1,68) | 8.108.290 (1,67) | 8.727.045 (1,71) |

| Kategori | Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P | Jasa Pendidikan | 6.780.283 (1,46) | 7.036.310 (1,45) | 7.244.720 (1,53) | 7.420.372 (1,53) | 7.679.667 (1,53) |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2.691.435 (0,58) | 2.864.486 (0,59) | 3.404.048 (0,72) | 3.861.218 (0,80) | 4.048.704 (0,80) |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 2.548.786 (0,55) | 2.750.363 (0,57) | 2.634.733 (0,56) | 2.665.592 (0,55) | 2.851.225 (0,56) |
| PDRB | | 464.694.427 (100,00) | 486.712.237 (100,00) | 472.393.329 (100,00) | 484.438.884 (100,00) | 506.158.907 (100,00) |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 40 persen dari total PDRB Kaltim. Namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Mulai tahun 2018, kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalian serta industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi Lapangan Usaha pertanian yang sempat turun tipis pada tahun yang sama. Namun semenjak 2020, khususnya karena masa Pandemi COVID-19, maka terlihat penurunan kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian hingga menjadi 41,29 persen dan terjadi peningkatan cukup signifikan pada Kategori Industri Pengolahan dan Kategori Pertanian. Sedangkan pada tahun 2021 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan mencapai 45,05 persen sedangkan sektor yang lain mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2022, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian kembali meningkat tajam hingga mencapai 53,24 persen akan tetapi sektor yang lain mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar II.15
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Menyadari bahwa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, maka transformasi ekonomi baik secara horizontal yaitu menumbuhkan dan mendorong lapangan usaha ekonomi baru maupun transformasi vertikal

melalui upaya hilirisasi/industrialisasi sangat tepat untuk dilakukan. Lapangan Usaha yang dapat didorong diantaranya Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas). Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kaltim secara rata-rata dari tahun 2018-2022 sebesar 8,05 persen. Capaian ini tentunya masih sangat kecil. Maka diperlukan dorongan besar untuk melakukan perubahan yang besar pula, terutama diarahkan pada inovasi pengembangan komoditas. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian terutama pada sub tanaman perkebunan.

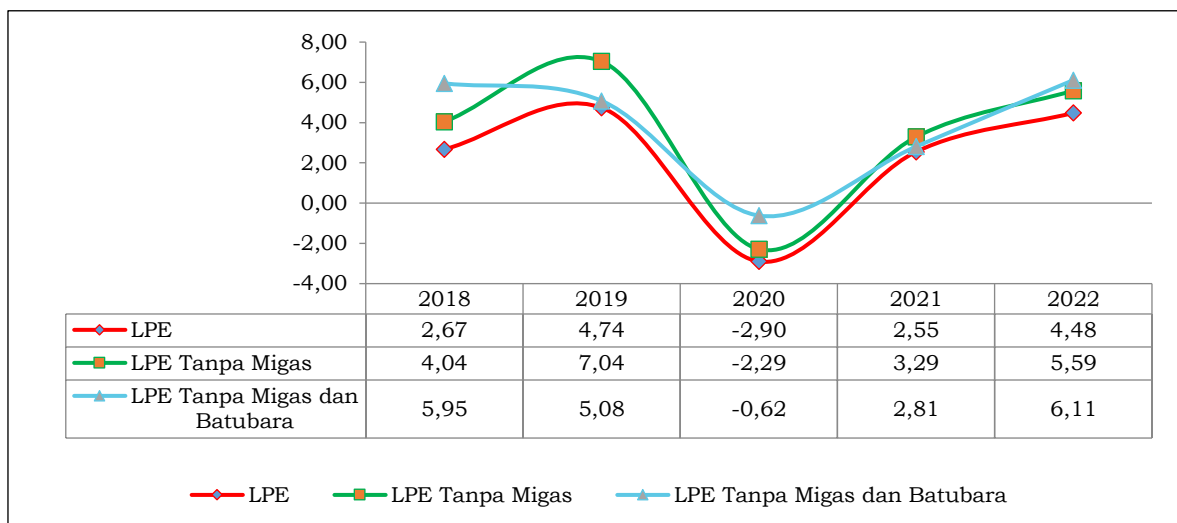
Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun. Komoditas perkebunan tahunan yang dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara. Komoditas dalam sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga berpotensi dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha pertanian, namun untuk melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan, dibutuhkan supporting data yang lengkap, akurat dan valid.

Perlu diketahui bahwa *share* Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih relatif kecil, pada tahun 2022 kontribusinya hanya sebesar 4,71 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 2,67 persen pada tahun 2018, dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas tercatat sebesar 4,04 persen serta laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 5,95 persen. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi negatif 2,90 persen. Hal ini disebabkan terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi sebagian besar lapangan usaha, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami kontraksi sebesar 0,62 persen.

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 4,48 persen dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 5,55 persen. Pertumbuhan bersumber dari peningkatan permintaan global maupun domestik serta juga turut ditopang oleh peningkatan aktivitas masyarakat, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mencapai 5,59 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,11 persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim tersebut utamanya bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan sejalan dengan tingginya pengiriman ekspor ke negara tujuan, disertai momen harga komoditas batu bara yang berada pada level tinggi. Di samping itu, berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Kaltim, mobilitas masyarakat yang terus membaik, dan masa panen produk pangan dan pertanian menjadi penopang pertumbuhan.



Gambar II.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan banyak proyek pembangunan fisik di Provinsi Kalimantan Timur yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif mendatang didukung oleh peningkatan kinerja di industri pengolahan minyak yang diperkirakan akan lebih tinggi, seiring aktivitas masyarakat yang makin menggeliat. Tenaga kerja Kaltim akan terserap, kebutuhan ribuan pekerja di IKN pasti akan berhubungan dengan petani dan

pedagang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk akomodasi baik hotel maupun penginapan juga akan laku karena banyak tamu untuk berbisnis maupun dinas, bahkan pelaku UMKM juga terkena dampak dalam penjualan produk.

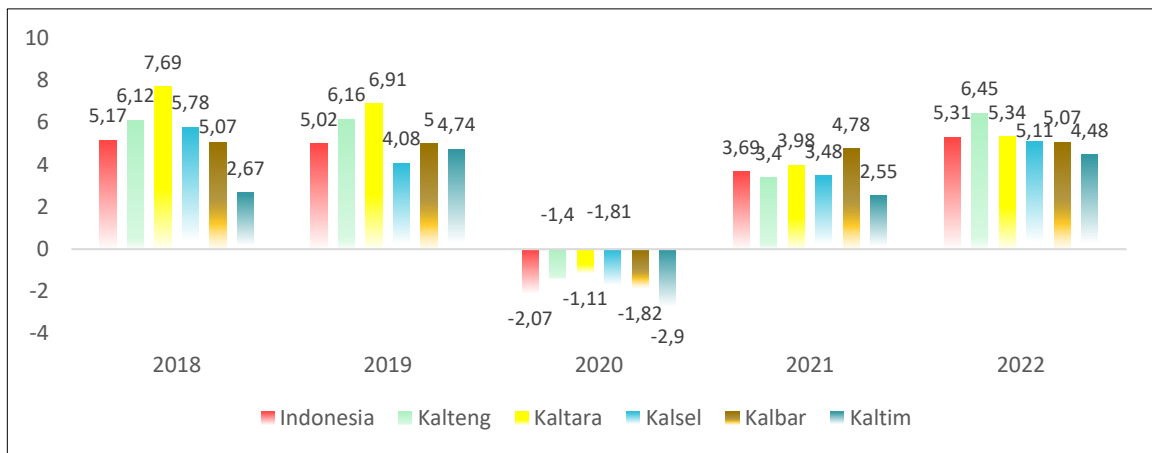
Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada tahun 2020 dimana terlihat pertumbuhan negatif di beberapa lapangan usaha karena pandemi COVID-19 dan ditahun 2022 seiring dengan pulihnya perekonomian, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan diikuti dengan pertumbuhan seluruh sektor lapangan usaha.

Tabel II.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)

| Kategori | Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|--|------|------|--------|--------|-------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 6,14 | 3,91 | (0,98) | -0,08 | 1,96 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 1,07 | 6,89 | (4,61) | 2,28 | 3,49 |
| C | Industri Pengolahan | 0,69 | 0,03 | (2,99) | 2,45 | 3,58 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 9,76 | 8,67 | 11,47 | 2,34 | 3,84 |
| E | Pengadaan Air | 3,22 | 4,84 | 5,33 | 4,24 | 7,58 |
| F | Konstruksi | 7,91 | 5,71 | (0,87) | 3,94 | 7,79 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7,16 | 5,24 | 0,57 | 4,24 | 6,81 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 5,80 | 2,34 | (6,58) | 2,91 | 11,96 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 8,70 | 6,37 | (5,34) | 2,07 | 9,16 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 4,38 | 6,86 | 7,56 | 7,86 | 7,98 |
| K | Jasa Keuangan | 4,05 | 3,17 | 2,47 | 2,55 | 9,46 |
| L | <i>Real Estate</i> | 4,83 | 2,12 | 0,69 | (0,72) | 2,51 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 4,96 | 2,00 | (3,14) | 2,46 | 5,36 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,11 | 3,92 | (3,83) | 1,98 | 7,63 |
| P | Jasa Pendidikan | 7,73 | 3,78 | 2,96 | 2,42 | 3,49 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,05 | 6,43 | 20,22 | 13,43 | 4,86 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 9,02 | 7,91 | (3,01) | 1,17 | 6,96 |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi | | 2,67 | 4,74 | (2,90) | 2,55 | 4,48 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Secara regional, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mulai membaik. Provinsi Kalimantan Tengah dengan pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 6,45 persen, lalu diikuti Kalimantan Utara sebesar 5,34 persen, Kalimantan Selatan sebesar 5,11 persen, Kalimantan Barat sebesar 5,07 persen dan Kalimantan Timur sebesar 4,48 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, dengan pertumbuhan sebesar 5,31 persen, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur juga masih tertinggal.



Gambar II.17

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Tabel II.11

Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (miliar rupiah)

| No | Komponen Pengeluaran | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 102.584,20 | 109.767,66 | 110.821,28 | 115.053,40 | 125.598,38 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2.958,20 | 3.239,36 | 3.248,32 | 3.419,27 | 3.689,59 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 23.760,62 | 26.360,55 | 27.129,17 | 28.315,36 | 31.283,12 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 173.474,79 | 188.079,94 | 188.258,10 | 209.951,00 | 232.491,11 |
| 5 | Perubahan Inventori | 1.613,95 | 768,36 | 1.228,65 | 383,61 | 401,29 |
| 6 | Net Ekspor Barang & Jasa | 331.106,93 | 324.264,39 | 277.058,96 | 339.461,86 | 527.869,49 |
| | PDRB | 635.498,68 | 652.480,26 | 607.744,49 | 696.584,50 | 921.332,98 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran pada tahun 2018-2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan karena Pandemi COVID-19, dimana PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami

penurunan menjadi sebesar Rp 607,32 triliun. Pada tahun 2022 Ekonomi Kalimantan Timur mulai mengalami perbaikan ekonomi yang mencapai Rp 921,33 triliun meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Tabel II.12
Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

| No | Komponen Pengeluaran | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 16,14 | 16,82 | 18,23 | 16,52 | 13,63 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,49 | 0,40 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 3,74 | 4,04 | 4,46 | 4,06 | 3,40 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 27,30 | 28,83 | 30,98 | 30,14 | 25,23 |
| 5 | Perubahan Inventori | 0,25 | 0,12 | 0,20 | 0,06 | 0,04 |
| 6 | Net Ekspor Barang dan Jasa | 52,10 | 49,70 | 45,59 | 48,73 | 57,29 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018-2022 masih didominasi oleh Komponen Net ekspor barang dan jasa. Hal ini tentu saja tidak dapat dipungkiri dimana ekspor barang tambang dan penggalian sangat mendominasi dalam ekspor barang dan jasa. Fenomena tersebut merupakan aktivitas perdagangan luar negeri yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen ekspor barang dan jasa, dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebagian besar didominasi komoditas bahan bakar mineral (batubara, minyak bumi dan gas alam).

Tabel II.13
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

| No | Komponen Pengeluaran | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|-----------------------------------|------|------|--------|------|------|
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 3,14 | 3,15 | (0,43) | 1,23 | 3,41 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 8,57 | 6,77 | (0,99) | 0,66 | 3,03 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 7,91 | 8,11 | (1,95) | 3,03 | 8,48 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 7,54 | 4,81 | (1,06) | 7,74 | 5,47 |
| 5 | Perubahan Inventori | - | - | - | - | - |
| 6 | Net Ekspor Barang & Jasa | 0,17 | 5,05 | (4,61) | 0,64 | 4,05 |
| PDRB | | 2,64 | 4,70 | -2,90 | 2,55 | 4,48 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2022 mencapai 4,48 persen. Dimana pertumbuhan terendah dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 3,03 persen. Sedangkan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 8,48 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai PDRB Kalimantan Timur dari sisi pertumbuhannya meningkat dikarenakan kegiatan Pemerintah.

Tabel II.14
 Nilai PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten/Kota di
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Miliar Rp)

| No | KAB/KOTA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Paser | 34.362,05 | 35.734,75 | 34.712,07 | 36.581,32 | 36.980,15 |
| 2 | KUBAR | 20.108,76 | 21.253,83 | 20.644,38 | 21.509,56 | 22.535,73 |
| 3 | KUKAR | 121.509,48 | 126.272,37 | 120.953,68 | 124.197,10 | 128.805,43 |
| 4 | KUTIM | 88.582,49 | 95.815,41 | 92.868,68 | 92.039,29 | 97.174,42 |
| 5 | Berau | 26.769,40 | 28.275,57 | 27.337,09 | 28.802,65 | 29.940,78 |
| 6 | PPU | 6.590,45 | 6.762,58 | 6.604,62 | 6.492,78 | 7.433,74 |
| 7 | MAHULU | 1.675,32 | 1.767,80 | 1.763,93 | 1.786,29 | 1.802,46 |
| 8 | Balikpapan | 79.807,11 | 83.793,41 | 83.034,71 | 86.817,89 | 91.104,44 |
| 9 | Samarinda | 43.323,57 | 45.491,36 | 45.041,33 | 46.294,41 | 49.342,39 |
| 10 | Bontang | 41.316,22 | 40.427,70 | 39.320,23 | 39.949,08 | 40.931,39 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Dominasi struktur ekonomi kewilayahan didominasi oleh PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dimana Nilai PDRB (ADHK) pada tahun 2022 mencapai Rp 128,81 triliun disusul perekonomian Kutai Timur dan Kota Balikpapan yang masing-masing dengan nilai PDRB (ADHK) sebesar Rp 97,17 triliun dan Rp 91,10 triliun. Ketiga daerah ini memang layak memiliki kontribusi dominan karena memiliki aktivitas pertambangan dan penggalian yang cukup menjanjikan dalam memberikan sumbangsih nilai PDRB.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan, salah satu faktor penyebab meningkatnya kinerja ekonomi adalah mulai menurunnya pandemi COVID-19 dan meningkatnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, dari sisi eksternal ekonomi wilayah Kalimantan Timur, khususnya pasar global, meningkatnya rata-rata harga komoditas pangan (tandan buah segar/TBS kelapa sawi dan minyak kelapa sawit/CPO), Harga Batu Bara Acuan (HBA) serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sehingga terdapat peningkatan *demand* terhadap komoditas energi, yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Timur seperti migas dan

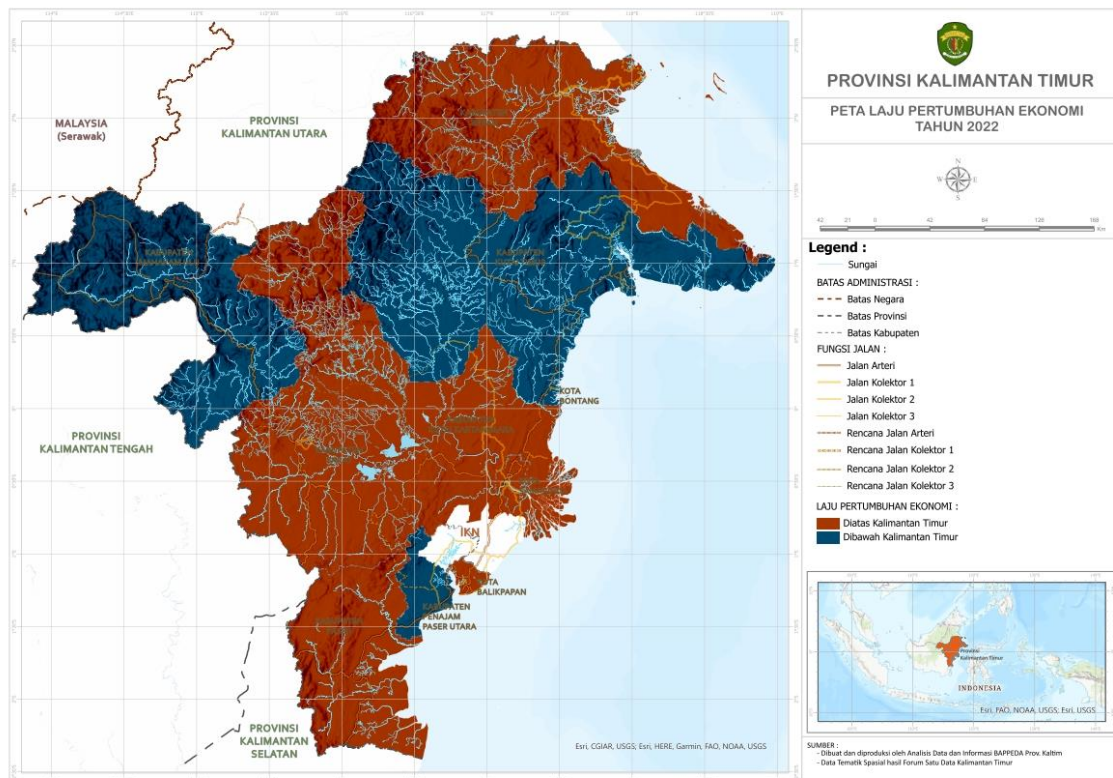
batubara dan kemudian diikuti peningkatan harga komoditas energi tersebut di pasar internasional.

Tabel II.15
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)

| No | KAB/KOTA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Paser | 3,69 | 3,99 | -2,86 | 5,39 | 1,09 |
| 2 | KUBAR | 5,06 | 5,69 | -2,87 | 4,19 | 4,77 |
| 3 | KUKAR | 2,16 | 3,92 | -4,21 | 2,68 | 3,71 |
| 4 | KUTIM | 2,38 | 8,17 | -3,08 | -0,89 | 5,58 |
| 5 | Berau | 2,07 | 5,63 | -3,32 | 5,36 | 3,95 |
| 6 | PPU | 1,28 | 2,61 | -2,34 | -1,69 | 14,49 |
| 7 | MAHULU | 5,40 | 5,52 | -0,22 | 1,27 | 0,91 |
| 8 | Balikpapan | 4,97 | 4,99 | -0,91 | 4,56 | 4,94 |
| 9 | Samarinda | 4,96 | 5,00 | -0,99 | 2,78 | 6,58 |
| 10 | Bontang | -4,08 | -2,15 | -2,74 | 1,60 | 2,46 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

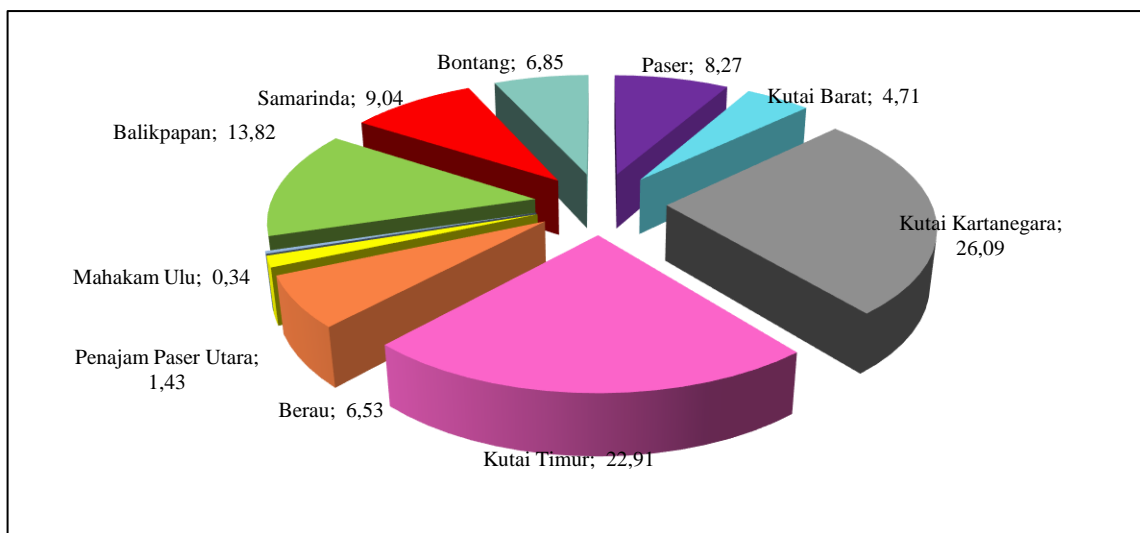
Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami peningkatan. Kabupaten yang masih mengalami pertumbuhan yang melambat adalah Kabupaten Paser yaitu 1,09 persen dan Kabupaten Mahakam Ulu 0,91 persen. Sementara itu, wilayah kabupaten/kota lainnya mengalami pertumbuhan yang cepat dengan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan capaian 14,49 persen.



Gambar II.18

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota Tahun 2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Berdasarkan peranan kabupaten/kota dalam pembentukan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, maka terlihat bahwa peranan Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya yang mencapai 26,09 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 22,91 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur merupakan sentra pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan memberikan peran sebesar 13,82 persen sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur dibawah 10 persen.



Gambar II.19
Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2022 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Pada tahun 2022, terdapat 5 (lima) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi utama. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi terutama pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat signifikan, hingga mencapai 85,09 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara.

Tabel II.16
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral
Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2022

| Kab/Kota | Peringkat I | | Peringkat II | | Peringkat III | |
|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| | Lap. Usaha | Share (%) | Lap. Usaha | Share (%) | Lap. Usaha | Share (%) |
| Paser | Pertambangan | 76,37 | Pertanian | 10,05 | Industri | 4,17 |
| KUBAR | Pertambangan | 57,88 | Pertanian | 12,27 | Konstruksi | 9,22 |
| KUKAR | Pertambangan | 70,77 | Pertanian | 10,72 | Konstruksi | 6,35 |
| KUTIM | Pertambangan | 85,09 | Pertanian | 5,90 | Industri | 2,55 |
| Berau | Pertambangan | 66,98 | Pertanian | 9,33 | Perdagangan | 4,99 |
| PPU | Konstruksi | 24,11 | Pertambangan | 22,62 | Pertanian | 19,41 |
| MAHULU | Pertanian | 74,53 | Konstruksi | 6,73 | Pertambangan | 6,29 |
| Balikpapan | Industri | 47,20 | Konstruksi | 15,81 | Transportasi | 10,75 |
| Samarinda | Konstruksi | 20,51 | Perdagangan | 16,07 | Pertambangan | 15,66 |
| Bontang | Industri | 78,72 | Konstruksi | 7,04 | Perdagangan | 3,32 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 76,37 persen. Sama halnya dengan

wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan peranan yang cukup besar mencapai 70,77 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya. Kabupaten lain dengan sektor utama pertambangan juga tercatat di Berau. Adapun daerah yang menggantungkan sektor utamanya pada sektor industri adalah Kota Bontang dan Kota Balikpapan, sedangkan daerah yang sektor utamanya Pertanian yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel II.17
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran
Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2022

| Kab/Kota | Peringkat I | | Peringkat II | | Peringkat III | |
|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| | Komponen | Share (%) | Komponen | Share (%) | Komponen | Share (%) |
| Paser | Net Ekspor | 74,38 | PMTB | 13,57 | K. Ruta | 9,53 |
| KUBAR | Net Ekspor | 54,77 | PMTB | 27,13 | K. Ruta | 11,94 |
| KUKAR | Net Ekspor | 58,34 | PMTB | 30,48 | K. Ruta | 8,79 |
| KUTIM | Net Ekspor | 80,07 | PMTB | 13,92 | K. Ruta | 4,45 |
| Berau | Net Ekspor | 73,45 | PMTB | 14,41 | K. Ruta | 8,79 |
| PPU | PMTB | 55,19 | K. Ruta | 34,20 | K. Pemerintah | 10,18 |
| MAHULU | Net Ekspor | 32,87 | PMTB | 28,89 | K. Ruta | 24,43 |
| Balikpapan | PMTB | 37,72 | Net Ekspor | 35,07 | K. Ruta | 23,53 |
| Samarinda | K. Ruta | 43,94 | PMTB | 42,20 | K. Pemerintah | 12,75 |
| Bontang | Net Ekspor | 73,21 | PMTB | 13,99 | K. Ruta | 10,35 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

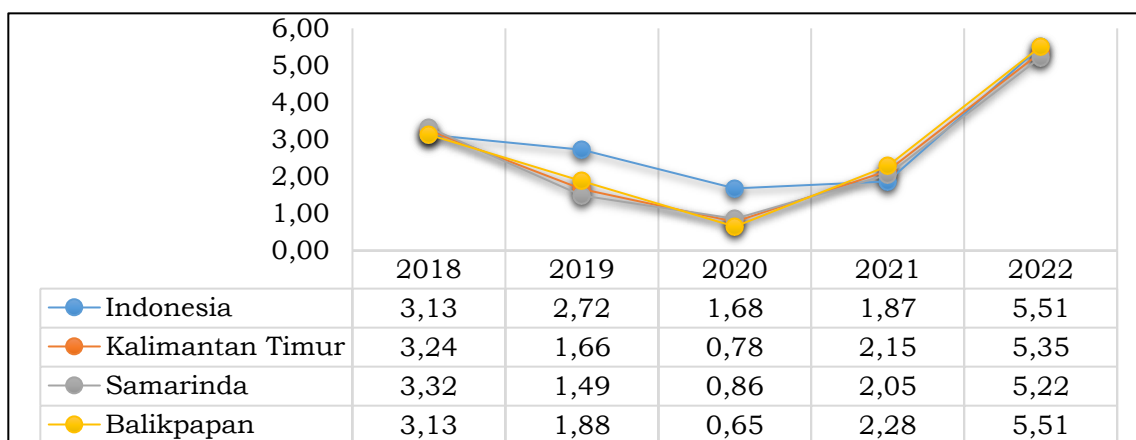
Pada tahun 2022, dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur sebanyak tujuh kabupaten/kota memiliki perekonomian yang didominasi oleh komponen Net Ekspor, sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT). Kabupaten/kota yang perekonomiannya didominasi oleh komponen selain Net ekspor adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan didominasi oleh komponen PMTB (investasi) yang masing-masing memberi *share* sebesar 55,19 persen dan 37,72 persen. Sementara itu,

perekonomian wilayah Kota Samarinda didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsusmsi Akhir Rumah Tangga dengan *share* 43,94.

Kabupaten/kota yang porsi tersebaranya merupakan Net Ekspor merupakan wilayah dengan ekonomi yang berbasis sumber daya alam, seperti batubara, minyak dan gas bumi. Jika dibandingkan porsi komponen Net Ekspor antar wilayah tersebut, yang memiliki nilai *share* Net Ekspor terbesar adalah Kabupaten Kutai Timur, yaitu sebesar 80,07 persen. Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau juga memiliki *share* Net Ekspor yang signifikan, yaitu masing-masing sebesar 74,38 persen dan 73,45 persen. Sementara itu, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki nilai *share* Net Ekspor masing-masing sebesar 73,21 persen, 54,77 persen, 58,34 persen dan 32,87 persen.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 hingga mencapai 5,35 persen. Hal ini karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.



Gambar II.20
Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Tingkat Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur masih disumbang secara dominan oleh bahan makanan menjadi penyumbang terbesar inflasi umum yang berpotensi meningkatkan kemiskinan mengingat alokasi makanan

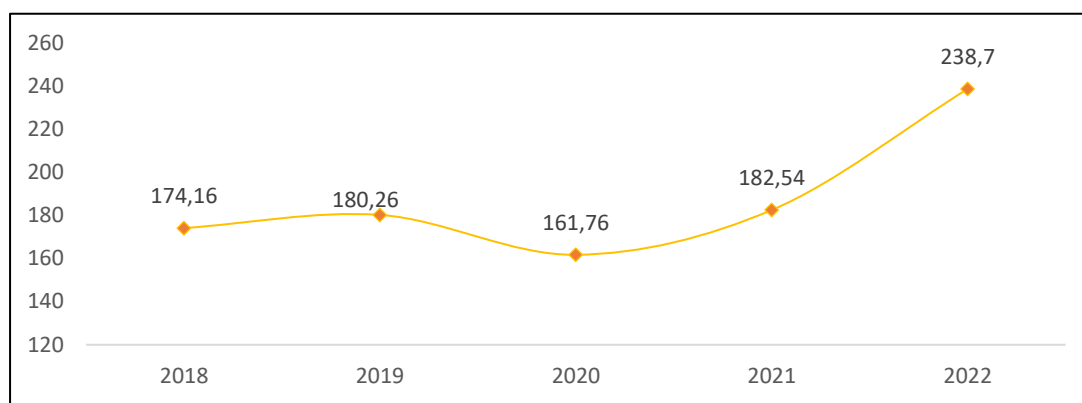
dalam budget rumah tangga miskin cenderung lebih besar ketimbang alokasi makanan dalam budget rumah tangga non miskin karena harga barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan. Kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan yang mengakibatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Meningkat. Peningkatan inflasi pada tahun 2022 terjadi seiring dengan membaiknya optimisme masyarakat terhadap prospek perekonomian seiring semakin terkendalinya kasus COVID-19 yang mendorong normalisasi permintaan masyarakat.

Kota Balikpapan pada tahun 2022 mengalami inflasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya menjadi 5,51 persen, dan lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Samarinda sebesar 5,22 persen. Sehingga secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 5,35 persen.

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah dan dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di suatu daerah. Apabila nilai PDRB-nya besar dengan jumlah penduduk sedikit maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah tersebut akan besar, demikian pula sebaliknya.

Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2018-2022 cenderung meningkat. Namun nilai PDRB per Kapita tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dari sebesar Rp 180,26 juta menjadi Rp 160,11 juta. Hal ini tentu saja disebabkan adanya pengaruh dari Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian daerah, khususnya ekonomi makro. Namun di tahun 2022 nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku kembali meningkat mencapai Rp 238,70 juta.



Gambar II.21

PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, jika diurutkan maka nilai PDRB per kapita tertinggi tahun 2022 yakni di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 450,27 juta, Kota Bontang sebesar Rp 344,56 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 325,67 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 72,05 juta dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp 94,51 juta.

Tabel II.18

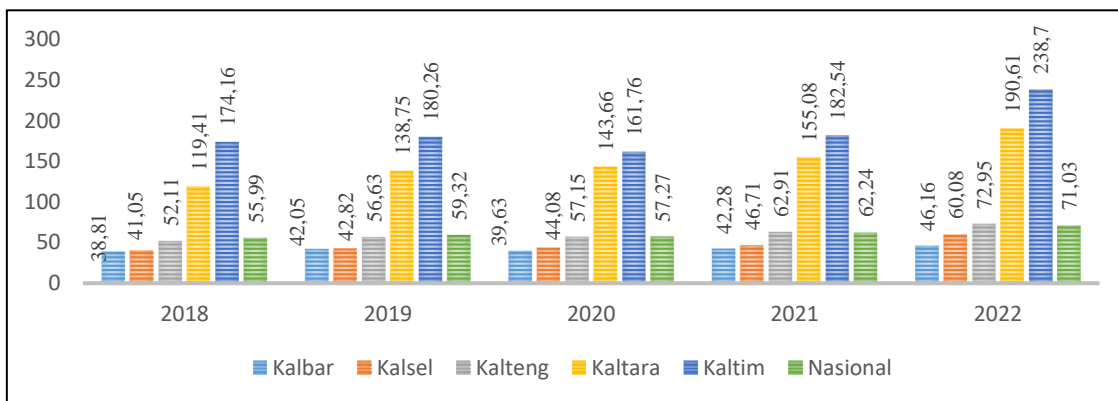
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

| No | Kab/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Paser | 171,64 | 173,34 | 157,18 | 194,12 | 272,09 |
| 2 | KUBAR | 192,10 | 195,40 | 158,03 | 184,46 | 246,65 |
| 3 | KUKAR | 210,47 | 212,76 | 204,50 | 241,84 | 325,67 |
| 4 | KUTIM | 353,74 | 367,11 | 268,80 | 304,16 | 450,27 |
| 5 | Berau | 166,27 | 173,83 | 143,67 | 170,34 | 232,68 |
| 6 | PPU | 55,70 | 57,76 | 50,78 | 55,85 | 72,05 |
| 7 | MAHULU | 95,32 | 102,46 | 85,38 | 90,17 | 94,51 |
| 8 | Balikpapan | 151,30 | 165,69 | 151,31 | 160,20 | 180,96 |
| 9 | Samarinda | 74,08 | 79,95 | 80,36 | 85,60 | 99,82 |
| 10 | Bontang | 337,45 | 327,06 | 311,88 | 320,44 | 344,56 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada di atas PDRB per Kapita Nasional sebesar Rp 238,70 juta. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan yang tertinggi kedua di tingkat nasional setelah DKI Jakarta. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan

jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarnya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.



Gambar II.22
PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan
Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

D. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,31 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga menurun menjadi sebanyak 236,25 ribu jiwa dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 241,77 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 728.208 yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan. Penurunan angka kemiskinan terjadi karena mulai pulihnya perekonomian sehingga memberikan pengaruh positif pada beberapa lapangan usaha.

Tabel II.19
Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

| Periode | Garis Kemiskinan | | | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | Persentase Penduduk Miskin |
|------------|------------------|-------------|---------|------------------------------------|----------------------------|
| | Makanan | Non Makanan | Total | | |
| Maret 2018 | 405.108 | 169.596 | 574.704 | 218,90 | 6,03 |
| Maret 2019 | 429.165 | 179.991 | 609.155 | 219,92 | 5,94 |
| Maret 2020 | 463.823 | 198.479 | 662.302 | 230,26 | 6,10 |
| Maret 2021 | 485.445 | 203.590 | 689.035 | 241,77 | 6,54 |
| Maret 2022 | 513.874 | 214.334 | 728.208 | 236,25 | 6,31 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Tingkat kemiskinan masyarakat di Kaltim juga tercermin dari peningkatan Garis Kemiskinan (GK) Kaltim dengan peningkatan GK di perdesaan yang lebih besar dibandingkan di perkotaan. GK meningkat dari

Rp689.035/kapita/bulan pada bulan Maret 2021 menjadi Rp728.208/kapita/bulan pada Maret 2022. Peningkatan garis kemiskinan Kaltim bersumber dari peningkatan garis kemiskinan baik dari perkotaan maupun perdesaan. Dari sisi lokasi, peningkatan garis kemiskinan di wilayah perdesaan sebesar 6,67% atau lebih besar dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang meningkat sebesar 5,23%. Komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKM di perkotaan dan perdesaan utamanya disebabkan oleh komoditas beras, rokok kretek filter dan telur ayam ras, sedangkan komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKNM di perkotaan dan perdesaan adalah komoditas perumahan. Komoditas beras merupakan penyumbang terhadap GKM di perkotaan dan perdesaan dengan masing-masing tercatat sebesar 14,88% dan 17,41%. Selanjutnya, rokok kretek filter merupakan komoditas yang menyumbang GKM terbesar kedua yang tercatat sebesar 11,14% di perkotaan dan 14,24% di perdesaan. Selanjutnya, diikuti oleh komoditas telur ayam ras yang tercatat sebesar 4,66% di perkotaan dan 4,35% di perdesaan. Komoditas lainnya yang memberi sumbangan GKM adalah daging ayam ras, mie instan, gula pasir, ikan tongkol, bawang merah, ikan kembung, dan cabai rawit.

Tabel II.20
 Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan
 Menurut Daerah Tahun 2022

| No | Perkotaan | | Perdesaan | |
|----|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| | Komoditi | % | Komoditi | % |
| 1 | Beras | 69,33 | Beras | 73,30 |
| 2 | Rokok Kretek Filter | 11,14 | Rokok Kretek Filter | 14,24 |
| 3 | Daging ayam ras | 5,01 | Telur ayam ras | 4,35 |
| 4 | Telur ayam ras | 4,66 | Tongkol/Tuna/Cakalang | 3,30 |
| 5 | Mie Instan | 3,50 | Mie Instan | 3,19 |
| 6 | Tongkol/Tuna/Cakalang | 2,94 | Daging Ayam Ras | 2,99 |
| 7 | Gula Pasir | 2,18 | Gula Pasir | 2,61 |
| 8 | Bawang Merah | 1,92 | Bawang merah | 2,29 |
| 9 | Cabe Rawit | 1,84 | Kembung | 1,92 |
| 10 | Tempe | 1,65 | Cabe Rawit | 1,85 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Bila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2022 masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 11,55 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya sebesar 2,45 persen. Sebagai daerah baru dan memiliki wilayah yang sulit diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Mahakam Ulu. Namun dalam perjalanannya, perkembangan

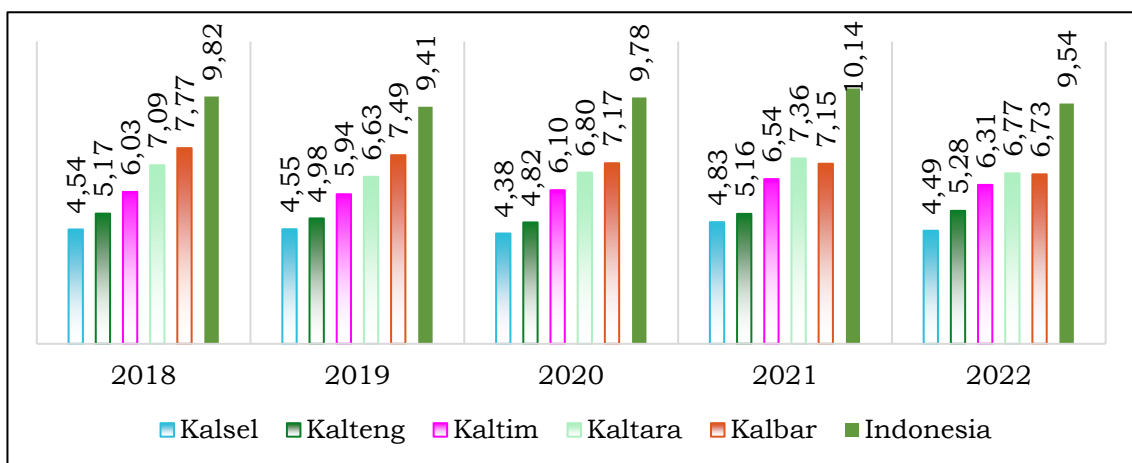
positif selalu ditunjukkan dari hasil pembangunan daerah hingga Pandemi COVID-19 melanda Indonesia.

Tabel II.21
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)

| No | KAB/KOTA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Paser | 9,03 | 8,95 | 9,23 | 9,73 | 9,43 |
| 2 | KUBAR | 9,15 | 9,09 | 9,29 | 10,24 | 10,20 |
| 3 | KUKAR | 7,41 | 7,20 | 7,31 | 7,99 | 7,96 |
| 4 | KUTIM | 9,22 | 9,48 | 9,55 | 9,81 | 9,28 |
| 5 | Berau | 5,04 | 5,04 | 5,19 | 5,88 | 5,65 |
| 6 | PPU | 7,40 | 7,18 | 7,36 | 7,61 | 7,25 |
| 7 | MAHULU | 11,62 | 11,25 | 11,44 | 11,90 | 11,55 |
| 8 | Balikpapan | 2,64 | 2,42 | 2,57 | 2,89 | 2,45 |
| 9 | Samarinda | 4,59 | 4,59 | 4,76 | 4,99 | 4,85 |
| 10 | Bontang | 4,67 | 4,22 | 4,38 | 4,62 | 4,54 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan, setelah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Regional Kalimantan, kecuali Provinsi Kalimantan tengah meningkat sebanyak 0,12 poin, sementara Kalimantan Timur menurun sebanyak 0,23 poin. Meski demikian, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,54 persen.



Gambar II.23
Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional
Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022)

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 62.870 jiwa, Kota Samarinda

sebanyak 41.950 jiwa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 36.840 jiwa. Disisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah share PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan dua terbesar terhadap total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata memiliki jumlah penduduk miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya belum mampu memberikan dampak maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel II.22
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (jiwa)

| No | KAB/KOTA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Paser | 25.140 | 25.450 | 26.770 | 27.560 | 27.020 |
| 2 | KUBAR | 13.490 | 13.450 | 13.780 | 15.380 | 15.380 |
| 3 | KUKAR | 56.560 | 56.340 | 58.420 | 62.360 | 62.870 |
| 4 | KUTIM | 33.020 | 35.310 | 36.980 | 37.780 | 36.840 |
| 5 | Berau | 11.330 | 11.620 | 12.300 | 13.620 | 13.310 |
| 6 | PPU | 11.760 | 11.520 | 11.930 | 12.130 | 11.590 |
| 7 | MAHULU | 3.250 | 3.190 | 3.260 | 3.180 | 3.100 |
| 8 | Balikpapan | 17.010 | 15.780 | 17.020 | 18.530 | 15.830 |
| 9 | Samarinda | 39.230 | 39.800 | 41.920 | 42.840 | 41.950 |
| 10 | Bontang | 8.100 | 7.470 | 7.910 | 8.410 | 8.390 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel II.23
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan
(P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah
Tahun 2018-2022

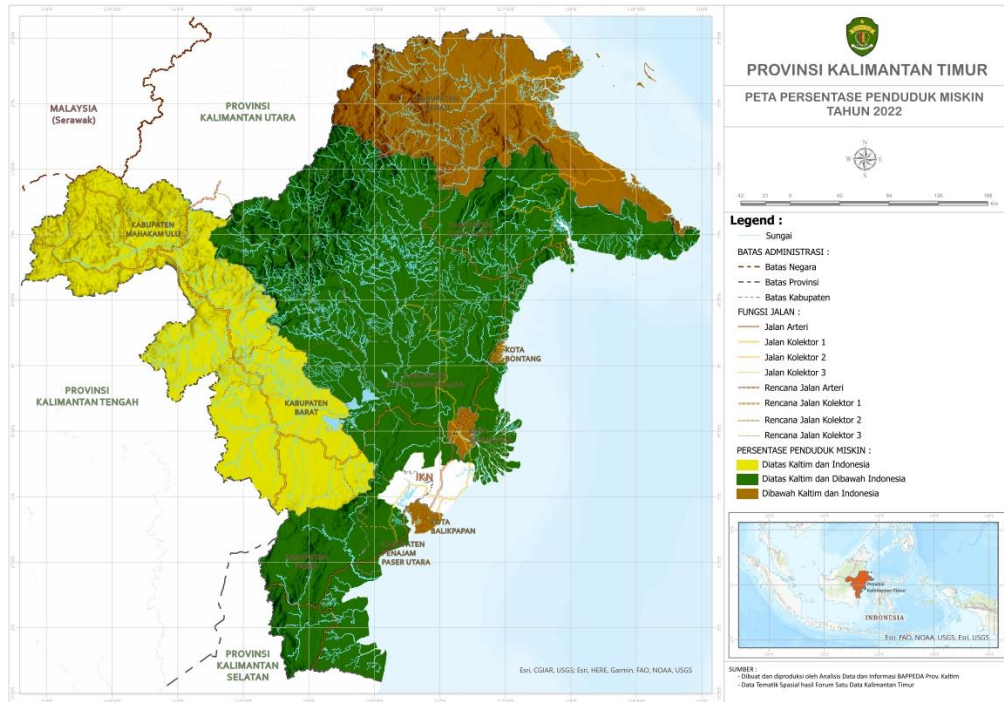
| Tahun | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan |
|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | | | |
| Maret 2018 | 0,656 | 1,229 | 0,846 |
| Maret 2019 | 0,610 | 1,530 | 0,910 |
| Maret 2020 | 0,664 | 1,743 | 1,015 |
| Maret 2021 | 1,017 | 1,673 | 1,223 |
| Maret 2022 | 0,672 | 1,687 | 0,989 |
| Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) | | | |
| Maret 2018 | 0,161 | 0,270 | 0,197 |

| Tahun | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan |
|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Maret 2019 | 0,130 | 0,380 | 0,210 |
| Maret 2020 | 0,157 | 0,412 | 0,240 |
| Maret 2021 | 0,303 | 0,413 | 0,337 |
| Maret 2022 | 0,149 | 0,395 | 0,226 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

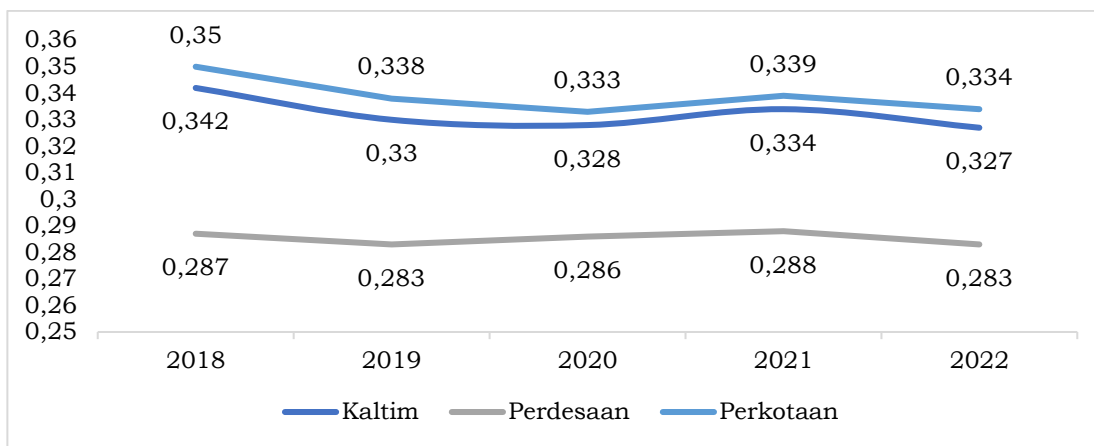
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan begitu juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2022. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun menjadi 0,989. Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,337 menjadi 0,226 pada periode yang sama. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada bulan Maret 2022, Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 0,672 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,687. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,149 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,395. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan terus meningkat dari tahun 2019-2021 dalam 3 tahun ini (2019, dengan nilai 0,910 di tahun 2021 tercatat berada pada nilai 1,223. Sempat menyentuh nilai 1,015 (2020) dan 1,223 (2021) yaitu pada masa Pandemi COVID-19. Serupa dengan Tingkat Keparahan kemiskinan yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kalimantan Timur. Sejak tahun 2019 dengan nilai 0,197 meningkat menjadi 0,337 di tahun 2021. Bahkan pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan pernah berada di nilai 0,303 di tahun 2021, yaitu pada masa Pandemi COVID-2019. Kondisi yang tidak baik tersebut akan dipadukan dengan Program Pemerintah Pusat yaitu Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada tahun 2023 dalam upaya penanganan pengentasan kemiskinan di wilayah Perkotaan dan wilayah perdesaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kalimantan Timur menurun 0,989 dan 0,226. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati batas garis kemiskinan serta ketimpangan pengeluaran penduduk miskin menjadi semakin kecil.



Gambar II.24
Peta Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Timur yang diukur dengan Indeks Gini, selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pengalaman performa baik pada tahun 2018 ke 2020 yaitu kondisi penurunan pernah ditunjukkan pada nilai 0,342 menjadi 0,328. Pada tahun 2021 Indeks Gini mengalami peningkatan menjadi 0,334. Rasio gini di Kalimantan Timur tahun 2022 menunjukkan penurunan sebesar 0,327 hal ini menunjukkan geliat usaha yang semakin adaptif pasca Pandemi COVID-19. Hal tersebut yang menjadi faktor utama membaiknya kinerja aktivitas ekonomi di berbagai lapangan usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari perputaran roda perekonomian, sehingga terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kalimantan Timur. Akan tetapi capaian indeks gini tahun 2022 masih dibawah target sebesar 0,308. Sehingga perlu perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelesaikan ketimpangan pendapatan penduduk.



Gambar II.25

Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sedangkan kabupaten/kota yang indeks gininya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki indeks gini paling rendah dengan capaian 0,269. Kabupaten Berau memiliki Indeks Gini tertinggi dengan capaian 0,352.

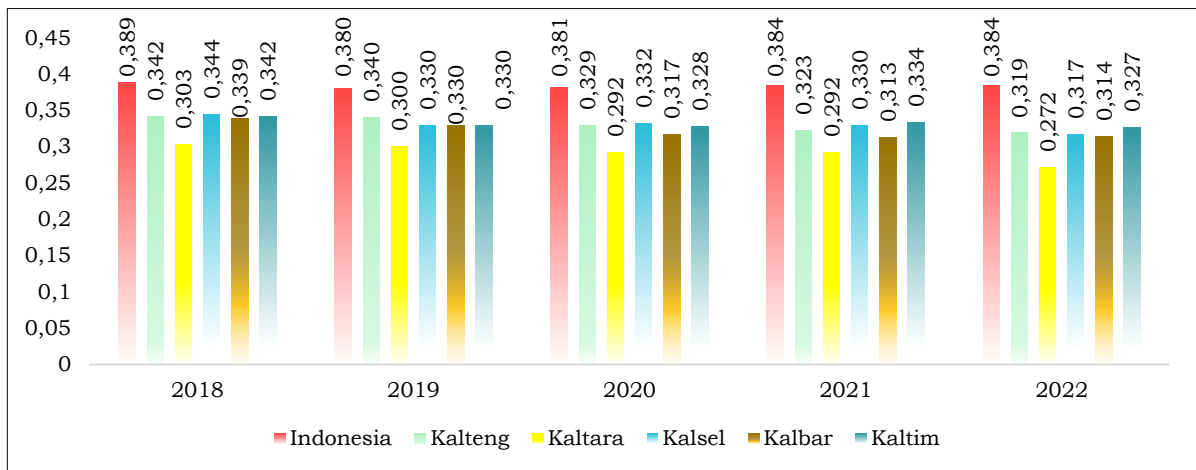
Tabel II.24

Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (jiwa)

| No | Kab/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Paser | 0,299 | 0,262 | 0,290 | 0,288 | 0,282 |
| 2 | KUBAR | 0,311 | 0,334 | 0,338 | 0,317 | 0,300 |
| 3 | KUKAR | 0,302 | 0,278 | 0,294 | 0,283 | 0,269 |
| 4 | KUTIM | 0,326 | 0,346 | 0,325 | 0,328 | 0,304 |
| 5 | Berau | 0,303 | 0,345 | 0,300 | 0,377 | 0,352 |
| 6 | PPU | 0,313 | 0,322 | 0,292 | 0,263 | 0,274 |
| 7 | MAHULU | 0,334 | 0,302 | 0,259 | 0,270 | 0,288 |
| 8 | Balikpapan | 0,356 | 0,302 | 0,311 | 0,325 | 0,334 |
| 9 | Samarinda | 0,317 | 0,341 | 0,324 | 0,322 | 0,346 |
| 10 | Bontang | 0,376 | 0,338 | 0,405 | 0,340 | 0,324 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,272. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,31-0,32. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,384 pada tahun 2022. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.

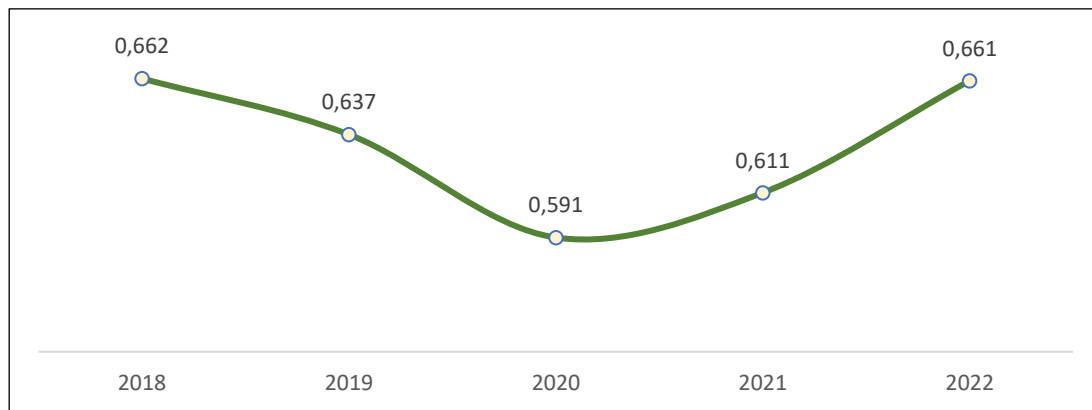


Gambar II.26

Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

E. Ketimpangan Antar Wilayah

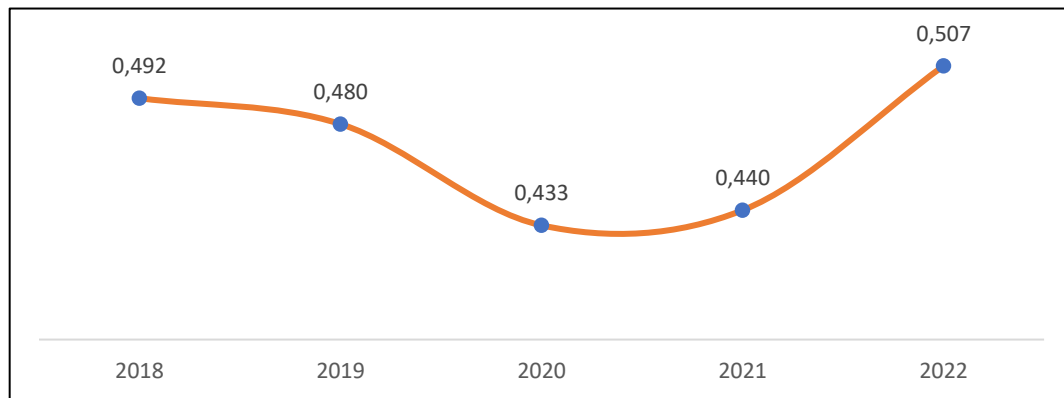
Ketimpangan wilayah terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah. Terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan penghitungan Indeks Williamson, kesenjangan antar wilayah dalam regional Kalimantan juga tercatat masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran angka Indeks Williamson yang selalu berada di atas angka 0,60, walaupun terdapat kecenderungan semakin menurun sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,594. Namun di tahun 2022 angka Indeks Williamson mengalami sedikit peningkatan yang mencapai 0,661.



Gambar II.27
Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)
Regional Kalimantan Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Secara umum, struktur perekonomian di pulau Kalimantan masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Sektor Pertanian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ketimpangan yang cukup tinggi pada regional Kalimantan ini disebabkan perbedaan potensi dan produktivitas hasil sumber daya alam pada masing-masing provinsi.

Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, kondisi ketimpangan di wilayah ini relatif moderat, bahkan termasuk rendah. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai Indeks Williamson di dalam wilayah Kalimantan Timur yang berada pada kisaran 0,40-0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki kondisi ekonomi yang relatif homogen. Namun, disisi lain besaran yang relatif sama tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengindikasikan bahwa masih diperlukan berbagai kebijakan yang lebih tepat yang dapat lebih menurunkan ketimpangan antara kabupaten/kota yang terjadi.



Gambar II.28

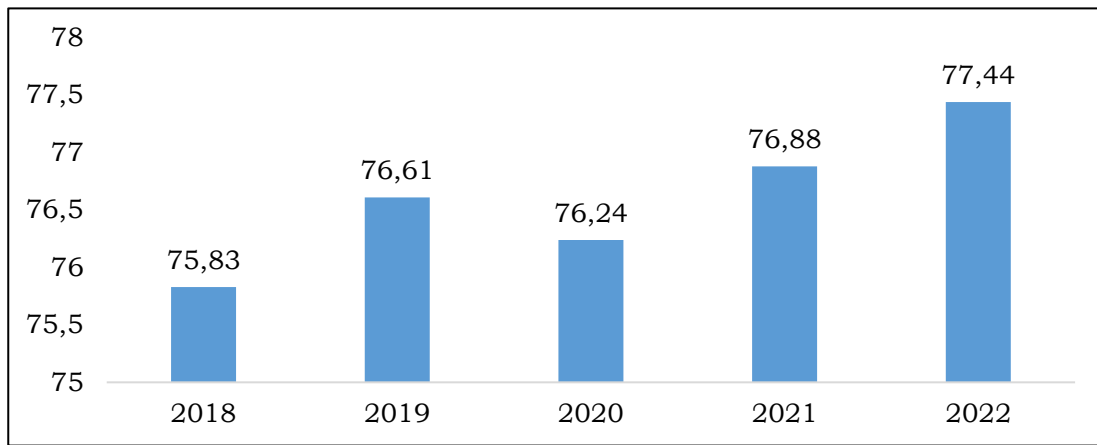
Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Kondisi perekonomian kabupaten/kota yang hampir homogen tersebut disebabkan karena wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki struktur ekonomi yang hampir sama. Sebagian besar perekonomian di kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengandalkan sumber daya alam atau memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis sektor primer. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang perekonomian terbesar di Kalimantan Timur, disusul oleh Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sangat mengandalkan perekonomiannya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sedangkan Kota Balikpapan mengandalkan industri pengolahan, khususnya industri pengilangan migas sebagai sumber perekonomian.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode 2018-2022, angka IPM Kalimantan Timur mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 angka IPM mengalami penurunan. Angka IPM tahun 2020 turun 0,37 poin menjadi 76,24 dari yang sebelumnya sebesar 76,61 di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengeluaran per kapita masyarakat mengalami penurunan sehingga berdampak pada rumusan IPM Kalimantan Timur. Pada tahun 2021-2022 IPM Kalimantan Timur kembali mengalami peningkatan mencapai 76,88 dan 77,44. Capaian pembangunan manusia Kalimantan Timur masih sama seperti pada tahun sebelumnya, yaitu berstatus “tinggi” dan berada pada posisi ketiga di Nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.



Gambar II.29
 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2018-2022
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Peningkatan angka IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2022, angka IPM seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terkoreksi naik. Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan terbesar adalah Kabupaten Kutai Barat sebesar 1,18 persen dari 72,07 di tahun 2021 menjadi 72,92 di tahun 2022. Selain Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu juga mengalami peningkatan angka IPM yang signifikan yaitu sebesar 1,18 persen dari 67,95 di tahun 2021 menjadi 68,75 di tahun 2022.

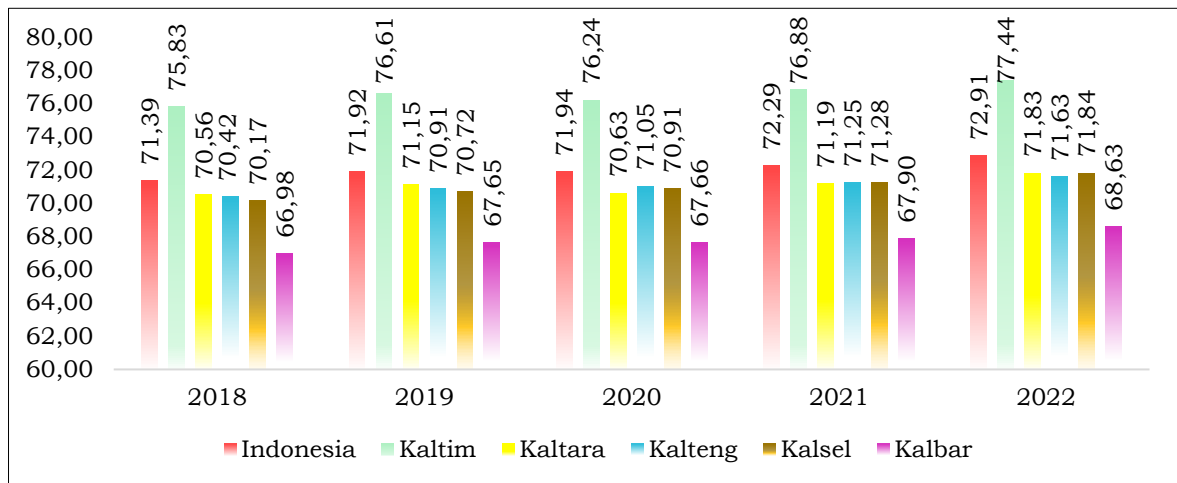
Tabel II.25
 Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

| No | Kab/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Paser | 71,61 | 72,29 | 72,04 | 72,93 | 73,44 |
| 2 | KUBAR | 70,69 | 71,63 | 71,19 | 72,07 | 72,92 |
| 3 | KUKAR | 73,15 | 73,78 | 73,59 | 74,06 | 74,67 |
| 4 | KUTIM | 72,56 | 73,49 | 73,00 | 73,81 | 74,35 |
| 5 | Berau | 74,01 | 74,88 | 74,71 | 75,20 | 75,74 |
| 6 | PPU | 71,13 | 71,64 | 71,41 | 72,01 | 72,55 |
| 7 | MAHULU | 66,67 | 67,58 | 67,09 | 67,95 | 68,75 |
| 8 | Balikpapan | 79,81 | 80,11 | 80,01 | 80,71 | 81,13 |
| 9 | Samarinda | 79,93 | 80,20 | 80,11 | 80,76 | 81,43 |
| 10 | Bontang | 79,86 | 80,09 | 80,02 | 80,59 | 80,94 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dilihat dari perbandingan dengan regional Kalimantan, maka IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan IPM tertinggi dengan interval yang cukup jauh, dimana berkisar antara 68,63 – 71,84. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi telah berkurang di seluruh

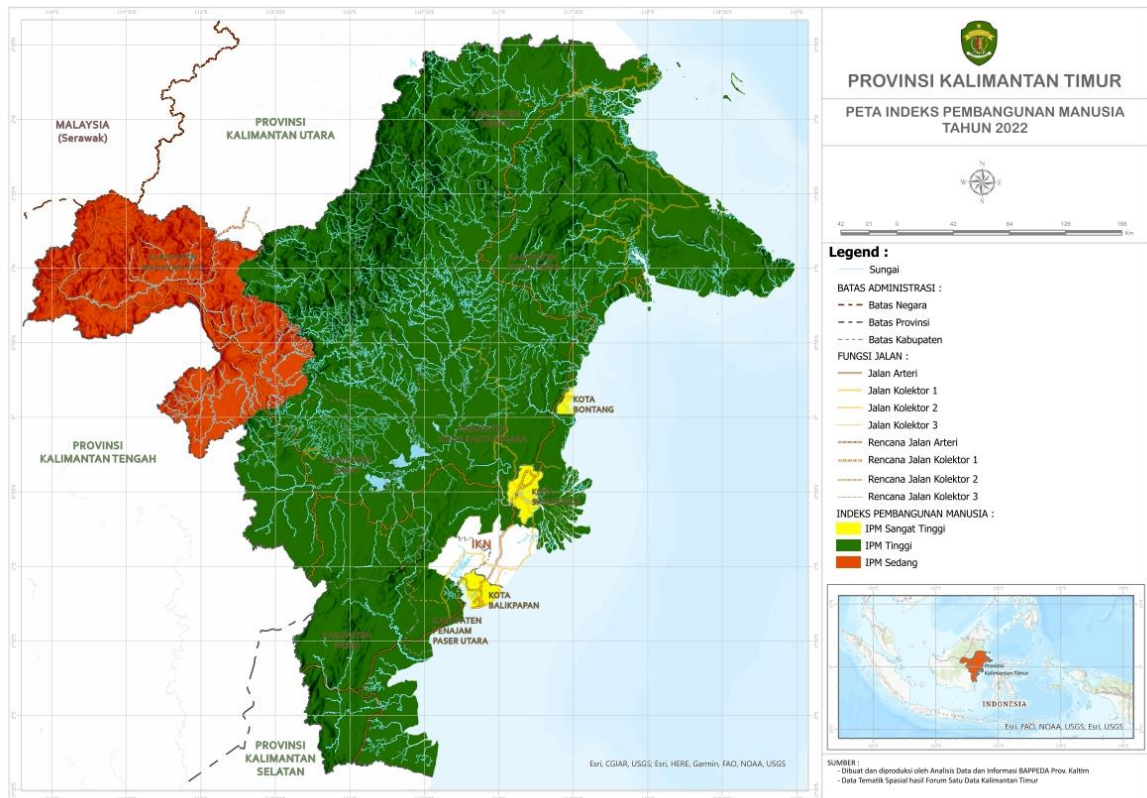
wilayah Kalimantan sehingga seluruh provinsi terdampak positif, khususnya kualitas SDM dari sisi pengeluaran per kapita.



Gambar II.30
Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan Timur yang tinggi bukanlah ranking secara nasional atau regional. Laju pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal ini terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

Pola spasial capaian IPM kabupaten/kota tahun 2022 menunjukkan kondisi adanya kesenjangan dalam pembangunan manusia di Kalimantan Timur. Penduduk kabupaten/kota dengan status pencapaian IPM yang sudah masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dan “Tinggi” memiliki kemudahan dan kesempatan yang lebih luas dalam mengakses hasil pembangunan terutama dalam hal memperoleh atau bahkan meningkatkan pendapatan serta memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dibanding penduduk di kabupaten dengan status pencapaian IPM kategori “sedang”, “rendah” dan “sangat rendah”.



Gambar II.31

Pola Spasial Status Pencapaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

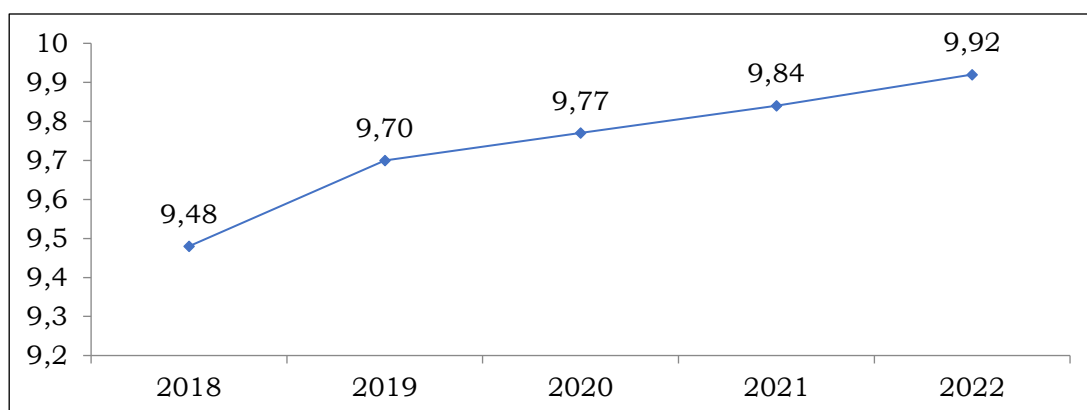
Pada tahun 2022 tidak ada perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Samarinda memiliki status IPM “Sangat Tinggi”, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki status IPM “Tinggi” sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki status “Sedang”.

Perkembangan capaian masing-masing komponen pembentuk IPM diuraikan sebagai berikut:

1) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2022 mencapai 9,92 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Capaian

Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur di tahun 2022 berada di atas target yang ditetapkan sebesar 9,40 tahun.



Gambar II.32
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 (Tahun)
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota juga selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tiga kota di Kalimantan Timur mengalami rata-rata lama sekolah tertinggi diatas rata-rata lama sekolah Provinsi, yang dimana Kota Balikpapan memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi mencapai 10,92 tahun. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya dengan capaian 8,36 tahun pada tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP Kelas III). Angka ini masih-belum mencapai target pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Tabel II.26
Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (tahun)

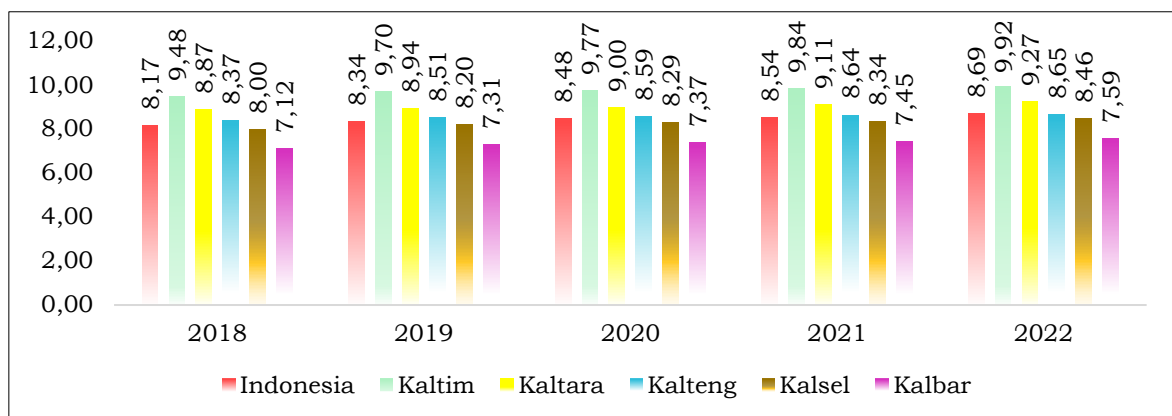
| No | Kab/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Paser | 8,22 | 8,54 | 8,55 | 8,79 | 8,80 |
| 2 | KUBAR | 8,07 | 8,34 | 8,47 | 8,70 | 8,78 |
| 3 | KUKAR | 8,84 | 9,10 | 9,22 | 9,23 | 9,24 |
| 4 | KUTIM | 9,08 | 9,18 | 9,19 | 9,43 | 9,44 |
| 5 | Berau | 8,98 | 9,25 | 9,52 | 9,53 | 9,54 |
| 6 | PPU | 8,03 | 8,16 | 8,28 | 8,36 | 8,51 |
| 7 | MAHULU | 7,69 | 7,89 | 7,97 | 8,18 | 8,36 |
| 8 | Balikpapan | 10,65 | 10,67 | 10,68 | 10,91 | 10,92 |
| 9 | Samarinda | 10,46 | 10,47 | 10,48 | 10,49 | 10,71 |
| 10 | Bontang | 10,72 | 10,73 | 10,79 | 10,80 | 10,81 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Seperti data yang tersaji pada tabel diatas, sampai dengan tahun 2022 masih terdapat empat Kabupaten yaitu Kabupaten Mahulu, PPU, Kubar dan Paser yang memiliki angka rata-rata lama sekolah dibawah angka rata-rata lama sekolah provinsi maupun kabupaten/kota lainnya. Namun demikian dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terlihat adanya trend kenaikan angka rata-rata lama sekolah pada keempat Kabupaten tersebut walaupun tidak signifikan.

Jika dilihat berdasarkan capaian rata-rata lama sekolah yang tertinggi ditahun 2022, Kota Balikpapan menduduki peringkat pertama rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini disebabkan antara lain karena sarana dan prasarana pendidikan yang sudah lengkap ataupun memadai di semua jenjang Pendidikan di Kota Balikpapan, sedangkan Kabupaten yang memiliki rata-rata lama sekolah terendah adalah Kab. Mahulu dengan capaian tahun 2022 sebesar 8,36 tahun, hal ini dimungkinkan antara lain karena infrastruktur pendidikan di Kab. Mahulu masih perlu mendapat perhatian khusus baik oleh Pemerintah Pusat maupun daerah.

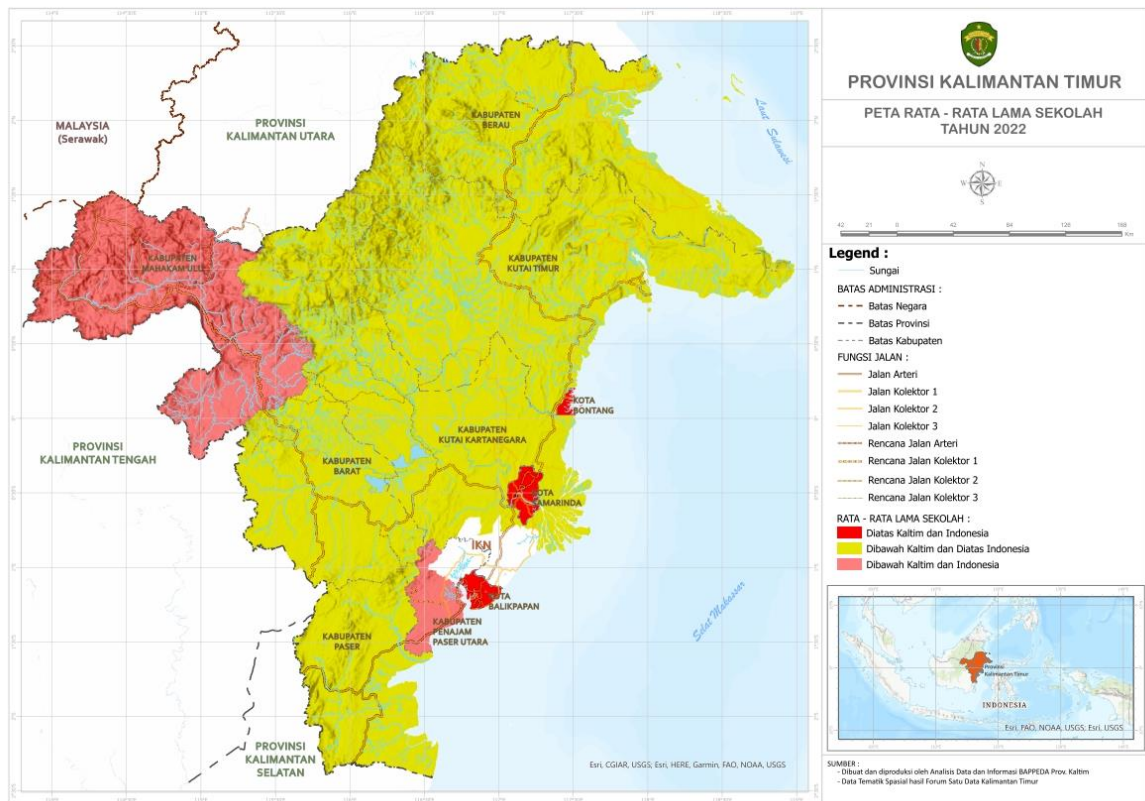
Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur sebesar 9,92 tahun adalah yang tertinggi di Regional Kalimantan serta lebih tinggi dari Nasional sebesar 8,69 tahun. Disusul Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 9,27 tahun dan 8,65 tahun.



Gambar II.33
Rata-Rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Pola spasial capaian Rata-Rata Lama Sekolah kabupaten/kota tahun 2022 menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tingginya angka lamanya bersekolah semakin tinggi

jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

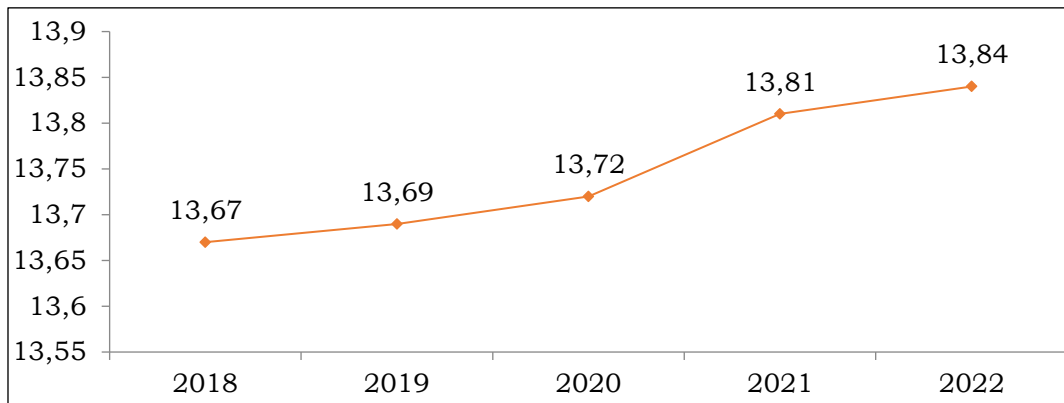


Gambar II.34

Pola Spasial Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

2) Harapan Lama Sekolah

Di tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 13,84 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga SMA atau D1. Hal ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.



Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 (Tahun)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Kota Samarinda memiliki capaian harapan lama sekolah paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu 15,10 tahun sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 12,62 tahun pada tahun 2022 merupakan capaian harapan lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya.

Tabel II.27

Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (tahun)

| No | Kab/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Paser | 12,99 | 13,00 | 13,10 | 13,25 | 13,27 |
| 2 | KUBAR | 12,88 | 12,89 | 12,90 | 13,02 | 13,09 |
| 3 | KUKAR | 13,57 | 13,58 | 13,59 | 13,60 | 13,63 |
| 4 | KUTIM | 12,65 | 12,78 | 12,89 | 12,90 | 13,00 |
| 5 | Berau | 13,3 | 13,31 | 13,32 | 13,33 | 13,35 |
| 6 | PPU | 12,54 | 12,55 | 12,56 | 12,57 | 12,70 |
| 7 | MAHULU | 12,48 | 12,50 | 12,51 | 12,61 | 12,62 |
| 8 | Balikpapan | 14,12 | 14,13 | 14,14 | 14,22 | 14,23 |
| 9 | Samarinda | 14,66 | 14,70 | 14,89 | 15,09 | 15,10 |
| 10 | Bontang | 12,89 | 12,90 | 13,03 | 13,17 | 13,18 |

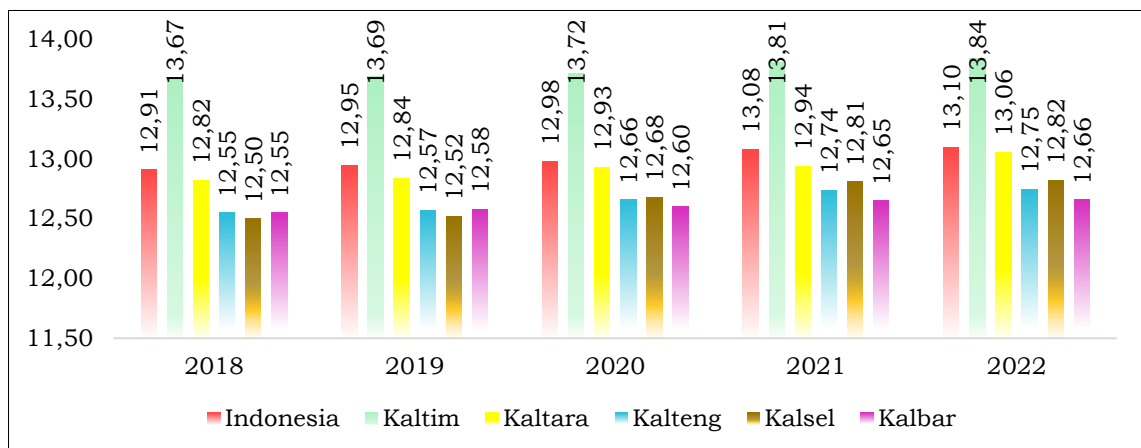
Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023

Secara umum Harapan Lama Sekolah pada kabupaten/kota mengalami trend kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2022 meskipun kenaikan harapan lama sekolah di kabupaten/kota belum menunjukkan kenaikan secara signifikan. Sebagai upaya pemerintah terhadap peningkatan harapan lama sekolah di delapan kabupaten dengan angka harapan lama sekolah masih berada dibawah provinsi khususnya Kabupaten Mahulu dengan angka harapan lama sekolah yang paling rendah, maka diperlukan adanya langkah konkret sebagai upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan baik pada peningkatan

pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan maupun pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikannya sehingga peningkatan angka harapan lama sekolah dapat segera diwujudkan.

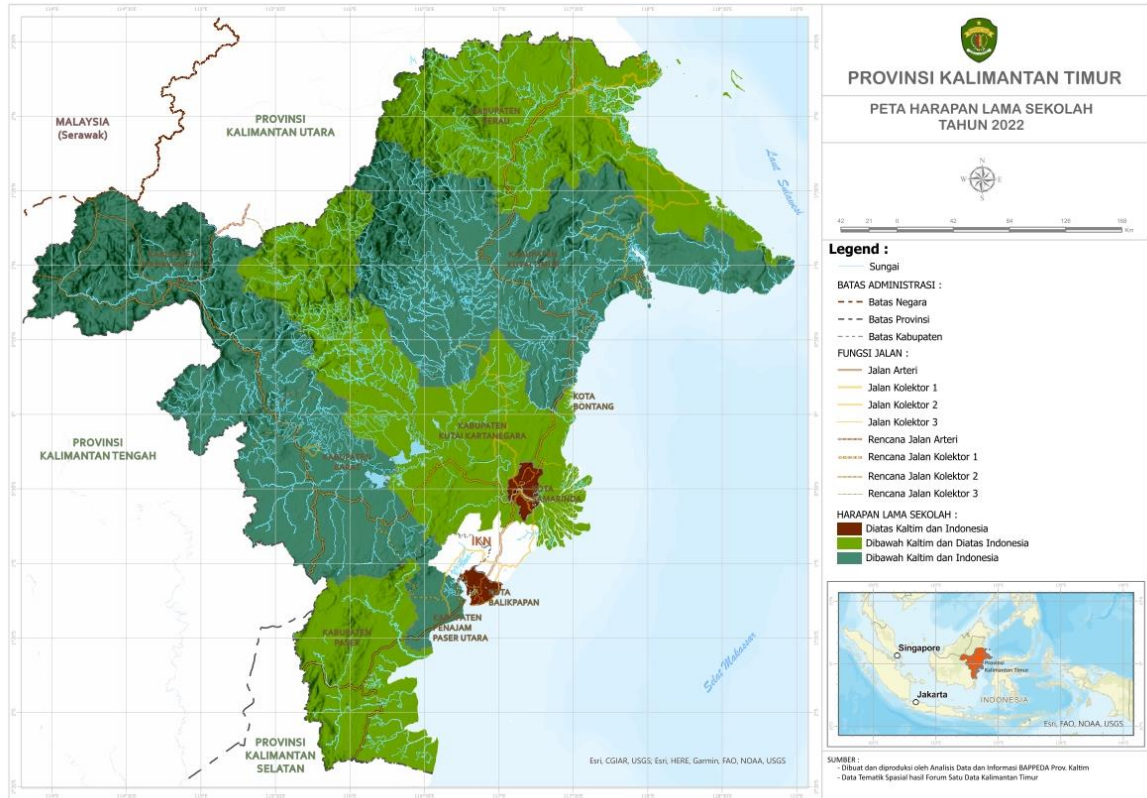
Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur selalu menjadi yang tertinggi di Regional Kalimantan. Namun tren laju pertumbuhan komponen ini (2018-2022) cenderung mengalami perlambatan. Berbeda dengan Provinsi lainnya di Regional Kalimantan yang meski berfluktuasi, namun cenderung meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Indonesia. Namun sayangnya, rata-rata laju pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kalimantan Timur. Hal ini berarti pertumbuhan HLS wilayah lain di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama 5 tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan HLS di Provinsi Kalimantan Timur cenderung melambat.



Gambar II.35
Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022)

Pola spasial capaian Harapan Lama Sekolah kabupaten/kota tahun 2022 menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam Pendidikan formal pada waktu tertentu.



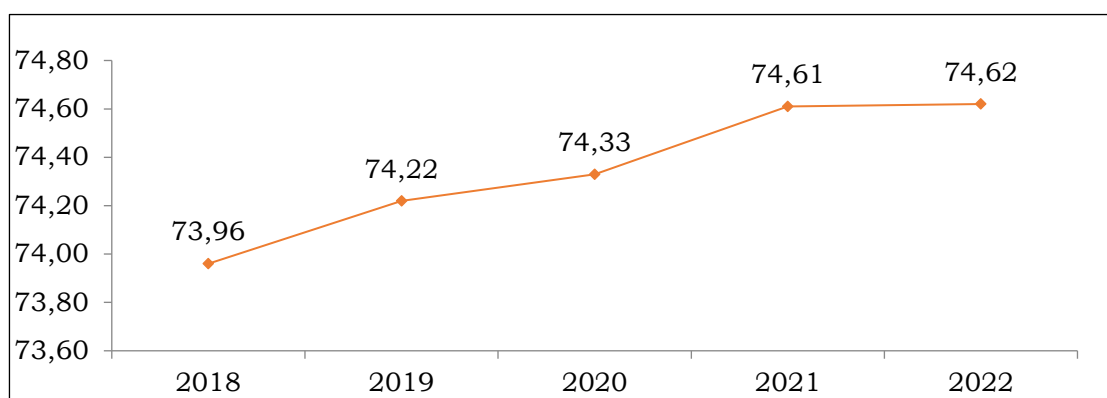
Gambar II.36

Pola Spasial Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

3) Umur Harapan Hidup

Di Provinsi Kalimantan Timur, Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 mencapai 73,96 tahun dan pada tahun 2022 menjadi 74,62 tahun. Selama periode tersebut secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,2 persen per tahun atau secara kumulatif terdapat peningkatan 1,34 poin. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74-75 tahun. Sehingga, angka ini bisa dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 74,75 tahun. Dari sisi preventif Keberhasilan Pemerintah dalam menanggulangi penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal dan penyakit-penyakit terkait gizi. Sedangkan dari sisi kuratif tergambar upaya pemerintah dan swasta di kabupaten/dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.



Gambar II.37

Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan memiliki usia harapan hidup tertinggi mencapai 74,78 tahun dan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai usia harapan hidup 71,71 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 akan memiliki harapan hidup hingga usia 71 tahun.

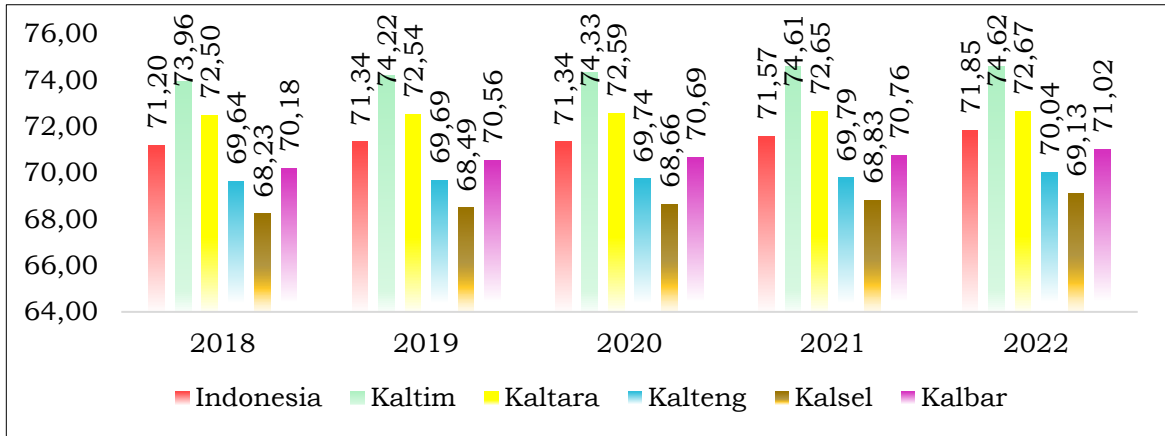
Tabel II.28

Usia Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (tahun)

| No | Kab/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Paser | 72,28 | 72,52 | 72,62 | 72,88 | 72,89 |
| 2 | KUBAR | 72,57 | 72,79 | 72,86 | 73,10 | 73,10 |
| 3 | KUKAR | 71,93 | 72,21 | 72,34 | 72,64 | 72,65 |
| 4 | KUTIM | 72,76 | 73,03 | 73,16 | 73,46 | 73,47 |
| 5 | Berau | 71,68 | 71,94 | 72,06 | 72,32 | 72,32 |
| 6 | PPU | 71,05 | 71,30 | 71,41 | 71,68 | 71,71 |
| 7 | MAHULU | 71,56 | 71,90 | 72,10 | 72,33 | 72,35 |
| 8 | Balikpapan | 74,18 | 74,41 | 74,49 | 74,76 | 74,78 |
| 9 | Samarinda | 73,93 | 74,17 | 74,27 | 74,54 | 74,56 |
| 10 | Bontang | 73,94 | 74,18 | 74,28 | 74,55 | 74,57 |

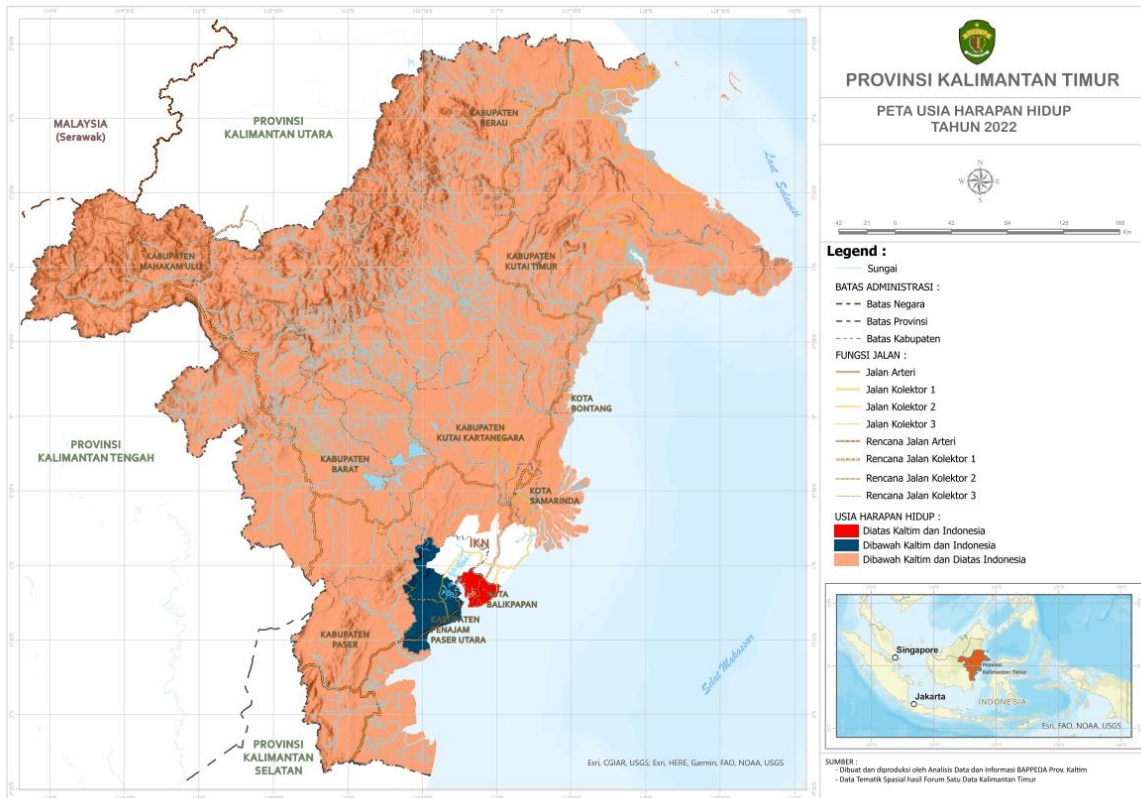
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih berada di atas capaian nasional sebesar 71,85 tahun.



Gambar II.38
 Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia
 Tahun 2018-2022
 (Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

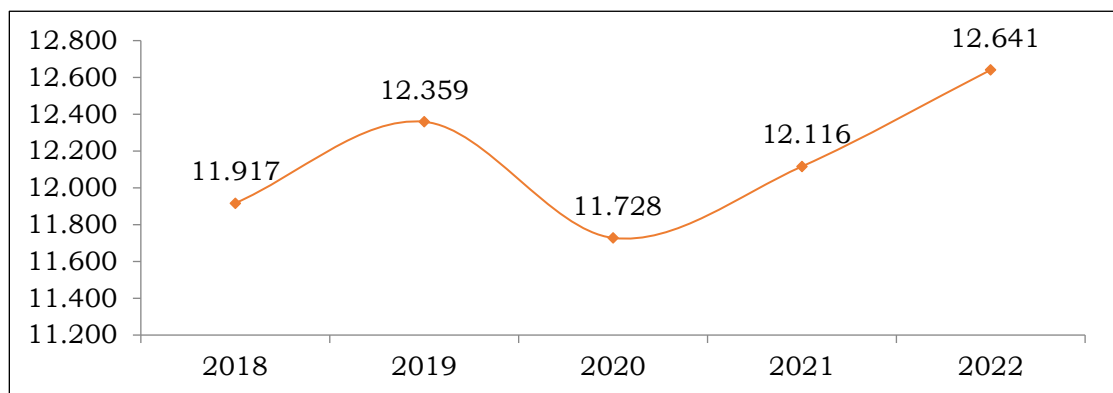
Pola spasial capaian Usia Harapan Hidup kabupaten/kota tahun 2022 menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat didalamnya.



Gambar II.39
 Pola Spasial Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2022
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

4) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran per Kapita Disesuaikan selama periode lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 4,34 persen per tahun. Pada tahun 2022, Pengeluaran per Kapita disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai Rp. 12,64 juta per tahun, atau naik Rp 525 ribu dibandingkan tahun 2021.



Gambar II.40
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 (Ribuan Rp)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 merupakan dampak dari adanya pemulihan pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur tanpa terkecuali yang menyebabkan daya beli masyarakat meningkat karena pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat.

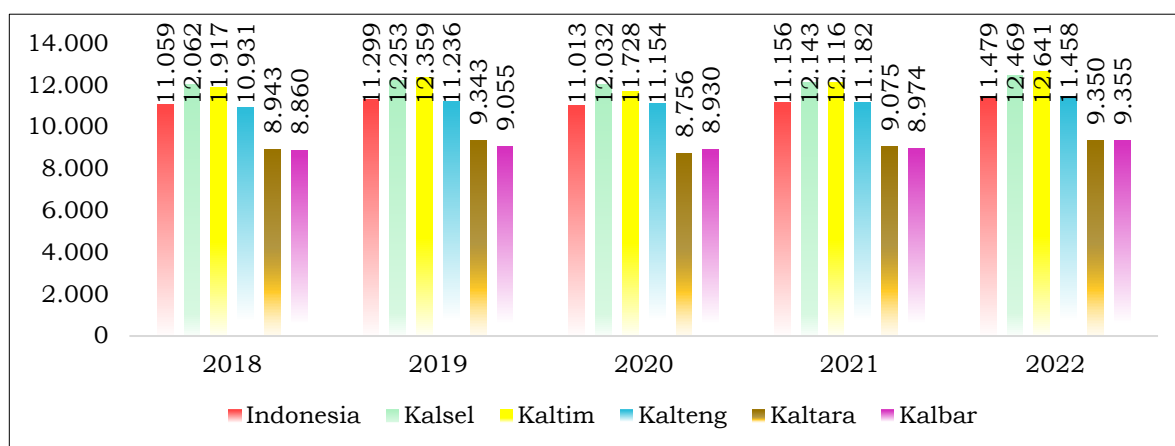
Sedangkan jika dirinci menurut kabupaten/kota, Kota Bontang memiliki pengeluaran per kapita disesuaikan paling besar diantara kabupaten/kota lainnya mencapai 17.327 ribu rupiah dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 8.215 ribu rupiah merupakan pengeluaran per kapita terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Secara umum, peningkatan pengeluaran per kapita menggambarkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur yang diakibatkan pemulihan pandemi COVID-19 dengan banyaknya masyarakat yang telah vaksin di tahun 2022.

Tabel II.29
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (Ribu Rupiah)

| No | Kab/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Paser | 10.605 | 10.767 | 10.344 | 10.673 | 11.181 |
| 2 | KUBAR | 9.849 | 10.338 | 9.712 | 10.062 | 10.740 |
| 3 | KUKAR | 10.959 | 11.152 | 10.720 | 11.048 | 11.677 |
| 4 | KUTIM | 10.614 | 11.196 | 10.485 | 10.868 | 11.322 |
| 5 | Berau | 12.207 | 12.726 | 12.018 | 12.435 | 13.095 |
| 6 | PPU | 11.492 | 11.750 | 11.231 | 11.651 | 11.890 |
| 7 | MAHULU | 7.653 | 8.008 | 7.524 | 7.802 | 8.215 |
| 8 | Balikpapan | 14.557 | 14.791 | 14.549 | 14.862 | 15.455 |
| 9 | Samarinda | 14.466 | 14.613 | 14.135 | 14.582 | 15.162 |
| 10 | Bontang | 16.698 | 16.843 | 16.278 | 16.765 | 17.327 |
| Kalimantan Timur | | 11.917 | 12.359 | 11.728 | 12.116 | 12.641 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun 2022, Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi kedua setelah Kalimantan Selatan. Serta perolehan komponen pengeluaran per kapita Kalimantan Timur masih berada di atas nasional. Capaian ini harus dipertahankan agar kesejahteraan masyarakat dapat terus terlihat peningkatannya dari sisi pendapatan rumah tangga.

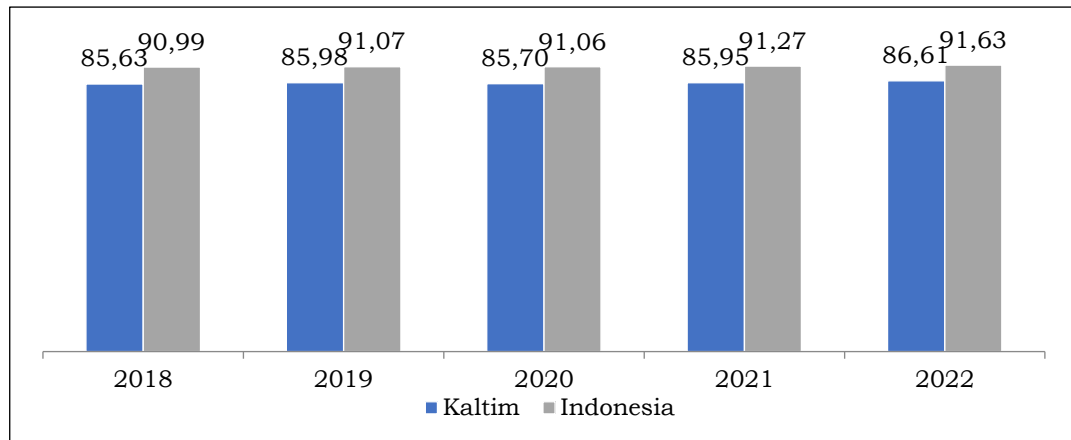


Gambar II.41
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribu Rupiah)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

G. Indeks Pembangunan Gender

Untuk dapat melihat pembangunan manusia yang dirinci menurut gender, United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan sebuah metode penghitungan Indeks Pembangunan Gender. Seiring dengan penggunaan metode baru di penghitungan IPM pada tahun 2010. Saat ini,

IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.



Gambar II.42
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 (tahun)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi di tahun 2022 sebesar 86,61. Dalam rumusan IPG, dilakukan formulasi menggunakan komponen IPM yang dipisahkan sesuai jenis kelamin, sehingga penurunan IPM akibat dampak COVID-19 akan berpengaruh pada penurunan IPG. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan mulai berkurangnya COVID-19 tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 86,61. Rendahnya Indeks Pembangunan Gender disebabkan oleh tingginya kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita Perempuan dibanding dengan laki-laki yaitu untuk Rata-Rata Lama Sekolah laki-laki tahun 2022 sebesar 10,24 tahun sedangkan perempuan 9,71 tahun, Adapun dari sisi pengeluaran perkapita untuk Laki-laki sebesar 19,22 juta rupiah sedangkan perempuan hanya 7,46 juta rupiah. Sehingga diperlukan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sekaligus keberhasilan strategi pembangunan berbasis gender yang bersifat multi program dan lintas sektor.

Tabel II.30
Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender

| No | Komponen | Laki-Laki | Perempuan |
|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Umur Harapan Hidup (Tahun) | 72,80 | 76,52 |
| 2 | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 13,81 | 13,92 |
| 3 | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | 10,24 | 9,71 |
| 4 | Pengeluaran Per Kapita (Juta Rp) | 19,22 | 7,46 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 89,76 sedangkan Paser memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 70,64 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

Tabel II.31
Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (tahun)

| No | Kab/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Paser | 70,64 | 71,41 | 71,15 | 71,19 | 71,98 |
| 2 | KUBAR | 83,52 | 83,84 | 83,87 | 84,28 | 84,62 |
| 3 | KUKAR | 78,83 | 79,14 | 78,90 | 79,12 | 79,80 |
| 4 | KUTIM | 76,03 | 76,51 | 76,26 | 76,40 | 77,11 |
| 5 | Berau | 87,92 | 87,93 | 87,61 | 87,76 | 87,76 |
| 6 | PPU | 86,34 | 86,22 | 86,39 | 86,57 | 86,83 |
| 7 | MAHULU | 80,18 | 80,89 | 80,98 | 81,65 | 82,32 |
| 8 | Balikpapan | 89,76 | 89,71 | 89,65 | 89,83 | 89,96 |
| 9 | Samarinda | 89,42 | 89,41 | 89,27 | 89,27 | 89,75 |
| 10 | Bontang | 86,61 | 86,72 | 86,87 | 87,12 | 87,52 |
| Kalimantan Timur | | 85,63 | 85,98 | 85,70 | 85,95 | 86,61 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

H. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel II.32
Indeks Pemberdayaan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (tahun)

| No | KAB/KOTA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Paser | 62,76 | 66,20 | 65,66 | 65,67 | 64,94 |
| 2 | KUBAR | 63,68 | 61,14 | 60,60 | 65,34 | 66,01 |
| 3 | KUKAR | 56,44 | 63,74 | 61,43 | 62,76 | 63,40 |
| 4 | KUTIM | 55,72 | 56,35 | 53,77 | 53,78 | 51,55 |
| 5 | Berau | 50,55 | 57,66 | 57,91 | 56,48 | 58,17 |
| 6 | PPU | 50,02 | 50,36 | 49,75 | 49,85 | 50,58 |
| 7 | MAHULU | 76,04 | 80,61 | 80,41 | 80,43 | 81,11 |
| 8 | Balikpapan | 66,33 | 69,11 | 68,97 | 68,62 | 69,27 |
| 9 | Samarinda | 69,61 | 66,29 | 70,65 | 67,54 | 68,63 |
| 10 | Bontang | 46,36 | 51,99 | 51,97 | 45,67 | 46,12 |
| Kalimantan Timur | | 57,53 | 65,65 | 65,54 | 66,64 | 66,89 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi dengan capaian 57,53 menjadi 65,65 di tahun 2019. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 65,54. Tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 66,89. Masih rendahnya indeks pemberdayaan gender di Kalimantan Timur disebabkan oleh keterlibatan perempuan di parlemen hanya 20,00 persen dan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 24,02 persen. Adapun persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional 49,78 persen.

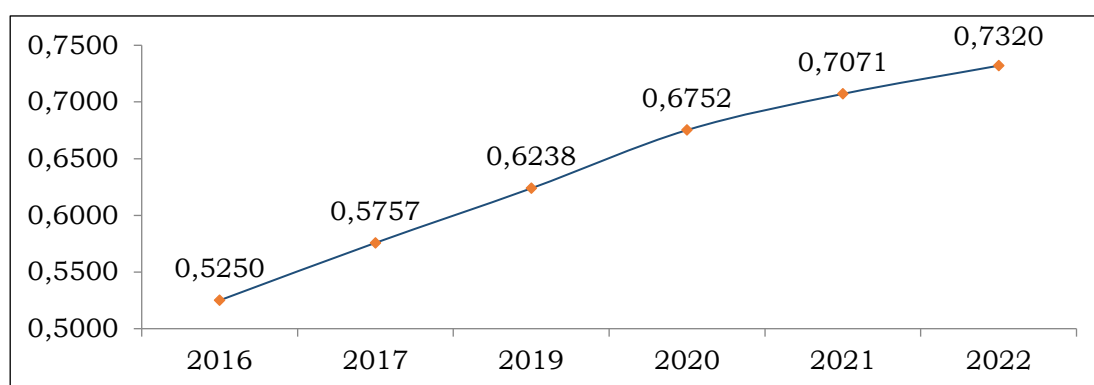
Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Mahulu memiliki Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 81,11 sedangkan Bontang memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 46,12 yang artinya bahwa di Kota Bontang memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

I. Indeks Desa Membangun

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan desa didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Capaian Indeks Desa Membangun merupakan cerminan status kemajuan dan kemandirian Desa, yang terbagi dalam Klasifikasi Status Desa yaitu Desa Mandiri ($IDM > 0.8155$), Desa Maju ($0.7072 < IDM \leq 0.8155$), Desa Berkembang ($0.5989 < IDM \leq 0.7072$), Desa Tertinggal ($0.4907 < IDM \leq 0.5989$) dan Desa Sangat Tertinggal ($IDM \leq 0.4907$).

Pada kurun waktu 5 tahun terakhir IDM Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dengan capaian terakhir pada tahun telah mencapai mencapai 0,7320. Capaian ini menempatkan Kalimantan Timur pada peringkat ke 8 diantara seluruh provinsi di Indonesia. Peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif bagi pemerataan dan pemberdayaan pembangunan hingga level administrasi terkecil di Kalimantan Timur.



Gambar II.43

Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016 - 2022

(Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2023)

Capaian IDM pada 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir seiring berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan dengan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat melalui dana desa dan bantuan keuangan spesifik ke seluruh desa. Capaian IDM terendah pada tahun 2022 terdapat pada Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 0,6646 dengan status Berkembang, dan capaian tertinggi pada Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai capaian sebesar 0,7769.

Tabel II.33

Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017 – 2022

| No | Kab/Kota | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Paser | 0,5856 | 0,6092 | 0,6664 | 0,7240 | 0,7500 |
| 2 | KUBAR | 0,5233 | 0,5900 | 0,6660 | 0,6953 | 0,7298 |
| 3 | KUKAR | 0,5815 | 0,6415 | 0,6846 | 0,7128 | 0,7465 |
| 4 | KUTIM | 0,6037 | 0,6378 | 0,6782 | 0,7119 | 0,7305 |
| 5 | Berau | 0,6097 | 0,6539 | 0,6999 | 0,7177 | 0,7261 |
| 6 | PPU | 0,6505 | 0,6905 | 0,7085 | 0,7340 | 0,7769 |
| 7 | MAHULU | 0,5352 | 0,5862 | 0,6181 | 0,6318 | 0,6646 |
| Kalimantan Timur | | 0,5757 | 0,6238 | 0,6752 | 0,7071 | 0,7320 |

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2023

Pada tahun 2022, dari 841 desa di Provinsi Kalimantan Timur yang tersebar di tujuh kabupaten tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal dan hanya tersisa 17 desa tertinggal yang tersebar di Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 8 desa, Kabupaten Kutai Barat sebanyak 6 desa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 2 desa dan Kabupaten Berau sebanyak 1 desa. Untuk mengurangi jumlah desa tertinggal di Kalimantan Timur, perlu upaya pemerintah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan desa terutama dalam meningkatkan pencapaian indeks ketahanan ekonomi yang masih rendah daripada 2 komponen lainnya.

Tabel II.34
Status Desa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

| No | Kab/Kota | Desa Mandiri | Desa Maju | Desa Berkembang | Desa Tertinggal | Desa Sangat Tertinggal |
|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1 | Paser | 17 | 76 | 46 | 0 | 0 |
| 2 | KUBAR | 32 | 75 | 77 | 6 | 0 |
| 3 | KUKAR | 46 | 73 | 74 | 0 | 0 |
| 4 | KUTIM | 18 | 61 | 58 | 2 | 0 |
| 5 | Berau | 11 | 41 | 47 | 1 | 0 |
| 6 | PPU | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | MAHULU | 0 | 8 | 34 | 8 | 0 |
| Kalimantan Timur | | 136 | 349 | 339 | 17 | 0 |

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2023

J. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pengembangan budaya dan seni di Kalimantan Timur ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 mencapai 52,49. Capaian IPK Kalimantan Timur berada diatas capaian IPK Nasional yaitu sebesar 51,90. Dari dimensi penilaian yang tercakup dalam IPK, Kalimantan Timur mendapatkan nilai di atas angka nasional, yaitu pada dimensi Ekonomi Budaya 29,65, Dimensi Pendidikan dengan nilai 72,20, dimensi Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai 72,46 dan dimensi budaya literasi dengan nilai 60,09.

Tabel II.35
Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

| Dimensi IPK | Provinsi | Nasional |
|-------------------------|----------|----------|
| Ekonomi Budaya | 29,65 | 20,69 |
| Pendidikan | 72,20 | 68,71 |
| Ketahanan Sosial Budaya | 72,46 | 66,83 |
| Warisan Budaya | 37,44 | 46,63 |

| Dimensi IPK | Provinsi | Nasional |
|-----------------|----------|----------|
| Ekspresi Budaya | 24,33 | 27,13 |
| Budaya Literasi | 60,09 | 54,29 |
| Gender | 55,88 | 58,55 |
| IPK | 52,49 | 51,90 |

Sumber: KEMENDIKBUD, 2022

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut, peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif dikarenakan capaian berada diatas capaian IPK nasional. Capaian ini patut diapresiasi dalam pengembangan budaya dan seni serta pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. Meskipun beberapa dimensi IPK terus mengalami peningkatan, namun masih diperlukan sinergi antar lembaga terkait di provinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

K. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menggambarkan kapasitas pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Pada Tahun 2017 IPP Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari 53,50 pada tahun 2017 menjadi 54,83 pada tahun 2020. Dengan capaian ini IPP Kalimantan Timur menduduki Peringkat 7 secara nasional meningkat dari tahun 2017. Semua capaian domain mengalami peningkatan, kecuali domain kesehatan dan kesejahteraan. Penurunan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan disebabkan oleh naiknya angka kehamilan remaja.

Tabel II.36
Domain Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Domain: Pendidikan | 73,33 | 73,33 | 73,33 | 73,33 | 76,67 |
| 1. Rata-Rata Lama Sekolah | 10,92 | 10,72 | 11,24 | 11,28 | 11,44 |
| 2. APK Sekolah Menengah | 95,52 | 94,35 | 93,00 | 93,96 | 93,85 |
| 3. APK Perguruan Tinggi | 35,58 | 35,64 | 37,78 | 39,16 | 40,21 |
| Domain: Kesehatan dan Kesejahteraan | 67,50 | 72,50 | 70,00 | 57,50 | 67,50 |
| 1. Angka Kesakitan Pemuda | 6,15 | 5,37 | 6,52 | 4,07 | 6,31 |
| 2. Pemuda Menjadi Korban Kejahatan | 1,37 | 0,93 | 1,37 | 1,67 | 0,23 |
| 3. Pemuda Merokok | 20,80 | 20,80 | 20,82 | 20,39 | 19,14 |
| 4. Remaja Perempuan Sedang Hamil | 7,99 | 7,99 | 2,52 | 25,55 | 26,88 |
| Domain: Lapangan dan Kesempatan Kerja | 40,00 | 35,00 | 45,00 | 50,00 | 35,00 |
| 1. Pemuda Berwirausaha Kerah Putih | 0,40 | 0,24 | 0,48 | 0,70 | 0,38 |
| 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda | 15,78 | 15,21 | 12,80 | 13,94 | 16,01 |
| Domain: Partisipasi dan Kepemimpinan | 40,00 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 30,00 |

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan | 77,25 | 70,55 | 70,55 | 70,55 | 50,56 |
| 2. Partisipasi Pemuda yang aktif dalam organisasi | 3,63 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,15 |
| 3. Pemuda Berpendapat Dalam Rapat | 6,21 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 2,62 |
| Domain: Gender dan Diskriminasi | 46,67 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 53,33 |
| 1. Angka Perkawinan Usia Anak | 13,90 | 11,54 | 12,36 | 11,79 | 8,64 |
| 2. Pemuda Perempuan Sedang Bersekolah Menengah dan Perguruan Tinggi | 44,83 | 44,39 | 46,10 | 45,88 | 46,76 |
| 3. Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal | 24,21 | 25,29 | 27,96 | 24,48 | 25,17 |
| Indeks Pembangunan Pemuda Kaltim | 53,50 | 54,83 | 56,33 | 54,83 | 52,50 |
| Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia | 49,33 | 51,50 | 52,67 | 51,00 | 53,33 |

Sumber: BAPPENAS, 2022

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Wajib

A. Pendidikan

Angka partisipasi sekolah (APS) di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur ternyata belum capai 100 persen, terbukti pada jenjang usia 16-18 tahun mengalami penurunan (81,43) tahun 2022, artinya Masih ada anak belum sepenuhnya mengenyam pendidikan formal bahkan pada tahun 2020 akibat pandemi Corona angkanya mengalami penurunan (81,88). Penyebab tersebut mungkin dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah). Untuk itu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan berdasarkan kewenangannya lebih memfokuskan/melaksanakan program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan ruang kelas baru SD, pembangunan SD, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, bantuan untuk siswa.

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 paling tinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, yakni sebesar 105,21. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 5,21 persen penduduk yang bukan golongan umur 7-12 tahun masih bersekolah ditingkat SD, ini hal disebabkan adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. sebenarnya wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang

sesungguhnya namun tidak memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas Pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang Pendidikan. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian. APM di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2022 mengalami peningkatan pada setiap jenjang Pendidikan terkecuali jenjang SLTA mengalami sedikit penurunan di tahun 2022. Peningkatan APM ini menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang Pendidikan yang harus diikuti terus bertambah dan menjadi penanda dari keningkatnya akses penduduk kelompok usia tersebut terhadap layanan Pendidikan di Kalimantan Timur. Namun, meskipun APM terus mengalami kenaikan, pemerintah tetap mendorong peningkatan yang lebih baik lagi melalui beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berupa pemberian bantuan operasional Pendidikan, bantuan bagi siswa miskin, pembangunan unit sekolah baru, pemerataan guru, dan sebagainya.

Tabel II.37
Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022

| Usia Sekolah | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Angka Partisipasi Sekolah | | | | | |
| 7-12 | 99,76 | 99,68 | 99,73 | 99,60 | 99,57 |
| 13-15 | 98,89 | 98,21 | 99,07 | 98,90 | 98,75 |
| 16-18 | 81,55 | 82,07 | 81,88 | 82,10 | 81,43 |
| Angka Partisipasi Kasar | | | | | |
| Jenjang Pendidikan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| SD | 108,02 | 106,84 | 105,75 | 105,26 | 105,21 |
| SLTP | 92,57 | 91,03 | 92,17 | 92,03 | 91,47 |
| SLTA | 96,08 | 94,96 | 95,23 | 95,52 | 95,09 |
| Angka Partisipasi Murni | | | | | |
| Jenjang Pendidikan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| SD | 98,40 | 98,41 | 98,44 | 98,36 | 98,45 |
| SLTP | 79,68 | 80,42 | 81,28 | 81,30 | 82,65 |
| SLTA | 68,43 | 68,55 | 69,00 | 69,29 | 69,10 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel II.38
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

| Tingkat Pendidikan | Jumlah Sekolah | Jumlah Murid | Jumlah Guru | Rasio Murid-Guru | Rasio Murid-Sekolah |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------|
| Sekolah Dasar (SD) | | | | | |
| Negeri | 1.652 | 347.886 | 22.323 | 15,58 | 210,84 |
| Swasta | 268 | 63.435 | 3.546 | 17,89 | 252,73 |
| MI | 133 | 30.179 | 2.194 | 13,76 | 226,91 |
| Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | | | | |
| Negeri | 453 | 127.778 | 8.593 | 14,87 | 285,86 |
| Swasta | 233 | 32.664 | 2.247 | 14,54 | 147,80 |
| MTs | 170 | 31.829 | 3.027 | 10,52 | 187,23 |
| Sekolah Menengah Atas (SMA) | | | | | |
| Negeri | 143 | 65.859 | 3.941 | 16,71 | 463,80 |
| Swasta | 90 | 12.905 | 963 | 13,40 | 150,06 |
| MA | 80 | 10.890 | 1.565 | 6,96 | 136,13 |
| Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | | | | | |
| Negeri | 87 | 65.859 | 3.941 | 16,71 | 463,80 |
| Swasta | 131 | 12.905 | 963 | 13,40 | 150,06 |

Sumber: Disdikbud dan Kemenag Kaltim, 2023

Pada tahun 2022, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Tabel II.39
Jumlah Satuan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur

| KABUPATEN/KOTA | SATUAN PENDIDIKAN | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------------|
| | SMA | | | SMK | | | SLB | | | TOTAL KESELURUHAN |
| | NEGERI | SWASTA | TOTAL | NEGERI | SWASTA | TOTAL | NEGERI | SWASTA | TOTAL | |
| Kab. Berau | 15 | 4 | 19 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| Kab. Kutai Barat | 17 | 5 | 22 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 37 |
| Kab. Kutai Kartanegara | 35 | 17 | 52 | 17 | 27 | 44 | 1 | 4 | 5 | 101 |
| Kab. Kutai Timur | 22 | 2 | 24 | 13 | 12 | 25 | 1 | 2 | 3 | 52 |
| Kab. Mahakam Ulu | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Kab. Paser | 13 | 4 | 17 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| Kab. Penajam Paser Utara | 7 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Kota Balikpapan | 9 | 19 | 28 | 6 | 27 | 33 | 1 | 3 | 4 | 65 |
| Kota Bontang | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 13 | 1 | 5 | 6 | 30 |
| Kota Samarinda | 18 | 25 | 43 | 22 | 29 | 51 | 2 | 9 | 11 | 105 |
| TOTAL | 143 | 90 | 233 | 87 | 131 | 218 | 11 | 23 | 34 | 485 |

Tabel II.40
Jumlah Peserta Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur

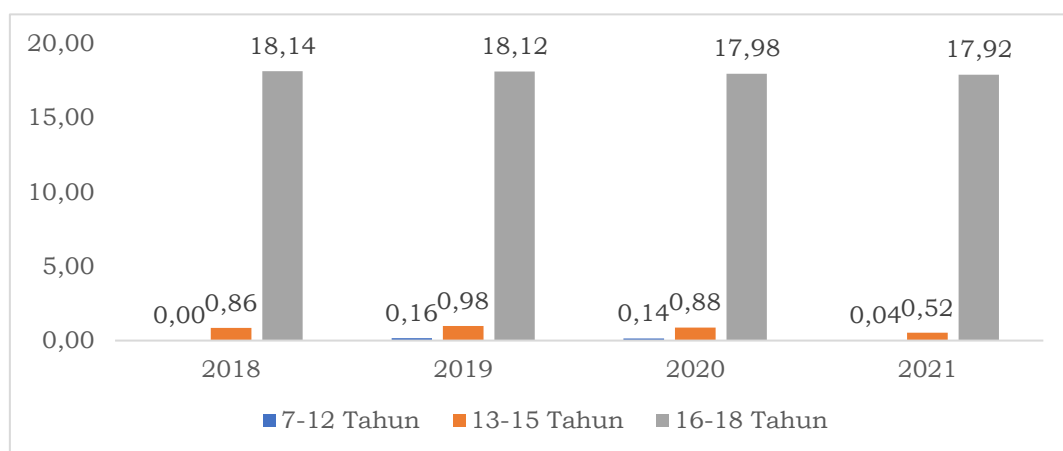
| KABUPATEN/KOTA | PESERTA DIDIK | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------------------|
| | SMA | | | SMK | | | SLB | | | TOTAL KESELURUHAN |
| | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | |
| Kab. Berau | 3445 | 3925 | 7370 | 2012 | 1468 | 3480 | 119 | 63 | 182 | 11032 |
| Kab. Kutai Barat | 2177 | 2366 | 4543 | 1784 | 1319 | 3103 | 76 | 35 | 111 | 7757 |
| Kab. Kutai Kartanegara | 7614 | 9194 | 16808 | 8594 | 5178 | 13772 | 227 | 106 | 333 | 30913 |
| Kab. Kutai Timur | 3269 | 4036 | 7305 | 4408 | 2880 | 7288 | 101 | 50 | 151 | 14744 |
| Kab. Mahakam Ulu | 654 | 611 | 1265 | 81 | 64 | 145 | 4 | 2 | 6 | 1416 |
| Kab. Paser | 2749 | 3072 | 5821 | 2697 | 1758 | 4455 | 41 | 25 | 66 | 10342 |
| Kab. Penajam Paser Utara | 1538 | 2243 | 3781 | 2542 | 1534 | 4076 | 73 | 39 | 112 | 7969 |
| Kota Balikpapan | 5023 | 7075 | 12098 | 10060 | 7333 | 17393 | 460 | 193 | 653 | 30144 |
| Kota Bontang | 1777 | 2744 | 4521 | 2748 | 1363 | 4111 | 172 | 58 | 230 | 8862 |
| Kota Samarinda | 7368 | 9524 | 16892 | 12538 | 10696 | 23234 | 459 | 268 | 727 | 40853 |
| TOTAL | 35614 | 44790 | 80404 | 47464 | 33593 | 81057 | 1732 | 839 | 2571 | 164032 |

Tabel II.41
Jumlah Guru di Provinsi Kalimantan Timur

| KABUPATEN/KOTA | GURU | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------------|
| | SMA | | | SMK | | | SLB | | | TOTAL KESELURUHAN |
| | NEGERI | SWASTA | TOTAL | NEGERI | SWASTA | TOTAL | NEGERI | SWASTA | TOTAL | |
| Kab. Berau | 392 | 61 | 453 | 205 | 84 | 289 | 17 | 0 | 17 | 759 |
| Kab. Kutai Barat | 357 | 25 | 382 | 184 | 78 | 262 | 15 | 0 | 15 | 659 |
| Kab. Kutai Kartanegara | 885 | 136 | 1021 | 479 | 375 | 854 | 31 | 19 | 50 | 1925 |
| Kab. Kutai Timur | 440 | 15 | 455 | 323 | 140 | 463 | 17 | 7 | 24 | 942 |
| Kab. Mahakam Ulu | 96 | 5 | 101 | 0 | 21 | 21 | 2 | 0 | 2 | 124 |
| Kab. Paser | 360 | 33 | 393 | 218 | 102 | 320 | 17 | 0 | 17 | 730 |
| Kab. Penajam Paser Utara | 192 | 26 | 218 | 220 | 64 | 284 | 11 | 0 | 11 | 513 |
| Kota Balikpapan | 467 | 221 | 688 | 492 | 392 | 884 | 44 | 35 | 79 | 1651 |
| Kota Bontang | 132 | 173 | 305 | 190 | 117 | 307 | 23 | 24 | 47 | 659 |
| Kota Samarinda | 682 | 279 | 961 | 1014 | 366 | 1380 | 66 | 62 | 128 | 2469 |
| TOTAL | 4003 | 974 | 4977 | 3325 | 1739 | 5064 | 243 | 147 | 390 | 10431 |

Selama beberapa tahun terakhir, Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya mengalami penurunan. Pada tahun 2021, Angka Putus Sekolah mengalami penurunan di seluruh kelompok usia sekolah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,10 poin untuk kelompok usia 7-12 tahun, kelompok usia 13,15 tahun turun 0,36 poin, dan untuk kelompok usia 16-18 tahun turun 0,06 poin.

Faktor penyebab putus sekolah antara lain karena masih kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan atau kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Kemiskinan sering kali menjadi alasan bagi siswa untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, faktor ekonomi sering kali memunculkan anggapan bahwa lebih baik bekerja untuk mendapatkan uang, dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan yang berimplikasi pada semakin besarnya pengeluaran yang harus dilakukan oleh rumah tangga.



Gambar II.44
Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2021 (persen)
(Sumber: BPS Kaltim, 2022)

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 54 perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2022, jumlah mahasiswa mencapai 96.091 dengan jumlah dosen sebanyak 4.424 orang.

B. Kesehatan

1) Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting

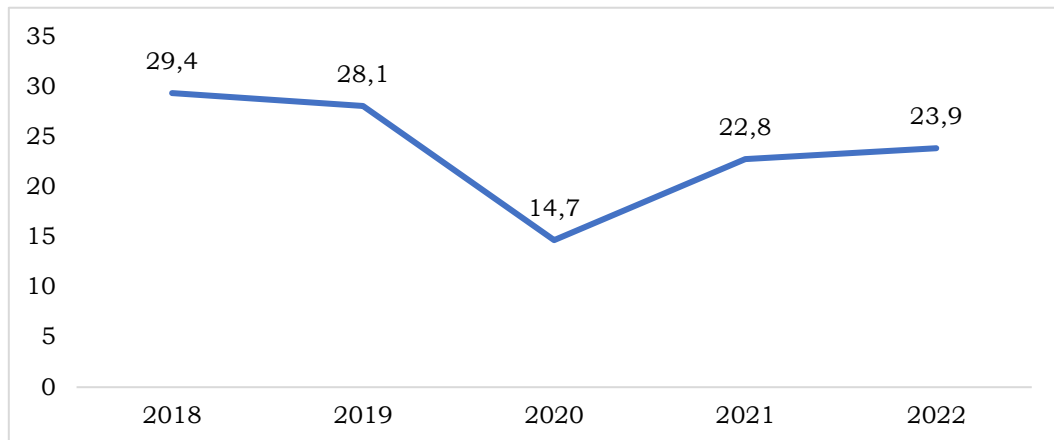
Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting masih tetap menjadi tantangan utama di sektor Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Trend Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2017–2018 sudah terjadi penurunan, namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kematian ibu. Sedangkan jumlah kematian bayi (0–11) bulan sudah mengalami penurunan.

Tabel II.42
Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Persen)

| No | Kab/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Paser | 27,50 | 32,20 | 15,50 | 23,60 | 24,90 |
| 2 | KUBAR | 30,00 | 35,70 | 16,60 | 15,80 | 23,10 |
| 3 | KUKAR | 35,70 | 36,50 | 14,30 | 26,40 | 27,10 |
| 4 | KUTIM | 30,50 | 39,40 | 16,10 | 27,50 | 24,70 |
| 5 | Berau | 31,70 | 24,70 | 17,60 | 25,70 | 21,60 |
| 6 | PPU | 31,60 | 27,00 | 11,40 | 27,30 | 21,80 |
| 7 | MAHULU | 32,80 | 36,60 | 9,60 | 20,30 | 14,80 |
| 8 | Balikpapan | 23,80 | 14,00 | 13,30 | 17,60 | 19,60 |
| 9 | Samarinda | 26,30 | 24,70 | 11,90 | 21,60 | 25,30 |
| 10 | Bontang | 26,60 | 29,00 | 20,90 | 26,30 | 21,00 |

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2023

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila dibandingkan dengan *Cut of Point* menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila <20 persen. Walau sempat turun tajam pada tahun 2020 menjadi 14,7, namun prevalensi stunting di Kalimantan Timur tahun 2021 dan 2022 cenderung meningkat mencapai 23,9. Angka ini diatas prevalensi stunting nasional yang mencapai 21,6. Secara regional, prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada urutan kedua terendah setelah Provinsi Kalimantan Utara. Rata-rata prevalensi stunting menurut kabupaten/kota pada tahun 2022 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali Kabupaten Mahakam Hulu dan Kota Balikpapan yang masing-masing mencapai 14,8 persen dan 19,6 persen.



Gambar II.45

Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 berdasarkan Hasil Survei SSGI
(Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2023)

Untuk wasting sendiri hasil SSGI Tahun 2022 menunjukkan Provinsi Kalimantan Timur mencapai 9,1. Angka ini lebih tinggi dibandingkan wasting nasional yang mencapai 7,7. Wasting di Kalimantan Timur dibandingkan daerah lain di Pulau Kalimantan berada pada posisi ketiga terendah setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Hal ini merupakan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur bagaimana agar semua balita yang ada dalam sasaran untuk dilakukan pengukuran setiap bulan agar terlihat data stunting dan wasting yang sebenarnya. Perlu adanya dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah terkait dalam rangka percepatan penurunan jumlah kematian ibu dan bayi dan stunting serta wasting di Provinsi Kalimantan Timur.

2) Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, upaya penambahan jumlah fasilitas kesehatan diwujudkan untuk mengoptimalkan dukungan pelayanan Kesehatan masyarakat. Terdapat penambahan sebanyak 15 Rumah Sakit Umum, 6 Rumah Sakit Swasta, 28 Puskesmas, sampai dengan bertambahnya 221 terlihat persebaran fasilitas Kesehatan di kabupaten kota sudah merata. Dengan jumlah 59 Rumah Sakit Umum dan Swasta di Kalimantan Timur pada tahun 2022, terdata pada Mahulu dan Bontang sudah memiliki 2 RS. Persebaran fasilitas kabupaten kota lainnya memiliki lebih dari jumlah tersebut. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 188 unit, setiap kabupaten kota setidaknya memiliki minimal 6 puskesmas yaitu pada Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Bontang. Selanjutnya jumlah pedagang besar farmasi

dan apotek secara kuantitas tersebar merata, sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di setiap kabupaten dan kota.

Tabel II.43
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

| No | Fasilitas Kesehatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|------------------------|------|------|------|------|
| 1 | Rumah Sakit Umum | 54 | 53 | 57 | 59 |
| 2 | Rumah Sakit Swasta | 19 | 19 | 22 | 22 |
| 3 | RS Bersalin | 15 | 9 | 7 | 10 |
| 4 | Puskesmas | 186 | 187 | 187 | 188 |
| 5 | Puskesmas Pembantu | 716 | 716 | 730 | 742 |
| 6 | Pedagang Besar Farmasi | 48 | 49 | 52 | 53 |
| 7 | Apotek | 637 | 704 | 759 | 745 |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Pada umumnya, jumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan atau tetap (puskesmas) jika dibandingkan dengan tahun 2021. Seluruh jenis fasilitas kesehatan mengalami penurunan, kecuali jumlah apotek meningkat dari 745 menjadi 826.

Tabel II.44
Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kabupaten Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

| No | Kabupaten/Kota | Fasilitas Kesehatan | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|------------|-----------|--------------------|------------------------|--------|
| | | RS. Umum | RS. Swasta | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Pedagang Besar Farmasi | Apotek |
| 1 | Paser | 2 | 0 | 19 | 123 | 0 | 38 |
| 2 | Kutai Barat | 2 | 1 | 19 | 84 | 0 | 36 |
| 3 | Kutai Kartanegara | 3 | 0 | 32 | 175 | 0 | 122 |
| 4 | Kutai Timur | 3 | 5 | 21 | 116 | 1 | 51 |
| 5 | Berau | 2 | 0 | 21 | 112 | 0 | 71 |
| 6 | Panajam Paser Utara | 2 | 0 | 11 | 43 | 0 | 34 |
| 7 | Mahakam Ulu | 2 | 0 | 6 | 30 | 0 | 6 |
| 8 | Balikpapan | 11 | 4 | 27 | 14 | 19 | 165 |
| 9 | Samarinda | 14 | 3 | 26 | 0 | 32 | 285 |
| 10 | Bontang | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 18 |
| JUMLAH | | 42 | 17 | 188 | 699 | 52 | 826 |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Terjaminnya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan setiap warga merupakan tanggung jawab Pemerintah. Fasilitas pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan baik secara promotif, preventif, dan kuratif demi mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang baik. Pelaksanaan pelayanan di bidang Kesehatan harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Tabel II.45
Jumlah Tenaga Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

| No | Fasilitas Kesehatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---------------------|-------|-------|-------|--------|
| 1 | Dokter Umum | 1.010 | 1.024 | 1.106 | 2.097 |
| 2 | Dokter Gigi | 309 | 314 | 320 | 411 |
| 3 | Dokter Spesialis | 503 | 597 | 649 | 768 |
| 4 | Perawat | 7.823 | 6.524 | 7.510 | 10.789 |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Hal utama selanjutnya yaitu pemenuhan tenaga Kesehatan yang mencukupi secara kualitas dan kuantitas yang adil dan merata di setiap wilayah. Pertambahan jumlah penduduk diikuti juga dengan penambahan jumlah sumber daya manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak 2017 sampai dengan 2022 penambahan Dokter umum bertambah 983 orang, Dokter gigi 91 orang, Dokter spesialis 90 orang, dan perawat sejumlah 4.127 orang. Persebaran tenaga Kesehatan di Kabupaten Kota sudah merata walaupun perlu di akurasi sampai pada kebutuhan di tingkat kecamatan. Dengan jumlah 11.976 tenaga Kesehatan utama pada tahun 2022, yang terdiri dari Dokter umum, Dokter gigi, Dokter Spesialis dan Perawat menggambarkan persebaran tenaga kesehatan di kabupaten/kota upaya pemenuhan pelayanan pada masyarakat sudah terpenuhi.

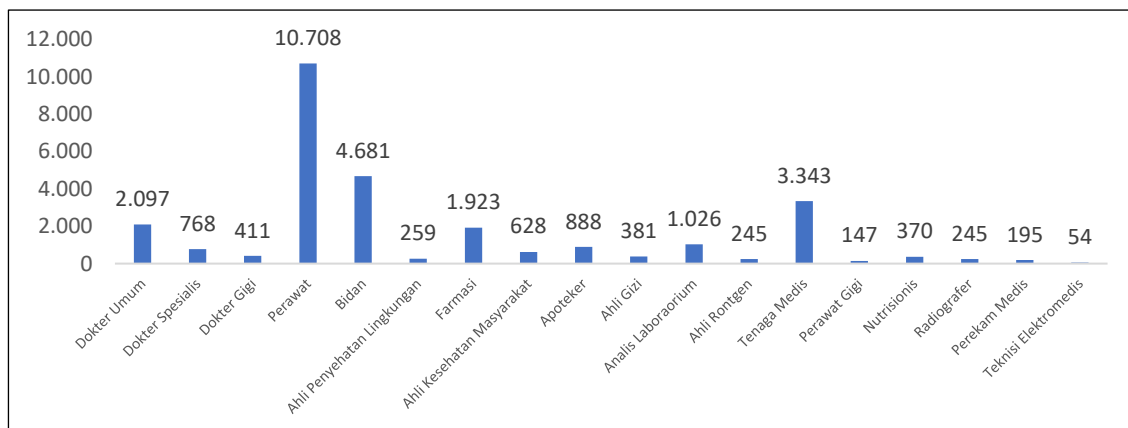
Tabel II.46
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

| No | Kabupaten/Kota | Fasilitas Kesehatan | | | |
|----|-------------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| | | Dokter Umum | Dokter Gigi | Dokter Spesialis | Perawat |
| 1 | Paser | 61 | 23 | 32 | 543 |
| 2 | Kutai Barat | 62 | 16 | 18 | 611 |
| 3 | Kutai Kartanegara | 111 | 33 | 68 | 1.096 |
| 4 | Kutai Timur | 113 | 34 | 50 | 858 |

| No | Kabupaten/Kota | Fasilitas Kesehatan | | | |
|--------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| | | Dokter Umum | Dokter Gigi | Dokter Spesialis | Perawat |
| 5 | Berau | 108 | 23 | 25 | 665 |
| 6 | Panajam Paser Utara | 39 | 13 | 23 | 287 |
| 7 | Mahakam Ulu | 24 | 2 | 1 | 211 |
| 8 | Balikpapan | 368 | 89 | 393 | 1.974 |
| 9 | Samarinda | 305 | 112 | 302 | 2.438 |
| 10 | Bontang | 163 | 35 | 104 | 763 |
| JUMLAH | | 1.354 | 380 | 1.016 | 9.226 |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Dalam upaya percepatan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mutlak diperlukan, sejumlah upaya telah dilakukan dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan atau Rumah Sakit diantaranya pemenuhan tenaga kesehatan melalui Program Nusantara sehat, Program Intersip Dokter Indonesia (PIDI), Program Pemberdayaan Dokter Spesialis (Dokter Spesialis yang baru selesai tugas belajar) ataupun juga dengan Institusi Pendidikan kesehatan untuk penempatan tenaga residen.



Gambar II.46

Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

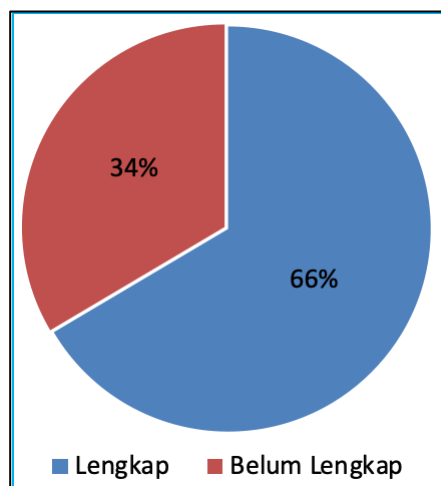
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022)

Tabel II.47
Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas

| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas | Lengkap | Belum Lengkap | % Pemenuhan |
|--------|---------------------|------------------|---------|---------------|-------------|
| 1 | Paser | 19 | 17 | 2 | 89.47 |
| 2 | Kutai Barat | 19 | 4 | 15 | 21.05 |
| 3 | Kutai Kartanegara | 32 | 22 | 10 | 68.75 |
| 4 | Kutai Timur | 21 | 7 | 14 | 33.33 |
| 5 | Berau | 21 | 15 | 6 | 71.43 |
| 6 | Penajam Paser Utara | 11 | 5 | 6 | 45.45 |
| 7 | Mahakam Hulu | 6 | 1 | 5 | 16.67 |
| 8 | Kota Balikpapan | 27 | 26 | 1 | 96.30 |
| 9 | Kota Samarinda | 26 | 22 | 4 | 84.62 |
| 10 | Kota Bontang | 6 | 6 | 0 | 100.00 |
| Jumlah | | 188 | 125 | 63 | |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 53 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaganya.



Gambar II.47
Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022)

Pemenuhan Tenaga Kesehatan terus dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebesar 55 persen RSUD di Provinsi Kalimantan Timur telah terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang dengan jumlah 9 RSUD yang belum terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang.

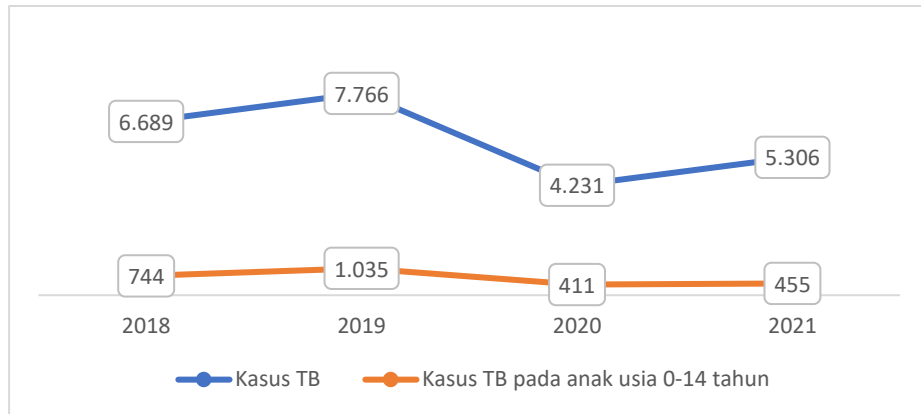
Tabel II.48
Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang Provinsi Kalimantan Timur

| No. | Kab/Kota | Milik | Tipe | Nama Fasyankes | Medik SPES Dasar | | | | Medik SPES Penunjang | | |
|-----|-------------------------------|----------|------|----------------------------------|------------------|------|-------|-------|----------------------|-------|--------|
| | | | | | Sp.A | Sp.B | Sp.OG | Sp.PD | Sp.An | SP.PK | Sp.Rad |
| 1. | Kabupaten Berau | Kab/Kota | RSUD | RSUD Talisayan | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | Kab/Kota | RSUD | RSUD Dr. Abd. Rival berau | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Kota Balikpapan | Kab/Kota | RSUD | RSUD Balikpapan | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| 3. | Kota Bontang | Kab/Kota | RSUD | RSUD Taman Husada | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4. | Kota Samarinda | Kab/Kota | RSUD | RSUD Inche Abdoel Moeis | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 5. | Kabupaten Kutai Barat | Kab/Kota | RSUD | RSUD Harapan Insan Sendawar | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 6. | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kab/Kota | RSUD | RSUD AM Parikesit Tenggarong | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| | | Kab/Kota | RSUD | RSUD Dayaku Raja | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | | Kab/Kota | RSUD | RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Kabupaten Kutai Timur | Kab/Kota | RSUD | RSUD Sangkuliran g | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| | | Kab/Kota | RSUD | RSUD Kudungga | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8. | Kabupaten Paser | Kab/Kota | RSUD | RSUD Panglima Sebaya | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| | | Kab/Kota | RSUD | RSUD Kerang | | | 1 | | | | |
| 9. | Kabupaten Penajam Paser Utara | Kab/Kota | RSUD | RSUD Sepaku | 1 | | 1 | | | | |
| | | Kab/Kota | RSUD | RSUD Ratu Aji Putri Botung | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

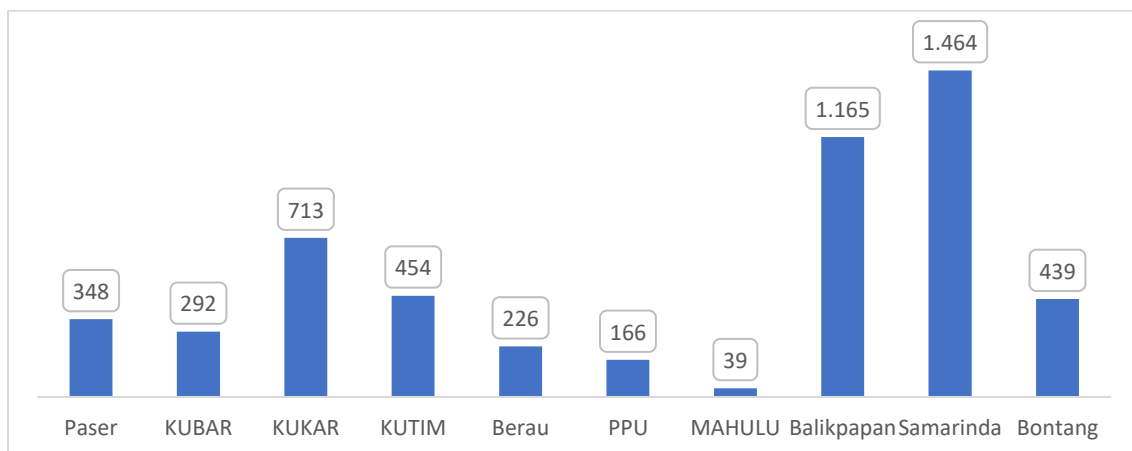
3) Penyakit menular

Salah satu penyakit menular yang saat ini menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah penyakit Tuberkulosis (TBC) atau TB, hal ini dikarenakan jumlah kasus TBC dan Jumlah kematian selama pengobatan Tuberkulosis tinggi dan meningkat di setiap tahunnya.



Gambar II.48
Kasus TB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021
(Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Kaltim, 2022)

Jumlah kasus TB mengalami peningkatan di tahun 2017 – 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 akan tetapi pada tahun 2021 meningkat kembali hingga mencapai 5.306 kasus sama halnya juga dengan kasus TB pada anak usia 0-14 tahun sedikit mengalami peningkatan tahun 2021 mencapai 455 kasus.



Gambar II.49
Jumlah Kasus TB menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021
(Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Kaltim, 2022)

Kota Samarinda, Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara berada di urutan tertinggi untuk kasus TB, hal ini juga terkait dengan lebih

banyak fasilitas Kesehatan yang aktif melapor dan besarnya jumlah penduduk di ketiga wilayah tersebut.

Tabel II.49
Jumlah Kasus Penyakit Menular Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018 - 2021

| No | Penyakit/Kasus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|-------|-------|-------|-------|
| 1. | CNR Seluruh Kasus TBC (Per 100.000 Penduduk Kalimantan Timur) | 176 | 206 | 123 | 140 |
| 2. | Jumlah Kematian selama Pengobatan Tuberkulosis (Kab/Kota) | 191 | 207 | 210 | 281 |
| 3. | Jumlah Kasus HIV (Kab/Kota) | 1,512 | 1,355 | 1,023 | 1,143 |
| 4. | Jumlah Kasus Baru AIDS (Kab/Kota) | 420 | 319 | 179 | 374 |
| 5. | Jumlah Kematian akibat AIDS (Kab/Kota) | 154 | 32 | 24 | 46 |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

TBC (Tuberkulosis) yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis*. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah.

Tabel II.50
Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2021

| No | Penyakit/Kasus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Kab/Kota) | 207.231 | 239.736 | 245.676 | 206.848 |
| 2. | Deteksi Dini Kanker (Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini Iva & Sadanis*) | 122 | 151 | 110 | 130 |

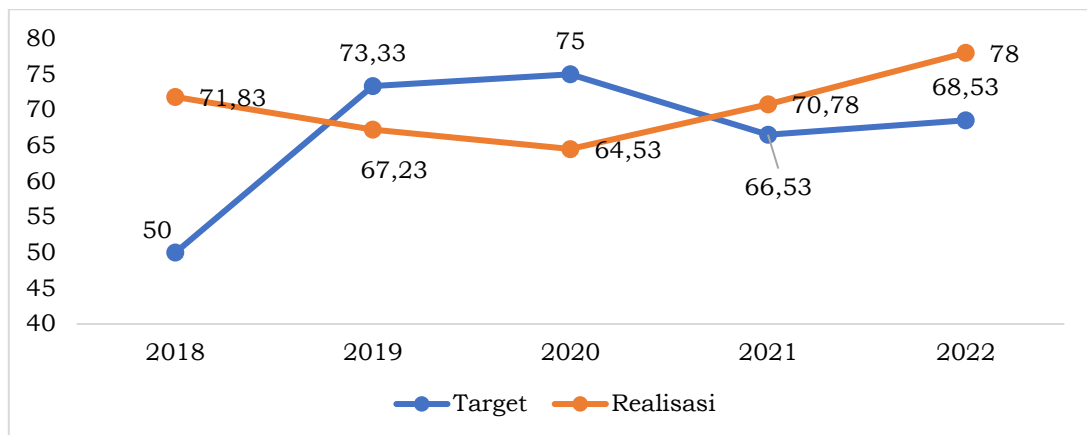
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Air Minum

Selain upaya pencapaian target SPM air minum (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal), Kalimantan Timur memiliki target pemenuhan kebutuhan akses air minum layak. Akses air minum layak merupakan kemudahan/kemampuan penduduk memperoleh kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari dari

sumber terlindungi baik dari jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Persentase akses air minum layak merupakan rasio antara jumlah penduduk yang telah memperoleh suplai air minum dengan total jumlah penduduk. Dalam 5 tahun terakhir, capaian akses air minum layak menunjukkan kinerja yang baik. Walaupun target tidak tercapai pada awal dan pertengahan tahun perencanaan (2019-2020), namun sejak tahun 2021, realisasi pemenuhan akses air minum layak telah melampaui target yang ditetapkan. Grafik target dan realisasi direpresentasikan pada gambar dibawah ini.



Gambar II.50

Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak 2018-2022 (%)

(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim 2023 – Web SPM, 2022)

Angka capaian merupakan agregat dari pencapaian 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur (tabel II. 42). Seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki capaian di atas 50% kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara yang aksesnya baru mencapai 30.90%. Sementara capaian tertinggi berada di Kota Balikpapan. Walaupun secara cakupan Kalimantan Timur menunjukkan layanan yang baik, perhatian perlu diberikan pada aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku. Hampir seluruh area perkotaan, terutama tiga Pusat Kegiatan Nasional (PKN) utama, memiliki cakupan di atas 80%. Sayangnya, suplai air baku yang mendukung tingginya capaian ini masih berasal dari air tanah, terutama di Kota Bontang dan Balikpapan. Kondisi ini dapat dikatakan tidak ideal dan tidak berkelanjutan. Sehingga diperlukan upaya untuk menyediakan air baku yang memenuhi standar keandalan, yakni bersumber dari air permukaan.

Tabel II.51
Capaian Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota 2022

| No | Kabupaten/Kota | Air minum layak (%) |
|----------|---------------------|---------------------|
| 1 | Balikpapan | 99.25 |
| 2 | Penajam Paser Utara | 30.90 |
| 3 | Paser | 70.14 |
| 4 | Bontang | 83.55 |
| 5 | Kutai Timur | 51.73 |
| 6 | Berau | 82.16 |
| 7 | Samarinda | 87.27 |
| 8 | Kutai Kartanegara | 72.85 |
| 9 | Kutai Barat | 86.02 |
| 10 | Mahakam Ulu | 66.06 |
| Provinsi | | 78.00 |

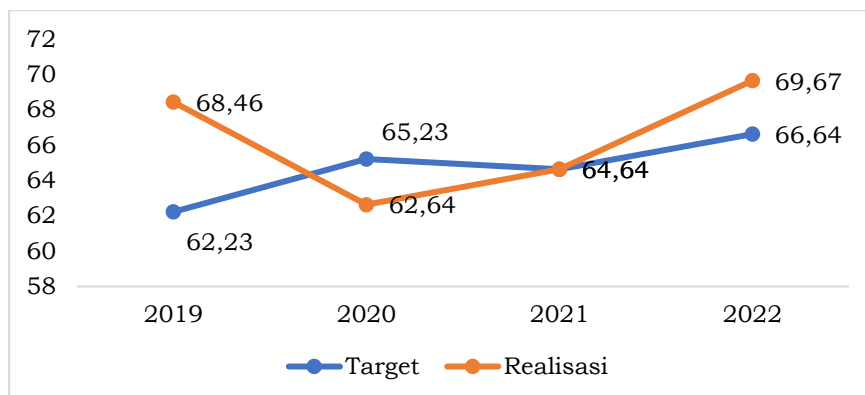
Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023

Dari sisi kualitas air yang digunakan oleh masyarakat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Data Susenas Kor (Maret 2022) menunjukkan bahwa terdapat 17.118 Rumah Tangga di Kaltim (1,3%) yang sumber air minumnya berasal dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak terlindung. Sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Sementara untuk keperluan domestik lainnya (memasak, mandi, mencuci, dll), terdapat sekitar 5.55% Rumah Tangga yang menggunakan air dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak terlindung dan sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Hal ini mengartikan bahwa terdapat penduduk yang sumber air bersihnya memiliki potensi terkontaminasi dengan air buangan/limbah domestik (termasuk tangki septik). Kondisi ini dapat membawa resiko negatif bagi kesehatan karena masyarakat berpotensi terpapar bakteri dari buangan air limbah.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target akses air minum layak secara nasional adalah 100% pada tahun 2024. Hingga tahun 2022, capaian air minum layak di Kaltim baru mencapai 78% (tabel II. 52). Oleh karena itu, masih terdapat gap yang cukup besar antara capaian Kalimantan Timur dengan target nasional. Pemerintah Provinsi tidak dapat sepenuhnya mengejar target tersebut mengingat kewenangan pemerintah provinsi terbatas pada suplai air baku untuk air minum pada cakupan regional atau

lintas kabupaten/kota. Dari 841 desa & kelurahan yang ada di Kaltim, rencana SPAM regional diperkirakan hanya mampu mensuplai air minum curah untuk kurang lebih 260 desa/kelurahan. Oleh karena itu, untuk mencapai target 100% cakupan layanan, diperlukan strategi penanganan khusus, salah satunya melalui mekanisme bantuan keuangan. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terutama untuk kompilasi data capaian di setiap kabupaten/Kota yang akan diagregat menjadi capaian provinsi.

Capaian layanan air minum layak melalui sistem perpipaan telah diterima oleh 69.67% dari jumlah penduduk Kaltim (Gambar II. 52) . Nilai ini adalah angka layanan baik sistem perpipaan PDAM maupun non-PDAM. Dalam konteks capaian berdasarkan dokumen RPJMD Kaltim 2019 – 2023, capaian air minum layak perpipaan tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan, yakni sebesar 66,64%. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, air minum layak perpipaan di Kaltim ditargetkan mencapai 71.75% pada tahun 2024, sehingga terdapat *gap* antara target nasional dengan kondisi saat ini, yakni berkisar 2.77%.



Gambar II.51

Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Perpipaan Kaltim

(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim 2023 – Web SPM, 2022)

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Penanganan atau upaya penyediaan infrastruktur air limbah oleh provinsi yang dilakukan hingga saat ini belum secara langsung memperlihatkan manfaat/dampak yang nyata terkait pencapaian SPM air limbah skala provinsi. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan bimbingan teknis sektor air limbah serta pemberian pendampingan untuk implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Tahun 2022, pendampingan dilakukan untuk Kota

Samarinda dan Kabupaten Berau sementara tahun 2023, pendampingan akan dilakukan untuk Kabupaten Paser, Mahulu, dan Kota Bontang. Nilai capaian sektor sanitasi yang digunakan sebagai indikator merupakan nilai capaian agregat 10 Kabupaten/Kota. Pada dimensi layak, sudah 81,79% penduduk mendapat layanan sanitasi. Namun, capaian masih sangat minim pada dimensi aman, yakni baru mencapai kurang dari 5%.

Tabel II.52
Capaian Sektor Air Limbah 2022

| Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Air Limbah | |
|---------------------|------------------------|------------|----------|
| | | Layak (%) | Aman (%) |
| Balikpapan | 718.423 | 91,40 | 9,18 |
| Penajam Paser Utara | 186.801 | 95,68 | 3,70 |
| Paser | 288.225 | 71,24 | 0,71 |
| Bontang | 185.928 | 94,93 | 7,63 |
| Kutai Timur | 424.743 | 89,10 | 2,70 |
| Berau | 263.150 | 88,45 | 3,35 |
| Samarinda | 838.935 | 78,02 | 7,95 |
| Kutai Kartanegara | 753.862 | 75,02 | 0,32 |
| Kutai Barat | 170.871 | 59,82 | 1,59 |
| Mahakam Ulu | 35.274 | 52,50 | 2,91 |
| Kaltim 2022 | 3.866.212 | 81,79 | 4,71 |

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022. Agregasi capaian Kabupaten/ Kota

Walaupun belum mencapai kondisi ideal dan masih jauh dari kondisi aman, secara nasional Kaltim memperlihatkan kemajuan penanganan sanitasi yang baik, terutama dari sisi tempat pembuangan tinja. Pada tahun 2022 (Maret), hampir seluruh Rumah Tangga di Kaltim atau 92,83 persen terlayani oleh tangki septik. Kondisi ini sudah berada di atas rata-rata nasional yakni 82,56 persen. Walaupun secara persentase terlihat baik, angka absolut untuk Rumah Tangga yang membutuhkan perhatian dapat dikatakan cukup signifikan. Pada tahun 2021, terdapat 75.956 Rumah Tangga yang masih membuang tinja secara langsung ke berbagai obyek geografis lingkungan alam, seperti kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun/dan lainnya.

3) Jalan Dalam Kondisi Mantap

Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana jaringan jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2022 mencapai 693,86 km atau 77,52 persen. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 284,86 km, kondisi sedang 409,00 km,

kondisi rusak ringan 104,81 km, dan kondisi rusak berat 96,42 km. Sedangkan jaringan jalan nasional sepanjang 1.710,96 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2021 mencapai 1.409,94 km atau 82,40 persen. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 305,83 Km, kondisi sedang 1.104,11 Km, kondisi rusak ringan 223,89 Km, dan kondisi rusak berat 77,12 Km.

Tabel II.53
Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan (km)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

| No | Status | Panjang (Km) | Aspal | Kerikil | Tanah | Lainnya |
|----|----------|--------------|----------|---------|-------|---------|
| 1 | Nasional | 1.710,96 | 1.428,99 | 16,25 | 0 | 265,72 |
| 2 | Provinsi | 895,09 | 465,29 | 127,59 | 27,17 | 275,04 |

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023

Data jalan kewenangan provinsi pada Tahun 2022 menunjukkan cukup besarnya rasio jalan yang dalam kondisi rusak sedang dan berat. Kondisi ini membutuhkan perhatian untuk pemeliharaan, sehingga dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan.

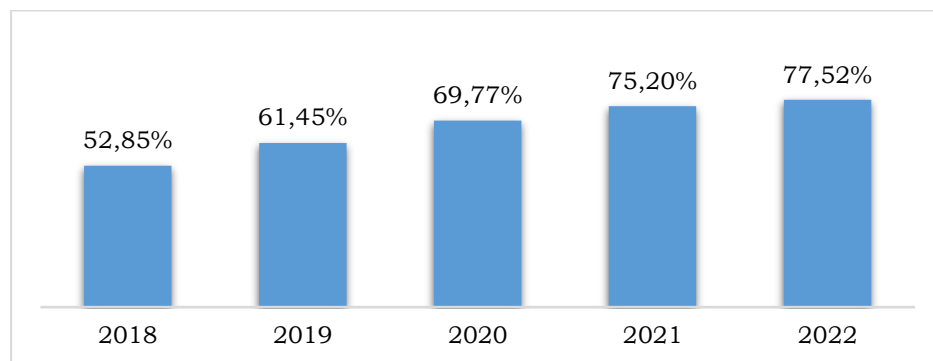
Tabel II.54
Rasio Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

| No | Status | Baik | Sedang | Rusak Sedang | Rusak Berat |
|-------|----------------|----------|----------|--------------|-------------|
| 1 | Nasional | 305,83 | 1.104,11 | 223,89 | 77,12 |
| 2 | Provinsi | 284,86 | 409,00 | 104,81 | 96,42 |
| 3 | Kabupaten/Kota | 6.859,70 | 2.265,13 | 2.035,89 | 2.355,49 |
| TOTAL | | 7.450,39 | 3.778,24 | 2.364,59 | 2.529,03 |

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023

Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 yang hanya mencapai 473,05 km, meningkat 220,81 km sehingga pada tahun 2022 telah mencapai 693,86 km. faktor pendorong yang membuat capaian jalan mantap bertambah setiap tahunnya adalah pemeliharaan jalan provinsi oleh UPTD Pemeliharaan Dinas PUPR PERA untuk menjaga kemantapan jalan dan alokasi pendanaan untuk rekonstruksi jalan yang bertambah setiap tahunnya untuk menambah proporsi jalan mantap yang ada di Provinsi Kaltim. Lokus penanganan jalan untuk meningkatkan persentase jalan mantap adalah ruas-ruas jalan provinsi yang mendukung sektor perekonomian seperti ruas jalan Tanjung Redeb-Talisayan yang

mendukung Pariwisata dan ruas jalan Patung Lembuswana – Sebulu yang mendukung Pertanian.



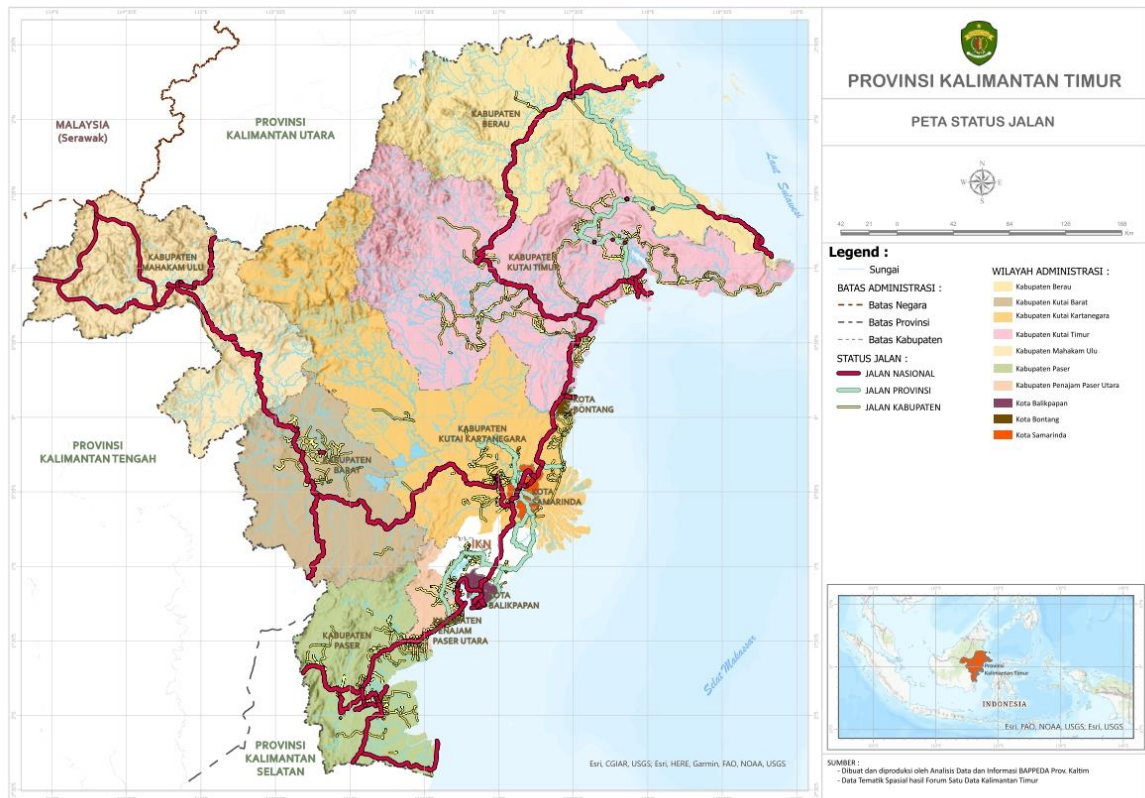
Gambar II.52

Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2019-2022

(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022)

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada salah satu permasalahan yaitu rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 149,19 km/1.000 km² (terdapat jalan sepanjang 149,19 km di dalam wilayah seluas 1000 km²) masih di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km². Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Penyebaran penduduk yang tidak merata masih dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berbukit dan bergunung;
- 2) Permasalahan penyediaan lahan pembangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Keterbatasan alokasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
- 4) Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
- 5) Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
- 6) Pengendalian batas maksimal muatan barang yang sesuai kelas jalan belum optimal; dan
- 7) Pembangunan jalan belum sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai jalan arteri dan kolektor



Gambar II.53
Peta Jalan Menurut Status Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

4) Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air memiliki 5 dimensi kebijakan dan strategi, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dimensi pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air masih perlu mendapatkan perhatian. Pada dimensi pendayagunaan air aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius penyediaan kapasitas air baku.

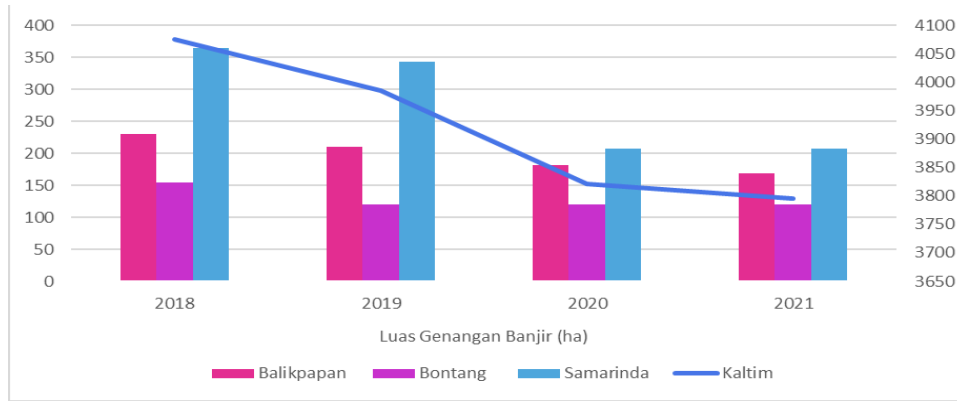
Kondisi eksisting penyediaan kapasitas air baku saat ini adalah sebesar 7.922 liter/detik. Hal ini masih jauh dari kebutuhan air baku yang diharapkan, kondisi ini terjadi dikarenakan kegiatan pembangunan Bendungan Marangkayu dan Sukarahmat yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air baku di Kota Bontang terkendala dalam pelaksanaannya yaitu pembebasan lahan, tumpang tindih dengan HGU, dan lokasi bendungan yang berada di kawasan lindung.

Pemenuhan kebutuhan air baku masih perlu untuk ditetapkan menjadi prioritas daerah, utamanya pada Kota Balikpapan dan Kota Bontang yang masih sangat bergantung pada penggunaan air tanah. Pemenuhan air baku dengan mengandalkan air permukaan sangat diperlukan untuk jangka

panjang, sementara untuk pemenuhan air baku untuk jangka pendek masih tetap mengandalkan penggunaan air tanah dengan pembangunan sumur dalam. Penambahan kapasitas air baku juga dianggap sangat penting, terutama dengan ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Dengan penetapan IKN di Kalimantan Timur maka diperkirakan akan terjadi peningkatan kebutuhan air baku sebagai konsekuensi dari pertambahan penduduk dan tumbuhnya kegiatan ekonomi baru dalam mendukung IKN.

Pada dimensi pengendalian daya rusak air, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pengurangan luas genangan banjir dan penanganan pantai kritis. Permasalahan banjir di Kalimantan Timur terjadi secara simultan, baik karena faktor alam maupun manusia. Faktor alam terutama disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kondisi topografi, pasang surut dan kondisi geografis DAS yang luas. Sedangkan factor manusia disebabkan oleh daerah tangkapan air (DTA) yang berubah fungsi, pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah hulu sungai serta sistem drainase yang tidak tertata dan berfungsi dengan baik. Hampir semua kota di Kalimantan Timur mengalami permasalahan banjir.

Penanganan banjir diprioritaskan pada wilayah perkotaan, yakni Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang. 3 Kota tersebut ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Timur yang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur. Luas genangan banjir Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang dalam 4 tahun terakhir mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar II.46, capaian kinerja pengurangan luas genangan banjir selalu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Namun demikian kendala yang dihadapi dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan pembebasan lahan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem pengendali luapan air sungai, adanya utilitas terbangun (jalur pipa PDAM, Listrik, Telekomunikasi dan kabel optik), lokasi penanganan banjir yang merupakan daerah padat penduduk, serta faktor cuaca yang tidak menentu. Selain permasalahan tersebut, banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum optimal.



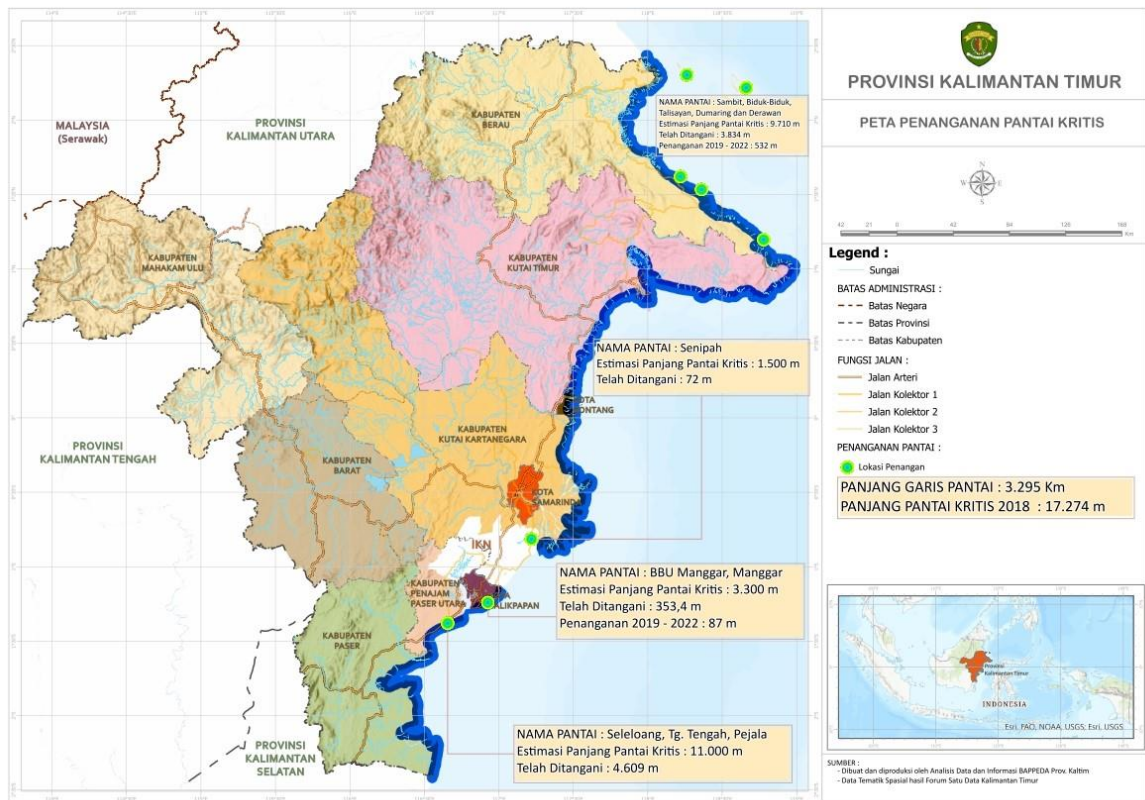
Gambar II.54
Luas Genangan Banjir 3 Kota Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2021 (Ha)
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menurunkan luas genangan banjir seluas 279 Ha dalam kurun waktu 4 tahun. Meskipun capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan, namun penanganan banjir masih perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat pada awal periode RPJMD (Tahun 2018) Provinsi Kalimantan Timur, luas genangan banjir masih 4.075 Ha yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur mempunyai garis pantai sepanjang 3.925 Km yang terbentang dari Kabupaten Berau di bagian Utara dan Kabupaten Paser di wilayah Selatan. Dengan garis pantai yang sangat panjang maka potensi terjadinya pengikisan akibat gelombang dan arus laut yang bersifat destruktif atau merusak menjadi cukup tinggi. Sementara pembangunan infrastruktur pengaman pantai masih rendah capaiannya, tidak berbanding lurus dengan panjang pantai kritis yang ada. Berdasarkan data perhitungan tahun 2019 terdapat 13.600 meter pantai kritis yang berada di dalam WS. Kewenangan Provinsi (Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau), sementara itu pembangunan infrastruktur pengaman pantai sampai dengan tahun 2022, baru mencapai 455 meter. Sehingga kedepannya penanganan pantai kritis harus dilanjutkan setiap tahunnya, agar dapat meminimalisir daya rusak air terhadap pantai. Namun penanganan kedepan perlu juga dipikirkan penanganan alternatif selain pembangunan fisik seperti konservasi/vegetasi.

Berdasarkan hasil laporan capaian terhadap Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abasi, erosi, dan akresi yang

terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi tahun 2021 sebesar 35,29% dan tahun 2022 sebesar 46,47%.



Gambar II.55
Penanganan Pantai Kritis
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022)

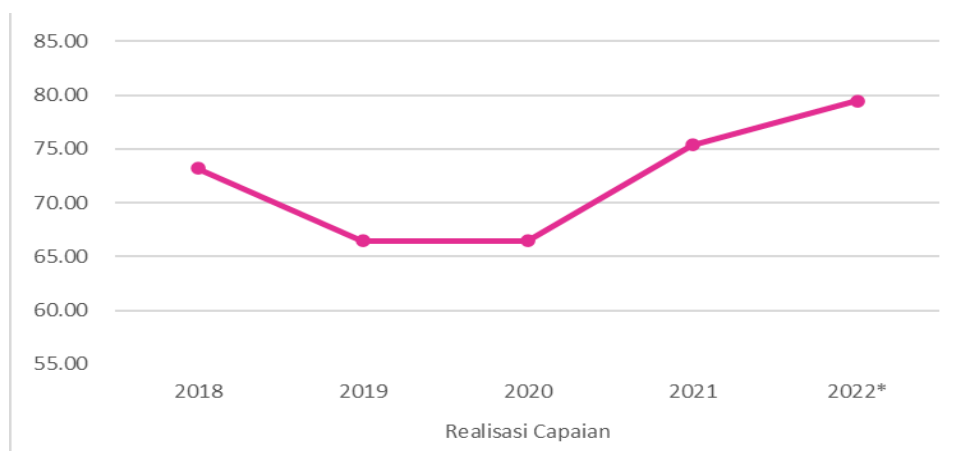
Pengelolaan pantai dan penanganan pantai kritis menjadi elemen yang sangat penting dalam pengelolaan daerah pesisir yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung kemandirian dan pertumbuhan perkonomian berbasis non migas. Pantai merupakan potensi pariwisata yang menjadi salah satu andalan Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Kabupaten Berau menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), khususnya Pulau Derawan yang mengedepankan pembangunan di sektor pariwisata. Penanganan pantai juga dilaksanakan dalam rangka mendukung masyarakat pesisir dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, yang mayoritas bergantung pada pemanfaatan hasil laut.

5) Penataan Ruang

Dalam perwujudan penyelenggaraan penataan ruang, skoring penyelenggaraan penataan ruang menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan kinerja penataan ruang. Realisasi capaian kinerja skoring

penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2019 sebesar 66.46% dan capaian yang sama pada tahun 2020.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Kawasan Strategis Provinsi tidak lagi ditetapkan dengan Perda RRTR melainkan menjadi bagian dari substansi Perda RTRW itu sendiri, sehingga hal ini mempengaruhi indikator pada aspek pelaksanaan penataan ruang. Sehingga, pada tahun 2021 dan 2022, terdapat peningkatan skoring menjadi 75,38 persen dan 78,57 persen dikarenakan progress revisi RTRWP telah berjalan sesuai dengan target.



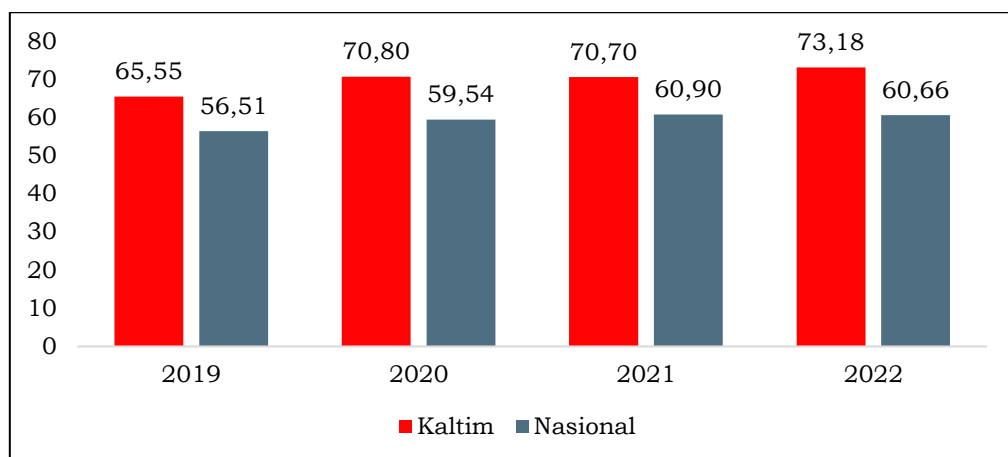
Gambar II.56
Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023)

Pada tahun 2023 ditargetkan pencapaian Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang mencapai 83,10% dimana diperlukan peningkatan sebesar 4,53%. Adapun target ini didasarkan kepada peningkatan kinerja dari masing-masing aspek yaitu Aspek Pembinaan Penataan Ruang (38,30), Aspek Pengaturan Penataan Ruang (23,50) dan Aspek Pelaksanaan Penataan Ruang (23,10). Selain itu diharapkan pada awal tahun 2023, Revisi RTRWP sudah dapat ditetapkan menjadi Perda sehingga Kabupaten/Kota yang saat ini sedang melakukan peninjauan kembali dan proses revisi perda dapat mengacu perda RTRWP.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rumah Tidak Layak Huni

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Data SUSENAS KOR tahun 2022 (Maret) menunjukkan bahwa Rumah Tangga di Kalimantan Timur yang telah menempati rumah layak huni mencapai 73,18%. Kondisi ini naik sekitar 2,84% dari tahun sebelumnya (Gambar II. 53). Meskipun demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar karena masih terdapat 345.031 Rumah Tangga (26,82%) yang belum bertempat tinggal di rumah yang layak huni.

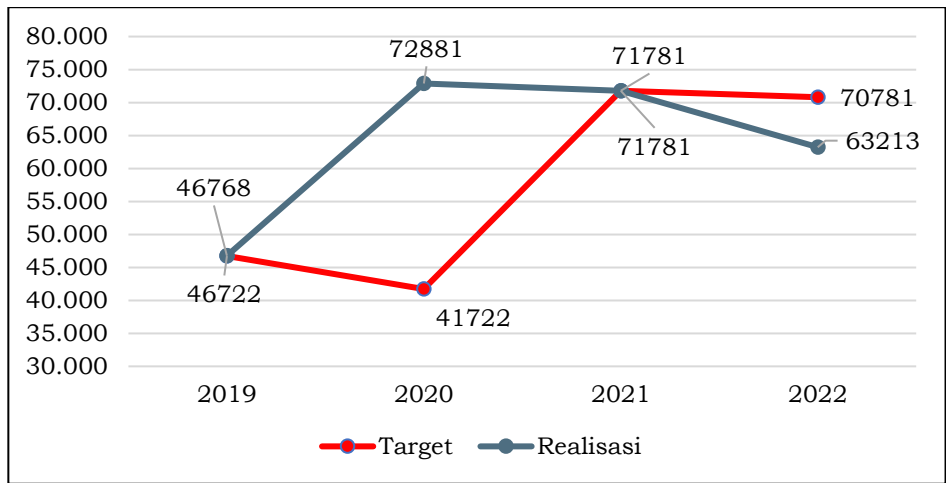


Gambar II.57

Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni di Kaltim Tahun 2019 – 2022

(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023)

Pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah tahun 2019 – 2023. Dalam rentang waktu tersebut, pengurangan ditargetkan mencapai 25.000-unit melalui berbagai skema pendanaan, antara lain program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dana APBN, APBD Provinsi Kaltim, serta APBD kabupaten/kota. Berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2022, terdapat setidaknya 63.213 RTLH di Kaltim yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Dari sisi pelaksanaan, penanganan melalui Dana APBD dilakukan dengan berpedoman pada kriteria penentuan kelayakan hunian bangunan. Kegiatan yang dilakukan adalah melalui perbaikan atap, lantai, serta dinding pada bangunan-bangunan yang telah terdata dan terverifikasi.



Gambar II.58

Target dan Realisasi Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni

(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023)

Gambar II.50 menunjukkan jumlah rumah layak huni tahun 2019 hingga 2022, yakni target dan capaian. Kinerja dikalkulasi melalui pengurangan RTLH setiap tahun, sehingga semakin kecil nilai RTLH maka kinerja dikatakan semakin baik. Kenampakan visual grafik memiliki sedikit anomali. Hal ini juga menunjukkan salah satu kendala atau kesulitan dalam perhitungan capaian kinerja penanganan RTLH, yakni inkonsistensi data baseline yang menyebabkan perubahan basis perhitungan. Kelemahan pada kondisi data *baseline* ini akan menjadi perhatian dalam proses perencanaan program penanganan RTLH tahun-tahun berikutnya.

2) Kawasan Kumuh

Kalimantan Timur memiliki 1,881.67 Ha area yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mendefinisikan permukiman kumuh sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Secara lebih detail, Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018 menjabarkan aspek yang menjadi penentu dalam penentuan kawasan kumuh, yakni meliputi tujuh aspek dan 16 variabel. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, pengaruh kekumuhan di Kalimantan Timur utamanya disebabkan oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, kondisi pengelolaan persampahan, aspek pengelolaan air limbah, aspek drainase lingkungan, serta kondisi jalan lingkungan.

Tabel II.55
Target dan Realisasi Luas Kawasan Kumuh Tahun 2018-2022

| Uraian | Luas kawasan kumuh (Ha) | | | | |
|-----------|-------------------------|--------|----------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Target | 673.42 | 620.06 | 1.287,82 | 1.237,82 | 1.187,82 |
| Realisasi | | 645.47 | 1.287,82 | 1,190.14 | 1.185,14 |

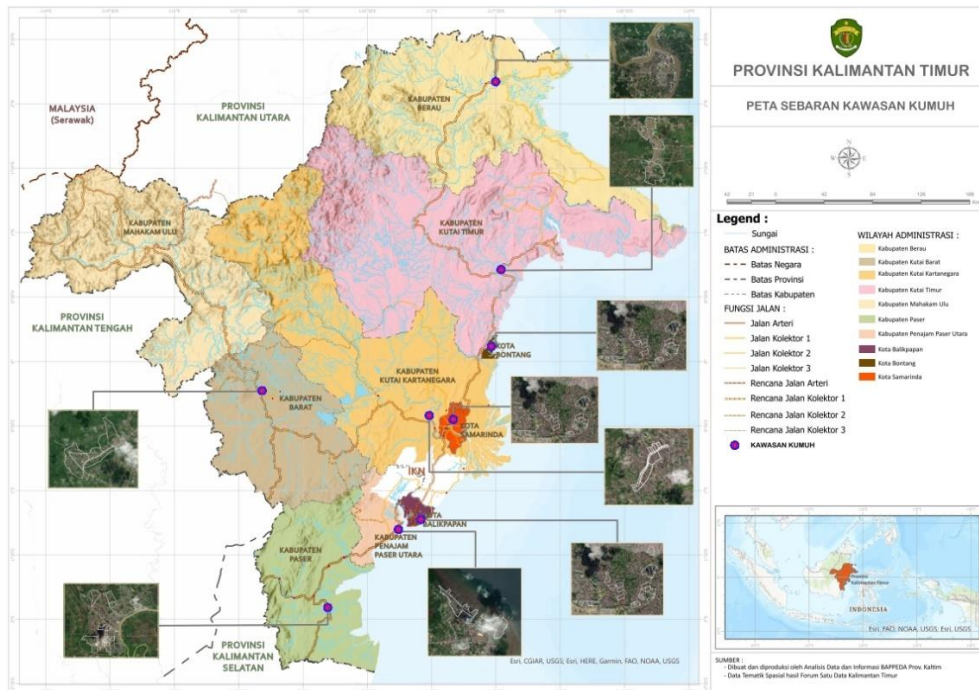
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023)

Lokasi kawasan kumuh ditetapkan oleh bupati/wali kota. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan oleh tiga level pemerintahan dilakukan berdasarkan rentang luasan. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk menanganan areal kumuh dengan luasan 10-15 Ha, pemeritah pusat untuk luasan di atas 15 Hektar, sementara pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menangani areal di bawah 10 Ha. Hingga tahun 2022, luas kawasan kumuh tersisa 1.185,14 Ha (Tabel II. 59). Capaian penurunan tersebut merupakan hasil kolaborasi penanganan antara berbagai sumber pendanaan.

Tabel II.56
Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan

| No. | Kab/Kota | Luas (Ha) | | | SK Bupati/Walikota |
|--------|------------|-----------|----------|----------|---------------------------|
| | | Pusat | Provinsi | Kab/Kota | |
| 1 | Paser | 180,74 | 35,06 | 8,72 | No. 653/KEP-116/2021 |
| 2 | KUBAR | 969,43 | 37,5 | 38,69 | No. 592/K.425/2021 |
| 3 | KUKAR | 122,99 | 37,51 | 7,61 | No. 454/SK-BUP/HK/2019 |
| 4 | KUTIM | 783,73 | 0 | 0 | No. 050/KK.268/2016 |
| 5 | Berau | 0 | 25,79 | 2,47 | No. 30 Tahun 2020 |
| 6 | PPU | 49,07 | 0 | 0 | No. 593.33/270/2017 |
| 7 | MAHULU | 37,15 | 0 | 2,45 | No. 050.136.146/K.63/2020 |
| 8 | Balikpapan | 137,51 | 10,39 | 5,4 | No. 188.45-326/2020 |
| 9 | Samarinda | 21,43 | 24,25 | 24,83 | No. 663/404/HK-KS/XI/2020 |
| 10 | Bontang | 32,8 | 33,35 | 7,41 | No. 188.45/509/DPKP2/2020 |
| Kaltim | | 2.334,85 | 203,85 | 97,58 | |

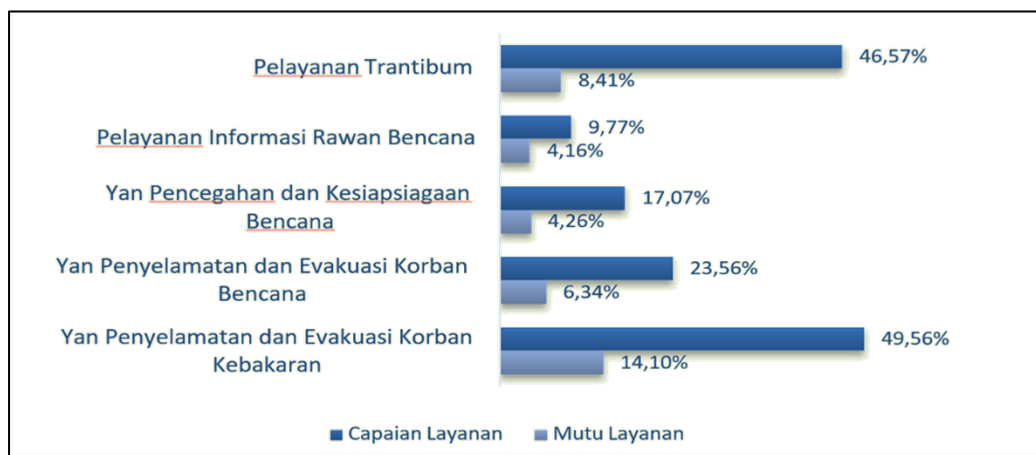
Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022



Gambar II.59
Peta Sebaran Kawasan Kumuh
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan pelaporan Standar Pelayanan Minimal ada Sekretariat Bersama SPM Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada triwulan III (tiga) tahun 2022, bidang urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 46,57% pada pelayanan dasar trantibum dengan kualitas pelayanan 8,41%. Hal ini disebabkan belum dialokasikan anggaran terkait pencapaian Standar Pelayanan Minimal terkhusus bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta belum terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Linmas Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar II.60
Capaian SPM Trantibum Tahun 2022
(Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangnda Kemendagri)

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang relatif aman dari konflik sosial. Walau demikian Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan). Secara umum kondisi ketertiban dan ketentraman sampai dengan tahun 2020 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap baik aparat pemerintah dan aparat keamanan. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Upaya penurunan peristiwa kejahatan dan pelanggaran ini memang terus diupayakan. Berdasarkan data yang ada, penurunan angka kejahatan dan pelanggaran saat ini masih belum optimal. Pada tahun 2017, persentase penurunan angka kejahatan dan pelanggaran sebesar 31 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 11 persen, hingga pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 16 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14 persen.

Tabel II.57
Angka Pelanggaran K3 dan Perlindungan Masyarakat
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

| Elemen Data | Tahun | | | | Satuan | Ket. |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Jumlah Aparat Satpol PP dan Linmas | 23.026 | 23.028 | 23.811 | 23.812 | Orang | Jumlah Aparat Satpol PP dan Satlinmas |
| Jumlah Aparat Satpol PP | 493 | 441 | 1.224 | 1.225 | Orang | Jumlah PNS dan Non PNS |
| a. Provinsi | 143 | 145 | 172 | 173 | Orang | Jumlah PNS dan Non PNS |
| b. Kab/Kota | 1.502 | 1.502 | 1.052 | 1.052 | Orang | Jumlah PNS dan Non PNS |
| Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat | 22.587 | 22.587 | 22.587 | 22.587 | Orang | Linmas Cadangan umum |
| a. Provinsi | 30 | 30 | 30 | 30 | Orang | Jumlah Non PNS |
| b. Kab/Kota | 22.557 | 22.557 | 22.557 | 22.557 | Orang | Jumlah Linmas |
| Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 jam | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 2.793 | Kali | 24 Jam (1 Tahun) |
| Jumlah Pos Siskamling | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 12.293 | Unit | Pos Jaga |
| Rasio Pos Siskamling per jumlah desa | 2 | 2 | 2 | 0,49 | | |
| Jumlah Pelanggaran K3 | 138 | 138 | 138 | 5.157 | Kasus | |
| Jumlah penyelesaian Pelanggaran K3 | 365 | 365 | 365 | 4.508 | Kasus | |

| Elemen Data | Tahun | | | | | Ket. |
|-------------------------------------|-------|------|------|------|--------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Satuan | |
| Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 | 264 | 264 | 264 | 41 | % | |
| Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja | 4 | 4 | 3 | 0,01 | | |

Masih belum optimalnya penurunan angka kriminalitas disebabkan karena pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat juga kurang. Berdasarkan indikator persentase poskamling aktif, pada tahun 2016, jumlahnya hanya sebesar 2.242. Angka ini mengalami penurunan menjadi 1927 pada tahun 2020. Dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum sebagai upaya penurunan angka kriminalitas untuk jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 63 kali, tahun 2017 sebanyak 211 kali, tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 2.793 kali.

Saat ini total jumlah petugas linmas adalah 30 orang. Idealnya setiap pos kamling dijaga minimal 2 orang dengan asumsi penjagaannya selama 24 jam bukan hanya pada malam hari saja. Hal ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020, karena keterbatasan tersebut, satlinmas diorientasikan untuk membantu pelaksanaan pengawasan pilkada. Kurangnya jumlah petugas linmas ini karena aturan terdahulu belum memberikan insentif kepada petugas linmas yang berasal dari anggaran dinas. Mengikuti aturan terbaru dari permendagri, program satlinmas ini nantinya berhak mendapatkan biaya operasional dari pemerintah. Diharapkan dengan adanya pemberian insentif tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja bagi para petugas linmas.

Angka kriminalitas khususnya jumlah tindak pidana di Kalimantan Timur dalam dua tahun terakhir cenderung menurun. Ini terlihat dari jumlah tindak pidana yang tercatat pada Polda Kaltim, yang pada tahun 2018 terdapat 6.715 tindak pidana, yang turun menjadi 5.253 tindak pidana pada 2019, dan turun kembali pada 2020 menjadi 4.368 tindak pidana.

Persentase penyelesaian kasus terhadap peristiwa kejahatan dan pelanggaran yang dilaporkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 85,00 persen, yang berarti mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 87,00 persen.

Tabel II.58
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

| Tahun | Dilaporkan | Tertunggak | Diselesaikan | % Tindak Kejahatan Diselesaikan | Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk |
|-------|------------|------------|--------------|---------------------------------|--|
| 2017 | 11.705 | 1.591 | 8.622 | 73,66 | 33,39 |
| 2018 | 6.715 | 1.228 | 5.487 | 81,71 | 18,90 |
| 2019 | 5.253 | 670 | 4.583 | 87,25 | 14,47 |
| 2020 | 4.368 | 506 | 1.696 | 87,00 | 6,01 |
| 2021 | 4.184 | 506 | 1.696 | 85,00 | 6,01 |

Sumber: POLDA KALTIM, 2022

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir yakni Tahun 2018 s/d Tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan yang mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2022, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 115 dimana 20,00% (23 demonstrasi) terkait Ekonomi; 10,43% (12 demonstrasi) terkait Politik; 13,04% (15 demonstrasi) terkait Sosial; 46,09% (53 demonstrasi) terkait Hukum; 0,87% (1 demonstrasi) terkait Agama; 9,57% (11 demonstrasi) terkait Kamtibmas.

Tabel II.59
Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

| Jenis Demo | Tahun | | | | | Jumlah |
|----------------|-------|------|------|------|------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ekonomi | 9 | 9 | 1 | 8 | 23 | 65 |
| Politik | 2 | 0 | 6 | 5 | 12 | 36 |
| Sosial | 22 | 15 | 14 | 15 | 15 | 119 |
| Budaya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hukum | 33 | 18 | 32 | 34 | 53 | 202 |
| Agama | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Hankam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tapal Batas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sengketa Lahan | 0 | 8 | 14 | 2 | 0 | 24 |
| Kamtibnas | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 19 |
| Lingkungan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Jumlah | 76 | 54 | 70 | 70 | 115 | 489 |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi KALTIM, 2023

F. Sosial

Perkembangan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 4 tahun terakhir fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada tahun 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktifitas kehidupan sosial masyarakat. Hal ini tergambarkan pada peningkatan jumlah PMKS yang harus menerima bantuan dengan puncak jumlah tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 108.434 orang.

Tabel II.60
Jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

| Jumlah PMKS | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah PMKS | Orang | 243.459 | 251.234 | 251.234 | 247.465 |
| PMKS yang ditangani | Jenis | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Persentase Penanganan PMKS | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan | Orang | 78.387 | 78.387 | 81.247 | 108.434 |
| PMKS yang diberikan Bantuan | Orang | 1.200 | 1.052 | 1.134 | 2.708 |
| PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial | % | 1,53 | 1,34 | 1,40 | 2,50 |
| Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif | % | 0,1 | 1,34 | 1,4 | 1,4 |
| Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS | KK | n/a | 46.510 | 46.510 | 23.355 |
| Jumlah Keluarga yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif | KK | n/a | 100 | 100 | 24 |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2022

Penanganan dan pemberdayaan PPKA dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan secara simultan melalui Sistem Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (curative), pemulihan (rehabilitative) dan pengembangan (promotive) seperti meningkatkan jumlah Keluarga miskin dan PPKS yang memiliki usaha ekonomi produktif dengan melibatkan multi program dan lintas sektor.

Berdasarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kalimantan Timur terdapat kenaikan dari tahun 2018 sebanyak 243.459 orang menjadi 247.465 orang pada tahun 2021, atau bertambah sebanyak 4.006 orang. Jumlah PMKS yang terbesar pada kabupaten/kota

berada pada Kabupaten Kutai Barat dan Kota Samarinda yaitu sebesar 87.726 dan 34.899. Berdasarkan inventarisasi permasalahan penanganan PMKS hal utama yang perlu dilakukan selain peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga adalah belum tersedianya panti rehabilitasi untuk penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Tabel II.61
 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

| No | Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) | Balikpapan | | KUKAR | | Samarinda | | PPU | | KUBAR | | Paser | |
|----|--|------------|-----|-------|-----|-----------|-------|-------|-----|--------|-------|-------|-----|
| | | Jiwa | KK | Jiwa | KK | Jiwa | KK | Jiwa | KK | Jiwa | KK | Jiwa | KK |
| 1 | Anak Balita Terlantar | 94 | - | 68 | - | 1.841 | - | 59 | - | 102 | - | 82 | - |
| 2 | Anak Terlantar | 327 | - | 743 | - | 1.542 | - | 274 | - | 326 | - | 1.625 | - |
| 3 | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 71 | - | 79 | - | 66 | - | 48 | - | 26 | - | 21 | - |
| 4 | Anak Jalanan | 124 | - | 81 | - | 206 | - | - | - | - | - | 39 | - |
| 5 | Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) | 76 | - | 63 | - | 435 | - | 31 | - | 14 | - | 164 | - |
| 6 | Anak Korban Tindak Kekerasan | 187 | - | 24 | - | 97 | - | 170 | - | 59 | - | 93 | - |
| 7 | Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 161 | - | 921 | - | 816 | - | 23 | - | - | - | 43 | - |
| 8 | Lanjut Usia Terlantar | 29 | - | 668 | - | 1.162 | - | - | - | 422 | - | - | - |
| 9 | Penyandang Disabilitas | 314 | - | 2.349 | - | 1.626 | - | 1.097 | - | 449 | - | 530 | - |
| 10 | Tuna Susila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Gelandangan | 11 | - | 4 | - | 51 | - | - | - | 26 | - | 10 | - |
| 12 | Pengemis | 9 | - | 8 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Pemulung | 21 | - | 5 | - | 64 | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 14 | Kelompok Minoritas | 65 | - | - | - | 38 | - | 93 | - | - | - | 17 | - |
| 15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP) | 143 | - | 134 | - | 439 | - | 110 | - | 240 | - | 298 | - |
| 16 | Orangr Dengan HIV/AIDS (ODHA) | 1.091 | - | 180 | - | 1.990 | - | 19 | - | 43 | - | 7 | - |
| 17 | Korban Penyalahgunaan Napza | 303 | - | 75 | - | 508 | - | 4 | - | 6 | - | 3 | - |
| 18 | Korban Trafficking | 2 | - | 3 | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 19 | Korban Tindak Kekerasan | 56 | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | 51 | - |
| 20 | Pekerja Migram Bermasalah Sosial | 399 | - | - | - | 59 | - | - | - | 48 | - | 34 | - |
| 21 | Korban Bencana Alam | 2.807 | 591 | 169 | 43 | 5.950 | 1.267 | 981 | 214 | 47.301 | 9.748 | 1.211 | 287 |
| 22 | Korban Bencana Sosial | 948 | 171 | 2.477 | 412 | 3.288 | 612 | 781 | 192 | 25.304 | 5.941 | 1.011 | 214 |

| No | Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) | Balikpapan | | KUKAR | | Samarinda | | PPU | | KUBAR | | Paser | |
|---------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Jiwa | KK | Jiwa | KK | Jiwa | KK | Jiwa | KK | Jiwa | KK | Jiwa | KK |
| 23 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 56 | - | - | - | - | - | 27 | - | 29 | - | 48 | - |
| 24 | Fakir Miskin | 14.704 | 3.114 | 20.114 | 3.193 | 14.248 | 3.101 | 12.047 | 3.012 | 12.678 | 2.870 | 13.647 | 3.291 |
| 25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | - | - | 34 | - | 337 | - | - | - | 581 | - | 11 | - |
| 26 | Komunitas Adat Terpencil | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 27 | 1.697 | 378 |
| JUMLAH | | 21.998 | 3.876 | 28.199 | 3.648 | 34.899 | 4.980 | 15.770 | 3.418 | 87.726 | 18.586 | 20.648 | 4.170 |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2022

Tabel II.56 Lanjutan

| NO | JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) | BERAU | | KUTIM | | BONTANG | | MAHULU | |
|--------|--|--------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-----|
| | | Jiwa | KK | Jiwa | KK | Jiwa | KK | Jiwa | KK |
| 1 | Anak Balita Terlantar | 77 | - | 128 | - | 78 | - | - | - |
| 2 | Anak Terlantar | 502 | - | 213 | - | 437 | - | - | - |
| 3 | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 172 | - | 442 | - | 43 | - | 18 | - |
| 4 | Anak Jalanan | 16 | - | - | - | 51 | - | - | - |
| 5 | Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) | 35 | - | 872 | - | 43 | - | - | - |
| 6 | Anak Korban Tindak Kekerasan | 139 | - | 187 | - | 56 | - | - | - |
| 7 | Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 147 | - | 587 | - | - | - | - | - |
| 8 | Lanjut Usia Terlantar | - | - | 198 | - | 337 | - | - | - |
| 9 | Penyandang Disabilitas | 276 | - | 612 | - | 795 | - | 310 | - |
| 10 | Tuna Susila | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Gelandangan | 75 | - | 19 | - | 17 | - | - | - |
| 12 | Pengemis | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 13 | Pemulung | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kelompok Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Orangr Dengan HIV/AIDS (ODHA) | 31 | - | 159 | - | 160 | - | - | - |
| 17 | Korban Penyalahgunaan Napza | 2 | - | 4 | - | 4 | - | - | - |
| 18 | Korban Trafficking | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Korban Tindak Kekerasan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial | 52 | - | - | - | 34 | - | - | - |
| 21 | Korban Bencana Alam | - | - | 712 | 154 | 869 | 196 | - | - |
| 22 | Korban Bencana Sosial | 422 | 106 | 392 | 98 | 377 | 95 | - | - |
| 23 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Fakir Miskin | 9.307 | 2.107 | 12.001 | 3.001 | 4.587 | 1.047 | 1.067 | 264 |
| 25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Komunitas Adat Terpencil | 1.717 | 411 | 575 | 104 | - | - | 1.250 | 249 |
| JUMLAH | | 13.014 | 2.624 | 17.101 | 3.357 | 7.892 | 1.338 | 2.645 | 513 |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2021

G. Ketenagakerjaan

Bila dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, ternyata penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur persentase terbesar adalah pendidikan SMA/SMK dan persentase terkecil adalah tamatan Diploma I/II/III.. Pada tahun 2022 persentase penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah tercatat 25,98 persen menurun dibanding tahun 2021 yang mencapai 28,57 persen. Sementara Persentase penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan lulus Diploma I/II/III sekitar 3,26 persen meningkat dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 3,77 persen.

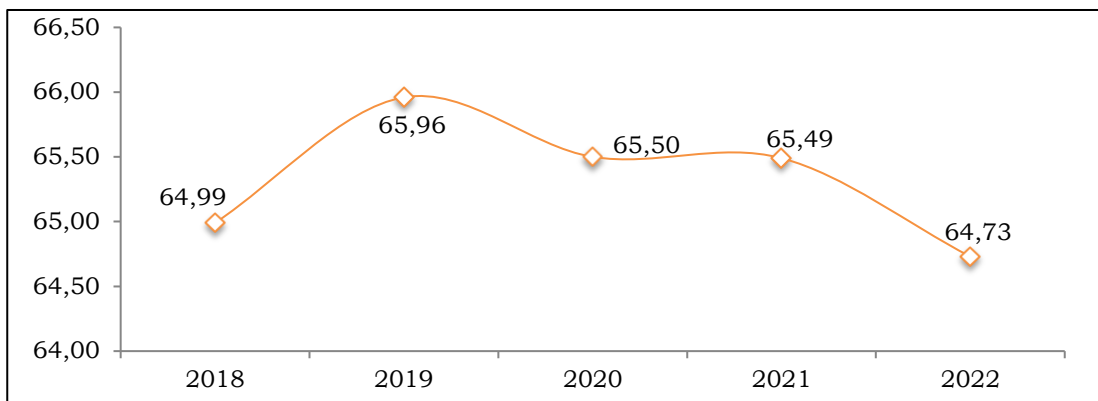
Tabel II.62
Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut
Tingkat Pendidikan Tahun 2018-2022

| No | Tingkat Pendidikan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | SD ke Bawah | 477.106 | 482.844 | 493.889 | 491.456 | 453.853 |
| | | (29,43) | (28,51) | (29,18) | (28,57) | (25,98) |
| 2 | SMP | 260.843 | 273.257 | 267.721 | 260.789 | 259.693 |
| | | (16,09) | (16,14) | (15,82) | (15,16) | (14,87) |
| 3 | SMA/SMK | 609.994 | 659.047 | 643.105 | 666.878 | 760.250 |
| | | (37,63) | (38,92) | (37,99) | (38,76) | (43,52) |
| 4 | Diploma I/II/III | 64.291 | 57.174 | 64.507 | 64.906 | 56.923 |
| | | (3,97) | (3,38) | (3,81) | (3,77) | (3,26) |
| 5 | Universitas/DIV | 208.735 | 221.159 | 223.574 | 236.332 | 216.201 |
| | | (12,88) | (13,06) | (13,21) | (13,74) | (12,38) |
| Kalimantan Timur | | 1.620.969 | 1.693.481 | 1.692.796 | 1.720.361 | 1.746.920 |
| | | (100,00) | (100,00) | (100,00) | (100,00) | (100,00) |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

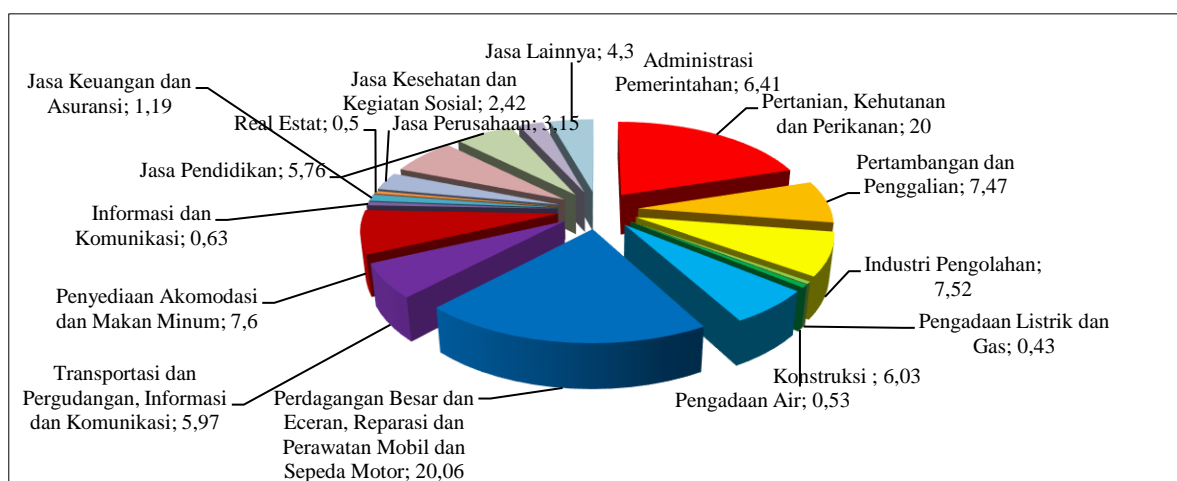
Perkembangan jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja selama tahun 2018-2022 selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang sempat turun dari 1.693.481 orang di tahun 2019 menjadi 1.692.796 orang di tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk yang bekerja tersebut merupakan salah satu dampak pandemi COVID- 19 yang menyebabkan banyak penduduk kehilangan pekerjaannya atau usahanya, pengurangan jam kerja ataupun pemberhentian kerja. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu serta program pemulihan ekonomi pasca pandemi yang dilaksanakan pemerintah, jumlah penduduk yang bekerja telah kembali meningkat. Kondisi itu tercermin pada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1.720.361 orang di tahun 2021 kemudian menjadi sebanyak 1.746.920 orang di tahun 2022.

Pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan tingkat pendidikan tertinggi Diploma dan Sarjana ke atas. Sebaliknya, terjadi peningkatan pada penduduk bekerja yang memiliki pendidikan tertinggi SMA dan SMK. Kedua hal ini juga dapat mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan lulusan SMA dan SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih memilih untuk bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi yang dominan menyerap tenaga kerja di Kalimantan Timur tidak memerlukan kompetensi/keahlian pada jenjang Diploma dan Universitas. Jika melihat fakta, penduduk paling banyak bekerja di wilayah perkotaan dengan lapangan usaha dominan di sektor perdagangan dan jasa (20,06%). Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa para pekerja sektor-sektor tersebut memiliki potensi untuk mendapatkan peluang kesejahteraan yang lebih baik apabila berpendidikan lebih tinggi yang didukung dengan kebutuhan perkembangan sektor ekonominya.



Gambar II.61
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja turun dari 65,49 persen menjadi 64,73 persen. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan ini juga bisa disebabkan oleh penimbangnya, yaitu jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja. Membaiknya kinerja ekonomi turut berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja yang tersedia dan hal tersebut juga membantu menurunkan angka pengangguran.



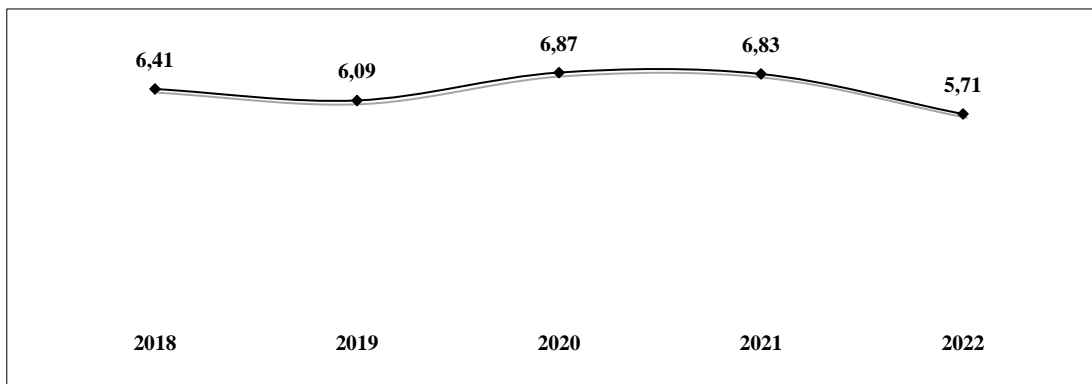
Gambar II.62

Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (%)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Tahun 2022, penduduk bekerja di Kalimantan Timur memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 20,06 persen diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai

20,00 persen, dan yang paling sedikit bekerja di sektor pengadaan listrik dan gas mencapai 0,43 persen.



Gambar II.63

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 (persen)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

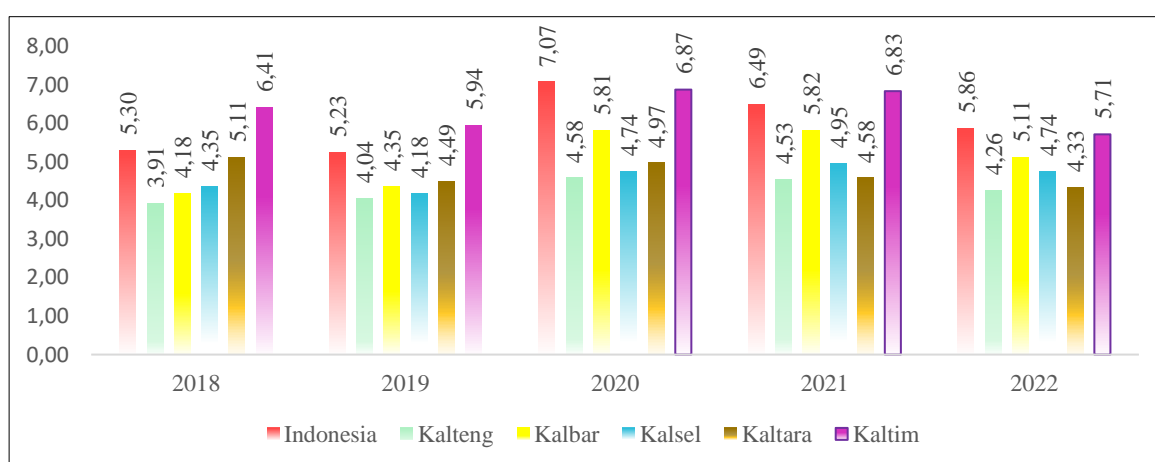
Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan yang mencapai 6,87 persen dimana angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 5,94 persen. Peningkatan ini diperkirakan akibat dampak dari Pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di dunia pada akhir tahun 2019 dan mulai terasa dampaknya di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur pada awal tahun 2020 terutama pada sektor transportasi dikarenakan beberapa negara memberlakukan pembatasan berskala besar bahkan ada yang memberlakukan karantina wilayah. Sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja pada sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate* dan jasa perusahaan. Namun di tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan mencapai 5,71 persen, penurunan terjadi dikarenakan di tahun 2022 pandemi COVID-19 sudah mulai berkurang dan banyaknya masyarakat yang telah di vaksin serta pemulihan ekonomi mulai membaik.

Tabel II.63
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)

| No | KAB/KOTA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Paser | 5,00 | 4,55 | 4,52 | 5,70 | 4,88 |
| 2 | KUBAR | 4,86 | 5,08 | 4,97 | 5,14 | 4,62 |
| 3 | KUKAR | 5,96 | 5,98 | 5,70 | 5,66 | 4,14 |
| 4 | KUTIM | 5,93 | 5,53 | 5,45 | 5,35 | 6,48 |
| 5 | Berau | 5,62 | 5,08 | 5,08 | 5,82 | 5,02 |
| 6 | PPU | 4,76 | 6,26 | 6,22 | 2,95 | 2,12 |
| 7 | MAHULU | 4,17 | 3,69 | 3,49 | 3,14 | 2,44 |
| 8 | Balikpapan | 9,52 | 7,29 | 9,00 | 8,94 | 6,90 |
| 9 | Samarinda | 6,16 | 5,87 | 8,26 | 8,16 | 6,78 |
| 10 | Bontang | 9,61 | 9,19 | 9,46 | 9,92 | 7,81 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Pada tahun 2022 terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Kalimantan Timur paling tinggi terdapat di Kota Bontang sebesar 7,81 persen, Kota Balikpapan sebesar 6,90 persen, dan Kota Samarinda sebesar 6,78 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terendah ditorehkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2,12 persen. Jika dilihat dari perbandingan regionalnya, maka Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur tahun 2022 masih menjadi yang tertinggi diantara provinsi lainnya di regional Kalimantan dan berada di atas tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 5,86 persen. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut, jika mengingat Kalimantan Timur sebagai penghasil nilai tambah ekonomi terbesar di Regional Kalimantan.



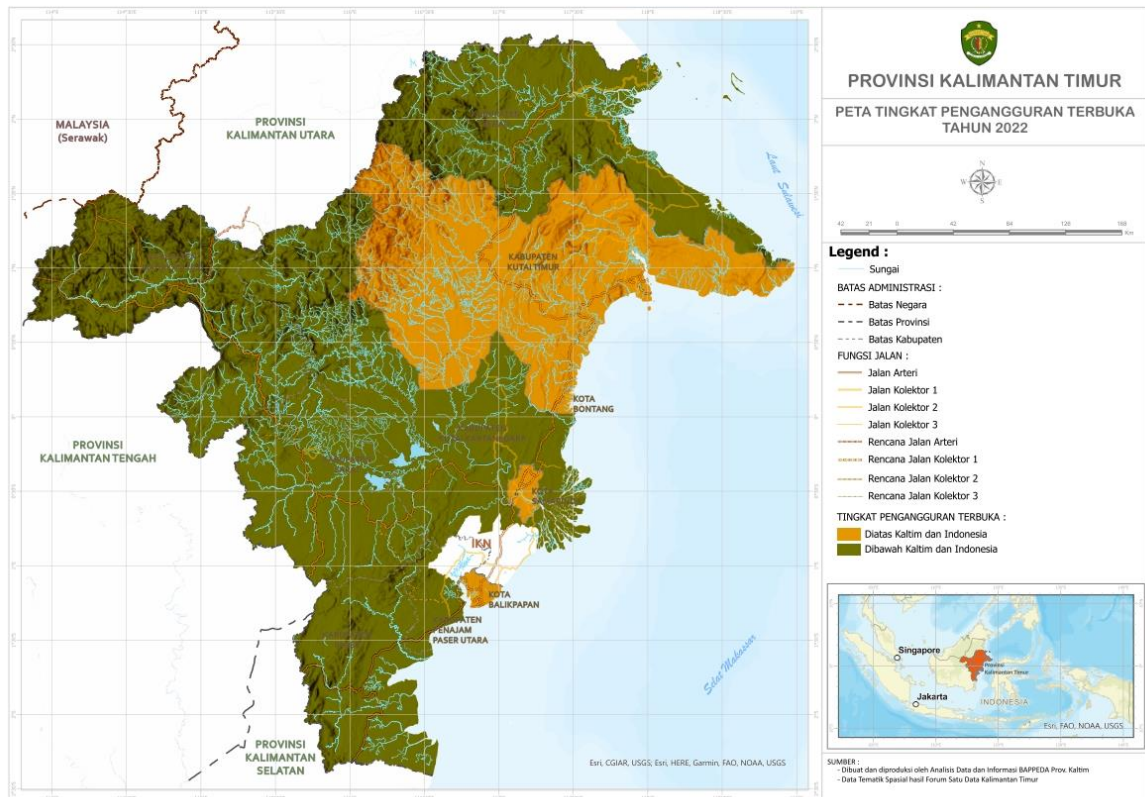
Gambar II.64

Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia

(Sumber: BPS RI, 2022)

Meskipun TPT Kaltim mengindikasikan penurunan, namun peringkat TPT Kaltim berada di atas TPT wilayah Kalimantan lainnya. Hal ini

mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kaltim relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan. TPT Kaltim pada Februari 2022 sebesar 6,77% atau berada di posisi paling tinggi dibandingkan dengan TPT provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Secara nasional, Kaltim menempati 10 besar provinsi yang memiliki TPT tertinggi dan berada di atas level TPT nasional sebesar 5,83%



Gambar II.65

Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur Tahun 2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Salah satu upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah dengan memberikan kemudahan akses informasi kepada pencari kerja terutama yang telah mendaftarkan ke dalam database pada Disnakertrans. Untuk kemudian akan disesuaikan dengan data yang bersumber dari perusahaan yang sedang membutuhkan pekerja.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja cenderung fluktuatif dan terus mengalami penurunan semenjak tahun 2020 dan capaian terendah pada tahun 2021 yaitu mencapai 15,79 persen. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingkat kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai

dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini masih diperlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja melalui balai-balai pelatihan kerja baik yang dibawah wewenang Disnakertrans maupun perangkat daerah lainnya.

Tabel II.64
 Persentase Penempatan Tenaga Kerja
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Pencari Kerja yang Mendaftar (orang) | 49.552 | 26.148 | 30.719 | 22.358 | 47.254 |
| 2 | Pencari Kerja yang ditempatkan (orang) | 11.266 | 7.690 | 5.538 | 3.531 | 12.334 |
| 4 | Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%) | 22,74 | 29,41 | 18,03 | 15,79 | 26,10 |

Sumber: Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2023

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka terlihat capaian tertinggi persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2022 adalah Kabupaten Kutai Timur mencapai 65,14 persen. Capaian yang cukup tinggi kemudian diikuti oleh Kota Samarinda yang mencapai 44,07 persen dan Kota Balikpapan mencapai 39,98 persen.

Tabel II.65
 Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

| No | KAB/KOTA | Pencari Kerja Terdaftar (Orang) | Penempatan Pencari Kerja (Orang) | Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%) |
|----|------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Paser | 2.592 | 657 | 25,35 |
| 2 | KUBAR | 3.116 | 388 | 12,45 |
| 3 | KUKAR | 13.622 | 335 | 2,46 |
| 4 | KUTIM | 3.815 | 2.485 | 65,14 |
| 5 | Berau | 6.215 | 2.282 | 36,72 |
| 6 | PPU | 1.149 | 447 | 38,90 |
| 7 | MAHULU | - | - | - |
| 8 | Balikpapan | 4.077 | 1.630 | 39,98 |
| 9 | Samarinda | 4.261 | 1.878 | 44,07 |
| 10 | Bontang | 8.407 | 2.232 | 26,55 |

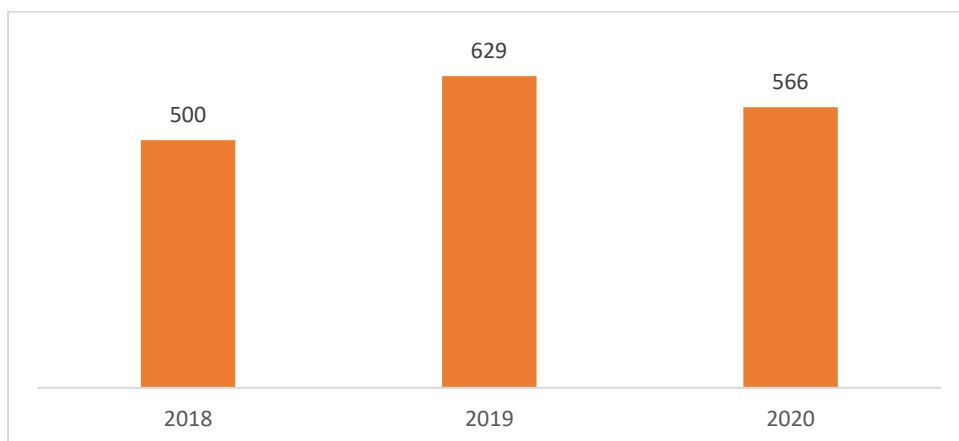
Sumber: Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2023

H. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan bukan saja memberikan pelayanan namun dilakukan juga pencegahan dan peningkatan kelembagaan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan

Anak (PUSPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota.

Menurut laporan Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPPA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 629 kasus dan terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi 566 kasus di Provinsi Kalimantan Timur, secara lengkap dapat dilihat dalam gambar di bawah.



Gambar II.66
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Kalimantan Timur
Tahun 2018-2020
(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data simfoni tahun 2020 terdapat jumlah kekerasan pada anak sebanyak 347 kasus.

Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kerentanan untuk menjadi korban kekerasan. Kondisi ini memerlukan upaya integratif selain Pemerintah juga meliputi keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan mas media. Beberapa kelembagaan perlindungan anak adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Forum Anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota, jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat ini bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

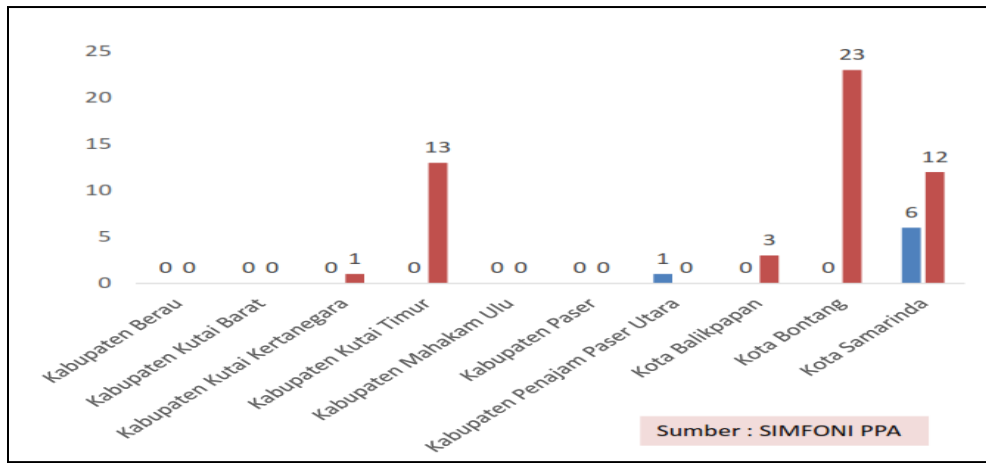
Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk itu diperlukan upaya pemenuhan hak anak serta melakukan percepatan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Jumlah Anak Disabilitas Kalimantan Timur cukup tinggi. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Kalimantan Timur seperti dalam tabel berikut.

Tabel II.66
Jumlah penduduk disabilitas di Kalimantan Timur Tahun 2020

| No | Kabupaten/Kota | Cacat Fisik | Cacat Netra | Cacat Rungu | Cacat Mental Jiwa | Cacat Fisik Mental | Cacat Lainnya |
|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1 | Paser | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kukar | 40 | 5 | 6 | 6 | 3 | 16 |
| 3 | Berau | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Kubar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Kutim | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 13 |
| 6 | PPU | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Mahakam Ulu | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Balikpapan | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Samarinda | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Bontang | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| JUMLAH | | 105 | 18 | 31 | 10 | 13 | 51 |

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022

Disabilitas/kecacatan merupakan bagian dari keberagaman. Disabilitas disebabkan oleh lingkungan, bukan kekurangan fisik seseorang. Lingkunganlah yang harus berubah agar kaum disabilitas, khususnya anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan perlindungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Anak-anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual dari lingkungannya. Mereka juga rentan mendapat stigma atas kondisi kedisabilitasnya. Rentan menjadi korban pemasungan, rentan mendapat *bullying*, dan rentan menjadi korban kekerasan fisik atau eksploitasi. Berikut data korban kekerasan difabel di Kaltim pada tahun 2020.



Gambar II.67

Korban Kekerasan Difabel di Kalimantan Timur Tahun 2020

(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022)

I. Pangan

Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP (Indeks Ketahanan Pangan) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan, Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Tabel II.67

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2018-2022

| No | Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Paser | 72,76 | 72,25 | 82,26 | 80,48 | 81,76 |
| 2. | KUBAR | 70,64 | 66,85 | 54,98 | 57,76 | 66,94 |
| 3. | KUKAR | 79,50 | 84,51 | 84,28 | 84,73 | 84,44 |
| 4. | KUTIM | 71,27 | 57,58 | 73,13 | 66,19 | 60,09 |
| 5. | Berau | 79,47 | 84,19 | 85,34 | 86,77 | 86,16 |
| 6. | PPU | 80,18 | 84,26 | 86,20 | 86,24 | 85,51 |
| 7. | MAHULU | 68,88 | 58,73 | 63,17 | 52,75 | 53,29 |
| 8. | Balikpapan | 83,62 | 88,74 | 87,66 | 88,68 | 89,47 |
| 9. | Samarinda | 82,56 | 85,19 | 80,75 | 83,72 | 84,66 |
| 10. | Bontang | 81,42 | 85,34 | 84,59 | 87,24 | 84,21 |
| Kalimantan Timur | | 77,03 | 76,90 | 78,24 | 77,46 | 77,65 |

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebesar 77,65 mengalami peningkatan dari IKP Tahun 2021 yang sebesar 77,46. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mulai mampu meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

Sejalan dengan hal tersebut, apabila dilihat hingga level desa masih terdapat 412 pada Tahun 2022 desa di Kalimantan Timur masih termasuk dalam kategori rawan pangan. Desa rawan pangan ini merupakan suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Adapun penyebab terbesar terjadinya desa rawan pangan disebabkan oleh faktor Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih (beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu dan stok), rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk dan persentase angka kesakitan/angka harapan hidup.

Tabel II.68
Jumlah Desa Rawan Pangan Berdasarkan Hasil FSVA Kabupaten/Kota Tahun 2021 dan 2022

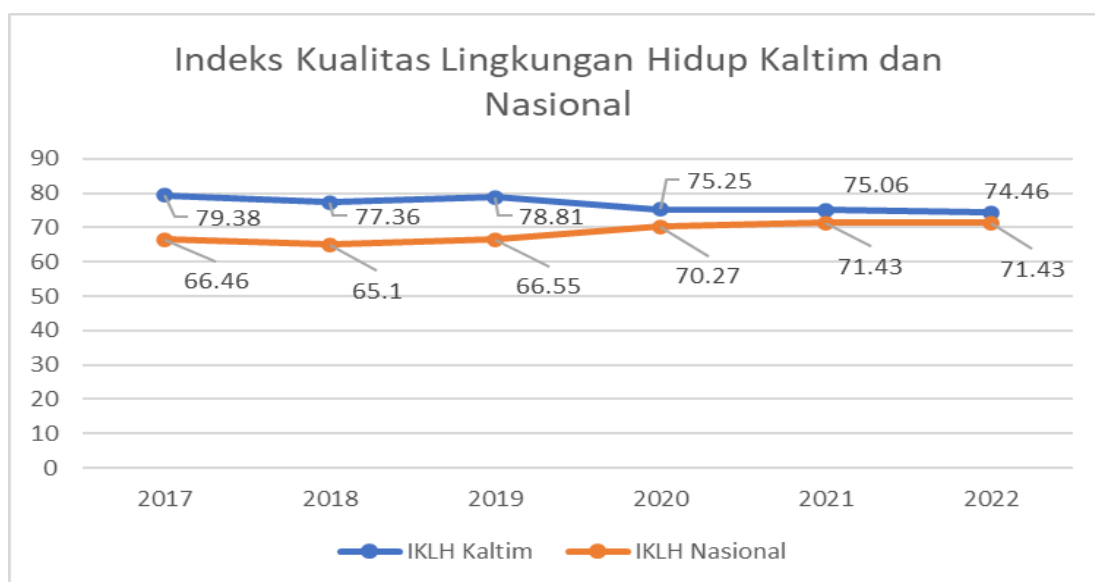
| No | Kab/Kota | Jumlah | | 2021 | | | 2022 | | |
|------------------|------------|-----------|-------|-------------------|----------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| | | Kecamatan | Desa | Desa Rawan Pangan | % Per Kab/Kota | % Provinsi | Desa Rawan Pangan | % Per Kab/Kota | % Provinsi |
| 1. | Paser | 10 | 144 | 35 | 24,31 | 12,20 | 24 | 16,67 | 5,84 |
| 2. | KUBAR | 16 | 194 | 50 | 25,77 | 17,42 | 62 | 31,96 | 15,09 |
| 3. | KUKAR | 18 | 237 | 60 | 25,32 | 20,91 | 85 | 35,86 | 20,68 |
| 4. | KUTIM | 18 | 141 | 44 | 31,21 | 15,33 | 96 | 68,09 | 23,36 |
| 5. | Berau | 13 | 110 | 19 | 17,27 | 6,62 | 56 | 50,91 | 13,63 |
| 6. | PPU | 4 | 54 | 11 | 20,37 | 3,83 | 20 | 37,04 | 4,87 |
| 7. | MAHULU | 5 | 50 | 21 | 42,00 | 7,32 | 21 | 42,00 | 5,11 |
| 8. | Balikpapan | 6 | 34 | 16 | 47,06 | 5,57 | 18 | 52,94 | 4,38 |
| 9. | Samarinda | 10 | 59 | 26 | 44,07 | 9,06 | 23 | 38,98 | 5,60 |
| 10. | Bontang | 3 | 15 | 5 | 33,33 | 1,74 | 6 | 40,00 | 1,46 |
| Kalimantan Timur | | 103 | 1.038 | 287 | 27,65 | 100,00 | 411 | 39,60 | 100,00 |

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi KALTIM, 2022

J. Lingkungan Hidup

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sumber daya alam tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat eksploitatif dan banyak menyebabkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan

kualitas lingkungan hidup. Secara umum, IKLH Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH Nasional.



Gambar II.68

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022

(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022)

Pada tahun 2019, IKLH Kalimantan Timur mengalami kenaikan angka indeks dari 77,36 di tahun 2018 menjadi 78,81 (predikat baik, $70 < \text{IKLH} \leq 80$) dan terus menurun pada tahun 2022 menjadi 74,46. Menurunnya IKLH tahun 2021 dapat dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 kemudian menurun menjadi 74,46. Capaian ini berada di bawah Target P-RPJMD Kaltim 2019-2023 pada tahun 2022 yakni, 76,05. Capaian IKLH Tahun 2022 ini menurun dikarenakan adanya penurunan angka indeks pada Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Laut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kaltim masih belum tercapai apabila dibandingkan dengan target di P-RPJMD.

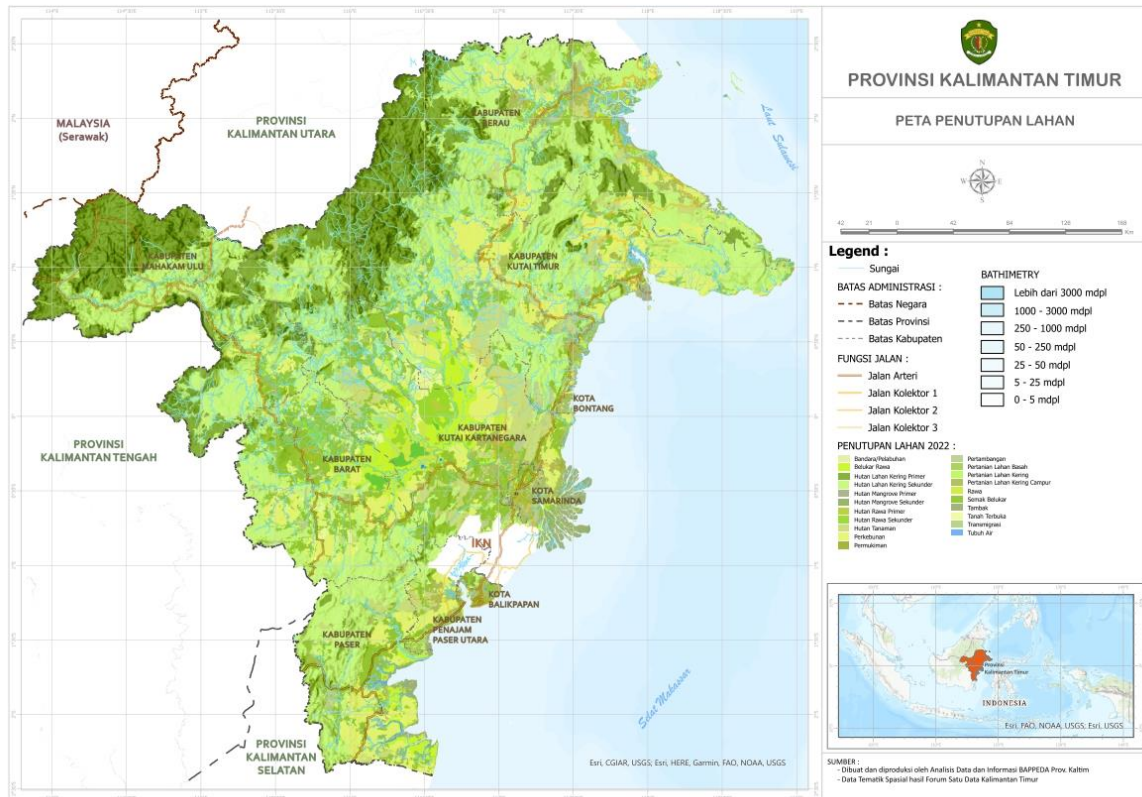
Tabel II.69

Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

| INDEKS | 2018 | 2019*) | 2020 | 2021 | 2022 | KET |
|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| IKA | 57,73 | 77,09 | 53,7 | 51,92 | 53,02 | *)IKAL/Indeks Kualitas Air Laut masih belum masuk menjadi salah satu penilaian IKLH pada Tahun 2019. |
| IKU | 83,36 | 89,42 | 89,06 | 88,84 | 87,59 | |
| IKL | 87,59 | 72,12 | 79,76 | 82,21 | 81,85 | |
| IKAL | - | - | 83,51 | 85,4 | 81,45 | |

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022

Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar II.69
Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak hanya diukur di tingkat Nasional dan Provinsi saja namun juga ada pada tingkat Kabupaten/Kota. Jika dilihat melalui capaian IKLH dari 10 Kabupaten/Kota di Tahun 2022 yang ada di Kalimantan Timur, Capaian IKLH Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Kabupaten dengan capaian terbaik, yakni 82,65 dengan Rating Baik. Capaian ini didukung oleh Capaian Indeks Kualitas Lahan yang sempurna yakni 100 Indeks. Sementara Kabupaten/Kota dengan capaian Rating Sedang adalah Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Selengkapnya dapat terlihat di tabel berikut:

Tabel II.70
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

| No | Kabupaten/Kota | IKA | IKU | IKL | IKLH | Target | Rating |
|----|-------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 1 | Kabupaten Kutai Timur | 50,00 | 86,61 | 81,09 | 71,64 | 70,44 | BAIK |
| 2 | Kota Balikpapan | 50,00 | 84,29 | 49,79 | 63,84 | 68,15 | SEDANG |
| 3 | Kota Bontang | 60,00 | 86,60 | 36,30 | 65,58 | 65,33 | SEDANG |
| 4 | Kabupaten Kutai Barat | 62,31 | 91,50 | 66,09 | 74,96 | 70,08 | BAIK |
| 5 | Kabupaten Kutai Kartanegara | 53,08 | 89,31 | 70,87 | 71,65 | 73,14 | BAIK |
| 6 | Kota Samarinda | 45,81 | 81,81 | 25,90 | 56,03 | 58,25 | SEDANG |
| 7 | Kabupaten Mahakam Ulu | 61,88 | 92,56 | 100,00 | 82,65 | 83,86 | BAIK |
| 8 | Kabupaten Paser | 54,09 | 89,53 | 72,02 | 72,37 | 71,43 | BAIK |
| 9 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 48,33 | 89,90 | 61,70 | 68,09 | 73,18 | SEDANG |
| 10 | Kabupaten Berau | 53,48 | 83,76 | 94,73 | 74,77 | 76,71 | BAIK |

Sumber: ppkl.menlhk.go.id/iklh

Kabupaten/kota yang memiliki capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang baik adalah kabupaten/kota yang menghasilkan capaian Indeks Kualitas Lahan yang baik pula. Hal ini disebabkan porsi perhitungan Indeks Kualitas Lahan yang lebih besar dalam rumus perhitungan IKLH, yakni 40%.

Indonesia dan Kalimantan Timur diakui turut berkontribusi terhadap pemanasan global melalui peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dimana Indonesia termasuk penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia, sementara Kalimantan Timur sendiri penghasil emisi terbesar ke-6 secara nasional (WRI, 2016). Penyumbang emisi GRK di Kalimantan Timur sampai tahun 2015 didominasi oleh sektor berbasis lahan berupa alih guna dan degradasi hutan (64%), energi (17%), limbah (17%) dan pertanian (2%).

Strategi transformasi ekonomi yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengarahkan pembangunan dengan cara meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sumber daya alam yang ada selama ini. Dengan melihat semakin menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan semakin menurunnya ekonomi dari sumber daya alam tak terbarukan, maka Pemprov Kaltim melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang, antara berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam yang terbarukan, yang dilakukan secara sistematis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengarahkan rencana pembangunan di Kalimantan Timur sejalan dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca

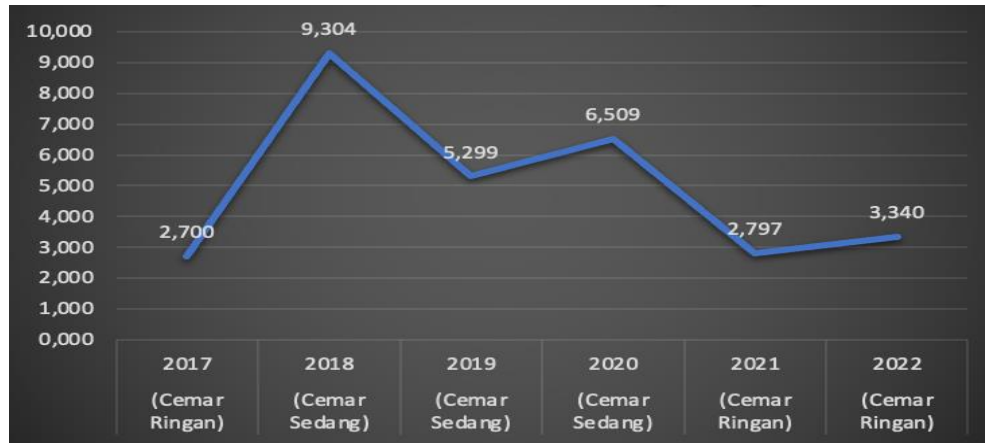
(GRK) dan strategi pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan disertai upaya mengarusutamakan ekonomi hijau ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota di Kaltim.

Dalam Konteks Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) adalah suatu keharusan untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar Pemerintah Daerah mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan RAD GRK, meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian target penurunan emisi dan penyerapan GRK. Selain itu, tahapan PEP ini dapat menjadi momentum untuk penyiapan bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan/Tindakan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan RAD GRK di tahun-tahun berikutnya. Sejak Tahun 2017, Kalimantan Timur tercatat sudah melakukan inventarisasi aksi mitigasi perubahan iklim dan di PEP kan. Hingga tahun 2022 total aksi yang sudah disetujui dan final di PEP/Aplikasi AKSARA Bappenas adalah sebanyak 836 aksi.

Kalimantan Timur sebagai Provinsi yang terpilih sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang baru juga memiliki masalah yang populer terjadi di Provinsi yang memiliki kota besar lainnya di Indonesia, yakni permasalahan pencemaran lingkungan. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan penanganan yang serius oleh semua pihak agar penanganannya dilakukan secara serius dan cepat tanggap. Maka dari itu dalam menentukan tingkat pencemaran lingkungan dilakukan pengukuran Indeks Pencemaran Lingkungan. Indeks Pencemaran Lingkungan adalah Indeks Pencemaran (IP) dari pemantauan Kualitas Air yang kemudian dilakukan penghitungan indeks pencemarannya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Tahun 2021 capaian Indeks Pencemaran 2,797 (Status Cemar Ringan) dari rata-rata 27 titik pemantauan kualitas air, sedangkan target yang ditetapkan adalah 8 (Status Cemar Sedang) artinya Indeks Pencemaran pada tahun 2021 masih dibawah status cemar sedang, yaitu cemar ringan. Tahun 2022 data Indeks Pencemar yang dihitung adalah 3,34 (Cemar ringan) dari 179 titik pemantauan kualitas air, sedangkan target tahun 2022 yang ditetapkan adalah 8 (cemar sedang) artinya capaian sementara tahun 2022 masih dibawah status mutu air cemar sedang. Jika dibandingkan dengan capaian IP tahun 2021 (2,797) dan IP sementara

tahun 2022 (3,34) terdapat selisih nilai yaitu 0,543, hal ini disebabkan adanya pada Tahun 2022 nilai Indeks Pencemaran dilakukan perhitungan penggabungan titik pantau kualitas air sebanyak 179 titik pemantauan kualitas air antara titik KLHK, titik Provinsi Kaltim dan titik Kabupaten/Kota, sehingga nilai tersebut dapat mempengaruhi hasil perhitungan Indeks Pencemaran pada Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar II.70
Indeks Pencemaran Lingkungan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022)

Selanjutnya, Kaltim telah dipilih sebagai lokasi Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) pada Oktober 2015. Program FCPF *Carbon Fund* dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di seluruh Kaltim (12,7 juta hektar) untuk mempertahankan 6,5 juta hektar kawasan berhutan. Apabila dilihat dari pengurangan emisi gas rumah kaca, Provinsi Kaltim terus berusaha untuk melakukan upaya-upaya penurunan emisi.

Tabel II.71
Angka Penurunan Emisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022

| Keterangan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Angka Penurunan Emisi (juta ton co2eq) | 54,12 | 42,14 | 34,65 | 24,41 | 20,89 | 36,4 |

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022

Dalam pengukuran emisi GRK Kalimantan Timur Tahun 2022 (Sementara), menggunakan 2 rumus dalam mendapatkan nilai persentase

penurunan emisi dari BAU (%), berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan:

$$\text{Jumlah Penurunan Emisi GRK} = \text{BAU Baseline Total} - \text{Total Emisi GRK}$$

$$\text{Persentase Penurunan Emisi GRK} = \left(\frac{\text{Jumlah Penurunan Emisi GRK}}{\text{BAU Baseline Total}} \right) \times 100\%$$

Saat ini merujuk pada data sementara Tahun 2022, Kalimantan Timur berhasil menurunkan emisi sebanyak 36,4 Juta Ton CO₂ eq atau sebanyak 70,68%. Capaian persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target capaian persentase penurunan emisi dari BAU (*Business As Usual*) di P-RPJMD Kaltim 2019-2023, yakni 28,50. Sehingga dapat dikatakan sementara ini capaian penurunan emisi dari BAU telah melampaui target pada P-RPJMD. Menurut Data Tahun 2021, potensi penurunan emisi sebesar 20,89 Juta ton CO₂ eq, dimana penurunan emisi terbesar berasal dari sektor lahan sebesar 18.9 Juta ton CO₂ eq, energi dan transportasi sebesar 1.6 Juta ton CO₂ eq, sektor limbah sebesar 0.2 Juta ton CO₂ eq dan pertanian-peternakan sebesar 0.098 Juta ton CO₂ eq. Total Penurunan Emisi pada tahun tersebut sebesar 41.96%, penurunan ini jauh dari targetan dalam dokumen RAD GRK 2010-2030 yang sebesar 27.75% untuk tahun 2021. Besaran capaian penurunan Emisi jika di bandingkan target sebesar 151.21%. Fluktuatif capaian ini jelas sangat terlihat dari tingginya capaian penurunan emisi dari sektor lahan.

K. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Indikator Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun LPPD di Tahun 2022 bernilai 100 persen yang didapat dari Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun dengan realisasi dan target sebanyak 2 kali. Pada Indikator Pemanfaatan data kependudukan LPPD OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian 107 kerja sama sebanyak 9 kabupaten/kota dari 34 kabupaten/kota.

Tabel II.72

Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

| No | KAB/KOTA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|--|-------|-------|------|------|------|
| 1 | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh | 82,84 | 84,83 | - | - | - |

| No | KAB/KOTA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---|-------|-------|------|-------|-------|
| | lembaga pencatatan sipil, menurut umur. (persen) | | | | | |
| 2 | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (persen) | 92,30 | 92,69 | - | - | - |
| 3 | Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk (kebijakan) | - | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Kebijakan terkait pencatatan sipil (kebijakan) | - | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan (kebijakan) | - | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun LPPD (kali) | - | - | - | 100% | 100% |
| 7 | Pemanfaatan data kependudukan lppd (OPD) | - | - | - | 18,92 | 26,47 |

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2022

L. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki target sasaran desa prioritas sebanyak 10.000 desa dari 74.953 desa di seluruh Indonesia, kemudian dari 271 kawasan perdesaan ditetapkan jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN sebanyak 62 kawasan dan 30 sasaran Kawasan perdesaan non KPPN yang sudah memiliki indeks perkembangan kawasan perdesaan. Dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi pengembangan KPPN yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Pada Kabupaten Kutai Timur memiliki keunggulan berupa potensi wisata terpadu, sedangkan pada Kabupaten Berau memiliki potensi Minapolitan (Udang dan Bandeng).

Tabel II.73
Lokus Prioritas Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
Provinsi Kalimantan Timur

| NO | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Nama Kawasan Perdesaan |
|----|-------------|------------------------|---|---|
| 1. | Kutai Timur | Sangatta Selatan | Sengata Selatan, Sangkima, Teluk Sangkima | Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK Kutai Timur yang ditetapkan dalam SK Bupati Nomor 050/K.433/2018 dan Perbup No 27 Tahun 2018 tentang RPKP |
| | | Kecamatan Teluk Pandan | Kandolo dan Teluk Pandan | |
| 2. | Berau | Pulau Derawan | Pulau Derawan, Teluk Semanting, Pegat Bertumbuk, Kasai dan Tanjung Batu | Kawasan Perdesaan Mina-Bestari Tanjung Redeb yang ditetapkan dalam Kep. Bupati Berau Nomor 227 tahun 2017 dan Nomor 236 tahun 2017 |

Sumber: Renstra Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT 2021

Berikut ini merupakan indikator kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam kurun waktu Tahun 2018-2022, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.74
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

| No | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa | - | - | - | 27 | - |
| 2 | Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya | - | - | - | 8 | - |
| 3 | Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan | - | - | - | 15 | - |
| 4 | Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan | - | - | - | 30 | - |

| No | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|--|------|--------|--------|--------|--------|
| | lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan | | | | | |
| 5 | Persentase pengentasan desa tertinggal | - | - | - | 90,00 | 68,52 |
| 6 | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | - | - | - | 0,66 | 92,25 |
| 7 | Indeks Desa Membangun | - | 0,6238 | 0,6752 | 0,7071 | 0,7320 |
| 8 | Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan | - | 35 | 35 | - | - |
| 9 | Jumlah Bumdes Yang Aktif | 289 | 304 | 323 | 353 | 388 |
| 10 | Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | - | 80 | 80 | - | - |
| 11 | Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat | - | 1 | 1 | - | - |
| 12 | Jumlah Kelompok Masyarakat Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar | - | 18 | 18 | - | - |
| 13 | PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan | - | 150 | 165 | - | - |
| 14 | Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat | - | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran | - | 15 | 363 | - | - |
| 16 | Jumlah Desa berkembang | - | 15 | 329 | - | 339 |
| 17 | Jumlah Kampung/Desa Iklim | - | - | 40 | - | - |
| 18 | Desa Tertinggal (Desa) | 381 | 285 | 128 | 78 | 17 |
| 19 | Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa) | - | - | - | 30 | 35 |
| 20 | Desa yang telah melaksanakan Penataan | - | - | - | 7 | 7 |
| 21 | Kampung/Desa Iklim + (Desa | - | - | - | 25 | 27 |
| 22 | Meningkatnya Desa Berkembang (Desa) | 381 | 285 | 128 | 30 | 35 |
| 23 | Desa Berkembang | - | - | - | 30 | 30 |
| 24 | Meningkatnya Bumdes yang aktif (Bumdes) | 289 | 304 | 323 | 353 | 388 |
| 25 | Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan | - | - | - | 30 | 30 |
| 26 | Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh pembinaan | 323 | 338 | 363 | - | - |

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

M. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Indikator kinerja lainnya pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu Tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.75
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

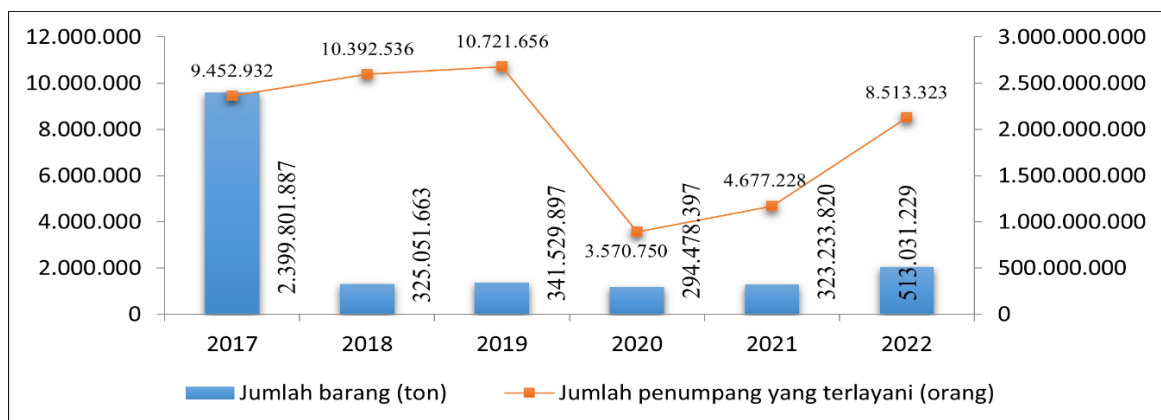
| No | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---|------|---------|------|------|------|
| 1 | peran perempuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga | - | 100 | - | - | - |
| 2 | terwujudnya keluarga berencana dalam kesetaraan gender dan anak dalam pengendalian penduduk | - | 100 | - | - | - |
| 3 | jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) | - | 100 org | - | - | - |
| 4 | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Perangkat Daerah (SKM) | 50 | - | 70 | - | - |
| 5 | Kebijakan tentang pengendalian penduduk | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 6 | Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 0 | 0 | 33 | 40 | - |
| 7 | Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 8 | Kebijakan tentang pengendalian penduduk | - | - | - | 1 | - |
| 9 | Jumlah dokumen grand desain pembangunan Kab/Kota dalam 5 aspek | - | - | - | 1 | - |
| 10 | Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | - | - | - | 160 | - |
| 11 | Peningkatan jumlah peserta KB | - | - | - | 160 | - |
| 12 | Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | - | - | - | 140 | - |
| 13 | Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | - | - | - | 140 | - |
| 14 | TFR (Angka Kelahiran Total) | - | - | - | 2,51 | 2,18 |
| 15 | Kampung KB | 154 | 160 | 175 | | |

| No | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|--|------|------|------|-------|-------|
| 16 | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>) | - | - | - | 50,82 | 55,50 |
| 17 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) | - | - | - | 22,18 | 29,70 |

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

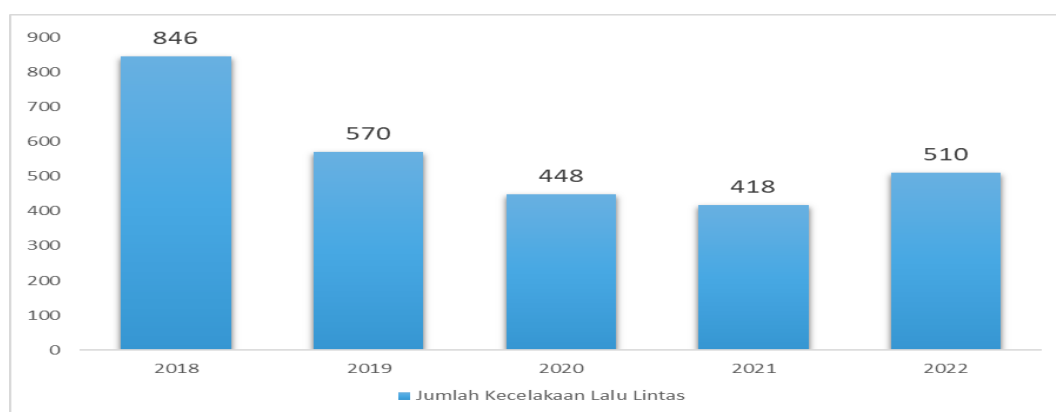
N. Perhubungan

Jumlah Penumpang yang terlayani dan jumlah barang yang diangkut terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2019 jumlah orang yang terlayani sebesar 10.721.656 orang penumpang, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 7.150.906 orang penumpang sehingga menjadi 3.570.750 orang penumpang, kemudian mengalami peningkatan kembali sehingga menjadi 4.667.228 orang penumpang. Pada tahun 2019 jumlah barang yang diangkut sebesar 341.529.297 ton, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 47.041.900 ton sehingga menjadi 294.478.397 Ton. Hal ini disebabkan beberapa negara telah melakukan pembatasan penerbangan untuk mencegah wabah pandemi COVID-19 masuk ke negara tersebut. Pada tahun 2021, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian dikarenakan telah berkurangnya pandemi COVID-19 dan telah dilaksanakannya vaksinasi sehingga jumlah penumpang dan barang yang diangkut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 4.667.228 orang dan 323.233.820 ton. Pada tahun 2022 jumlah penumpang dan barang yang diangkut terus mengalami peningkatan, untuk jumlah penumpang menjadi 8.513.323 orang dan jumlah barang menjadi 513.031.229 ton.



Gambar II.71
 Jumlah Penumpang yang terlayani dan Jumlah Barang
 Tahun 2017-2022
 (Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2022)

Terjadi penurunan jumlah kecelakaan di Kalimantan Timur dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Data kecelakaan pada tahun 2018 mencapai 846 kasus kecelakaan, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 418 kasus kecelakaan. Hal yang mengakibatkan penurunan kasus kecelakaan adalah pemasangan fasilitas pengaman jalan pada ruas-ruas jalan provinsi di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, sinergitas dan koordinasi antar stakeholders untuk menurunkan angka kasus kecelakaan semakin baik. Hal tersebut dicapai melalui rapat – rapat koordinasi secara berkala antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Polda Kaltim dan Stakeholders lainnya. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus kecelakaan menjadi sebanyak 510 kasus kecelakaan, hal ini diakibatkan oleh aktifitas masyarakat yang berkendara di jalan terus meningkat karena pada tahun 2022 merupakan tahun pemulihan perekonomian pasca kasus COVID-19.



Gambar II.72
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018 – 2022
(Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2022)

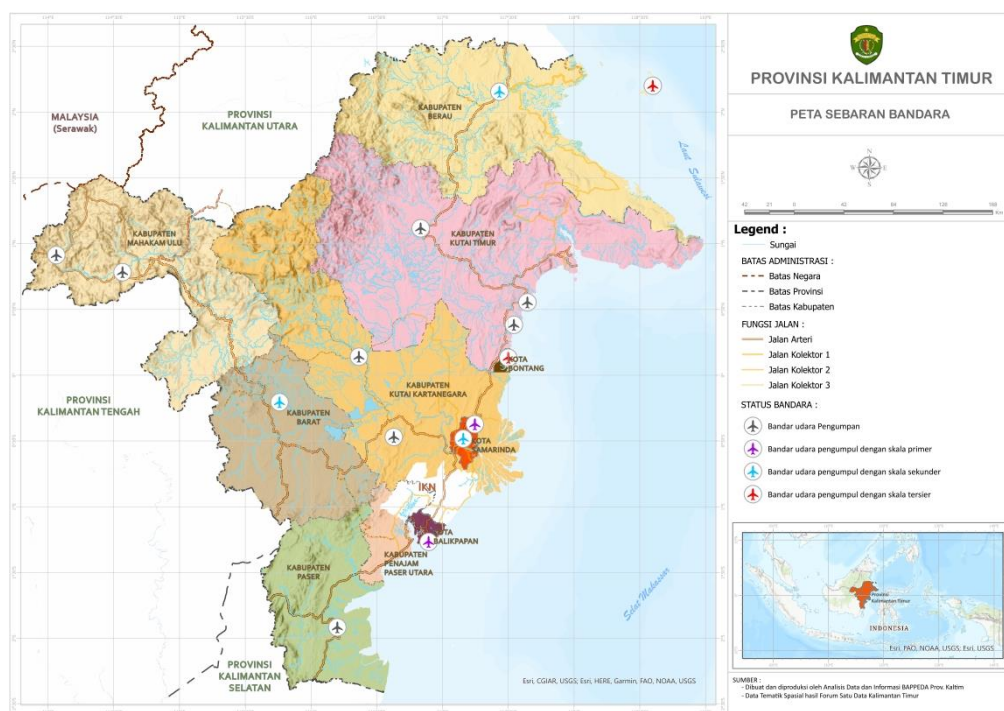
Ketersediaan prasarana perhubungan laut juga sudah cukup baik, upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pengembangan pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Terminal Peti Kemas Balikpapan dan Pelabuhan Maloy.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang yang terletak di Kota Balikpapan. Selain itu layanan transportasi udara yang cukup memadai juga difasilitasi oleh Bandara Kalimantan di Berau dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Bandara-bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara

di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Meskipun kuantitas bandara dan maskapai tidak mengalami perubahan sejak tahun 2017, namun kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan perhubungan udara terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Di Kalimantan Timur terdapat 6 bandar udara yang terdiri dari 1 bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I dan 5 bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI. Secara khusus perkembangan bandara APT. Pranoto, saat ini telah beroperasi 7 (tujuh) maskapai dengan rute penerbangan yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Berau, Melak, Tanjung Selor, dan Datah Dawai.

Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang runway 1.600 m telah dilakukan di kawasan perbatasan yaitu kecamatan Data Dawai dan di Pulau kecil terluar yaitu Pulau Maratua. Selain itu, telah direncanakan pembangunan bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di daerah perbatasan.



Gambar II.73
Peta Bandara Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021)

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 bahwa pendekatan multi-dimensi dalam perumusan kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana amanat undang-undang diharapkan mampu mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa, membantu menciptakan konektivitas dan pola distribusi nasional yang handal (*reliable*) dan dinamis serta berkontribusi dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan hirarki pelabuhan, di Kalimantan Timur tahun 2017 telah ditetapkan 13 pelabuhan laut yang terdiri 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (Sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 3 (Tiga) Pelabuhan Regional. Selanjutnya pada tahun 2022 penetapan Pelabuhan tersebut mengalami perubahan menjadi 1 (satu) Pelabuhan Utama, 10 (Sepuluh) Pelabuhan Pengumpul dan 2 (Dua) Pelabuhan Regional yaitu Pelabuhan Mataritip di Kabupaten Berau dan Pelabuhan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur.

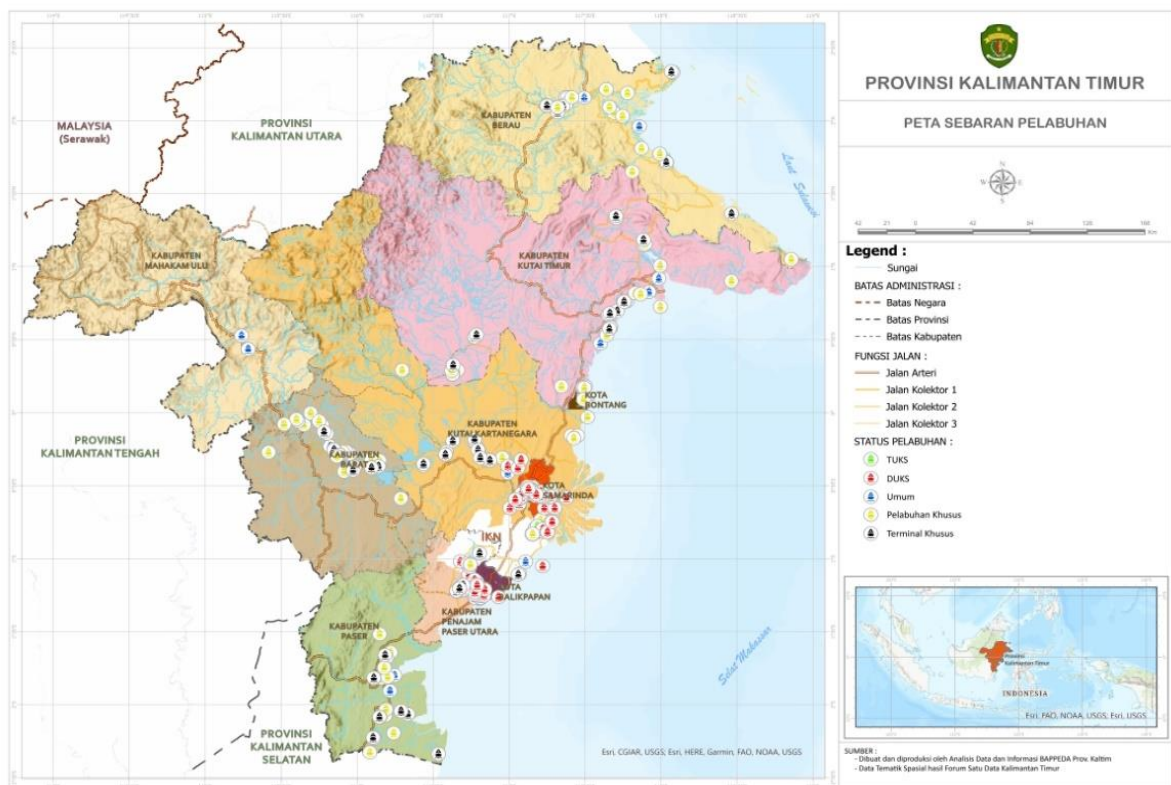
Tabel II.76
Rencana Induk Pelabuhan Nasional
Di Kalimantan Timur Berdasarkan KP 432 Tahun 2017

| No. | Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----|------------------------|--------------------|------|------|------|
| | Kab/Kota | No. | Pelabuhan | Hierarki Pelabuhan | | | |
| | | | | 2017 | 2022 | 2027 | 2037 |
| XXIII. Provinsi Kalimantan Timur | | | | | | | |
| 304 | Balikpapan | 1 | Balikpapan | PU | PU | PU | PU |
| 305 | Berau | 2 | Mataritip | PR | PR | PR | PR |
| 306 | Berau | 3 | Tanjung Redeb | PR | PP | PP | PP |
| 307 | Bontang | 4 | Lhok Tuan | PP | PP | PP | PP |
| 308 | Bontang | 5 | Tanjung Laut | PP | PP | PP | PP |
| 309 | KUKAR | 6 | Kuala Samboja / Sebulu | PP | PP | PP | PP |
| 310 | KUKAR | 7 | Tanjung Santan | PP | PP | PP | PP |
| 311 | KUTIM | 8 | Maloy | PP | PP | PP | PP |
| 312 | KUTIM | 9 | Sangatta | PP | PP | PP | PP |
| 313 | KUTIM | 10 | Sangkulirang | PR | PR | PR | PR |
| 314 | Paser | 11 | Tana Paser / Pondong | PP | PP | PP | PP |
| 315 | PPU | 12 | Penajam Paser | PP | PP | PP | PP |
| 316 | Samarinda | 13 | Samarinda | PP | PP | PP | PP |

Sumber: Kementerian Perhubungan Provinsi KALTIM

Untuk pelayanan angkutan penyeberangan telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan yang terdapat di Kalimantan Timur yaitu 2 (dua) Pelabuhan Kelas I yang terdiri dari Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Penajam, 1 (satu) Pelabuhan Kelas II yaitu Pelabuhan Tenggarong, dan 4

(empat) Pelabuhan Kelas IV yang terdiri dari Pelabuhan Desa Sakka, Sungai Meriam, Handil I dan Gunung Tabur.



Gambar II.74
Peta Pelabuhan Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang. Namun kondisi kedua terminal tersebut memerlukan peningkatan pelayanan fasilitas. Selanjutnya untuk melayani Antar Kota Dalam Provinsi ditetapkan 7 Terminal Tipe B yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota.

O. Komunikasi Dan Informatika

1) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada tahun 2021 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan nilai menjadi 2,22 dibandingkan tahun sebelumnya berada di angka 3,14. Hal ini disebabkan karena perubahan aspek penilaian dan evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2018 hingga 2020 pedoman evaluasi yang dilakukan

menggunakan Permen PAN & RB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan tahun 2021 hingga saat ini menggunakan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel II.77
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Indeks SPBE | 2,89 | 3,04 | 3,14 | 2,22 | 2,11 |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim

Pelaksanaan SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga diikuti dengan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan data 2022, terdapat 6 (enam) daerah yang memiliki SPBD dengan predikat Cukup, sedangkan sisanya masih berpredikat Kurang. Ini menunjukkan masih perlunya penyiapan dan peningkatan penerapan SPBR baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

Tabel II.78
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

| INSTANSI | INDEKS SPBE | PREDIKAT |
|--------------------------------------|-------------|----------|
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | 2,22 | CUKUP |
| Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara | 2,48 | CUKUP |
| Pemerintah Kab. Paser | 1,36 | KURANG |
| Pemerintah Kab. Kutai Barat | 1,83 | CUKUP |
| Pemerintah Kab. Kutai Timur | 1,03 | KURANG |
| Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara | 2,14 | CUKUP |
| Pemerintah Kab. Mahakam Ulu | 1,03 | KURANG |
| Pemerintah Kota Saamrinda | 2,46 | CUKUP |
| Pemerintah Kota Balikpapan | 2,44 | CUKUP |
| Pemerintah Kota Bontang | 2,11 | CUKUP |

Sumber : Kepmenpan RB No. 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2021

L. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pentingnya peran koperasi dan UKM Koperasi dan UKM ditujukan untuk membantu pemberdayaan perekonomian masyarakat terutama para pengusaha mikro kecil dan menengah. Pembangunan dan pembinaan Koperasi dan UKM telah menunjukkan dampak yang positif, meskipun

belum optimal mengubah struktur perekonomian daerah. Pentingnya peran koperasi dan UKM di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa Koperasi dan UKM merupakan bentuk perekonomian kerakyatan di Kalimantan Timur. Adapun jumlah koperasi aktif tahun 2022 adalah sebanyak 3.117 Koperasi dari jumlah koperasi sebanyak 6.041 Koperasi. Secara rinci perkembangan aktivitas koperasi dijelaskan melalui tabel berikut:

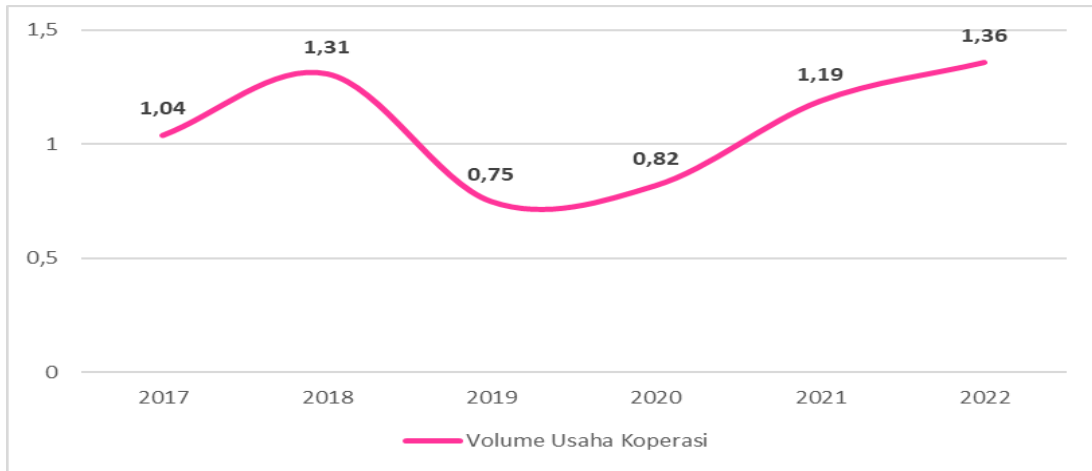
Tabel II.79
Perkembangan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2022

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Koperasi Aktif | 3.428 | 2.832 | 2.751 | 2.844 | 3.117 |
| 2 | Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT | 657 | 583 | 351 | 457 | 451 |
| 3 | Jumlah Seluruh Koperasi | 5.406 | 5.664 | 5.619 | 5.676 | 6.041 |
| 4 | Jumlah Anggota Koperasi | 86.297 | 82.054 | 57.381 | 68.580 | 96.940 |

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2023

Pada tabel diatas terlihat jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dan jumlah seluruh koperasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pengurus koperasi dalam pertanggung jawaban koperasi. Disamping itu masih rendahnya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 tahun sekali atau paling lambat 6 bulan setelah tutup buku. Pelaksanaan RAT bagi koperasi menjadi syarat untuk menjadi koperasi yang bisa dikatakan aktif dan sehat.

Jumlah anggota koperasi di Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, kondisi tahun 2020 mengalami penurunan jumlah anggota yakni 57.381 orang. Secara umum kendala penurunan di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19, namun kendala lain yang dihadapi adalah berkurangnya modal, berkurangnya pelanggan, dan harga produk yang menurun. Hal ini juga memberi pengaruh pada jumlah volume usaha koperasi yang tergambar pada gambar berikut.



Gambar II.75
 Volume Usaha Koperasi Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2016–2022 (Triliun Rupiah)
 (Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2023)

Jumlah volume usaha koperasi di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah volume usaha koperasi tahun 2019 dan 2020 berada di bawah 1 Triliun Rupiah. Tahun 2021 jumlah volume usaha koperasi kembali pulih mencapai 1,19 Triliun Rupiah dan 1,36 Triliun Rupiah pada tahun 2022 yang diikuti dengan bertambahnya jumlah koperasi aktif, jumlah anggota koperasi, dan koperasi yang melaksanakan RAT.

Sementara Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pergerakan perekonomian daerah khususnya perekonomian masyarakat. Usaha kecil dan menengah merupakan usaha yang mampu bertahan lebih baik di saat pandemi COVID-19. Secara rinci jumlah UKM berdasarkan jenis usaha di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel II.80
 Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten/Kota
 Tahun 2022

| No. | Kab/Kota | Industri | | | Dagang | Jasa | Total |
|-----|------------|----------|---------------------|-----------|--------|--------|---------|
| | | Kuliner | Industri Pengolahan | Kerajinan | | | |
| 1 | Paser | 18.469 | 983 | 783 | 21.886 | 5.368 | 47.489 |
| 2 | KUBAR | 2.235 | - | 861 | 8.511 | 2.223 | 13.830 |
| 3 | KUKAR | 35.320 | 825 | 130 | 23.719 | 434 | 60.428 |
| 4 | KUTIM | 11.221 | 1.204 | 30 | 3.360 | 875 | 2.989 |
| 5 | Berau | 4.509 | 62 | 53 | 9.467 | 851 | 14.942 |
| 6 | PPU | 5.813 | 489 | 18 | 6.269 | 878 | 13.467 |
| 7 | MAHULU | 338 | 1 | - | 247 | - | 586 |
| 8 | Balikpapan | 59.861 | 1.999 | 443 | 52.791 | 12.581 | 127.675 |

| No. | Kab/Kota | Industri | | | Dagang | Jasa | Total |
|-----|---------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Kuliner | Industri Pengolahan | Kerajinan | | | |
| 9 | Samarinda | 60.629 | 1.626 | 620 | 53.172 | 14.477 | 130.524 |
| 10 | Bontang | 16.631 | 968 | 160 | 16.282 | 475 | 34.516 |
| | Jumlah | 215.026 | 8.157 | 3.098 | 195.704 | 38.162 | 460.147 |

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2023

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sebanyak 460.147 UMKM. Jumlah terbanyak berada di Kota Samarinda yakni 130.524 UMKM, sedangkan terbanyak kedua adalah Kota Balikpapan sebanyak 127.675 UMKM. Jenis usaha UMKM yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur beragam, mulai dari kuliner, industri pengolahan, industri kerajinan, perdagangan dan jasa. Jenis usaha didominasi pada usaha kuliner sebanyak 215.036 UMKM dan usaha dagang sebanyak 195.704 UMKM. Banyaknya usaha dagang dan kuliner ini tidak dipungkiri karena kemudahan dalam penyediaan modal dan banyak peminat. Sedangkan jenis usaha paling sedikit adalah industri kerajinan yakni 3.098 UMKM dimana jenis usaha ini tidak terdapat pada Kabupaten Mahulu.

M. Penanaman Modal

1) Jumlah Proyek Investasi Dalam Negeri dan Asing (PMDN/PMA)

Kenaikan jumlah proyek investasi merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian.

Tabel II.81
Jumlah Proyek PMDN/PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

| Tahun | PMDN | PMA | Total |
|-------|-------|-------|--------|
| 2018 | 520 | 513 | 1.033 |
| 2019 | 2.227 | 903 | 3.130 |
| 2020 | 3.924 | 778 | 4.702 |
| 2021 | 9.291 | 1.034 | 10.325 |
| 2022 | 6.706 | 1.055 | 7.711 |

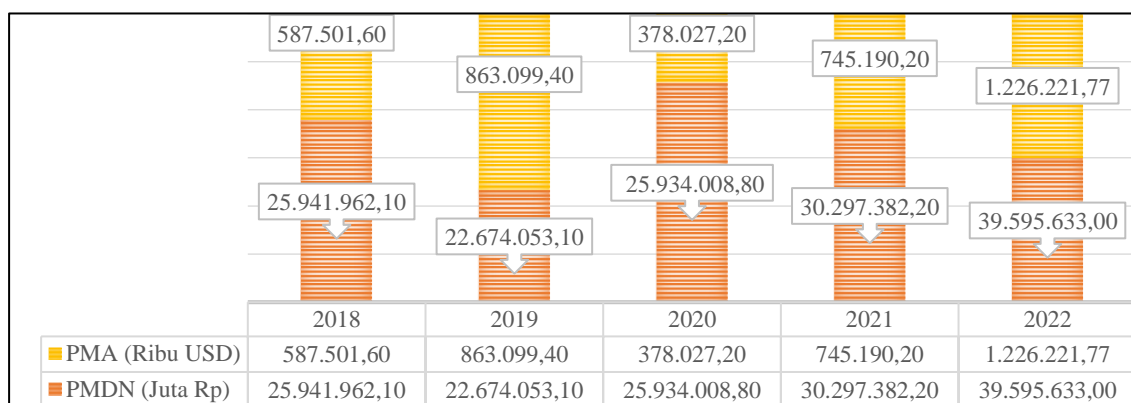
Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2022

Dilihat dari total jumlah proyek PMDN/PMA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah proyek

PMDN/PMA di Kalimantan Timur sebanyak 10.325 proyek, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya sebanyak 4.702 proyek. Kenaikan jumlah proyek pada investasi Dalam Negeri sebesar 5.367 proyek dan kenaikan proyek pada investasi Asing sebesar 256 proyek. Peningkatan jumlah proyek baik penanaman modal dalam negeri maupun asing ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif pada nilai investasi sehingga mampu menggerakkan perekonomian dengan lebih baik. Pada tahun 2022 jumlah proyek PMDN sebesar 6.706 proyek dan PMA sebesar 1.005 proyek. Proyek pada investasi Dalam Negeri dominan berlokasi di Kota Balikpapan dengan jumlah 1.850 proyek dan di Kota Samarinda dengan jumlah 1.845 proyek. Begitu juga untuk proyek investasi asing dominan berlokasi di Kota Balikpapan dengan jumlah 332 proyek.

2) Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Nilai realisasi investasi dalam negeri tahun 2022 mencapai Rp 39,59 triliun dengan 5 (lima) sektor utama yakni pertambangan (37,91%), Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi (37,67%), Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (9,22%), Industri Makanan (6,04%), dan Perdagangan dan Reparasi (1,74%). Selanjutnya nilai realisasi investasi asing mencapai US\$ 1.266,22 Juta dengan 5 (lima) sektor utama yaitu pertambangan (40,74%), Industri Mineral Non Logam (17,06%), Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (15,01%), Industri makanan (7,59%), dan Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (7,42%). Dengan adanya IKN Nusantara di Kalimantan Timur tentunya akan membawa pengaruh yang baik terhadap nilai invesasi di kemudian hari dikarenakan adanya peningkatan aktivitas investasi oleh investor.



Gambar II.76

Nilai Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022

(Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2023)

Kalimantan Timur telah dikenal sebagai provinsi yang punya banyak kekayaan alam, mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, maupun sektor lainnya seperti Agrikultur, Pariwisata dan Industri pengolahan. Hal ini menjadi daya tarik investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal di Kalimantan Timur baik pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Di samping itu, kehadiran IKN Nusantara tentu menjadi potensi yang baik untuk investasi ke depan.

Berdasarkan Realisasi Investasi PMDN, mulai tahun 2017-2019 sektor pertambangan merupakan sektor yang paling dominan dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, namun sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia sektor yang paling dominan di tahun 2020 adalah sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi yang mencapai Rp 7.965,22 miliar dan meningkat tajam di tahun 2021 hingga mencapai Rp 15.145,34 miliar. Investasi sektor pertambangan juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai Rp 5.859,33 miliar meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3.818,59 miliar diikuti sektor Tanaman pangan dan perkebunan yang mencapai Rp 4.828,00 miliar. Pada tahun 2022 sektor pertambangan kembali menjadi sektor paling dominan dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri yakni Rp 15.012,38 miliar. Peningkatan ini terjadi karena adanya momentum membaiknya harga komoditas batubara pada level tinggi dan menjadi faktor pendorong investasi di sektor pertambangan. Sektor lain yang juga berkontribusi cukup besar adalah sektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi mencapai Rp 14.914,62 miliar, serta sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan mencapai Rp 3.650,82 miliar.

Tabel II.82
Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

| No. | Sektor Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| I. | Sektor Primer | | | | | |
| 1. | Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan | 3.747.269,70 | 4.278.148,30 | 4.738.083,60 | 4.828.002,20 | 3.650.817,60 |
| 2. | Kehutanan | 602.835,40 | 283.625 | 125.549,60 | 73.973,60 | 346.853,60 |
| 3. | Perikanan | . | . | 3,00 | 0,50 | 2,00 |
| 4. | Pertambangan | 12.559.385,40 | 8.712.257,70 | 3.818.587,60 | 5.859.330,30 | 15.012.379,10 |
| II. | Sektor Sekunder | | | | | |
| 1. | Industri Makanan | 1.687.495,70 | 569.890,60 | 1.397.339,40 | 671.841,30 | 2.390.781,50 |

| No. | Sektor Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. | Industri Tekstil | . | . | - | 2,00 | 431,00 |
| 3. | Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki | . | . | - | - | - |
| 4. | Industri Kayu | 264.104,30 | 350.224 | 97.509,90 | 5.996,00 | 24.001,70 |
| 5. | Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan | . | . | 0 | 5,00 | 500,00 |
| 6. | Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi | 1.034,70 | 444.145,60 | 7.965.221,90 | 15.145.338,40 | 14.914.625,40 |
| 7. | Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik | . | 9.000 | 70,80 | - | 7.209,90 |
| 8. | Industri Mineral Non-Logam | 17.919,90 | 292.133,10 | 95,00 | 2.351 | 18.184,90 |
| 9. | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik | . | . | 5.000 | 10,30 | 521.796,50 |
| 10. | Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam | . | . | 0 | 39,50 | 4.381,50 |
| 11. | Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya | 7.620 | 151.706,50 | 3.626,30 | 9.221,80 | 21.487,30 |
| 12. | Industri lainnya | . | 509,50 | 70.348,60 | 5.200,50 | 48.889,00 |
| III. | Sektor Tersier | | | | | |
| 1. | Listrik, Gas, dan Air | 2.559.556,90 | 2.021.363,60 | 759.122,70 | 298.896,80 | 165.780,50 |
| 2. | Konstruksi | 3.204.289,50 | 1.223.384,70 | 5.777.776,90 | 113.413,70 | 55.394,60 |
| 3. | Perdagangan dan Reparasi | 82.557,40 | 341.327,60 | 218.379,90 | 295.260,00 | 687.631,40 |
| 4. | Hotel dan Restoran | 480 | 1.086.261,80 | 25.127 | 55.384,90 | 199.549,50 |
| 5. | Transportasi, Gudang dan Komunikasi | 165.403,80 | 940.606,30 | 459.299,20 | 1.503.072,30 | 573.564,20 |
| 6. | Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran | 26.874,40 | 345.944,10 | 53.687,40 | 840.351,30 | 286.654,80 |
| 7. | Jasa Lainnya | 1.015.135 | 1.623.524,70 | 419.150 | 589.690,80 | 664.717,90 |
| | Total | 25.941.962,10 | 22.674.053,10 | 25.934.008,80 | 30.297.382,20 | 39.595.633,00 |

Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2023

Disamping itu pada realisasi investasi PMA, lapangan usaha pertambangan yang memiliki peranan terbesar di Kalimantan Timur tahun 2017-2022 mengalami peningkatan nilai investasi PMA yang mencapai US\$ 515.919,94 Ribu dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 252.125,20 Ribu. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan secara signifikan tahun 2021 yaitu sektor Industri Makanan yang mencapai US\$ 242.430,00 Ribu. Kondisi ini merupakan posisi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2022 yang hanya mencapai US\$ 96.106,59 Ribu diikuti sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi, serta tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan masuknya investasi asing ke Kalimantan Timur. Salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi

asing ini juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Selain itu, masuknya investasi asing biasanya disertai dengan transfer teknologi baru yang dikembangkan serta tidak menutup kemungkinan pula para investor asing akan bekerjasama dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Keterlibatan UMKM ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional.

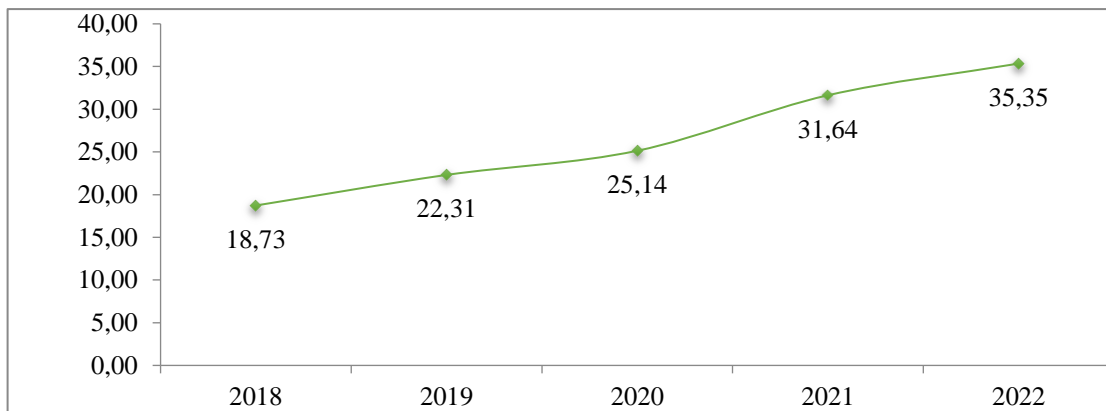
Tabel II.83
Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (US\$)

| No | Sektor Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. | Sektor Primer | | | | | |
| 1. | Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan | 64.114.100 | 185.796.300 | 67.781.500 | 58.097.000 | 190.013.892 |
| 2. | Kehutanan | 657.100 | 2.751.700 | 2.071.400 | 2.330.000 | 37.276.491 |
| 3. | Perikanan | 135.500 | . | - | - | - |
| 4. | Pertambangan | 188.763.000 | 306.457.800 | 167.858.400 | 252.125.200 | 515.919.940 |
| II. | Sektor Sekunder | | | | | |
| 1. | Industri Makanan | 118.386.600 | 14.264.600 | 41.235.500 | 242.430.000 | 96.106.592 |
| 2. | Industri Tekstil | . | . | - | - | - |
| 3. | Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki | . | . | - | - | - |
| 4. | Industri Kayu | 6.600 | 33.300 | - | 15.291.200 | 1.811.899 |
| 5. | Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan | . | . | - | - | - |
| 6. | Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi | 760.700 | 60.000 | 32.861.600 | 66.411.000 | 60.176.592 |
| 7. | Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik | 256.700 | 561.100 | 986.400 | 990.600 | 136.400 |
| 8. | Industri Mineral Non-Logam | . | 15.809.600 | 24.840.000 | 40.020.700 | 216.016.282 |
| 9. | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik | 22.600 | 1.879.400 | 276.400 | 24.600 | 93.934.693 |
| 10. | Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam | 253.200 | 1.533.400 | 3.550.700 | 1.084.700 | 1.967.500 |
| 11. | Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya | . | 43.800 | - | - | 10.091.596 |
| 12. | Industri lainnya | 526.100 | 134.600 | - | - | - |
| III. | Sektor Tersier | | | | | |
| 1. | Listrik, Gas, dan Air | 53.012.000 | 280.607.900 | 278.800 | - | - |
| 2. | Konstruksi | 5.093.100 | . | - | - | - |
| 3. | Perdagangan dan Reparasi | 3.738.700 | 4.258.100 | 5.618.500 | 3.804.800 | 9.497.500 |
| 4. | Hotel dan Restoran | 2.245.800 | 1.297.000 | 791.000 | 586.000 | 3.682.299 |
| 5. | Transportasi, Gudang dan Komunikasi | 86.566.000 | 14.847.700 | 29.415.000 | 52.588.300 | 16.726.698 |

| No | Sektor Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 6. | Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran | 301.200 | 146.900 | 221.300 | 9.379.800 | 6.288.898 |
| 7. | Jasa Lainnya | 62.662.600 | 32.616.200 | 240.700 | 26.300 | 6.574.500 |
| Total | | 587.501.600 | 863.099.400 | 378.027.200 | 745.190.200 | 1.266.221.770 |

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2022

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan pada tahun 2017 yang mencapai Rp 11,42 triliun dan mengalami peningkatan ditahun berikutnya hingga mencapai Rp 35,35 triliun pada tahun 2022.



Gambar II.77

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Triliun Rp)

(Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2023)

Nilai investasi sektor non migas dan batubara tahun 2021 yang mencapai Rp 31,64 triliun ini terdiri dari investasi PMDN sebesar Rp 24,44 triliun dan PMA sebesar Rp 7,2 triliun. Peningkatan nilai investasi ini dipengaruhi oleh masih tingginya angka kasus Covid-19 di tahun 2021 sehingga kontribusi sektor usaha Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni mencapai Rp 15,145 triliun. Selanjutnya nilai investasi sektor non migas dan batubara tahun 2022 ditargetkan di angka Rp 35 triliun. Di Triwulan IV target tercapai sebesar Rp 35,35 triliun. Tahun 2023 Nilai Investasi sektor non migas dan batubara ditargetkan mencapai Rp 35,67 triliun dan diharapkan ke depannya investasi sektor non migas dan batubara lebih maksimal.

N. Kepemudaan Dan Olah Raga

Setelah sukses meraih peringkat 7 besar pada PON XX Tahun 2021, Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. dari hasil capaian tersebut Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam *Event* berskala nasional maupun internasional. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam *Event* berskala nasional maupun internasional dengan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana olahraga yang ada.

Pada urusan kepemudaan dan olahraga ada 2 (dua) indikator kinerja yang perlu menjadi perhatian serius dalam menunjang peningkatan sumber daya pemuda yaitu :

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, indikator ini cukup menggambarkan tingkat partisipasi pemuda dalam berwirausaha.
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan, indikator ini mewakili peningkatan pemuda yang berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat.

Pemuda Kaltim diharapkan mampu memberikan dampak serta solusi ke depan dengan menjawab segala tantangan pembangunan di era revolusi industri 4.0 dan era *society* 5.0.

Pemuda Kaltim harus mampu bersaing dalam kepemimpinan dan kepeloporan ditingkat nasional agar memberikan motivasi bagi pemuda-pemuda lainnya untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi pemuda dan kemasyarakatan yang saat ini masih belum optimal. Tingkat kepercayaan diri pemuda Kaltim harus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam kebebasan berpendapat yang bertujuan terhadap perubahan ke arah yang lebih baik dan maju.

Tabel II.84
Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2021

| Uraian | Tahun | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah Organisasi Pemuda | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 305 |
| Jumlah Kegiatan Kepemudaan | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 38 |
| Jumlah Klub Olahraga | 1.050 | 1.050 | 1.087 | 1.109 | 1.109 | 1.112 |
| Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga | 97 | 101 | 102 | 105 | 105 | 105 |
| Jumlah Kegiatan Olahraga | 152 | 152 | 152 | 161 | 161 | 120 |
| Jumlah Organisasi Olahraga | 57 | 57 | 63 | 63 | 63 | 63 |

Sumber: DISPORA Provinsi KALTIM, 2022

O. Statistik

Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah bernilai 100 persen pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah berjumlah 37 OPD dari 37 OPD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja urusan statistik lainnya dalam kurun waktu Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.85
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kalimantan Timur

| No | Indikator | 2021 | 2022 |
|----|---|------|------|
| 1 | Tersedianya buku profil daerah | 1 | - |
| 2 | Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan | 1 | - |
| 3 | Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan | 1 | - |
| 4 | Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS | 1 | - |
| 5 | Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | 1 | - |
| 6 | Persentase kelengkapan metadada kegiatan Statistik sektoral | 100 | - |
| 7 | Persentase kelengkapan metadada indikator sektoral | 100 | - |
| 8 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 100% | 100% |
| 9 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | 100% | 100% |
| 10 | Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur | 50 | - |
| 11 | Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur di Lingkup Daerah Provinsi | 50 | - |

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

P. Persandian

Pada Indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah pada Tahun 2021 bernilai 1,73, dimana didapat dari hasil penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI), yang dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu: 1. Fase Persiapan: 2,54 2. Fase Aksi 1,76 3. Fase Tindak Lanjut 0,90. Sedangkan untuk Indikator yang lain sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.86
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kalimantan Timur

| No | Indikator | 2021 | 2022 |
|----|--|---------|-------|
| 1 | Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan | 40 | - |
| 2 | Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah | 63,28 | - |
| 3 | Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan risiko kategori rendah | 54,69 | - |
| 4 | Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi | 84,33 | - |
| 5 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 173,33 | 38,76 |
| 6 | Indeks keamanan informasi | Level 2 | - |
| 7 | Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI) | Level 2 | - |

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

Q. Kebudayaan

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka untuk menjaga agar karya budaya baik benda dan tak benda di Kalimantan Timur tidak diklaim oleh negara lain. Pada tahun 2020 mensertifikasikan calon TACB, berdasarkan hasil sertifikasi maka dibentuklah Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur yang diputuskan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 430 tahun 2020 tentang TACB Prov. Kaltim. dan yang sudah melakukan sidang penetapan cagar budaya peringkat provinsi untuk Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkulirang Mangkalihat dan Situs Penguburan Gunung Selendang.

Tabel II.87
Karya Budaya Benda dan tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur
yang Telah Dipatenkan Tahun 2021

| No | Kabupaten/ Kota | Karya Budaya tak Benda | Peringkat | Karya Budaya Benda |
|----|--------------------|--|--|---|
| 1. | KUBAR | Alat Musik Kelentangan Tari Ngerangkau Tari Gong Alat Musik Sapeq Tari Perang Dayak Suliikng Dewa Belian Bawo Hudoq Upacara adat Kwangkay Musik Genikng Pakaian Kulit Kayu Parapm Api Bayaq Rumah Panjang Dayak | Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional | Bunker Komando Gudang Peluru Kolam Belanda Penampungan Air Belanda Pillbox Sumur Kembar Belanda Lamin Mancong Lamin Tolar |
| 2. | SAMARINDA | Sarung Tenun Samarinda | Nasional | |
| 3. | KUKAR | Tari Dewa Memanah Tari Ganjur Tari Datun Ngantau Tari Topeng Kemindu Undang-Undang Kerajaan Kutai Kertanegara (uu Panju Selatan) Erau Kertanegara Suling Dewa Punan Leto Kanjat Lasan Belian Namang Naek Ayun Muang Tarsul Kutai Begasing Kutai Nutuk Beham | Nasional | |
| 4. | Paser | Tari Ngarang Petis Udang Paser Ronggeng Paser Pentengan Gambus Paser | Nasional Nasional Nasional Nasional | |
| 5. | Kutai Timur | Lom Plai Blontang Bekenjong Mandau | Nasional Nasional Nasional Nasional | |
| 6. | Provinsi | | | 1. Kawasan Gambar Cadas Prasejarah |

| No | Kabupaten/ Kota | Karya Budaya tak Benda | Peringkat | Karya Budaya Benda |
|----|--------------------|------------------------|-----------|---|
| | | | | Sangkaliran Mangkalihat 2. Situs Penguburan Gunung Selendang |

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2022

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai cagar budaya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Secara keseluruhan pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 698 Cagar Budaya, 9 Museum, 537 Komunitas Budaya, 245 Tenaga Budaya, dan 216 Adat Istiadat/Tradisi.

Tabel II.88
Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kab/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

| No | Kabupaten/Kota | Jenis Kekayaan Budaya | | | | |
|----|------------------|-----------------------|--------|------------------|---------------|-----------------------|
| | | Cagar Budaya | Museum | Komunitas Budaya | Tenaga Budaya | Adat Istiadat/Tradisi |
| 1 | Paser | 83 | 1 | 58 | 9 | 7 |
| 2 | Kubar | 13 | 1 | 81 | 31 | 19 |
| 3 | Kukar | 187 | 2 | 69 | 39 | 8 |
| 4 | Kutim | 57 | 0 | 7 | 10 | 7 |
| 5 | Berau | 167 | 3 | 7 | 7 | 2 |
| 6 | PPU | 33 | 0 | 24 | 12 | 7 |
| 7 | Mahulu | 47 | 0 | 0 | 9 | 137 |
| 8 | Balikpapan | 75 | 1 | 29 | 29 | 29 |
| 9 | Samarinda | 32 | 1 | 222 | 93 | 0 |
| 10 | Bontang | 4 | 0 | 40 | 6 | 0 |
| | Kalimantan Timur | 698 | 9 | 537 | 245 | 216 |

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2022

R. Perpustakaan

Perkembangan Indikator Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (*online* dan *onsite*) di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuatif, dimana di tahun 2018 berjumlah 137.841 orang, meningkat di tahun 2019 menjadi 145.731 orang, namun menurun Kembali di tahun 2019 menjadi 77.884 orang. Sedangkan untuk Indikator yang lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.89
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

| No | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---|---------|---------|--------|-------|-------|
| 1 | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk | - | - | - | 5,49 | - |
| 2 | Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat | - | - | - | 1,43 | - |
| 3 | Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | - | - | - | 0,001 | - |
| 4 | Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | - | - | - | 6.16 | - |
| 5 | Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat | - | - | - | 19 | - |
| 6 | Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun | - | - | - | 575 | - |
| 7 | Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah | - | - | - | 3050 | - |
| 8 | Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah | - | - | - | 5 | - |
| 9 | Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah | - | - | - | 575 | - |
| 10 | Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya | - | - | - | 30 | - |
| 11 | Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa | - | - | - | 0 | - |
| 12 | Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) | - | - | - | 150 | - |
| 13 | Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi | - | - | - | 8,1 | - |
| 14 | Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai Wahana Pembelajaran Sepanjang Hayat | - | - | - | 100 | - |
| 15 | Peningkatan Gerakan Gemar Membaca dalam Mewujudkan Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif | - | - | - | 2 | - |
| 16 | Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (<i>online</i> dan <i>onsite</i>) (orang) | 137.841 | 145.731 | 77.884 | - | - |
| 17 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (skor) | - | - | - | 60,85 | 46,27 |
| 18 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks) | - | - | - | 17,74 | 34,16 |

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

S. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan mempunyai tujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan

standar kearsipan. Indikator kinerja bidang Kearsipan dalam kurun waktu Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.90
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
Provinsi Kalimantan Timur

| No | Indikator | 2021 | 2022 |
|----|--|--------|--------|
| 1 | Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip | 73,09 | - |
| 2 | Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip | 100 | - |
| 3 | Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik | 80,48 | - |
| 4 | Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | 4 | - |
| 5 | Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK | 16991 | - |
| 6 | Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK | 0 | - |
| 7 | Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi | 3552 | - |
| 8 | Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK | 23115 | - |
| 9 | Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK | 625 | - |
| 10 | Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK | 33 | - |
| 11 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 64.30% | 74,65% |
| 12 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek 7.39 % 111 kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | 7,39 | 3,34 |
| 13 | Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip | 90 | - |
| 14 | Tercapainya penyelenggaraan kearsipan pada LKD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kearsipan | 10 | - |
| 15 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip yang Autentik dan Terpercaya | 125 | - |
| 16 | Pelaksanaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah | 1 OPD | - |
| 17 | Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta | 200 | - |
| 18 | Penyelamatan Arsip OPD akibat Penggabungan, Pembubaran dan Pemekaran Organisasi | 2 OPD | - |

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

T. Kepegawaian

Peningkatan penerapan sistem merit yang menjadi salah satu prioritas kerja nasional Presiden Republik Indonesia dalam pembangunan SDM. BKD Prov Kaltim telah mengikuti penilaian mandiri dalam penerapan

sistem merit berdasarkan Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019. Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022 mendapatkan poin sebesar 263,5 atau berada pada kategori “III” (Baik) dan belum mencapai pada kategori ke IV “Sangat Baik”.

Tabel II.91
Nilai Sistem Merit Pemprov. Kaltim

| No. | Aspek Skor Sistem Merit | 2021 | 2022 |
|-----|---------------------------------------|------------|--------------|
| 1. | Perencanaan Kebutuhan | 35 | 35 |
| 2. | Pengadaan | 32 | 36 |
| 3. | Pengembangan Karier | 62,5 | 67,5 |
| 4. | Promosi dan Mutasi | 17,5 | 17,5 |
| 5. | Manajemen Kinerja | 45 | 42,5 |
| 6. | Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin | 30 | 30 |
| 7. | Perlindungan dan Pelayanan | 16 | 16 |
| 8. | Sistem Informasi | 18 | 19 |
| | Jumlah Nilai | 256 | 263,5 |

Sumber: KASN, 2022

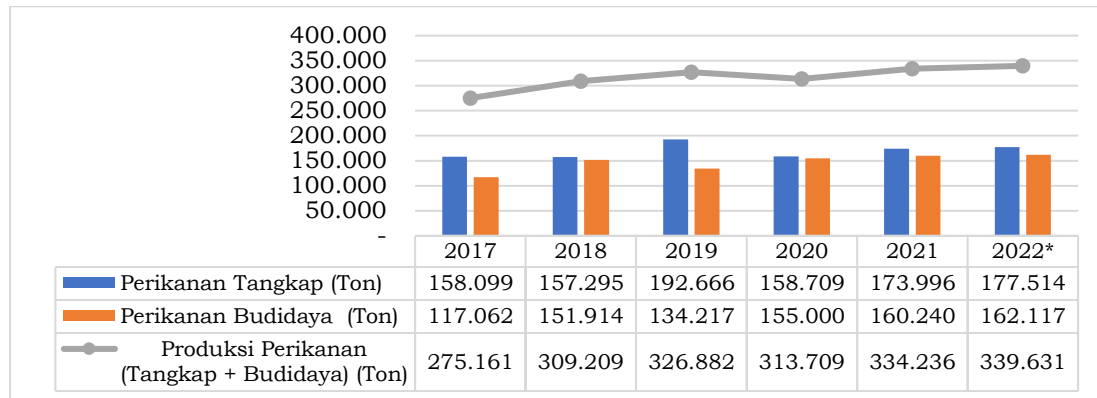
2.3.2. Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas baik laut seluas 3,99 juta Ha maupun perairan darat dengan potensi perikanan yang juga sangat besar. Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan.

Produksi perikanan Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Namun pada tahun 2022 produksi perikanan di Kalimantan Timur diperkirakan mencapai 321.644 Ton atau menurun dari tahun sebelumnya. Dalam pencapaian produksi perikanan di Kalimantan Timur masih ditemui permasalahan yang perlu mendapat perhatian yakni tingginya harga pakan mengakibatkan beberapa pelaku usaha menurunkan produksinya atau berhenti produksi sementara waktu,

masih rendahnya kesadaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, belum optimalnya sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan, serta sistem pemasaran dan peningkatan nilai tambah produk perikanan.



Gambar II.78
Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017–2022

(Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2022 (diolah))

B. Pariwisata

Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 tahun mengalami tren penurunan. Penurunan terjadi akibat terjadinya wabah COVID – 19 yang masuk ke Indonesia tahun 2020 sehingga terjadinya pembatasan sosial berskala besar seperti adanya larangan bepergian ke dalam maupun luar negeri. Di samping itu belum optimalnya kerja sama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata terutama dalam hal promosi dan destinasi pariwisata. Pengembangan sarana dan prasarana masih sangat diperlukan dalam rangka menunjang perkembangan pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk capaian jumlah kunjungan wisatawan (wisman – wisnus) pada Triwulan III tahun 2022 sebesar 2,511,419 orang tercapai 125,26 dari target 2022 sebesar 2,005,000 orang. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat hambatan dalam analisis pasar promosi pariwisata. Diharapkan dengan analisis tersebut promosi pariwisata bisa lebih terarahkan.

Tabel II.92
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2018–2022

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tw III 2022 |
| 1 | Kota Balikpapan | 2.837.034 | 2.878.561 | 1.072.569 | 1.431.862 | 1,214,958 |
| 2 | Kota Samarinda | 2.036.236 | 1.643.536 | 654.984 | 1.119.174 | 700,798 |
| 3 | Kota Bontang | 409.319 | 472.037 | 215.029 | 156.212 | 93,965 |
| 4 | Kabupaten Paser | 39.566 | 7.501 | 32.965 | 89.931 | 44,534 |
| 5 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 86.375 | 57.576 | 20.263 | 114.869 | 49,824 |
| 6 | Kabupaten Kutai Kartanegara | 1.715.660 | 1.394.171 | 692.689 | 617.018 | 221,918 |
| 7 | Kabupaten Kutai Timur | 36.717 | 70.560 | 40.129 | 72.438 | 12,757 |
| 8 | Kabupaten Kutai Barat | 32.205 | 56.125 | 25.929 | 10.871 | 54,126 |
| 9 | Kabupaten Mahulu | 3.464 | 3.058 | 2.596 | 5.590 | 5,002 |
| 10 | Kabupaten Berau | 283.294 | 292.692 | 127.176 | 141.398 | 102, 770 |
| Jumlah Se-Kalimantan Timur | | 7.479.870 | 6.875.817 | 2.884.329 | 3.759.363 | 2.500.652 |

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi KALTIM

Tabel II.93
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2018–2021

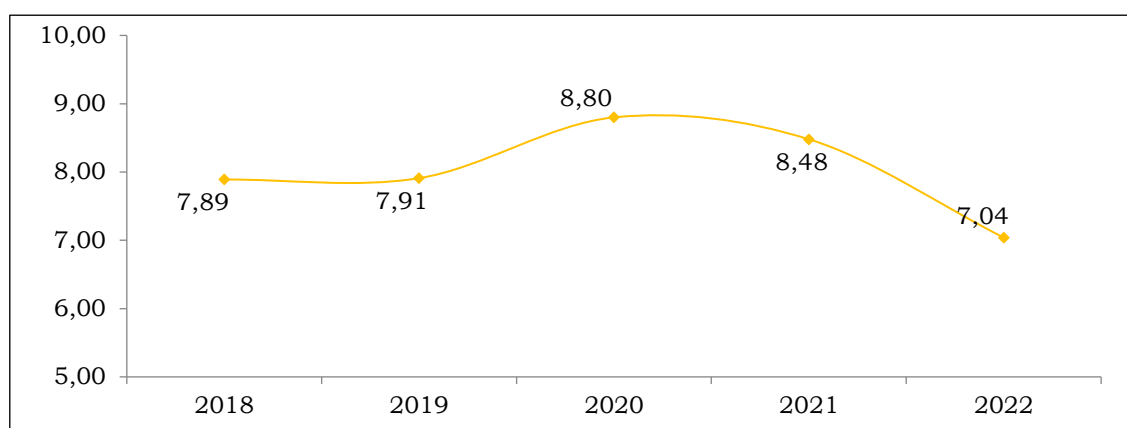
| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TW III 2022 |
| 1 | Kota Balikpapan | 47.040 | 56.577 | 16.510 | 17.458 | 8,860 |
| 2 | Kota Samarinda | 4.835 | 2.735 | 2.075 | 444 | 80 |
| 3 | Kota Bontang | 174 | 168 | - | - | 1,024 |
| 4 | Kabupaten Paser | 431 | - | - | 1 | 1 |
| 5 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 135 | 8 | 26 | - | - |
| 6 | Kabupaten Kutai Kartanegara | 4.557 | 3.872 | 557 | 46 | 4 |
| 7 | Kabupaten Kutai Timur | 2.340 | 345 | 365 | 6 | 2 |
| 8 | Kabupaten Kutai Barat | 279 | 273 | 28 | 5 | 190 |
| 9 | Kabupaten Mahulu | 47 | - | 5 | - | 562 |
| 10 | Kabupaten Berau | 2.586 | 8.323 | 220 | 85 | 44 |
| Jumlah Se-Kalimantan Timur | | 62,424 | 72.301 | 19.786 | 18.045 | 10.767 |

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi KALTIM

C. Pertanian

Kontribusi sektor Pertanian Arti Luas Tahun 2018-2022 secara umum mengalami trend fluktuasi, dimana tercatat pada Tahun 2022 kontribusi sektor mencapai 7,04%. Kontribusi sektor pertanian arti luas di Kaltim didominasi oleh kinerja sub sektor Tanaman Perkebunan dan sub

sektor Perikanan. Kedua kontributor tersebut sangat dipengaruhi oleh harga komoditi di pasar dan biaya produksi. Subsektor Tanaman Perkebunan pada tahun 2022 terjadi penurunan pendapatan di tingkat petani dikarenakan adanya pelarangan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang mengakibatkan hasil panen petani tidak terserap dan berimbas pada harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani turun signifikan. Untuk Sub sektor perikanan sangat dipengaruhi oleh biaya produksi dan iklim. Selain itu usaha pertambangan batu bara sejak 2021 sudah kembali bangkit, yang mengakibatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB belum dapat menyaingi kecepatan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalan. Sejalan dengan hal tersebut, sektor pertanian di Kalimantan Timur masih belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal terutama pada tingkat produksi dan produktivitas komoditas pertanian.

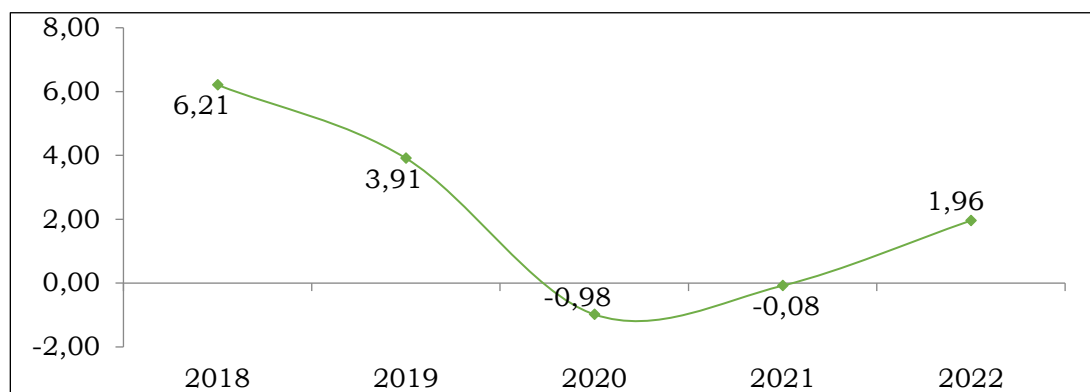


Gambar II.79
Kontribusi Sektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Pada gambar di atas, terlihat pada tahun 2022 masih mengalami penurunan dimana target kontribusi PDRB sektor pertanian di tahun 2022 sebesar 8,99 persen. Berdasarkan hasil evaluasi, belum berhasilnya pencapaian target pada tahun 2022 ini salah satunya dikarenakan sektor pertanian masih belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal terutama pada tingkat produksi dan produktivitas sektor pertanian.

Dari sisi Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian Arti Luas dari tahun ke tahun menunjukkan trend penurunan. Tercatat pada tahun 2020 dan tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Subsektor Pertanian Arti Luas mengalami pertumbuhan negative yaitu pada angka $-0,98$ dan $-0,08\%$. Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja sub sektor kehutanan dan

penembangan kayu yang berkontraksi cukup pada tahun 2020 yaitu sebesar -6,28 dan kontraksi yang cukup dalam juga terjadi pada sub sektor tanaman pangan pada tahun 2021 yaitu sebesar -4,48. Namun hal menggembirakan terjadi pada tahun 2022, dimana Laju Pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian telah mampu tumbuh positif sebesar 1,96 persen, dengan sub sektor perkebunan yang menjadi penopang utamanya.



Gambar II.80

Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

1) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Secara umum, terjadi penurunan produktivitas padi selama empat tahun terakhir dimana pada tahun 2018 mencapai 4,04 ton per hektar dan menurun hingga 3,63 ton/ha. Selain karena penurunan produksi, menurunnya produktivitas ini juga ternyata dikarenakan fluktuasinya luas panen secara umum. Beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi salah satunya adalah pemberian bantuan saprodi pertanian kepada petani dan Kegiatan Gerakan Tanam yang menjadi motivasi bagi petani untuk menanam padi. Namun program tersebut belum terlalu efektif untuk mewujudkan swasembada pangan.

Tabel II.94
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

| Tahun | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Ton/Ha) |
|-------|-----------------|----------------|------------------------|
| 2018 | 64.961 | 262.774 | 4,04 |
| 2019 | 69.708 | 253.818 | 3,64 |
| 2020 | 73.569 | 262.436 | 3,57 |
| 2021 | 66.269 | 244.678 | 3,69 |
| 2022 | 64.031 | 232.144 | 3,63 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

2) Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5 (lima) komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Lima komoditas unggulan itu adalah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, dan lada. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investor dari luar daerah adalah kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,59 juta Ha dengan tingkat produksi mencapai 17,36 juta ton. Kemudian komoditas yang juga cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian adalah tanaman karet dengan luas tanam saat ini mencapai 123.776 Ha dan produksi sebesar 71,4 ribu ton pada Tahun 2022. Luasan dan Produksi ini meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan membaiknya harga komoditi perkebunan pada Tahun 2022 sehingga membangkitkan semangat pekebun untuk berbudidaya dan memanen hasil budidayanya. Namun peningkatan produksi perkebunan di Kalimantan Timur masih dihadapkan pada tantangan berupa mahalnya harga pupuk yang berpengaruh pada produksi tanaman. Serta masih adanya tanaman tua/rusak belum dilakukan peremajaan maupun rehabilitasi.

Tabel II.95
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

| No. | Komoditi | Luas Tanam (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Ton/Ha) |
|-----|--------------|-----------------|----------------|------------------------|
| 1. | Karet | 123.776 | 71.483 | 0,58 |
| 2. | Kelapa | 20.068 | 7.201 | 0,36 |
| 3. | Kopi | 1.495 | 165 | 0,11 |
| 4. | Lada | 8.321 | 5.080 | 0,61 |
| 5. | Kakao | 7.777 | 2.566 | 0,33 |
| 6. | Kelapa Sawit | 1.411.861 | 16.938.307 | 11,99 |

Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2023

Secara umum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki perkebunan Kelapa Sawit dengan Kabupaten Kutai Timur sebagai kabupaten yang memiliki produksi terbanyak yaitu sebanyak 6,84 juta ton pada tahun 2022, Sedangkan Kabupaten Kutai Barat merupakan penghasil jenis karet terbesar di Kalimantan Timur sebanyak 32,06 Ribuan Ton. Untuk tanaman lada, produksi terbesar ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah produksi sebanyak 2.961 ton, Kabupaten Paser menjadi kabupaten dengan penghasil kelapa terbesar dibanding kabupaten/kota lain dengan jumlah produksi sebesar 2.325 ton dan Kabupaten Kutai Timur dengan produksi tanaman kakao terbesar yaitu 1.664 ton. Dengan tingkat produksi yang ada, akan terus dilakukan pengembangan salah satunya melalui pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi sehingga kegiatan perkebunan tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi namun akan dapat terintegrasi dari hulu – hilir. Dimana pengadaan benih/bibit, pengolahan/produksi, hingga distribusi ke konsumen akhir diintegrasikan dan dikelola oleh korporasi petani sedemikian rupa sehingga nilai tambah terbesar dari kegiatan pertanian bisa dinikmati pekebun yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Tabel II.96

Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), Tahun 2022

| No | Kab/Kota | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Lada |
|----|------------|--------------|--------|--------|------|-------|-------|
| 1 | Paser | 1.974.991 | 2.325 | 8.703 | 71 | 4 | 18 |
| 2 | KUBAR | 728.607 | 147 | 32.064 | 21 | 24 | 6 |
| 3 | KUKAR | 2.901.860 | 1.667 | 15.466 | 7 | 44 | 2.961 |
| 4 | KUTIM | 6.835.708 | 751 | 1.868 | 51 | 1.664 | 156 |
| 5 | Berau | 4.063.493 | 1.110 | 7.256 | 13 | 484 | 556 |
| 6 | PPU | 299.681 | 723 | 1.564 | 1 | 2 | 1.240 |
| 7 | MAHULU | 124.824 | 4 | - | - | 339 | - |
| 8 | Balikpapan | 477 | 340 | 4.246 | 1 | 1 | 127 |
| 9 | Samarinda | 8.548 | 126 | 316 | - | 4 | 16 |
| 10 | Bontang | 118 | 8 | - | - | - | - |

Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2022

Namun jika dilihat dari pola pengelolaannya dapat dilihat bahwa produktivitas perkebunan rakyat masih jauh jika dibandingkan dengan produktivitas komoditi perkebunan yang dikelola oleh perusahaan/swasta. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pendampingan pemerintah terhadap petani terutama pada aspek akses terhadap benih unggul, sarana dan prasarana produksi, serta akses modal dan pasar.

Tabel II.97
Data Perbandingan Produktivitas Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Swasta (Ton/Ha)

| Kabupaten / Kota | Kelapa Sawit | | Karet | |
|------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| | Swasta | Rakyat | Swasta | Rakyat |
| 1. Kutai Kartanegara | 14.92 | 9.75 | 0.63 | 0.65 |
| 2. Kutai Timur | 14.81 | 11.37 | 0.01 | 0.11 |
| 3. Kutai Barat | 6.54 | 0.87 | 0.02 | 0.73 |
| 4. Penajam Paser Utara | 10.80 | 4.51 | | 0.24 |
| 5. Paser | 13.42 | 8.80 | 0.75 | 0.48 |
| 6. Berau | 22.52 | 15.97 | | 0.01 |
| 7. Mahakam Ulu | 5.88 | 0.00 | | 0.00 |
| 8. Samarinda | | 7.21 | | 0.54 |
| 9. Balikpapan | | 12.82 | | 0.60 |
| 10. Bontang | 13.60 | 0.75 | | |
| Kalimantan Timur | 14.06 | 11.85 | 0.09 | 0.52 |

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi KALTIM, 2022 (diolah)

Disamping itu, guna meningkatkan daya saing hasil komoditi perkebunan diperlukan upaya hilirisasi hasil produk perkebunan. Dengan adanya upaya hilirisasi maka geliat produksi pada sektor hulu akan semakin meningkat dan harga komoditi perkebunan di tingkat pasar akan cenderung stabil. Terdapat 97 Perusahaan Besar Sawit (PBS) di Kalimantan Timur dimana perusahaan tersebut mengolah dari produk mentah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi produk setengah jadi berupa *Crude Palm Oil* (CPO). Diperlukan upaya pemerintah untuk menarik investor untuk membangun industri pengolahan berupa turunan produk rumah tangga, membentuk korporasi pekebun serta penyediaan infrastruktur pendekat dari kebun menuju pabrik pengolahan guna meningkatkan geliat perekonomian Kalimantan Timur.

Tabel II.98
Jumlah Perusahaan Besar Sawit (PBS)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

| Kabupaten / Kota | Perusahaan Besar Sawit | Kapasitas Produksi TBS (ton/jam) | |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
| | | Terpasang | Terpakai |
| 1. Kutai Kartanegara | 18 | 975 | 858.87 |
| 2. Kutai Timur | 35 | 1917 | 1746.32 |
| 3. Kutai Barat | 8 | 460 | 446.99 |
| 4. Penajam Paser Utara | 7 | 360 | 238.33 |
| 5. Paser | 17 | 890 | 674.67 |
| 6. Berau | 11 | 685 | 636 |
| 7. Mahakam Ulu | 1 | 60 | 50.5 |
| 8. Samarinda | 0 | 0 | 0 |
| 9. Balikpapan | 0 | 0 | 0 |

| Kabupaten / Kota | Perusahaan Besar Sawit | Kapasitas Produksi TBS (ton/jam) | |
|------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
| | | Terpasang | Terpakai |
| 10. Bontang | 0 | 0 | 0 |
| KALIMANTAN TIMUR | 97 | 5347 | 4651.68 |

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi KALTIM, 2022

3) Peternakan

Populasi ternak di Provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini didominasi ternak ayam ras pedaging sebanyak 72,28 juta ekor, ayam kampung 4,96 juta ekor dan ayam ras petelur 1.975,93 ribu ekor. Sedangkan untuk populasi sapi potong hanya sebesar 124,93 ribu ekor dan babi sebanyak 78,58 ribu ekor yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Tabel II.99
Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 (ekor)

| No | Hewan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Sapi Potong | 117.504 | 119.485 | 119.974 | 121.290 | 124.930 |
| 2 | Sapi Perah | 110 | 91 | 87 | 76 | 78 |
| 3 | Kambing | 66.378 | 67.892 | 69.929 | 68.997 | 71.068 |
| 4 | Domba | 439 | 590 | 635 | 694 | 714 |
| 5 | Babi | 78.968 | 82.546 | 83.652 | 76.292 | 78.581 |
| 6 | Kerbau | 6.157 | 6.194 | 6.552 | 6.539 | 6.734 |
| 7 | Kuda | 97 | 102 | 95 | 143 | 146 |
| 8 | Kelinci | 14.189 | 8.859 | 10.830 | 11.044 | |
| 9 | Ayam Kampung | 4.569.169 | 4.372.415 | 4.435.205 | 4.815.976 | 4.960.453 |
| 10 | Ayam Ras Pedaging | 66.672.445 | 67.886.566 | 59.402.832 | 55.877.917 | 72.283.207 |
| 11 | Ayam Ras Petelur | 1.055.432 | 853.693 | 1.218.994 | 2.263.835 | 1.975.927 |
| 12 | Itik | 248.978 | 254.683 | 254.749 | 325.441 | 335.203 |

Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2022

Untuk mendukung program pemerintah berupa swasembada dan ketahanan pangan, maka jumlah ketersediaan daging sapi harus mampu mengimbangi jumlah kebutuhan daging sapi masyarakat di Kalimantan Timur dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau sehingga kebutuhan akan daging sapi terpenuhi. Ketersediaan daging sapi sampai saat ini belum bisa mengimbangi kebutuhan akan daging sapi setiap tahunnya untuk masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan hanya mampu memenuhi sekitar 30% kebutuhan. Hal ini dikarenakan populasi sapi di Kalimantan Timur masih tergolong sedikit, sehingga masih harus memasok dari luar daerah seperti dari Sulawesi Selatan, NTT, NTB.

Keterbatasan fasilitas yang pada umumnya menimbulkan efek langsung untuk usaha peternakan juga mempengaruhi produksi daging sapi, serta adanya kecenderungan peternak berusaha sendiri. Sehingga sebagai upaya mendorong pemenuhan konsumsi daging sapi maka Pemerintah Kalimantan Timur telah melakukan strategi pengembangan peternakan sapi pada lahan bekas tambang melalui fasilitasi *miniranch* dan areal kebun sawit melalui Program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA).

Tabel II.100
Jumlah *Miniranch* di Provinsi Kalimantan Timur

| No | Kab/Kota | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------------|------|------|------|------|
| 1 | Paser | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | KUBAR | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | KUKAR | - | 3 | 5 | 12 |
| 4 | KUTIM | 2 | - | 4 | 5 |
| 5 | Berau | | 1 | 5 | 8 |
| 6 | PPU | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | MAHULU | - | 2 | - | 2 |
| 8 | Balikpapan | - | - | - | 2 |
| 9 | Samarinda | - | - | - | 1 |
| 10 | Bontang | - | - | 1 | 1 |
| Kalimantan Timur | | 5 | 12 | 24 | 49 |

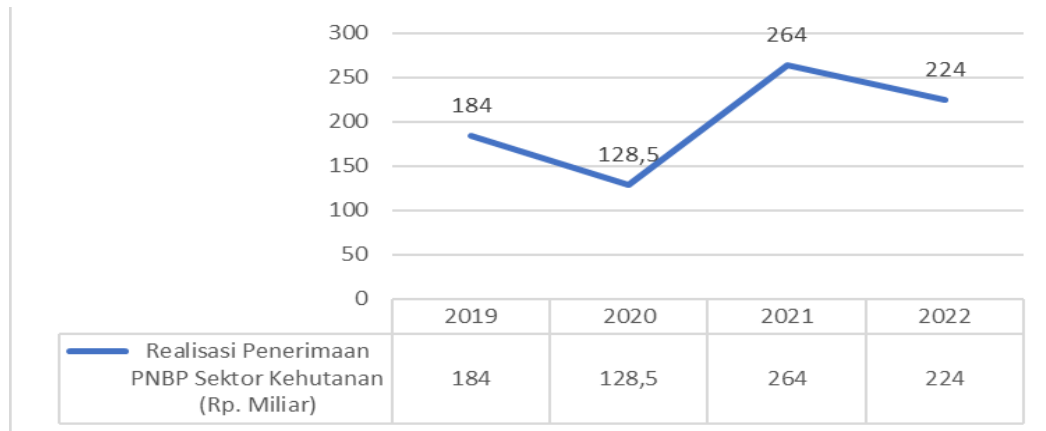
Sumber: *Siranch, DPKH Provinsi KALTIM, 2022*

D. Kehutanan

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektor Kehutanan menempatkan kewenangan terbatas dalam pemanfaatan hutan. Bilamana sebelumnya UPTD KHP dan Tahura dapat melakukan pemanfaatan Kawasan hutan, namun kemudian UPTD KPH dan Tahura berperan sebagai fasilitator dalam pemanfaatan Kawasan hutan. Perubahan kebijakan pemanfaatan hutan juga mengubah penyebutan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu menjadi Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, yang dapat melakukan pemanfaatan hutan dengan multi-usaha kehutanan.

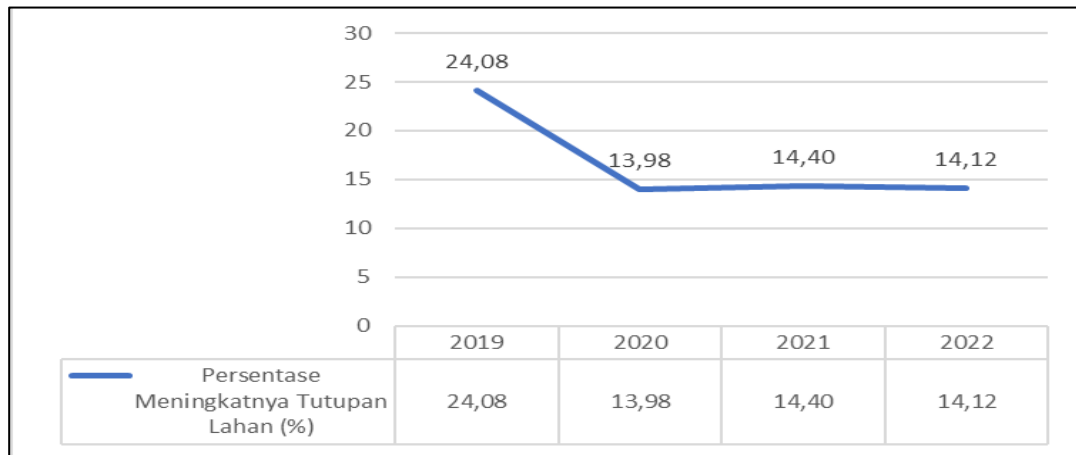
Dari pemanfaatan hutan tersebut, realisasi penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan adalah dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif namun jika dilihat secara umum maka terjadi penurunan. Dalam empat tahun terakhir, Pada tahun 2019 kontribusi sub sektor kehutanan sebesar Rp. 184 Milyar, lalu terjadi penurunan dengan kontribusi terendah pada tahun 2020 yakni sebesar Rp. 128,5 Milyar. Kontribusi terbesar sub sektor kehutanan terjadi pada tahun 2021 yang

mencapai Rp. 264 Milyar sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 224 Milyar.



Gambar II.81
Realisasi PNPB Sektor Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022 (Rp. Miliar)
(Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022)

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi dari pembukaan lahan. Perubahan tutupan lahan di Kalimantan Timur dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami perubahan tutupan lahan dari satu tipe menjadi tipe lainnya, dengan laju perubahan Persentase Tutupan Lahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sebesar 24,08%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan terendah yakni 13,98%, pada tahun 2021 meningkat sebesar 14,40%, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 14,12%. Umumnya perubahan tersebut memicu berkurangnya luasan hutan alami karena perluasan hutan tanaman, perkebunan, pertanian, pertambangan, serta meningkatnya lahan-lahan tidur seperti tanah terbuka dan semak belukar.



Gambar II.82

Persentase Tutupan Lahan Di Kalimantan Timur Tahun 2019–2022 (%)

(Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022)

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat besar. Luas hutan di Kalimantan Timur seluas 8.371.478,05 hektar yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan KSA/KPA.

Tabel II.101

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

| No | Tahun | Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha) |
|-------|-------|--|
| 1. | 2018 | 38.771,77 |
| 2. | 2019 | 66.302,27 |
| 3. | 2020 | 38.737,80 |
| 4. | 2021 | 39.900,80 |
| 5. | 2022 | 1.144,00 |
| TOTAL | | 184.856,64 |

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2018, Luas Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Timur seluas 275.272 Hektar (diperbaharui setiap 5 tahun). Pada tahun 2018 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 38.771,77 Hektar. Pada tahun 2019 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami peningkatan seluas 66.302,27 hektar. Pada tahun 2020 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami penurunan seluas 38.737,80 hektar. Pada tahun 2021 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 39.900,80 hektar dan pada tahun 2022 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 38.866,17 hektar.

Jumlah total lahan kritis yang direhabilitasi hingga tahun 2022 adalah 222.578,81 hektar dengan persentase 80,86%.

Pengawasan terhadap gangguan hutan tidak dilakukan jauh di provinsi, namun menjadi efektif ketika dilakukan oleh KPH yang berada dekat dengan lokasi. Walaupun pada level tertentu, harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Terutama untuk wilayah yang di atasnya masih ditumbuhi pohon dan masih menjadi aset negara. Ini dapat ditemui di wilayah-wilayah berhutan yang akan dikonversi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan kepada industri pengolahan kayu tetap harus dilakukan. Karena sangat mungkin di industri pengolahan ditemukan bahan baku dari sumber yang tidak sah. Hal ini merupakan tugas dan fungsi untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum atas hilangnya aset-aset negara tersebut. Hal lain yang juga penting adalah bagaimana mendorong SDM untuk lebih cerdas dan profesional dalam menangani perkara-perkara ilegal *logging*/kebakaran hutan, memberikan dalam memberikan keterangan ahli untuk tujuan-tujuan penyidikan/penyelidikan, termasuk juga penanganan pelanggaran administratif kehutanan (perdata) yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

Tabel II.102
Jumlah Luas Hutan yang Rusak/Terbakar/Perambahan/Ilegal Logging
Tahun 2022

| No | Kab/Kota | Jumlah Luas Hutan yang Rusak/ Terbakar/Perambahan/Ilegal Logging (dalam Ha) |
|-------|------------------------|---|
| 1. | Kab. Berau | 1.935 |
| 2. | Kab. Kutai Timur | 2.157 |
| 3. | Kab. Kutai Kartanegara | 2.518 |
| 4. | Kab. Kutai Barat | 495 |
| 5. | Kab. PPU | 1.136 |
| 6. | Kab. Paser | 2.054 |
| 7. | Kab. Mahakam Ulu | 64 |
| 8. | Kota Bontang | 17 |
| 9. | Kota Balikpapan | 25,84 |
| TOTAL | | 10.401,84 |

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022

Guna optimalisasi daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas hutan dan lahan dapat dicapai dengan menurunkan laju kerusakan hutan (per tahun) melalui upaya menurunkan luas lahan kritis dan mempertahankan kelestarian hutan, diantaranya dengan menjaga hutan dari ilegal logging dan kebakaran hutan yang merupakan penyebab kerusakan

hutan. Melalui Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistemnya di tahun 2022 berorientasi pada menurunnya intensitas terjadinya gangguan hutan dalam bentuk aktivitas kebakaran hutan, ilegal logging/perambahan, dan yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan. Persentase pencegahan kerusakan hutan pada tahun 2022 sebesar 0,12% dan persentase pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2022 sebesar 0,0012%. Beberapa pencegahan kerusakan hutan yang dilakukan adalah patroli pencegahan kerusakan hutan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi pencegahan kerusakan hutan serta pembentukan dan pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Dan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan kegiatan belanja sarana prasarana Karhutla (perlengkapan lapangan, alat pemadam kebakaran/selang pemadam, pompa air mesin pemadam, *drone* pemantau kebakaran hutan) patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi penyadartahuan kebakaran hutan, pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Namun hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah personil Polisi Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api masih belum memadai.

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan berasal dari hutan alam dan tanaman. Produksi hasil hutan kayu mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 4.104.271,21 m³ menjadi 4.471.286,16 m³ di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan adanya faktor pendukung yaitu 1). Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada Unit Manajemen terkait aspek produksi, lingkungan dan sosial; 2.) Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada pemegang Izin terkait penatausahaan hasil hutan; 3). Adanya akses ke sistem pelaporan (SI-PUHH, SI-CAKEP, SI-HHBK, SI-PNBP, SIMPONI) sehingga produksi Hasil Hutan unit manajemen dapat terpantau melalui sistem. Namun demikian, adapun yang menjadi penghambat pada pemanfaatan hasil hutan kayu yaitu: 1). Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu menurun karena adanya beberapa faktor: a). Curah hujan tinggi menyebabkan produksi terganggu; b). Peralatan Produksi yang sudah berumur sehingga produktivitas alat rendah; c). Harga kayu yang menurun cukup tajam (terutama pada bulan – bulan terakhir) karena lesunya permintaan pasar dunia sementara biaya operasional meningkat karena kenaikan BBM, kenaikan biaya perawatan, biaya *sparespart*, dll

Sementara harga jual produksi kayu bulat tidak naik signifikan, malah cenderung turun pada beberapa bulan menjelang akhir tahun 2022, serta lesunya permintaan pasar dunia (ekspor) terhadap produk-produk olahan kayu terutama dari negara Eropa pada beberapa bulan. Tidak hanya hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu juga mengalami Penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2021 sebesar 1.175,38 ton menjadi 826,05 ton di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena tanaman karet sudah masuk usia siap sadap.

Tabel II.103

Data Rekapitulasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

| NO | Kabupaten/Kota | Status dan Fungsi Kawasan | | | | Jumlah Total |
|--------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | HL | HP | HPK | HPT | |
| 1 | Paser | 6,703.20 | 11,483.43 | 3,421.56 | 23,528.38 | 45,136.57 |
| 2 | Kutai Barat | 13,809.10 | 10,806.60 | - | 5,271.50 | 29,887.19 |
| 3 | Kutai Kartanegara | 5,264.61 | 30,362.96 | 1,497.82 | 19,193.10 | 56,318.49 |
| 4 | Kutai Timur | 11,395.93 | 15,947.34 | 685.74 | 9,017.65 | 37,046.67 |
| 5 | Berau | 20,963.55 | 18,183.52 | 181.72 | 2,615.23 | 41,944.01 |
| 6 | Penajam Paser Utara | - | 2,421.47 | - | - | 2,421.47 |
| 7 | Mahakam Ulu | 11,742.98 | 6,863.48 | 318.73 | 25,332.58 | 44,257.77 |
| 8 | Balikpapan | - | 127.55 | - | - | 127.55 |
| 9 | Bontang | - | - | 61.98 | - | 61.98 |
| TOTAL | | 69,879.36 | 96,196.35 | 6,167.55 | 84,958.44 | 257,201.70 |

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022

Dalam rangka mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan, menurunkan pengangguran dan memberikan akses secara legal kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan lahan kawasan hutan, maka Pemerintah berkomitmen meningkatkan alokasi lahan kawasan hutan dari 1,7 juta hektar menjadi 12,7 juta hektar dari total kawasan hutan Indonesia untuk dikelola oleh masyarakat setempat, dan Kalimantan Timur mendapatkan luas kawasan yang dikelola sebesar 250 ribu hektar. Pelibatan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan kawasan hutan ini, pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS). Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program Perhutanan Sosial lahir untuk menjawab pertanyaan apakah benar bahwa hutan sebagai sumber penghidupan warga masyarakat perdesaan, telah dioptimalkan fungsinya secara sosial, sehingga dapat membantu mengurangi dan mengatasi kemiskinan, bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar

hutan. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) merupakan instrumen yang disiapkan untuk memberikan arahan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat dibawah skema Perhutanan Sosial tersebut. Namun Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat memiliki kendala yaitu Tata Waktu Penerbitan SK Persetujuan dari KLHK Yang belum Terukur dan Lokasi PIAPS Relatif Jauh Dari Pemukiman.

Tabel II.104
Data Rekapitulasi Perkembangan Perhutanan Sosial
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

| NO | Kabupaten/ Kota | Jumlah | | | | | Luas (Ha) | | | | | Total Per Kab/Kota | |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| | | HD | HKm | HTR | Kemitraan | HA | HD | HKm | HTR | Kemitraan | HA | Jumlah | Luas (Ha) |
| 1 | Berau | 10 | - | 1 | 3 | - | 80.089 | - | 1.096 | 425 | - | 14 | 81.610 |
| 2 | Kutai Timur | 5 | 3 | 9 | 1 | - | 24.945 | 2.996 | 9.482 | 109 | - | 18 | 37.532 |
| 3 | Kutai Kartanegara | 12 | 29 | 4 | - | - | 43.550 | 8.375 | 3.574 | - | - | 45 | 55.499 |
| 4 | Kutai Barat | 5 | - | 3 | - | 1 | 19.706 | - | 989 | - | 48,85 | 9 | 20.744 |
| 5 | Paser | 2 | - | - | - | 1 | 1.550 | - | - | - | 7.722 | 3 | 9.272 |
| 6 | Mahakam Ulu | 10 | - | - | 1 | - | 30.776 | - | - | 96 | - | 11 | 30.872 |
| 7 | Balikpapan | - | 11 | - | - | - | - | 1.897 | - | - | - | 11 | 1.897 |
| TOTAL | | 44 | 43 | 17 | 5 | 2 | 200.616 | 13.268 | 15.141 | 630 | 7.770,85 | 111 | 237.426 |

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022

Selain itu, dari sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur pada tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat. Pada tahun 2022, perkembangan perhutanan sosial mencapai 111 unit dengan luas sebesar 237.426 hektar.

Perhutanan Sosial (*social forestry*) sebagai program pemerintah pada dasarnya sudah dimulai sekitar 4 (empat) dasawarsa lalu, namun baru menjadi program utama Kementerian LHK pada 4 (empat) tahun terakhir. Perhutanan Sosial secara resmi didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau

masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016).

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sangat penting diketahui karena berhubungan erat dengan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar hutan. Desa yang memiliki hutan memiliki potensi membentuk KUPS. KUPS sendiri merupakan amanat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Desa yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) kepemilikan areal hutan didorong untuk membentuk KUPS. Namun, terlebih dahulu membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

KLHK membuat tingkatan kemandirian KUPS dengan beberapa kategori. Pertama adalah kategori Biru, yaitu baru mendapatkan izin/hak pengelolaan hutan sosial, Kedua adalah kategori Perak/Silver, yang berarti sudah menyusun Rencana Kerja Usaha dan melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya Ketiga adalah Kategori Emas/Gold, yaitu yang telah memiliki unit usaha dan memasarkan produk, dan terakhir, Kategori keempat adalah Platinum, yang berarti KUPS tersebut telah memiliki pasar yang luas, baik nasional maupun internasional. Di Kalimantan Timur hingga tahun 2022 baru mencapai 2 KUPS dengan Kategori Gold, yakni Kelompok Tani Hutan Delta Mahakam, Desa Muara Jawa Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kelompok Tani Hutan Bunga Pisang, Desa Sungai Wain, Kota Balikpapan Melalui Dinas Kehutanan, Kalimantan Timur berfokus untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang telah mendapatkan izin hutan sosial.

Tabel II.105
**Perkembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
 Di Kalimantan Timur Tahun 2022**

| Kabupaten / Kota | HUTAN DESA | | | | | | HUTAN KEMASYARAKATAN | | | | |
|------------------------|---------------|---|------|-----------|-----------|-------------|----------------------|---|----------|----------|-----------|
| | Luasan (Ha) | Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) | | | | Jumlah KUPS | Luasan (Ha) | Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) | | | |
| | | Platinum | Gold | Silver | Blue | | | Platinum | Gold | Silver | Blue |
| Berau | 80089 | - | - | 6 | 7 | 13 | - | - | - | - | - |
| Kutai Barat | 19706 | - | - | 15 | 6 | 21 | - | - | - | - | - |
| Kutai Kartanegara | 43550 | - | - | - | 8 | 8 | 8375 | - | 1 | 1 | 12 |
| Kutai Timur | 24895 | - | - | - | 7 | 7 | 2996 | - | - | - | - |
| Mahakam Ulu | 30776 | - | - | 15 | 4 | 19 | - | - | - | - | - |
| Paser | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Balikpapan | - | - | - | - | - | - | 1400 | - | 1 | - | 24 |
| TOTAL | 200566 | - | - | 36 | 32 | 68 | 12771 | - | 2 | 1 | 36 |

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022

E. Energi Dan Sumber Daya Mineral

1) Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal.

Tabel II.106
Data Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2022 TW IV

| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Desa/KeI | Jumlah KK | Jumlah Penduduk | Desa Berlistrik | | | Desa Belum Berlistrik | KK Berlistrik | | | Rasio Desa Berlistrik (%) | Rasio Elektrifikasi / Rasio KK Berlistrik (%) |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------|---|
| | | | | | PLN | Non PLN | Jumlah | | PLN | NON PLN | JUMLAH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=3-8 | 10 | 11 | 12=10+11 | 13=(8/3)*100 | 14=(12/4)*100% |
| I | Balikpapan | 34 | 240.079 | 710.293 | 34 | 0 | 34 | 0 | 224.999 | 416 | 225.415 | 100,00% | 93,89% |
| II | Berau | 110 | 88.427 | 263.150 | 82 | 28 | 110 | 0 | 68.252 | 13.104 | 81.356 | 100,00% | 92,00% |
| III | Kutai Kartanegara | 237 | 243.862 | 753.862 | 221 | 16 | 237 | 0 | 198.502 | 13.426 | 211.928 | 100,00% | 86,90% |
| IV | Samarinda | 59 | 272.054 | 831.220 | 59 | 0 | 59 | 0 | 281.599 | 0 | 281.599 | 100,00% | 100,00% |
| V | Kutai Timur | 141 | 139.068 | 424.743 | 96 | 45 | 141 | 0 | 84.798 | 30.053 | 114.851 | 100,00% | 82,59% |
| VI | Bontang | 15 | 58.292 | 185.393 | 15 | 0 | 15 | 0 | 52.447 | 1.123 | 53.570 | 100,00% | 91,90% |
| VII | Penajam Paser Utara | 54 | 59.995 | 186.801 | 54 | 0 | 54 | 0 | 46.687 | 2.963 | 49.650 | 100,00% | 82,76% |
| VIII | Paser | 144 | 94.080 | 288.225 | 133 | 11 | 144 | 0 | 77.728 | 6.652 | 84.380 | 100,00% | 89,69% |
| IX | Kutai Barat | 194 | 55.789 | 170.871 | 124 | 70 | 194 | 0 | 44.152 | 8.383 | 52.535 | 100,00% | 94,17% |
| X | Mahulu | 50 | 12.185 | 35.274 | 21 | 29 | 50 | 0 | 4.596 | 6.461 | 11.057 | 100,00% | 90,74% |
| TOTAL | KALTIM | 1.038 | 1.263.831 | 3.849.832 | 839 | 199 | 1.038 | 0 | 1.083.760 | 82.581 | 1.166.341 | 100,00% | 92,29% |

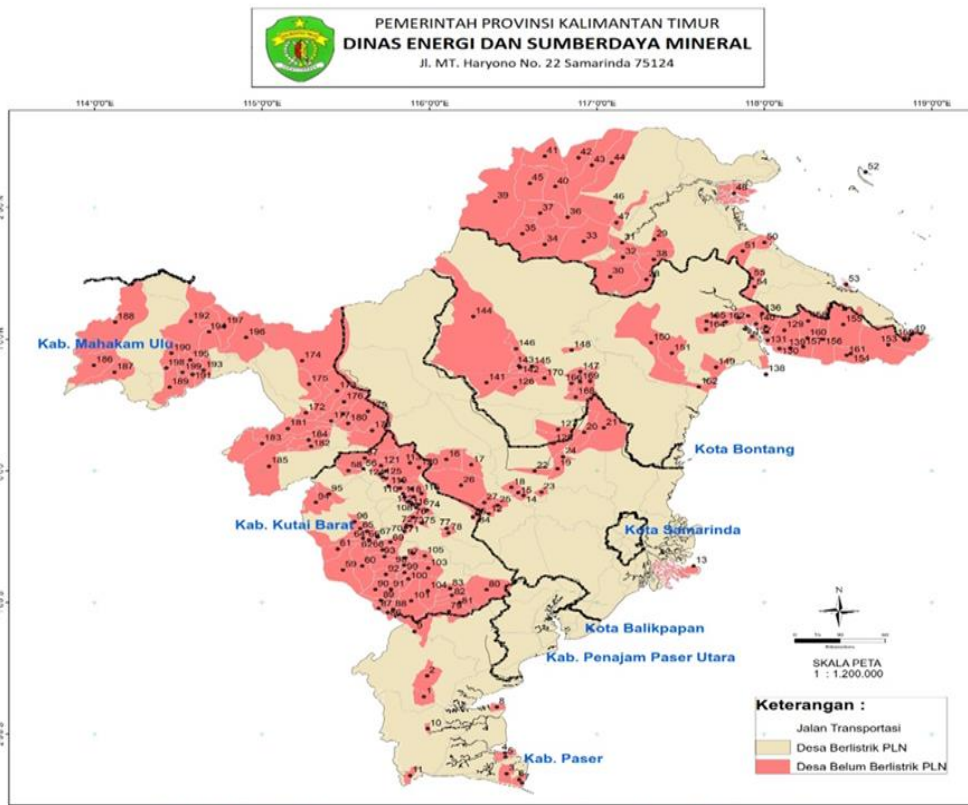
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2022

Dari total 1.263.831 jumlah KK dan 3.849.832 jumlah penduduk di Kalimantan Timur, 85,75 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 6,53 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik non-PLN dan sampai dengan tahun 2022 masih terdapat 199 Desa Berlistrik Non PLN dan 82.581 KK Berlistrik Non PLN. Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik Non-PLN. Pada Tahun 2022, Rasio Elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 91,98 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 92,29 persen pada tahun 2022.

Desa yang sudah terjangkau aliran listrik, baik hanya menggunakan genset dan listrik yang menyala tidak lebih dari 6 jam sehari. Terdapat 199 desa yang belum berlistrik PLN atau bisa dikatakan belum berlistrik selama

24jam, yang akan dikejar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PLN dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari (PLTS).

Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi agar menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah berdaya saing tinggi, maka sektor energi listrik ini berperan sebagai salah satu kontributor yang cukup besar. Dalam rangka mendukung perwujudan pertumbuhan ekonomi dengan salah satunya adalah pengembangan kawasan industri, maka peran sektor energi listrik ini menjadi cukup penting sebagai penyedia energi bagi kawasan industri baru.



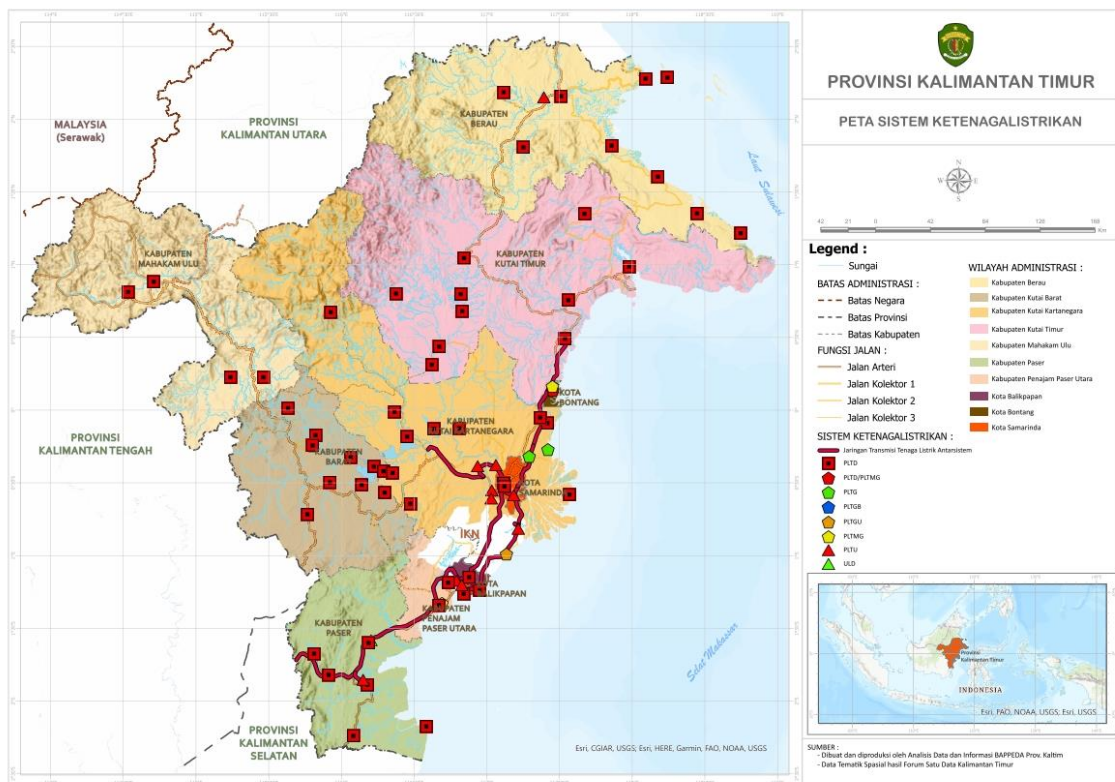
| DESA BERLISTRIK NON PLN DI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Kab. Paser (11 Desa) | Kab. Berau (28 Desa) | Kab. Kutai Barat (70 Desa) | | | | Kab. Mahulu (29 Desa) | |
| 1 Desa Rantau Buta | 28 Desa Merau | 57 Desa Ujoh Halang | 86 Desa Randa Empas | 115 Desa Abit | 143 Desa Long Lees | 171 Desa Long Hural | |
| 2 Desa Rantau Layung | 29 Desa Panaan | 58 Desa Kelian Luar | 87 Desa Tukuy | 116 Desa Rambayan | 144 Desa Mekar Baru | 172 Desa Long Melaham | |
| 3 Desa Keladen | 30 Desa Meraun | 59 Desa Besiq | 88 Desa Tende | 117 Desa Gunung Rambah | 145 Desa Rantau Sentosa | 173 Desa Memahak Besar/Ilir | |
| 4 Desa Labuangkailo | 31 Desa Muara Lesan | 60 Desa Bermali | 89 Desa Sambung | 118 Desa Jengang | 146 Desa Long Nyelong | 174 Desa Memahak Ulu | |
| 5 Desa Selengot | 32 Desa Lesan Dayak | 61 Desa Muara Nilq | 90 Desa Arlan Java | 119 Desa Muara Kalag | 147 Desa Long Noran | 175 Desa Batu Maang | |
| 6 Desa Random | 33 Desa Long Belu | 62 Desa Mantar | 91 Desa Jelmu Sibak | 120 Desa Tondoh | 148 Desa Rantau Panjang | 176 Desa Long Merah | |
| 7 Desa Senipah | 34 Desa Long Duhung | 63 Desa Muara Bombo | 92 Desa Suakong | 121 Desa Tukul | 149 Desa Sekerat | 177 Desa Rukun Damai | |
| 8 Desa Harapan Baru | 35 Desa Long Lamcin | 64 Desa Lumpat Dahug | 93 Desa Penarung | 122 Desa Muiyub Ulu | 150 Desa Tepian Langsat | 178 Desa Matalbaq | |
| 9 Desa Kepala Telake | 36 Desa Long Keluh | 65 Desa Muara Tokong | 94 Desa Intu Lingau | 123 Desa Muiyub Aiket | 151 Desa Tebangan Lembaik | 179 Desa Tri Pariq Makmur | |
| 10 Desa Luan | 37 Desa Long Pelay | 66 Desa Muara Nyahing | 95 Desa Lakan Bilem | 124 Desa Linggang Muiyub Ilir | 152 Desa Muara Bengalon | 180 Desa Wana Pariq | |
| 11 Desa Muara Andeh | 38 Desa M apulu | 67 Desa Kelian Luar | 96 Desa Sentalar | 125 Desa Gabung Baru | 153 Desa Sandaran | 181 Desa Laham | |
| | 39 Desa Long Sului | 68 Desa Muara Beqai | 97 Desa Betung | | 154 Desa Manubar | 182 Desa Long Gelawang | |
| | | 69 Desa Lotaq | 98 Desa Kiaq | 126 Desa Long Pog Baru | 155 Desa Tadon | 183 Desa Muara Ratah | |
| 12 Desa Tanjung Batuq Hara | 40 Desa Long Lafai | 70 Desa Jerang Dayak | 99 Desa Tendo | 127 Desa Senambah | 156 Desa Marukanan | 184 Desa Danum Paroy | |
| 13 Desa Sepatin | 41 Desa Punan Segah | 71 Desa Mendung | 100 Desa Penawang | 128 Desa Mukupan | 157 Desa Susuk Luar | 185 Desa Nvabungan | |
| 14 Desa Muhuran | 42 Desa Long Ayap | 72 Desa Jerang M elayu | 101 Desa Lendan Ujang Nayu | 129 Desa Kerayaan | 158 Desa Susuk Dalam | 186 Desa Naha Tifab | |
| 15 Desa Sembelimbangan | 43 Desa Long Ayan | 73 Desa Dasaq | 102 Desa Kenyanyan | 130 Desa Tanjung Manis | 159 Desa Tanjung Mangkalat | 187 Desa Naha Sitab | |
| 16 Desa Lamin Telihan | 44 Desa Punan Mahaka | 74 Desa Tanjung Pagat | 103 Desa Rikong | 131 Desa Peridan | 160 Desa Susuk Tengah | 188 Desa Long Apari | |
| 17 Desa Lamin Putut | 45 Desa Punan Mahaka | 75 Desa Gunung Bayar | 104 Desa Kendisq | 132 Desa Saka | 161 Desa Manubar Dalam | 189 Desa Delang Kerohong | |
| 18 Desa Teluk Muda | 46 Desa Baru Rajang | 76 Desa Muara Belan | 105 Desa Muara Ponaq | 133 Desa Mandu Dalam | 162 Desa Kadungan Jaya | 190 Desa Long Pakaq | |
| 19 Desa Tunjungan | 47 Desa Siduung Indah | 77 Desa Muara Chong | 106 Desa Sakaq Lotog | 134 Desa Sempayau | 163 Desa Pengadang Baru | 191 Desa Long Lunuk | |
| 20 Desa Menamang Kiri | 48 Desa Pegat Batumbi | 78 Desa Tanjung Jone | 107 Desa Sakaq Tada | 135 Desa Pelawan | 164 Desa Mata Air | 192 Desa Long Isun | |
| 21 Desa Menamang Kanan | 49 Desa Teluk Sumbani | 79 Desa Gerutung | 108 Desa Gemuruh | 136 Desa Tepian Terap | 165 Desa Bukit Permata | 193 Desa Naha Aru | |
| 22 Desa Kupang Baru | 50 Desa Tabalar Muara | 80 Desa Pereng Talq | 109 Desa Linggang Marimun | 137 Desa Kolek | 166 Desa Beno Harapan | 194 Desa Datab Naha | |
| 23 Desa Bukit Jering | 51 Desa Tabalar Ulu | 81 Desa Tanjung Soke | 110 Desa Meravaq | 138 Desa Pulau Miang | 167 Desa Muqi Rahayu | 195 Desa Lunug Ubinq | |
| 24 Desa Liang Buaya | 52 Desa Teluk Alulu | 82 Desa Derava | 111 Desa Linggang Marimun | 139 Desa Penupuk | 168 Desa Mawai Indah | 196 Desa Long Tuvoq | |
| 25 Desa M elintang | 53 Desa Balukukup | 83 Desa Lempem | 112 Desa Gadur | 140 Desa Mandu Pantai Sejat | 169 Desa Himba Lestari | 197 Desa Liu Mulang | |
| 26 Desa Enggelam | 54 Desa Biatan Ulu | 84 Desa Loa Deras | 113 Desa Linggang Muara Bat | 141 Desa Long Bantuq | 170 Desa Melan | 198 Desa Long Pakaq Baru | |
| 27 Desa Muara Enggelam | 55 Desa Bukit Makmur | 85 Desa Minta | 114 Desa Muara Jawaq | 142 Desa Long Pejeng | | 199 Desa Long Lunuk Baru | |
| | 56 Desa Keliwai | | | | | | |

Gambar II.83

Data Desa Berlistrik Non PLN

(Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2022)

Sistem ketenagalistrikan Kalimantan Timur ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi yang disebut Sistem Mahakam yang terkoneksi dengan Sistem Barito Kalimantan Selatan. Dengan demikian dalam pemenuhan kebutuhan listrik, Kalimantan Timur tidak hanya ditopang oleh pembangkit listrik yang ada di Kalimantan Timur namun juga Kalimantan Selatan.



Gambar II.84
Peta Sistem Ketenagalistrikan
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal, potensi energi matahari selalu ada setiap perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur ditambah dengan luasan wilayah merupakan Provinsi Peringkat 2 di NKRI sehingga dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari sangat lebih baik. Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai 7 Kabupaten (Paser, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, & Mahakam Ulu dan 3 Kota (Samarinda, Balikpapan & Bontang) dengan desa/kelurahan sebanyak 1.038 desa/kelurahan. Desa Belum Berlistrik PLN tahun 2021 sebanyak 199 desa yang mana diantaranya desa-desa tersebut akan dibangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pembangunan PLTS Terpusat merupakan satu diantara program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Adapun

pelaksanaan program unggulan pembangunan PLTS Terpusat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.107
Data Listrik di Seluruh Desa Berbasis Potensi Lokal

| NO. | TAHUN | AKTIFITAS | LOKASI | OPD PENANGGUNG JAWAB | OUTPUT/OUTCOME |
|-----|-------|---|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 2019 | | | | |
| 2 | 2020 | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat | Desa Rantau Buta, Kec. Batu Sopang, Kab.Paser Desa Sandaran, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur Desa Sandaran, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 51 Pelanggan, kapasitas 23 kWp 130 Pelanggan, kapasitas 65.34 kWp 54 Pelanggan, kapasitas 27.72 kWp |
| 3 | 2021 | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat | Desa Tadoan, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur Desa Enggelam, Kec. Muara Wis, Kab. Kutai Kertanegara Dusun Ketibeh Desa Enggelam, Kec. Muara Wis, Kab. Kutai Kertanegara Desa Long Lamcin, Kec. Kelay, Kab. Berau Desa Rantau Layung, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser Desa Tanjung Soke, Kab. Bongon, Kab. Kutai Barat | | 203 Pelanggan, kapasitas 58.80 kWp 201 Pelanggan, kapasitas 83.16 kWp 91 Pelanggan, kapasitas 47.04 kWp 67 Pelanggan, kapasitas 29.40 kWp 79 Pelanggan, kapasitas 33.60 kWp 49 Pelanggan, kapasitas 29.40 kWp |
| 4 | 2022 | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat | Desa Selengot, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser Desa Pegat Betumbuk, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau Desa Menamang Kanan, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kertanegara Desa Menaman Kiri, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kertanegara Desa Long Duhung, Kec. Kelay, Kab. Berau | | 293 Pelanggan, kapasitas 73.65 kWp 139 Pelanggan, kapasitas 40.45 kWp 208 Pelanggan, kapasitas 65.54 kWp 141 Pelanggan, kapasitas 37.45 kWp 69 Pelanggan, kapasitas 21.89 kWp |
| 5 | 2023 | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat | Desa Pegat Betumbuk, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau Desa Long Sului, Kec. Kelay, Kab. Berau Desa Lemper dan Desa Seraya, Kec. Bongon, Kab. Kutai Barat Desa Mata Libaq, Kec. Long Hubung, Kab. Mahakam Ulu Desa Ujoh Halang, Kec. Long Iram, Kab. Kutai Barat Dusun Muluy Desa Swan Slutung, Kec. Muara Komam, Kab. Paser Desa Labuan Kallo, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser | | |

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2022

Pembangunan PLTS Terpusat merupakan satu diantara program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Pada tahun 2020 pembangunan PLTS Terpusat berlokasi di Paser dengan jumlah 51 pelanggan dan Kutai Timur dengan jumlah 184 pelanggan dengan jumlah pembangunan 235 Pelanggan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 pembangunan PLTS Pusat berlokasi di Kutai Timur dengan jumlah 203 pelanggan, Kutai Kartanegara dengan jumlah 292 pelanggan, Berau dengan jumlah 67 pelanggan, Paser dengan jumlah 79 pelanggan, dan Kutai Barat dengan jumlah 49 pelanggan dengan jumlah pembangunan 690 pelanggan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pembangunan PLTS Pusat berlokasi di Paser dengan jumlah 293 pelanggan, Berau dengan jumlah 208 pelanggan, dan Kutai Kartanegara dengan jumlah 349 pelanggan dengan jumlah pembangunan 850 Pelanggan

pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 ini masih dalam proses pembangunan.

Infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik mencapai 4.273.525 MWh pada tahun 2019. Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebanyak 1.038 Desa dan telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non-PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 839 Desa dan yang bersumber dari non-PLN sebanyak 199 Desa, sehingga rasio desa berlistrik pada tahun 2020 telah mencapai 100 persen. Sejalan dengan peningkatan rasio desa berlistrik, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan yakni sebesar 90,21 persen pada tahun 2020 menjadi 91,98 persen pada tahun 2021.

Tabel II.108
Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020

| NO | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah pelanggan listrik rumah tangga | 774.995 | 832.528 | 1.018.222 | 1.089.707 | 1.163.243 |
| 2 | Banyaknya tenaga listrik rumah tangga yang terjual (GWh) | 1.801,72 | 1.748,94 | 2.053,4 | 2.213,4 | 2.379,9 |

Sumber: PT. PLN Wilayah KALTIMRA

2) Energi Baru Terbarukan (EBT)

Potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Timur cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal, sementara pengembangan energi baru dan terbarukan masih mengalami kendala, lokasi sebagian besar berada di kawasan tertinggal, terdepan, terluar (3T) serta kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai. Adapun potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti energi air, surya, angin, *bioenergy*, panas bumi, gelombang laut dan lahan bekas tambang.

Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (Solar Cell) merupakan pembangkit listrik yang mampu mengonversi sinar matahari menjadi arus listrik. Energi matahari sesungguhnya merupakan sumber energi yang paling menjanjikan mengingat sifatnya yang berkelanjutan (*sustainable*)

serta jumlahnya yang sangat besar. Untuk wilayah khatulistiwa seperti Kalimantan Timur, potensi radiasi sinar matahari mencapai 1000 Watt Peak (Wp) per meter persegi. Dengan efisiensi panel surya 20%, maka dapat diperoleh daya listrik sebesar 200 Wp per meter persegi. Bila diasumsikan daya yang dapat diperoleh dari sistem tenaga surya sebesar 1 MWp per Hektar, maka apabila luasan void tambang yang dibangun dengan sistem tenaga surya terapung seluas 1000 Ha akan diperoleh daya listrik sebesar 1 GWp.

Tabel II.109
Rincian data Kualitatif/Absolut Terkait Presentasi Pemanfaatan EBT
(Realisasi Capaian 7,27)

| JENIS ENERGI | UNIT | 2022 | Konversi ke BOE | Satuan Energi | |
|---------------------------|-------|------------|-----------------|---------------|-------------|
| | | | | BOE | TOE |
| Minyak Bumi | | | | | |
| Total konsumsi | | | | | |
| 1. BBM | | | | | |
| Avgas | KL | | 5,53 | 0 | 0 |
| Avtur | KL | 105932 | 5,8907 | 624013,6324 | 87361,90854 |
| MFO 180/380 | KL | 89128 | 6,9612 | 620437,8336 | 86861,2967 |
| RON 95/98 | KL | 1754 | 5,8275 | 10221,435 | 1431,0009 |
| RON 88 | KL | 0 | 5,8275 | 0 | 0 |
| RON 89/90 | KL | 480251 | 5,8275 | 2798662,703 | 391812,7784 |
| RON 92 | KL | 52472 | 5,8275 | 305780,58 | 42809,2812 |
| IDO | KL | 0 | 6,6078 | 0 | 0 |
| CN 48 (murni) | KL | 23714,776 | 6,4871 | 153840,1234 | 21537,61727 |
| CN 51 (murni) | KL | 63526 | 6,4871 | 412099,5146 | 57693,93204 |
| CN 53 (murni) | KL | 16514 | 6,4871 | 107127,9694 | 14997,91572 |
| Kerosene | KL | 237 | 5,9274 | 1404,7938 | 196,671132 |
| Biogasoil (B20/B30) | KL | 2104371 | 6,4871 | 9555885,58 | 1337823,981 |
| 2. LPG | MT | 112650 | 8,5246 | 960296,19 | 134441,4666 |
| Total | | | | 15549770,35 | 2176967,85 |
| | | | | | |
| Batubara | | | | | |
| total Konsumsi | | | | | |
| 1. Bahan Bakar Pembangkit | Ton | 660238,804 | 4,2 | 2773002,977 | 388220,4168 |
| 2. Bahan Baku Industri | Ton | | 4,2 | 0 | 0 |
| Total | | 660238,804 | | 2773002,977 | 388220,4168 |
| | | | | | |
| Gas Bumi | | | | | |
| Total Konsumsi | | | | | |
| 1. bahan Bakar Pembangkit | mmscf | 3710,36888 | 0,1796 | 666,3822508 | 93,29351512 |
| 2. Bahan bakar industri | mmscf | 264,996 | 0,1796 | 47,5932816 | 6,663059424 |

| JENIS ENERGI | UNIT | 2022 | Konversi ke BOE | | Satuan Energi | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | | | BOE | TOE |
| 3. Jargas Rumah Tangga | sambungan RT/mmscf | 62735 | 0,1796 | | 11267,206 | 1577,40884 |
| 4. Sektor Komersial | mscf | | 0,1796 | | 0 | 0 |
| Total | | | | | 11981,18153 | 1677,365415 |
| Energi baru terbarukan (EBT) | | | | | | |
| Non Listrik | | | | | | |
| Total konsumsi | | | | | | |
| 1. FAME | KL | 2104371 | 6,4871 | | 1010193,618 | 141427,1066 |
| 2. Etanol | KL | | 2,2979 | | 0 | 0 |
| 3. Biomassa | Ton | | 3,2979 | | 0 | 0 |
| 4. Kapasitas Biogas RT | m3/tahun | 183898,4 | 0,00634 | | 1165,915856 | 163,2282198 |
| Total | | | | | 1011359,534 | 141590,3348 |
| Listrik | | | Cf | Eff | | |
| Kapasitas Terpasang On Grid Off Grid | | | E | F | | |
| 1. PLTA | MW | | 0,6 | 0,33 | 0,00 | 0 |
| 2. PLTB | MW | | 0,5 | 0,25 | 0,00 | 0 |
| 3. PLT BIOGAS | MW | 9 | 0,8 | 0,25 | 154652,54 | 21651,35616 |
| 4. PLT Biomassa | MW | 11 | 0,8 | 0,25 | 189019,78 | 26462,76864 |
| 5. PLTM | MW | | 0,6 | 0,25 | 0,00 | 0 |
| 6. PLTMH | MW | 0,529 | 0,6 | 0,25 | 6817,60 | 954,4639507 |
| 7. PLTP | MW | | 0,9 | 0,33 | 0,00 | 0 |
| 8. PLTS/PLTS ATAP | MW | 9,16 | 0,2 | 0,13 | 75674,00 | 10594,36017 |
| 9. PLTS Hybrid | MW | 0,15 | 0,17 | 0,13 | 1053,32 | 147,4651662 |
| 10. PLT Sampah | MW | | 0,8 | 0,25 | 0,00 | 0 |
| 11. PJUTS | MW | | | | 0,00 | 0 |
| 12. LTHSE | MW | | | | 0,00 | 0 |
| Total | | | | | 427217,24 | 59810,41409 |
| Total EBT | | | | | 1438576,78 | 201400,7489 |
| Perhitungan Bauran Energi 2022 | | | | | | |
| Energi Primer | | MTOE | | % | | |
| Minyak Bumi | | 2176967,85 | | 78,64011443 | | |
| Batubara | | 388220,4168 | | 14,02395447 | | |
| Gas Bumi | | 1677,365415 | | 0,06059263 | | |
| EBT | | 201400,7489 | | 7,275338468 | | |
| Total | | 2768266,381 | | 100 | | |

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2022

Bio-energi yang berasal dari biomassa, baik dalam bentuk cair, gas atau padat yang didukung oleh:

- a. limbah ternak seperti kotoran sapi perah, potong, kambing dan unggas.
- b. limbah industri seperti tahu, kelapa sawit (POME), dan tapioka.

- c. limbah rumah tangga dan perkotaan seperti kotoran manusia, sampah industri dan rumah tangga, *biomass* seperti hutan tanaman energi, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, limbah kayu, sekam padi, tongkol jagung, cangkang sawit, tangkos sawit.

Tabel II.110
Potensi Bioenergi dari Pome

| No | Kabupaten/ Kota | Jumlah Pabrik Minyak Sawit | TBS Diolah / Tahun (ton) | Pome Yang Dihasilkan (m3) | Listrik Yang Dihasilkan (MWh) | Kabupaten Pembangkitan (MW) |
|----|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Kutai Timur | 34 | 8.325.264 | 4.995.158 | 264.978 | 32,6 |
| 2 | Kutai Kartanegara | 18 | 4.260.823 | 2.556.494 | 135.614 | 16,7 |
| 3 | Berau | 11 | 3.064.374 | 1.838.624 | 97.534 | 12 |
| 4 | Kutai Barat | 6 | 1.736.580 | 1.058.148 | 56.132 | 6,9 |
| 5 | Penajam Paser Utara | 7 | 1.405.494 | 843.296 | 44.734 | 5,5 |
| 6 | Paser | 17 | 3.080.340 | 1.848.204 | 98.942 | 12,1 |
| 7 | Mahakam Ulu | 1 | 152.550 | 91.530 | 4.855 | 0,60 |
| | Jumlah | 94 | 22.025.425 | 13.231.454 | 702.789 | 86,4 |

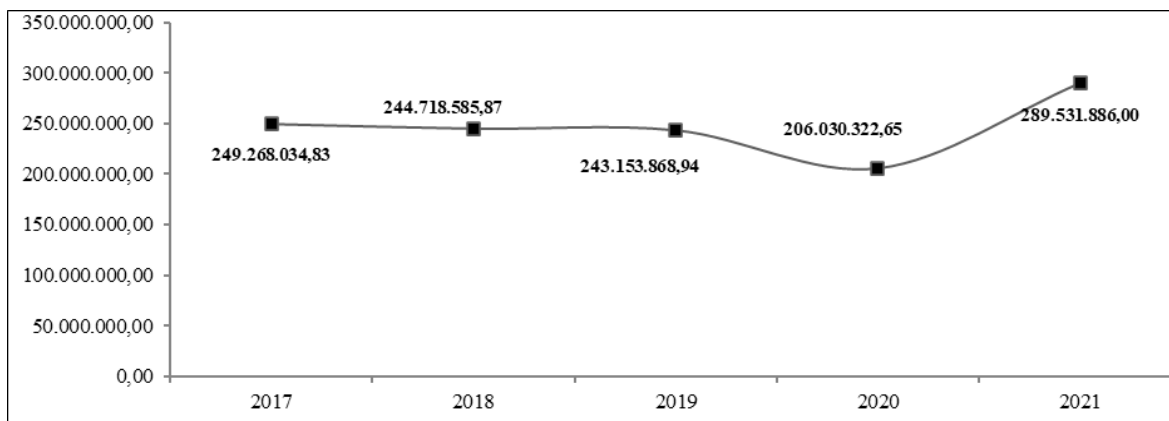
Sumber : Disbun Kaltim, 2021 (Data Diolah)

Tabel II.111
Potensi Bioenergi dari Biomass Hutan Energi

| Unit Usaha | Lokasi (Kab) | Luas (ha) | Kelas Perusahaan | Luas Alokasi HTE | Rencana Penanaman 2015-2024 | Jenis Tanaman Energi |
|--|-------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Unit Usaha yang telah mengembangkan THE di Kaltim | | | | | | |
| PT. Dharma Hutani Makmur | Kutai Kartanegara | 41,545 | Pertukangan dan energi | 7,500 | 7,500 | Akasia, Gamal, Giant Bamboo |
| Unit Usaha yang Berkomitmen untuk Mengembangkan Bioenergi di Kaltim | | | | | | |
| PT. Inhutani I | Paser | 16,816 | | 0 | 0 | |
| PT. Hutan Mahligai | Kutai Barat | 11,275 | | 100 | 0 | |
| PT. Belantara Pusaka | Berau | 14,010 | | 500 | 500 | |
| PT. Oceanic Timber Product | Berau | 16,600 | | 3000 | 0 | |

3) Pertambangan

Produksi batubara tahun 2021 adalah sebesar 289,53 juta ton, yang menunjukkan peningkatan sebesar 40,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi batubara disebabkan oleh permintaan batubara yang meningkat dari negara tujuan seperti Tiongkok dan India akibat mulai berkurangnya pandemi COVID-19 serta peningkatan yang signifikan pada harga batubara global.

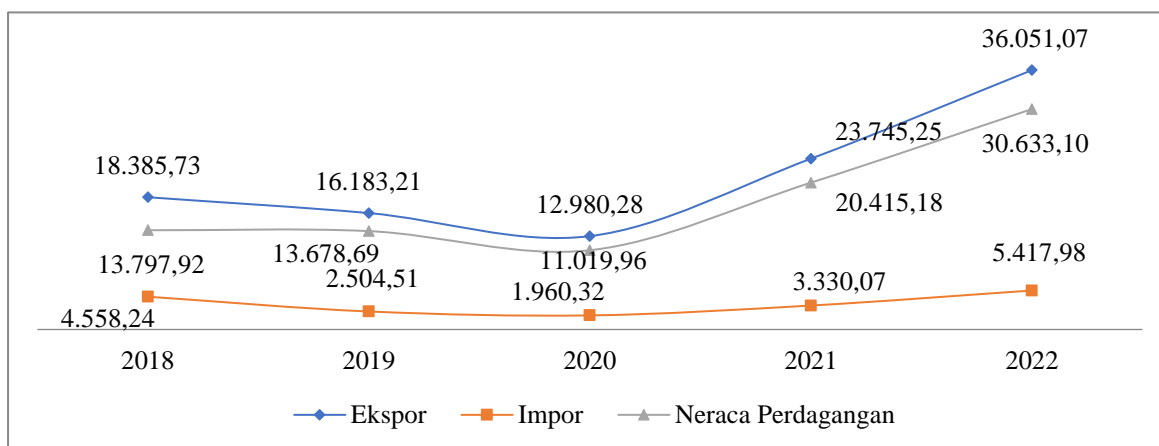


Gambar II.85
 Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2017-2021 (Ton)
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Pada tahun 2022 produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur terdapat penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi. Penurunan produksi migas tak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja aktivitas hulu migas.

F. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kaltim lebih kecil dibandingkan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persoalan ini disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan.



Gambar II.86
 Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerjasama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2018-2022, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Sementara dilihat dari tren pertumbuhan mengalami surplus perdagangan.

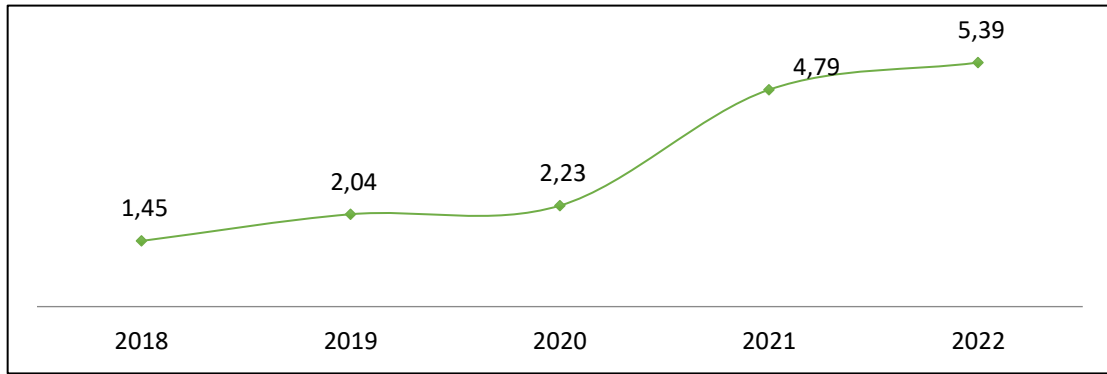
Tabel II.112
Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018 – 2022 (Juta US\$)

| No | Golongan Barang | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Migas | | 4.302,83 | 3.356,38 | 2.068,20 | 1.605,15 | 2.998,12 |
| 1 | Minyak Mentah | 334,70 | 12,63 | 7,27 | - | 8,48 |
| 2 | Hasil Minyak | 12,97 | 224,05 | 108,64 | 7,40 | 763,12 |
| 3 | Gas | 2.977,57 | 1.831,52 | 1.032,38 | 1.597,75 | 2.226,52 |
| Non Migas | | 13.230,03 | 15.029,36 | 14.113,59 | 22.554,76 | 33.052,95 |
| 1 | Hasil Tambang | 13.580,80 | 12.408 | 9.600,36 | 17.767,61 | 27.665,96 |
| 2 | Hasil Industri | 1.445,92 | 1.696,72 | 2.222,52 | 4.780,52 | 5.377,14 |
| 3 | Hasil Pertanian | 4,21 | 8,87 | 9,11 | 6,63 | 9,85 |
| Total Ekspor | | 18.385,73 | 16.183,21 | 12.980,28 | 24.159,90 | 36.051,07 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 32,84 persen dibanding tahun 2021 yaitu dari US\$ 24,16 miliar menjadi US\$ 36,05 miliar. Peningkatan ekspor tahun 2022 disebabkan oleh naiknya nilai ekspor barang migas maupun non migas. Ekspor barang migas tahun 2022 mencapai US\$ 2,99 miliar naik sebesar 129,01 persen dibanding tahun 2021. Sementara ekspor barang non migas mencapai US\$ 33,05 miliar naik sebesar 24,39 persen dibanding tahun 2021.

Nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir hingga mencapai 5,39 miliar US\$ pada tahun 2022 mengalami peningkatan 12,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,79 miliar US\$.

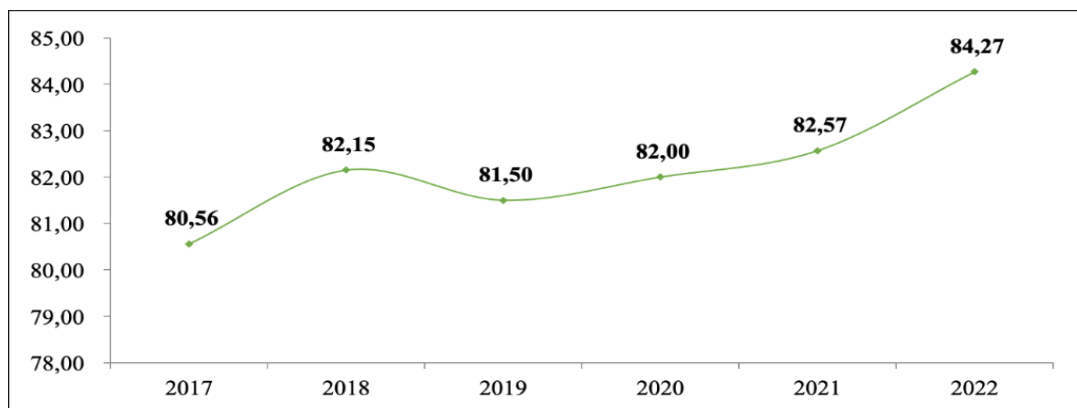


Gambar II.87
Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Miliar US\$)
(Sumber: BPS Prov KALTIM, 2022)

2.3.3. Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2022 meningkat di angka sementara 84,27 dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 82,57. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemajuan dalam kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur walaupun belum stabil sehingga terjadi fluktuasi pada angka IKM.



Gambar II.88
Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2022
(Sumber: Biro Organisasi Provinsi KALTIM)

2) Nilai SAKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan nilai sebesar 78,10 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Tabel II.113
Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Timur

| KOMPONEN YANG DINILAI | BOBOT | NILAI | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| a. Perencanaan Kinerja | 30 | 25.35 | 25.59 | 25.92 | 25.94 | 26,06 |
| b. Pengukuran Kinerja | 25 | 18.28 | 18.77 | 18.97 | 18.99 | 22,50 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15 | 12.47 | 12.54 | 12.75 | 12.76 | 12,84 |
| d. Evaluasi Kinerja | 10 | 5.13 | 5.91 | 6.21 | 6.21 | - |
| e. Capaian Kinerja | 20 | 13.66 | 13.74 | 13.82 | 13.92 | - |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 77,50 | 74,89 | 76,55 | 77,67 | 78,10 |
| Predikat Akuntabilitas Kinerja | | BB | BB | BB | BB | BB |
| Persentase Kenaikan / Penurunan | | 0.2% | -3.4% | 2.2% | 3.7% | 0,6% |

Sumber: Surat Kementerian PAN dan RB Nomor: B/798/AA.05/2022 Tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.

Hasil evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level Perangkat Daerah.

3) Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan telah mencapai status skor sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional. Tingkat akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dilihat melalui hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mendapat predikat BB dengan skor 77,82. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu meningkatkan konsistensi penentuan indikator perencanaan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah.

2.3.4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Perencanaan

Pemerintah daerah telah menyusun dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan periodesasinya. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan RKPD, maka perangkat daerah juga menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen perencanaan yang disusun melalui proses penyelarasan dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan perencanaan di bawahnya. Terdapat beberapa capaian kinerja pada unsur Perencanaan yang telah baik namun masih terdapat yang belum optimal. Beberapa kinerja yang belum optimal ditunjukkan oleh indikator Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota, Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur, dan Persentase target kinerja pembangunan yang didukung oleh data. Indikator kinerja unsur Perencanaan dalam kurun waktu Tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.114
Capaian Indikator Kinerja Unsur Perencanaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

| No | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|--|------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%) | 82,3 | 43,33 | 79,30 | | |
| 2 | Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur (%) | | 83 | 75,00 | | |
| 3 | Persentase target kinerja pembangunan yang didukung oleh data (%) | | 80 | 81,48 | | |
| 4 | Persentase prioritas pembangunan daerah yang mencapai target (%) | | | | 43,09 | 93,75 |
| 5 | Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran (%) | | | | 96,97 | 99,61 |

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023

B. Keuangan

Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori tinggi.

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dana perimbangan cenderung semakin menurun. Namun peningkatan PAD tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah yang ada belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kalimantan Timur perlu upaya keras untuk melakukan transformasi sumber-sumber PAD lainnya secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD, serta pengembangan nilai tambah sektor ekonomi non migas dan batu bara yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Kemandirian Fiskal Daerah/Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD pada tahun yang sama tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2022 adalah 54,07 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

Tabel II.115
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

| Tahun | PAD (Ribu Rupiah) | Total Pendapatan (Ribu Rupiah) | DOF (Persen) |
|-----------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| 2018 | 5.800.270.286,00 | 10.669.542.802,00 | 54,36 |
| 2019 | 6.555.852.805,00 | 11.775.086.446,00 | 55,68 |
| 2020 | 4.116.573.388,00 | 8.763.476.903,00 | 46,97 |
| 2021 | 6.111.918.272,28 | 10.220.142.967,27 | 59,80 |
| 2022 | 8.997.262.537,26 | 16.804.693.776,01 | 53,54 |
| Rata-rata | 6.316.375.457,71 | 11.646.588.578,86 | 54,07 |

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2023

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2012 sampai 2021. Meskipun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan aset-aset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki status opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, pada tahun 2012 hanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 8 Kabupaten/Kota masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Kabupaten Mahakam Ulu masih belum mendapatkan status opini

dari BPK dan pada tahun 2020 seluruh kabupaten/kota telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

C. Penelitian dan Pengembangan

Walaupun nilai capaian kinerja kelitbangan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah mencapai target bahkan melampaui target yang dimuat dalam Renstra PD, namun masih perlu dilakukan perbaikan karena indikator tersebut belum mengukur kebermanfaatannya. Selanjutnya, pada tahun 2021 telah dilakukan perbaikan terhadap indikator kinerja sasaran yang lebih berorientasi pada pemanfaatan hasil kelitbangan, sehingga dibuatlah pemetaan pemanfaatan terhadap hasil kelitbangan.

Tabel II.116
Capaian Kinerja Kelitbangan Tahun 2018-2021

| No | Indikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|------|------|------|------|
| 1 | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (%) | | | 26 | 57 |
| 2 | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan IKN (%) | | | 9 | 27 |

Sumber: LkjIP BALITBANGDA Kaltim Tahun 2021

Perolehan angka realisasi tahun 2020 sebesar 26% diperoleh dari perhitungan ($23/88 \times 100 = 26\%$), sedangkan realisasi tahun 2021 diperoleh dari perhitungan ($50/88 \times 100 = 57\%$). dari realisasi tersebut kemudian dapat diketahui peningkatan realisasi dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kemudian untuk melihat sampai sejauh mana peningkatan/penurunan persentase capaian indikator kinerja sasaran, dibandingkanlah realisasi antara tahun 2021 dengan 2020, dan diperolehlah angka peningkatan sebesar 119%. ($57/26 \times 100$). Peningkatan tersebut disebabkan akumulasi dari jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal lainnya yang mendukung peningkatan kinerja tersebut adalah inovasi yang telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Kepala Badan. Keberhasilan tersebut juga tak lepas dari kerjakeras dan peran dari ASN Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tetap semangat dalam melakukan kegiatan kelitbangan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19.

Persentase hasil kelitbangan yang memanfaatkan untuk mendukung pembangunan IKN mengalami kenaikan sebesar 200% dari tahun 2020 ke 2021. Pada tahun 2020 jumlah kelitbangan yang telah dimanfaatkan sebanyak 1 judul kelitbangan dari target RENSTA 1 judul kelitbangan, sedangkan tahun 2021 terlaksana sebanyak 2 pemanfaatan judul kelitbangan dari target RENSTRA 2 judul kelitbangan. Kemudian untuk melihat sampai sejauh mana peningkatan/penurunan persentase capaian indikator kinerja sasaran, dibandingkanlah realisasi antara tahun 2021 dengan 2020, dan diperoleh angka peningkatan sebesar 200%.

2.3.5. Pengawasan

1. Tingkat Maturitas Sistem Intern Pemerintah (SPIP)

Capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 berada pada Level 3 atau Tingkat Terdefinisi yang artinya pada tingkat ini, Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau Terdefinisi yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas Terdefinisi, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Penilaian

dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap perangkat daerah sampel sebanyak 11 Perangkat Daerah, yaitu Inspektorat, Bappeda, BPSDM, BPKAD, Dinas Perindagkop UKM, Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial. Pada tahun 2021 ini sebenarnya penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang harus dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan, namun belum dilaksanakan hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dan Bimtek SPIP kepada perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai pilot project Maturitas SPIP Terintegrasi. Pada tahun 2022 telah dilakukan Quality Assurance (QA) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada perangkat daerah yang pemangku penanggung jawab atas pencapaian RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dimana dari hasil Quality Assurance tersebut hasil sama dengan seperti pada tahun 2021 yang pada level 3 atau pada tingkat maturitas Terdefinisi. Penilaian Maturitas pada Tahun 2022 ini ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan atas peraturan Perka BPKP menggunakan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yaitu Penilaian Maturitas New SPIP Terintegrasi yang bertujuan agar penilaian Maturitas SPIP lebih berkaitan dengan Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan SPIP.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain:

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap:
 - (1). Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi peraturan tersebut,
 - (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada Organisasi/Unit Kerja,
 - (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang,
 - (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan pemberhentiannya,
 - (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/ rekonsiliasi,
 - (6) Pengamanan Asset Daerah,
 - (7) Penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas,
 - (8) Otoritas dan kejadian penting,
 - (9) Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.
2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.

3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.
5. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan identifikasi dan Evaluasi atas pelaksanaan Benturan Kepentingan.
6. Pemprov Kaltim belum mempunyai Sistem Pengendalian Froud (*Fraud Control System*) dan Impelementasinya.

Tabel II.117
Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Sumber: Inspektorat Provinsi KALTIM, 2023

2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam laporan tersebut ditemukan temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh obrik/entitas. Selama lima tahun terakhir, indikator ini menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2021 sempat sedikit mengalami penurunan akibat ada rekomendasi yang belum atau sulit dilaksanakan. Secara umum, peningkatan ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan APIP semakin banyak yang ditindaklanjuti.

Target Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP pada tahun 2022 memang belum 100% sebab jumlah rekomendasi setiap tahun yang selalu bertambah sesuai laporan hasil pemeriksaan, masih terdapat rekomendasi temuan yang sudah lama dan berlarut-larut atau sulit untuk ditindaklanjuti. Selain itu, faktor lainnya adalah masih kurangnya kesadaran dan respon dari obrik untuk penyelesaian tindak lanjut hasil temua pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa ditindaklanjuti selama 60 hari setelah menerima LHP, masih kurangnya pemahaman obrik terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya, serta belum ada *reward and punishment*.

Tabel II.118
 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

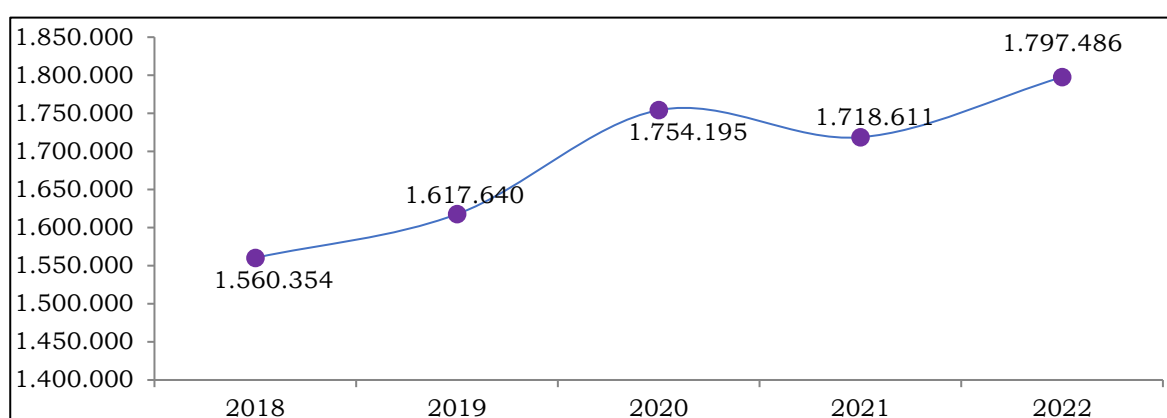
| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|------|
| Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (%) | 75 | 80 | 81 | 80 | 85 |

Sumber: LkjIP Inspektorat Provinsi KALTIM Tahun 2019-2022

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama 5 tahun terakhir, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik akan tetapi pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yang mencapai Rp. 1.718.611,- per bulan. Namun di tahun 2022, pengeluaran konsumsi rumah tangga kembali mengalami meningkat mencapai Rp. 1.797.486,-. Penyebab naiknya pengeluaran rata-rata per kapita adalah meningkatnya pengeluaran konsumsi makanan di tahun 2022 yang mencapai Rp 813.448 (42,85 persen) dimana pengeluaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 736.465 (45,06 persen).



Gambar II.89
 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Rupiah)
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi Rumah Tangga untuk Non Pangan)

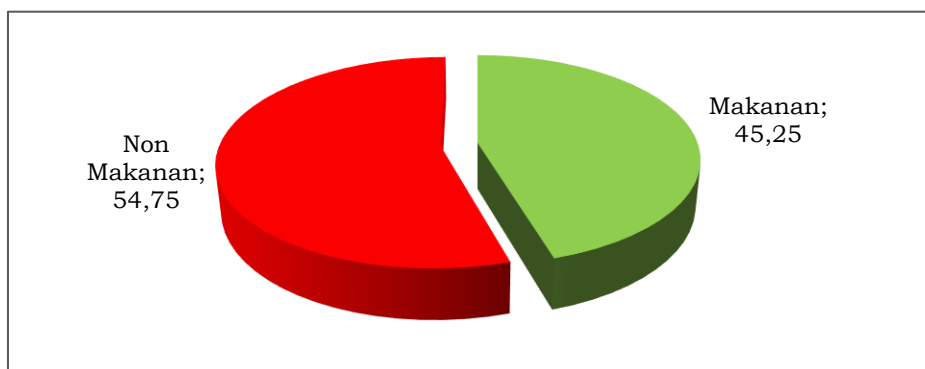
Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier

yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

Tabel II.119
Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp) | 857.449 | 893.217 | 963.725 | 982.146 | 984.038 |
| 2 | Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp) | 1.560.354 | 1.617.640 | 1.754.195 | 1.718.611 | 1.797.486 |
| 3 | Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%) | 54,95 | 55,22 | 54,94 | 57,15 | 54,75 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023



Gambar II.90
Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

C. Nilai Tukar Petani

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, NTP gabungan tahun 2019 – 2022 selalu berada di atas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayarkan petani di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II.120
Rata-Rata Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Indeks Yang Diterima Petani (It) | 123,77 | 107,91 | 116,96 | 128,25 | 139,73 |
| 2. | Indeks Yang Dibayar Petani (Ib) | 128,75 | 102,41 | 104,76 | 106,05 | 110,87 |
| 3. | Nilai Tukar Petani (NTP) | 96,14 | 105,38 | 111,65 | 120,94 | 126,03 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Peningkatan NTP tahun 2022 disebabkan meningkatnya NTP pada hampir seluruh sub sektor, kecuali sub sektor tanaman pangan dan perikanan yang mengalami penurunan. Selanjutnya, ada tiga sub sektor yang mengalami peningkatan NTP, yaitu subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat dan peternakan. Penurunan NTP subsector Tanaman Pangan disebabkan menurunnya indeks harga yang diterima petani (It) sejak bulan februari dan terus menurun hingga bulan mei tahun 2022 dan mulai sedikit meningkat pada bulan juni tahun 2022. Bahkan pada bulan mei tahun 2022 angka indeks harga yang diterima petani dibawah 100. Artinya pada bulan mei tersebut, harga produk pertanian tanaman pangan yang diterima petani nilainya dibawah harga tahun dasar 2018. Sedangkan penyebab menurunnya nilai NTP tahun 2022 subsektor perikanan adalah karena sejak bulan Juli hingga Oktober, indeks harga yang diterima petani perikanan lebih rendah daripada yang harus dibayarkan. Sehingga menyebabkan NTP bulan Juli hingga Oktober tahun 2022 berada dibawah 100 yang artinya pada bulan-bulan tersebut petani perikanan merugi.

Diantara kelima subsector dalam pembentukan NTP, petani pada subsector perkebunan rakyat adalah petani yang paling sejahtera dibandingkan dengan subsektor yang lain karena rata-rata NTP tiap tahun sudah diatas 150 artinya bahwa nilai yang diterima dari hasil produksi perkebunannya sudah 50 persen lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal untuk proses produksi perkebunannya. Untuk subsector yang lain masih belum aman karena nilai NTP masih berfluktuasi disekitaran angka 100.

Tabel II.121
 Nilai Tukar Petani (NTP) Regional Kalimantan dan Nasional
 Menurut Subsektor Tahun 2022

| No | Uraian | Kaltim | Kalbar | Kalteng | Kalsel | Kaltara | Nasional |
|----|---------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|----------|
| | NTP Gabungan | 126,03 | 141,34 | 121,60 | 107,33 | 109,00 | 107,33 |
| 1. | Tanaman Pangan | 92,34 | 92,59 | 94,63 | 98,79 | 96,78 | 98,82 |
| 2. | Hortikultura | 112,32 | 102,01 | 111,82 | 105,54 | 101,41 | 108,74 |
| 3. | Tanaman Perkebunan Rakyat | 162,54 | 167,77 | 139,17 | 123,02 | 154,16 | 126,22 |
| 4. | Peternakan | 108,77 | 100,53 | 107,74 | 102,38 | 104,55 | 101,24 |
| 5. | Perikanan | 97,98 | 102,64 | 94,46 | 100,60 | 104,29 | 105,24 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Ternyata fenomena yang terjadi di Kalimantan Timur, juga terjadi di wilayah lain di pulau Kalimantan, bahwa petani subsector perkebunan rakyat lebih sejahtera dibandingkan dengan subsector yang lain. Sementara subsector tanaman pangan dan perikanan merupakan subsector yang masih rentan berfluktuasi nilai NTP-nya berada dibawah 100.

Nilai Tukar Petani di regional Kalimantan berada di atas 100 dan berada di atas nasional sebesar 107,33. Namun jika diurutkan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata NTP tertinggi kedua sebesar 126,03, dibawah Kalimantan Barat sebesar 141,34.

D. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Pada tahun 2017-2021, proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mengalami kenaikan namun rasio daya serap tenaga kerja justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam penyediaan lapangan kerja yang belum sesuai dengan kualitas dan *skill* tenaga kerja lokal yang tersedia. Sejalan dengan itu, peralihan investasi dari sektor industri/manufaktur yang padat karya menjadi sektor industri/manufaktur padat modal yang cenderung memiliki serapan tenaga kerja yang lebih sedikit. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan peluang dan kesempatan kerja lebih kepada masyarakat lokal melalui peningkatan investasi yang memberikan timbal balik positif bagi masyarakat. Rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi, baik PMDN maupun PMA, di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.122
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022

| No | Uraian | PMDN | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN | 12.935 | 20.837 | 19.952 | 21.596 | 24.829 |
| 2 | Jumlah proyek seluruh PMDN | 520 | 2.227 | 3.924 | 9.291 | 4.938 |
| 3 | Rasio daya serap tenaga kerja | 24,88 | 9,36 | 5,08 | 2,32 | 5,03 |
| No | Uraian | PMA | | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA | 12.500 | 15.166 | 5.868 | 5.650 | 11.609 |
| 2 | Jumlah proyek seluruh PMA | 513 | 903 | 778 | 1.034 | 742 |
| 3 | Rasio daya serap tenaga kerja | 24,37 | 16,80 | 7,54 | 5,46 | 15,65 |

Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2023

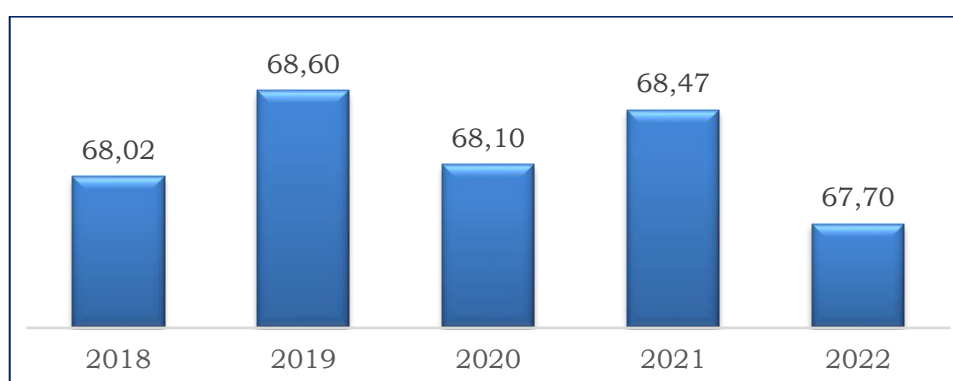
Sektor usaha tenaga kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2022 pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) paling banyak diserap oleh sektor pertambangan sebesar 41,03 persen dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 28,88 persen. Hal ini terjadi dikarenakan nilai realisasi investasi dan jumlah proyek terbesar pada PMDN adalah sektor pertambangan. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) paling banyak diserap oleh sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan menyerap 50,59 persen tenaga kerja, sedangkan sektor pertambangan menyerap tenaga kerja sebanyak 26,13 persen. Sama halnya seperti pada PMDN, pada PMA penyerapan tenaga kerja sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan terbanyak juga dipengaruhi dengan nilai investasi dan jumlah proyek yang tinggi pada sektor tersebut. Kemudian dengan berkembangnya investasi, efek yang akan diperoleh yakni terhadap upaya memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

E. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah

langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan perbaikan guna menunjang reformasi birokrasi yang baik dan mengarah kearah tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada tahun 2020 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di angka 68,10 dengan predikat B (Cukup Baik), sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,54% berada di angka 68,47 dengan predikat B (cukup baik).



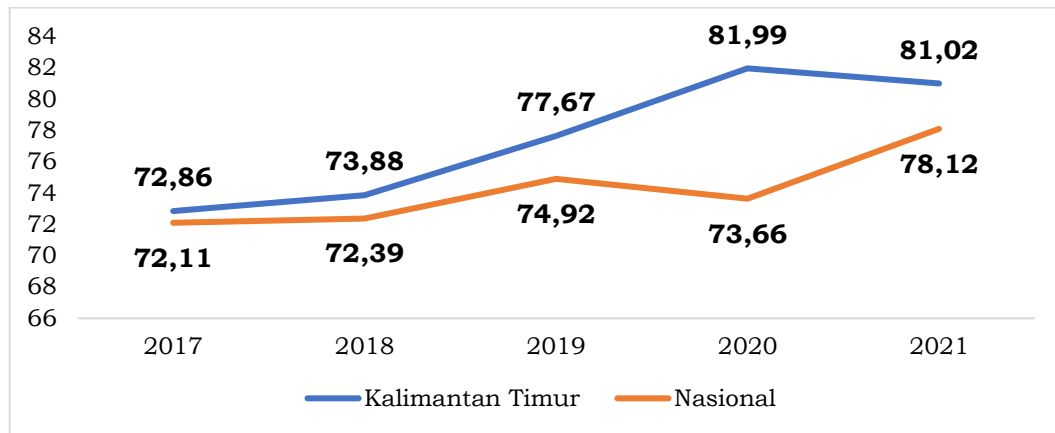
Gambar II.91

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur

(Sumber: Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2023)

F. Indeks Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksnya mencapai 81,02 persen pada tahun 2022 dan di level nasional berada pada peringkat ke Lima, nilai indeks ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan metode dalam perhitungan indeks demokrasi mengalami perubahan. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur masuk dalam kategori "*high performing democracy*". Walau mengalami penurunan di tahun 2021, namun IDI Kalimantan Timur masih tetap berada di atas IDI nasional yang mencapai 78,12.



Gambar II.92
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2021
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Perkembangan IDI Kalimantan Timur dari 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi, Capaian IDI terendah pada tahun 2017 sebesar 72,86 sedangkan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 81,99. Fluktuasi angka IDI mencerminkan dinamika situasi demokrasi di wilayah Kalimantan Timur.

Pada tahun 2021 Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan metode baru dimana pada metode lama focus pada demokrasi politik yang hanya mengukur demokrasi politik yang memiliki porsi besar pada institutional democracy seperti Lembaga pemilu, DPRD, birokrasi, dll sedangkan pada metode baru focus pada demokrasi yang lebih luas dimana mengurangi porsi ukuran institutional democracy dan melibatkan aspek ekonomi politik. Selain itu pada metode lamaterdapat 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator sedangkan pada metode baru hanya ada 3 aspek dan 22 indikator.

Berdasarkan capaian IDI Tahun 2021 di Kalimantan Timur, masih terdapat 2 indikator yang nilainya masih dibawah 60, yaitu:

1. Indikator Anti Monopoli Sumber Daya Ekonomi

Indikator ini diperoleh dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Dari data KPPU, ada peningkatan data dari 4,51 di tahun 2020 menjadi 4,57 di tahun 2021. Kondisi ini didukung dengan peningkatan dimensi regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Indikator Lembaga Kinerja Legislatif

Diperoleh dari persentase perda yang disahkan terhadap target Propempera. Data dari sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

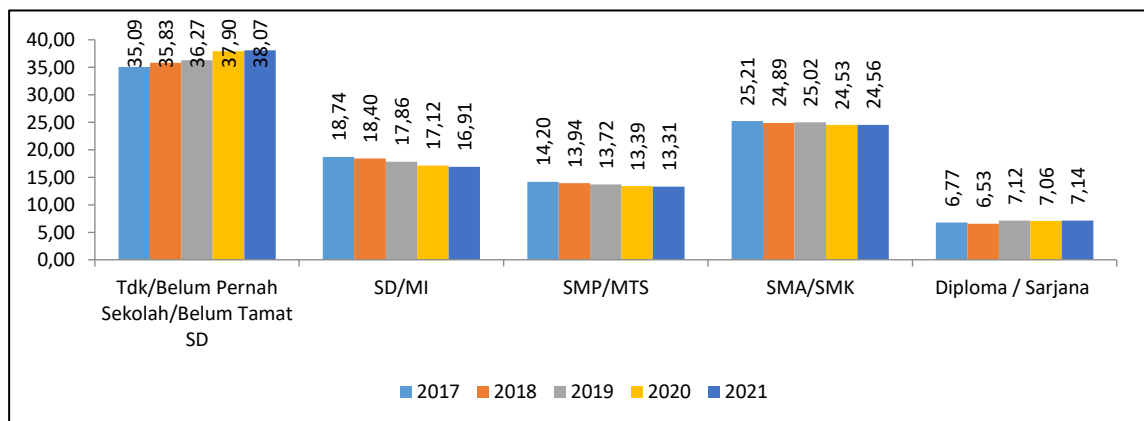
diperoleh ada 8 perda yang disahkan dari 15 target yang masuk di Propempera pada tahun 2021.

G. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku diploma/sarjana pada tahun 2021 hanya sebesar 7,14 persen, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA/MA/SMK (24,56 persen), SLTP/MTs (13,31 persen) dan SD/MI (16,91 persen). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 38,07 persen, persentase ini meningkat dibandingkan presentase pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.



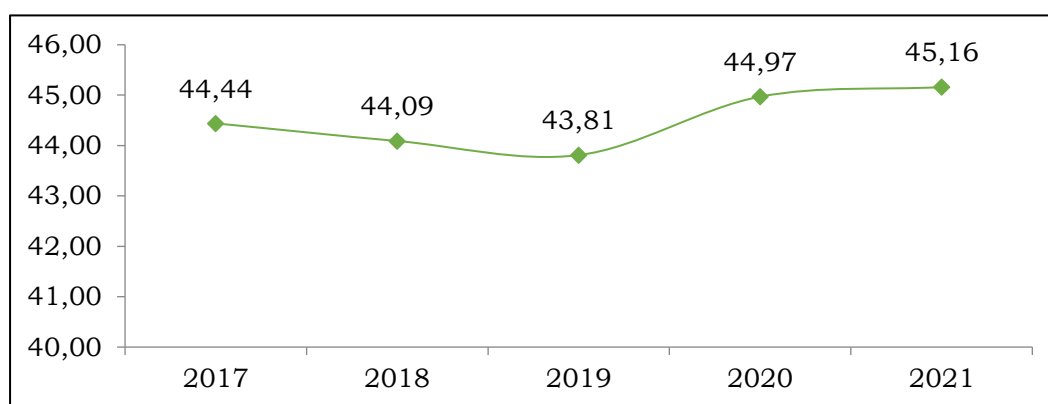
Gambar II.93

Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022)

H. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 45,16, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45-46 orang penduduk usia non produktif. Bila disandingkan dengan tingkat kemiskinan dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan dipengaruhi oleh rasio ketergantungan, dimana pengeluaran per kapita usia produktif harus menanggung biaya hidup kelompok usia non produktif. Upaya mengurangi angka ketergantungan usia non produktif dapat dilakukan dengan meningkatkan Pendidikan dan keterampilan kelompok usia produktif serta menciptakan kesempatan lapangan kerja yang melibatkan usia non produktif.



Gambar II.94

Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Salah satu tahapan penting dalam

pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2022 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2024. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel II.123
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Prioritas Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

| Misi/Tujuan/ Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|--------|---------------------------------------|---------------|--|----------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|---|----------------|---|------------|--|------------|---|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7*100 | | 11=5/4*10 0 | | 11 |
| [MISI] 1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [TUJUAN] 1 Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 77,25 | | 77,44 | | 76,88 | | 77,25 | | 77,44 | | 100, 25 | | 100, 25 | | |
| [SASARAN] 1.1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | Tahun | 14,02 | | 13,84 | | 13,81 | | 13,9 | | 13,84 | | 99, 57 | | 98, 72 | | |
| | Rata-rata lama sekolah (Tahun) | Tahun | 10,04 | | 9,92 | | 9,84 | | 10,04 | | 9,92 | | 98, 80 | | 98, 80 | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKA AN | Persentase Peningkatan Jangka waktu dan Kapasitas Perpustakaan | % | 9,19 | 2.325.000.000 | 10,64 | 13.499.680.760 | 8,1 | 2.017.396.306 | 9 | 5.462.794.661 | 10,64 | 13.499.680.760 | 118, 22 | 247, 12 | 115, 78 | 580, 63 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|--------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = $\frac{8}{7} \times 100$ | | 11 = $\frac{5}{4} \times 100$ | | 11 |
| | akan yang terakreditasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK | % | 82 | 894.742.153.237 | 83,3 | 946.842.723.002 | 78,15 | 518.070.640.416 | 82 | 657.333.850.063 | 83,3 | 763.661.010.906 | 101,59 | 116,18 | 101,59 | 105,82 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| [SASARAN] 1.2 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan | Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan | % | 0,85 | | 0,88 | | 0,13 | | 0,85 | | 0,88 | 103,53 | | 103,53 | | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAN | Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | % | 70 | 26.000.000.000 | 71 | 120.432.779.815 | 20,59 | 110.430.633.679 | 70 | 118.316.524.305 | 71,74 | 120.431.597.843 | 102,49 | 101,79 | 101,43 | 463,20 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS | Persentase Pengembangan Kapasit | % | 1 | 8.420.000.000 | 0,88 | 8.942.653.376 | 0,13 | 1.789.757.399 | 1 | 8.081.638.000 | 0,88 | 8.942.326.376 | 88,00 | 110,65 | 88,00 | 106,21 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |

| Misi/Tujuan/ Sasaran/Bida ng Urusan/Progr am | Indikat or Kinerja | Satu an | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab |
|---|--|--------------|---------------------------------------|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|------------|--|-----------|--|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7*100 | | 11=5/4*10 0 | | 11 |
| DAYA SAING KEPEMUDAA N | as daya Saing Kepemu daan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [SASARAN] 1.3 Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat | Usia Harapa n Hidup (Tahun) | Tahu n | 74,6 | | 74,62 | | 74,61 | | 74,65 | | 74,62 | | 99, 96 | | 100 ,03 | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Jumlah Kab/Ko ta yang melaku kan PHBS | Kab/ Kota | 3 | 504.923 .350 | 3 | 388.527 .545 | 3 | 780.540 .850 | 3 | 8.081.63 8.000 | 3 | 8.942.3 26.376 | 100 ,00 | 110 ,65 | 100 ,00 | 76,9 5 | Dinas Kesehat an |
| [PROGRAM] PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persent ase pelaksa naan SPM Bidang Kesehat an oleh kab/kot a | % | 100 | 88.073. 706.300 | 100 | 62.420. 498.641 | 100 | 35.978. 932.834 | 100 | 469.523. 350 | 100 | 388.527 .545 | 100 ,00 | 82, 75 | 100 ,00 | 70,8 7 | Dinas Kesehat an |
| [PROGRAM] PROGRAM PENINGKATA N KAPASITAS SUMBER | Present ase Kab/Ko ta yang memilik | % | 40 | 500.000 .000 | 70 | 0 | 60 | 28.801. 187.079 | 40 | 72.497.1 45.630 | 67,02 | 62.420. 498.641 | 167 ,55 | 86, 10 | 175 ,00 | 0,00 | Dinas Kesehat an |

| Misi/Tujuan/ Sasaran/Bida ng Urusan/Progr am | Indikat or Kinerja | Satu an | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab |
|---|--|---------------|---------------------------------------|-------------------|--|-------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|------------|--|------------|--|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7*100 | | 11=5/4*10 0 | | 11 |
| DAYA MANUSIA KESEHATAN | i ≥ 45% Puskes mas memen uhi 9 jenis tenaga kesehat an | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [SASARAN] 1.4 Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan | Indeks Pember dayaan Gender | Indeks | 65,64 | | 66,64 | | 66,64 | | 65,65 | | 66,64 | | 101 ,51 | | 101 ,52 | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN | Implem entasi Kelemb agaan PUG | Kebij akan | 1 | 1.200.0 00.000 | 1 | 1.524.1 54.513 | 1 | 798.506 .351 | 1 | 1.306.71 0.000 | 1 | 1.524.1 54.513 | 100 ,00 | 116 ,64 | 100 ,00 | 127, 01 | Dinas Kepend udukan , Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak |
| [TUJUAN] 2 Meningkatnya | Tingkat Kemiski nan (%) | % | 6 | | 6,31 | | 6,54 | | 6,15 | | 6,31 | | 97, 40 | | 94, 83 | | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|--------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------|---|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = $\frac{8}{7} \times 100$ | | 11 = $\frac{5}{4} \times 100$ | | 11 |
| Kesejahteraan Masyarakat | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | % | 6,75 | | 5,71 | | 6,83 | | 6,75 | | 5,71 | | 115,41 | | 115,41 | | |
| [SASARAN] 2.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan | Indeks Desa Membangun | Indeks | 0,6825 | | 0,732 | | 0,7071 | | 0,7071 | | 0,732 | | 103,52 | | 107,25 | | |
| [PROGRAM] PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa) | Desa | 35 | 2.698.564.625 | 35 | 2.137.318.302 | 30 | 1.681.845.362 | 35 | 2.190.940.500 | 35 | 2.137.318.302 | 100,00 | 97,55 | 100,00 | 79,20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| [PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Desa Berkembang | Desa | 30 | 1.281.412.513 | 38 | 14.814.563.403 | 27 | 624.712.927 | 30 | 893.397.500 | 38 | 14.814.563.403 | 126,67 | 1.658,23 | 126,67 | 1.156,11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|----------------------------------|-------|-------------------------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7*100 | | 11=5/4*100 | | 11 |
| [SASARAN] 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%) | % | 35 | | 25,08 | | 26,04 | | 35 | | 25,08 | | 71,66 | | 71,66 | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja | % | 70 | 1.191.517.040 | 62,22 | 832.889.618 | 75 | 1.261.566.671 | 70 | 2.555.911.000 | 62,22 | 832.889.618 | 88,89 | 32,59 | 88,89 | 69,90 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| [PROGRAM] PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Penempatan Tenaga Kerja | % | 31 | 1.967.167.260 | 68,43 | 716.846.853 | 79,07 | 1.576.375.854 | 31 | 861.978.000 | 34,88 | 716.846.853 | 112,52 | 83,16 | 220,75 | 36,44 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| [MISI] 2 Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [TUJUAN] 3 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | % | 3,5±1 | | 4,48 | | 2,48 | | 3,5±1 | | 4,48 | | 128,00 | | 128,00 | | |
| | PDRB per Kapita (Juta Rp) | Juta Rp | 172 | | 238,7 | | 182,54 | | 182,5 | | 238,7 | | 130,79 | | 138,78 | | |

| Misi/Tujuan/ Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|----------------|---------------------------------------|---------------|--|-------------|---|-------------|-----------------------------------|-------|---|-------|---|----|--|----|--|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7*100 | | 11=5/4*10 0 | | 11 |
| | LPE Non Migas dan Batubara (%) | % | 2 | | 6,11 | | 2,69 | | 2 | | 6,11 | | 305,50 | | 305,50 | | |
| | Nilai Tukar Petani | | 113 | | 126,03 | | 120,94 | | 119 | | 126,03 | | 105,91 | | 111,53 | | |
| [SASARAN] 3.1 Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah | Pendapatan Daerah (Miliar Rp) | Miliar Rp | 11.038 | | 15.909 | | 10.090 | | 10.861 | | 15.909 | | 146,48 | | 144,13 | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya | % | 100 | | 144,72 | | 92,98 | | 100 | | 144,72 | | 144,72 | | 144,72 | | Badan Pendapatan Daerah |
| | Jumlah wajib pajak cabang yang beroper | Wajib Pajak | 739 | 1.633.400.000 | 879.861.347 | 654.933.456 | 1.237.200.000 | 879.861.347 | 71,12 | 53,87 | 94,32 | 94,32 | | | | | Badan Pendapatan Daerah |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|-------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|----------------------------------|-------|--|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = $\frac{8}{7} \times 100$ | | 11 = $\frac{5}{4} \times 100$ | | 11 |
| | asi di Kaltim (wajib pajak) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah | % | 100 | 19.318.082.000 | 127,19 | 11.234.929.165 | 114,69 | 6.897.139.934 | 100 | 9.443.475.000 | 127,19 | 8.768.789.802 | 127,19 | 92,86 | 127,19 | 58,16 | Badan Pendapatan Daerah |
| [SASARAN] 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara | Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$) | Miliar US\$ | 1,72 | | 5,05 | | 4,75 | | 2 | | 5,05 | | 252,50 | | 293,60 | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non | % | 5 | 1.185.650.240 | 15,85 | 556.639.658 | 116,56 | 682.531.738 | 5 | 574.185.166 | 15,85 | 556.639.658 | 317,00 | 96,94 | 317,00 | 46,95 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|----------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|--------|---|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = $\frac{8}{7} \times 100$ | | 11 = $\frac{5}{4} \times 100$ | | 11 |
| | batubara | | | | | | | | | | | | | | | | Menengah |
| [SASARAN] 3.3 Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara | Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%) | % | 9,64 | | 8,24 | | 7,97 | | 7,9 | | 8,24 | | 104,30 | | 85,48 | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntu | Industri | 2 | 3.022.500.000 | 2 | 3.818.212.642 | 2 | 587.368.100 | 2 | 1.641.231.000 | 2 | 3.818.212.642 | 100,00 | 232,64 | 100,00 | 126,33 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|--------|---------------------------------|----|------------------------------------|----|-----------------------------------|----|--------------------------------|----|-----------------------------------|----|---------------------------------|----|----------------------------------|----|-----------------------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = $\frac{8}{7} \times 100$ | | 11 = $\frac{5}{4} \times 100$ | | 11 |
| | kan industri | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [SASARAN] 3.4 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas) | Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%) | % | 0,65 | | 0,43 | | 0,54 | | 0,6 | | 0,43 | | 71,67 | | 66,15 | | |
| | Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap | % | 0,37 | | 0,27 | | 0,32 | | 0,37 | | 0,27 | | 72,97 | | 72,97 | | |

| Misi/Tujuan/ Sasaran/Bida ng Urusan/Progr am | Indikat or Kinerja | Satu an | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab |
|--|---|------------|---------------------------------------|----|--|----|---|----|-----------------------------------|----|---|----|---|----|--|----|--|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7*100 | | 11=5/4*10 0 | | 11 |
| | p PDRB (%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kontrib usi lapanga n usaha sub sektor perkebu nan terhada p PDRB (%) | % | 5,2 | | 4,22 | | 4,97 | | 5,2 | | 4,22 | | 81, 15 | | 81, 15 | | |
| | Kontrib usi lapanga n usaha sub sektor perikan an terhada p PDRB (%) | % | 1,7 | | 1,28 | | 1,56 | | 1,6 | | 1,28 | | 80, 00 | | 75, 29 | | |
| | Kontrib usi lapanga n usaha sub sektor kehuta nan | % | 1,07 | | 0,81 | | 1,04 | | 1,07 | | 0,81 | | 75, 70 | | 75, 70 | | |

| Misi/Tujuan/ Sasaran/Bida ng Urusan/Progr am | Indikat or Kinerja | Satu an | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab |
|--|--|------------|---------------------------------------|-------------------------|--|--------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|------------|--|------------|--|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7*100 | | 11=5/4*10 0 | | 11 |
| | terhada p PDRB (%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Luas Kawasa n Hutan yang Dikelola Masyar akat (Ha) | Ha | 32.000 | 25.158. 200.136 | 48.258 | 25.806. 300.490 | 19.17 8 | 17.264. 230.139 | 32.000 | 17.450.9 53.875 | 48.258 | 25.806. 300.490 | 150 ,81 | 147 ,88 | 150 ,81 | 102, 58 | Dinas Kehuta nan |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAA N HUTAN | 1. Produk si Hasil Hutan Kayu; | M3 | 5.000. 000 | 181.688 .359.05 7 | 4.471. 286 | 74.141. 066.287 | 4.104. 271,2 1 | 97.904. 199.304 | 5.000. 000 | 23.467.6 18.071 | 4.471. 286,16 | 15.163. 952.667 | 89, 43 | 64, 62 | 89, 43 | 40,8 1 | Dinas Kehuta nan |
| | 2. Produk si Hasil Hutan Non Kayu | Ton | 700 | | 826,05 | | 1.175, 38 | | 700 | | 826,05 | | 118 ,01 | | 118 ,01 | | Dinas Kehuta nan |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAA N KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL | Luasan Kawasa n Konserv asi yang ditata | Ha | 297.80 6 | 4.036.2 45.818 | 293.03 1 | 3.855.1 07.558 | 289.0 48 | 3.449.8 33.835 | 297.80 5,90 | 3.986.23 5.800 | 293.03 0,78 | 3.855.1 07.558 | 98, 40 | 96, 71 | 98, 40 | 95,5 1 | Dinas Kelauta n Dan Perikan an |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|-------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = $\frac{8}{7} \times 100$ | | 11 = $\frac{5}{4} \times 100$ | | 11 |
| | menuju pengelolaan yang efektif | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | ton | 164.441 | 5.394.447.000 | 161.230 | 6.065.065.353 | 158.086 | 5.090.172.070 | 164.441 | 6.392.307.000 | 161.051 | 6.065.065.353 | 97,94 | 94,88 | 98,05 | 112,43 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | ton | 162.593 | 72.422.675.000 | 177.514 | 21.251.309.706 | 168.964 | 17.179.335.545 | 162.593 | 27.714.746.660 | 160.593 | 21.251.309.706 | 98,77 | 76,68 | 109,18 | 29,34 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan | Juta Ton CO ₂ e | 4,067 | 1.080.500.000 | 7,92 | 2.041.859.335 | 6,02 | 1.132.376.875 | 4,067 | 1.195.590.000 | 7,92 | 1.181.406.320 | 194,74 | 98,81 | 194,74 | 188,97 | Dinas Perkebunan |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN | Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan | Jenis | 3 | 1.481.250.000 | 3 | 1.447.597.872 | 2 | 771.015.020 | 3 | 1.573.750.000 | 3 | 1.447.597.872 | 100,00 | 91,98 | 100,00 | 97,73 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|----------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|----------------------------------|-------|---|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = $\frac{8}{7} \times 100$ | | 11 = $\frac{5}{4} \times 100$ | | 11 |
| HASIL PERIKANAN | berkualitas (SNI) yang dipasarkan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi ; | Ha | 8.000 | | 8.000 | | 7.000 | | 8.000 | | 8.000 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | 2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura | Unit | 7 | 4.716.890.000 | 7 | 2.875.053.809 | 6 | 4.414.794.317 | 7 | 2.965.929.180 | 7 | 2.875.053.809 | 100,00 | 96,94 | 100,00 | 60,95 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| [PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN | 1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapat | Kelompok | 30 | 6.722.948.500 | 36 | 6.037.862.000 | 34 | 6.679.289.750 | 30 | 6.997.252.000 | 36 | 6.037.862.000 | 120,00 | 86,29 | 120,00 | 89,81 | Dinas Perkebunan |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPDP Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|--------|---|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = $\frac{8}{7} \times 100$ | | 11 = $\frac{5}{4} \times 100$ | | 11 |
| PRASARANA PERTANIAN | atkan Bantuan Prasarana Perkebunan ; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) Luas Kebun yang dibangun | Ha | 1.462.645 | | 1.575.966 | | 1.540.488 | | 1.462.645 | | 1.575.966 | | 107,75 | | 107,75 | | Dinas Perkebunan |
| [PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Jumlah Miniranch yang teregister | Unit | 49 | 10.023.538.200 | 49 | 7.757.188.752 | 24 | 7.430.159.604 | 49 | 8.330.342.400 | 49 | 7.757.188.752 | 100,00 | 93,12 | 100,00 | 77,39 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| [PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 1. Jumlah produksi padi ; | Ton | 279.681 | 25.533.110.000 | 280.665 | 38.729.839.200 | 244.677,96 | 18.744.721.100 | 279.681 | 43.496.197.500 | 280.665 | 38.729.839.200 | 100,35 | 89,04 | 100,35 | 151,68 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | 2. Jumlah Produksi Tanaman | Ton | 283.592 | | 319.257 | | 345.230 | | 283.592 | | 380.283 | | 134,10 | | 112,58 | | Dinas Pangan, Tanaman Pangan |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|-------|----------------------------------|--------|---|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7*100 | | 11=5/4*100 | | 11 |
| | n Hortikultura | | | | | | | | | | | | | | | | dan Hortikultura |
| [PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produksi komoditas perkebunan | Ton | 18.126.490,20 | 6.465.557.600 | 17.022.588,00 | 13.218.069.532 | 17.792.792 | 5.190.021.450 | 18.126.490,20 | 14.810.658.000 | 17.022.588,00 | 11.156.061.775 | 93,91 | 75,32 | 93,91 | 204,44 | Dinas Perkebunan |
| [PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Angka Kelahiran Sapi | % | 21 | 7.243.486.018 | 21 | 3.458.041.537 | 19 | 7.171.086.750 | 21 | 4.206.881.500 | 21 | 2.975.608.741 | 100,00 | 70,73 | 100,00 | 47,74 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| [PROGRAM] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 1. Jumlah Aparatur Non Aparatur yang di bina ; | Orang | 330 | 3.693.331.700 | 333 | 3.522.700.804 | 91 | 4.787.423.236 | 330 | 3.616.662.000 | 333 | 3.522.700.804 | 100,91 | 97,40 | 100,91 | 95,38 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | 2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorpor | Lembaga | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 100,00 | | 100,00 | | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |

| Misi/Tujuan/ Sasaran/Bida ng Urusan/Progr am | Indikat or Kinerja | Satu an | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|------------|--|-----------|--|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7*100 | | 11=5/4*10 0 | | 11 |
| | asi yang dibina | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Jumlah kelemb agaan petani berbasi s korpora si yang dibentu k | lemb aga | 1 | 3.715.2 04.900 | 1 | 2.131.6 89.820 | 1 | 3.537.3 77.859 | 1 | 1.963.89 7.000 | 1 | 2.131.6 89.820 | 100 ,00 | 108 ,54 | 100 ,00 | 57,3 8 | Dinas Perkeb unan |
| [PROGRAM] PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Jumlah perusah aan yang mendap at sertifika t penilaian usaha perkebu nan (PUP) | Perus ahaa n | 35 | 750.000 .000 | 36 | 583.449 .050 | 41 | 772.764 .300 | 35 | 584.700. 000 | 36 | 583.449 .050 | 102 ,86 | 99, 79 | 102 ,86 | 77,7 9 | Dinas Perkeb unan |
| [SASARAN] 3.5 Meningkatnya realisasi investasi sektor Non | Nilai Realisa si Investasi Sektor Non | Triliu n Rp | 35 | | 36,17 | | 31,64 | | 35 | | 36,17 | | 103 ,34 | | 103 ,34 | | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|--------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|----------------------------------|--------|--|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = $\frac{8}{7} \times 100$ | | 11 = $\frac{5}{4} \times 100$ | | 11 |
| Migas dan non Batu Bara | Migas dan Batubara (Triliun Rp) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Waktu penyelesaian proses perizinan | Hari | 11 | 3.651.30.000 | 5 | 1.372.443.216 | 5 | 1.354.323.701 | 11 | 1.820.219.524 | 5 | 1.372.443.216 | 154,55 | 75,40 | 154,55 | 37,59 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM | % | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 1.514.309.436 | 100 | 1.069.577.836 | 100 | 1.610.282.000 | 100 | 1.514.309.436 | 100,00 | 94,04 | 100,00 | 100,95 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| [SASARAN] 3.6 Meningkatnya usaha ekonomi | Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap | % | 13 | | 15,13 | | | 12,13 | 13 | | 15,13 | | 116,38 | | 116,38 | | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|---|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = $\frac{8}{7} \times 100$ | | 11 = $\frac{5}{4} \times 100$ | | 11 |
| koperasi dan UKM | p PDRB (%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase tercapainya target UKM naik kelas | % | 1 | 271.143.400 | 4,84 | 31.818.261.900 | 1 | 436.292.550 | 1 | 369.151.000 | 4,84 | 31.818.261.900 | 484,00 | 8.619,31 | 484,00 | 11.734,85 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase tercapainya target Koperasi sehat | % | 10 | 576.519.240 | 13 | 705.461.493 | 0 | | 10 | 731.659.500 | 13 | 705.461.493 | 130,00 | 96,42 | 130,00 | 122,37 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------|---|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = $\frac{8}{7} \times 100$ | | 11 = $\frac{5}{4} \times 100$ | | 11 |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital | % | 3 | 701.986.600 | 36,2 | 8.108.087.742 | 2,75 | 498.824.200 | 3 | 302.400.000 | 36,2 | 8.108.087.742 | 1.206,67 | 2.681,25 | 1.206,67 | 1.155,02 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| [SASARAN] 3.7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) | % | 9,67 | | 8,58 | | 10,47 | | 9,67 | | 8,58 | | 88,73 | | 88,73 | | |
| | Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%) | % | 15,23 | | 14,38 | | 16,34 | | 15,23 | | 14,38 | | 94,42 | | 94,42 | | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|----------------------------------|-------|-----------------------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = $\frac{8}{7} \times 100$ | | 11 = $\frac{5}{4} \times 100$ | | 11 |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Sub Sektor Ekraf yang dikembangkan | % | 23,53 | 2.794.999.500 | 23,53 | 2.535.799.565 | 0 | | 23,53 | 4.583.154.474 | 23,53 | 2.535.799.565 | 100,00 | 55,33 | 100,00 | 90,73 | Dinas Pariwisata |
| [PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang dikembangkan | Destinasi | 3 | 7.602.445.000 | 3 | 4.763.794.929 | 2 | 3.956.536.975 | 3 | 5.745.573.520 | 3 | 4.763.794.929 | 100,00 | 82,91 | 100,00 | 62,66 | Dinas Pariwisata |
| [MISI] 3 Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [TUJUAN] 4 Meningkatkan Pemerataan Pelayanan | Indeks Gini | Indeks | 0,313 | | 0,327 | | 0,334 | | 0,327 | | 0,327 | | 100,00 | | 95,53 | | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---------|---------------------------------|----|------------------------------------|----|-----------------------------------|----|--------------------------------|----|-----------------------------------|----|---------------------------------|----|----------------------------------|----|-----------------------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = $\frac{8}{7} \times 100$ | | 11 = $\frac{5}{4} \times 100$ | | 11 |
| Infrastruktur Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [SASARAN] 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan | Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang) | orang | 6.000.000 | | 8.513.323 | | 4.664.922 | | 6.000.000 | | 8.513.323 | | 141,89 | | 141,89 | | |
| | Jumlah barang yang diangkut (Ton) | Ton | 337.000.000 | | 513.031.229 | | 323.231.994 | | 337.000.000 | | 513.031.229 | | 152,23 | | 152,23 | | |
| | Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung (Kawasan) | Kawasan | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Capaian akses air minum layak (%) | % | 68,53 | | 78 | | 70,78 | | 68,53 | | 78 | | 113,82 | | 113,82 | | |

| Misi/Tujuan/ Sasaran/Bida ng Urusan/Progr am | Indikat or Kinerja | Satu an | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab |
|--|---|------------|---------------------------------------|----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|---|----------------|---|-------|--|-------|--|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7*100 | | 11=5/4*10 0 | | 11 |
| | Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha) | Ha | 14.278,50 | | 14.278,50 | | 14.078,50 | | 14.278,50 | | 14.278,50 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | Luas kawasan kumuh (Ha) | Ha | 1.187,82 | | 1.185,14 | | 1.190,14 | | 1.187,82 | | 1.185,14 | | 100,23 | | 100,23 | | |
| | Luas genangan banjir perkotaan (Ha) | Ha | 374 | | 318,9 | | 406,3 | | 374 | | 318,9 | | 114,73 | | 114,73 | | |
| | Skoring Penyelesaian Penataan Ruang (%) | % | 76,74 | | 78,57 | | 75,94 | | 76,74 | | 78,57 | | 102,38 | | 102,38 | | |
| | Rasio elektrifikasi (%) | % | 93 | | 93,09 | | 91,98 | | 93 | | 93,09 | | 100,10 | | 100,10 | | |
| [PROGRAM] PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Jumlah Rumah Tidak | unit | 70.781 | 43.686.076.280 | 70.811 | 38.635.518.094 | 71.781 | 38.820.826.321 | 70.781 | 44.412.284.978 | 70.781 | 36.934.252.000 | 100,00 | 83,16 | 100,04 | 88,44 | Dinas Pekerjaan Umum, |

| Misi/Tujuan/ Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|--------|---------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|---|-------------------------|---|-----------|--|-----------|--|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7*100 | | 11=5/4*10 0 | | 11 |
| | Layak Huni | | | | | | | | | | | | | | | | Penataan Ruangan dan Perumahan Rakyat |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Panjang saluran drainase yang berfungsi baik | meter | 3.020 | 18.611. 113.120 | 2.723, 70 | 12.316. 674.513 | 2.180, 2 | 10.275. 217.797 | 3.020, 00 | 10.739.7 54.460 | 2.723, 70 | 7.768.7 24.512 | 90, 19 | 72, 34 | 90, 19 | 66,1 8 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan dan Perumahan Rakyat |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan | % | 66,64 | 150.384 .487.10 0 | 69,28 | 136.777 .317.87 7 | 67,48 | 44.446. 590.391 | 66,64 | 167.235. 906.513 | 69,67 | 136.777 .317.87 7 | 104 ,55 | 81, 79 | 103 ,96 | 90,9 5 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan dan Perumahan Rakyat |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN | Persentase Pemanfaatan | % | 7,34 | 2.920.7 31.000 | 7,27 | 2.003.7 93.750 | 6,53 | 1.812.3 25.181 | 7,34 | 2.184.37 7.000 | 7,27 | 2.003.7 93.750 | 99, 05 | 91, 73 | 99, 05 | 68,6 1 | Dinas Energi dan Sumber |

| Misi/Tujuan/ Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|--------|---------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------|---|-----------|--|------------|--|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7*100 | | 11=5/4*10 0 | | 11 |
| N ENERGI TERBARUKAN | aatan EBT | | | | | | | | | | | | | | | | Daya Mineral |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALIHAN STRIKAN | Jumlah KK Berlistrik | KK | 1.165. 000 | 54.200. 364.300 | 1.197. 475 | 41.149. 510.955 | 1.143. 533 | 39.092. 429.018 | 1.165. 000 | 44.245.1 92.660 | 1.197. 475 | 41.149. 510.955 | 102 ,79 | 93, 00 | 102 ,79 | 75,9 2 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP | % | 87 | 5.005.7 77.515 | 85 | 3.090.1 71.936 | 83 | 7.319.2 64.313 | 87 | 3.390.80 3.000 | 85 | 3.090.1 71.936 | 97, 70 | 91, 13 | 97, 70 | 61,7 3 | Dinas Perhubungan |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Capaian Layanan SDA | % | 76 | 103.392 .334.89 6 | 76,95 | 79.199. 791.645 | 74,07 | 65.828. 802.915 | 76 | 104.718. 557.425 | 76,95 | 79.106. 639.213 | 101 ,25 | 75, 54 | 101 ,25 | 76,6 0 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan dan Perumahan Rakyat |
| [PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi | % | 76,15 | 728.072 .635.44 6 | 77,52 | 810.674 .327.48 8 | 75,2 | 668.550 .468.74 2 | 76 | 1.144.27 6.260.05 4 | 77,52 | 664.721 .895.18 3 | 102 ,00 | 58, 09 | 101 ,80 | 111, 35 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|--|---------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|-------|-----------------------------------|---|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = $\frac{8}{7} \times 100$ | | 11 = $\frac{5}{4} \times 100$ | | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | n Ruang dan Perumahan Rakyat |
| [PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Jumlah Lakalantas | kasus | 427 | 18.601.404.483 | 195 | 17.201.253.416 | 418 | 15.106.518.512 | 427 | 10.634.422.056 | 195 | 13.615.817.387 | 154,33 | 128,04 | 154,33 | 92,47 | | Dinas Perhubungan |
| [PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang | indeks | 0,91 | 8.000.000.000 | 0,92 | 7.788.192.591 | 0,87 | 6.786.104.461 | 0,91 | 9.131.874.700 | 0,92 | 7.788.193.591 | 101,10 | 85,29 | 101,10 | 97,35 | | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| [MISI] 4 Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [TUJUAN] 5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | 76,05 | | 74,46 | | 75,06 | | 76,05 | | 74,46 | | 97,91 | | 97,91 | | | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPDP Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|--|---|--------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|------|---------------------------------|-------|------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|----|-----------------------------------|------------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = $\frac{8}{7} \times 100$ | | 11 = $\frac{5}{4} \times 100$ | | 11 | |
| [SASARAN] 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | Persentase penurunan emisi dari BAU (%) | | 28,5 | | 70,68 | | 41,96 | | 28,5 | | 70,68 | | 248,00 | | 248,00 | | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ; | Indeks | 53,8 | 6.807.500.000 | 53,02 | 4.437.095.398 | 51,92 | 53,8 | 4.728.990.700 | 53,02 | 4.437.095.398 | 93,83 | 98,55 | 65,18 | 98,55 | | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) ; | Indeks | 89,16 | | 87,59 | | 88,84 | | | 89,16 | | | 87,59 | | 98,24 | | 98,24 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) ; | Indeks | 79,86 | | 81,85 | | 82,21 | | | 79,86 | | | 81,85 | | 102,49 | | 102,49 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 4. Indeks kualitas air laut (IKAL) | Indeks | 83,61 | | 81,45 | | 85,4 | | | 83,61 | | | 81,45 | | 97,42 | | 97,42 | Dinas Lingkungan Hidup |
| [SASARAN] 5.2 Meningkatnya Ketangguhan | Indeks Risiko Bencana | | 151,49 | | 146,67 | | 154,02 | | 151,49 | | 146,67 | | 96,82 | | 96,82 | | | |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|--------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = $\frac{8}{7} \times 100$ | | 11 = $\frac{5}{4} \times 100$ | | 11 |
| Menghadapi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana | % | 82,67 | 3.156.119.870 | 82,67 | 3.843.054.179 | 66,67 | 2.395.860.262 | 82,67 | 3.711.345.907 | 82,67 | 3.843.054.179 | 100,00 | 103,55 | 100,00 | 121,77 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| [MISI] 5 Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [TUJUAN] 6 Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik | Indeks Reformasi Birokrasi | | B (71,50) | | 67,7 | | 68,47 | | B (69,00) | | B (67,70) | | 98,12 | | 94,69 | | |
| [SASARAN] 6.1 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 82,5 | | 84,41 | | 82,57 | | 82,5 | | 84,41 | | 102,32 | | 102,32 | | |
| | Indeks Sistem Pemerintahan | | 3,25 | | 2,11 | | 2,24 | | 2,75 | | 2,11 | | 76,73 | | 64,92 | | |






| Misi/Tujuan/ Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|--------|---------------------------------------|---------------|--|---------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------|--|-------|--|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7*100 | | 11=5/4*10 0 | | 11 |
| | Berbasis Elektronik (SPBE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi | indeks | 80 | 8.637.367.937 | 97,84 | 3.825.888.344 | 92 | 4.639.215.203 | 85 | 7.362.108.000 | 97,84 | 7.203.081.824 | 115,11 | 97,84 | 122,30 | 44,29 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| [SASARAN] 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien | Nilai Akuntabilitas Kinerja | | 77 | | 78,1 | | 77,67 | | 79 | | 78,1 | | 98,86 | | 101,43 | | |

| Misi/Tujuan/ Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|--------|---------------------------------------|---------------|--|---------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|---|---------------|---|-------|--|-------|--|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7*100 | | 11=5/4*10 0 | | 11 |
| [PROGRAM] PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK) | % | 79 | | 89,19 | | 75,67 | 1.046.246.218 | 79 | | 89,19 | | 112,90 | | 112,90 | | Sekretariat Daerah |
| | Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) | % | 95 | 4.794.658.057 | 91,89 | 3.386.637.313 | 92 | 865.889.630 | 95 | 3.656.979.000 | 91,89 | 3.386.637.313 | 96,73 | 92,61 | 96,73 | 70,63 | Sekretariat Daerah |

| Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPDP Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|--------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|-----------------------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = $\frac{8}{7} \times 100$ | | 11 = $\frac{5}{4} \times 100$ | | 11 |
| | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | % | 79 | | 81,03 | | 83,44 | 510.243.220 | 79 | | 81,03 | | 102,57 | | 102,57 | | Sekretariat Daerah |
| [SASARAN] 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda | | Level 3 | | Level 3 | | Level 3 | | Level 3 | | Level 3 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| [PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan | % | 90 | 13.084.203.070 | 86,53 | 9.872.851.607 | 90 | 7.093.609.671 | 90 | 11.409.744.064 | 90 | 9.872.851.607 | 100,00 | 86,53 | 96,14 | 75,46 | Inspektorat |

| Misi/Tujuan/ Sasaran/Bida ng Urusan/Progr am | Indikat or Kinerja | Satu an | Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021 | | Target Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 | | Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab |
|--|--|------------|---------------------------------------|----|--|----|---|----|-----------------------------------|----|---|----|---|----|--|----|--|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7*100 | | 11=5/4*10 0 | | 11 |
| | Pemda sesuai dengan Standar Akunta nsi Pemerin tah (SAP) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan :

- Sangat Tinggi : $\geq 90,01$ 
- Tinggi : 75,01 - 90 
- Sedang : 65,01 - 75 
- Rendah : 50,01 - 65 
- Sangat Rendah : ≤ 50 

Dari 6 tujuan dan 19 sasaran yang ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2022, terdapat 44 (empat puluh empat) indikator tujuan dan sasaran. Dari total indikator tersebut, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan, dan sebanyak 17 (tujuh belas) indikator masih belum mencapai target di tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dari 54 program prioritas di Kalimantan Timur, terdapat 3 (tiga) program prioritas yang pencapaian targetnya berada di bawah 90 persen. Program tersebut antara lain: Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta Program Pengelolaan Hutan.

Dari total 54 (lima puluh empat) program prioritas yang ditetapkan dalam P-RKPD tahun 2022, terdapat sebanyak 65 (enam puluh lima) indikator yang menjadi target kinerja pembangunan yang harus dicapai agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dinilai berhasil. Dari total indikator yang telah ditentukan tersebut, sebanyak 50 (lima puluh) indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, dan sebanyak 15 (lima belas) masih belum mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2022.

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.2.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Indikator Makro Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di tahun 2022, diidentifikasi masih terdapat empat permasalahan utama pembangunan yang masih dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1) Indeks Pembangunan Manusia

Capaian kinerja dari IPM Kalimantan Timur telah melampaui target yang telah ditentukan, tetapi masih terdapat permasalahan karena belum tercapainya kinerja harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta usia harapan hidup.

Belum tercapainya rata-rata lama sekolah disebabkan oleh akses pendidikan wajib belajar 12 tahun belum terpenuhi secara merata. Kabupaten Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara, Kutai Barat serta Paser merupakan Kabupaten yang memiliki rata-rata lama sekolah dengan angka capaian di bawah 9 tahun.

Untuk harapan lama sekolah yang belum mencapai target disebabkan oleh pemerataan dan perluasan akses pendidikan baik pada peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan maupun pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikannya sehingga peningkatan angka harapan lama sekolah dapat segera diwujudkan. Kabupaten Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara merupakan Kabupaten yang memiliki rata-rata lama sekolah dengan angka capaian di bawah 13 tahun.

Belum tercapainya usia harapan hidup disebabkan oleh akses dan layanan terhadap fasilitas kesehatan masyarakat belum maksimal, khususnya pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai usia harapan hidup 71,71 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya.

2) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Capaian kinerja dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE) telah melampaui target yang telah ditentukan, tetapi masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang masih bergantung pada pengiriman ekspor ke negara tujuan, disertai momen harga komoditas batu bara yang berada pada level tinggi. Dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pembangunan proyek-proyek strategis nasional di fokuskan ke wilayah Kaltim. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan diveresifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada sumber daya alam.

3) Indeks Gini

Indeks Gini Kalimantan Timur pada tahun 2022 menunjukkan penurunan angka ketimpangan menjadi 0,327. Sebelumnya indeks gini Kalimantan Timur sebesar 0,334. Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,272. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,31-0,32. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,384 pada tahun 2022. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan terbatasnya konektivitas dan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam. Jika aksesibilitas dan konektivitas sudah baik, maka distribusi alur barang dan

jasa akan lebih lancar, perekonomian masyarakat dapat bergerak secara lebih efisien dan produktif, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong kelompok berpendapatan rendah untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya.

4) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,31 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga menurun menjadi sebanyak 236,25 ribu jiwa dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 241,77 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur juga meningkat menjadi sebesar Rp 728.208 yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan.

Berdasarkan kabupaten/kota tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2021 masih di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 11,55 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya sebesar 2,89 persen. Sebagai daerah baru dan memiliki wilayah yang sulit diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Mahakam Ulu.

Permasalahan lain berdasarkan identifikasi pilar sosial TPB/SDGs adalah belum maksimalnya penjangkauan dan pemerataan program pengentasan kemiskinan dimana program-program masih terpusat pada wilayah perkotaan dan hanya sebagian kecil berada di kabupaten/kota, terlebih di sekitar pedesaan. Situasi ini dimungkinkan faktor aksesibilitas akibat kondisi geografis yang relatif sulit dan pemenuhan fasilitas penunjang lainnya, tidak terkecuali jarak dengan pusat pemerintahan dan perekonomian.

5) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 5,71%, lebih baik dari capaian nasional sebesar 5,86%, namun capaian ini masih menjadi yang tertinggi diantara provinsi lainnya di regional Kalimantan. Permasalahan yang masih dihadapi antara lain Rasio antara lapangan kerja dan pencari kerja masih tidak berimbang; Peserta magang yang telah menjalankan pemagangan di perusahaan menemukan minat yang berbeda dengan kejuruan yang dijalankan, sehingga sebagian dari peserta tidak optimal dalam bekerja; Kompetensi

atau skill yang dimiliki peserta magang tidak sesuai dengan standar perusahaan penyelenggara pemagangan, sehingga tidak terjadi penyerapan; Kurangnya pengetahuan tentang pengurusan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL) sehingga memperlambat proses pembuatan rekomendasi; Tidak sesuainya penyediaan fasilitas bagi tenaga kerja yang di datangkan.

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan per-urusan disusun berdasarkan sebab indikatif dari analisis data gambaran umum kondisi daerah dan berbagai data lain, seperti kesepakatan mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan kebijakan-kebijakan di level nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema RKPDP Kalimantan Timur tahun 2024.

Tabel II.124
Permasalahan Pembangunan Per Urusan

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|--|--|
| Pendidikan | | |
| Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar pada SPM di bidang Pendidikan Menengah dan Khusus serta kebudayaan | Belum optimalnya pencapaian APM, APK dan APS SMA/SMK/Khusus di beberapa wilayah Kalimantan Timur | Belum terpenuhinya sarana, prasarana untuk wilayah yang telah diperhitungkan dengan banyak jumlah penduduk usia sekolah menengah dan pendidikan khusus di wilayah tersebut |
| | | Belum terpenuhi salah satu indikator pemenuhan standar pelayanan minimal untuk sekolah menengah yaitu pemenuhan ruang kelas untuk sekolah yang kekurangan ruang kelas baru sehingga ketimpangan antara jumlah rombel dan ruang kelas dapat terpenuhi |
| Kesehatan | | |
| Status gizi dan kesehatan ibu dan anak belum optimal | Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi | Masih rendahnya kualitas skrining pada ibu hamil maupun bayi baru lahir yang masih belum sesuai standar |
| | | Belum optimalnya Sistem Rujukan, sehingga proses koordinasi antar tenaga kesehatan terhambat |
| | | Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan Antenatal dan Neonatal |
| | Masih rendahnya pemantauan pertumbuhan terkait <i>stunting</i> , <i>wasting</i> dan <i>underweight</i> | Masih kurang optimalnya alkes deteksi dini <i>Stunting</i> di Posyandu |
| | | Kurangnya pemanfaatan Buku Konsultasi Ibu dan Anak (KIA) sebagai pemantauan pertumbuhan |
| | Belum optimalnya implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga pola makan dengan gizi seimbang dan olahraga |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | |
|--|---|---|---|
| Akses dan mutu pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar | Belum optimalnya ketersediaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan | Masih sulitnya/terjadinya keterlambatan pendistribusian obat dan vaksin ke daerah | |
| | | Keterbatasan penyediaan obat program dan vaksin oleh Pusat | |
| | | Terdapat banyak vaksin yang <i>expired date</i> | |
| Masih tingginya beban penyakit menular dan penyakit tidak menular | Belum optimalnya penemuan kasus penyakit menular | Masih kurangnya alat kesehatan dan logistik untuk pemeriksaan diagnostik (TCM dan Mikroskop) | |
| | | Belum maksimalnya sistem pencatatan dan pelaporan penyakit menular | |
| | | Belum optimalnya aplikasi pelaporan dengan sistem informasi pelayanan faskes | |
| Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan | Belum optimalnya pendayagunaan dan pemerataan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar | Belum optimalnya sistem Perencanaan Kebutuhan (Renbut) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan formasi (kebutuhan) tenaga kesehatan | |
| | | Masih rendahnya insentif tenaga kesehatan | |
| | Belum terpenuhinya tenaga 4 Spesialis Dasar dan 3 Penunjang pada RSUD milik Pemerintah Daerah Kab/Kota | Kurangnya dokter yang ditugaskan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) | |
| | | Belum optimalnya sistem pengembalian/pendayagunaan Dokter Spesialis yang telah selesai pendidikan (Program Pendidikan Dokter Spesialis) | |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | Kurangnya pendayagunaan dokter spesialis yang berlokasi di Kaltim | |
| | | | |
| Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar | Konektivitas dan aksesibilitas kawasan strategis provinsi belum terhubung dengan baik | Kualitas jaringan jalan provinsi belum optimal yang ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kerusakan jalan | |
| | | Masih banyak kendaraan yang melebihi kapasitas jalan | |
| | | Kelengkapan fasilitas jalan belum memadai | |
| | | Kelas jalan belum sesuai dengan peruntukan | |
| | | Sistem jaringan jalan belum tertata dengan baik | |
| | | Belum optimalnya sinkronisasi fungsi jalan | |
| | | Belum lengkapnya bukti sah kepemilikan lahan | |
| | Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur pendayagunaan sumber daya air | Belum optimalnya infrastruktur penyedia air baku | |
| | Belum optimalnya dan masih rendahnya pengendalian daya rusak air | | Masalah sosial dan lahan |
| | | | Belum optimalnya sistem pengendali banjir |
| Masih rendahnya ketersediaan sistem pengendali banjir | | | |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|--|--|
| | | Pendangkalan dan penyempitan sungai serta bangunan pengendali yang tidak berfungsi optimal |
| | | Penanganan pantai kritis belum optimal |
| | Penyelenggaraan penataan ruang belum optimal | Belum optimalnya sinkronisasi dokumen perencanaan penataan ruang |
| | RTR belum sepenuhnya menjadi acuan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah | |
| | Terdapat beberapa dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan | |
| | Masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pemanfaatan ruang | |
| | Belum optimalnya penyediaan infrastruktur air minum skala regional | Kaltim belum memiliki lembaga pengelola SPAM Regional |
| | Masih ada kabupaten/kota yang kekurangan sumber suplai air baku untuk air minum yang handal, baik dari sisi kuantitas, kontinuitas, dan kualitas | |
| | Belum optimalnya penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi serta yang mendukung kawasan strategis provinsi | Masih terdapat permukiman di kawasan strategis provinsi yang belum terpenuhi kebutuhan infrastruktur dasarnya |
| | Belum tersedianya infrastruktur pengelola air limbah domestik skala regional | Kaltim belum memiliki infrastruktur pengelola air limbah lintas Kabupaten/Kota |
| | Belum tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan pada lokasi yang berpotensi dibangun infrastruktur pengelola limbah skala regional | |
| | Pengelolaan air limbah domestik dan sanitasi masih sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten/Kota | |
| | Belum tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah skala regional | Belum tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan pada lokasi yang berpotensi dibangun infrastruktur pengelola sampah skala regional |
| | Belum tumbuhnya kesadaran penduduk untuk melakukan efisiensi serta pengurangan volume sampah domestik | |
| | Belum optimalnya kondisi bangunan gedung yang menjadi kepentingan strategis provinsi | Masih terdapat gedung yang menjadi kepentingan strategis provinsi yang mengalami penurunan fungsi dan kelayakan |
| Kebutuhan akan bangunan gedung yang mendukung kepentingan strategis provinsi belum terpenuhi secara optimal | | |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|--|
| | Belum optimalnya kondisi bangunan cagar budaya level provinsi | Terdapat bangunan serta lingkungan cagar budaya yang kondisinya belum memadai dari sisi fisik dan tata bangunan dan lingkungan |
| | Belum optimalnya pemenuhan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli | Masih tingginya angka tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang belum tersertifikasi |
| Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | |
| Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman | Beberapa lokasi permukiman masih termasuk dalam kategori kumuh | Beberapa permukiman kumuh kewenangan provinsi belum memiliki sarana prasarana yang memenuhi standar teknis dan kelaikan fungsi |
| | | Penanganan kumuh belum menjangkau aspek yang menjadi faktor penyebab kekumuhan |
| | | Penanganan kekumuhan masih fokus pada aspek fisik dan tata lingkungan |
| | | Masih terdapat bangunan rumah yang tidak memenuhi standar teknis dan kelaikan fungsi |
| | | Belum tersedia data komprehensif terkait lokasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni |
| | Pemenuhan SPM bidang perumahan level provinsi masih belum optimal | Belum terpenuhinya seluruh kebutuhan/ kelengkapan data dan administrasi untuk pemenuhan SPM bidang perumahan level provinsi |
| | | Belum optimalnya koordinasi lintas sektor terkait pemenuhan SPM bidang perumahan level provinsi |
| Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk permukiman masih belum optimal | Belum tersedianya perencanaan komprehensif terkait kebutuhan penyediaan PSU permukiman | |
| | Terdapat permukiman yang mengalami penurunan fungsi akibat belum tersedianya PSU yang memadai | |
| Trantibumlinmas | | |
| Belum optimalnya pelayanan trantibumlinmas | Belum maksimalnya penegakan perda dan perkada di lapangan | Kurangnya tenaga anggota personil baik PPNS maupun anggota di lapangan dan ketersediaannya sarana dan prasarana |
| | | Kurangnya minat ASN Sarjana S1 untuk menjadi PPNS |
| | | PPNS masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya |
| | | Kurangnya peningkatan kapasitas SDM baik PPNS, anggota personil Satpol PP dan Satlinmas |
| | | Kurangnya keterlibatan Perangkat Daerah pemangku perda dan perkada didalam pelaksanaan aksi penegakan perda dan perkada |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | |
|---|--|--|---|
| Rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan tingginya tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan (GALKARHUTLA) | Belum maksimalnya sistem kerja penanggulangan bencana | Rendahnya tata kerja, kelola BPBD dan fasilitasi hubungan kerja sama antar Lembaga, Mitra dan Masyarakat | |
| | Belum maksimalnya sistem penanganan dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana | Rendahnya penanggulangan pada tingkat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, pelayanan kedaruratan dan logistik serta pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta pelayanan pengendalian operasi penanggulangan bencana | |
| | | Rendahnya kualitas SDM aparatur | |
| | | Minimnya sapras penanggulangan bencana | |
| | Rendahnya sistem pengawasan dalam penanggulangan bencana | | |
| Sosial | | | |
| Belum maksimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Belum optimalnya fungsi rehabilitasi sosial dalam pemulihan dan pengembangan diri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | |
| | | Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti | |
| | Belum optimalnya pemberdayaan sosial | Belum optimalnya pemanfaatan dan pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | |
| | Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial | | Belum maksimalnya proses verifikasi dan validasi data ditingkat kab/kota, sehingga bantuan sering tidak tepat sasaran |
| | | | Belum maksimalnya keberdayaan berusaha bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah tergraduasi baik berupa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP) |
| | | | Belum maksimalnya akselerasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang ditangani provinsi, kab dan kota |
| Belum optimalnya penanganan fakir miskin | Belum optimalnya penanganan fakir miskin khususnya wilayah pesisir dan pulau terluar disebabkan karena faktor geografis/luas wilayah | | |
| | Belum optimalnya proses pendampingan Program Penanganan Kemiskinan di tingkat Kab/Kota | | |
| Tenaga Kerja | | | |
| Masih rendahnya kesempatan kerja dan penempatan kerja bagi para pencari kerja | Belum maksimalnya informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja | Kurangnya dukungan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja | |
| | | Belum optimalnya dukungan layanan yang mempertemukan pencari kerja dengan pasar kerja | |
| Belum optimalnya kualitas hubungan industrial | Belum optimalnya penerapan tata kelola kerja (perusahaan) yang layak | Masih kurangnya pemahaman baik oleh pekerja maupun perusahaan terkait dengan syarat kerja | |
| | | Masih kurangnya pemahaman pekerja dalam memahami aturan ketenagakerjaan | |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|--|--|
| | | Belum optimalnya pembinaan dan sosialisasi dari mediator hubungan industrial terkait syarat-syarat kerja |
| Belum optimalnya penerapan norma ketenagakerjaan dan norma K3 di tempat kerja | Belum optimalnya ketaatan perusahaan pada norma ketenagakerjaan dan norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja | Sulitnya jangkauan akses geografis wilayah Kaltim |
| | | Kurang kooperatifnya peran perusahaan dalam pelaksanaan pemeriksaan |
| Belum optimalnya pengembangan di kawasan transmigrasi | Belum ada fokus lintas sektor dalam mendukung pengembangan kawasan transmigrasi | Masih kurangnya dukungan pelatihan, ketersediaan sarana dan prasarana pada kawasan transmigrasi. |
| Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| Belum optimalnya kesetaraan gender | Masih tingginya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sumbangan pendapatan per kapita | Kurangnya sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) |
| | | Kurangnya pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi |
| Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak | Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga | Masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga |
| | | Masih adanya stigma bahwa kasus kekerasan merupakan privasi |
| | Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap perlindungan perempuan | Masih kurangnya pemahaman dan kepedulian terkait perlindungan Perempuan Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan |
| Belum optimalnya KIE pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga | Masih kurangnya advokasi dan sosialisasi di kabupaten/kota | Masih rendahnya pemahaman terhadap ketahanan keluarga Masih tingginya kesenjangan antar pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia |
| | Masih rendahnya fleksibilitas peran dalam keluarga | Masih rendahnya pemahaman terhadap pengendalian penduduk dan KB |
| | | Masih kurangnya pelatihan kepekaan dan kepedulian terhadap anggota keluarga |
| Belum maksimalnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kab/Kota | Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan | Belum maksimalnya sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan masyarakat |
| | | Masih rendahnya laporan penduduk pendatang dari luar daerah |
| | | Belum terstandarnya layanan <i>online</i> di kab/kota |
| | Belum optimalnya pengurusan dokumen | Belum optimalnya sarana peralatan Disdukcapil dalam mendukung aplikasi terbaru Masih minimnya pelayanan Adminduk dalam pelayanan di Kab/Kota |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | |
|---|--|--|--|
| Perhubungan | | | |
| Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur perhubungan | Tingkat kecelakaan lalu lintas masih tinggi | Masih tingginya tingkat kerusakan jalan | |
| | | Belum terdapat fasilitas keselamatan jalan di beberapa ruas jalan | |
| | | Regulasi terkait kewenangan pemasangan fasilitas jalan masih belum optimal diterapkan | |
| | | Koordinasi antar <i>stakeholders</i> belum maksimal | |
| | | Geometrik jalan yang belum sesuai | |
| | | Keterampilan pengemudi yang belum memadai | |
| | | Kondisi kendaraan yang tidak layak | |
| | Belum optimalnya distribusi barang dan penumpang | Prasarana transportasi seperti terminal dan pelabuhan belum memadai | |
| | | Sarana dan prasarana transportasi belum optimal | |
| | | Regulasi terkait pembangunan dan pengelolaan prasarana transportasi belum terlaksana dengan baik | |
| | | Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi massal masih rendah | |
| | Lingkungan Hidup | | |
| | Terjadinya penurunan kualitas air, air laut, udara dan lahan | Belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup | Belum optimalnya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup |
| | | | Belum optimalnya upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup |
| Belum optimalnya upaya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | | | |
| Belum optimalnya perencanaan lingkungan hidup | | Belum optimalnya pendampingan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota | |
| | | Belum tersusunnya penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPD/RPJMD | |
| Belum optimalnya pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | | Belum optimalnya upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) di luar kawasan hutan dan taman keanekaragaman hayati | |
| Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) | | Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan limbah B3 skala provinsi | |
| Belum optimalnya pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | | Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|---|
| | Masih rendahnya pemahaman masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan |
| | Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat | Belum optimalnya hasil dari Penilaian dan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup |
| | Banyaknya pengaduan lingkungan hidup | Banyaknya pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |
| | Belum optimalnya pengelolaan persampahan | Belum optimalnya penanganan sampah darat dan laut |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| Belum optimalnya pengelolaan desa secara menyeluruh | Belum optimalnya pembangunan potensi kawasan perdesaan | Belum meratanya kualitas pembangunan wilayah perdesaan |
| | Belum optimalnya peningkatan kapasitas BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa | Masih terbatasnya pengembangan ekonomi perdesaan melalui BUMDes |
| | Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan belum berjalan dengan baik | Masih rendahnya Kompetensi SDM desa dan anggota BPD rata-rata masih rendah, jumlah perangkat sebagian desa belum terpenuhi, prasarana dan sarana pemdes dan kelurahan belum memadai |
| | Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas kemasyarakatan desa | Masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat |
| | Belum optimalnya pembangunan potensi kawasan perdesaan | Masih terbatasnya potensi desa pada pembangunan kawasan perdesaan, masih terbatasnya pengembangan lembaga masyarakat seperti BKAD dan BUMDES |
| | | Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim |
| Komunikasi dan Informatika | | |
| Transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal | Belum semua layanan (publik dan pemerintah) terdigitalisasi | Kurangnya SDM bidang TIK |
| | Masih banyak PD yang mengadakan infrastruktur TIK masing-masing | Kurangnya kapasitas peningkatan infrastruktur TIK |
| | belum maksimalnya penerapan SPBE di PD | Belum diaktifkannya forum SPBE |
| | Belum terintegrasi aplikasi pada beberapa PD | Belum terinventarisasi aplikasi layanan PD |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|---|
| Tata kelola keamanan informasi yang belum optimal | Tingkat keamanan informasi masih rendah | Kurangnya SDM urusan Persandian |
| Belum optimalnya layanan informasi publik | Kurangnya penyebaran informasi program dan kebijakan Pemprov Kaltim ke seluruh wilayah Kaltim | Kurangnya penyebaran informasi program dan kebijakan Pemprov Kaltim ke seluruh wilayah Kaltim |
| Penyediaan data statistik sektoral dilingkungan pemda yang belum berkualitas | Data statistik sektoral yang tersedia kurang lengkap dan akurat | Kurangnya kemampuan dan keterampilan SDM pengelola data pada masing-masing produsen data |
| Koperasi dan UKM | | |
| Rendahnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian daerah | Belum optimalnya kualitas usaha koperasi | Belum optimalnya kinerja kelembagaan koperasi |
| | | Rendahnya kualitas SDM koperasi |
| | | Lemahnya sistem pengawasan koperasi |
| | Rendahnya produktivitas UKM | Minimnya pelaku UKM dalam pemanfaatan pemasaran digital |
| | | Menurunnya aktivitas ekonomi UKM semasa pandemi COVID-19 |
| | | Rendahnya daya saing produk UKM |
| | | Kurangnya informasi permodalan UKM dalam menjalankan usahanya |
| Penanaman Modal | | |
| Belum optimalnya realisasi nilai investasi pada sektor sekunder dan tersier | Belum optimalnya kondusivitas investasi industri non migas dan non batubara | Belum terintegrasinya promosi investasi yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota |
| | | Belum optimal layanan yang diberikan karena masih terbatasnya SDM |
| | | Masih kurangnya ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi |
| | | Belum optimalnya komitmen perizinan |
| | | Belum efektifnya pengawasan perizinan penanaman modal |
| Kepemudaan dan Olahraga | | |
| Masih rendahnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga | Belum berkembangnya daya saing generasi pemuda | Masih kurangnya peluang usaha sesuai dengan tuntutan zaman bagi pemuda Kaltim dalam mendukung IKN |
| | | Perilaku generasi muda yang menjurus kepada pengguna/pengedar NAPZA dan Kriminal Remaja |
| | Masih kurangnya kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan (kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan) pemuda | |
| Masih rendahnya prestasi olahraga | Masih lemahnya kualitas SDM yang menangani keolahragaan sehingga beberapa prestasi atlet pada event Olahraga seperti PON dan <i>Seagames</i> cenderung menurun dari tahun ke tahun | |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|---|--|
| | | Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya olahraga bagi kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup Pembina, pengurus, pelatih dan insan olahraga kurang profesional, baik ditingkat provinsi, kab/kota serta klub cabor |
| Perpustakaan | | |
| Masih rendahnya pelayanan perpustakaan | Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca masyarakat | Masih kurangnya minat baca bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas di Badan Perpustakaan Sarpras yang telah dibangun masih kurang optimal terhadap penyelenggaraan minat baca/literasi Belum optimalnya aplikasi secara digital yang diterapkan oleh Badan Perpustakaan |
| Kelautan dan Perikanan | | |
| Lambatnya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan | Masih rendahnya produksi perikanan budidaya Masih rendahnya produksi perikanan tangkap Belum optimalnya pengembangan nilai tambah dan pemasaran produk kelautan dan perikanan Belum terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan | Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perbenihan dan produksi perikanan budidaya Penanggulangan hama dan penyakit ikan belum optimal Pengembangan komoditas budidaya unggulan belum maksimal Ketergantungan induk unggulan dari daerah lain Struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil Penyaluran BBM subsidi untuk nelayan masih belum optimal dikarenakan masih banyaknya kapal perikanan tangkap yang belum memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern Masih banyaknya Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil perikanan yang belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Minimnya kerja sama bidang usaha perikanan Inovasi peningkatan produk hasil perikanan belum berkembang Belum optimalnya pengelolaan Kawasan Konservasi Kelautan Masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku |
| Pariwisata | | |
| Masih rendahnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif | Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata | Sarana dan prasarana serta amenitas pendukung pariwisata belum dibangun/dikembangkan secara maksimal |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|---|---|
| terhadap perekonomian daerah | | Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata tiap destinasi |
| | | Belum maksimalnya kerja sama dan sinergitas antara <i>stakeholder</i> pariwisata (mitra kerja, kab/kota, dll) |
| | Belum maksimalnya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif | Belum optimalnya pengembangan sub sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata |
| | | Belum optimalnya dukungan dan pembinaan multi sektor kepada para pelaku ekonomi kreatif |
| | | Belum fokus pada nilai kekhasan daerah dalam pengembangan potensi ekraf |
| Pangan | | |
| Belum optimal pemenuhan pangan dalam mendukung IKN | Tingkat ketersediaan dan diversifikasi pangan masih belum optimal | Stabilisasi pasokan pangan masih belum optimal |
| | | Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang masih kurang |
| Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) | | |
| Lambatnya transformasi Ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan | Rendahnya produktivitas tanaman pangan (padi) dan hortikultura | Ketersediaan lahan pertanian yang berkurang |
| | | Kurangnya infrastruktur pendukung pertanian |
| | | Tingginya biaya produksi TPH |
| | | Masih kurangnya ketersediaan benih unggul tanaman pangan dan hortikultura |
| | | Belum optimalnya penanganan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura |
| | | Minat kaum milenial menjadi petani semakin berkurang |
| Pertanian (Peternakan) | | |
| Lambatnya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan | Populasi dan produktivitas ternak masih rendah | Ketersediaan bibit ternak lokal masih kurang |
| | | Penerapan <i>Good Breeding Practice</i> dan <i>Good Farming Practice</i> belum optimal |
| | | Keterbatasan prasarana pendukung usaha peternakan |
| | | Ketersediaan pakan ternak berkualitas masih kurang |
| | | Masih munculnya penyakit hewan menular strategis dan zoonosis |
| | Terbatasnya kawasan peternakan | |
| | Daya saing produk peternakan masih rendah | Hilirisasi dan industrialisasi produk peternakan masih rendah |
| | | Manajemen pemasaran produk peternakan belum optimal |
| Pertanian (Perkebunan) | | |
| Lambatnya transformasi ekonomi | Rendahnya produktivitas kebun rakyat | Infrastruktur di areal perkebunan yang tidak memadai |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | |
|---|---|--|---|
| di sektor perkebunan menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan | | Tingginya biaya produksi komoditas perkebunan tidak efisien | |
| | | Masih terbatasnya ketersediaan benih unggul bermutu bersertifikat dalam daerah dan sumber benih untuk mendorong pembangunan kebun | |
| | | Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi budidaya pekebun | |
| | Permasalahan pemasaran dan lambatnya pembangunan industri hilir komoditas perkebunan | | Tidak kontinu dan tidak padunya proses fasilitasi dan pendampingan kegiatan hulu hilir usaha perkebunan |
| | | | Rendahnya kualitas olahan hasil perkebunan |
| | | | Akses pemasaran yang masih konvensional |
| | Meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan penurunan emisi dalam pembangunan perkebunan | | Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS |
| | | Pengelolaan ANKT di area perkebunan belum diterapkan secara konsisten | |
| Energi dan Sumber Daya Mineral | | | |
| Belum meratanya infrastruktur ketenagalistrikan | Infrastruktur jaringan PLN hanya terpusat pada wilayah padat penduduknya | Kendala dalam pemerataan infrastruktur penyaluran tenaga listrik | |
| | | Kendala masyarakat tidak mampu dalam membiayai | |
| | | Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan kerja sama Pemerintah, PLN dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. | |
| | | Masih banyak masyarakat yang belum menikmati listrik PLN karena jauhnya jangkauan dari jaringan PLN, sehingga perlu dibangun infrastruktur listrik dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan yang PLTS terpusat sehingga masyarakat dapat menikmati listrik 24 jam | |
| | | Masih adanya pelaku usaha ketenagalistrikan yang belum memahami perizinan usaha ketenagalistrikan dan kurangnya kesadaran tentang keselamatan ketenagalistrikan (K2) | |
| Belum optimalnya peningkatan pembangkit listrik dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) | Belum optimalnya pencapaian bauran EBT sektor kelistrikan | Belum optimalnya cakupan pelayanan listrik pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik pada daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan | |
| | | Masih rendahnya pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan sebagai energi alternatif pengganti energi fosil | |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | | <p>Belum optimalnya pembinaan, pengusahaan dan pengendalian perusahaan pemanfaatan ketenagalistrikan</p> |
| <p>Belum tersedianya hasil evaluasi zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi</p> | <p>Pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan yang belum optimal</p> | <p>Masih rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan, dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan, dan belum menjadi prioritas pemerintah dibandingkan energi fosil</p> <p>Masih rendahnya persentase konsumsi energi di Kaltim dari sumber energi baru terbarukan</p> <p>Masih terjadinya kekurangan air bersih di wilayah Kaltim</p> <p>Belum ditetapkan cekungan air tanah, yang disebabkan keterbatasan kajian identifikasi potensi air tanah</p> <p>Belum ditetapkan zona konservasi air tanah, dipengaruhi oleh kajian pendataan zona konservasi air tanah yang terbatas</p> <p>Belum tersedianya <i>database</i> dan sistem informasi hidrogeologi</p> <p>Masih terdapat pengguna air tanah yang belum memiliki ijin pemanfaatan air tanah, dan pemegang ijin pemanfaatan air tanah yang belum melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan</p> <p>Belum optimalnya penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) dalam rangka peningkatan pendapatan bersumber dari pemanfaatan air tanah</p> |
| <p>Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan</p> | <p>Masih banyak perusahaan pertambangan yang belum menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik, sesuai dengan perundangan yang berlaku, baik secara administratif maupun teknis</p> | <p>Belum optimalnya inventarisasi atas pengumpulan, penetapan, pengelolaan data dan informasi WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil</p> <p>Belum optimalnya kegiatan penerbitan IUP dan perpanjangan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, serta pengelolaan WIUP Pertambangan Mineral Logam dan Batubara untuk membantu kegiatan pengawasan dari Kementerian ESDM maupun kepolisian</p> <p>Belum terwujudnya perusahaan pertambangan yang melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik untuk kegiatan pertambangan mineral logam dan batubara dan kegiatan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|--|---|
| | | Belum optimalnya kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagai acuan penetapan harga patokan MBLB |
| Kehutanan | | |
| Belum terwujudnya diversifikasi ekonomi sub sektor kehutanan | Belum optimalnya pemanfaatan hutan yang berkelanjutan | <p>Belum optimalnya pemanfaatan hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</p> <p>Belum optimalnya pembinaan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/Tahun</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</p> |
| Belum terwujudnya penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan | <p>Belum optimalnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP) dan konservasi provinsi</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</p> <p>Belum optimalnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan</p> | <p>Penyusunan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi yang belum optimal</p> <p>Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) yang masih belum optimal</p> <p>Terhambatnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan</p> <p>Masih kurangnya kualitas dan kuantitas bibit tanaman melalui sertifikasi sumber benih</p> <p>Belum optimalnya kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan Tahura provinsi</p> <p>Belum optimalnya perlindungan tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi</p> <p>Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan multi-pihak kawasan bernilai ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</p> <p>Penyusunan rencana pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu multi pihak yang belum terintegrasi</p> <p>Masih kurangnya kuantitas dan kapasitas penyuluh kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</p> |
| Perdagangan | | |
| Belum optimalnya ekspor non migas dan batubara | <p>Ekspor Kaltim masih didominasi oleh produk Primer (migas dan batubara)</p> <p>Rendahnya daya saing produk yang dipasarkan</p> | <p>Terbatasnya ekspor komoditi dan produk non migas non batubara</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan/ peluang ekspor langsung di Kalimantan Timur</p> <p>Terbatasnya jangkauan pemasaran komoditi dan produk ekspor</p> |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|---|---|
| | | Minimnya produksi dan sarana distribusi bahan pokok Belum optimalnya fasilitasi sistem distribusi perdagangan Belum optimalnya kerja sama perdagangan |
| Perindustrian | | |
| Belum optimalnya pembangunan industri berbasis komoditi unggulan | Belum maksimalnya daya saing dan daya tarik investasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri | Kurang siapnya ketersediaan lahan industri |
| | | Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri dan penunjang |
| | | Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, dan komitmen antar organisasi |
| | | Kinerja kelembagaan dalam membangun dan mengelola kawasan belum optimal |
| | | Belum optimalnya penerapan dan pengawasan standar produk |
| | Masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia industri | Kuranginya kerjasama lembaga pendidikan/pelatihan dan pelaku industri dalam pemenuhan tenaga kerja industri yang dibutuhkan |
| | | Masih rendahnya kapasitas keterampilan dan penguasaan teknologi |
| | | Belum optimalnya inovasi dan kreativitas |
| | Belum kuatnya struktur industri di daerah | Integrasi industri hulu dan hilir antar sektor belum optimal |
| | | Belum terbangunnya basis data sektor industri |
| Belum optimalnya pemberdayaan industri melalui dukungan pengembangan kompetensi pengembangan ekosistem bisnis dan penyediaan fasilitas | | |
| Sekretariat Daerah | | |
| Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi simplikasi dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah dan penyelenggaraan pemerintah | Belum optimalnya kinerja aparatur dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan | Kuranginya pemahaman secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya |
| | | Belum adanya regulasi teknis terkait pelaksanaan tugas di Biro Pemerintahan dan Biro Kesejahteraan Rakyat |
| | | Data yang tersedia belum lengkap, akurat dan valid |
| | | Belum optimalnya penanganan permasalahan perbatasan |
| | | Belum optimalnya koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran di Perangkat Daerah |
| Belum optimalnya target penawaran kerja sama | Kuranginya pemahaman penawaran kerja sama secara mendalam | |
| Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum secara kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum | Kuranginya pemahaman secara mendalam oleh ASN maupun Perangkat Daerah dalam menelaah ketentuan perundang-undangan dan produk-produk Hukum | |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|---|--|
| | Belum optimalnya pengendalian pembangunan | Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya. |
| | Belum optimalnya penerapan kebijakan dan prinsip serta ketaatan kode etik pengadaan barang dan jasa | Kurangnya penerapan prinsip, kode etik, dan kebijakan pengadaan barang dan jasa |
| | Belum optimalnya Penerapan SAKIP | Masih kurangnya penerapan akuntabilitas kinerja sebagai budaya kerja |
| | | Belum optimalnya monitoring dan evaluasi guna perbaikan kinerja |
| | Belum optimalnya kualitas layanan administrasi Pimpinan | Belum optimalnya penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) |
| | Belum optimalnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah | Belum optimalnya penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) |
| Sekretariat DPRD | | |
| Belum optimalnya pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi | Belum optimalnya standar layanan yang diberikan kepada DPRD | Kurang koordinasi baik dari internal maupun eksternal sehingga berpengaruh terhadap kinerja DPRD |
| | | Belum optimalnya pelayanan yang diberikan terhadap kegiatan DPRD |
| | | Kurangnya pemahaman terkait prosedur administrasi keuangan |
| | Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia | Minimnya pemahaman terhadap teknologi informasi sehingga belum banyak mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD |
| | | Lamban dalam memberikan informasi ter-update/perubahan kepada Anggota DPRD terkait regulasi maupun jadwal kegiatan kedepanan |
| | | tidak adanya teknologi informasi internal terkait verifikasi SPJ kegiatan Anggota DPRD yang sudah selesai |
| Belum optimal pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Belum tersedianya <i>nursery room</i> dan <i>play ground</i> | |
| | Fasilitas peralatan kerja di ruangan anggota DPRD sering rusak Fasilitas ruang kerja Anggota DPRD yang sudah puluhan tahun terkadang mengalami kerusakan | |
| Perencanaan | | |
| Belum optimalnya capaian sasaran pembangunan daerah | Belum optimalnya pelaksanaan proses perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah, serta sinergi | Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan belum optimal |
| | | Belum optimalnya pemanfaatan data dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|---|
| | pusat, provinsi dan kabupaten/kota | <p>Adanya perbedaan periode dokumen rencana pembangunan jangka menengah antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang menyulitkan untuk sinergi prioritas dan target pembangunan.</p> <p>Perbedaan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota sebab pada sebagian kabupaten/kota masih belum melakukan penyesuaian terhadap RPJMD dan RKPD Provinsi dikarenakan belum menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (bupati/walikota) sehingga sinergi perencanaan dari provinsi terhadap kabupaten/kota belum terlaksana secara optimal.</p> |
| Keuangan | | |
| Belum optimalnya Laporan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang mencapai WTP | Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah | <p>Belum optimalnya identifikasi, Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah</p> <p>Masih lemahnya sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah</p> <p>Sering terjadinya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat</p> |
| Belum optimalnya pendapatan asli daerah | <p>Belum optimalnya pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan penatausahaan Penerima Pendapatan Asli Daerah berbasis digitalisasi</p> | <p>Belum optimalnya penyusunan perencanaan pendapatan daerah</p> <p>Belum optimalnya validasi atas pajak daerah yang bersifat <i>Self Assessment</i></p> <p>Masih tingginya piutang pajak daerah</p> <p>Belum optimalnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis elektronifikasi</p> <p><i>Database</i> berbasis digital yang belum aktual</p> |
| Kepegawaian | | |
| Implementasi penyelenggaraan Sistem Merit yang belum berjalan secara optimal | <p>Belum terpenuhinya ASN sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah</p> <p>Belum terukurnya penilaian kinerja ASN sesuai kaidah dan belum optimalnya</p> | <p>Belum tersedianya perhitungan kebutuhan ASN sesuai dengan ketentuan</p> <p>Sebagian besar ASN yang telah diukur kompetensinya belum memenuhi standar kompetensi jabatan</p> <p>Instrumen pengukuran kinerja masih dalam tahap <u>penyiapan</u></p> <p>Penilaian SKP masih sebatas formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian</p> <p>Pejabat penilai kinerja secara berjenjang belum sepenuhnya memahami tata cara melakukan penilaian kinerja secara objektif</p> <p>Pelaksanaan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> belum optimal</p> |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|---|
| | Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN | Belum semua ASN diukur kompetensinya Belum tersedianya dokumen analisis kebutuhan diklat |
| Pendidikan dan Pelatihan | | |
| Masih rendahnya profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia/ aparatur | Belum optimalnya upaya pengembangan kompetensi SDM/Aparatur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas | Masih rendahnya aparatur yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi yang meliputi kompetensi manajerial, teknis, dan sosio-kultural. |
| Penelitian dan Pengembangan | | |
| Hasil kelitbangan belum optimal dimanfaatkan oleh perangkat daerah maupun masyarakat | Belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil kelitbangan | Kepedulian dan perhatian terhadap hasil kelitbangan masih rendah Pembinaan kab/kota belum optimal Kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam menghasilkan naskah kebijakan yang dihasilkan sebagai dasar kebijakan Pemprov Kaltim |
| | Hasil Kelitbangan belum aplikatif | Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam riset Skema pendanaan riset yang belum memadai Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang riset Kurangnya kemitraan (praktisi) dalam penelitian Monitoring dan evaluasi hasil kelitbangan belum dilaksanakan secara periodik Kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam menghasilkan publikasi ilmiah/buku/naskah akademik/di nasional dan internasional/prosiding |
| Belum berkembangnya inovasi daerah | Produk-produk inovasi yang dihasilkan masih belum memenuhi kebutuhan penyelesaian permasalahan pembangunan | Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang inovasi dan teknologi |
| | | Kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam menghasilkan produk inovasi dari perangkat daerah Pemprov Kaltim dan para pihak yang dibina masih kurang |
| | | Kemampuan inovator dalam menghasilkan produk inovasi dari perangkat daerah Pemprov Kaltim dan para pihak yang dibina masih kurang |
| | Kemampuan SDM IPTEK dalam menghasilkan perekayasa IPTEK untuk daerah masih kurang | |
| | Regulasi pengembangan inovasi belum dilaksanakan secara optimal | Standar penilaian terkait indeks inovasi daerah dari pusat yang meningkat dan berubah-ubah |
| | Komitmen pengembangan inovasi masih rendah | Pemahaman terkait inovasi masih kurang |
| Pengawasan | | |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|---|
| Belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah | SPIP belum sepenuhnya diimplementasikan | Pedoman pelaksanaan SPIP terintegrasi, sehingga harus disosialisasikan kembali Masih adanya temuan hasil pengawasan baik dari internal dan eksternal |
| | Kapabilitas APIP masih pada Level 3 | Belum optimalnya penerapan kebijakan dan standar operasional pengendalian internal Belum optimalnya pendokumentasian pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektivitas pengendalian secara periodik |
| | Belum optimalnya program yang terkait implementasi Reformasi Birokrasi melalui penguatan pengawasan | Penguatan monitoring dan evaluasi SPIP, Zona Integritas menuju WBK/WBBM, penanganan laporan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, penanganan pengaduan, PMRB, Survei Penilaian Integritas, <i>Wistle Blowing</i> Sistem, <i>Probitiy Audit</i> , LHPKN dan LHKASN Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan belum optimal Peran Inspektorat Daerah selaku <i>Quality Assurance</i> (QA) dan <i>Advisory</i> belum optimal Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah |
| | Belum terbangunnya sistem pengawasan melalui pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan membangun sinergitas dengan pihak terkait dalam upaya mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Belum optimalnya pemeriksaan berkala dan tujuan tertentu, reviu atas dokumen perencanaan dan keuangan serta lainnya, evaluasi, monitoring hasil pengawasan dan kegiatan tertentu, pemutakhiran data hasil pengawasan. Inspektorat Daerah belum memiliki sistem deteksi dini (<i>early warning</i>) yang handal dalam mencegah korupsi baik untuk deteksi <i>fraud</i> , maupun penyimpangan lainnya Belum optimalnya prioritas program yang dapat membangun sistem pengawasan internal yang efektif dan menghasilkan kegiatan penjaminan (<i>assurance</i>) dan layanan konsultasi yang berkualitas |
| | Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparat pengawasan maupun tenaga fungsional umum lainnya yang belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangan APIP | Masih belum optimalnya peningkatan kompetensi APIP seiring dengan kebutuhan pengawasan dan cakupan pengawasan Jumlah SDM Pengawasan / Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD belum sebanding dengan tugas pengawasan baik tugas rutin maupun <i>mandatory</i> |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|---|---|
| | Masih belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh perangkat daerah | Masih terdapat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum selesai dan berlarut-larut penyelesaiannya, dan belum adanya penyelesaian melalui majelis TP/TGR, serta kurangnya komitmen perangkat daerah |
| Pemerintahan Umum | | |
| Terganggunya stabilitas IPOLEKSOSBUD di Kalimantan Timur | Belum optimalnya kesadaran berdemokrasi masyarakat | Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan berdemokrasi |
| | | Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi |
| | Belum optimalnya kesadaran masyarakat mengenai wawasan kebangsaan | Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan |
| | | Masih lemahnya semangat kebersamaan dan turunnya kepedulian sosial |
| | | Masih meningkatnya simbolisme agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan |
| | | Masih meningkatnya tindak kekerasan dan disharmoni sosial dalam masyarakat |
| | Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai seni dan budaya bangsa | Kurangnya pemahaman nilai-nilai seni dan Budaya di masyarakat |
| | Meningkatnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba | Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba |
| | Meningkatnya penganut agama yang menyimpang | Kurangnya edukasi moderasi beragama |
| | Peningkatan penggunaan produk impor atau penurunan penggunaan produk dalam negeri | Kurangnya edukasi cinta produk dalam negeri |
| | Banyaknya ormas yang tidak sesuai AD/ART | Kurangnya pembekalan dan pendampingan kepada pengurus-pengurus ormas untuk menjalankan tupoksinya |
| | Tingginya potensi konflik sosial di wilayah Kalimantan Timur | Ego sektoral kedaerahan menyebabkan mudahnya masyarakat terprovokasi |
| | | Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konflik sosial |
| Geografis Kalimantan Timur yang multikultural | | |

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan pembiayaan pembangunan yang direncanakan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang arah kebijakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan memberikan pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja makro ekonomi yang direncanakan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting dan berpengaruh serta harus dilakukan pencermatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Analisis kerangka pendanaan memberikan analisis terkait perkiraan besaran pendapatan dari berbagai sumber pendapatan pada sektor-sektor potensial, perkiraan belanja daerah yang akan dilakukan pemerintah, dan pembiayaan untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada masa pemulihan perekonomian daerah pasca pandemi COVID-19, kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2022 masih memiliki tren perbaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2021 yang mencapai 2,55 persen yang merupakan pertumbuhan positif kali pertama semenjak pandemi berlangsung. Capaian ini sebagai salah satu dampak *base effect* mulai membaiknya perekonomian di tengah kasus COVID-19 yang terjadi, mengingat pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kinerja sektor-sektor di dalam negeri, serta melemahkan permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Seiring dengan pulihnya perekonomian, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur tahun 2022 tumbuh signifikan mencapai 4,48 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, hampir seluruh provinsi di Kalimantan melanjutkan tren perbaikan kinerja perekonomian meski melambat. Berdasarkan pangsaanya, Kalimantan Timur masih menjadi provinsi dengan ekonomi terbesar di Kalimantan dengan pangsa mencapai 52,14 persen terhadap total perekonomian Kalimantan. Selaras dengan hal tersebut, Perbaikan perekonomian nasional juga mengalami tren perbaikan seperti perekonomian Kalimantan Timur dan Kalimantan. Laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 mencapai 5,31 persen, setelah pada tahun sebelumnya tumbuh 3,69 persen.

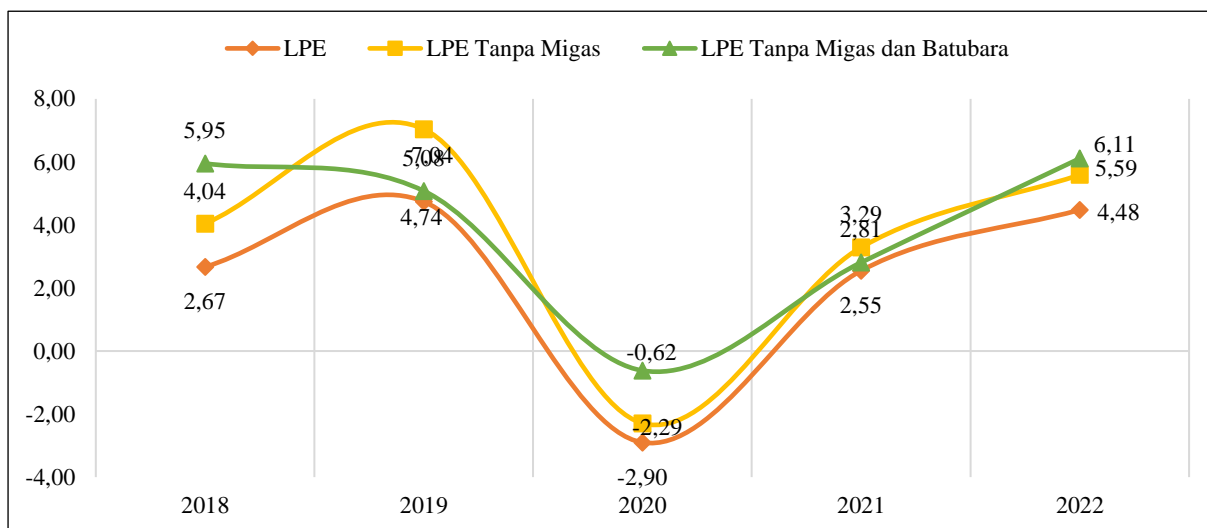
3.1.1 Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2024

A. Kinerja Ekonomi Daerah

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami perbaikan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 setelah terkontraksi pada tahun 2016. Namun pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami kontraksi paling dalam hingga 2,85 persen (*y-o-y*) yang dipengaruhi oleh penurunan kinerja beberapa lapangan usaha sebagai dampak pandemi COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia. Kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2021 ini mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 seiring dengan keberhasilan program vaksinasi di seluruh wilayah yang mendorong pulihnya aktifitas perekonomian masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2021 tercatat mencapai 2,55 persen (*y-o-y*). Seiring dengan pulihnya perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2022, Laju

Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur tumbuh 4,48 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

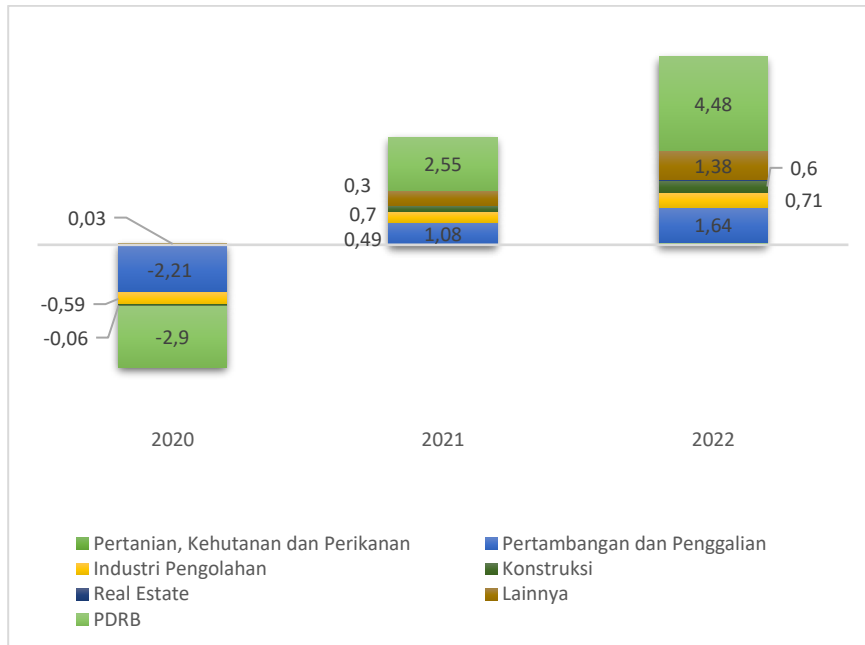


Gambar III.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%) (*y-o-y*)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

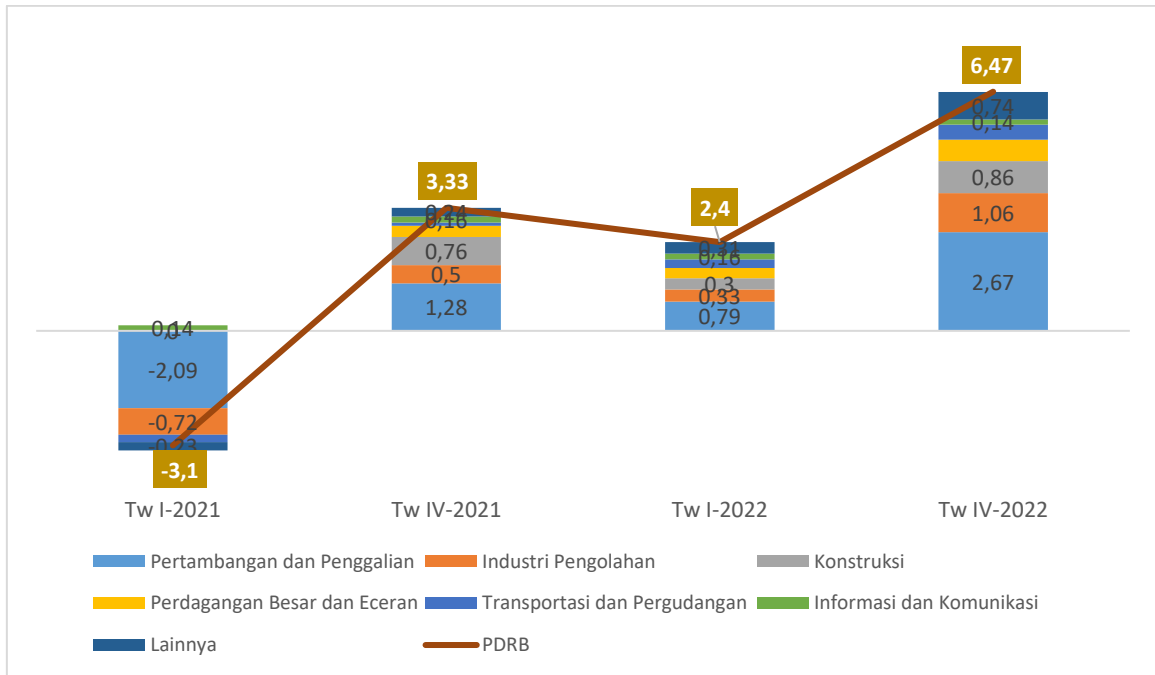
Jika dilihat laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,59 persen, meningkat lebih baik dibandingkan Tahun 2021. Adapun kinerja perekonomian tanpa migas dan batubara juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar sebesar 6,11 persen di Tahun 2022.

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 menunjukkan capaian kinerja yang positif di seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,96 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 9,46 persen, dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 9,16 persen. Selain itu, kinerja lapangan usaha utama Kalimantan Timur, yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian pada periode ini juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,49 persen.



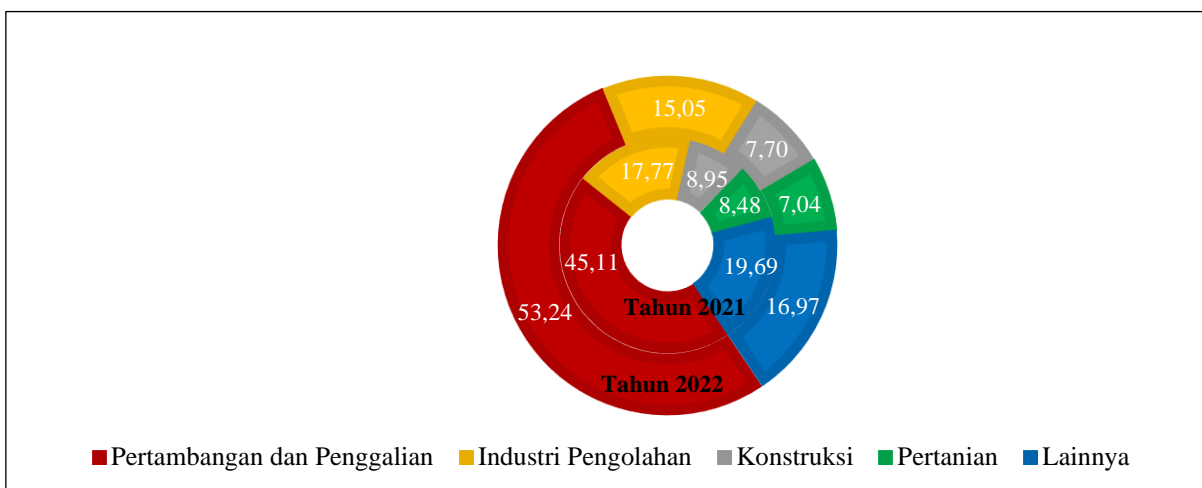
Gambar III.2
Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020-2022 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian merupakan lapangan usaha yang memberikan andil positif terbesar, yaitu sebesar 1,64 persen. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan andil positif sebesar 0,71 persen, lapangan usaha Konstruksi dengan andil positif sebesar 0,60 persen, dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan andil positif sebesar 0,40 persen.



Gambar III.3
 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 (*y-on-y*) (Persen)
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Struktur perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 53,24 persen dan industri pengolahan sebesar 15,05 persen. Kemudian disusul sektor konstruksi yang kontribusinya meningkat menjadi sebesar 7,70 persen. Sedangkan kontribusi sektor pertanian yang diharapkan mampu menjadi salah satu sektor yang berkembang di Kalimantan Timur, hanya memberikan kontribusi sebesar 7,04 persen, namun kontribusinya menurun dibandingkan Tahun 2021 sebesar 8,48 persen.



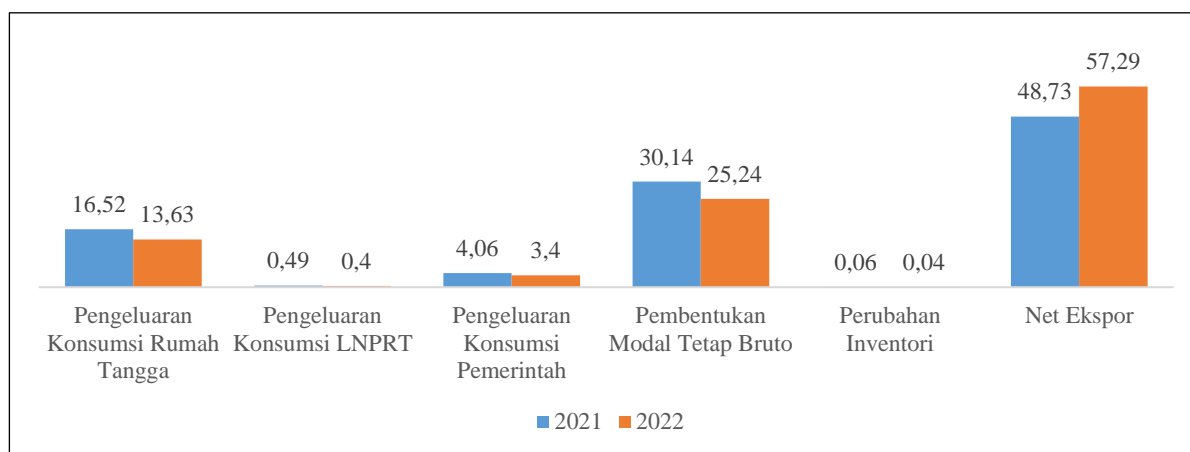
Gambar III.4
 Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2022 (%)
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat dinamika struktur perekonomian Kalimantan Timur yang mengalami pemulihan. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian pada Tahun 2022 mengalami peningkatan diakibatkan oleh tren peningkatan harga minyak dunia dan batubara, serta meningkatnya permintaan hasil pertambangan dari negara tujuan ekspor Kalimantan Timur. Selain itu pula, perbaikan ini diakibatkan oleh peningkatan kinerja *lifting* migas di Kaltim yang bersumber baik dari produksi sumur-sumur eksisting, hasil produksi sumur-sumur baru dan hasil *artificial lift*.

Lapangan usaha industri pengolahan juga memiliki peran yang cukup besar terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Timur dengan kontribusi pada Tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021 dengan capaian 15,05 persen. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kinerja CPO merupakan dampak dari hasil panen yang tidak sebaik perkiraan sebelumnya akibat efek cuaca buruk pada tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan struktur PDRB Provinsi Kalimantan Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 masih relatif sama dengan dominasi sektor unggulan yang sama dengan tahun sebelumnya. Terdapat empat lapangan usaha utama yang mendominasi yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dengan peranan sebesar 53,24 persen, Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 15,05 persen, Konstruksi dengan peranan sebesar 7,70 persen serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan sebesar 7,04 persen.

Distribusi PDRB Kalimantan Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada Tahun 2022 masih didominasi oleh Komponen Net Ekspor dengan peranan sebesar 57,29 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 25,24 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 13,63 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,40 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga sebesar 0,4 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, meningkatnya aktivitas perdagangan Kalimantan Timur menyebabkan meningkatnya porsi terhadap pembentukan PDRB dari sisi pengeluaran. Meningkatnya permintaan negara tujuan terhadap migas dan batubara mengakibatkan perubahan pada struktur perekonomian Kalimantan Timur.



Gambar III.5

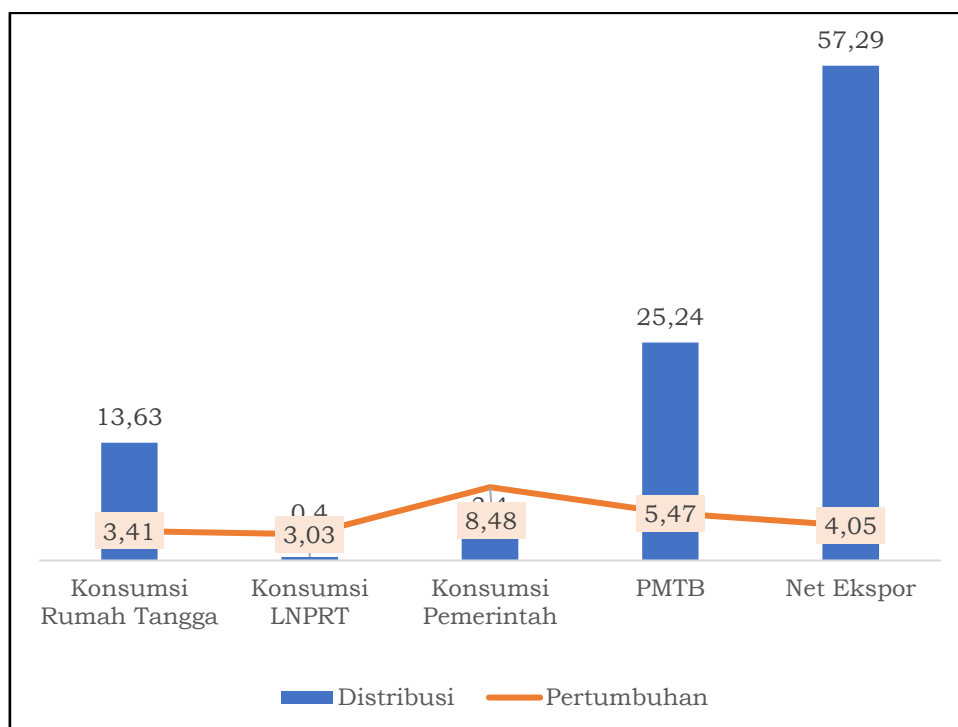
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2021 dan 2022 (%)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2022 tumbuh positif mencapai 4,48 persen. Seluruh komponen PDRB menurut Pengeluaran mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mencapai 8,48 persen yang disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan pemerintah. Diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 5,47 persen, komponen ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,67 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,41 persen.

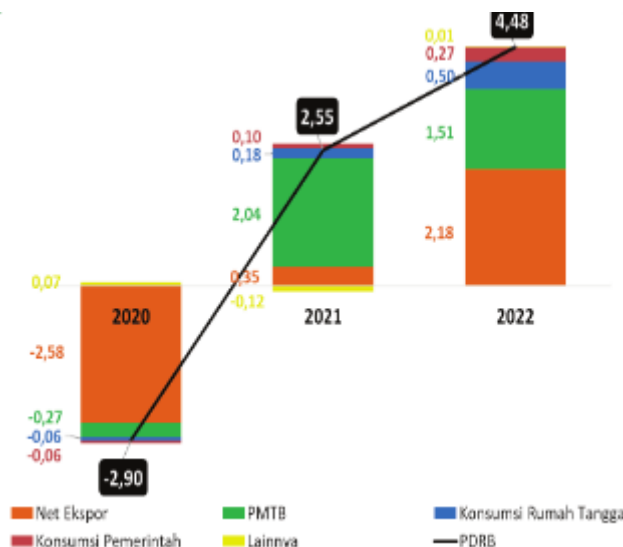
Struktur PDRB Kalimantan Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu sebesar 108,00 persen, diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 25,24 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 13,63 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,40 persen dan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga sebesar 0,40 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut Pengeluaran memiliki peran sebesar 50,71 persen, sehingga Net Ekspor memberikan kontribusi sebesar 57,29 persen terhadap total ekonomi Kalimantan Timur.



Gambar III.6
Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Perkembangan PDRB Pengeluaran pada tahun 2022 (*y-o-y*), komponen konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi dengan capaian 8,48 persen. Pertumbuhan tertinggi berikutnya terjadi pada Komponen PMTB sebesar 5,47 persen dan komponen konsumsi LNPRT tumbuh paling rendah sebesar 3,03 persen.

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 secara (*y-on-y*), maka sumbangan terbesar adalah berasal dari Komponen Net Ekspor, yaitu sebesar 2,18 persen. Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi selanjutnya disumbang dari Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,51 persen, dan Komponen lainnya yang memberikan andil positif sebesar 0,79 persen.

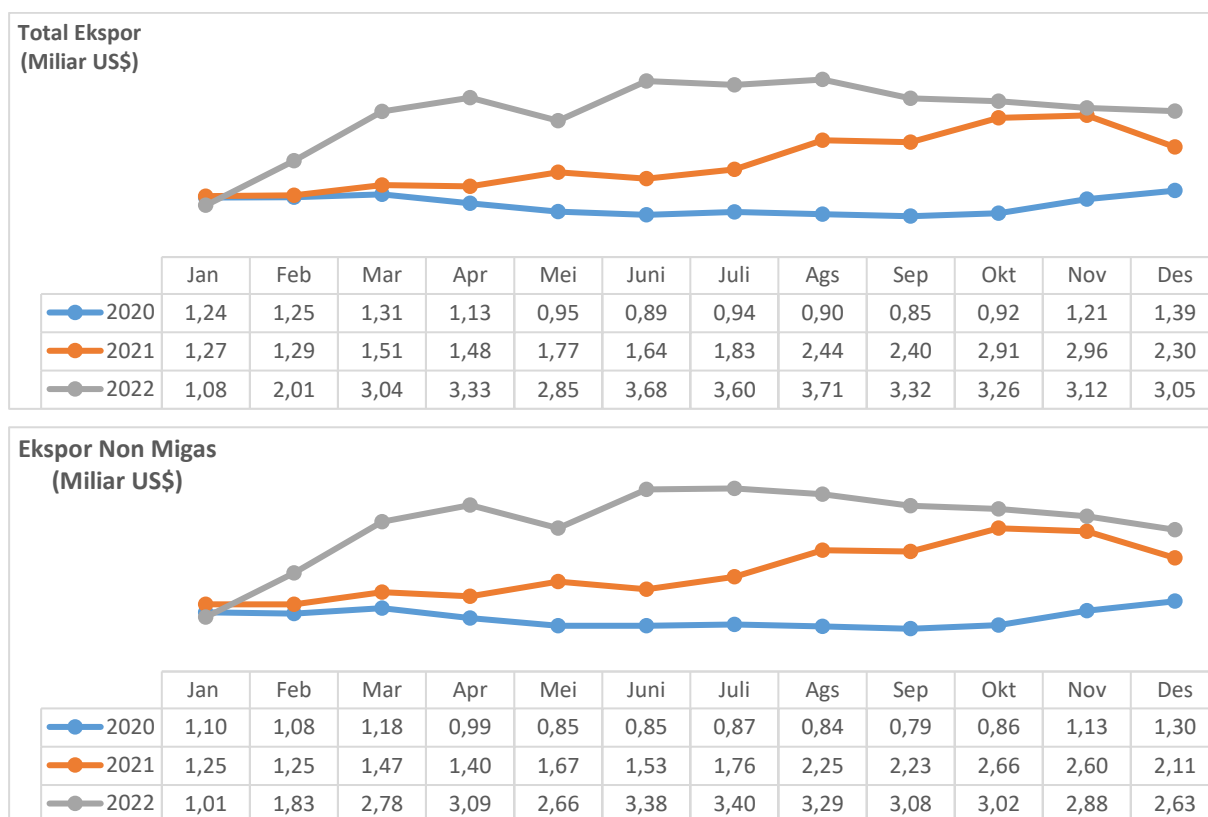


Gambar III.7
 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (*y-o-y*) (%)
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

2) Ekspor dan Impor

Nilai Ekspor Kalimantan Timur pada Desember 2022 mencapai US\$ 3,05 miliar mengalami penurunan sebesar 2,09 persen dibanding November 2022 yang mencapai US\$ 3,12 miliar. Secara kumulatif, nilai ekspor Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai US\$ 36,05 miliar dan capaian ini lebih tinggi dari capaian ekspor pada tahun 2021 yang mencapai US\$ 5,55 miliar. Penurunan nilai ekspor Desember 2022 disebabkan oleh turunnya ekspor nonmigas sebesar 8,81 persen, sementara ekspor migas naik 79,67 persen. Peranan ekspor nonmigas yang mencapai 86,08 persen mempengaruhi turunnya ekspor secara total. Ekspor non migas Desember 2022 tercatat sebesar US\$ 2,63 miliar, turun dari ekspor migas November 2022 yang tercatat US\$ 2,88 miliar. Sedangkan ekspor migas Desember sebesar US\$ 0,43 miliar, naik dari ekspor migas November yang tercatat US\$ 0,24 miliar.

Nilai ekspor 10 (sepuluh) golongan barang utama pada Desember 2022 jika dibandingkan November 2022 mengalami penurunan sebesar 8,51 persen. Jika dirinci, penurunan terbesar terjadi pada golongan barang pupuk yang menurun sebesar 81,87 persen, disusul golongan bahan kimia anorganik yang menurun sebesar 42,84 persen dan golongan barang yang memiliki peran paling besar yakni bahan bakar mineral nonmigas menurun sebesar 9,75 persen.



Gambar III.8

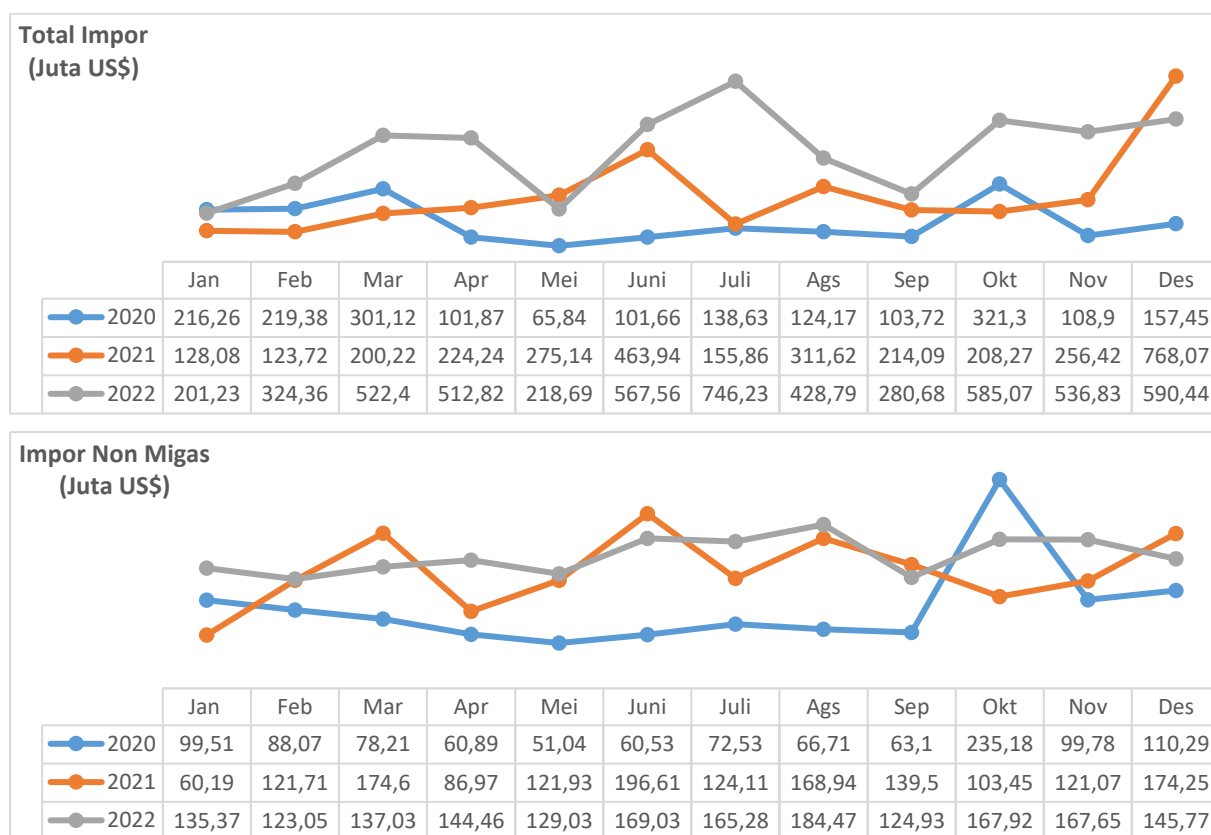
Perkembangan Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Total nilai ekspor nonmigas ke 13 negara tujuan utama pada Desember 2022 mencapai US\$2.397,27 juta mengalami penurunan US\$284,59 juta (10,61 persen) dibandingkan November 2022. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya nilai ekspor ke beberapa negara utama seperti ekspor ke negara Tiongkok yang turun US\$ 162,13 juta (16,40 persen), kemudian negara Taiwan yang turun US\$133,47 juta. Di kawasan Eropa nilai ekspor Kalimantan Timur naik US\$32,17 juta (66,79 persen), sedangkan di kawasan Asean naik US\$18,99 juta (3,44 persen). Ekspor Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan nilai cukup signifikan terjadi pada ekspor ke negara Thailand yang naik sebesar US\$59,26 juta (156,77 persen).

Impor Kalimantan Timur pada Desember 2022 mencapai US\$ 590,44 juta dan mengalami peningkatan 9,99 persen dibanding November 2022 serta bila dibanding Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 23,13 persen. Nilai impor barang migas tercatat mencapai US\$ 444,66 juta atau naik 20,45 persen dibanding November 2022. Sementara untuk komoditi barang non migas tercatat mencapai US\$ 145,77 juta atau turun 13,05 persen dibanding November 2022.

Secara kumulatif nilai impor Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai US\$ 5,42 miliar, naik sebesar 62,72 persen dibanding periode yang sama tahun 2021. Peran impor barang migas mencapai 67,75 persen sedangkan peranan impor barang non migas mencapai 32,25 persen.

Jika dibanding dengan November 2022, penurunan nilai impor terbesar pada Desember 2022 terjadi pada golongan barang bahan bakar mineral non migas yang turun 99,99 persen, yaitu dari US\$ 0,33 juta, menjadi US\$ 0,00 juta, kemudian disusul oleh golongan pupuk yang turun 56,77 persen yaitu dari US\$ 49,01 juta menjadi US\$ 21,18 juta serta golongan karet dan barang dari karet yang mengalami penurunan 28,00 persen yaitu dari US\$ 5,62 juta menjadi US\$ 4,05 juta.

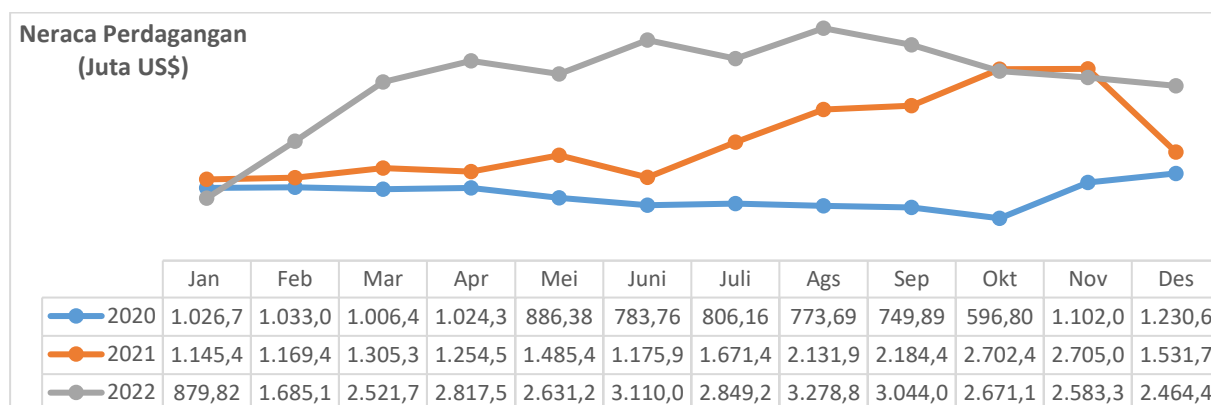


Gambar III.9

Perkembangan Impor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Neraca perdagangan Kalimantan Timur pada Desember 2022 menunjukkan nilai yang positif (surplus) sebesar US\$ 2,46 miliar. Angka ini mengalami penurunan dibanding neraca perdagangan pada November 2022 yang surplus sebesar US\$ 2,58 miliar. Secara kumulatif tahun 2022 neraca perdagangan Kalimantan Timur tercatat surplus sebesar US\$ 30,63 miliar, atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan neraca perdagangan

pada periode yang sama di tahun 2021 yang surplus sebesar US\$ 20,47 miliar.



Gambar III.10
Neraca Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

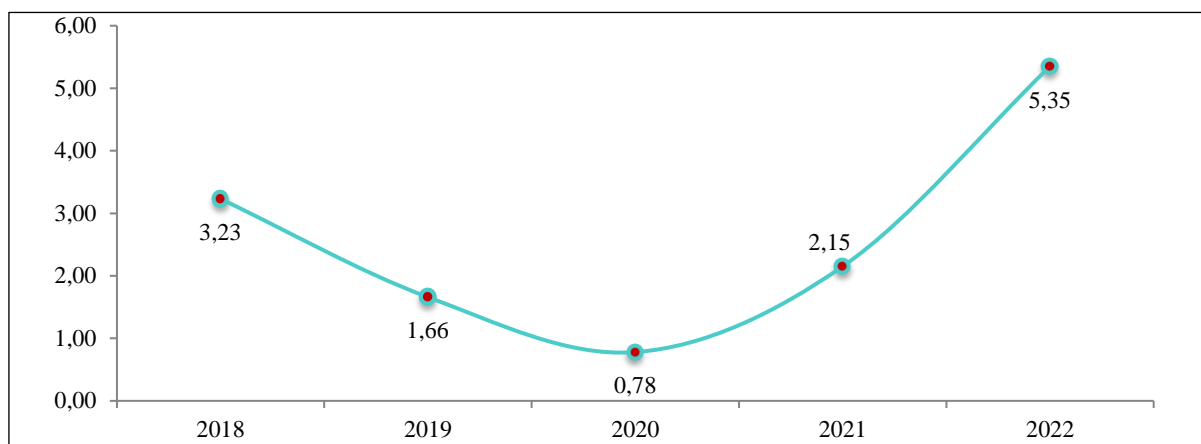
3) Inflasi

Inflasi Kalimantan Timur pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat, namun tetap berada di sekitar rentang sasaran inflasi nasional. Proses pemulihan ekonomi Kalimantan Timur yang mendorong berangsurnya peningkatan permintaan dan risiko terganggunya distribusi/pasokan menjadi faktor utama yang akan menyebabkan peningkatan tekanan inflasi.

Selain dari sisi peningkatan permintaan, risiko peningkatan inflasi juga bersumber dari keterbatasan pasokan dari daerah sentra produsen yang utamanya disebabkan oleh gangguan cuaca akibat adanya fenomena La Nina. Tekanan inflasi juga berasal dari sektor pangan berasal dari *pricing behavior* pasca COVID-19 sehingga mendorong produsen meningkatkan harga sebagai kompensasi kerugian di tahun 2020. Sementara itu, tekanan inflasi juga berasal dari sektor transportasi yang disebabkan oleh lebih mudahnya persyaratan masyarakat untuk melakukan perjalanan dan juga diiringi fasilitas kesehatan yang lebih memadai serta terjangkau. Lebih lanjut, kenaikan inflasi juga didorong oleh penyesuaian harga sejumlah komoditas yang terpengaruh kebijakan tarif/fiskal pemerintah seperti kenaikan cukai rokok, kenaikan tarif iuran BPJS kelas III, dan tarif bea materai.

Jika melihat dari tingkat inflasi kelompok pengeluaran, lima kelompok pengeluaran yang memiliki tingkat inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transportasi sebesar 13,26 persen, diikuti kelompok makanan, minuman dan

tembakau sebesar 6,56 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,62 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,29 persen, kelompok perumahan sebesar 3,87 persen.



Gambar III.11
Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Kalimantan Timur tahun 2022 sebesar 5,71 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 1,12 poin persentase dibandingkan tahun 2021.

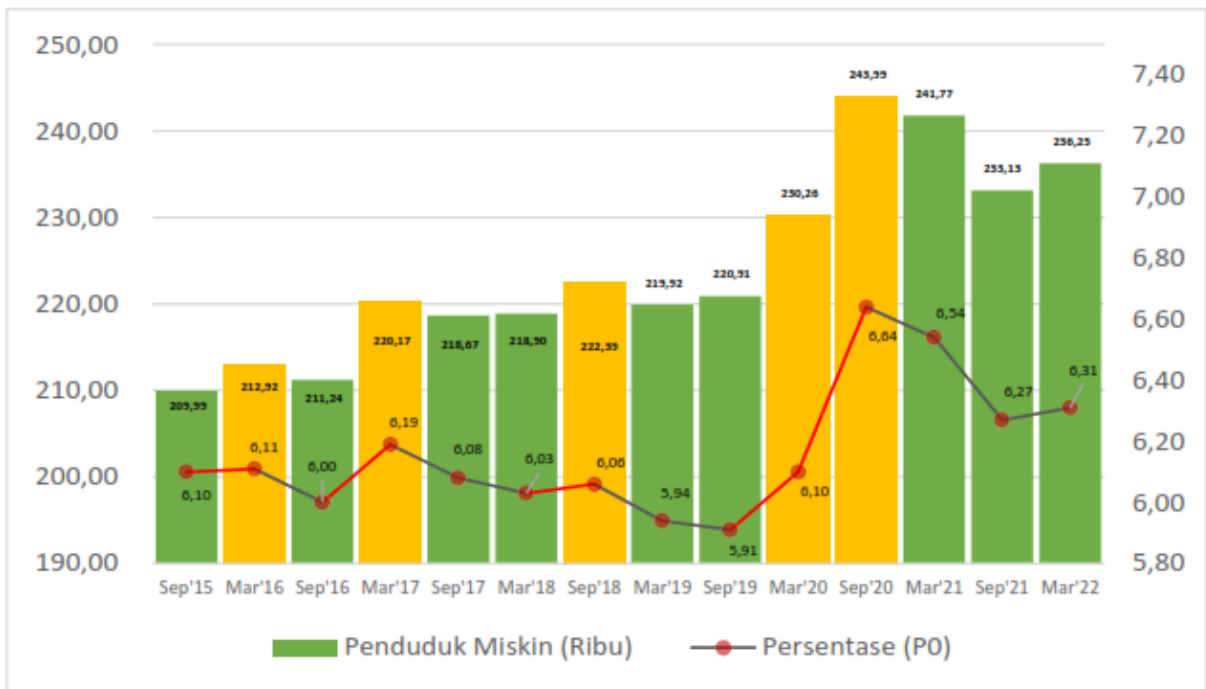
Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki pada tahun 2022 sebesar 5,12 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,90 persen. TPT menurut jenis kelamin memiliki pola yang berkebalikan antara perempuan dan laki-laki, yaitu TPT laki-laki mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dan perempuan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. TPT laki-laki turun 2,10 poin persentase, sedangkan TPT Perempuan cenderung naik sebesar 0,77 poin persentase.

Jika berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT perkotaan mencapai 6,72 persen atau lebih tinggi dibanding TPT di daerah perdesaan yang mencapai 3,61 persen. Dibandingkan tahun 2021, TPT perkotaan turun sebesar 0,88 persen dan perdesaan turun sebesar 1,68 persen.

Dampak pandemic COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah mengalami penurunan yang berarti perkembangan aktifitas usaha yang melibatkan tenaga kerja telah berangsur-angsur pulih. Hal ini tampak dari perkembangan jumlah pengangguran karena COVID-19 pada tahun 2022 yang turun sebesar 21.439 orang atau 79,17 persen dibanding tahun 2021. Begitu juga halnya dengan penduduk yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 dan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 juga mengalami penurunan.

5) Tingkat Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan Kalimantan Timur pada periode Maret 2022 mengalami perbaikan baik dari sisi jumlah maupun presentase. Hal ini menggambarkan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kalimantan Timur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pasca pandemi Covid-19 pertama kali melanda Indonesia dan secara khusus Kalimantan Timur.



Gambar III.12
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur September 2015-Maret 2022
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai 236,25 ribu orang. Dibandingkan 2021, jumlah penduduk miskin turun 5,52 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebesar 6,31 persen, turun 0,23 persen poin terhadap Maret.

6) Investasi

Nilai investasi Kalimantan Timur sampai dengan triwulan III Tahun 2022 telah mencapai Rp 41,20 Triliun dengan realisasi PMDN sebesar Rp.28,76 triliun dan realisasi PMA sebesar Rp 12,44 triliun. Realisasi Investasi PMDN paling besar berada di Kota Balikpapan, yaitu mencapai Rp 9,35 triliun atau 32,51 persen, dan Kabupaten Kutai Timur dengan realisasi sebesar Rp 8,43 triliun. Sedangkan investasi PMA paling besar berada di Kabupaten Kutai Timur, yaitu mencacapi US\$ 430,54 juta dan Kabupaten Kutai Barat mencapai US\$ 118,61 juta. Adapun sektor usaha yang mampu menarik investasi PMDN tertinggi adalah Pertambangan, Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi serta Industri Makanan. Sedangkan Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, subsektor Pertambangan memiliki realisasi investasi terbesar yaitu US\$ 449,19 juta atau sebesar 51,80 persen dan Industri Mineral Non Logam yaitu sebesar US\$ 100,18 juta atau sebesar 11,55 persen.

B. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024

1) Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa Tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- a) Potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Kalimantan Timur yang berpengaruh terhadap permintaan komoditi ekspor;
- b) Isu geopolitik dunia yakni perang dagang Australia- Republik Rakyat Tiongkok, serta Konflik Rusia – Ukraina yang berdampak pada perekonomian global;

- c) Potensi terjadinya krisis ekonomi global akibat gangguan rantai pasok, kerawanan pangan dan tantangan kesehatan masyarakat yang dikhawatirkan memicu stagflasi perekonomian dunia;
- d) Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global dimana Indonesia untuk mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah emisi dan ramah lingkungan;
- e) Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah berkaitan dengan ekspor bahan mentah (terutama komoditas batubara);
- f) Mulai digalakkannya implementasi energi baru terbarukan di Kawasan Asia Timur menyebabkan permintaan ekspor berpotensi menurun;
- g) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang melambat akibat masih dalam situasi pemulihan pandemi COVID-19 yang menurunkan tingkat konsumsi masyarakat;

2) Peluang

Ekonomi Kaltim Tahun 2023 dan 2024 diperkirakan tetap tumbuh positif namun masih terbatas. Beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a) Momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara, diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan sentimen bisnis di daerah serta mempercepat realisasi investasi, terutama dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana IKN Nusantara;
- b) Tumbuhnya minat investasi di sektor hilirisasi produk turunan batubara dan komoditas kelapa sawit bernilai tambah tinggi seperti biodiesel dan minyak goreng;
- c) Realisasi tambahan perolehan pendapatan daerah melalui sumber pendanaan alternatif dari Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (FCPF-CF) serta potensi sumber pendanaan dari Dana Bagi Hasil Sawit;
- d) Berlanjutnya proyek peningkatan kapasitas kilang minyak Balikpapan/*Refinery Development Master Plan Refinery Unit V* (RDMP RU V Pertamina) dan beberapa proyek swasta lain;
- e) Peningkatan kinerja ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi negara tujuan utama ekspor seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Negara Asia lainnya;

- f) Meningkatnya kinerja lapangan usaha konstruksi seiring dengan berlanjutnya pembangunan Ibu Kota Nusantara, pengerjaan proyek strategis *multiyears existing* (RDMP RU V, Bendungan Sepaku – Semoi, Pabrik Amonium Nitrat, Pabrik Coal-Methanol) dan realisasi investasi baru korporasi di Kaltim dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi;
- g) Optimalisasi Kebijakan B20 dan B30 dan rencana B40 memberi peluang bagi peningkatan daya serap produk CPO di pasar domestik;
- h) Optimalisasi sumur-sumur migas baru serta optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- i) Perluasan kesempatan kerja sebagai dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

C. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada tahun 2024

Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2024 mendorong transformasi ekonomi sebagai *game changer* menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses serta kesempatan.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025–2029 melalui percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif.

Upaya percepatan agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,7 persen pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi

tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US\$4.970–5.150 pada tahun 2024, berada pada kategori *upper-middle income countries*.

Adapun target pembangunan nasional pada tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel III.1 sebagai berikut.

Tabel III.1
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024

| Uraian | | Tahun 2024 |
|---------------------------------|---|-------------|
| Perkiraan besaran-besaran pokok | | |
| 1 | Pertumbuhan PDB (% ,yoy) | 5,3-5,7 |
| 2 | Laju inflasi, IHK (% ,yoy) | 1,5-3,5 |
| Neraca Pembayaran | | |
| 3 | Cadangan Devisa (US\$ miliar) | 149,1-150,2 |
| 4 | Neraca transaksi berjalan (% PDB) | 0,5-0,4 |
| Keuangan Negara | | |
| 5 | Penerimaan Perpajakan (% PDB) | 9,9–10,2 |
| 6 | Keseimbangan Primer (% PDB) | (0,0)–(0,4) |
| 7 | Surplus/Defisit APBN (% PDB) | (2,2)–(2,6) |
| 8 | Stok Utang Pemerintah (% PDB) | 38,1–39,0 |
| PMTB/Investasi | | |
| 9 | Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) | 6,2-7,0 |
| 10 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) | 1.450–1.650 |
| 11 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan (Triliun Rp) | 662,7–731,1 |
| Target Pembangunan | | |
| 12 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,0-5,7 |
| 13 | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,5-7,5 |
| 14 | Indeks Gini (nilai) | 0,374-0,377 |
| 15 | Indeks Pembangunan Manusia (nilai) | 73,99-74,02 |
| 16 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) | 27,27 |
| Indikator Pembangunan | | |
| 17 | Nilai Tukar Petani (nilai) | 105-108 |
| 18 | Nilai tukar Nelayan (nilai) | 107-110 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, 2023

Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045.

Untuk arah kebijakan pembangunan pembangunan yang berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan timur antara lain mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi, memantapkan peran Kalimantan Timur sebagai lumbung energi nasional, mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Arah kebijakan nasional ini diharapkan mampu meningkatkan pencapaian target makro ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2024.

Strategi pembangunan wilayah Kalimantan Timur diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi ekonomi, pemantapan peran sebagai lumbung energi nasional, mempertahankan peran sebagai paru-paru dunia dan mendorong pemerataan pembangunan.

Sedangkan sasaran utama pengembangan Wilayah Kalimantan pada tahun 2024 diutamakan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Tabel III.2 sebagai berikut.

Tabel III.2
Sasaran Pembangunan Tahun 2024

| Uraian | | Tahun 2024 |
|--------|----------------------------------|-------------|
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,1 - 5,6 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,78 - 5,48 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan (%) | 3,50 - 4,00 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, 2023

3.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2022 mengalami perbaikan dan tumbuh positif, dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,48 persen. Perbaikan ini disebabkan oleh tingginya produksi lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mendominasi PDRB Kalimantan Timur seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap batu bara. Selain itu dampak bangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19 juga berakibat pada meningkatnya aktivitas perekonomian lainnya.

Peningkatan daya saing daerah perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penyediaan kompetensi angkatan kerja yang dapat memenuhi standar pasar kerja industri di

Kalimantan Timur. Selain itu, pengendalian investasi di Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2024 perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung pengembangan hilirisasi industri dan infrastruktur pendukung penunjang Ibu Kota Negara Baru terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru.

A. Sasaran Ekonomi Makro

Pada Tahun 2024, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III.3
Sasaran Ekonomi Makro Daerah

| Uraian | | Target 2024 |
|--------|------------------------------|-------------|
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,00 - 5,00 |
| 2 | PDRB Per Kapita (Juta Rp) | 255,00 |
| 3 | Inflasi (persen) | 3,00 - 4,00 |

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023

Pada Tahun 2024, merupakan periode bagi Kalimantan Timur untuk melakukan penguatan daya saing daerah dan meneruskan perbaikan dari sisi perekonomian yang telah dicapai pada tahun 2022 yang diharapkan masih terus berlanjut. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat tersebut, diharapkan pada tahun 2024 terus mengalami perbaikan sehingga target pembangunan yang direncanakan dapat tercapai.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan terjaga dengan laju pertumbuhan positif pada rentang 3,5±1 persen dan untuk tahun 2024 juga diharapkan mampu tumbuh positif pada 4,10 – 4,90 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diasumsikan dengan masih terjaganya harga komoditas batubara dan kelapa sawit, berjalannya proyek strategis seperti Refinery Development Master Project (RDMP) RU V Balikpapan, pembangunan proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara beserta dampak ikutannya, dan berbagai proyek lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD.

B. Arah Kebijakan Ekonomi

Untuk mencapai target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2024, dirumuskan arah kebijakan ekonomi makro sebagai berikut :

1. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 4,10 – 4,90 Persen, yakni melalui :
 - a) Memperkuat kinerja industri pengolahan dengan mendorong operasionalisasi pabrik-pabrik pengolahan produk kelapa sawit seperti biodiesel, minyak goreng, dan produk turunan lainnya;
 - b) Meningkatkan produktivitas hasil produksi pertanian (dalam arti luas) melalui intensifikasi di sektor pangan dan ekstensifikasi di sektor perkebunan (optimalisasi pemanfaatan kawasan perkebunan);
 - c) Mendorong peningkatan sektor konstruksi, perdagangan, transportasi, serta sektor akomodasi makan dan minum dengan menangkap peluang bangkitan ekonomi terhadap pembangunan IKN;
2. Mendorong Inklusifitas Ekonomi dengan meningkatkan *trickle down effect* pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui upaya peningkatan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja;
3. Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah, melalui :
 1. Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah
 2. Mengendalikan tingkat inflasi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga
 3. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang signifikan dapat memicu pertumbuhan sektor lainnya
 4. Mendorong peran komoditas hasil olahan industri untuk peningkatan ekspor perdagangan antar wilayah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Pendapatan Daerah

Perhitungan pendapatan daerah Tahun 2024 pada Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan asumsi/pendekatan yang telah ditetapkan di dalam

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, yakni sebagai berikut:

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi dan perkembangan pendapatan pada tiga tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- 2) Dana transfer berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU, DAK dan DID diasumsikan sama dengan Tahun 2022 sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025. Selain itu terdapat penambahan sumber pendapatan bagi hasil yakni dana *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF)*;
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pengembangan dan terobosan-terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2024. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 2) Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 3) Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Melakukan kajian secara *holistic* untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
- 5) Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
- 6) Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- 7) Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP

Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;

- 8) Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 9) Adanya penambahan izin pemakaian/pemanfaatan air permukaan dari perusahaan baru;
- 10) Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 11) Melakukan *cleansing* data base kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 12) Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
- 13) Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD.

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan proyeksi tahun 2023 secara umum dapat dilihat pada tabel III.4. Pada kurun waktu dari tahun 2019 hingga 2022 tren realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 38,03 persen. Peningkatan tren realisasi ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan daerah yang signifikan pada tahun 2022 akibat meningkatnya pendapatan pada seluruh komponen pendapatan. Namun proyeksi pendapatan tahun 2023 diperhitungkan akan mengalami penurunan dengan sebesar 11,07 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022, target pendapatan daerah tahun 2023 dipengaruhi oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,86 persen, pendapatan transfer sebesar 14,71 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 19,18 persen.

Tabel III.4
 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2019-2022 dan Penetapan Tahun 2023

| Kode Rek | Komponen Penerimaan | Realisasi Tahun 2019 (Rp) | Realisasi Tahun 2020 (Rp) | Realisasi Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2022 (unaudited) (Rp) | Penetapan Tahun 2023* (Rp) |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 4 | Pendapatan Daerah | 11.775.086.836.200 | 9.987.385.879.199 | 10.220.142.967.274 | 16.804.693.776.013 | 14.621.856.687.106 |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 6.555.853.195.408 | 5.143.521.676.422 | 6.111.918.272.284 | 8.997.262.537.258 | 8.045.500.965.106 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 4.984.520.517.159 | 3.900.431.414.629 | 4.774.890.855.289 | 7.623.597.479.496 | 7.010.000.000.000 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 26.492.587.130 | 10.123.187.099 | 13.590.719.061 | 19.980.889.916 | 20.052.388.240 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan | 392.379.951.610 | 110.988.636.348 | 214.599.338.882 | 310.262.666.522 | 232.740.891.298 |
| 4.1.04 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 1.152.460.139.510 | 1.121.978.438.346 | 1.108.837.359.053 | 1.043.421.501.324 | 782.707.685.568 |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 5.186.147.690.792 | 4.831.865.557.777 | 4.094.319.639.990 | 7.790.284.158.755 | 6.562.497.042.000 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 5.186.147.690.792 | 4.831.865.557.777 | 4.094.319.639.990 | 7.790.284.158.755 | 6.562.497.042.000 |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 5.176.264.298.792 | 4.759.526.731.777 | 4.056.865.328.990 | 7.753.114.697.755 | 6.562.497.042.000 |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) | 3.207.168.795.642 | 3.544.638.973.637 | 2.591.967.832.399 | 6.329.446.113.503 | 5.021.968.600.000 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 815.693.641.000 | 831.404.756.000 | 828.050.174.361 | 824.108.986.889 | 857.929.020.000 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 221.093.462.036 | 212.147.502.140 | 247.450.542.385 | 233.206.951.954 | 190.152.584.000 |
| 4.2.01.01.04 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 932.308.400.114 | 171.335.500.000 | 389.396.779.845 | 366.352.645.409 | 492.456.838.000 |

| Kode Rek | Komponen Penerimaan | Realisasi Tahun 2019 (Rp) | Realisasi Tahun 2020 (Rp) | Realisasi Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2022 (unaudited) (Rp) | Penetapan Tahun 2023* (Rp) |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 9.883.392.000 | 72.338.826.000 | 37.454.311.000 | 37.169.461.000 | 0 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 33.085.950.000 | 11.998.645.000 | 13.905.055.000 | 17.147.080.000 | 13.858.680.000 |
| 4.03.01 | Hibah | 33.085.950.000 | 11.998.645.000 | 13.905.055.000 | 17.147.080.000 | 13.858.680.000 |

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2023

Tabel III.5
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2022 dan Penetapan Tahun 2023 (persen)

| Kode Rek | Komponen Penerimaan | Realisasi Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Penetapan Tahun 2023* |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4 | Pendapatan Daerah | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 55,68% | 51,50% | 59,80% | 53,54% | 55,02% |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 76,03% | 75,83% | 78,12% | 84,73% | 87,13% |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 0,40% | 0,20% | 0,22% | 0,22% | 0,25% |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan | 5,99% | 2,16% | 3,51% | 3,45% | 2,89% |
| 4.1.04 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 17,58% | 21,81% | 18,14% | 11,60% | 9,73% |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 44,04% | 48,38% | 40,06% | 46,36% | 44,88% |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 99,81% | 98,50% | 99,09% | 99,52% | 100,00% |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) | 61,84% | 73,36% | 63,89% | 81,64% | 76,53% |
| 4.2.01.01.02 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 15,73% | 17,21% | 20,41% | 10,63% | 13,07% |
| 4.2.01.01.03 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 4,26% | 4,39% | 6,10% | 3,01% | 2,90% |

| Kode Rek | Komponen Penerimaan | Realisasi Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Penetapan Tahun 2023* |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4.2.01.01.04 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 17,98% | 3,55% | 9,60% | 4,73% | 7,50% |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 0,19% | 1,50% | 0,91% | 0,48% | 0 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 0,28% | 0,12% | 0,12% | 0,10% | 0,09% |
| 4.03.01 | Hibah | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2023

Proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 mengalami penurunan dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar 25,72 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,14 persen dan penurunan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat signifikan sebesar 35,03 persen. Secara proporsi pada Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah sebesar 60,33 persen.

Tabel III.6
Proyeksi dan Proporsi Pendapatan Daerah Pendapatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| Kode Rek | Komponen Penerimaan | Tahun 2024 | |
|--------------|---|--------------------|---------|
| | | Rp | % |
| 4 | Pendapatan Daerah | 20.000.000.000.000 | 100,00% |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 9.804.205.686.170 | 49,02% |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 8.592.000.000.000 | 87,64% |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 874.811.711.940 | 8,92% |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan | 252.916.355.582 | 2,58% |
| 4.1.04 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 84.477.618.648 | 0,86% |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 9.411.932.777.866 | 47,06% |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 9.411.932.777.866 | 100,00% |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 9.401.932.777.866 | 99,89% |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.858.263.118.029 | 83,58% |
| 4.2.01.01.02 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 872.370.733.844 | 9,28% |
| 4.2.01.01.03 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 192.713.322.771 | 2,05% |
| 4.2.01.01.04 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 478.585.603.223 | 5,09% |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 10.000.000.000 | 0,11% |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 783.861.535.964 | 3,92% |
| 4.03.01 | Hibah | 13.861.535.964 | 1,77% |

| Kode Rek | Komponen Penerimaan | Tahun 2024 | |
|----------|------------------------|-----------------|--------|
| | | Rp | % |
| | Remunerasi TDF | 201.000.000.000 | 25,64% |
| | Keuntungan Bersih IUPK | 569.000.000.000 | 72,59% |

Sumber: BAPENDA, BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

3.2.2 Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

Penyusunan kebijakan keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Sedangkan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan rutin dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Tabel III.7
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024

| No | Uraian Belanja Wajib Mengikat | Tahun 2024 (Rp) |
|----|--|--------------------|
| A | BELANJA OPERASI | 12.190.083.917.305 |
| 1 | Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP | 2.444.580.408.253 |
| 2 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH-DPRD | 70.439.792.609 |
| 3 | Belanja Non PNS | 460.000.000.000 |
| 4 | Belanja Operasional Kantor (Telepon, Listrik, Air, Internet, dan Jasa Kebersihan dan Satpam) | 137.452.554.204 |
| 5 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 671.298.925.993 |
| 6 | Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR) | 152.445.275.246 |
| 7 | Dana Insentif Daerah (DID) | 10.000.000.000 |
| 8 | Dana FCPF-CF | 66.185.600.000 |
| 9 | Belanja pajak rokok (JPKM) | 50.000.000.000 |
| 10 | BLUD | 859.135.000.000 |
| 11 | Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik | 8.123.695.000 |

| No | Uraian Belanja Wajib Mengikat | Tahun 2024 (Rp) |
|--------------------------------|---|--------------------|
| 12 | Dukungan pelaksanaan Pemilu 2024 (Hibah Ke KPU, Bawaslu, TNI/POLRI) | 374.200.000.000 |
| 13 | Bantuan keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota | 1.300.000.000.000 |
| 14 | Belanja Tidak Terduga | 793.322.666.000 |
| 15 | Belanja Bagi Hasil | 4.792.900.000.000 |
| B | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 500.000.000.000 |
| 1 | Pembayaran Pokok Utang | - |
| 2 | 500.000.000.000 | 500.000.000.000 |
| TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT | | 12.690.083.917.305 |

Sumber: *BAPPEDA Provinsi KALTIM, BAPENDA Provinsi KALTIM, 2023*

Adapun penjelasan terhadap masing-masing komponen belanja mengikat yang menjadi dasar analisis perhitungan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Pegawai yakni belanja Gaji, Tunjangan dan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) yang diberikan kepada seluruh PNS;
- b) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pj. Gubernur, dianggap belanja mengikat karena merupakan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan DPRD yang harus dibayarkan (seperti belanja pegawai);
- c) Belanja Non PNS merupakan belanja gaji yang diberikan kepada pegawai Non PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- d) Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Kota merupakan transfer pembagian hasil penerimaan pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kabupaten Kota yang diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2018;
- e) Belanja operasional wajib kantor, dianggap belanja mengikat karena menjadi pembiayaan rutin untuk penyelenggaraan kegiatan perkantoran selama satu tahun, seperti air, listrik, telpon, internet, dan pajak kendaraan;

- f) Insentif pemungut pajak, dianggap belanja mengikat karena peruntukannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 terkait pemberian insentif bagi pemungut pajak;
- g) Dana Alokasi Khusus (DAK), dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah ditentukan, dan diasumsikan hampir pasti selalu ada di setiap tahunnya;
- h) DBH-DR, dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas dan diatur dalam PMK Nomor 230/PMK.07/2017;
- i) Belanja pajak rokok, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas dan diatur (Dinkes untuk JPKN, Satpol untuk Penegakan Perda) PMK Nomor 102/PMK.07/2015;
- j) BLUD, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas digunakan untuk operasional masing-masing BLUD;
- k) Bankeu/Hibah kepada Partai Politik, dianggap Belanja mengikat karena telah diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018;
- l) Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dianggap belanja mengikat karena bersifat rutin di setiap tahunnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang bersifat prioritas, namun bukan menjadi kewenangan provinsi;
- m) Belanja Tidak Terduga, dianggap belanja mengikat karena pengalokasiannya bersifat rutin dan dibutuhkan sebagai antisipasi
- n) komponen Belanja Pendidikan, Kesehatan, Inspektorat, dan BPSDM nilainya;
- o) Penyertaan Modal diberikan kepada BUMD yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3.2.3 Belanja Daerah

Belanja daerah yang terdapat pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Namun pada pelaksanaan pada APBD tahun 2021 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Namun pada realisasi belanja daerah tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Pj. Gubernur, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa;
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran;
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- 2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya;

- 3) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- 4) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

Belanja daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 cenderung fluktuatif namun dengan tren pertumbuhan yang positif sebesar 5,72 persen. Dalam kurun waktu tersebut, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dikarenakan terjadinya pelimpahan pegawai dari pemerintah kabupaten/kota dan nasional ke provinsi sebagai akibat penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kemudian kembali meningkat pada tahun 2022.

Realisasi dan proporsi belanja daerah pada kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.8
 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2019-2022 dan Penetapan Tahun 2023

| Kode Rek | Uraian | Realisasi Tahun 2019 (Rp) | Realisasi Tahun 2020 (Rp) | Realisasi Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2022 (Rp) | Penetapan Tahun 2023* (Rp) |
|----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 5 | BELANJA | 12.900.000.000.000 | 10.683.921.000.001 | 10.723.529.422.431 | 12.393.745.833.368 | 17.031.194.223.080 |
| 5.01 | BELANJA OPERASI | 5.940.390.533.458 | 5.356.491.717.806 | 4.983.150.466.273 | 6.001.780.302.943 | 7.414.552.277.521 |
| 5.01.01 | Belanja Pegawai | 2.276.292.750.006 | 2.246.712.057.549 | 2.105.588.712.918 | 2.334.585.774.591 | 2.796.363.758.450 |
| 5.01.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.839.199.050.718 | 2.870.659.107.195 | 2.634.941.566.554 | 3.184.224.252.607 | 4.207.685.257.571 |
| 5.01.05 | Belanja Hibah | 815.124.182.734 | 223.050.003.062 | 228.665.386.800 | 432.031.575.745 | 395.879.061.500 |
| 5.01.06 | Belanja Bantuan Sosial | 9.774.550.000 | 16.070.550.000 | 13.954.800.000 | 50.938.700.000 | 14.624.200.000 |
| 5.02 | BELANJA MODAL | 1.825.021.228.128 | 1.317.417.909.377 | 1.514.465.189.715 | 1.980.010.052.268 | 4.097.300.945.741 |
| 5.03 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 25.000.000.000 | 500.000.000.000 | 221.409.234.933 | 6.688.799.413 | 129.340.999.818 |
| 5.04 | BELANJA TRANSFER | 5.109.588.238.414 | 3.510.011.372.818 | 4.004.504.531.511 | 4.405.266.678.744 | 5.390.000.000.000 |
| 5.04.01 | Belanja Bagi Hasil | 3.087.791.772.893 | 1.911.308.336.000 | 2.455.934.232.318 | 3.542.721.678.744 | 4.192.500.000.000 |
| 5.04.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 2.021.796.465.521 | 1.598.703.036.818 | 1.548.570.299.193 | 862.545.000.000 | 1.197.500.000.000 |

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2023

Tabel III.9
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2022 dan Penetapan Tahun 2023

| Kode Rek | Uraian | Realisasi Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Penetapan Tahun 2023* |
|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5 | BELANJA | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 5.01 | BELANJA OPERASI | 46,05% | 50,14% | 46,47% | 48,15% | 43,54% |
| 5.01.01 | Belanja Pegawai | 38,32% | 41,94% | 42,25% | 39,55% | 37,71% |
| 5.01.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47,79% | 53,59% | 52,88% | 52,26% | 56,75% |
| 5.01.05 | Belanja Hibah | 13,72% | 4,16% | 4,59% | 7,32% | 5,34% |
| 5.01.06 | Belanja Bantuan Sosial | 0,16% | 0,30% | 0,28% | 0,86% | 0,20% |
| 5.02 | BELANJA MODAL | 14,15% | 12,33% | 14,12% | 15,85% | 24,06% |
| 5.03 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 0,19% | 4,68% | 2,06% | 0,05% | 0,76% |
| 5.04 | BELANJA TRANSFER | 39,61% | 32,85% | 37,34% | 35,95% | 31,65% |
| 5.04.01 | Belanja Bagi Hasil | 60,43% | 54,45% | 61,33% | 80,42% | 77,78% |
| 5.04.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 39,57% | 45,55% | 38,67% | 19,58% | 22,22% |

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 20223

Peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 sangat diperlukan terlebih dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Pada tahun 2024 komponen konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kalimantan Timur diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024. Berdasarkan tema pembangunan tahun 2024, arah kebijakan belanja daerah difokuskan untuk mendukung peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah untuk percepatan transformasi ekonomi dan berkelanjutan. Untuk dapat mencapai target tersebut maka arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

- 1) Meningkatkan belanja produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah;
- 2) Meningkatkan efisiensi dan penajaman pada belanja non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal;
- 3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
- 4) Kebijakan belanja pemerintah daerah diarahkan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 5) Perkuatan perekonomian seperti Pariwisata, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM serta pemulihan kembali daya beli masyarakat ;
- 6) Pencapaian target, sasaran, dan program prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
- 7) Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan. Sedangkan untuk belanja *mandatory* lainnya seperti belanja peningkatan SDM ASN dan pengawasan (APIP) disesuaikan dengan potensi besaran anggaran;

- 8) Transfer ke kabupaten/kota dan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan pada keselarasan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah provinsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk memperkirakan segala kebutuhan belanja daerah terkait pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di tahun kedepan. Adapun proyeksi 2024 Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.10
 Proyeksi dan Proporsi Belanja Daerah
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| Kode Rek | Uraian | Proyeksi Tahun 2024 | |
|----------|---|---------------------|--------|
| | | Rp | % |
| 5 | BELANJA | 20.000.000.000.000 | 100% |
| 5.01 | BELANJA OPERASI | 7.599.100.539.075 | 38,00% |
| 5.01.01 | Belanja Pegawai | 3.175.447.949.732 | 41,79% |
| 5.01.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.903.652.589.343 | 51,37% |
| 5.01.05 | Belanja Hibah | 510.000.000.000 | 6,71% |
| 5.01.06 | Belanja Bantuan Sosial | 10.000.000.000 | 0,13% |
| 5.02 | BELANJA MODAL | 5.514.676.794.925 | 27,57% |
| 5.03 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 793.322.666.000 | 3,97% |
| 5.04 | BELANJA TRANSFER | 6.092.900.000.000 | 30,46% |
| 5.04.01 | Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota | 4.792.900.000.000 | 78,66% |
| 5.04.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 1.300.000.000.000 | 21,34% |

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022

3.2.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Tabel III.11
Penetapan Pembiayaan APBD Tahun 2023 dan Proyeksi Pembiayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| No | Uraian | Penetapan Tahun 2023 | Proyeksi Tahun 2024 |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| A | Penerimaan Pembiayaan | | |
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | 2.578.143.312.894 | 500.000.000.000 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 2.578.143.312.894 | 500.000.000.000 |
| B | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| 1 | Penyertaan Modal | 168.805.776.920 | 500.000.000.000 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 168.805.776.920 | 500.000.000.000 |
| | Jumlah Pembiayaan Netto | 2.409.337.535.974 | 0 |

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2022

Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022 tidak diproyeksikan meskipun memungkinkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022 yang berasal dari pelampauan penerimaan PAD, Pelampauan penerimaan dana perimbangan dan Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, namun angkanya tidak diproyeksikan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2024 dialokasikan untuk penyertaan modal ke BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang bertujuan peningkatan pendapatan daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah dilakukannya penyusunan perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

Dalam rangka mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah, Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya dalam menggali sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah akan diupayakan dengan cara mengoptimalisasi dan mengintegrasikan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari BUMD, swasta, maupun masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan di Tahun 2024 akan diarahkan pada:

- 1) Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi bagi masyarakat secara lebih luas;
- 2) Pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU;
- 3) Optimalisasi dan integrasi sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk mendukung pencapaian target-target program prioritas Kalimantan Timur. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan kehidupan masyarakat.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun pertama dari RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah. Secara umum, kerangka kebijakan pembangunan Kalimantan Timur untuk Tahun 2024 dapat di lihat seperti pada Gambar IV.1 berikut.

| RPD Provinsi Kalimantan Tahun 2024 - 2026 | |
|--|--|
| Fokus Utama | |
| I. SDM yang Berdaya Saing | II. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas |
| 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Ketenagakerjaan 4. Pemberdayaan Gender | 1. Diversifikasi Ekonomi 2. Inklusifitas Ekonomi 3. Kemiskinan 4. Infrastruktur Wilayah |
| Fokus Pendukung/Kondisi Perlu | |
| III. Lingkungan Hidup | IV. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik |
| 1. Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penurunan Emisi GRK 3. Bauran Energi Baru Terbarukan | 1. Reformasi Birokrasi 2. ASN BerAKHLAK |

Gambar IV.1
Pola Hubungan Antar Fokus Pembangunan RPD Kalimantan Timur
Tahun 2024-2026

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada rencana tahunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.1
 Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
 “Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan”

| Tujuan dan Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Satuan | Target |
|--|---|---------------|------------------|
| | | | 2024 |
| Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 78,32 |
| Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat | 1 Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,95 |
| | 2 Rata-rata lama sekolah | Tahun | 10,10 |
| Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 1 Usia Harapan Hidup | Tahun | 74,82 |
| | 2 Prevalensi Stunting | Persen | 12,83 |
| Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 5,46 |
| Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 67,31 |
| Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas | 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Persen | 4,10-4,90 |
| | 2 Tingkat Kemiskinan | Persen | 5,78 |
| | 3 Indeks Gini | Indeks | 0,316 |
| Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi | LPE Non Migas dan Batubara | Persen | 5,90-6,70 |
| Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin | 1 Indeks Kedalaman Kemiskinan | Indeks | 0,86 |
| | 2 Indeks Keparahan Kemiskinan | Indeks | 0,15 |
| | 3 Tingkat inflasi | Persen | 4,50 |

| Tujuan dan Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | | Satuan | Target |
|---|------------------------------|--|---------------|------------------|
| | | | | 2024 |
| Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar | | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) | Indeks | 7,74 |
| Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 75,00 |
| | 2 | Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU) | Persen | 31,05 |
| Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan | 1 | Indeks Kualitas Air | Indeks | 53,52 |
| | 2 | Indeks Kualitas Air Laut | Indeks | 81,95 |
| | 3 | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 88,17 |
| | 4 | Indeks Kualitas Lahan | Indeks | 82,35 |
| Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan | | Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU) | Persen | 23,32 |
| Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan | | Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) | Persen | 10,39 |
| Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi | | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 69,00 (B) |
| Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 85,00 |
| | 2 | Sistem Merit | Poin | 270 |
| | 3 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 2,90 |
| | 4 | Nilai Akuntabilitas Kinerja | Poin | 78,50 (BB) |
| | 5 | Tingkat maturitas SPIP | Level | 3 Skor 3,476 |

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Selain mempedomani dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, juga perlu memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2024. Berdasarkan hasil Konsultasi Publik RKP Tahun 2024, didapatkan informasi dari hasil evaluasi pembangunan nasional tahun 2022 bahwa permasalahan yang dihadapi adalah berkaitan dengan tingkat kemiskinan, rasio gini, indeks pembangunan manusia dan emisi gas rumah kaca.

Tabel IV.2
Capaian Indikator Sasaran RKP Tahun 2022

| No | Indikator Sasaran Pembangunan | Target 2022*) | Capaian 2022 |
|----|--|---------------|-----------------------|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,2-5,5 | 5,31 |
| 2. | Tingkat Kemiskinan (%) | 8,5-9,0 | 9,57 (Sept 2022) |
| 3. | Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%) | 5,5-6,3 | 5,86 (Agustus 2022) |
| 4. | Rasio Gini (nilai) | 0,376-0,378 | 0,381 (Sept 2022) |
| 5. | Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) | 73,41-73,46 | 72,91 |
| 6. | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (%) | 26,87 | 26,87 (Estimasi) |
| 7. | Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) | 103-105 | 107,33 (Jan-Des 2022) |
| 8. | Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) | 104-106 | 106,45 (Jan-Des 2022) |

**)Target 2022 bersumber dari Perpres Nomor 115/2021 tentang Pemutakhiran RKP 2022*

Adapun beberapa strategi yang telah dan kedepannya dapat terus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui strategi :
 - (1) Pemulihan daya beli dan usaha; dan
 - (2) Diversifikasi ekonomi;
2. Menekan jumlah penduduk miskin, melalui strategi :
 - (1) Penurunan beban pengeluaran; dan
 - (2) Peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan;
3. Menekan tingkat pengangguran, melalui upaya :

- (1) Penciptaan kesempatan kerja baru sebagai upaya penumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM;
 - (2) Peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - (3) Penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan; dan
 - (4) Penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja;
4. Menurunkan tingkat ketimpangan, melalui strategi :
- (1) Memperkuat afirmasi kelompok 40 persen terbawah melalui reformasi sistem perlindungan sosial yang meliputi pengembangan registrasi sosial ekonomi; peningkatan akurasi penargetan; integrasi dan penyederhanaan program; serta penyaluran secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan;
 - (2) Penguatan kelembagaan pelatihan vokasi;
 - (3) Peningkatan peran UMKM;
 - (4) Penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata;
5. Meningkatkan indeks pembangunan manusia, melalui strategi :
- (1) Bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah serta insentif kepada dunia usaha dan penganggur;
 - (2) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya *promotif* dan *preventif*, serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah;
 - (3) Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi dalam Pendidikan, afirmasi akses di semua jenjang pendidikan, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun;
6. Menurunkan emisi gas rumah kaca, melalui upaya :
- (1) Pelaksanaan transisi dari kegiatan perekonomian yang intensif karbon menjadi kegiatan perekonomian yang lebih ramah lingkungan serta meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi GRK; dan

- (2) Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon yang memiliki kontribusi signifikan dan berdampak langsung pada penurunan emisi, utamanya pada sektor lahan dan energi;
7. Menjaga nilai tukar petani, melalui kebijakan :
 - (1) Jaminan ketersediaan *input* pertanian;
 - (2) Pembentukan korporasi petani dan nelayan;
 - (3) Kawasan sentra produksi pangan (*food estate*);
 - (4) Pengembangan sentra produksi pangan berbasis pertanian digital;
 - (5) Efisiensi distribusi pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usaha tani) dan sistem logistik pangan;
 - (6) Percepatan transformasi *platform e-commerce* pertanian/rantai pasok *online*;
 - (7) Pengolahan primer produksi pangan dan pertanian;
 8. Meningkatkan nilai tukar nelayan, melalui kebijakan :
 - (1) Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha perikanan serta digitalisasi usaha kelautan dan perikanan;
 - (2) Penguatan rantai pasok hasil perikanan;
 - (3) Pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan kampung-kampung perikanan;
 - (4) Penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan;
 - (5) Perlindungan bagi pelaku usaha perikanan, serta pendampingan dan penyuluhan.

Tema RKP tahun 2024 mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan fokus pembangunan Nasional yang dijabarkan melalui Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024 sebagai berikut:

- Prioritas 1: Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
- Prioritas 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- Prioritas 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- Prioritas 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

- Prioritas 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- Prioritas 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- Prioritas 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran dan tema RKP 2024 telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sedangkan target sasaran nasional pada RKP tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel IV.3
Indikator Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024

| No | Sasaran | Target 2024 |
|----|----------------------------------|-------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,3 – 5,7 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,5-7,5 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,0-5,7 |
| 4 | Rasio Gini (Indeks) | 0,374-0,377 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | 73,99-74,02 |
| 6 | Penurunan Emisi GRK (%) | 27,27 |
| 7 | Nilai Tukar Petani/NTP | 105-108 |
| 8 | Nilai Tukar Nelayan/NTN | 107-110 |

Sumber: Rancangan Sasaran RKP 2024

Selanjutnya besaran target pembangunan Kalimantan Timur pada RKP 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4
Target RKP Tahun 2024 untuk Kalimantan Timur

| No | Sasaran | Target 2024 |
|----|----------------------------------|-------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,1-5,6 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan (%) | 3,5-4,00 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,7-5,4 |

Sumber: Rancangan Awal RKP 2024, 2023

Penetapan target makro Kalimantan Timur dalam RKP 2024 merupakan target dengan *range* angka yang optimis, oleh karena itu dalam pencapaian target makro tersebut perlu didorong terutama oleh adanya pengembangan komoditas unggulan pertanian dalam arti luas seperti sawit, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, perikanan budidaya serta perbaikan harga komoditas minyak, gas bumi serta batubara di pasar internasional. Selain itu pula, dorongan untuk melakukan hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan pertambangan juga terus dilakukan dan ditambah lagi kaitannya dengan proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur juga merupakan bagian dari faktor pendorong pencapaian target pembangunan yang ditetapkan.

4.2.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2024

Isu strategis merupakan persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Secara metodologis, isu ini disusun berdasarkan analisis situasi capaian pembangunan dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang.

Perumusan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2023, arah kebijakan dari RPD dan arah kebijakan RKP. Proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.5
Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|---|--|--|--|--|
| <p>1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan</p> | <p>1. Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus</p> <p>2. Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus</p> <p>3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan</p> <p>4. Optimalisasi <i>Boarding School</i></p> <p>5. Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu</p> <p>6. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>7. Peningkatan literasi dan numerasi</p> <p>8. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar</p> | <p>1. Belum terpenuhi USB untuk wilayah yang telah perhitungkan dengan banyak jumlah penduduk usia sekolah di wilayah tersebut dan ketersediaan sekolah dasar di wilayah tersebut</p> <p>2. Belum terpenuhi salah satu indikator pemenuhan standar pelayanan minimal untuk sekolah menengah yaitu pemenuhan ruang kelas untuk sekolah yang kekurangan ruang kelas baru sehingga ketimpangan antara jumlah rombel dan ruang kelas dapat terpenuhi</p> <p>3. Keterbatasan SDM, yakni:</p> <p>1) Belum semua Puskesmas memiliki tenaga profesi gizi</p> <p>2) Belum semua Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas terlatih dalam Tata Laksana Gizi Buruk, Konselor ASI & MP-ASI dan PMBA, dan Pemantauan Pertumbuhan Balita</p> | <p>1. Relatif tingginya tingkat kemiskinan</p> <p>2. Masih adanya ketimpangan pendapatan</p> <p>3. Potensi Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>4. Masih rendahnya reformasi birokrasi</p> | <p>Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)</p> |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|---|---|--|--|
| | <p>9. Percepatan perbaikan gizi masyarakat</p> <p>10. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi</p> <p>11. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta</p> <p>12. pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat</p> <p>13. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</p> <p>14. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen fasyankes maupun fasilitasnya</p> <p>15. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</p> <p>16. Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan</p> <p>17. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan</p> <p>18. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja</p> <p>19. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri</p> | <p>4. Keterbatasan sarana dan alat bantu kerja TPG Puskesmas:</p> <p>1) Masih banyak dijumpai TPG Puskesmas tidak memiliki ruang kerja, meja dan kursi kerja</p> <p>2) Belum semua TPG Puskesmas/Puskesmas memiliki alat bantu kerja untuk media KIE (buku panduan, food model & lembar balik, konseling kit, dll)</p> <p>5. Keterbatasan obat dan logistik program perbaikan gizi:</p> <p>1) Belum semua kabupaten/kota mampu memenuhi kewajibannya untuk mencukupi ketersediaan obat dan logistik gizi seperti MP-ASI, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Anak Sekolah, Fe bagi Ibu Hamil maupun bagi Remaja Putri, Vitamin A biru (100.000 IU) dan Vitamin A merah (200.000 IU), Mineral Mix, Taburia, Iodium test, dll sehingga Provinsi yang awalnya berfungsi hanya sebagai <i>bufferstock</i></p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--|---|--|--|
| | <p>20. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja</p> <p>21. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan</p> <p>22. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja</p> <p>23. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi</p> <p>24. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan</p> <p>25. Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik</p> <p>26. Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan</p> | <p>mengalami kekurangan dalam pendistribusian obat</p> <p>6. Kematian Ibu penyebab terbesar adalah karena perdarahan, Usia ibu pada saat hamil, jarak kehamilan, penyakit yang diderita ibu pada saat kehamilan, nutrisi ibu selama hamil dan nifas.</p> <p>7. Penyebab kematian bayi terbesar disebabkan oleh bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram (BBLR) dan Asfeksia. BBLR dan Asfeksia dapat disebabkan karena nutrisi ibu hamil yang kurang baik selama kehamilan.</p> <p>8. Masih cukup tingginya kematian akibat penyakit menular dan tidak menular</p> <p>9. Belum optimalnya sosialisasi dan aksi pencegahan penyakit</p> <p>10. Pola hidup masyarakat yang belum menerapkan hidup bersih dan sehat, antara lain kurang aktivitas fisik, kurang mengonsumsi buah dan sayur, sering minum alkohol, merokok,</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>dan buang air besar di sembarang tempat.</p> <p>11. Jumlah rumah sakit yang ada di wilayah IKN masih kurang.</p> <p>12. Masih kurangnya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diinginkan.</p> <p>13. Minat dokter spesialis yang mendaftar di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan masih kurang</p> <p>14. Belum adanya ruang perawatan khusus ibu dan anak</p> <p>15. Realisasi TW III masih rendah karena terhambat belum terkumpulnya semua sertifikat hasil pelatihan yang sudah dilaksanakan di semua bidang</p> <p>16. Anggaran yang kurang di APBD sehingga dibantu dengan dana BLUD.</p> <p>17. Adanya pandemi COVID - 19 yang berdampak pelaksanaan Bimtek dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai tidak dapat tercapai sesuai target.</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>18. Penilaian kinerja pegawai belum optimal</p> <p>19. Pembayaran tunai masih menggunakan perhitungan <i>fee for service</i> dan untuk BPJS menyesuaikan</p> <p>20. Masih adanya usulan kebutuhan yang belum diakomodir oleh karena alokasi anggaran yang tidak mencukupi</p> <p>21. Tingginya permintaan diluar perencanaan (bersifat Cito)</p> <p>22. Pelaksanaan sistem <i>Inventory</i> belum maksimal</p> <p>23. Kurang optimalnya sistem evaluasi dan pelaporan kinerja sesuai rencana aksi dari unit /bidang/ instalasi sehingga proses kompilasi data terhambat</p> <p>24. Belum ada sistem aplikasi yang terintegrasi mulai proses pengusulan perencanaan sampai proses evaluasi realisasi capaian kinerja</p> <p>25. Sumber Pendapatan RS tahun 2022 > 75 % bersumber BPJS</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>26. Tim Case mix di internal RS belum optimal karena tergantung laporan dari unit / instalasi</p> <p>27. Regulasi tentang tarif belum <i>update</i></p> <p>28. <i>Monev</i> KSO alat kesehatan belum optimal</p> <p>29. Kurang optimalnya penghitungan unit <i>cost</i> di RS</p> <p>30. Kepatuhan klinisi terhadap penggunaan obat Fornas dan Forkit masih rendah</p> <p>31. Sistem pendaftaran <i>online</i> yang belum semua terintegrasi</p> <p>32. Tingginya jumlah kunjungan pasien poliklinik dan rujukan pasien ke RS</p> <p>33. RS belum mengoptimalkan sistem e- Rekam Medik</p> <p>34. Kompetensi dan <i>soft skill</i> petugas pemberi layanan kesehatan yang kurang</p> <p>35. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan dan penunjangnya</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>36. Belum optimalnya kerja sama operasional alat dengan pihak ketiga</p> <p>37. Banyak alat yang rusak karena utilitas yang tinggi sebagai RS Rujukan Nasional dan kurangnya <i>maintenance</i></p> <p>38. Lemahnya perencanaan yang dilakukan dari unit/ instalasi</p> <p>39. Beban anggaran untuk pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan canggih yang tinggi</p> <p>40. Evaluasi tingkat utilisasi alat yang kurang optimal</p> <p>41. Jadwal kalibrasi alat menyesuaikan dengan jadwal dari pusat</p> <p>42. Belum adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kontrak <i>service</i> alat kedokteran canggih</p> <p>43. Kurangnya anggaran untuk pelatihan bagi SDM dengan target 20 jam /tahun/orang</p> <p>44. Masih ada usulan pelatihan dari instalasi dan unit yang belum terakomodir</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>45. Pemanfaatan tenaga terlatih yang belum optimal</p> <p>46. Supervisi DPJP/Provider layanan terhadap anak didik masih lemah</p> <p>47. Lemahnya integrasi pelayanan dan institusi pendidikan</p> <p>48. Kurang optimalnya dukungan dari institusi kesehatan terhadap penyelenggaraan pendidikan di RS</p> <p>49. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kerja sama belum optimal</p> <p>50. Pelaksanaan rekrutmen kerja sama perlu <i>update</i> sesuai aturan / regulasi</p> <p>51. Kompetensi petugas dalam membangun jejaring belum optimal</p> <p>52. Ketersediaan sarana pendukung PKRS</p> <p>53. melaksanakan sosialisasi tentang program pengurangan angka pengangguran kepada perusahaan dan pencari kerja. Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi. Melaksanakan</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>seminar terkait keminatan terkait keminatan dan persiapan untuk pencari kerja terhadap pasar kerja</p> <p>54. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di Provinsi Kalimantan Timur mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dalam tahapan pembangunan.</p> <p>55. Kurangnya komitmen Kepala Daerah dan para pengambil kebijakan dalam implementasi PUG bidang politik, hukum, sosial-budaya, dan ekonomi, meliputi penerapan kuota perempuan 30% di legislatif, harmonisasi peraturan yang bias gender, perlindungan anak, perlindungan perempuan, serta pengembangan UMKM, UPPKS, dll.</p> <p>56. Lembaga PUG belum berperan sesuai tugas fungsi</p> <p>57. Tugas kewenangan DKP3A dalam meningkatkan keberhasilan</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>program pendapatan perempuan tidak secara langsung, namun di tentukan oleh komitmen lintas sektor lainnya</p> <p>58. Perhitungan Data Korban Kekerasan melalui <i>online</i> (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan</p> <p>59. Belum optimalnya fungsi koordinasi Forkomda. PATBM, PUSPA bagi perlindungan perempuan dan anak.</p> <p>60. Belum terbentuknya sistem informasi data gender dan anak (data pilah) yang aktif</p> <p>61. Masih kurangnya peluang usaha sesuai dengan tuntutan zaman bagi pemuda Kaltim dalam mendukung IKN</p> <p>62. Perilaku generasi muda yang menjurus kepada pengguna/pengedar NAPZA dan Kriminal Remaja</p> <p>63. Masih Kurangnya kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan (kepemimpinan,</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>kewirausahaan dan kepeloporan) pemuda</p> <p>64. Masih lemahnya kualitas SDM yang menangani ke Olahraga sehingga beberapa prestasi atlet pada event event Olahraga seperti PON dan Seagames cenderung menurun dari tahun ke tahun</p> <p>65. Kurangnya pengetahuan masyarakat arti pentingnya olahraga bagi Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup</p> <p>66. Pembina, Pengurus, pelatih dan Insan Olahraga kurang Profesional baik ditingkat Provinsi, Kab/Kota serta Klub Cabor</p> <p>67. Terbatasnya ruangan baca pagi pengunjung <i>onsite</i></p> <p>68. Daya tampung gedung yang semakin sempit dengan adanya penambahan koleksi terbaru sehingga ruang baca bagi pengunjung menjadi terbatas</p> <p>69. Kondisi Gedung perpustakaan yang sering terdampak banjir</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|--|---|---|--|---|
| | | manakala hujan, sehingga dipandang perlu untuk relokasi gedung perpustakaan yang lebih representatif | | |
| <p>2. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem</p> <p>3. Penguatan Daya Saing Usaha</p> <p>4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan</p> <p>5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas</p> <p>6. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara</p> | <p>1. Peningkatan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, dan non-agro yang terintegrasi hulu-hilir</p> <p>2. Peningkatan Strategi Promosi dan kegiatan Promosi di Kawasan industri</p> <p>3. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di Kawasan industri</p> <p>4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital</p> <p>5. Peningkatan SDM UKM/IKM untuk tumbuh menjadi eksportir</p> <p>6. Peningkatan dukungan kemudahan pengurusan ekspor dan kemudahan memperoleh pinjaman bagi UKM/IKM</p> <p>7. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang</p> | <p>1. Kualitas jaringan jalan provinsi belum optimal yang ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kerusakan jalan</p> <p>2. Masih banyak kendaraan yang melebihi kapasitas jalan</p> <p>3. Kelengkapan fasilitas jalan belum memadai</p> <p>4. Kelas Jalan belum sesuai dengan peruntukan</p> <p>5. Masih terdapat daerah minim aksesibilitas dan konektivitas</p> <p>6. Sistem jaringan jalan belum tertata dengan baik</p> <p>7. Belum optimalnya sinkronisasi fungsi jalan</p> <p>8. Belum lengkapnya bukti syah kepemilikan lahan</p> <p>9. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan</p> <p>10. Belum terdapat fasilitas keselamatan jalan di beberapa ruas jalan</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif • Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|---|--|--|--|
| | <p>didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata</p> <p>8. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan</p> <p>9. Pemberian akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan dan peningkatan kapasitas usaha kelompok masyarakat, serta peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan.</p> <p>10. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perkebunan</p> <p>11. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan</p> <p>12. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak</p> <p>13. Penguatan kelembagaan peternakan</p> <p>14. Peningkatan produksi perikanan</p> <p>15. Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan</p> <p>16. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura</p> | <p>11. Regulasi terkait kewenangan pemasangan fasilitas jalan</p> <p>12. Koordinasi antar <i>stakeholders</i> belum maksimal</p> <p>13. Geometrik Jalan yang belum sesuai</p> <p>14. Keterampilan Pengemudi yang belum memadai</p> <p>15. Kondisi kendaraan yang tidak layak</p> <p>16. Prasarana transportasi seperti terminal dan pelabuhan belum memadai</p> <p>17. Sarana dan prasarana transportasi belum optimal</p> <p>18. Regulasi terkait pembangunan dan pengelolaan prasarana transportasi belum terlaksana dengan baik</p> <p>19. Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi massal masih rendah</p> <p>20. Belum terbangunnya jaringan irigasi teknis</p> <p>21. Ketersediaan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi belum memadai</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--|--|--|--|
| | <p>17. Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian</p> <p>18. Peningkatan iklim usaha dan investasi</p> <p>19. Peningkatan Kualitas pelaksanaan investasi berbasis Online Single System (OSS)</p> <p>20. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar</p> <p>21. Peningkatan keberfungsian sosial PPKS</p> <p>22. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan</p> <p>23. Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial</p> <p>24. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi</p> <p>25. Peningkatan Daya Saing UMKM</p> | <p>22. Belum terbangunnya bendung/embung</p> <p>23. Terbatasnya sumber air baku</p> <p>24. Belum sinkronnya strategi dan arah kebijakan pembangunan antara sektor pertanian dan pekerjaan umum (pengairan)</p> <p>25. Kurangnya data dan informasi lahan pertanian eksisting</p> <p>26. Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam pemenuhan jaringan irigasi</p> <p>27. Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan kegiatan OP</p> <p>28. Belum terbangunnya pengendali banjir</p> <p>29. Masalah sosial dan lahan</p> <p>30. Masih rendahnya implementasi dokumen pola dan rencana pengelolaan DAS</p> <p>31. Belum optimalnya sistem pengendali banjir</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--|--|--|--|
| | <p>26. Pemberdayaan perempuan kepala keluarga untuk kemandirian berusaha</p> <p>27. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</p> <p>28. Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa</p> <p>29. Peningkatan penataan permukiman kumuh dan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak</p> <p>30. Peningkatan Pelayanan Jalan Provinsi</p> <p>31. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan provinsi</p> <p>32. Pembangunan Jalan pada kawasan pertumbuhan ekonomi</p> <p>33. Peningkatan pelayanan terminal tipe B</p> <p>34. Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan ketersediaan air</p> | <p>32. Pendangkalan dan penyempitan sungai serta bangunan pengendali</p> <p>33. Sistem drainase dan sarana pendukungnya yang belum berfungsi baik</p> <p>34. Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan kegiatan OP</p> <p>35. Masih rendahnya infrastruktur penanganan pantai kritis</p> <p>36. Belum optimalnya penanganan pantai kritis</p> <p>37. Belum terbangunnya infrastruktur penanganan pantai kritis</p> <p>38. Terjadinya pergeseran garis pantai akibat abrasi</p> <p>39. Belum selesainya RTRWN</p> <p>40. Belum selesainya RTRWP</p> <p>41. Belum selesainya RTRWK/K dan RDTR</p> <p>42. Belum optimal sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|---|--|--|--|
| | <p>35. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir</p> <p>36. Peningkatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi</p> <p>37. Peningkatan kualitas dan cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)</p> <p>38. Perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan perbatasan, terluar, dan terpencil</p> <p>39. Penguatan distribusi barang khususnya komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan</p> <p>40. Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik</p> <p>41. Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang</p> <p>42. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah</p> <p>43. Pengimplementasian kebijakan satu peta</p> | <p>43. RTR belum sepenuhnya menjadi acuan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah</p> <p>44. Terdapat beberapa dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan</p> <p>45. Masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pemanfaatan ruang</p> <p>46. Belum memiliki kelembagaan pengelolaan SPAM Regional</p> <p>47. Terdapat kabupaten/kota yang kekurangan sumber suplai air baku yang handal untuk air minum, baik dari sisi kuantitas, kontinuitas, dan kualitas</p> <p>48. Belum tersedianya prasarana yang memberikan layanan air minum curah lintas Kab/Kota</p> <p>49. Keterbatasan kewenangan pemerintah provinsi untuk mencapai akses universal (100%) air minum layak</p> <p>50. Kondisi geografis dan pemusatan penduduk yang sporadis menyebabkan penyediaan</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>layanan air minum dengan sistem regional tidak efisien untuk dilakukan</p> <p>51. Penanganan air minum masih difokuskan untuk akses layak universal</p> <p>52. Tingkat pelayanan air limbah terpusat sangat rendah</p> <p>53. Belum tersedianya prasarana pengolahan air limbah domestik skala regional</p> <p>54. Pengelolaan air limbah domestik skala regional di Kaltim hanya mampu menangani 110 Desa/kelurahan dari 841 Desa/kelurahan.</p> <p>55. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (pada sumber, Tempat Penampungan Sementara/TPS, Tempat Pemrosesan Akhir/TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir)</p> <p>56. Capaian akses penanganan sampah domestik baru mencapai 71,68%</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>57. Belum tersedia pengelolaan persampahan yang berorientasi 3R (dari hulu ke hilir).</p> <p>58. Perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan serta belum ada kesadaran dalam mengurangi dan memilah sampah atau <i>Reuse, Reduce</i> dan <i>Recycle</i> (3R);</p> <p>59. Masih terdapat kawasan kumuh yang perlu perhatian Pemerintah Provinsi</p> <p>60. Sebagian besar rumah di kawasan kumuh berada di kawasan bantaran sungai - biasanya lahan merupakan milik pemerintah - warganya tidak memiliki sertifikat</p> <p>61. <i>Update</i> SK Kumuh terjadi ditengah tahun pelaksanaan jangka menengah daerah sehingga mengganggu perhitungan capaian</p> <p>62. Penanganan belum tepat sasaran - pelaksanaan penanganan kumuh bukan merupakan bagian dari aspek kumuh yang</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>dapat mengurangi skor kekumuhan</p> <p>63. Penguasaan lahan telah lebih dahulu daripada penetapan rencana tata ruang</p> <p>64. Penguasaan lahan oleh masyarakat tanpa bukti kepemilikan yang syah</p> <p>65. Ketidakjelasan kriteria penentuan luasan untuk klasifikasi kewenangan</p> <p>66. Proses Pendataan yang belum sempurna</p> <p>67. Keterbatasan finansial warga untuk membeli atau membangun rumah yang layak huni</p> <p>68. Penerapan SPM Perumahan dapat dipenuhi pasca terjadinya bencana (setelah ada penetapan bencana provinsi). Hanya bisa dilakukan tahap-tahap sebelumnya</p> <p>69. Masih terdapat warga yang tinggal di wilayah rawan bencana</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>70. Terdapat warga yang berpotensi terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi</p> <p>71. Belum tersedianya data detail terkait rencana penanganan rumah untuk korban bencana tingkat provinsi</p> <p>72. Belum tersedianya data detail terkait rencana penanganan rumah untuk warga yang terkena relokasi program pemerintah</p> <p>73. Rencana perpindahan Ibukota Negara menuju Kalimantan Timur secara langsung berdampak bagi penambahan penduduk sehingga akan memunculkan permasalahan baru yaitu bertambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p> <p>74. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi Kaltim</p> <p>75. Terdapat <i>Blank Spot</i> di beberapa Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur hal ini</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>menyebabkan keterlambatan dalam meng-update data pada daerah yang bersangkutan.</p> <p>76. Belum Optimalnya Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur dalam proses perencanaan dan Implementasi penanganan Program-program Kesejahteraan Sosial</p> <p>77. Belum meratanya kualitas pembangunan wilayah perdesaan</p> <p>78. Masih terbatasnya pengembangan ekonomi perdesaan bumdes</p> <p>79. Kompetensi SDA desa dan anggota BPD rata-rata masih rendah, jumlah perangkat sebagian desa belum terpenuhi, prasarana dan sarana pemdes dan kelurahan belum memadai</p> <p>80. Masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat</p> <p>81. Masih terbatasnya potensi desa pada pembangunan kawasan</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>perdesaan, masih terbatasnya pengembangan lembaga masyarakat seperti BKAD dan BUMADES</p> <p>82. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim</p> <p>83. Belum optimalnya kinerja kelembagaan koperasi</p> <p>84. Rendahnya Kualitas SDM Koperasi</p> <p>85. Lemahnya sistem pengawasan koperasi</p> <p>86. Minimnya pelaku UKM dalam pemanfaatan pemasaran digital</p> <p>87. Menurunnya aktivitas ekonomi UKM semasa Pandemi COVID-19</p> <p>88. Rendahnya daya saing produk UKM</p> <p>89. Kurangnya informasi permodalan UKM dalam menjalankan usahanya</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>90. Belum terintegrasinya Promosi Investasi yang dilakukan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>91. Belum optimal layanan yang diberikan karena masih terbatasnya SDM</p> <p>92. Masih kurangnya ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi</p> <p>93. Belum optimalnya komitmen perizinan</p> <p>94. Belum efektifnya pengawasan perizinan penanaman modal</p> <p>95. Terbatasnya prasarana saluran irigasi</p> <p>96. Supply ketersediaan benih udang/ikan yang dihasilkan oleh UPTD Balai</p> <p>97. Benih Udang/Ikan belum optimal</p> <p>98. Rendahnya kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit</p> <p>99. Belum optimalnya penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>100. Bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan</p> <p>101. Struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil</p> <p>102. Penyaluran BBM subsidi untuk nelayan masih belum optimal</p> <p>103. Sulitnya mendapatkan data kapal dan</p> <p>104. data operasional yang valid</p> <p>105. Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor kelautan</p> <p>106. dan perikanan</p> <p>107. Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern</p> <p>108. Masih banyaknya Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil perikanan yang</p> <p>109. belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)</p> <p>110. Minimnya kerja sama bidang usaha perikanan</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>111. Inovasi peningkatan produk hasil perikanan belum berkembang</p> <p>112. Mutu produk hasil perikanan yang masih rendah</p> <p>113. Tenaga pendamping perikanan belum diberdayakan secara optimal</p> <p>114. Tindak lanjut hasil koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan sektor pariwisata belum optimal</p> <p>115. Belum maksimalnya kerja sama dan sinergitas antara <i>stakeholder</i> pariwisata (mitra kerja, kab/kota, dll)</p> <p>116. Belum dimaksimalkannya potensi pelaku ekonomi kreatif sebagai bagian dari atraksi yang bisa dinikmati wisatawan.</p> <p>117. Belum optimalnya data sub sektor ekonomi kreatif.</p> <p>118. Belum tersedianya pusat kegiatan kreatif tingkat Provinsi</p> <p>119. Belum optimalnya perlindungan terhadap hasil karya pelaku ekraf</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>120. Belum optimalnya pengembangan sub sektor ekraf.</p> <p>121. Belum fokus pada nilai kekhasan daerah dalam pengembangan potensi ekraf.</p> <p>122. Belum terbangunnya sebuah destinasi wisata unggulan yang siap jual secara utuh serta Belum dibangun secara maksimal ketersediaan sarpras pendukung untuk kenyamanan wisatawan seperti infrastruktur dasar Jalan lingkungan, jaringan air minum, dan listrik, juga permasalahan utiliti dasar seperti telekomunikasi, toilet, pedestrian, pengelolaan limbah/ sampah. Amenitas lainnya yang belum diintegrasikan adalah sarana kesehatan, perbankan, pasar dan lain-lain</p> <p>123. Kurangnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif didalam pengembangan usaha serta belum optimalnya kemitraan</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>untuk pengembangan kapasitas SDM Pariwisata dan ekraf</p> <p>124. Teknologi pertanian yang belum dilakukan secara modern</p> <p>125. Alih fungsi lahan pertanian</p> <p>126. terbatasnya jalan usaha tani dan jalan produksi</p> <p>127. kurangnya jaringan irigasi</p> <p>128. Ketersediaan bibit ternak lokal masih kurang</p> <p>129. manajemen perkawinan ternak belum optimal</p> <p>130. Keterbatasan lahan usaha peternakan</p> <p>131. Penataan kawasan peternakan belum optimal</p> <p>132. Ketersediaan pakan ternak berkualitas masih kurang</p> <p>133. Hilirisasi dan industrialisasi produk peternakan masih rendah</p> <p>134. Manajemen pemasaran produk peternakan belum optimal</p> <p>135. Keterbatasan permodalan</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>136. Infrastruktur jalan di areal perkebunan yang tidak memadai</p> <p>137. Kesulitan dalam mendapatkan saprodi</p> <p>138. Penggunaan benih yang ilegal</p> <p>139. Praktek budidaya yang tidak tepat</p> <p>140. Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi pekebun</p> <p>141. Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS</p> <p>142. Tidak kontinu dan tidak padunya proses fasilitasi dan pendampingan kegiatan hulu hilir usaha perkebunan</p> <p>143. Rendahnya kualitas olahan hasil</p> <p>144. perkebunan dan produk olahan yang dihasilkan tidak berorientasi pasar</p> <p>145. Rantai pemasaran produk perkebunan yang panjang</p> <p>146. Belum terpenuhinya alat dan mesin pengolahan hasil</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>perkebunan sehingga dalam mengolah hasil perkebunan masih menggunakan alat dan mesin manual/ sederhana</p> <p>147. Kurangnya sosialisasi dan</p> <p>148. pengenalan produk-produk olahan dan pemasaran komoditi perkebunan kepada petani pekebun yang ada di Kabupaten/ Kota</p> <p>149. Kawasan agro industri dan infrastruktur pendukungnya belum dikembangkan dengan baik</p> <p>150. Terbatasnya Ekspor Komoditi dan Produk Non Migas Non Batubara</p> <p>151. Belum Optimalnya Pemanfaatan/Peluang Ekspor Langsung di Kalimantan Timur</p> <p>152. Terbatasnya Jangkauan Pemasaran Komoditi dan Produk Ekspor</p> <p>153. Minimnya Produksi dan Sarana Distribusi Bahan Pokok</p> <p>154. Belum Optimalnya Fasilitas Sistem Distribusi Perdagangan</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|--|---|--|--|---|
| | | 155. Belum Optimalnya Kerja sama Perdagangan 156. Belum memadainya infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang termasuk konektivitas antar wilayah 157. Terbatasnya sumber daya manusia industri 158. Kelembagaan industri belum efektif 159. Minimnya pembinaan pengembangan 160. wirausaha industri kecil mikro. | | |
| 7. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi | 1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Pengendalian pencemaran air 3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut 4. Pengendalian pencemaran udara 5. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan dan hutan 6. Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 1. Belum optimalnya penyusunan kajian dan implementasi RPPLH dan KLHS 2. Belum jelasnya teknis kajian dampak lingkungan hidup. 3. Masih rendahnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi para pihak terhadap upaya pemeliharaan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati. | | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas lingkungan hidup |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 7. Pemeliharaan dan Perlindungan Wilayah-Wilayah Penyedia Jasa LH 8. Penurunan Deforestasi dan Degradasi Hutan 9. Pengelolaan Hutan Lestari Berkelanjutan 10. Peningkatan Peranan Konservasi Hutan 11. Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) 12. Rehabilitasi Kawasan Hutan (Regenerasi/tanpa penebangan) 13. Rehabilitasi Hutan Produksi dan Lahan (Dengan Rotasi) 14. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 15. Peningkatan pengelolaan DAS 16. Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan 17. Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan 18. Pemanfaatan limbah industri pertanian dan kehutanan sebagai sumber energi secara terintegrasi dengan industrinya | <ul style="list-style-type: none"> 4. Minimnya Pendanaan untuk program kegiatan prioritas 5. Perubahan pada Metode Perhitungan IKLH dan validasi Nilai IKLH 6. Jumlah Pengawas LH dengan izin usaha yang diawasi belum sebanding (kekurangan SDM) 7. Jumlah dana untuk kegiatan pengawasan tidak sebanding dengan target yang wajib diawasi 8. Belum optimalnya kegiatan penanganan sampah di wilayah lintas kabupaten/kota serta pesisir dan laut 9. Masih terbatasnya ketersediaan data pengelolaan B3 dan Limbah B3 serta kurangnya fasilitas pengelolaan Limbah B3 10. Belum tersedianya prasarana dan sarana penanganan sampah di lintas kab/kota 11. Belum ditetapkannya lokasi TPA/TPST regional 12. Terbatasnya kewenangan Provinsi dalam Penanganan Sampah | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--|--|--|--|
| | <p>19. Pengembangan dan pemanfaatan biodiesel sebagai upaya untuk mengurangi emisi GRK dan meningkatkan ekonomi masyarakat.</p> <p>20. Pengembangan energi surya mencakup pemanfaatan PLTS di perdesaan dan perkotaan</p> <p>21. Pengembangan infrastruktur EBT</p> <p>22. Peningkatan kerja sama dalam pengelolaan EBT</p> <p>23. Peningkatan edukasi kepada para pihak terutama masyarakat untuk penerapan EBT</p> | <p>khususnya penyediaan sarana dan prasarana</p> <p>13. Tidak terserapnya anggaran secara maksimal, karena kendala teknis administrasi penganggaran (seperti Dana POKIR)</p> <p>14. Belum ditetapkannya lokasi rencana pembangunan insinerator</p> <p>15. Masih pada tahap proses penyusunan Peraturan Gubernur sebagai instrumen untuk dasar pengukuran merkuri.</p> <p>16. Belum maksimalnya frekuensi dan titik pemantauan lingkungan</p> <p>17. Belum adanya penetapan alokasi beban pencemar pada badan air</p> <p>18. Belum adanya penetapan wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara</p> <p>19. Masih tingginya tingkat kerusakan lahan, danau dan gambut</p> <p>20. Panjangnya Alur Proses Mekanisme dalam Pemulihan Kerusakan Lingkungan</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>21. Perubahan metode perhitungan IKLH dan validasi nilai IKLH</p> <p>22. Kurangnya Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan kabupaten/kota, terkait data lingkungan</p> <p>23. Tidak sinkronnya data antara OPD terkait</p> <p>24. Minimnya pendanaan untuk program kegiatan prioritas</p> <p>25. Panjangnya alur proses mekanisme dalam pemulihan kerusakan lingkungan</p> <p>26. Adanya aturan yang tidak selaras</p> <p>27. Meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</p> <p>28. Meningkatnya pelaku usaha yang harus diawasi</p> <p>29. Kurangnya pemahaman lembaga masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lh</p> <p>30. Adanya aturan yang tidak selaras</p> <p>31. Sarana dan prasarana penunjang (kendaraan lapangan medan</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>berat, APD, peralatan sampling in situ, drone, handy talky, dll) untuk pelaksanaan verifikasi kelengkapan tidak/kurang memadai.</p> <p>32. Jumlah SDM masih kurang</p> <p>33. Kualitas SDM perlu ditingkatkan</p> <p>34. Kurangnya Tenaga Anggota Personil di Lapangan dan Ketersediaannya Sarana dan Prasarana</p> <p>35. Kurangnya Jumlah Tenaga PPNS dan Kurang Berminatnya ASN Sarjana S1 Kurang Berminat Menjadi PPNS</p> <p>36. PPNS masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya</p> <p>37. Belum aktif dalam menghimpun laporan kebencanaan kebakaran</p> <p>38. Kurang diresponnya Permintaan Data Daerah Rawan Bencana Kebakaran</p> <p>39. Rendahnya tata kelola dan fasilitasi hubungan kerja sama antar Lembaga, Mitra dan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>hutan dan lahan di wilayah provinsi</p> <p>40. Rendahnya Penanggulangan pada Tingkat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pelayanan Kedaruratan dan Logistik serta pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <p>41. Rendahnya kualitas SDM aparatur</p> <p>42. Minimnya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>43. Rendahnya tata kelola dan fasilitasi hubungan kerja sama antar Lembaga, Mitra dan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi</p> <p>44. Rendahnya Penanggulangan karhutla pada Tingkat Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pemadaman, dan penanganan Pasca Karhutla</p> <p>45. Rendahnya kualitas maupun Kuantitas SDM aparatur</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>46. Minimnya Sarana dan Prasarana Karhutla</p> <p>47. Rendahnya Sistem Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Karhutla</p> <p>48. Rendahnya Tingkat penyidikan kejadian karhutla</p> <p>49. Kendala dalam pemerataan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik.</p> <p>50. Kendala masyarakat tidak mampu dalam membiayai pemasangan instalasi dan penyambungan listrik PLN.</p> <p>51. Belum optimalnya pembinaan, Pengawasan dan kerja sama Pemerintah, PLN dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.</p> <p>52. Teknologi pemanfaatan limbah ternak untuk diolah menjadi biogas masih relatif agak tinggi dari segi biaya</p> <p>53. Pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan limbah ternak untuk diolah menjadi biogas masih terbatas</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>54. Sebagian hewan ternak tidak dikandangkan</p> <p>55. Belum tersedianya informasi kehutanan berbasis data di tingkat tapak</p> <p>56. Belum optimalnya inovasi, diversifikasi dan dukungan regulasi terhadap produk dari kawasan hutan</p> <p>57. kurangnya pengawasan terhadap pemegang izin usaha di kawasan hutan produksi baik hulu dan hilir serta terhadap penatausahaan hasil hutan</p> <p>58. Curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun, yang berakibat kepada terganggunya kegiatan produksi kayu.</p> <p>59. Biaya operasional produksi kayu yang meningkat karena naiknya harga BBM, diikuti dengan kenaikan biaya <i>sparepart</i> dan biaya perawatan kendaraan, sementara harga jual produksi kayu bulat tidak naik signifikan, malah cenderung turun pada</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>beberapa bulan menjelang akhir tahun 2022.</p> <p>60. Lesunya permintaan pasar dunia (ekspor) terhadap produk-produk olahan kayu terutama dari negara eropa pada beberapa bulan terakhir (yang sedang menghadapi musim gugur di bulan September hingga November).</p> <p>61. Belum optimalnya kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan</p> <p>62. Masih tingginya luas kebakaran hutan dan lahan</p> <p>63. Masih kurangnya kawasan bernilai konservasi tinggi</p> <p>64. Jumlah personil Polisi Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api masih belum memadai.</p> <p>65. Belum optimalnya kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</p> <p>66. Belum optimalnya kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>67. Belum optimalnya pengelolaan perbenihan tanaman hutan yang berkualitas</p> <p>68. Penanaman yang dilakukan mitra kerja tidak dilakukan berbarengan, sehingga pelaporan tidak bersamaan</p> <p>69. Rendahnya kapasitas dan kompetensi petugas/penyuluh kehutanan</p> <p>70. Belum optimalnya kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan/atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), atau Kemitraan di dalam dan sekitar kawasan hutan</p> <p>71. Belum optimalnya peran Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan/atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Hutan Hak dan Hutan Adat di dalam dan sekitar kawasan hutan.</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|----------------------------|---|--|--|---|
| | | 72. Tata Waktu Penerbitan SK Persetujuan dari KLHK Yang belum Terukur 73. Lokasi PIAPS Relatif Jauh Dari Pemukiman | | |
| 8. Pelaksanaan Pemilu 2024 | 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT 2. Perubahan <i>Mindset</i> dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi 3. Deregulasi Kebijakan 4. Penyederhanaan Organisasi 5. Perbaikan Tata Laksana 6. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur 7. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan 8. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran 9. Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah 10. Peningkatan kinerja perangkat daerah dan aparatur 11. Penguatan Pengawasan | 1. Masih terdapat inkonsistensi perencanaan dan penganggaran 2. Belum terintegrasinya program kegiatan antar sektor/bidang pembangunan baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota 3. Perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya 4. Keterbatasan data Bidang kominformasi/TIK yang dibutuhkan untuk proses analisis perencanaan pembangunan TIK 5. Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid 6. Keterbatasan SDM analisis data dan informasi | | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|---|--|--|--|
| | <p>12. Optimalisasi kerja sama daerah yang sinergi dengan pembangunan IKN</p> | <p>7. Proses pembaharuan data pada aplikasi yang kurang cepat</p> <p>8. Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara <i>online</i> karena aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi</p> <p>9. Masalah ada perbedaan persepsi terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintahan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020</p> <p>10. Belum maksimalnya koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat di Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota</p> <p>11. Belum tersedianya data dan informasi yang terpadu di bidang kesejahteraan rakyat dengan baik.</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>12. Kerja sama belum dianggap sektor yang strategis dalam pembangunan, terlihat dari terbatasnya anggaran Bagian Kerja sama dan Sumber Daya Aparatur yang menangani kurang sesuai pendidikannya, dan belum dibekali dengan Diklat dan Bimtek yang mumpuni.</p> <p>13. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam menelaah Produk Hukum.</p> <p>14. Konsep atau Draft Produk Hukum yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Perundang-Undangan</p> <p>15. Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah.</p> <p>16. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.</p> <p>17. Belum diterapkannya kebijakan pengadaan barang dan jasa</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>18. Belum ditaatinya kode etik pengadaan barang dan jasa</p> <p>19. Belum di terapkannya prinsip pengadaan barang dan jasa</p> <p>20. Rendahnya kualitas data dan informasi terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah</p> <p>21. Rendahnya kualitas data dan informasi terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah</p> <p>22. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja</p> <p>23. Belum Optimalnya Penerapan</p> <p>24. SAKIP, khususnya Penerapan <i>Cascading</i> dan Rencana Aksi Pada Setda</p> <p>25. Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) belum optimal</p> <p>26. Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) belum optimal</p> <p>27. Pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan sebenarnya</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>sudah sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi kadang-kadang di lapangan masih ditemui beberapa kendala misalnya bahan untuk rapat anggota dewan masih menunggu dari instansi lain, sehingga pelayanan juga agak terhambat</p> <p>28. Pelayanan pada masa reses, sosper dan sosbang masih belum optimal</p> <p>29. Minimnya pemahaman SDM terkait prosedur administrasi keuangan</p> <p>30. Kegiatan anggota DPRD belum diinformasikan kepada media cetak maupun media elektronik sehingga masyarakat bisa mengetahui kegiatan anggota DPRD</p> <p>31. Belum optimalnya Perencanaan,</p> <p>32. Pengembangan dan Sistem layanan Informasi Pendapatan</p> <p>33. Tidak tertagihnya Piutang Pajak Daerah</p> <p>34. Belum optimalnya penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>dan bukan pajak serta penerimaan lain-lain</p> <p>35. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah</p> <p>36. Belum optimalnya pelaksanaan kajian hukum dan perundang - undangan berkenaan dengan pendapatan daerah</p> <p>37. Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah serta peraturan teknis pendukung lainnya.</p> <p>38. Riset dan inovasi daerah berfokus pada konsep <i>science based policy</i> untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan memberdayakan tuisi Litbangjirap inovek.</p> <p>39. Terciptanya ekosistem riset dan inovasi daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan strategis (BRIN, Kemendagri, Kemendikbudristek, Kemenkumham, Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang Kab/Kota, Badan Usaha, Lembaga Masyarakat,</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>Penyandang Dana Riset/Yayasan, Mahasiswa, Pelajar, dll.)</p> <p>40. Tersedianya Rencana Induk (Rinduk) Kelitbangan/ Pemajuan Iptek di Kalimantan Timur.</p> <p>41. Terwujudnya sistem informasi riset dan inovasi daerah berbasis teknologi yang terpadu (amanat Perpres 78/2021).</p> <p>42. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) Iptek/riset dan inovasi daerah melalui kolaborasi dan sinergi antar Periset dari berbagai lembaga riset, baik pemerintah, swasta, maupun luar negeri.</p> <p>43. Adanya peta jalan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk lembaga riset yang ada di Kab/Kota.</p> <p>44. Terbentuk Sentra HAKI di Balitbangda/BRIDA Prov. Kaltim.</p> <p>45. Adanya skema pendanaan riset dan inovasi daerah yang optimal.</p> <p>46. PPKM akibat pandemi COVID-19 membatasi pelayanan</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>47. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan belum dilaksanakan secara benar</p> <p>48. Kompetensi SDM pelaksana masih kurang</p> <p>49. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan</p> <p>50. Penetapan kawasan di TMII sebagai Green Zone sehingga diperlukan kendaraan listrik di lingkungan TMII yang akan berdampak pada jumlah kunjungan</p> <p>51. Belum tersedianya informasi yang akurat terkait IKN</p> <p>52. Masih kurangnya koordinasi dengan <i>stakeholder</i></p> <p>53. Pedoman Pelaksanaan SPIP yang berubah, sehingga harus di Sosialisasikan Kembali</p> <p>54. Masih adanya temuan hasil pengawasan baik dari internal dan eksternal</p> <p>55. Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>56. Belum optimalnya pendokumentasian pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten</p> <p>57. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektivitas pengendalian secara periodik</p> <p>58. Penguatan monitoring dan evaluasi SPIP, Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Penanganan Laporan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, penanganan pengaduan, PMRB, Survei Penilaian Integritas, <i>Wistle Blowing</i> Sistem, <i>Probitiy</i> Audit, LHPKN dan LHKASN</p> <p>59. Penguatan dan peningkatan kapabilitas APIP, penyusunan kebijakan dan prosedur serta Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berkualitas dan berbasis risiko</p> <p>60. Peran Inspektorat Daerah selaku <i>Quality Assurance</i> (QA) dan <i>Advisory</i> belum berjalan sebagaimana yang diharapkan,</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | <p>dan perlu adanya sosialisasi dan monev/ pendampingan terkait reformasi birokrasi yang terus ditingkatkan serta perlunya komitmen perangkat daerah.</p> <p>61. Penguatan kegiatan pemeriksaan berkala dan tujuan tertentu, revidasi atas dokumen perencanaan dan keuangan serta lainnya, evaluasi, monitoring hasil pengawasan dan kegiatan tertentu, pemutakhiran data hasil pengawasan.</p> <p>62. Penguatan penerapan rencana aksi daerah dan implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kegiatan asistensi/ bimtek/ diklat dan layanan konsultasi</p> <p>63. Penguatan kegiatan pelatihan kantor sendiri, peningkatan kemampuan teknis aparat pengawas dan komparasi implementasi kebijakan pengawasan melalui diklat fungsional, substantif dan profesi.</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | <p>64. Jumlah SDM Pengawasan / Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD belum sebanding dengan tugas pengawasan baik tugas rutin maupun mandatori</p> <p>65. Masih terdapat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum selesai dan berlarut-larut penyelesaiannya dan belum adanya penyelesaian melalui majelis TP/TGR serta kurangnya komitmen perangkat daerah</p> <p>66. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan berdemokrasi</p> <p>67. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi</p> <p>68. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.</p> <p>69. Melemahnya semangat kebersamaan dan menurunnya kepedulian sosial.</p> | | |

| Arah Kebijakan RKP 2024 | Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan | Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 | Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | 70.Meningkatnya simbolisme agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 71.Meningkatnya tindak kekerasan dan disharmoni sosial dalam masyarakat | | |

Sumber perumusan isu strategis:

1. Arah kebijakan RKP Tahun 2024
2. Arah kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
3. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
4. Permasalahan pembangunan daerah (hasil evaluasi RKPD)

Berdasarkan Tabel IV.5 di atas, maka 5 (lima) isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM);
2. Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
5. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Adapun penjelasan terhadap masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Pemerataan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Membangun sumber daya manusia di wilayah Kalimantan Timur adalah bagaimana memperkuat kualitas sumber daya manusia yang mampu mendukung proses transformasi ekonomi wilayah Kalimantan Timur menuju ekonomi berkelanjutan serta didukung pengetahuan dan inovasi. Posisi strategis Kalimantan Timur sebagai daerah asal IKN dan menjadi mitra pembangunan IKN memberikan peluang sekaligus tantangan bagi SDM di Kalimantan Timur. Merespons kondisi tersebut, pembangunan daerah untuk 3 (tiga) tahun kedepan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan SDM, antara lain sistem pendidikan dan sistem kesehatan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Perbaikan sistem pendidikan, utamanya revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi perlu terus menjadi perhatian. Selain itu, penataan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga pengajar juga perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Sementara itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan diarahkan selain untuk peningkatan layanan yang menjangkau masyarakat sampai ke pelosok, juga diharapkan lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan.

b. Peningkatan Daya saing tenaga kerja

Perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, penambahan penduduk dan persaingan ekonomi menuntut SDM Kalimantan Timur yang terampil dan unggul agar memiliki daya saing yang tinggi. Penguatan SDM menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja. Kolaborasi antara pemerintah dan industri perlu didorong mulai dari perancangan program dan desain kurikulum, standar pelatihan hingga penyelenggaraan pelatihan kerja, sehingga kebijakan *link and match* dapat benar-benar berjalan. Dengan demikian, dapat dihasilkan tenaga kerja yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja. Lebih lanjut, dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, diharapkan tenaga kerja di Kalimantan Timur dapat mengembangkan usaha dan mandiri, bahkan diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru.

c. Peningkatan daya saing perempuan

Ketimpangan gender di Kalimantan Timur masih terjadi. Hal ini tergambar dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih rendah. Secara khusus bila membahas peran perempuan dalam pembangunan, maka indikator IDG Kalimantan Timur masih rendah bila dibandingkan daerah lain di Pulau Kalimantan dan berada di bawah IDG nasional. Hal ini menunjukkan Kaltim masih terjadi ketimpangan/ketidaksetaraan gender pada partisipasi perempuan dalam pembangunan. Untuk itu perlu perhatian yang besar untuk peningkatan kualitas hidup perempuan sehingga dapat berdaya dan produktif.

2. Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

a. Diversifikasi ekonomi

Tantangan pembangunan ekonomi wilayah Kalimantan Timur ke depan adalah membangun keterkaitan hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan yang dapat menjadi basis perekonomian Kalimantan Timur masa mendatang. Transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Kalimantan Timur.

Transformasi dari ekonomi berbasis SDA tak terbaharukan menjadi ekonomi berbasis SDA terbaharukan merupakan tantangan utama yang perlu disiapkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam jangka menengah

dan panjang. Proses menipisnya stok SDA tak terbaharukan merupakan hukum alam yang tidak dapat dicegah, sehingga transformasi menjadi suatu keharusan guna menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah Kalimantan Timur. Sektor non migas memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata yang lebih tinggi dari sektor migas. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor-sektor non pertambangan yang saat ini belum dimaksimalkan memiliki perilaku pertumbuhan alami yang menjanjikan.

Kalimantan Timur berfokus pada pertambangan batubara yang merupakan sektor primer sebesar 76%, yang seharusnya sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa) harus lebih ditingkatkan dengan adanya inovasi hasil sektor tersebut. Diperlukan otoritas pengawasan pada tingkat daerah untuk mengurangi degradasi lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan. Pemerintah bersama dengan pelaku pembangunan lainnya perlu melakukan kolaborasi sektor perkebunan dan peternakan untuk memperkuat produktivitas daerah. Berbagai upaya untuk pengembangan sektor-sektor unggulan non migas dan tambang perlu ditempuh, seperti pendekatan industri teknologi bersih melalui penerapan transformasi digital dan industrialisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan secara berkelanjutan; pembangunan rendah karbon melalui ekonomi sirkular; industri hijau; peningkatan ekowisata dan pariwisata dan penggunaan bahan kimia dan produk kimia dan energi rendah karbon.

b. Peningkatan Keberdayaan ekonomi masyarakat

Masalah kesejahteraan sosial tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan dengan masalah kemiskinan dengan akar masalah yang sebagian berbeda-beda pada setiap daerah kabupaten/kota. Penanganan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem menjadi perhatian pemerintah Kalimantan Timur. Berbagai upaya telah dilakukan dan masih terus dilaksanakan, antara lain upaya untuk meningkatkan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk kemandirian, meningkatkan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, serta penataan permukiman kumuh dan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak.

Pemerintah daerah juga terus berusaha untuk meningkatkan dan menguatkan partisipasi UMKM dan koperasi. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi diharapkan dapat membangkitkan perekonomian masyarakat

serta membuka lapangan kerja. Pengembangan usaha UMKM dan koperasi diarahkan juga untuk mengolah produk-produk lokal hasil pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, serta unggulan lainnya diluar non migas dan tambang.

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur

Pengembangan perekonomian daerah membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal. Pembangunan Kalimantan Timur beberapa tahun diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan mutu layanan infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, persampahan, telekomunikasi dan listrik diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan penerapan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu, infrastruktur juga diarahkan ke kawasan-kawasan strategis yang mampu membangkitkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur.

3. Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur

Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah yang berdekatan dengan Ibukota Negara Nusantara memiliki posisi strategis sebagai penggerak perekonomian negara. Perlu ketersediaan infrastruktur dasar termasuk infrastruktur yang mendukung perekonomian, yang terkoneksi dan terintegrasi sehingga dapat mendukung pembangunan daerah dan IKN.

Masalah utama yang ditemui adalah ketersediaan infrastruktur yang belum merata. Selain itu, kondisi infrastruktur yang sebagian tidak dalam kondisi baik, menyebabkan pelayanan tidak optimal. Terjadi kerusakan pada beberapa ruas jalan yang disebabkan faktor *Over Dimension* dan *Over Load* di beberapa ruas jalan sehingga perlu penanganan serius dengan membuat jaringan jalan khusus untuk moda transportasi pertambangan dan perkebunan sawit dan penegakan hukum terkait penggunaan jalan.

4. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup

a. Peningkatan kualitas air, air laut, udara dan tutupan lahan

Pembangunan Kalimantan Timur selain untuk mengejar pertumbuhan, juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ditengah upaya pemerintah bersama masyarakat

dan dunia usaha membangun Kalimantan Timur, komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup juga terus dilakukan.

Upaya menjaga kualitas lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh kualitas air, air laut, udara, dan tutupan lahan diharapkan dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Beberapa potensi yang mempengaruhi upaya menjaga kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur antara lain industri petrokimia, migas, batubara, pengolahan kayu, perkebunan, permukiman, pertambangan, peternakan, jumlah kendaraan, limbah padat, sarana transportasi, beban limbah cair dan limbah B3 dari sarana penginapan dan rumah sakit, keterbatasan fasilitas buang air besar dan timbulan sampah.

b. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau ditopang oleh pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim merupakan suatu keharusan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Provinsi Kalimantan timur bersama berbagai pihak termasuk masyarakat untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon. Program Pengurangan Emisi GRK: Program Pengurangan Emisi (*Emission Reduction/ER program*) dari deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur yang telah berlangsung sejak 2019-2024, dirancang bersama oleh Pemerintah Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Program ini merupakan program berbasis kinerja dibawah skema Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (*Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund/FCPF-Carbon Fund*) yang dikelola oleh Bank Dunia. FCPF merupakan kemitraan global pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan organisasi Masyarakat Adat yang berfokus pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang. ER Program di Kalimantan Timur merupakan salah satu contoh penerapan nilai ekonomi karbon untuk skema RBPs (pembayaran berbasis kinerja).

Kedepan, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memberikan penekanan yang besar pada penurunan emisi GRK dan intensitas emisi. Penurunan emisi GRK secara khusus diprioritaskan pada sektor kehutanan dan lahan, sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. Penurunan emisi deforestasi dan degradasi hutan, pembangunan hutan tanaman, *sustainable management of forest*, dan rehabilitasi hutan merupakan beberapa aksi yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembangunan rendah karbon, sekaligus

mendukung pencapaian target NDC. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, akademisi, pihak swasta, mitra pemerintah maupun penggiat dan aktivis lingkungan hidup untuk dapat mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Kalimantan Timur.

c. Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Potensi EBT seperti panas bumi, air, bioenergi, sinar matahari dan angin/bayu sangat melimpah di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia seluas 120 juta hektar memiliki potensi sumber biomassa, energi air, dan panas bumi yang sangat besar. Dari data proyeksi penyediaan energi yang dimuat dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Timur, bauran energi primer Provinsi Kalimantan Timur dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu batubara, minyak bumi, gas bumi, dan EBT.

Beberapa penyebab harga EBT belum kompetitif yaitu adanya subsidi untuk BBM dan listrik serta masih mahal biaya dari sebagian besar teknologi EBT. Akibatnya hingga tahun 2015 EBT masih kalah bersaing dengan energi fosil. Hal ini menyebabkan pengembangan dan pemanfaatan EBT belum optimal dan mengakibatkan ketergantungan yang besar pada energi fosil. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan EBT adalah dengan mengalihkan subsidi yang semula dialokasikan untuk energi fosil menjadi subsidi untuk EBT.

Pencapaian target program RUED Kalimantan Timur diprioritaskan untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi. Bauran energi dari EBT ditargetkan mendekati sebesar 12,39% tahun 2025 dan sebesar 28,72% tahun 2050. Pencapaian bauran EBT meliputi kontribusi dari program kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dan swasta.

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penerapan reformasi birokrasi. Dalam dokumen tersebut, terdapat tiga sasaran reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel; 2. Birokrasi yang Kapabel; dan 3. Pelayanan Publik yang Prima.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek yakni kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur. Bagi Pemerintah Daerah, reformasi birokrasi merupakan faktor yang mendukung pembenahan birokrasi di daerah. Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan untuk penataan organisasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memberikan pelayanan publik yang prima. Penerapan e-Government dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Timur saat ini sudah sebagian besar berbasis TIK. Adanya beberapa sistem informasi dan integrasi mampu menghasilkan Nilai Indeks SPBE yang meningkat dari tahun ke tahun. Adanya keterbukaan informasi pelayanan publik melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) merupakan langkah awal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyampaikan jenis-jenis pelayanan dan kinerja Perangkat daerahnya.

Lebih lanjut, dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur telah berkomitmen untuk mempercepat pembentukan MPP secara bertahap. Dengan adanya MPP maka pelayanan bagi masyarakat dari pemerintah pusat dan daerah akan terintegrasi dalam satu tempat sehingga memberikan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan. Selain itu, juga dapat berimplikasi dalam meningkatkan daya saing dengan memberikan kemudahan berusaha.

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2024

Dengan memperhatikan hasil analisa terhadap arah kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, arah kebijakan RKP tahun 2024, isu strategis serta permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan tahun 2024, maka tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah “Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.

Tema RKPD tahun 2024 menggambarkan fokus pelaksanaan pembangunan dengan tetap menerapkan prinsip inklusifitas. Pembangunan difokuskan pada upaya-upaya strategis dan taktis untuk mencapai tujuan dan sasaran RKPD. Dengan dicapainya tujuan dan sasaran pembangunan, maka diharapkan dapat tidak saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan daya saing Kalimantan Timur.

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menekankan pada kata kunci peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah yang andal, percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. 4 (empat) hal tersebut menjadi perhatian utama untuk pembangunan tahun pertama periode RPD dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kualitas lingkungan hidup serta rendahnya Reformasi Birokrasi. Upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah yang andal, percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan industri pengolahan, serta pemenuhan tenaga kerja yang berdaya saing, yang didukung dengan peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur, kemandirian birokrasi, dan pelestarian lingkungan.



Gambar IV.2
Kerangka Pikir Perumusan Prioritas RKPD Kalimantan Timur
Tahun 2024

Prioritas Pembangunan pada RKPD merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik yang ditujukan pada pencapaian sasaran utama pada tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, dimana RKPD ini juga perlu memperhatikan upaya pencapaian tujuan pembangunan pada RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan. Dengan memahami isu strategis dan permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur serta memperhatikan tema pembangunan daerah tahun 2024, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan;
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama;

Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan RPD dan permasalahan pembangunan daerah. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan
RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

| No | Prioritas Pembangunan RKPD 2024 | Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024 |
|----|--|--|
| 1. | Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja | <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus b. Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus c. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan d. Optimalisasi <i>Boarding School</i> e. Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu f. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan g. Peningkatan literasi dan numerasi h. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar i. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja j. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri k. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja l. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan m. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja n. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi o. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan p. Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik q. Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan |
| 2. | Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya | <ul style="list-style-type: none"> a. Percepatan perbaikan gizi masyarakat b. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi c. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta d. pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat e. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan f. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen fasyankes maupun fasilitasnya g. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat |

| No | Prioritas Pembangunan RKPD 2024 | Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024 |
|----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> h. Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan i. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan |
| 3. | Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan | <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, dan non-agro yang terintegrasi hulu-hilir b. Peningkatan Strategi Promosi dan kegiatan Promosi di Kawasan industri c. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di Kawasan industri d. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital e. Peningkatan SDM UKM/IKM untuk tumbuh menjadi eksportir f. Peningkatan dukungan kemudahan pengurusan ekspor dan kemudahan memperoleh pinjaman bagi UKM/IKM g. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata h. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan i. Pemberian akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan dan peningkatan kapasitas usaha kelompok masyarakat, serta peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan. j. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perkebunan k. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan l. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak m. Penguatan kelembagaan peternakan n. Peningkatan produksi perikanan o. Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan p. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura q. Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian r. Peningkatan iklim usaha dan investasi s. Peningkatan Kualitas pelaksanaan investasi berbasis <i>Online Single System</i> (OSS) |
| 4. | Penguatan infrastruktur untuk mendukung | <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Pelayanan Jalan Provinsi b. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan provinsi |

| No | Prioritas Pembangunan RKPD 2024 | Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024 |
|----|--|--|
| | pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | <ul style="list-style-type: none"> c. Pembangunan Jalan pada kawasan pertumbuhan ekonomi d. Peningkatan pelayanan terminal tipe B e. Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan ketersediaan air f. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir g. Peningkatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi h. Peningkatan kualitas dan cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) i. Perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan perbatasan, terluar, dan terpencil j. Penguatan distribusi barang khususnya komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan k. Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik l. Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang m. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah n. Pengimplementasian kebijakan satu peta |
| 5. | Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem | <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar b. Peningkatan keberfungsian sosial PPKS c. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan d. Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial e. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi f. Peningkatan Daya Saing UMKM g. Pemberdayaan perempuan kepala keluarga untuk kemandirian berusaha h. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting i. Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa j. Peningkatan penataan permukiman kumuh dan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak |
| 6. | Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan b. Pengendalian pencemaran air c. Pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut d. Pengendalian pencemaran udara e. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan dan hutan |

| No | Prioritas Pembangunan RKPD 2024 | Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024 |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> f. Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan g. Pemeliharaan dan Perlindungan Wilayah-Wilayah Penyedia Jasa LH h. Penurunan Deforestasi dan Degradasi Hutan i. Pengelolaan Hutan Lestari Berkelanjutan j. Peningkatan Peranan Konservasi Hutan k. Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) l. Rehabilitasi Kawasan Hutan (Regenerasi/tanpa penebangan) m. Rehabilitasi Hutan Produksi dan Lahan (Dengan Rotasi) n. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan o. Peningkatan pengelolaan DAS p. Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan q. Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan r. Pemanfaatan limbah industri pertanian dan kehutanan sebagai sumber energi secara terintegrasi dengan industrinya s. Pengembangan dan pemanfaatan biodiesel sebagai upaya untuk mengurangi emisi GRK dan meningkatkan ekonomi masyarakat. t. Pengembangan energi surya mencakup pemanfaatan PLTS di perdesaan dan perkotaan u. Pengembangan infrastruktur EBT v. Peningkatan kerja sama dalam pengelolaan EBT w. Peningkatan edukasi kepada para pihak terutama masyarakat untuk penerapan EBT |
| 7. | <p>Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT b. Perubahan <i>Mindset</i> dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi c. Deregulasi Kebijakan d. Penyederhanaan Organisasi e. Perbaikan Tata Laksana f. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur g. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan h. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran i. Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah j. Peningkatan kinerja perangkat daerah dan aparatur k. Penguatan Pengawasan |
| 8. | <p>Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi kerja sama daerah yang sinergi dengan pembangunan IKN |

Untuk mendukung prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, maka disusun strategi dan arah kebijakan tahunan yang mengacu pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang dapat dilihat pada tabel IV.8.

Tabel IV.6
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| Tujuan dan Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---------------------------------------|---|
| Tujuan 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing | | |
| Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat | Peningkatan akses dan mutu pendidikan | 1 Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus |
| | | 2 Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus |
| | | 3 Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan |
| | | 4 Optimalisasi <i>Boarding School</i> |
| | | 5 Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu |
| | | 6 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan |
| | | 7 Peningkatan literasi dan numerasi |
| | | 8 Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar |
| Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Peningkatan akses dan mutu kesehatan | 1 Percepatan perbaikan gizi masyarakat |
| | | 2 Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi |
| | | 3 Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat |
| | | 4 Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan |
| | | 5 Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen |

| Tujuan dan Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|--|
| | | fasyankes maupun fasilitasnya 6 Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 7 Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan 8 Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan |
| Sasaran 3: Menurunnya tingkat pengangguran | Peningkatan mutu dan daya saing tenaga kerja | 1 Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja 2 Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri 3 Penyelenggaraan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja |
| Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan | Perluasan kesempatan kerja | 1 Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja |
| | Penerapan kesetaraan gender dalam pembangunan | 1 Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan 2 Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik 3 Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan |
| Tujuan 2: | | |
| Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas | | |
| Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi | Pengembangan ekspor komoditas non migas dan batubara | 1 Peningkatan Daya Saing UKM 2 Peningkatan Pemasaran Produk UKM 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Industri 4 Pengembangan Hilirisasi Komoditi Hulu Agro, Aneka dan Pangan 5 Peningkatan Kapasitas SDM yang Berdaya Saing 6 Pengembangan Destinasi Pariwisata Prov. Kaltim 7 Peningkatan Pemasaran Pariwisata Daerah 8 Peningkatan Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi Pariwisata Daerah 1 Peningkatan Kualitas pelaksanaan investasi |

| Tujuan dan Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|----------|---|
| Peningkatan daya saing investasi di sektor non migas dan batubara | | berbasis <i>Online Single System</i> (OSS) |
| | 2 | Peningkatan Strategi Promosi dan kegiatan Promosi di Kawasan industri |
| | 3 | Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di Kawasan industri |
| Meningkatkan ketersediaan pangan melalui pemantauan pasokan pangan dan cadangan Pangan | 1 | Menjamin ketersediaan pangan melalui analisis dan informasi pasokan pangan yang akurat dan <i>update</i> |
| | 2 | Meningkatkan sumber pangan dan gizi yang berkualitas melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal |
| Penanganan Daerah Rawan Pangan | 1 | Pemetaan Rawan Pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi |
| | 2 | Penyaluran bantuan pangan pada daerah rawan pangan / terdampak bencana |
| Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal | 1 | Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam , bergizi, seimbang, aman (B2SA) berbasis pangan lokal |
| Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perkebunan | 1 | Revitalisasi lahan perkebunan yang tidak produktif |
| | 2 | Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan |
| | 3 | Memperbanyak penggunaan benih perkebunan unggul bersertifikat |
| | 4 | Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produk Perkebunan |
| Peningkatan produksi dan produktivitas ternak | 1 | Optimalisasi reproduksi ternak |
| | 2 | Meningkatkan produksi dan produktivitas pakan ternak |
| | 3 | Meningkatkan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan ternak |
| | 4 | Pengembangan dan Penguatan kelembagaan peternakan |
| Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan | 1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan |
| | 2 | Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan |

| Tujuan dan Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|---|
| | Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura | <ol style="list-style-type: none"> 1 Revitalisasi lahan pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2 Memperbanyak penggunaan benih TPH unggul bersertifikat 3 Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian |
| | Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan | <ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu |
| Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin | Peningkatan Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan | <ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar 2 Peningkatan keberfungsian sosial PMKS 3 Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan 4 Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial 5 Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi 6 Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa 7 Perbaiki rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin/rentan miskin |
| | Peningkatan lapangan usaha produktif bagi masyarakat miskin | <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemberian bantuan sarana pertanian dan perikanan bagi masyarakat miskin terutama di daerah tertinggal dan perbatasan 2 Pelatihan dan penyuluhan pertanian dan perikanan bagi masyarakat miskin 3 Pemberian Akses Legal Pengelolaan Hutan kepada Masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan Hutan 4 Pelatihan dan stimulus permodalan untuk gabungan kelompok usaha mikro/keompok usaha bersama (KUBE) |

| Tujuan dan Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|--|
| | | 5 Subsidi ongkos angkut pemasaran produk untuk daerah tertinggal dan perbatasan |
| | Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | 1 Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting |
| | | 2 Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting |
| Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar | Optimalisasi penyelenggaraan jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi | 1 Peningkatan dan pemeliharaan pelayanan jalan provinsi |
| | | 2 Pembangunan ruas jalan baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi |
| | Peningkatan infrastruktur sumber daya air | 1 Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan pendayagunaan air |
| | | 2 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air |
| | Optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang | 1 Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang |
| | | 2 Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah |
| | | 3 Pengimplementasian kebijakan satu peta |
| | Pemenuhan kebutuhan infrastruktur air minum | 1 Pembangunan sistem penyediaan air minum skala regional |
| | Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh | 1 Revitalisasi, penanganan, dan penyediaan infrastruktur di permukiman kumuh kewenangan provinsi |
| | Peningkatan layanan infrastruktur perhubungan | 1 Peningkatan pelayanan terminal tipe B |
| | | 2 Penyediaan perlengkapan keselamatan jalan |
| | Peningkatan pemerataan ketersediaan listrik 24 jam | 1 Peningkatan ketersediaan jaringan tegangan rendah dan distribusi listrik |
| | Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | |
| Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan | Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan | 1 Menjaga kualitas lingkungan melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan |
| | | 2 Menjaga kualitas lingkungan melalui penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan |
| | | 3 Menjaga kualitas lingkungan melalui pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat |

| Tujuan dan Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|
| | | pencemaran dan kerusakan lingkungan |
| Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan | Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan | 1 Peningkatan pengelolaan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan |
| | Optimalisasi perlindungan hutan dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting (KBEP) dan konservasi provinsi | 1 Meningkatkan upaya pengelolaan TAHURA provinsi |
| | | 2 Meningkatkan upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar |
| | | 3 Optimalisasi pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat |
| | Optimalisasi penyelenggaraan Rehabilitasi hutan dan lahan serta belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS | 1 Optimalisasi Pengelolaan DAS terpadu multipihak |
| | | 2 Optimalisasi penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan |
| Optimalisasi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan | 1 Pemberian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat berbasis perhutanan sosial | |
| Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan | Peningkatan cakupan desa yang memanfaatkan energi baru terbarukan | 1 Percepatan pembangunan pembangkit listrik pada Desa belum berlistrik PLN dengan menggunakan energi baru terbarukan |
| | Peningkatan ketersediaan daya listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan | 1 Peningkatan penyediaan sarana pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan |
| Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi | | |
| Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK | Peningkatan pemenuhan dan penerapan standar pelayanan publik | 1 Penyusunan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan |
| | | 2 Pelaksanaan layanan publik sesuai standar, operasional dan prosedur |
| | | 3 Perbaiki budaya kerja di lingkungan pemerintahan |
| | Optimalisasi pengelolaan administrasi pemerintah dan layanan publik berbasis teknologi informasi | 1 Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi |
| 2 Peningkatan pengelolaan <i>e-Government</i> | | |
| 3 Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah | | |
| Optimalisasi penerapan sistem Merit | 1 Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan | |

| Tujuan dan Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------------------|---|---|
| | | 2 Peningkatan kualitas penilaian dan evaluasi kinerja ASN |
| | Pengembangan kompetensi ASN | 1 Peningkatan pelatihan ASN berbasis kompetensi |
| | | 2 Peningkatan sertifikasi kompetensi ASN |
| | Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | 1 Peningkatan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja |
| | | 2 Peningkatan kualitas perencanaan dan penjenjangan kinerja |
| | | 3 Peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja |
| | Optimalisasi pelaksanaan pengendalian intern pemerintah | 1 Peningkatan kapabilitas APIP |
| | | 2 Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah |
| | | 3 Peningkatan pembangunan zona integritas |

Prioritas pembangunan daerah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja tujuan dan sasaran, program prioritas, indikator kinerja untuk masing-masing program prioritas, target kinerja program serta pagu anggaran program prioritas dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.7

Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

| No | Program Prioritas | Indikator | 2024 | | PD Pengampu Utama | Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah |
|--|---|---|------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | Target | Rp | | |
| Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing | | | | | | |
| Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus | 100% | 2.143.303.170.954 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PP-1 |
| | | Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK | 100% | | | |
| | | Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus | 88,48% | | | |
| | | Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus | 87,49% | | | |
| | | Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus | 94,87% | | | |
| | | Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus | 67,69% | | | |
| | | Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus | 60,34% | | | |
| | | Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK | 79,00% | | | |
| | | Tingkat penyerapan lulusan SMK | 94,00% | | | |
| 2 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentase tenaga pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana | 100% | 9.596.846.500 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PP-1 |
| Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | |
| 3 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kesakitan | 10,8 rasio | 181.814.368.000 | Dinas Kesehatan | PP-2 |

| No | Program Prioritas | Indikator | 2024 | | PD Pengampu Utama | Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|---|--------------------|----------------|--|--|
| | | | Target | Rp | | |
| Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | |
| 4 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase lulusan pelatihan kerja yang dimagangkan dan bekerja | 65% | 2.243.647.800 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PP-1 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | |
| 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat | 57,64 % | 21.500.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | PP-1 |
| Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | |
| 6 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Jumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan | 400 Orang | 12.459.543.000 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | PP-1 |
| Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas | | | | | | |
| Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | | | |
| 7 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu | 850 Ton | 5.558.990.000 | Dinas Kehutanan | PP-3 |
| | | Produksi Hasil Hutan Kayu | 4.420.000 m3/tahun | 25.324.422.000 | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | |
| 8 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Jumlah UKM potensial ekspor | 20 UKM | 2.197.850.000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | |

| No | Program Prioritas | Indikator | 2024 | | PD Pengampu Utama | Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah |
|--|---|--|---------------------|----------------|--|--|
| | | | Target | Rp | | |
| 9 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UKM yang masuk pasar digital | 5% | 968.165.000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | PP-3 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | |
| 10 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase keberhasilan produk potensial ekspor menembus pasar ekspor | 2% | 1.570.000.000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | PP-3 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | |
| 11 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara | 5,20% | 2.820.000.000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | PP-3 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | |
| 12 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase DTW (Daya Tarik Wisata) Pengembangan Pariwisata yg difasilitasi (DTW) | 81,82% | 10.673.000.000 | Dinas Pariwisata | PP-3 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | |
| 13 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase penyelesaian perizinan | 100% | 2.750.000.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PP-3 |
| 14 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Kepeminatan investasi di kalimantan timur | 11 Minat | 2.600.000.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PP-3 |
| 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Potensi Investasi yang direncanakan | 2 Potensi investasi | 2.700.000.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PP-3 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | |
| 16 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Luas kebun yang dibangun (Ha) | 50702 Ha | 600.000.000 | Dinas Perkebunan | PP-3 |

| No | Program Prioritas | Indikator | 2024 | | PD Pengampu Utama | Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah |
|---|---|--|-------------|----------------|---|--|
| | | | Target | Rp | | |
| 17 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Tingkat pemenuhan sarana perkebunan | 25,36 % | 19.552.056.400 | Dinas Perkebunan | PP-3 |
| 18 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya | 32,5 % | 5.026.179.200 | Dinas Perkebunan | PP-3 |
| | | Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat | 81,08 % | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | |
| 19 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan | 97.6 Skor | 3.775.000.000 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | PP-3 |
| | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi | 86.3 Skor | | | |
| 20 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase daerah rawan pangan | 0% | 1.900.000.000 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | PP-3 |
| | | Jumlah kecamatan yang meningkat status ketahanan pangannya | 1 Kecamatan | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | |
| 21 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Tingkat pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan | 41,39 % | 3.200.000.000 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | PP-3 |
| | | Tingkat pemenuhan prasarana pertanian hortikultura | 34% | | | |
| 22 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Tingkat pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan | 35,5% | 18.000.000.000 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | PP-3 |
| | | Tingkat pemenuhan sarana pertanian hortikultura | 39,29 % | | | |
| 23 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya | 77% | 2.849.500.000 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | PP-3 |

| No | Program Prioritas | Indikator | 2024 | | PD Pengampu Utama | Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah |
|--|---|--|-----------------|----------------|--------------------------------------|--|
| | | | Target | Rp | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | |
| 24 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Tingkat pemenuhan prasarana peternakan | 93,75 Skor | 6.172.900.371 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | PP-3 |
| 25 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan agribisnis | 96,88 Skor | 24.475.549.970 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | PP-3 |
| | | Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | 88,54 Skor | 1.975.328.118 | | |
| 26 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ | 91,79 Skor | 10.926.033.657 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | PP-3 |
| 27 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan | 99,58% | 2.469.160.148 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | PP-3 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| 28 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah produksi perikanan tangkap | 190000 Ton | 9.700.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PP-3 |
| 29 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah produksi perikanan budidaya | 200000 Ton | 7.461.359.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PP-3 |
| 30 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah produk olahan hasil perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan | 7 Produk Olahan | 1.723.064.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PP-3 |
| Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | |
| 31 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Jumlah keluarga miskin yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif (UEP) | 12936 Orang | 18.375.516.000 | Dinas Sosial | PP-5 |

| No | Program Prioritas | Indikator | 2024 | | PD Pengampu Utama | Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah |
|--|---|---|------------|-------------------|---|--|
| | | | Target | Rp | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | |
| 32 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal | 2,38% | 6.156.522.300 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | PP-5 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | |
| 33 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase pengurangan permukiman kumuh kewenangan provinsi | 51,58% | 180.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | PP-5 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | |
| 34 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Disparitas harga barang pokok dan barang penting | 16% | 1.245.000.000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | PP-5 |
| Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | |
| 35 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | Persentase layanan lalu lintas jalan provinsi dan AKDP | 82% | 9.092.000.000 | Dinas Perhubungan | PP-4 |
| | | Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1000 keberangkatan | 0,006 poin | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | |
| 36 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Rasio kemantapan jalan status provinsi | 80,58% | 1.115.966.543.207 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | PP-4 |
| 37 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi | 62,39% | 317.066.477.680 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | PP-4 |
| | | Persentase pengurangan luas genangan banjir perkotaan | 64,58% | | | |

| No | Program Prioritas | Indikator | 2024 | | PD Pengampu Utama | Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah |
|--|--|--|---------|-----------------|---|--|
| | | | Target | Rp | | |
| | | Persentase penyediaan kapasitas air baku | 80,08% | | | |
| | | Persentase panjang pantai kritis yang ditangani | 88,72% | | | |
| 38 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase panjang drainase yang berfungsi baik | 71,95% | 43.650.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | PP-4 |
| 39 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Penerapan SPM Air Minum Provinsi | 49,58% | 244.043.993.627 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | PP-4 |
| 40 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat | 57,64 % | 21.500.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | PP-4 |
| 40 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Skoring penyelenggaraan penataan ruang | 86,04% | 13.500.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | PP-4 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | |
| 41 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase pengurangan permukiman kumuh kewenangan provinsi | 51,58% | 180.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | PP-4 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | |
| 42 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Persentase kelurahan/desa yang teraliri listrik 24 jam | 92,97% | 55.743.953.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | PP-4 |

| No | Program Prioritas | Indikator | 2024 | | PD Pengampu Utama | Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah |
|--|--|--|----------------------|-----------------|------------------------|--|
| | | | Target | Rp | | |
| Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | |
| Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | |
| 43 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Pencemaran | ≤5 (tercemar ringan) | 9.062.247.305 | Dinas Lingkungan Hidup | PP-6 |
| | | Indeks Standar Pencemar Udara | 48 (Baik) | | | |
| Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | | | |
| 44 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Persentase luas lahan yang direhabilitasi | 0,47% | 89.670.958.000 | Dinas Kehutanan | PP-6 |
| | | Persentase luas kerusakan kawasan hutan | 1% | 135.892.372.000 | | |
| 45 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola | 545.726 Ha | 18.556.035.000 | Dinas Kehutanan | PP-6 |
| 46 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola | 10.104 Ha | 4.289.275.000 | Dinas Kehutanan | PP-6 |
| 47 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat | 20.000 Ha | 35.367.302.000 | Dinas Kehutanan | PP-6 |
| | | Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya | 20 Kelompok | 35.296.415.000 | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | |
| 48 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Perkebunan) | 40% | 5.499.080.100 | Dinas Perkebunan | PP-6 |

| No | Program Prioritas | Indikator | 2024 | | PD Pengampu Utama | Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah |
|--|--|---|------------------------------|----------------|--|--|
| | | | Target | Rp | | |
| Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | |
| 49 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Persentase desa yang dibangun PLTS pada desa belum berlistrik PLN | 34,10% | 55.743.953.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | PP-6 |
| | | Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT | 250,00 kWp | | | |
| 50 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi | 243.246, 516 Ton CO2e/Ta hun | 6.500.000.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | PP-6 |
| | | Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi | 43,76% | | | |
| | | Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi | 33,56% | | | |
| Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi | | | | | | |
| Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK | | | | | | |
| KEPEGAWAIAN | | | | | | |
| 51 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Indeks NSPK Manajemen ASN | 90 indeks | 21.160.000.000 | Badan Kepegawaian Daerah | PP-7 |
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | |
| 52 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional | 86% | 25.000.000.000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | PP-7 |
| | | ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial | 86% | | | |
| | | SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi | 86% | | | |
| | | SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Daerah | 86% | | | |
| | | SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis | 87% | | | |

| No | Program Prioritas | Indikator | 2024 | | PD Pengampu Utama | Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah |
|--|--|--|--------------------|----------------|----------------------------------|--|
| | | | Target | Rp | | |
| SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | |
| 53 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Indeks Kelembagaan | 72 poin | 5.400.000.000 | Biro Organisasi | PP-7 |
| | | Indeks Kematangan Organisasi | 44 poin | | | |
| | | Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) | 1 Perangkat Daerah | | | |
| | | Persentase Perangkat Daerah Klaster Pendukung yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal BB (Sangat Baik) | 70% | | | |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B) | 85% | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | |
| 54 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase tatakelola SPBE | 90% | 23.600.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | PP-7 |
| INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | |
| 55 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase penyelenggaraan pengawasan internal pemda provinsi dan kab/kota | 100% | 16.862.522.000 | Inspektorat | PP-7 |

Dalam upaya penyelesaian permasalahan maupun isu strategis pembangunan daerah, pelaksanaan program pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya melibatkan Perangkat Daerah namun juga dari *stakeholders* lainnya diluar Perangkat Daerah yakni dengan melakukan kerja sama dengan Badan Usaha atau swasta. Dalam mensinergikan program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan perusahaan-perusahaan yang berada dalam wilayah Kalimantan Timur telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan dibidang usaha dan/atau jasa wajib melaksanakan TJSL dan PKBL. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 terdapat 2 (dua) program prioritas yaitu Program Rumah Layak Huni dan Program Pangan untuk Penghijauan dimana Program tersebut sudah dibentuk Badan Pengelolanya masing-masing yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan pelaksanaan program prioritas tahunan kepada masyarakat.
2. Melakukan validasi dan menyepakati rencana program dan kegiatan yang diusulkan Perusahaan, serta menyinergikan dengan program pembangunan daerah.
3. Melakukan identifikasi lokasi dan calon penerima bantuan
4. Mengusulkan rencana program dan kegiatan.
5. Melakukan penilaian terhadap perusahaan pelaksana.
6. Mengusulkan pemberian penghargaan pelaksana program prioritas terbaik oleh Gubernur
7. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan kepada Perusahaan.
8. Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan terkait program Rumah Layak Huni dan Program Pangan untuk Penghijauan.

Selanjutnya, pelaksanaan program pembangunan melalui program-program prioritas Kalimantan Timur tahun 2024 juga dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian sasaran pada Prioritas Nasional, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pengelolaan Hutan
 - b. Program Pengembangan UMKM
 - c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah dan Usaha Mikro
 - d. Program Pengembangan Ekspor
 - e. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - f. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program
 - g. Pelayanan Penanaman Modal
 - h. Program Promosi Penanaman Modal
 - i. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - j. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - k. Program Penyuluhan Pertanian
 - l. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - m. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - n. Program Penyuluhan Pertanian
 - o. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - p. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - q. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - r. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
2. Untuk mendukung Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, maka program prioritas daerah yang dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Untuk mendukung Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Program Pengelolaan Pendidikan
 - b. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
 - c. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - d. Program Penempatan Tenaga Kerja

- e. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - f. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
4. Untuk mendukung Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
5. Untuk mendukung Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - b. Program Penyelenggaraan Jalan
 - c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - g. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)
 - h. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
6. Untuk mendukung Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - b. Program Pengelolaan Hutan
 - c. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
 - d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
 - e. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
 - f. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - g. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
 - h. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
7. Untuk mendukung Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Program Kepegawaian
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- c. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- d. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- e. Program Penataan Organisasi
- f. Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- g. Program Penyelenggaraan Pengawasan

4.2.4 Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2024

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 telah selaras dengan kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD Tahun 2024-2026), mendukung Prioritas Pembangunan Nasional seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan kebijakan pembangunan nasional disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel IV.8

Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024

| No | Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 | Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024 |
|----|--|---|
| 1. | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan | <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan b. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar |
| 2. | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar b. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama |
| 3. | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja |

| No | Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 | Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024 |
|----|---|--|
| | | b. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem |
| 4. | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja |
| 5. | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar |
| 6. | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan |
| 7. | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik |

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan program-program pembangunan daerah Tahun 2024 agar target-target pada indikator TPB/SDGs baik nasional maupun daerah dapat tercapai secara optimal. Berikut program-program pembangunan yang mendukung kebijakan pengarusutamaan TPB/SDGs:

Tabel IV.9
 Persandingan Program Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

| Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>) | Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 |
|--|---|
| Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) | |
| Goal 1 Tanpa Kemiskinan Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi |

| Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>) | Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 |
|---|---|
| <p>yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</p> <p>Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan</p> <p>Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro</p> <p>Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti • Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti • Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti • Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti • Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi • Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi • Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi • Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana • Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana • Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi • Program Penanggulangan Bencana Program Perencanaan Tenaga Kerja • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| <p>Goal 2 Tanpa Kelaparan</p> <p>Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</p> <p>Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengawasan Keamanan Pangan • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian |

| Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>) | Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 |
|--|--|
| <p>secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p> <p>Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan <i>input</i> lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.</p> <p>Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.</p> <p>Target 2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| <p>Goal 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera</p> <p>Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup</p> <p>Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) |

| Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>) | Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 |
|---|--|
| <p>Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</p> <p>Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</p> <p>Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</p> <p>Target 3.8 Pada tahun 2030, mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</p> <p>Target 3.a Memperkuat pelaksanaan The Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.</p> <p>Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |
| <p>Goal 4 Pendidikan Berkualitas</p> <p>Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan |

| Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>) | Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 |
|---|--|
| <p>mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</p> <p>Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</p> <p>Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.</p> <p>Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</p> <p>Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</p> | |
| <p>Goal 5 Kesetaraan Gender</p> <p>Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.</p> <p>Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</p> <p>Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.</p> <p>Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan • Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak • Program Perlindungan Khusus Anak |
| <p>Goal 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak</p> <p>Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |

| Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>) | Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 |
|--|---|
| <p>Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan</p> <p>Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</p> <p>Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional |
| <p>Goal 7 Energi Bersih dan Terjangkau</p> <p>Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.</p> <p>Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.</p> <p>Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Energi Terbarukan (EBT) • Program Pengelolaan Ketenagalistrikan |
| <p>Goal 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.</p> <p>Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</p> <p>Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial • Program Pengawasan Ketenagakerjaan • Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Program Promosi Penanaman Modal • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata |

| Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>) | Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 |
|---|--|
| <p>keuangan Target 8.6 Pada tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) |
| <p>Goal 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2021.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) • Program Pengelolaan Pelayaran • Program Pengelolaan Perkeretaapian • Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri |
| <p>Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Penataan Desa • Program Peningkatan Kerja sama Desa |

| Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>) | Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 |
|--|---|
| <p>40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.</p> <p>Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Administrasi Pemerintahan Desa • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat |
| <p>Goal 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan</p> <p>Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.</p> <p>Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.</p> <p>Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan</p> <p>Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Pengembangan Perumahan • Program Kawasan Pemukiman • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi • Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi |
| <p>Goal 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab</p> <p>Target 12.4 Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.</p> <p>Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.</p> <p>Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) • Program Pengelolaan Persampahan |

| Pengaruhutamakan (<i>Mainstreaming</i>) | Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 |
|---|---|
| <p>Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Penanggulangan Bencana • Program Penanganan Bencana • Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati • Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat |
| <p>Goal 14 Ekosistem Lautan Target 14.2 Pada tahun 2021, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. Target 14.5 Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| <p>Goal 15 Ekosistem Daratan Target 15.1 Pada tahun 2021, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. Target 15.3 Pada tahun 2021, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Hutan • Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya • Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan • Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) |

| Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>) | Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 |
|--|--|
| <p>penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.</p> <p>Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Target 15.9 Pada tahun 2021, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.</p> <p>Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.</p> | |
| <p>Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</p> <p>Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.</p> <p>Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.</p> <p>Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.</p> <p>Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum • Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| <p>Goal 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan</p> <p>Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.</p> <p>Target 17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance-ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Ekspor • Program Perekonomian dan Pembangunan • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |

| Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>) | Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 |
|---|---|
| <p>ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.</p> <p>Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.</p> <p>Target 17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.</p> <p>Target 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.</p> <p>Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitas teknologi global.</p> <p>Target 17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi yang disetujui bersama.</p> <p>Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh</p> | |

| Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>) | Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 |
|---|---|
| <p>tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.</p> <p>Target 17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda</p> <p>Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.</p> <p>Target 17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.</p> <p>Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.</p> <p>Target 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Target 17.15 menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan</p> <p>Target 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.</p> <p>Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.</p> <p>Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk</p> | |

| Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>) | Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 |
|--|---|
| <p>negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografi dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p> <p>Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.</p> | |

4.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2024 meliputi aspek umum, bidang infrastruktur dan kesenjangan wilayah serta Pemilu 2024.

Tabel IV.10
Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

| No. | Pokok-Pokok Pikiran DPRD |
|-----|---|
| 1. | <p>Umum</p> <p>a. Tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan program pemerintah mendorong pembangunan secara luas yang lebih merata, berkesinambungan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>b. Pemerintah Provinsi diharapkan terus meningkatkan Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Kabupaten/Kota serta mempermudah tata cara usulan masyarakat untuk mendapatkan program dari Pemerintah Provinsi.</p> |
| 2. | <p>Infrastruktur</p> <p>a. Infrastruktur dasar dan konektivitas yang ada belum sepenuhnya merata dan terintegrasi. Sebagai contoh, konektivitas wilayah tengah yang belum sepenuhnya</p> |

| | |
|----|--|
| | <p>terintegrasi menjadi penghambat dalam mendorong pengembangan ekonomi dan penyediaan layanan dasar, terutama di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu;</p> <p>b. Kondisi Jalan Samarinda ke Kutai Barat yang merupakan Jalan Negara dinilai tidak layak bila berlarut-larut tidak ditangani kita khawatir berdampak pada memicu inflasi daerah dan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok.</p> |
| 3. | <p>Kesenjangan Wilayah</p> <p>Kesenjangan antar wilayah di Kalimantan Timur sangat tinggi dimana distribusi ekonomi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa hampir 80 persen perekonomian dikontribusikan oleh 5 Kabupaten/Kota yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur, sedangkan Kabupaten lainnya memberikan kontribusi sangat kecil. Hal ini menjadi catatan penting agar Pemerintah Provinsi fokus mendorong pemerataan pembangunan di setiap wilayah.</p> |
| 4. | <p>Pemilu 2024</p> <p>Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 menjadi hal penting untuk disikapi oleh Pemerintah Provinsi dan semua elemen masyarakat tetap menjaga stabilitas politik agar iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi tetap kondusif.</p> |

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA




5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2024

Capaian kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2022 telah dilakukan evaluasi seperti capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini dan PDRB per Kapita. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota pada tahun 2024.

5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

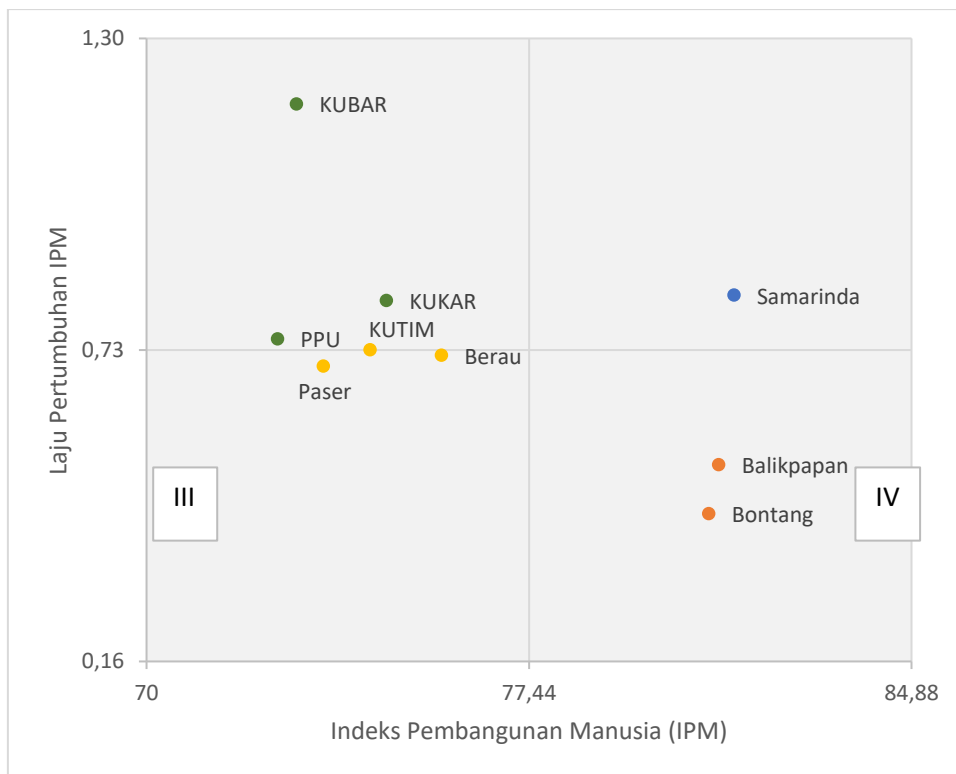
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian IPM Kabupaten/Kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel V.1
Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota

| Kuadran | Simbol | Interpretasi |
|---------|---|--|
| I |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM LEBIH RENDAH dan Progress Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi |
| II |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan Progress Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi |
| III |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan Progress Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi |
| IV |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM LEBIH TINGGI dan Progress Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah dan progress pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian IPM dan progress pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Samarinda.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian IPM dan progress pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan progress pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Balikpapan dan Kota Bontang.



Gambar V.1
Analisis Kuadran Capaian IPM dan Progress Pertumbuhan IPM
Kabupaten/Kota Tahun 2022
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2022 mencapai 77,44 meningkat 0,56 poin dibandingkan capaian tahun 2021 yang mencapai 76,88. Perbaikan kemajuan pembangunan manusia Kalimantan Timur pada tahun 2022 ditandai oleh peningkatan angka IPM sebesar 0,73 persen, setelah sebelumnya sempat tumbuh sebesar 0,84 persen pada tahun 2021. Peningkatan IPM tahun 2022 disebabkan oleh peningkatan yang terjadi disemua komponen penyusunnya. Berbeda dengan kondisi pada tahun 2020, di mana pandemi COVID-19 telah menyebabkan kinerja pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang disebabkan oleh turunnya nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan naik 3,31 persen dibanding tahun 2021.

Sebagai upaya dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dalam aspek pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur perlu upaya yang sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tujuan pembangunan mewujudkan SDM berdaya saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 sebesar 78,32 dengan kategori “Tinggi”. Adapun upaya yang dilakukan adalah pemerataan kualitas pelayanan pendidikan pada semua jenjang melalui penyediaan infrastruktur pendidik, peningkatan kualifikasi pendidik/tenaga kependidikan serta pemberian beasiswa.

Tabel V.2
Penetapan Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Tahun 2024





| No | KAB/KOTA | Realisasi | | | Target | |
|------------------|------------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Paser | 72,04 | 72,93 | 73,44 | 73,77 | 74,00 |
| 2 | KUBAR | 71,19 | 72,07 | 72,92 | 72,86 | 73,42 |
| 3 | KUKAR | 73,59 | 74,06 | 74,67 | 74,91 | 75,51 |
| 4 | KUTIM | 73,00 | 73,81 | 74,35 | 75,10 | 75,64 |
| 5 | Berau | 74,71 | 75,20 | 75,74 | 75,50 | 76,53 |
| 6 | PPU | 71,41 | 72,01 | 72,55 | 72,50 | 73,30 |
| 7 | MAHULU | 67,09 | 67,95 | 68,75 | 68,70 | 70,80 |
| 8 | Balikpapan | 80,01 | 80,71 | 81,13 | 81,00 | 81,60 |
| 9 | Samarinda | 80,11 | 76,88 | 81,43 | 82,14 | 82,77 |
| 10 | Bontang | 80,02 | 80,59 | 80,94 | 81,20 | 81,53 |
| Kalimantan Timur | | 76,24 | 76,88 | 77,44 | 77,75 | 78,32 |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/ daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian LPE non batubara kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.3
Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota

| Kuadran | Simbol | Interpretasi |
|---------|---|---|
| I |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE LEBIH RENDAH dan Rata-rata LPE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi |
| II |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi |
| III |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi |
| IV |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE LEBIH TINGGI dan Rata-rata LPE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi |

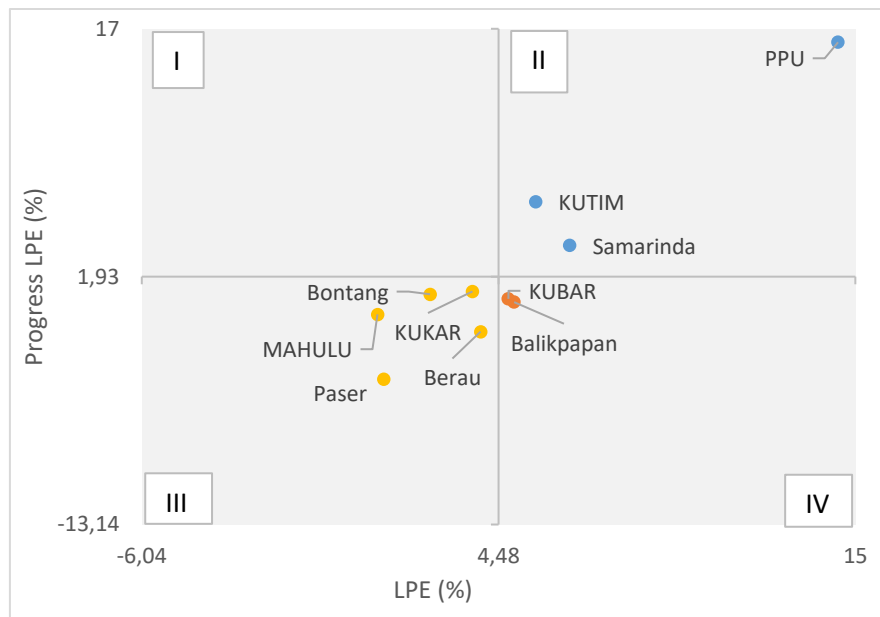
Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

Kuadran I. Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih rendah dan rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bontang, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Berau.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih tinggi dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat.



Gambar V.2

Analisis Kuadran Capaian dan Rata-Rata LPE Kabupaten/Kota Tahun 2022

(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2022 tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kalimantan Timur menggambarkan bahwa produksi dan kinerja perekonomian wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur, terutama pada daerah yang memiliki peranan besar terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Dari 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terdapat 3 kabupaten yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2021. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara, dari -1,69 persen menjadi 14,49 persen.

Dalam rangka memacu pemerataan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, upaya yang dilakukan yakni mendorong peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung tumbuh dan menguatnya sektor perekonomian di Kabupaten/Kota, menjaga iklim investasi daerah dan serta mendorong munculnya hilirasi industri. Adapun target perekonomian Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi ekonomi daerah.

Tabel V.4
Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

| No | KAB/KOTA | Realisasi | | | Target | |
|------------------|------------|-----------|-------|-------|-----------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Paser | -2,86 | 5,41 | 1,09 | 3,50-4,50 | 3,96 |
| 2 | KUBAR | -2,87 | 4,18 | 4,77 | 4,24 | 4,55 |
| 3 | KUKAR | -4,21 | 2,67 | 3,71 | 3,00-3,50 | 3,50-4,00 |
| 4 | KUTIM | -3,08 | -1,01 | 5,58 | 2,10 | 5,00 |
| 5 | Berau | -3,32 | 5,36 | 3,95 | 3,79 | 4,29 |
| 6 | PPU | -2,34 | -1,69 | 14,49 | 1,82+1 | 14,42 |
| 7 | MAHULU | -0,23 | 1,27 | 0,91 | 2,49 | 3,40 |
| 8 | Balikpapan | -0,93 | 4,56 | 4,94 | 4,60 | 5,04 |
| 9 | Samarinda | -0,99 | 2,78 | 6,58 | 6,73 | 6,42 |
| 10 | Bontang | -2,74 | 1,60 | 2,46 | 2,50 | 2,65 |
| Kalimantan Timur | | -2,90 | 2,55 | 4,48 | 3+1 | 4,10 – 4,90 |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan jumlah pengangguran dalam angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel dibawah ini.

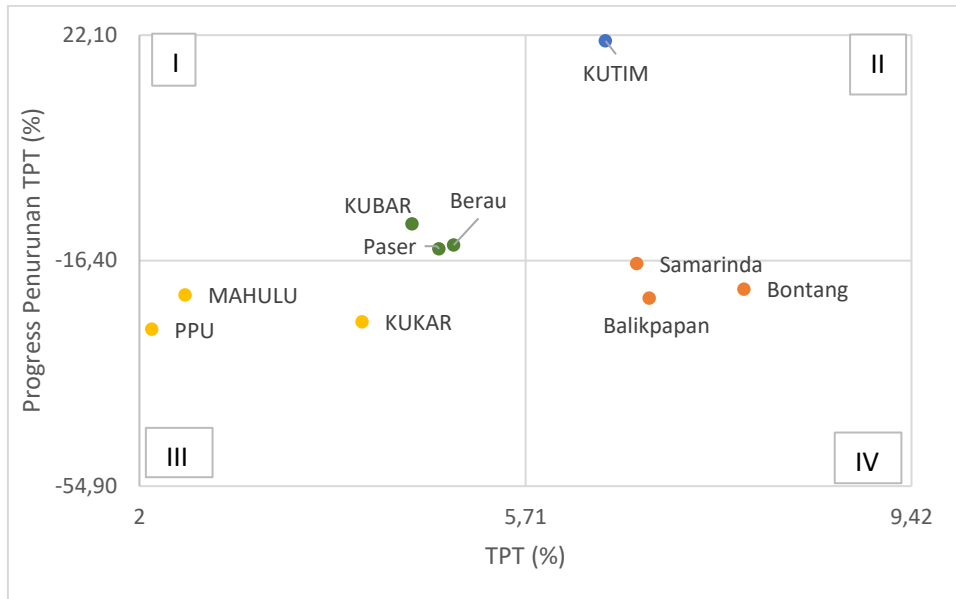
Tabel V.5
Kategori Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota

| Kuadran | Simbol | Interpretasi |
|---------|--------|--|
| I | ● | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT LEBIH RENDAH dan Progress pertumbuhan TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi |

| Kuadran | Simbol | Interpretasi |
|---------|--------|--|
| II | ● | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan Progress pertumbuhan TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi |
| III | ● | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan Progress pertumbuhan TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi |
| IV | ● | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dan Progress pertumbuhan TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian TPT lebih rendah dan progress pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Berau.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian TPT dan progress pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Timur.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian TPT dan progress pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kota dengan capaian TPT lebih tinggi dan progress pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang.



Gambar V.3

Analisis Kuadran Capaian dan Progress Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2022

(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023)

Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi. Penyelarasan target TPT Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 diselaraskan dengan target Kabupaten/Kota, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.

Tabel V.6

Penetapan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2024

| No | KAB/KOTA | Realisasi | | | Target | |
|----|----------|-----------|------|------|--------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Paser | 4,52 | 5,77 | 4,88 | 4,50 | 4,63 |
| 2 | KUBAR | 4,97 | 5,14 | 4,62 | 4,46 | 4,31 |
| 3 | KUKAR | 5,70 | 5,66 | 4,14 | 5,30 | 3,90 |
| 4 | KUTIM | 5,45 | 5,35 | 6,48 | 5,00 | 5,56 |
| 5 | Berau | 5,08 | 5,82 | 5,02 | 4,73 | 4,62 |

| No | KAB/KOTA | Realisasi | | | Target | |
|------------------|------------|-----------|------|------|--------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6 | PPU | 6,22 | 2,95 | 2,12 | 2,95 | 2,05 |
| 7 | MAHULU | 3,49 | 3,14 | 2,44 | 2,90 | 2,00 |
| 8 | Balikpapan | 9,00 | 8,94 | 6,90 | 8,46 | 6,53 |
| 9 | Samarinda | 8,26 | 8,16 | 6,78 | 5,39 | 4,72 |
| 10 | Bontang | 9,46 | 9,92 | 7,81 | 7,65 | 7,35 |
| Kalimantan Timur | | 6,87 | 6,83 | 5,71 | 5,44 | 5,46 |





Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

5.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel V.7

Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

| Kuadran | Simbol | Interpretasi |
|---------|---|--|
| I |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin LEBIH RENDAH dan Progress pertumbuhan angka miskin LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi |
| II |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan Progress pertumbuhan angka miskin LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi |
| III |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan Progress pertumbuhan angka miskin LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi |
| IV |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin LEBIH TINGGI dan Progress pertumbuhan angka miskin LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

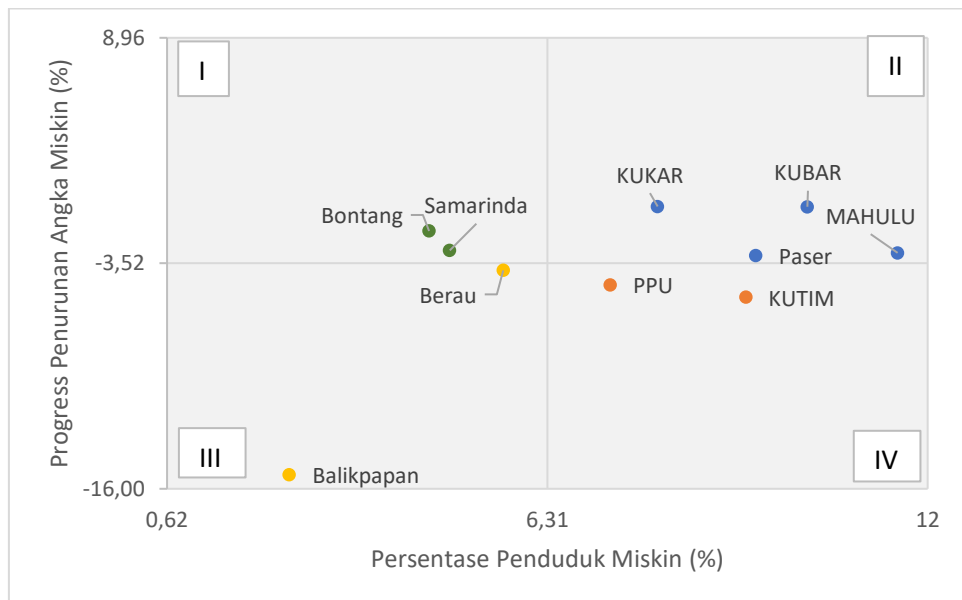
Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih rendah dan progress

pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bontang dan Kota Samarinda.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin dan progress pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan progress pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Balikpapan dan Kabupaten Berau.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi dan progress pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur.



Gambar V.4

Analisis Kuadran Capaian dan Progress Pertumbuhan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2022
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023)

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan dari jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Penurunan ini terjadi merupakan efek dari mulai

berkurangnya pandemic Covid-19 yang masuk ke Kalimantan Timur dan pulihnya perekonomian. Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

Sebagai upaya menurunkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur tahun 2024, penentuan target ditentukan dengan mensinergikan target Kabupaten/Kota tahun 2024 dengan analisis yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang diperkirakan akan semakin kondusif seiring dengan progres transisi pandemi COVID-19 menuju fase endemi.

Tabel V.8
Penetapan Target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
Tahun 2024





| No | KAB/KOTA | Realisasi | | | Target | |
|------------------|------------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Paser | 9,23 | 9,73 | 9,43 | 8,80 | 9,09 |
| 2 | KUBAR | 9,29 | 10,04 | 10,20 | 9,11 | 9,06 |
| 3 | KUKAR | 7,31 | 7,99 | 7,96 | 7,64 | 7,50 |
| 4 | KUTIM | 9,55 | 9,81 | 9,28 | 9,25 | 8,72 |
| 5 | Berau | 5,19 | 5,88 | 5,65 | 5,01 | 5,32 |
| 6 | PPU | 7,36 | 7,61 | 7,25 | 6,50 | 6,76 |
| 7 | MAHULU | 11,44 | 11,90 | 11,55 | 10,50 | 10,00 |
| 8 | Balikpapan | 2,57 | 2,89 | 2,45 | 2,39 | 2,31 |
| 9 | Samarinda | 4,76 | 4,99 | 4,85 | 4,68 | 4,50 |
| 10 | Bontang | 4,38 | 4,62 | 4,54 | 4,03 | 4,25 |
| Kalimantan Timur | | 6,10 | 6,54 | 6,31 | 5,90 | 5,78 |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

5.1.5 Indeks Gini

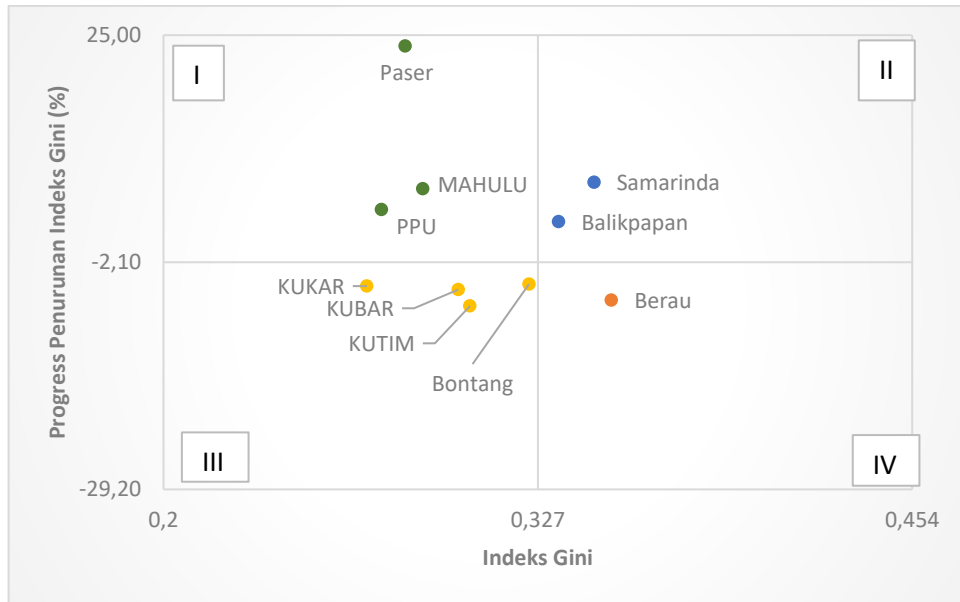
Indeks Gini yang tinggi menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Indeks Gini kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian Indeks Gini kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel V.9
Kategori Capaian Indeks Gini Kabupaten/Kota

| Kuadran | Simbol | Interpretasi |
|---------|---|--|
| I |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini LEBIH RENDAH dan Progress pertumbuhan Indeks Gini LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi |
| II |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan Progress pertumbuhan Indeks Gini LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi |
| III |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan Progress pertumbuhan Indeks Gini LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi |
| IV |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini LEBIH TINGGI dan Progress pertumbuhan Indeks Gini LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian Indeks Gini lebih rendah dan progress pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Balikpapan.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian Indeks Gini dan progress pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Berau.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian Indeks Gini dan progress pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian persentase Indeks Gini lebih tinggi dan progress pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Bontang.



Gambar V.5

Analisis Kuadran Capaian dan Progress Pertumbuhan Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2022

(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023)

Indeks Gini daerah perkotaan jauh lebih tinggi dari daerah perdesaan. Tercatat, pada tahun 2022 ketimpangan perkotaan mencapai 0,334 sedangkan untuk daerah perdesaan 0,283. Rendahnya Indeks Gini di daerah perdesaan tidak serta merta dapat menggeneralisasi bahwa kesejahteraan di daerah perdesaan lebih baik. Hal ini lebih menggambarkan keberagaman pekerjaan di daerah perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yang mengakibatkan *gap* antar lapisan penduduk diperkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Guna pemerataan pendapatan pada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya dan tidak didominasi oleh golongan tertentu. Penentuan target indeks gini tahun 2024 dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penurunan target indeks gini.

Tabel V.10

Penetapan Target Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2024

| No | KAB/KOTA | Realisasi | | | Target | |
|----|----------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Paser | 0,290 | 0,288 | 0,282 | 0,270 | 0,280 |

| No | KAB/KOTA | Realisasi | | | Target | |
|------------------|------------|-----------|-------|-------|-----------------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | KUBAR | 0,338 | 0,317 | 0,300 | 0,333 | 0,299 |
| 3 | KUKAR | 0,294 | 0,283 | 0,269 | 0,260- 0,280 | 0,268 |
| 4 | KUTIM | 0,325 | 0,328 | 0,304 | 0,330 | 0,330 |
| 5 | Berau | 0,300 | 0,377 | 0,352 | 0,305 | 0,344 |
| 6 | PPU | 0,292 | 0,263 | 0,274 | 0,263 | 0,260 |
| 7 | MAHULU | 0,259 | 0,270 | 0,288 | 0,237 | 0,229 |
| 8 | Balikpapan | 0,311 | 0,325 | 0,334 | 0,300 | 0,320 |
| 9 | Samarinda | 0,324 | 0,322 | 0,345 | 0,345 | 0,327 |
| 10 | Bontang | 0,405 | 0,340 | 0,324 | 0,320 | 0,320 |
| Kalimantan Timur | | 0,328 | 0,331 | 0,327 | 0,308 | 0,316 |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan di tahun 2022 menunjukkan bahwa masih terdapat 4 (empat) permasalahan utama pembangunan yang harus diselesaikan, yakni tingkat kemiskinan, indeks gini, kualitas lingkungan dan indeks reformasi birokrasi. Permasalahan tingkat kemiskinan dilihat dari daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa penduduk miskin lebih banyak di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan, terutama di wilayah kabupaten yakni wilayah Kabupaten Mahulu dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,55 persen, Kabupaten Kutai Barat sebesar 10,20 persen, dan Kabupaten Paser sebesar 9,43 persen. Indeks gini yang merupakan pengukuran dari tingkat ketimpangan pendapatan apabila dilihat berdasarkan tempat tinggal mengalami sedikit penurunan di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Selanjutnya untuk permasalahan kualitas lingkungan hidup yang diukur melalui IKLH menunjukkan bahwa masih perlu upaya lebih terhadap perbaikan kualitas lingkungan dan udara. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

Berdasarkan pertimbangan ke empat permasalahan tersebut, maka perlu strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten/kota yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang inklusif dan berkelanjutan, dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang berdampak positif pada pengurangan kesenjangan antar wilayah. Hal ini sejalan dengan tema RKPD Tahun 2024, yaitu *“Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal*

untuk Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan serta Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan”, yang menekankan pada peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah untuk mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan dan Menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam rangka mendukung pembangunan wilayah kabupaten/kota. Adapun arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota beserta lokasi khusus pelaksanaannya dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan, target sasaran pembangunan daerah, serta sektor potensial di masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Tabel V.11
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2024

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|---|--|--|
| 1 | Paser | Peningkatan layanan pendidikan | 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa) | SMAN 2 TANAH GROGOT Kec.Tanah Grogot Kelurahan Janju, SMKN 1 TANAH GROGOT Kec,Tanah Grogot Kelurahan Tanah Paser, SMKN 3 TANAH GROGOT Kec.Tanah Grogot Kelurahan Tepian Batang |
| | | | 2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin) | SMAN 2 TANAH GROGOT Kec.Tanah Grogot Kelurahan Janju |
| | | | 3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB | SMAN 2 TANAH GROGOT Kec.Tanah Grogot Kelurahan Janju |
| | | | 4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB | SMAN 2 TANAH GROGOT Kec.Tanah Grogot Kelurahan Janju, SMKN 1 TANAH GROGOT Kec,Tanah Grogot Kelurahan Tanah Paser, SMKN 2 TANAH GROGOT Kec.Tanah Grogot Kelurahan Tepian Batang, SMKN 3 TANAH GROGOT Kec.Tanah Grogot Kelurahan Tepian Batang, SMKN 4 TANAH GROGOT Kec.Tanah Grogot Kelurahan Tepian Batang |
| | | Peningkatan layanan kesehatan | Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah | Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tepian Batang |
| | | Peningkatan kompetensi tenaga kerja | 1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah | SMAN 2 TANAH GROGOT |
| | | | 2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan | BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten Paser) |
| | | Peningkatan Peran BUMDes Aktif dan Berbadan Hukum | Pelatihan dan Pendampingan bagi BUMDes | |
| | | Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan | Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan | Kec. Tanah Grogot, Kec. Kuaro, Kec. Paser Belengkong |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|---|---|--|
| | | Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin | Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial | Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Kuaro & Muara Samu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Tanah Grogot & Paser Belengkong Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Batu Sopang, Desa Senaken, Kec. Paser Belengkong, Tanah Grogot, Desa Padang Pengrapat, Desa Putang Kec. Long Kali, Kec. Kuaro, Desa Janju Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Kec. Long Ikis Korban Bencana : semua Kecamatan |
| | | Pengembangan kawasan pariwisata | Pengembangan destinasi pariwisata Kawasan Gunung Embun | Desa Luan, Kec. Muara Samu |
| | | Peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan | Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani (komoditi kelapa sawit) | Kec. Long ikis/Kuaro |
| | | Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan | Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan | Intensifikasi : Karet : Desa Tempakan Kec. Batu Engau, Desa Busui Kec. Batu Sopang, Desa Mendik Makmur Kec. Long Kali Kelapa Sawit : Desa Krayan Makmu Kec. Long Ikis Ekstensifikasi/Perluasan : Kelapa Sawit : Desa Tebru Pasir Damai Kec. Batu Engau |
| | | Peningkatan produksi sektor peternakan | Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) | Kuaro, Long Ikis, Long Kali, Paser Belengkong, Tanah Grogot |
| | | Peningkatan produktivitas TPH | Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura (pisang) | Padang Pangrapat |
| | | Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan | Perlindungan ANKT di usaha perkebunan | Kab. Paser |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|---|---|--|
| | | Peningkatan produktivitas perikanan budidaya | Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan) | Kab. Paser |
| | | Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM | Pelatihan Koperasi dan UKM | Kec. Tanah Grogot |
| | | Peningkatan produksi / hilirisasi produk potensial daerah | Pembangunan Rumah Produksi Bersama | Desa Kersik Bura Kec. Paser Belengkong, Desa Lomu Kec. Batu Engau |
| | | Peningkatan layanan infrastruktur | 1. Pemeliharaan Jalan Provinsi | Ruas Jalan Janju - Jone - Pondong Baru dan Ruas Jalan Prioritas Provinsi |
| | | | 2. Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi rawa | DIR. Suliliran |
| | | | 3. Evaluasi Rencana Tata Ruang | Kab. Paser |
| | | | 4. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni | Paser |
| | | | 5. Koordinasi dan upaya peningkatan akses layanan air minum skala regional | Longkali |
| | | | 6. Penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas di permukiman untuk menunjang fungsi hunian | Paser Belengkong |
| | | | 7. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli | Tanah Grogot |
| | | Pengelolaan lingkungan hidup | 1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS | Kab. Paser |
| | | | 2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) | Kab. Paser |
| | | | 3. Pengendalian KARHUTLA | Kab. Paser |
| | | | 4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan | Kab. Paser |
| | | | 5. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER | Kab. Paser |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|--------------------------------|--|--|
| | | | 6. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara ambien passive sampler | Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Kasungai (Titik Hulu dan Titik Hilir) Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (TERMINAL KM. 7), PERKANTORAN (KANTOR BUPATI PASER), PEMUKIMAN (KANTOR DESA TAPIS), INDUSTRI (KANTOR DESA LONG PINANG) Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Pelabuhan Pondong |
| | | | 7. Pemantauan dan penanganan sampah laut | Kab. Paser |
| | | | 8. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup | Kab. Paser |
| 2 | Kutai Barat | Peningkatan layanan pendidikan | 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa) | SMAN 4 Sendawar Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Muara Asa, SMAN 1 Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Linggang Bigung, SMAN 1 Siluq Ngurai Kecamatan Siluq Ngurai Kelurahan Muhur |
| | | | 2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin) | SMAN 4 Sendawar Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Muara Asa, SMAN 1 Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Linggang Bigung, SMAN 1 Siluq Ngurai Kecamatan Siluq Ngurai Kelurahan Muhur |
| | | | 3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB | SMAN 4 Sendawar Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Muara Asa, SMAN 1 Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Linggang Bigung, SMAN 1 Siluq Ngurai Kecamatan Siluq Ngurai Kelurahan Muhur |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|---|---|--|
| | | | 4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB | SMAN 4 Sendawar Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Muara Asa, SMAN 1 Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Linggang Bigung, SMAN 1 Siluq Ngurai Kecamatan Siluq Ngurai Kelurahan Muhur, SMKN 3 Sendawar Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Ngenyan Asa, SMK KESEHATAN KARTINI Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu, SMKN 1 BONGAN Kecamatan Kecamatan Bongan Kelurahan Bukit Harapan, SMKN 1 SENDAWAR Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu |
| | | Peningkatan layanan kesehatan | Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah | Kecamatan Barong Tongkok, Kelurahan Barong Tongkok |
| | | Peningkatan kompetensi tenaga kerja | 1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah | SMAN 4 Sendawar, SMAN 1 Linggang Bigung, SMAN 1 Siluq Ngurai |
| | | | 2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan | BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten Kutai Barat) |
| | | Peningkatan Peran BUMDes Aktif dan Berbadan Hukum | Pelatihan dan Pendampingan bagi BUMDes | |
| | | Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin | Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial | Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Siluq Ngurai & Muara Lawa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Melak & Barong Tongkok Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok, Melak Ulu Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Kec. Damai Korban Bencana : semua Kecamatan |
| | | Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi | Destinasi ekowisata berkelas dunia yang mendorong ekonomi kerakyatan (Pengembangan Danau Kaskade) | Danau Jempang (Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang) |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|---|--|--|
| | | Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan | Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan | <p>Intensifikasi :</p> <p>Kelapa Sawit : Kec. Bongan dan Kec. Jempang Karet : Kampung Tering lama Ulu Kec. Tering, Kampung Tering, Kamp. Baru, Kamp. Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat. Kakao :Kec. Tering (Kamp. Muara Mujan dan Kamp. Tering Lama) Kelapa : Kecamatan Jempang, Kecamatan Bongan</p> <p>Peremajaan Kec.Barong Tongkok (karet)</p> <p>Ekstensifikasi/Perluasan :</p> <p>Kelapa Sawit : Kamp.Lendian Permai Kec. Siluq Ngurai, Kec. Damai. Karet : Kec. Sekolaq Darat (Kamp.Sekolaq Darat, Kampung Sekolaq Muliaq, dan Kampung Sekolaq Joleq) Kakao : Kec. Nyuatan Kopi : Kec. Tering, Kampung Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung</p> |
| | | Peningkatan produksi sektor peternakan | Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) | Barong Tongkok, Linggang Bigung, Sekolaq Darat, Tering |
| | | Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan | Perlindungan ANKT di usaha perkebunan | Kab. Kutai Barat |
| | | Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM | Pelatihan Koperasi dan UKM | Kec. Barong Tongkok |
| | | Peningkatan layanan infrastruktur | 1. Pembangunan Jalan menuju Kab. Mahulu | Ruas Jalan Tering - Batas Mahulu |
| | | | 2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni | Kutai Barat |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|--|---|---|
| | | | 3. Revitalisasi/penanganan Kawasan Kumuh | Besiq, Damai Kota, Cempedes |
| | | | 4. Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi rawa | DIR. Resak |
| | | | 5. Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang | Kab. Kutai Barat |
| | | | 6. Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian | Barong Tongkok |
| | | | 7. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli | Barong Tongkok |
| | | Pemanfaatan energi baru dan terbarukan | 1. Pembangunan PLTS Komunal 1 lokasi di Kubar | Anan Jaya |
| | | | 2. Revitalisasi PLTS 1 lokasi di Kubar | Kendesiq |
| | | Pengelolaan lingkungan hidup | 1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS | Kab. Kutai Barat |
| | | | 2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) | Kab. Kutai Barat |
| | | | 3. Pengendalian KARHUTLA | Kab. Kutai Barat |
| | | | 4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan | Kab. Kutai Barat |
| | | | 5. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER | Kab. Kutai Barat |
| | | | 6. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air danau dan udara ambien passive sampler | Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Mahakam Titik Tering Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (JL. PERKANTORAN NO.III PERSIMPANGAN LMPU MERAH BUSSINESS CENTER, KUTAI BARAT), PERKANTORAN (AREA PERKANTORAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KUBAR), PEMUKIMAN (KANTOR KECAMATAN SEKOLAQ DARAT), INDUSTRI (PABRIK TAHU KP. SUMBER SARI) |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|-------------------|---|--|--|
| | | | 7. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup | Kab. Kutai Barat |
| 3 | Kutai Kartanegara | Peningkatan layanan pendidikan | 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa) 2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin) 3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB 4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB | SMAN 3 LOA KULU Kecamatan Loa Kulu Kelurahan Sungai Payang, SMAN 3 KOTA BANGUN Kec.Kota Bangun Kelurahan Kedang Ipil, SMAN 3 MUARA MUNTAI Kec.Muara Muntai Kelurahan Jantur Selatan SMAN 3 LOA KULU Kecamatan Loa Kulu Kelurahan Sungai Payang, SMAN 3 KOTA BANGUN Kec.Kota Bangun Kelurahan Kedang Ipil, SMAN 3 MUARA MUNTAI Kec.Muara Muntai Kelurahan Jantur Selatan SMAN 3 LOA KULU Kecamatan Loa Kulu Kelurahan Sungai Payang, SMAN 3 KOTA BANGUN Kec.Kota Bangun Kelurahan Kedang Ipil, SMAN 3 MUARA MUNTAI Kec.Muara Muntai Kelurahan Jantur Selatan SMAN 3 LOA KULU Kecamatan Loa Kulu Kelurahan Sungai Payang, SMAN 3 KOTA BANGUN Kec.Kota Bangun Kelurahan Kedang Ipil, SMAN 3 MUARA MUNTAI Kec.Muara Muntai Kelurahan Jantur Selatan |
| | | Peningkatan layanan kesehatan | Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah | Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu |
| | | Peningkatan kompetensi tenaga kerja | 1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah | SMAN 3 LOA KULU, SMAN 3 KOTA BANGUN, SMAN 3 MUARA MUNTAI |
| | | | 2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan | BLKI Bontang (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten Kutai Kartanegara) |
| | | Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan | Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan | Kec. Tenggarong, Kec. Tenggarong Seberang, Kec. Loa Kulu |
| | | Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin | Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha | Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Muara Badak & Marangkayu |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|--|---|--|
| | | | Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial | Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Tenggarong & Tenggarong Seberang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Bukit Raya Kec. Tenggarong Seberang, Kel. Muara Jawa Kec. Muara Jaya, Desa Kota bangun III, Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja, Desa Loh Sumber Loa Kulu, Kel. Melayu Kec. Tenggarong, Desa Anggana Kec. Anggana, Desa Gn. Pegat Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Maluhu, Desa Loh Sumber Loa Kulu Korban Bencana : semua Kecamatan |
| | | Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi | Destinasi ekowisata berkelas dunia yang mendorong ekonomi kerakyatan (Pengembangan Danau Kaskade) | Danau semayang (Kecamatan Kenohan)-Danau Melintang (Kecamatan Muara Wis) |
| | | Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan | Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan | Intensifikasi : Kelapa Sawit : Kec. muara Leka, Desa Mekar Jaya Kec. Sebulu, Desa Teluk Muda Kec. Kenohan Karet : Poktan Tunas Harapan Kakao : Desa. Sumber Sari Kec. Kota Bangun Kelapa : Kel. Muara Jawa Ilir Lada: Desa Batuah Ekstensifikasi/Perluasan : Kelapa Sawit : Desa Prian Kec. Muara Muntai, Desa Santan Ilir Kec. Marang Kayu, Desa Tuana Tua Kec. Kenohan Karet : Desa jembayan Dalam Kec. Loa Kulu Kopi : Kamp. Kopi Luwak kecamatan Marangkayu |
| | | Peningkatan produksi sektor peternakan | Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) | Kota Bangun, Loa Kulu, Marang Kayu, Muara Amuntai, Muara Kaman, Muara wis, Semboja, Tenggarong, Tenggarong Seberang |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|---|---|--|
| | | Peningkatan produktivitas TPH | Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura (pisang) | Benamang |
| | | Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan | Perlindungan ANKT di usaha perkebunan | Kab. Kutai Kertanegara |
| | | Peningkatan produktivitas perikanan budidaya | Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan) | Kab. Kutai Kertanegara |
| | | Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM | Pelatihan Koperasi dan UKM | Kec. Tenggarong Kota |
| | | Peningkatan produksi / hilirisasi produk potensial daerah | Pembangunan Rumah Produksi Bersama | Desa Tuana Tuha Kec Kenohan |
| | | Peningkatan layanan infrastruktur | 1. Pemeliharaan Jalan Provinsi | Ruas Jalan Patung Lembuswana - Sebulu dan Ruas Jalan yang mendukung perekonomian |
| | | | 2. Rekonstruksi Jalan Provinsi | |
| | | | 3. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni | Kutai Kartanegara |
| | | | 4. Peningkatan layanan suplai air minum skala regional | Sekitar Marangkayu & Muara Badak |
| | | | 5. Revitalisasi/penanganan kawasan kumuh | Muara Badak |
| | | | 6. Pembangunan jaringan distribusi listrik | Desa Prangat baru, kec. marang kayu, kab Kukar |
| | | | 7. Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan | DI. Sungai Buluh |
| | | | 8. Pengendalian banjir | Perkuatan Tebing Sungai Sebuntal Marangkayu |
| | | | 9. Koordinasi dan penyiapan readiness criteria pengelolaan air limbah domestik skala regional | Loa Janan, Perbatasan dengan Kutim, Bontang |
| | | | 10. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli | Tenggarong |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) | |
|----|----------------|--|---|--|--|
| | | Pemanfaatan energi baru dan terbarukan | 1. Pembangunan instalasi biogas | Kab. Kutai Kartanegara | |
| | | Pengelolaan lingkungan hidup | 1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS | Kab. Kutai Kartanegara | |
| | | | 2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) | Kab. Kutai Kartanegara | |
| | | | 3. Pengendalian KARHUTLA | Kab. Kutai Kartanegara | |
| | | | 4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan | Kab. Kutai Kartanegara | |
| | | | 5. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER | Kab. Kutai Kartanegara | |
| | | | 6. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air danau, air laut dan udara ambien passive sampler | Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Mahakam (Titik Anggana, Bloro, Kumala), Sungai Kedang Kepala (Titik Desa Kedang Kepala dan Desa Siran), Sungai Belayan (Titik Desa Sebelimbingan dan Muara Sungai Belayan), Sungai Santan (Titik Jembatan Marangkayu Santan Ulu dan Jembatan Santan Tengah) | |
| | | | | Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (SIMPANG 3 JAM BENTONG, JL. MULAWARMAN, KUKAR), PERKANTORAN (DINAS PERIKANAN TENGGARONG), PEMUKIMAN (KAMPUNG MANGKURAWANG, KUKAR), INDUSTRI (INDUSTRY READY MIX, KEC. TENGGARONG) | |
| | | | | Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Pantai Pemedas, Pantai Tanah Merah, Pantai Mutiara Indah, Pantai Samboja, Pantai Keresik, Tanjung Sembilang | |
| | | | 7. Pemantauan dan penanganan sampah laut | Kab. Kutai Kartanegara | |
| | | | 8. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan | Kab. Kutai Kartanegara | |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup | |
| 4 | Kutai Timur | Peningkatan layanan pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa) 2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin) 3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB 4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB | <p>SMAN 2 Sandaran Kec.Sandaran Kelurahan Susuk Luar, SMKN 1 RANTAU PULUNG Kec. Rantau Pulung Kelurahan Margo Mulyo, SMKN 1 SANGKULIRANG Kec. Sangkulirang Kelurahan Kerayaan</p> <p>SMAN 2 Sandaran Kec. Sandaran Kelurahan Susuk Luar</p> <p>SMAN 2 Sandaran Kec. Sandaran Kelurahan Susuk Luar</p> <p>SMAN 2 Sandaran Sandaran Kec.Sandaran Kelurahan Susuk Luar, SMKN 1 Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kelurahan Karya Bakti, SMKN 1 Sangkulirang Kec. Sangkulirang Kelurahan Kerayaan, SMKN 1 TELEN Kec.Telen Kelurahan Muara Pantun, SMKN 2 BENGALON Kec. Bengalon Kelurahan Tepian Indah, SMKN 2 SANGKULIRANG Kec. Sangkulirang Kelurahan Mandu Pantai Sejahtera, SMKN 1 BENGALON Kec. Bengalon Kelurahan Sepaso Barat, SMKN 1 KONGBENG Kec. Kongbeng Kelurahan Marga Mulia, SMKN 1 MUARA BENGKAL Kec.Muara Bengkal Kelurahan Muara Bengkal Ulu, SMKN 1 SANGATA UTARA Kec.Sangatta Utara, SMKN 2 SANGATA UTARA Kec.Sangatta Utara Kelurahan Sanggatta Utara, SMKN 1 KALIORANG Kecamatan Kaliorang Kelurahan Bukit Makmur</p> |
| | | Peningkatan layanan kesehatan | Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah | Kecamatan Sangatta Utara, Kelurahan Teluk Lingga |
| | | Peningkatan kompetensi tenaga kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah 2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan | <p>SMAN 2 Sandaran</p> <p>BLKI Bontang (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten Kutai Timur)</p> |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|--|---|--|
| | | Peningkatan Peran BUMDes Aktif dan Berbadan Hukum | Pelatihan dan Pendampingan bagi Bumdes | |
| | | Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin | Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial | Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Teluk Pandan & Sanggatta Selatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Sangatta Selatan & Sangatta Utara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Simpang Tiga Bontang-Sanggatta, Teluk Lingga, Dea Miau Baru, Kec. Sangatta Selatan Korban Bencana : semua Kecamatan |
| | | Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi (KSPP) 2 | Pengembangan Destinasi, SDM dan Promosi | Karst Sangkulirang - Mangkalihat (Kecamatan Sangkulirang) |
| | | Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan | Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan | Intensifikasi : Kelapa Sawit : Kec. Sangkulirang Karet : Kec. Long Mesangat Kakao : Kec. Kaubun Aren : Kecamatan Kaliorang Peremajaan Karet : Kec. Long Mesangat Kakao : Kecamatan Busang Ekstensifikasi/Perluasan : Kelapa Sawit : Kecamatan Karang Kakao : Lada : Kec. Batu Ampar |
| | | Peningkatan produksi sektor peternakan | Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) | Kaliorang, Kaubun, Kongbeng, Muara Wahau, Sangkulirang |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|---|---|--|
| | | Peningkatan produktivitas perikanan budidaya | Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan) | Udang dan Bandeng : Kec. Kaliorang (Desa Selangkau); Kec. Bengalon (Desa Muara Bengalon), Kec. Sangatta Selatan (Desa Teluk Singkama, Desa Sangkima dan Kel. Singa Geweh) |
| | | Peningkatan produktivitas TPH | Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura (pisang) | Rumput Laut : Kec. Sangatta Selatan (Desa Teluk Singkama Kaibun, Kaliorang, Bengalon, Ma. Ancalong |
| | | Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan | Pemanfaatan limbah sawit menjadi bioenergi | Kec. Muara Wahau |
| | | Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan | Perlindungan ANKT di usaha perkebunan | Kab. Kutai Timur |
| | | Pengembangan hilirisasi industri | Dukungan Pengembangan KEK MBTK | Kec. Kaliorang |
| | | Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM | Pelatihan Koperasi dan UKM | Sangatta |
| | | Peningkatan produksi / hilirisasi produk potensial daerah | Pembangunan Rumah Produksi Bersama | Sangatta |
| | | Peningkatan layanan infrastruktur | 1. Rekonstruksi Jaln Provinsi | Ruas Jalan Kaliorang - Talisayan |
| | | | 2. Pembangunan Jalan dan Jembatan yang mendukung perekonomian | Akses jalan dan jembatan Nibung |
| | | | 3. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni | Kutai Timur |
| | | | 4. Pembangunan infrastruktur dalam KEK MBTK | |
| | | | 5. Pengendalian banjir | Normalisasi Sungai Sangatta |
| | | | 6. Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang | Kab. Kutai Timur |
| | | | 7. Koordinasi dan upaya peningkatan akses layanan air minum skala regional | Kec. Teluk Pandan |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) | |
|----|----------------|------------------------------|---|--|--|
| | | | 8. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli | Kutai Timur | |
| | | Pengelolaan lingkungan hidup | 1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS | Kab. Kutai Timur | |
| | | | 2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) | Kab. Kutai Timur | |
| | | | 3. Pengendalian KARHUTLA | Kab. Kutai Timur | |
| | | | 4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan | Kab. Kutai Timur | |
| | | | 5. Pengelolaan KBEP Karst Mangkalihat Ulu | Kab. Kutai Timur | |
| | | | 6. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER | Kab. Kutai Timur | |
| | | | 7. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air danau, air laut dan udara ambien passive sampler | | Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Bontang Titik Jembatan Jl. Poros Bontang-Samarinda Km. 8 Kutai Timur |
| | | | | | Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (JL. A. WAHAB SYAHRANIE, KANTOR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. KUTIM, KUTAI TIMUR), PERKANTORAN (KANTOR PDAM UNIT PERKANTORAN BUKIT PELANGI), PEMUKIMAN (PERMUKIMAN JLN. D.I. PANJAITAN), INDUSTRI (SIMPANG SECURITY GATE PELANGI) |
| | | | | | Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Pantai Kenyamukan, Pantai Teluk Lombok, dan Pantai Teluk Kaba |
| | | | 8. Pemantauan dan penanganan sampah laut | Kab. Kutai Timur | |
| | | | 9. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan | Kab. Kutai Timur | |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|--------------------------------|---|---|
| | | | dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup | |
| 5 | Berau | Peningkatan layanan pendidikan | <p>1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)</p> <p>2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)</p> <p>3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB</p> <p>4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB</p> | <p>SMAN 11 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Eka Sapta, SMAN 13 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Campur Sari, SMAN 3 Berau Kelurahan Talisayan Kecamatan Talisayan, SMKN 6 BERAU Kec.Teluk Bayur Kelurahan Desa Labanan</p> <p>SMAN 11 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Eka Sapta, SMAN 13 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Campur Sari, SMAN 3 Berau Kelurahan Talisayan Kecamatan Talisayan</p> <p>SMAN 11 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Eka Sapta, SMAN 13 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Campur Sari, SMAN 3 Berau Kelurahan Talisayan Kecamatan Talisayan</p> <p>SMAN 11 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Eka Sapta, SMAN 13 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Campur Sari, SMAN 3 Berau Kelurahan Talisayan Kecamatan Talisayan, SMKN 7 BERAU Kecamatan Tabalar, SMKN 8 BERAU Kecamatan Talisayan Desa Bumi Jaya, SMKS INSAN CEMERLANG Kec.Tanjung Redeb Kelurahan Tanjung Redeb , SMKN 3 BERAU Kecamatan Pulau Derawan Kelurahan Tanjung Batu, SMKN 2 BERAU Kecamatan Tanjung Redeb Kelurahan Sungai Bedungun, SMKN 1 BERAU Kecamatan Tanjung Redeb Kelurahan Tanjung Redeb, SMKN 6 BERAU Kecamatan Gunung Tabur Kelurahan Merancang Ulu, SMKS SEHAT PERSADA Kecamatan Tanjung Redeb Kelurahan Gunung Panjang</p> |
| | | Peningkatan layanan kesehatan | Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah | Kecamatan Tanjung Redeb, Kelurahan Karang Ambon |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|--|---|--|
| | | Peningkatan kompetensi tenaga kerja | 1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah 2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan | SMAN 11 Berau, SMAN 13 Berau, SMAN 3 Berau BLKI Bontang (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kota Berau) |
| | | Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin | Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial | Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Tabalar & Talisayan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Tanjung Redeb & Gunung Tabur Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Sambaliung, Talisayan, Kec. Teluk Bayur, Kel. Karang Ambun Korban Bencana : semua Kecamatan |
| | | Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi (KSPP) 1 | Pengembangan Destinasi, SDM dan Promosi | Kaniungan - Biduk-biduk (Kecamatan Biduk Biduk), Maratua (Kecamatan Maratua) dan sekitarnya |
| | | Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan | Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan | Intensifikasi : Kakao : Kampung. Gn. Tabur Lada : Kec. Gunung Tabur Kelapa : Kampung Tubaan, Kecamatan Biduk-Biduk Pala : Kampung Teluk Sumbang, Kampung Batu-Batu Peremajaan Kakao : Kec. Kelay Kelapa : Kec. Biduk-biduk Ekstensifikasi/Perluasan : Kakao Kec. Sambaliung |
| | | Peningkatan produksi sektor peternakan | Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) | Biduk Biduk, Gunung Tabur, Sambaliung, Talisayan, Teluk Bayur |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|--|---|---|--|
| | | Peningkatan produktivitas perikanan budidaya | Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan) | Udang dan Bandeng : Kec. Sambaliung (Desa Kampung Suaran); Kep. Derawan (Desa Kasai dan Desa Pegat Tumbuk) Rajungan : Kep. Derawan (Desa Tanjung Batu) Kepiting : Kec. Batu Putih (Kampung Batu Putih); Kep. Derawan (Desa Tabalar) |
| | | Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan | Perlindungan ANKT di usaha perkebunan | Kab. Berau |
| | | Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM | Pelatihan Koperasi dan UKM | Kec. Tanjung Redeb |
| | | Peningkatan produksi / hilirisasi produk potensial daerah | Pembangunan Rumah Produksi Bersama | Kec. Tanjung Redeb |
| | | Peningkatan layanan infrastruktur | 1. Rekonstruksi Jalan Provinsi | Ruas Jalan Tanjung Redeb - Talisayan |
| | 2. Pemeliharaan Jalan Provinsi | | | |
| | 3. Penanganan Rumah tidak layak huni | | Berau | |
| | 4. Pembangunan pengaman pantai | | Pantai Talisayan - Dumaring, Pantai Biduk-biduk, Pantai Balikukup, Pantai Kaniungan, Pantai Biduk-biduk Kamp. Giring-giring | |
| | 5. Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan | | DI. Biatan, DI. Labanan, DI. Merancang, DI. Semurut - Buyung buyung | |
| | 6. Revitalisasi/penanganan kawasan kumuh | | Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung | |
| | 7. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli | | Tanjung Redeb | |
| | | Pemanfaatan energi baru dan terbarukan | 1. Pembangunan PLTS Komunal | Kab. Berau (Desa Mapulu) |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|--|---|---|
| | | Pengelolaan lingkungan hidup | 1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS | Kab. Berau |
| | | | 2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) | Kab. Berau |
| | | | 3. Pengendalian KARHUTLA | Kab. Berau |
| | | | 4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan | Kab. Berau |
| | | | 5. Pengelolaan KBEP Karst Mangkalihat Pesisir | Kab. Berau |
| | | | 6. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER | Kab. Berau |
| | | | 7. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air danau, air laut dan udara ambien passive sampler | Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Segah (Titik Hulu PT. BBE, Hilir Berau Coal, Jembatan Gunung Tabur, Kerator Gunung Tabur), Sungai Kelay (Titik Kantor Bupati dan Keraton Sambaliung) |
| | | | | Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (PEREMPATAN JL. H. ISA 2 APT. PRANOTO, BERAU), PERKANTORAN (KANTOR DPMPSTP, BERAU), PEMUKIMAN (PERUM KORPRI, JL. MURJANI 3), INDUSTRI (PLTU BERAU) |
| | | | | Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Pulau Derawan dan Pulau Panjang |
| | | 8. Pemantauan dan penanganan sampah laut | Kab. Berau | |
| | | 9. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup | Kab. Berau | |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|---|---|---|
| 6 | PPU | Peningkatan layanan pendidikan | 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa) | SMAN 1 PPU Kecamatan Penajam Kelurahan Penajam, SMK INNE DONGWHA Kec Penajam Kelurahan Gresik , SMKN 1 PENAJAM PASER UTARA Kelurahan Bukit Raya Kecamatan Sepaku, SMKN 4 PENAJAM PASER UTARA Kelurahan Kecamatan Waru Kelurahan Sesulu |
| | | | 2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin) | SMAN 1 PPU Kecamatan Penajam Kelurahan Penajam |
| | | | 3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB | SMAN 1 PPU Kecamatan Penajam Kelurahan Penajam |
| | | | 4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB | SMAN 1 PPU SMAN 1 PPU Kecamatan Penajam Kelurahan Penajam, SMKN 1 PENAJAM PASER UTARA Kelurahan Bukit Raya Kecamatan Sepaku, SMKN 2 PPU Penajam Kelurahan Nipah Nipah, SMKN 3 PPU Kecamatan Babulu Kelurahan Babulu Darat, SMKN 4 PPU Kecamatan Babulu Kelurahan Babulu Darat, SMKN 5 PPU Kecamatan Sepaku Kelurahan Binuang, SMK INNE DONGWHA Kec Penajam Kelurahan Gresik |
| | | Peningkatan layanan kesehatan | Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah | Kecamatan Penajam, Kelurahan Penajam |
| | | Peningkatan kompetensi tenaga kerja | 1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah | SMAN 1 PPU |
| | | | 2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan | BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten PPU) |
| | | Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan | Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan | Kec. Penajam, Kec. Petung |
| | | Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin | Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial | Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Penajam & Sepaku Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Penajam & Sepaku |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|--|---|--|
| | | | | Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Kel. Nenang Kec. Penajam, Kel. Petung Kec. Penajam, Desa Girimukti, Kel. Gunung Seteleng, Desa Rawa Mulia Kec. Babulu Korban Bencana : semua Kecamatan |
| | | Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan | Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan | Intensifikasi : Kelapa Sawit : Desa argomulyo, Poktan Sri Rejeki A Lada : Poktan Sumber Urip, Poktan Sumber Wangi, Poktan Dewi Sri A Kelapa : Kelurahan Pejala Ekstensifikasi/Perluasan : Kelapa Sawit : Poktan Suka Maju |
| | | Peningkatan produksi TPH | Pengembangan komoditi tanaman pangan | Kab. Penajam Paser Utara (Kec. Penajam (Desa Sidorejo), Kec. Babulu Desa. Gunung Mulia, Desa Sumber Sari) |
| | | Peningkatan produksi sektor peternakan | Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) | Babulu, Penajam, Sepaku, Waru |
| | | Peningkatan produktivitas perikanan budidaya | Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan) | Udang : Kec. Penajam (Desa Sesumpu) Rumput Laut : Kec. Penajam (Desa Sungai Parit, Desa Api-api, Desa Waru) Kepiting : Kec. Penajam (Desa Janabora) Bandeng : Kec. Penajam (Desa Babulu Laut) |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|---|---|--|
| | | Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan | Perlindungan ANKT di usaha perkebunan | Kab. Penajam Paser Utara |
| | | Pengembangan hilirisasi industri | Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Buluminung | Kec. Penajam |
| | | Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM | Pelatihan Koperasi dan UKM | Kec. Penajam |
| | | Peningkatan layanan infrastruktur | 1. Pemeliharaan Jalan Provinsi | Ruas Jalan Prioritas Provinsi (mendukung KSP KI Buluminung) |
| | | | 2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni | PPU |
| | | | 3. Pembangunan pengaman pantai | Pantai Tanjung Jumlai |
| | | | 4. Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang | Kab. PPU |
| | | | 5. Koordinasi dan upaya peningkatan akses layanan air minum & air limbah skala regional | Babulu, daerah berbatasan dengan IKN & Balikpapan |
| | | | 6. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli | Penajam |
| | | Pengelolaan lingkungan hidup | 1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS | Kab. PPU |
| | | | 2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) | Kab. PPU |
| | | | 3. Pengendalian KARHUTLA | Kab. PPU |
| | | | 4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan | Kab. PPU |
| | | | 5. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER | Kab. PPU |
| | | | | Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Sepaku (Titik Nursery Suring dan Titik Jembatan Sei Sepaku) |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|---|---|---|
| | | Peningkatan layanan kesehatan | Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah | Kecamatan Long Bagun, Kampung Ujoh Bilang |
| | | Peningkatan kompetensi tenaga kerja | 1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah | BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten Mahakam Ulu) |
| | | | 2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan | BLKI Bontang: Desa Long Apari, Kec. Long Apari |
| | | Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin | Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial | Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Long Bagun & Ujoh Bilang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Long Bagun & Ujoh Bilang Korban bencana : semua kecamatan |
| | | Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan | Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan | Ekstensifikasi/Perluasan : Kakao : Poktan Mambes II 20, Poktan Mambes III 20, Poktan Mambes IV 20, Poktan Maju Makmur 10 |
| | | Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan | Perlindungan ANKT di usaha perkebunan | Kab. Mahakam Ulu |
| | | Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM | Pelatihan Koperasi dan UKM | Ujoh Bilang |
| | | Peningkatan layanan infrastruktur | 1. Pembangunan Jalan Perbatasan | Ruas Jalan Batas Kubar - Long Bagun - Long Pahangai |
| | | | 2. Pembangunan Jembatan Perbatasan | |
| | | | 3. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni | Kab. Mahakam Ulu |
| | | | 4. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli | Mahakam Ulu |
| | | Pemanfaatan energi baru dan terbarukan | Pembangunan PLTS Komunal | Batuk Kelo Kab. Mahakam Ulu |
| | | Pengelolaan lingkungan hidup | 1. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) | Kab. Mahakam Ulu |
| | | | 2. Pengendalian KARHUTLA | Kab. Mahakam Ulu |
| | | | 3. Rehabilitasi diluar kawasan hutan | Kab. Mahakam Ulu |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|--------------------------------|--|---|
| | | | 4. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER | Kab. Mahakam Ulu |
| | | | 5. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, dan udara ambien passive sampler | Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Boh titik Muara Sungai Boh, Sungai Mahakam (Titik Nyan, Batu Kelu, Long Bagun Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (JL. KUDCI SIMPANG TIGA PELABUHAN UJOH BILANG), PERKANTORAN (JL. CEMPEDAK), PEMUKIMAN (JL. LIKUR ULO SIMPANG EMPAT KANTOR KAMPUNG LONG BAGUN ULU), INDUSTRI (JL. POROS LONG MELAHAM-UJOH BILANG) |
| | | | 6. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup | Kab. Mahakam Ulu |
| 8 | Balikpapan | Peningkatan layanan pendidikan | 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa) | SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggian, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar, SMKN 7 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMK ADZKIYA BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMKS MUHAMMADIYAH 1 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Tengah Kelurahan Sumber Rejo |
| | | | 2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin) | SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggian, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | 3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB | SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggian, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar |
| | | | 4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB | SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggian, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar, SMKN 5 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMKN 6 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Graha Indah, SMKN 1 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggian Raya, SMKN 4 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Gunung Bahagia, SMKN 5 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMKS MUHAMMADIYAH 1 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Tengah Kelurahan Sumber Rejo, SMKN 3 BALIKPAPAN, SMKN 2 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan utara Kelurahan Gunung Sam |
| | | Peningkatan layanan kesehatan | Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah | Kecamatan Balikpapan Kota, Kelurahan Klandasan Ulu |
| | | Peningkatan kompetensi tenaga kerja | 1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah | SMAN 8 Balikpapan, SMAN 4 Balikpapan, SMAN 6 Balikpapan BLKI Balikpapan: Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan |
| | | | 2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan | BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan di Kota Balikpapan) |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|--|---|---|
| | | Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan | Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan | Kec. Balikpapan Kota, Kec. Balikpapan Tengah |
| | | Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin | Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial | Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Balikpapan Selatan & Balikpapan Kota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Balikpapan Tengah & Balikpapan Barat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Batu Ampar, Kel. Balikpapan Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kel. Sumber Rejo, Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur, Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara, Baru Tengah, Kel. Karang Joang, Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota, Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan Korban Bencana : semua Kecamatan |
| | | Pengembangan hilirisasi industri | Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau | Kel. Kariangau |
| | | Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan | Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan | Intensifikasi : Lada : Kel. Karang Joang (Poktan Harapan Sejahtera), Kelurahan Teritip (Poktan Agri Sejahtera dan Poktan Jalan Beimbai), Kelurahan Karang Joang (Poktan Bunga Salak) , Kelurahan Lamaru (Poktan Mentari Jaya Baru) |
| | | Peningkatan produktivitas perikanan budidaya | Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Rumput Laut dan Kepiting) | Rumput Laut : Pokdakan Sumber Laut Berjaya, Pokdakan Nestapa Kepiting : |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|---|---|--|
| | | | | Pokdakan Soka Teritip Kaltim dan Pokdakan Mina Barokah) |
| | | Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM | Pelatihan Koperasi dan UKM | Balikpapan |
| | | Peningkatan layanan infrastruktur | 1. Pemeliharaan Jalan Provinsi | Ruas Jalan Prioritas Provinsi (mendukung KSP KI Kariangau) |
| | | | 2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni | Kota Balikpapan |
| | | | 3. Revitalisasi/penanganan Kawasan Kumuh | Klandasan Ilir |
| | | | 4. Pembangunan pengaman pantai | Pantai Manggar |
| | | | 5. Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang | Kota Balikpapan |
| | | | 6. Koordinasi dan upaya peningkatan suplai air curah untuk air minum skala regional | Kota Balikpapan (daerah berbatasan dengan PPU) |
| | | | 7. Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian | -Permukiman Mentarang -Kel. Manggar |
| | | | 8. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli | Balikpapan |
| | | | 9. Pengendalian banjir | Drainase Sekunder Depsos Bawah |
| | | Pemanfaatan energi baru dan terbarukan | Pembangunan PLTS Atap Balikpapan 32 kWp | Kota Balikpapan |
| | | Pengelolaan lingkungan hidup | 1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS | Kota Balikpapan |
| | | | 2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) | Kota Balikpapan |
| | | | 3. Pengendalian KARHUTLA | Kota Balikpapan |
| | | | 4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan | Kota Balikpapan |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|--------------------------------|--|--|
| | | | 5. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER | Kota Balikpapan |
| | | | 6. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut, udara ambien passive sampler | Pemantauan Kualitas Air Sungai: Manggar Besar (Titik Sungai 28 dan Titik Pos PON 1) Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (JL. MARSMA ISWAHYUDI DEPAN KANTOR BMKG KOTA BALIKPAPAN), PERKANTORAN (AREA PERKANTORAN PT. TELKOM, JL. A YANI KOTA BALIKPAPAN), PEMUKIMAN (PERUM. KORPRI JLN. KLAUSS REPPE KM.7 RUSUNAWA BALIKPAPAN), INDUSTRI (KAWASAN INDUSTRI KM. 13 KARANGJOANG PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA BALIKPAPAN) Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Mangrove Pendopo Teritip, Benua Patra, Plaza Balikpapan, Balikpapan Super Blok, Batakan, Perumahan Auri, Pantai Lamaru. |
| | | | 7. Pelaksanaan uji emisi kendaraan roda 4 | Kota Balikpapan |
| | | | 8. Pemantauan dan penanganan sampah laut | Kota Balikpapan |
| | | | 9. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup | Kota Balikpapan |
| 9 | Samarinda | Peningkatan layanan pendidikan | 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa) | SMAN 16 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua, SMKN 10 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah, SMKN 11 SAMARINDA Kecamatan Palaran Kelurahan Simoang Pasir, SMKN 15 SAMARINDA Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Lok Bahu, SMKN 20 SAMARINDA Kecamatan Sambutan |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|----------------------------|---|---|
| | | | | Kelurahan Sungai Kapih, SMKN 8 SAMARINDA Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Harapan Baru, SMKN 14 SAMARINDA Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Tani Aman, SMKN 18 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake, SMKN 9 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Dadi Mulya, SMKN 12 SAMARINDA Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Loa Buah, SMKS CENDANA DDI SAMARINDA Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Teluk Lerong ulu, SMKS MIFTAHUL ULUM SAMARINDA Kecamatan Sambutan Kelurahan Sambutan, SMKNS TERPADU MADINA SAMARINDA Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo |
| | | | 2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin) | SMAN 16 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua |
| | | | 3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB | SMAN 16 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua |
| | | | 4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB | SMAN 16 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua, SMKN 8 SAMARINDA Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Harapan Baru, SMKN 7 SAMARINDA, SMKN 10 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah, SMKN 11 SAMARINDA Kecamatan Palaran Kelurahan Simoang Pasir, SMKN 15 SAMARINDA Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Lok Bahu, SMKN 2 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Hitam, SMN 14 SAMARINDA Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Tani Aman, SMKN 5 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan, SMKS CENDANA DDI SAMARINDA Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|---|---|---|
| | | | | Teluk Lerong ulu, SMKN 9 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Dadi Mulya, SMKN 17 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Hitam, SMKS KESEHATAN SAMARINDA , SMKN 19 SAMARINDA Kecamatan Palaran Kelurahan Rawa Makmur, SMKN 6 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara, SMKN 8 SAMARINDA Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Harapan Baru, SMKN PELAYARAN Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara, SMKN 1 SAMARINDA Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Dadi Mulya, SMKS MIFTAHUL ULUM SAMARINDA Kecamatan Sambutan Kelurahan Sambutan |
| | | Peningkatan layanan kesehatan | Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah | Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis |
| | | Peningkatan kompetensi tenaga kerja | 1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah | SMAN 16 SAMARINDA |
| | | | 2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan | BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kota Samarinda) |
| | | Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan | Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan | Kec. Samarinda Kota, Kec. Sungai Pinang, Kec. Samarinda Ilir, Kec. Samarinda Ulu |
| | | Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin | Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial | Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Palaran & Loa Janan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Samarinda Kota & Sungai Pinang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Kel. Teluk Lerong, Kel. Sidodadi, Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu, Kel. Selili, Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang, Kel. Sambutan Kec. Sambutan, Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran, Kel. Lempake |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|--|--|--|
| | | | | <p>Kec. samarinda Utara, Kel. Sempaja Utara Kec. samarinda Utara</p> <p>Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda samarinda Utara, Kec. Sungai Pinang, Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu</p> <p>Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS-PD) : Kec. Sungai Pinang, Sungai Kunjang</p> <p>Korban Bencana : semua Kecamatan</p> |
| | | Pengembangan Destinasi Pariwisata | Pengembangan Destinasi dan Promosi Kampung Ketupat | Samarinda Seberang (Kecamatan Samarinda Seberang) |
| | | Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan | Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan | Intensifikasi : Kelapa Sawit : Poktan Subur Makmur Kel. Bentuas Karet : Kec. Bentuas (Poktan Tani Maju), Kec. Bukit Pinang (Poktan Tani Melati), Poktan Rawa Bakung, Poktan Pinang Raya) |
| | | Peningkatan sistem distribusi perdagangan | Pengembangan pusat distribusi barang bahan pokok (food station) | Samarinda Kota |
| | | Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM | Pelatihan Koperasi dan UKM | Samarinda Kota |
| | | Peningkatan layanan infrastruktur | 1. Revitalisasi Terminal Tipe B | Terminal Tipe B Sungai Kunjang |
| | | | 2. Pembangunan Jalan yang mendukung perekonomian | Akses Menuju Bandara APT Pranoto |
| | | | 3. Pemeliharaan jalan Provinsi | Ruas Jalan Prioritas Provinsi (mendukung KSP Kawasan Perdagangan dan Jasa) |
| | | | 4. Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera | Kota Samarinda |
| | | | 5. Revitalisasi/penanganan kawasan kumuh | Karang Mumus II (Temindung Permai, Sempaja Selatan) dan Sungai Kapih (Selili, Sungai Kapih) |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) | |
|----|----------------|------------------------------|---|---|----------------|
| | | | 6. Pengendalian banjir | Normalisasi Sungai Karang Mumus, Normalisasi Sungai Sub Sistem Karang Asam Besar, Normalisasi Sungai Sub Sistem Karang Asam Kecil, | |
| | | | 7. Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang | Kota Samarinda | |
| | | | 8. Penyiapan <i>readiness criteria</i> sistem pengelolaan limbah domestik terpusat skala regional | Kota Samarinda | |
| | | | 9. Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian | Kota Samarinda | |
| | | | 10. Penyediaan Drainase Perkotaan | Rapak Dalam, Loa Jalan | |
| | | Pengelolaan lingkungan hidup | 1. Rehabilitasi diluar kawasan hutan | Kota Samarinda | |
| | | | 2. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER | Kota Samarinda | |
| | | | 3. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, udara ambien passive sampler | Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Mahakam (Titik Kalamur, Titik Depan Kantor Gubernur, Titik Palaran), Sungai Karang Mumus (Titik Pampang Dalam dan Titik Jembatan Desa Pampang) | |
| | | | | Pemantau Kualitas Udara Ambien: Transportasi (TAMAN SIMPANG EMPAT JL. BASUKI RAHMAT, SAMARINDA), PERKANTORAN (PERTOKOAN MERAK SQUARE, SAMARINDA), PEMUKIMAN (JL. MT. HARYONO PERUMAHAN RAWASARI 1, SAMARINDA), INDUSTRI (PT. SAGA TRADE MURNI JL. SULTAN ALIMUDIN, SAMARINDA) | |
| | | | | 4. Pelaksanaan uji emisi kendaraan roda 4 | Kota Samarinda |
| | | | | 5. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan | Kota Samarinda |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|--|--|---|
| | | | dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup | |
| 10 | Bontang | Peningkatan layanan pendidikan | 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa) | SMAN 2 Bontang Kecamatan Bontang Selatan Kelurahan Tanjung Laut |
| | | | 2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin) | SMAN 2 Bontang Kecamatan Bontang Selatan Kelurahan Tanjung Laut |
| | | | 3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB | SMAN 2 Bontang Kecamatan Bontang Selatan Kelurahan Tanjung Laut |
| | | | 4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB | SMAN 2 Bontang Kecamatan Bontang Selatan Kelurahan Tanjung Laut, SMKN 1 BONTANG Kecamatan Bontang Utara Kelurahan Gunung Elai, SMKN 2 BONTANG Kecatan Bontang Selatan Kelurahan Tanjung Laut Indah, SMKN 3 BONTANG Kecamatan Bontang Barat Kelurahan Gunung Telihan, SMKN 4 BONTANG Kecamatan Bontang Selatan Kelurahan Bontang Lestari |
| | | Peningkatan layanan kesehatan | Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah | Kecamatan Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari |
| | | Peningkatan kompetensi tenaga kerja | 1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah | SMAN 2 Bontang BLKI Bontang :Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang |
| | | | 2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan | BLKI Bontang (cakupan wilayah peserta pelatihan di Kota Bontang) |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLKI Bontang | 1. Pembangunan Workshop Las Air | BLKI Bontang (cakupan wilayah peserta pelatihan di Kalimantan Timur) |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|---|--|---|--|
| | | Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin | Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial | Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Bontang Selatan & Bontang Utara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Bontang Selatan & Bontang Utara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat, Bontang Selatan, Tanjung Laut, Loktuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Api-api Korban Bencana : semua Kecamatan |
| | | Peningkatan produktivitas perikanan budidaya | Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan) | Kecamatan Bontang Selatan (Kamp Tihi-Tihi) dan Bontang Utara (Kampung Gusung). KKERamba Jaring Apung: Melahing dan Bontang Baru (Ikan Kerapu dan Ikan Putih) |
| | | Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM | Pelatihan Koperasi dan UKM | Kel. Bontang Lestari |
| | | Peningkatan layanan infrastruktur | 1. Pemeliharaan Jalan Provinsi | Ruas Jalan Prioritas Provinsi (mendukung KSP KI Bontang) |
| | 2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni | | Kota Bontang | |
| | 3. Revitalisasi/penanganan kawasan kumuh | | Kampung Pesisir Kampung Kuala Tanjung Limau | |
| | 4. Penyediaan air baku | | Long Storage Sungai Bontang | |
| | 5. Pengendalian banjir | | Normalisasi Sungai Bontang | |
| | 6. Koordinasi peningkatan akses layanan air minum/peningkatan suplai air curah untuk air minum skala regional | | -Kec. Bontang lestari -Kec. Bontang Barat | |
| | 7. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli | | Bontang | |
| | | Pengelolaan lingkungan hidup | 1. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) | Kota Bontang |

| NO | KABUPATEN/KOTA | ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN | FOKUS PEMBANGUNAN | INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI) |
|----|----------------|----------------------------|--|--|
| | | | 2. Pengendalian KARHUTLA | Kota Bontang |
| | | | 3. Rehabilitasi diluar kawasan hutan | Kota Bontang |
| | | | 4. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER | Kota Bontang |
| | | | 5. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara ambien passive sampler | Pemantauan Kualitas Air Sungai: Titik Jembatan Jl. Soekarno-Hatta Bontang Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (HALAMAN RUKO PT. BADAQ NGL, BONTANG), PERKANTORAN (HALAMAN KANTOR DPMPSTP), PEMUKIMAN (PERUMAHAN MULAWARMAN RESIDENCE, KEL. BONTANG BARU, BONTANG), INDUSTRI (KAWASAN PT. BLACKBEAR REASOURCE INDONESIA, BONTANG) |
| | | | 6. Pemantauan dan penanganan sampah laut | Kota Bontang |
| | | | 7. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup | Kota Bontang |

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur secara sinergis. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2024 adalah “*Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan*”.

Guna merealisasikan fokus/tema pembangunan yang telah dicanangkan, rencana pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan ini merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan pembangunan ini melibatkan *stakeholders* yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kepentingan di dalamnya dengan tetap melibatkan masyarakat secara aktif.

Agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat menunjukkan capaian kinerja masing-masing prioritas daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan arahan dalam penentuan program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif, pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 merujuk pada program prioritas

dalam dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2024, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah (PD) provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Penyusunan kerangka pendanaan daerah pada Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan realisasi belanja perangkat daerah pada tahun 2022 dan rencana belanja yang ditetapkan pada APBD Tahun 2023. Berdasarkan pendekatan tersebut, rencana belanja perangkat daerah dalam RKPD tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp20.000.000.000.000,- dengan rincian pembagian pagu indikatif per-Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel VI.1
Pagu Perangkat Daerah Tahun 2024

| No | Perangkat daerah | Pagu Indikatif |
|-----|---|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3.800.000.000.000 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 357.155.081.404 |
| 3 | RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda | 793.148.894.568 |
| 4 | RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan | 448.195.547.000 |
| 5 | Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam | 110.357.067.000 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | 3.593.832.230.882 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja | 30.600.000.000 |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 27.590.000.000 |
| 9 | Dinas Sosial | 125.444.673.000 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 113.201.958.000 |

| No | Perangkat daerah | Pagu Indikatif |
|-----|---|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 11 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 42.815.466.000 |
| 12 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 114.559.410.000 |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | 50.812.247.000 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 47.373.059.000 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 50.061.000.000 |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 85.116.942.000 |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 31.306.262.000 |
| 17 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 218.407.867.000 |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 44.446.499.000 |
| 19 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 89.742.423.000 |
| 20 | Dinas Pariwisata | 43.500.000.000 |
| 21 | Dinas Perkebunan | 77.429.186.000 |
| 22 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 90.919.621.963 |
| 23 | Dinas Kehutanan | 460.967.865.246 |
| 24 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 120.850.953.000 |
| 25 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 109.316.634.110 |
| 26 | Sekretariat Daerah | 455.883.503.600 |
| 27 | Sekretariat DPRD | 355.000.000.000 |
| 28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 68.541.155.000 |
| 29 | Badan Pendapatan Daerah | 295.603.991.000 |
| 30 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 7.099.383.986.535 |
| 31 | Badan Kepegawaian Daerah | 51.757.970.692 |
| 32 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 60.000.000.000 |
| 33 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 31.000.000.000 |
| 34 | Badan Penghubung Provinsi | 22.500.000.000 |
| 35 | Inspektorat | 68.000.000.000 |
| 36 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 415.178.506.000 |
| | Jumlah | 20.000.000.000.000 |

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (*outcome*), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/PD penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial) dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan). Kemudian, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan, yaitu Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

6.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah

Data dan informasi rencana kerja Perangkat Daerah pada tahap rancangan awal telah di-*input* melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah melalui tautan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/dashboard/pusat> Pengambilan data bersumber dari Menu “Renja” pada aplikasi SIPD di tahap Penetapan RKPD, dimana untuk indikator dan target kinerja Program dan Kegiatan yang tercantum di dalamnya berasal dari Menu “RPJMD” dan Menu “RENSTRA” yang didasarkan pada Perubahan RPJMD dan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah.

Tabel VI.2
Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | " | | 1.280.178.641.895 | |
| | 1.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | 9.718.816.206 | |
| | 1.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 5.142.827.206 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 239 Dokumen | 1.296.432.500 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 239 Dokumen | 1.295.435.900 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 239 Dokumen | 298.105.500 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 239 Dokumen | 497.460.700 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 239 Laporan | 598.851.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 239 Laporan | 589.703.400 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 1.156.210.545.396 | |
| | 1.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn | 12 Orang/ Bulan | 1.149.487.297.396 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 2.807.886.600 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 561.786.500 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 50 Dokumen | 235.482.500 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 3.118.092.400 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.515.993.229 | |
| | 1.01.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 1.515.993.229 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 15.789.576.870 | |
| | 1.01.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 6 Paket | 600.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1000 Orang | 9.430.361.870 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 1000 Orang | 5.759.215.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 6.760.390.670 | |
| | 1.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 109.967.550 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 4.656.013.890 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 500 Paket | 648.396.320 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Paket | 109.964.910 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1.236.048.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 72.717.018.140 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 105 Unit | 50.261.381.700 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Paket | 5.999.970.350 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 3.375.562.410 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | 13.080.103.680 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 8.275.549.930 | |
| | 1.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 38.469.640 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 7.739.844.430 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 497.235.860 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.964.294.689 | |
| | 1.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 75 Unit | 889.409.480 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 369.268.680 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 540.641.279 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 164.975.250 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.1.14 | Fasilitasi Keprotokolan | - | - | 7.226.456.765 | |
| | 1.01.01.1.14.01 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 12 Laporan | 7.226.456.765 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|---|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | <i>Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SmA berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SmAIB berdasarkan Asesmen Nasional. Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional</i> | 2,17 Nilai 2,19 Nilai 2,61 Nilai 2,28 Nilai 2,44 Nilai 1,95 Nilai 100 % 2,37 Nilai | 2.143.303.170.954 | |
| | 1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | <i>Presentase standar pelayanan minimal dibidang Pendidikan SMA/ SMK</i> | 100% | 1.272.679.005.860 | |
| | 1.01.02.1.01.01 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 4 Unit | 27.640.400.100 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 65 Ruang | 23.118.703.770 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 4 Ruang | 4.844.790.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.04 | Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun | 11 Ruang | 7.016.880.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.05 | Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika | Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun | 9 Ruang | 13.800.823.200 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.06 | Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia | Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun | 10 Ruang | 9.401.604.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.07 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer | Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun | 15 Ruang | 6.041.730.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.10 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 7 Ruang | 5.045.144.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.13 | Pembangunan Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Unit | 5.579.700.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.14 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 10 Unit | 28.915.664.820 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.17 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 5 Unit | 2.526.072.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.02.1.01.19 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 17 Ruang | 7.885.042.640 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.20 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 Ruang | 346.744.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.21 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | 197.352.520 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | 379.044.520 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.28 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 4 Ruang | 236.709.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.31 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | 8 Unit | 26.185.138.590 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.34 | Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi | 4 Unit | 282.460.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.36 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 70 Paket | 43.754.352.500 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.39 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 50 Paket | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.40 | Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia | 15 Unit | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.41 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 100 Paket | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.45 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 76871 Peserta didik | 220.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.46 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 219 Paket | 31.955.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.47 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | 235 Satuan Pendidikan | 4.568.257.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.49 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 5000 Peserta Didik | 11.162.570.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.02.1.01.50 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 3800 Orang | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.51 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 500 Orang | 6.218.428.300 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.52 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 0 Satuan Pendidikan | 4.649.886.500 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.53 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | 229 Satuan Pendidikan | 732.934.578.400 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.54 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | 0 Orang | 27.654.500.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.57 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 500 Orang | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.58 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 100 Konten Digital | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.59 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 300 Orang | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.60 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 10 Dokumen | 6.337.430.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.01.61 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 100 Dokumen | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | 816.183.833.398 | |
| | 1.01.02.1.02.01 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 5 Unit | 34.698.244.400 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.02 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 50 Ruang | 29.587.062.400 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.04 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | 20 Ruang | 25.447.000.400 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.05 | Pembangunan Ruang Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 4 Ruang | 28.598.103.900 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.02.1.02.06 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 5 Ruang | 2.040.676.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.07 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 2 Ruang | 3.534.933.400 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 20 Unit | 40.430.963.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.15 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | 22 Ruang | 3.206.112.320 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.17 | Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | 5 Ruang | 1.653.400.360 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.18 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | 1 Ruang | 639.948.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.23 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | 6 Unit | 18.294.666.360 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.28 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 50 Paket | 45.306.348.750 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.31 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 20 Paket | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.32 | Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia | 10 Unit | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.33 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 150 Paket | 80.618.645.725 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.37 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 100 Peserta didik | 1.154.976.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.38 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 100 Paket | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.39 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | 219 Satuan Pendidikan | 15.153.037.475 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.40 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 219 Satuan Pendidikan | 299.994.500 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.02.1.02.41 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 25000 Peserta Didik | 34.068.917.750 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.42 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 3100 Orang | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.43 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 0 Orang | 3.250.096.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.45 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 120 Satuan Pendidikan | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.46 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS | 221 Satuan Pendidikan | 404.694.106.658 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.47 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | 0 Orang | 26.506.600.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.50 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 400 Orang | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.51 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 80 Konten Digital | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.52 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 100 Orang | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.53 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 87 Dokumen | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.02.54 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 100 Dokumen | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03 | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | 54.440.331.696 | |
| | 1.01.02.1.03.02 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah | 15 Ruang | 3.574.874.800 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03.08 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 13 Unit | 12.066.506.048 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03.10 | Pembangunan Kantin Sekolah | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | 5 Unit | 1.711.740.800 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.02.1.03.24 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | 15 Unit | 8.458.814.048 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03.30 | Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas | Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi | 15 Ruang | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03.35 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 15 Paket | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03.38 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 10 Paket | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03.40 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 5 Paket | 411.787.500 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03.44 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 2581 Peserta Didik | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03.45 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 100 Paket | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03.48 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 100 Peserta Didik | 4.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03.49 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus | 240 Orang | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03.50 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 200 Orang | 1.503.423.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03.51 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 10 Satuan Pendidikan | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03.52 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana bOs | 34 Satuan Pendidikan | 1.454.685.500 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03.53 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | 0 Orang | 3.258.500.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03.56 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 50 Orang | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03.57 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 50 Konten Digital | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.02.1.03.58 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 80 Orang | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.1.03.60 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 11 Dokumen | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3 | 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | - | - | 11.721.560.000 | |
| | 1.01.03.1.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | - | - | 8.221.560.000 | |
| | 1.01.03.1.01.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun | 5 Dokumen | 1.937.960.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.1.01.04 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya | 219 Orang | 6.283.600.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.1.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | - | - | 3.500.000.000 | |
| | 1.01.03.1.02.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | 1 Dokumen | 2.500.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.1.02.02 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 4 | 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | - | - | 9.596.846.500 | |
| | 1.01.04.1.01 | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | | | 9.596.846.500 | |
| | 1.01.04.1.01.01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 25 Dokumen | 2.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.04.1.01.02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 1 Laporan | 7.596.846.500 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | |
| 1 | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | - | - | 8.628.175.290 | |
| | 2.22.02.1.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 4.428.175.290 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.22.02.1.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan | 50 Objek | 4.428.175.290 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.1.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | | | 4.200.000.000 | |
| | 2.22.02.1.02.03 | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan | 116 Sertifikat | 4.200.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2 | 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | - | - | 6.400.000.000 | |
| | 2.22.03.1.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 6.400.000.000 | |
| | 2.22.03.1.01.01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 400 Orang | 1.700.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.03.1.01.02 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi | 50 Sertifikat | 1.200.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.03.1.01.03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 10 Lembaga | 3.500.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3 | 2.22.04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | - | - | 845.339.660 | |
| | 2.22.04.1.01 | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi | - | - | 845.339.660 | |
| | 2.22.04.1.01.03 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat | 100 Dokumen | 845.339.660 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 4 | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | - | - | 3.200.000.000 | |
| | 2.22.05.1.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | - | - | 1.800.000.000 | |
| | 2.22.05.1.01.02 | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | 12 Objek | 1.800.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.1.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | - | - | 1.400.000.000 | |
| | 2.22.05.1.02.03 | Pemanfaatan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | 40 Objek | 600.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.1.02.04 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya | Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya | 220 Orang | 800.000.000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 5 | 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | - | - | 2.866.129.700 | |
| | 2.22.06.1.01 | Pengelolaan Museum Provinsi | - | - | 2.866.129.700 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.22.06.1.01.03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | 1 Unit | 2.866.129.700 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | UPTD TAMAN BUDAYA | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 4.219.100.000 | |
| | 1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.120.090.000 | |
| | 1.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 38.490.000 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 160.000.000 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 1.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 10.000.000 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 1.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 45 Laporan | 911.600.000 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 1.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.089.000.000 | |
| | 1.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | 1.089.000.000 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.806.573.000 | |
| | 1.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10 Laporan | 8.000.000 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 1.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 170.005.160 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 1.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.628.567.840 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 1.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 203.437.000 | |
| | 1.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | 203.437.000 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | |
| | 2.22.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 179.040.000 | |
| | 2.22.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 179.040.000 | UPTD TAMAN BUDAYA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | <i>m</i> | - | 4.400.000.000 | |
| | 2.22.02.1.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 2.000.000.000 | |
| | 2.22.02.1.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan | 12 Objek | 2.000.000.000 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | 2.22.02.1.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | | | 2.400.000.000 | |
| | 2.22.02.1.02.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 12 Objek | 2.400.000.000 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | X | - | | | | |
| | X.XX | - | | | | |
| 1 | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 1.565.300.000 | |
| | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 65.300.000 | |
| | X.XX.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 25 Laporan | 65.300.000 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 1.500.000.000 | |
| | X.XX.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 1.500.000.000 | UPTD TAMAN BUDAYA |
| | | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 17.757.526.800 | |
| | 1.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 165.840.000 | |
| | 1.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 165.840.000 | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 77.754.600 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 30 Paket | 77.754.600 | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 6.881.711.700 | |
| | 1.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 16.972.500 | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 3.700.000.000 | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | 80.000.000 | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1.939.200 | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 3.082.800.000 | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 100.000.000 | |
| | 1.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 100.000.000 | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 10.372.368.500 | |
| | 1.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 10.000.000 | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 9.527.137.940 | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 13 Laporan | 835.230.560 | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 159.852.000 | |
| | 1.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 10 Unit | 57.252.000 | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 27.600.000 | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 75.000.000 | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| 2 | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | <i>m</i> | - | 2.701.621.200 | |
| | 1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | 1.570.866.000 | |
| | 1.01.02.1.01.51 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 130 Orang | 1.570.866.000 | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.1.03 | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | 1.130.755.200 | |
| | 1.01.02.1.03.46 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | 240 Satuan Pendidikan | 1.130.755.200 | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| | | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | " | - | 1.513.238.000 | |
| | 1.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 218.280.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 218.280.000 | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN |
| | 1.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 25.000.000 | |
| | 1.01.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 25.000.000 | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN |
| | 1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 135.000.000 | |
| | 1.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 65.000.000 | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN |
| | 1.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 7 Paket | 70.000.000 | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN |
| | 1.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.134.958.000 | |
| | 1.01.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1.134.958.000 | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| 2,22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | |
| | 2.22.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 665.000.000 | |
| | 2.22.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 15.000.000 | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN |
| | 2.22.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 650.000.000 | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN |
| | 2.22.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.110.000.000 | |
| | 2.22.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 10.000.000 | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN |
| | 2.22.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 500.000.000 | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN |
| | 2.22.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 300.000.000 | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.22.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.300.000.000 | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN |
| | 2.22.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 172.000.000 | |
| | 2.22.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 172.000.000 | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN |
| 1 | 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | - | - | 2.168.000.000 | |
| | 2.22.06.1.01 | Pengelolaan Museum Provinsi | - | - | 2.168.000.000 | |
| | 2.22.06.1.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan | 1 Unit | 554.000.000 | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN |
| | 2.22.06.1.01.02 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya | 50 Orang | 360.000.000 | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN |
| | 2.22.06.1.01.03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | 1 Unit | 988.000.000 | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN |
| | 2.22.06.1.01.04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia | 1 Unit | 266.000.000 | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN |
| | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | | | | |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 3.486.630.200 | |
| | 1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.130.500.000 | |
| | 1.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 227 Laporan | 1.130.500.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.383.641.320 | |
| | 1.01.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 85 Unit | 1.383.641.320 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 813.100.880 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 155.483.200 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 130 Laporan | 657.617.680 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 159.388.000 | |
| | 1.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 15 Unit | 159.388.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| 2 | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | - | 4.097.287.800 | |
| | 1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | 1.886.310.200 | |
| | 1.01.02.1.01.49 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 192 Peserta Didik | 913.900.200 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1.01.02.1.01.51 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 200 Orang | 972.410.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | 2.069.807.200 | |
| | 1.01.02.1.02.41 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 258 Peserta Didik | 1.097.397.200 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1.01.02.1.02.43 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 200 Orang | 972.410.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | 1.01.02.1.03 | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | 141.170.400 | |
| | 1.01.02.1.03.48 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 18 Peserta Didik | 141.170.400 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I |
| | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 2.293.187.100 | |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.288.187.100 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 73.658.400 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.214.528.700 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 5.000.000 | |
| | 1.01.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 5.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| 2 | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | - | 5.330.952.900 | |
| | 1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | 2.504.794.800 | |
| | 1.01.02.1.01.49 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 300 Peserta Didik | 1.504.794.800 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1.01.02.1.01.51 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 250 Orang | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | 2.280.000.000 | |
| | 1.01.02.1.02.41 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 300 Peserta Didik | 1.280.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1.01.02.1.02.43 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 250 Orang | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | 1.01.02.1.03 | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | 546.158.100 | |
| | 1.01.02.1.03.48 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 100 Peserta Didik | 546.158.100 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II |
| | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>m</i> | - | 2.016.000.000 | |
| | 1.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 85.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 85.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 50.000.000 | |
| | 1.01.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 40 Paket | 50.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 820.000.000 | |
| | 1.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 30 Paket | 20.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 800.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 985.000.000 | |
| | 1.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 85.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 300.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 600.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 76.000.000 | |
| | 1.01.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 Unit | 76.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| 2 | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | - | 5.643.344.000 | |
| | 1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | 2.600.000.000 | |
| | 1.01.02.1.01.49 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 250 Peserta Didik | 1.300.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1.01.02.1.01.51 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 250 Orang | 1.150.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1.01.02.1.01.52 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 34 Satuan Pendidikan | 150.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | 2.818.344.000 | |
| | 1.01.02.1.02.41 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 250 Peserta Didik | 900.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1.01.02.1.02.43 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 100 Orang | 1.218.344.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1.01.02.1.02.45 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 41 Satuan Pendidikan | 700.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1.01.02.1.03 | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | 225.000.000 | |
| | 1.01.02.1.03.48 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 40 Peserta Didik | 75.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 1.01.02.1.03.50 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 70 Orang | 150.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | |
| 1 | 2.22.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 90.000.000 | |
| | 2.22.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 90.000.000 | |
| | 2.22.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 10 Unit | 90.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III |
| | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 2.266.614.000 | |
| | 1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.010.000.000 | |
| | 1.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 10.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 261.614.000 | |
| | 1.01.01.1.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 261.614.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 895.000.000 | |
| | 1.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 10.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 25.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 60.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 800.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 100.000.000 | |
| | 1.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 10 Unit | 100.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| 2 | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | <i>m</i> | - | 4.300.000.000 | |
| | 1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | 2.200.000.000 | |
| | 1.01.02.1.01.49 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 50 Peserta Didik | 700.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1.01.02.1.01.51 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 100 Orang | 1.500.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | 2.100.000.000 | |
| | 1.01.02.1.02.41 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 50 Peserta Didik | 600.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |
| | 1.01.02.1.02.43 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 100 Orang | 1.500.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 2.035.245.000 | |
| | 1.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 100.000.000 | |
| | 1.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 100.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 60.000.000 | |
| | 1.01.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 40 Paket | 60.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.000.000.000 | |
| | 1.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 121.245.000 | |
| | 1.01.01.1.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 120.245.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1.01.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 754.000.000 | |
| | 1.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 50.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 154.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 550.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| 2 | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | - | 3.400.000.000 | |
| | 1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | 1.700.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.02.1.01.49 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 250 Peserta Didik | 500.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1.01.02.1.01.51 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 400 Orang | 1.200.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | 1.700.000.000 | |
| | 1.01.02.1.02.41 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 250 Peserta Didik | 500.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | 1.01.02.1.02.43 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 400 Orang | 1.200.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | X | - | | | | |
| | X.XX | - | | | | |
| 1 | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 90.000.000 | |
| | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 90.000.000 | |
| | X.XX.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | 90.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V |
| | | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>m</i> | - | 3.150.000.000 | |
| | 1.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 150.000.000 | |
| | 1.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 150.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI |
| | 1.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.230.000.000 | |
| | 1.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 20.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 Paket | 10.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI |
| | 1.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1.200.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.610.000.000 | |
| | 1.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 10.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI |
| | 1.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI |
| | 1.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 600.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI |
| | 1.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 160.000.000 | |
| | 1.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit | 150.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI |
| | 1.01.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 10.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI |
| 2 | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | - | 5.280.520.000 | |
| | 1.01.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | - | - | 2.280.520.000 | |
| | 1.01.02.1.01.49 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 800 Peserta Didik | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI |
| | 1.01.02.1.01.51 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 700 Orang | 1.280.520.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI |
| | 1.01.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | - | - | 2.000.000.000 | |
| | 1.01.02.1.02.41 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 500 Peserta Didik | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI |
| | 1.01.02.1.02.43 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 500 Orang | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI |
| | 1.01.02.1.03 | Pengelolaan Pendidikan Khusus | - | - | 1.000.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.01.02.1.03.50 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 Orang | 1.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI |
| | | SMKN PELAYARAN KALIMANTAN SAMARINDA | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 3.996.558.000 | |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.996.558.000 | |
| | 1.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 3.996.558.000 | SMKN PELAYARAN KALIMANTAN SAMARINDA |
| | | SMK-SPP NEGERI SAMARINDA | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | 6.755.847.000 | |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 6.755.847.000 | |
| | 1.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 6.755.847.000 | SMK-SPP NEGERI SAMARINDA |
| | | SMAN KHUSUS OLAHRAGAWAN | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 23.077.124.000 | |
| | 1.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 23.077.124.000 | |
| | 1.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 23.077.124.000 | SMAN KHUSUS OLAHRAGAWAN |
| | | DINAS KESEHATAN | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | |
| 1 | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i> | 80 % 87 % 85 % | 67.652.415.000 | |
| | 1.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i> | 100% | 1.625.000.000 | |
| | 1.02.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 950.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 200.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 Laporan | 475.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah</i> | 100% | 52.667.415.000 | |
| | 1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 185 Orang/ Bulan | 52.027.415.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 400.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 20.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 20.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 50.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 150.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i> | 100% | 640.000.000 | |
| | 1.02.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 320.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 80 Orang | 320.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 100% | 4.620.000.000 | |
| | 1.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 40.000.000 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 1.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 50.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 30.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 3.500.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang diadakan</i> | 1 Laporan | 20.000.000 | |
| | 1.02.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 20.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 12 Bulan | 7.130.000.000 | |
| | 1.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 20.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1.710.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 5.400.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah</i> | 1 Laporan | 950.000.000 | |
| | 1.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 38 Unit | 325.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 200.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 90 Unit | 425.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 2 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | <i>Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk yang terdampak krisis akibat bencana dan atau berpotensi bencana Rasio Daya Tampung RS Rujukan</i> | 100 % 1,86 % | 181.814.368.000 | |
| | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60% Jumlah Kelas Terapi Obat Yang Diadakan</i> | 10 % 10 Kelas Terapi | 26.861.138.000 | |
| | 1.02.02.1.01.06 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan | 3 Layanan | 1.685.100.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.01.07 | Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center | Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan | 20 Unit | 600.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | 1 Unit | 6.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.02.1.01.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | 1 Unit | 1.500.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.01.12 | Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | 1 Unit | 2.500.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.01.17 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 26 Unit | 516.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.01.20 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | 6 Unit | 842.550.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.01.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 2 Dokumen | 2.729.154.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.01.22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan | 1 Paket | 10.488.334.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Persentase Kab/Kota dengan STBM berkelanjutan Persentase penduduk usia > 15 tahun dengan masalah kesehatan jiwa yang dilakukan skrining Persentase Kab/Kota wilayah Kerja yang difasilitasi dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat Persentase pengobatan ARV pada ODHIV Baru Persentase Kabupaten/ Kota yang mencapai IDL Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan ibu dan anak Persentase penduduk usia > 15 tahun yang dilakukan deteksi dini faktor risiko PTM Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam upaya peningkatan upaya pelayanan usia lanjut Persentase Kab/Kota dengan Kesehatan Kerja dan Olahraga Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam upaya peningkatan pelayanan gizi Persentase Kab/Kota yang difasilitasi layanan kesehatan usia produktif</i> | 60 % 10 % 60 % 80 % 90 % 60 % 19 % 60 % 60 % 60 % 60 % | 148.447.930.000 | |
| | 1.02.02.1.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | 2096543 Orang | 1.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 185 Orang | 4.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | 1 Dokumen | 6.500.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | 1 Dokumen | 3.500.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | 1 Dokumen | 3.117.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | 10.870.200.000 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.02.1.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | 2.246.800.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | 2.246.800.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 1.348.080.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 5 Dokumen | 5.055.300.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 2 Dokumen | 25.101.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | 1 Dokumen | 750.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 1 Dokumen | 2.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen | 75.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.17 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | 700.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.19 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 1 Dokumen | 1.685.100.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.21 | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 700.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.23 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 3 Unit | 842.550.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.25 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional | Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | 10 Paket | 100.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.02.27 | Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 2 Dokumen | 1.685.100.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | <i>Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan</i> | 90% | 1.450.000.000 | |
| | 1.02.02.1.03.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 1 Dokumen | 450.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna</i> | 60% | 5.055.300.000 | |
| | 1.02.02.1.04.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 1 Unit | 1.685.100.000 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | 5 Unit | 1.685.100.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.1.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | 20 Unit | 1.685.100.000 | DINAS KESEHATAN |
| 3 | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | <i>Persentase Kab/Kota yang memiliki 75% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan</i> | 40% | 7.425.500.000 | |
| | 1.02.03.1.01 | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Provinsi dan Kab/Kota</i> | 1 Dokumen | 1.341.924.000 | |
| | 1.02.03.1.01.01 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 1610 Orang | 1.341.924.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.1.02 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan</i> | 2 KabKota | 6.083.576.000 | |
| | 1.02.03.1.02.01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan | 600 Orang | 5.700.526.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.1.02.02 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 Dokumen | 383.050.000 | DINAS KESEHATAN |
| 4 | 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | <i>Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha</i> | 100% | 1.092.012.000 | |
| | 1.02.04.1.01 | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | <i>Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan</i> | 100% | 798.080.000 | |
| | 1.02.04.1.01.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan | 55 Sarana | 793.080.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.1.01.02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik | Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik | 2 Dokumen | 5.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.1.02 | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) | <i>Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</i> | 100% | 293.932.000 | |
| | 1.02.04.1.02.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | 3 Sarana | 288.932.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.1.02.02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik | 1 Dokumen | 5.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 5 | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | <i>Persentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan PHBS</i> | 100% | 2.022.120.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.05.1.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | <i>Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor</i> | 60% | 404.424.000 | |
| | 1.02.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 1 Dokumen | 404.424.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.1.02 | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | <i>Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah</i> | 60% | 1.011.060.000 | |
| | 1.02.05.1.02.01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 1 Dokumen | 505.530.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.1.02.02 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 1 Dokumen | 505.530.000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.1.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi | <i>Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi</i> | 60% | 606.636.000 | |
| | 1.02.05.1.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | 1 Dokumen | 606.636.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | |
| 1 | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</i> | 100% | 7.321.404.800 | |
| | 1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah dokumen hasil pelayanan administrasi pelaksanaan tugas ASN</i> | 12 Dokumen | 104.400.000 | |
| | 1.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 104.400.000 | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah paket pakaian dinas harian beserta atribut dan kelengkapannya</i> | 67 Orang 3 Paket | 613.560.000 | |
| | 1.02.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 192.800.000 | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 67 Orang | 420.760.000 | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|---|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan</i> | 9 Paket 60 Paket 7 Paket 12 Laporan 16 Paket 10 Paket | 1.797.134.800 | |
| | 1.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 55.382.800 | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 465.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 452.655.000 | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 60.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | 84.097.000 | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 680.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah paket mebel yang disediakan</i> | 3 Paket | 60.672.000 | |
| | 1.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Paket | 60.672.000 | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</i> | 12 Laporan 12 Bulan 12 Laporan | 2.937.000.000 | |
| | 1.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 12.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 850.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.075.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya | 12 Laporan 12 Laporan 13 Unit | 1.808.638.000 | |
| | 1.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit | 65.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 220 Unit | 166.969.000 | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 24 Unit | 1.576.669.000 | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN |
| 2 | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | <i>Persentase kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan</i> | 80% | 1.837.990.200 | |
| | 1.02.03.1.02 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat</i> | 240 Orang | 1.837.990.200 | |
| | 1.02.03.1.02.01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | 240 Orang | 1.837.990.200 | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN |
| | | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | |
| 1 | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan</i> | 100% | 22.811.925.000 | |
| | 1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 12 bulan | 5.551.793.184 | |
| | 1.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 100 Dokumen | 5.551.793.184 | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM |
| | 1.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | 98 % 390 orang | 1.490.943.000 | |
| | 1.02.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 376 Orang | 1.490.943.000 | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | 24 Jenis 7 Jenis 36 Laporan | 6.122.642.216 | |
| | 1.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 93.111.200 | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM |
| | 1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 19 Paket | 4.829.531.016 | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM |
| | 1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 8 Laporan | 1.200.000.000 | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM |
| | 1.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | 5 Jenis | 300.000.000 | |
| | 1.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 300.000.000 | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | 12 Bulan | 1.517.613.600 | |
| | 1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1.517.613.600 | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM |
| | 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah sarana prasarana dan alkes yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Rumah sakit</i> | 150 Jenis 4 Unit 2 Unit | 3.828.933.000 | |
| | 1.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 272.413.000 | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM |
| | 1.02.01.1.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 131 Unit | 2.556.520.000 | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM |
| | 1.02.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1.000.000.000 | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM |
| | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | <i>Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i> | 98% | 4.000.000.000 | |
| | 1.02.01.1.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 4.000.000.000 | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM |
| 2 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | <i>Capaian program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RS. Mata</i> | 80% | 5.500.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Persentase unit/sarana prasarana pelayanan kesehatan RS sesuai dengan standar</i> | 75% | 5.500.000.000 | |
| | 1.02.02.1.01.01 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 1 Unit | 500.000.000 | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM |
| | 1.02.02.1.01.15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan | Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara | 77 Unit | 5.000.000.000 | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM |
| | | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | |
| 1 | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100% | 10.516.142.480 | |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah</i> | 12 Bulan | 3.516.142.480 | |
| | 1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 960.000.000 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | 2.556.142.480 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN |
| | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | <i>"Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan"</i> | 1 Unit Kerja | 7.000.000.000 | |
| | 1.02.01.1.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 7.000.000.000 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN |
| 2 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | <i>Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Laboratorium</i> | 100% | 573.608.520 | |
| | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Jumlah Bulan Tersedianya Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar Laboratorium</i> | 12 Bulan | 573.608.520 | |
| | 1.02.02.1.01.04 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 1 Unit | 573.608.520 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN |
| | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Persentase Realisasi Anggaran Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 85 % 80 % | 14.592.275.335 | |
| | 1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase dokumen pelaksanaan administrasi keuangan</i> | 100% | 132.120.000 | |
| | 1.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 72 Dokumen | 132.120.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Persentase Dokumen administrasi pengamanan barang milik daerah SKPD</i> | 100% | 738.600.000 | |
| | 1.02.01.1.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 12 Dokumen | 738.600.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 100% | 945.976.865 | |
| | 1.02.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 150 Paket | 101.305.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100 Orang | 844.671.865 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit</i> | 100% | 3.432.147.510 | |
| | 1.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 30 Paket | 24.182.500 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 309.854.410 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 76.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 456.426.600 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 221.854.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 250 Laporan | 2.343.830.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi</i> | 100% | 700.000.000 | |
| | 1.02.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 150.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 Paket | 150.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | 400.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Capaian Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100% | 5.113.430.960 | |
| | 1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 72 Laporan | 723.730.800 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 29 Laporan | 4.389.700.160 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala</i> | 100% | 395.000.000 | |
| | 1.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit | 250.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100 Unit | 145.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | <i>Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah</i> | 100% | 3.135.000.000 | |
| | 1.02.01.1.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 25 Unit Kerja | 3.135.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| 2 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | <i>Persentase Unit/Instalasi Layanan RS yang Memenuhi Standar</i> | 100% | 6.837.948.665 | |
| | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Jumlah ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/penunjang pada unit/instalasi sesuai standar</i> | 5 Jenis | 6.042.948.665 | |
| | 1.02.02.1.01.03 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 2 Unit | 1.000.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | 200 Unit | 2.379.904.965 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.02.1.01.14 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan | 300 Paket | 259.246.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.02.1.01.17 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 150 Unit | 117.537.700 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.02.1.01.18 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara | 150 Unit | 136.260.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.02.1.01.22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan | 4 Paket | 2.150.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | 100% | 580.000.000 | |
| | 1.02.02.1.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 80 Dokumen | 300.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 75 Dokumen | 280.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | 1.02.02.1.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | <i>Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi</i> | 70% | 215.000.000 | |
| | 1.02.02.1.03.03 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia | 5 Unit | 215.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| 3 | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | <i>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang sesuai Kompetensi</i> | 100% | 3.060.000.000 | |
| | 1.02.03.1.01 | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | <i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)</i> | 100% | 3.060.000.000 | |
| | 1.02.03.1.01.01 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 23 Orang | 3.060.000.000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI |
| | | RSUD A. WAHAB SJHRANIE DI SAMARINDA | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | |
| 1 | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 100 Persentase 80 Persentase | 733.626.992.150 | |
| | 1.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</i> | 100 Persentase | 405.751.676 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 18 Dokumen | 218.913.676 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 42 Laporan | 186.838.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</i> | 90 Persentase | 211.362.516.258 | |
| | 1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn | 1100 Orang/Bulan | 210.882.426.258 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 24 Dokumen | 351.960.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 21 Laporan | 128.130.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS</i> | 100 Persentase | 143.070.000 | |
| | 1.02.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 135.900.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 15 Laporan | 7.170.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i> | 100 Persentase | 1.208.584.600 | |
| | 1.02.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 1.135.863.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 2.000.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 540 Orang | 28.800.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 18 Orang | 41.921.600 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase capaian kegiatan administrasi umum RS</i> | 85 Persentase | 1.406.835.709 | |
| | 1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 111 Paket | 179.677.496 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | 301.915.003 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 273.455.210 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 62.572.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 109 Laporan | 589.216.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan</i> | 80 Persentase | 3.686.376.036 | |
| | 1.02.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 4 Unit | 50.000.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | 520.000.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 14 Paket | 460.628.600 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 59 Unit | 1.064.759.936 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 500.000.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 563.000.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 11 Unit | 527.987.500 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 100 Persentase | 1.000.000 | |
| | 1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1.000.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 75 Persentase | 5.412.857.871 | |
| | 1.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 40 Unit | 331.800.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 13 Unit | 1.095.399.999 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 Unit | 1.038.948.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 2.946.709.872 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | <i>Nilai evaluasi kinerja BLUD</i> | 80 Nilai | 510.000.000.000 | |
| | 1.02.01.1.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 510.000.000.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| 2 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | <i>Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS</i> | 88 Persentase | 49.530.932.850 | |
| | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)</i> | 95 Persentase | 46.580.359.644 | |
| | 1.02.02.1.01.01 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 7 Unit | 21.600.000.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | 90 Unit | 22.586.223.144 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.02.1.01.14 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan | 1 Paket | 299.492.500 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.02.1.01.17 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 2304 Unit | 2.094.644.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | <i>ersentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</i> | 75 Persentase | 971.328.666 | |
| | 1.02.02.1.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 80 Dokumen | 723.813.666 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.02.1.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 5 Dokumen | 20.000.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.02.1.02.28 | Pengelolaan Penelitian Kesehatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan | 9 Dokumen | 227.515.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.02.1.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | <i>Persentase pemenuhan modul front office dan back office yang dibuat dan diaplikasikan secara terintegrasi</i> | 75 Persentase | 1.811.089.540 | |
| | 1.02.02.1.03.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 11 Dokumen | 63.350.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.02.1.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20 Dokumen | 1.000.000.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.02.1.03.03 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia | 2170 Unit | 747.739.540 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.02.1.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Persentase Kepatuhan Implementasi Indikator Mutu</i> | 90 Persentase | 168.155.000 | |
| | 1.02.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | 11 Unit | 10.140.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.02.1.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | 15 Unit | 158.015.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| 3 | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | <i>Persentase peningkatan kapabilitas SDM RS</i> | 70 Persentase | 2.665.830.000 | |
| | 1.02.03.1.01 | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | <i>Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan</i> | 100 Persentase | 1.000.000 | |
| | 1.02.03.1.01.01 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 70 Orang | 1.000.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | 1.02.03.1.02 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Persentase pemenuhan standart pelatihan minimal 20 JPL/ Pegawai/ tahun baik secara internal maupun secara eksternal</i> | 64 Persentase | 2.664.830.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|------------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.03.1.02.01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | 734 Orang | 2.664.830.000 | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA |
| | | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | |
| 1 | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Indeks kepuasan layanan kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti</i> | 75,50 Point 70 % 100 % | 429.418.866.512 | |
| | 1.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat</i> | 4 Dokumen | 50.000.000 | |
| | 1.02.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 50.000.000 | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN |
| | 1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.</i> | 14 Bulan | 117.018.866.512 | |
| | 1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 670 Orang/ Bulan | 117.018.866.512 | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN |
| | 1.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i> | 1192 Stell | 100.000.000 | |
| | 1.02.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1192 Paket | 100.000.000 | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN |
| | 1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | 12 Laporan | 100.000.000 | |
| | 1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 100.000.000 | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</i> | 12 Laporan | 150.000.000 | |
| | 1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 150.000.000 | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | <i>Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> | 22 Unit Kerja | 312.000.000.000 | |
| | 1.02.01.1.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 22 Unit Kerja | 312.000.000.000 | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN |
| 2 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | <i>Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</i> | 88% | 18.276.680.488 | |
| | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000</i> | 1627 Unit | 17.756.680.488 | |
| | 1.02.02.1.01.01 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 1 Unit | 10.000.000.000 | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN |
| | 1.02.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | 93 Unit | 7.000.000.000 | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN |
| | 1.02.02.1.01.12 | Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | 2 Unit | 656.680.488 | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN |
| | 1.02.02.1.01.17 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 1523 Unit | 50.000.000 | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN |
| | 1.02.02.1.01.18 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara | 8 Unit | 50.000.000 | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN |
| | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i> | 8 Dokumen | 100.000.000 | |
| | 1.02.02.1.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 (Hijau) Dokumen | 80.000.000 | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.02.1.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 4 Dokumen | 10.000.000 | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN |
| | 1.02.02.1.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 4 Dokumen | 10.000.000 | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN |
| | 1.02.02.1.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Tersedianya Rumah Sakit Kelas A dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya</i> | 3 Dokumen | 420.000.000 | |
| | 1.02.02.1.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | 3 Unit | 420.000.000 | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN |
| 3 | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | <i>Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya</i> | 60% | 500.000.000 | |
| | 1.02.03.1.02 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan</i> | 60% | 500.000.000 | |
| | 1.02.03.1.02.01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan | 923 Orang | 500.000.000 | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO DI BALIKPAPAN |
| | | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | |
| 1 | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti</i> | 96.10 % 100 % | 85.729.363.096 | |
| | 1.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan</i> | 100% | 49.400.000 | |
| | 1.02.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Laporan | 49.400.000 | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu</i> | 100% | 40.909.707.096 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn | 4732 Orang/Bulan | 40.523.427.096 | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 222.480.000 | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 31 Dokumen | 163.800.000 | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit</i> | 58 Dokumen | 1.005.292.300 | |
| | 1.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 31 Paket | 151.252.500 | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 23 Paket | 478.864.200 | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 19 Paket | 67.975.600 | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 48 Laporan | 307.200.000 | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Ketepatan Pengadaan sesuai pprenncnan</i> | 100% | 2.150.930.100 | |
| | 1.02.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 5 Unit | 1.710.000.000 | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 9 Paket | 45.760.100 | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 395.170.000 | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Survei Kepuasan Pegawai terhadap Kenyamanan ditempat kerja | 77,6% | 16.847.403.800 | |
| | 1.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 15.000.000 | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 48 Laporan | 2.041.624.200 | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 15 Laporan | 14.790.779.600 | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Pada RSJD AHM Yang Berfungsi Dengan Baik | 72.19 % | 2.766.629.800 | |
| | 1.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 26.831.000 | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 34 Unit | 398.362.000 | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 2.341.436.800 | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Pendapatan Hasil Pelayanan Terhadap Target BLUD | 100% | 22.000.000.000 | |
| | 1.02.01.1.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 15 Unit Kerja | 22.000.000.000 | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM |
| 2 | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM) | 93,73% | 16.897.233.904 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Nilai Aspak | 94,8% | 15.686.828.599 | |
| | 1.02.02.1.01.02 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | 1 Unit | 3.454.560.000 | RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | 1 Unit | 1.826.500 | RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.02.1.01.14 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan | 44 Paket | 661.703.924 | RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.02.1.01.16 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan | 254 Unit | 142.392.000 | RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.02.1.01.17 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 345 Unit | 198.061.200 | RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.02.1.01.18 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara | 225 Unit | 156.431.400 | RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.02.1.01.19 | Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara | 2 Unit | 11.071.853.575 | RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Angka Kunjungan Rawat Jalan | 26102 Orang | 475.532.190 | |
| | 1.02.02.1.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 550 Dokumen | 295.000.000 | RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.02.1.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | 7 Dokumen | 180.532.190 | RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.02.02.1.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | <i>Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi</i> | 1 Modul | 734.873.115 | |
| | 1.02.02.1.03.03 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia | 551 Unit | 734.873.115 | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM |
| 3 | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | <i>Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)</i> | 92,5% | 1.162.080.000 | |
| | 1.02.03.1.01 | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | <i>Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Di Butuhkan Dalam Standar Rumah Sakit Jiwa Kelas A</i> | 1 Orang | 66.000.000 | |
| | 1.02.03.1.01.01 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 1 Orang | 66.000.000 | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | 1.02.03.1.02 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Jumlah Laporan Diklat Dan Atau Penelitian Yang Dilaksanakan</i> | 8 Laporan | 1.096.080.000 | |
| | 1.02.03.1.02.01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan | 140 Orang | 1.096.080.000 | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM |
| | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | |
| 1 | 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 7,07 indeks | 8.183.665.151 | |
| | 1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu</i> | 100% | 343.200.000 | |
| | 1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 343.200.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian</i> | 100% | 534.900.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | 234.900.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 36 Orang | 300.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum</i> | 100% | 1.054.466.745 | |
| | 1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 12.500.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 300.500.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 92.850.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 37.096.745 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 72 Dokumen | 11.520.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 600.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i> | 100% | 1.048.344.000 | |
| | 1.03.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 1.048.344.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.01.1.07.03 | Pengadaan Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 1 Unit | - | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Operasional Perangkat Daerah</i> | 100% | 3.239.081.906 | |
| | 1.03.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 268.202.946 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.958.878.960 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i> | 100% | 1.963.672.500 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 32 Unit | 450.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.01.1.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 38 Unit | 656.172.500 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 34 Unit | 42.500.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 815.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| 2 | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | <i>Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Persentase pengurangan luas genangan banjir perkotaan Persentase penyediaan kapasitas air baku Persentase panjang pantai kritis yang ditangani</i> | 62,39 % 64,58 % 80,08 % 88,72 % | 8.901.920.800 | |
| | 1.03.02.1.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | <i>Kapasitas air baku yang tersedia Panjang pantai kritis yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani</i> | 144 liter/detik 317 meter 2667,7 meter | 556.376.800 | |
| | 1.03.02.1.01.49 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 Unit | 556.376.800 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | <i>Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik</i> | 3390,58 meter | 8.345.544.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.02.1.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 20 KM | 8.345.544.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| 3 | 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | <i>Persentase Panjang Drainase yang berfungsi baik</i> | 71,95% | 6.203.283.500 | |
| | 1.03.06.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | <i>Panjang Drainase yang Berfungsi Baik</i> | 787 meter | 6.203.283.500 | |
| | 1.03.06.1.01.06 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara | 9 Unit | 6.203.283.500 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| 4 | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | <i>Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi</i> | 80,58% | 38.915.130.549 | |
| | 1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | <i>Panjang jalan dengan kondisi mantap</i> | 671,5 Km | 38.915.130.549 | |
| | 1.03.10.1.01.09 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 3 KM | 20.042.483.530 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | 10 KM | 9.561.946.519 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | 1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | 3596 M | 9.310.700.500 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| | | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 7,07 indeks | 5.518.696.200 | |
| | 1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu</i> | 100% | 120.840.000 | |
| | 1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 120.840.000 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |
| | 1.03.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian</i> | 100% | 227.856.200 | |
| | 1.03.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | 227.856.200 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |
| | 1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum</i> | 100% | 1.930.000.000 | |
| | 1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 50.000.000 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |
| | 1.03.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 6 Paket | 200.000.000 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |
| | 1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 50.000.000 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |
| | 1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 100.000.000 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |
| | 1.03.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 4 Paket | 130.000.000 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |
| | 1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1.400.000.000 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |
| | 1.03.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i> | 100% | 600.000.000 | |
| | 1.03.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | 100.000.000 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |
| | 1.03.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 50 Unit | 500.000.000 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |
| | 1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Operasional Perangkat Daerah</i> | 100% | 2.265.000.000 | |
| | 1.03.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 25.000.000 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 300.000.000 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |
| | 1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 40.000.000 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |
| | 1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.900.000.000 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |
| | 1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i> | 100% | 375.000.000 | |
| | 1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 225.000.000 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |
| | 1.03.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 150.000.000 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |
| 2 | 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | <i>Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)</i> | 75% | 475.296.800 | |
| | 1.03.11.1.03 | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | <i>Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD</i> | 1 Laporan | 475.296.800 | |
| | 1.03.11.1.03.02 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | 3 Laporan | 475.296.800 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |
| | X | - | | | | |
| | X.XX | - | | | | |
| 1 | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 7,07% | 100.000.000 | |
| | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i> | 100% | 100.000.000 | |
| | X.XX.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 88 Unit | 100.000.000 | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI |
| | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | |
| 1 | 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 7,07 indeks | 85.341.288.525 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu</i> | 80% | 1.600.000.000 | |
| | 1.03.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 500.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | 200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4 Dokumen | 200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Laporan | 500.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu</i> | 100% | 53.993.293.845 | |
| | 1.03.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 4.452,00 Orang/ Bulan | 51.974.605.845 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 6 Dokumen | 2.018.688.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian</i> | 100% | 739.884.200 | |
| | 1.03.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 537.066.200 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 200 Orang | 202.818.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum</i> | 100% | 2.665.940.025 | |
| | 1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 100.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 800.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 283.519.005 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 200 Paket | 250.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 11 Paket | 282.421.020 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 900.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 50.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i> | 100% | 500.000.000 | |
| | 1.03.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 500.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Operasional Perangkat Daerah</i> | 100% | 21.253.811.455 | |
| | 1.03.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 95.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 2.633.275.050 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 18.525.536.405 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i> | 100% | 4.588.359.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|------------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 Unit | 500.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | 1.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 400.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 2.688.359.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2 | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | <i>Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Persentase pengurangan luas genangan banjir perkotaan Persentase penyediaan kapasitas air baku Persentase panjang pantai kritis yang ditangani</i> | 62,39 % 64,58 % 80,08 % 88,72 % | 317.066.477.680 | |
| | 1.03.02.1.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | <i>Panjang segmen sungai yang ditangani Kapasitas air baku yang tersedia Panjang pantai kritis yang ditangani</i> | 2667,70 meter 144 liter/detik 317 meter | 226.916.477.680 | |
| | 1.03.02.1.01.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 17 Dokumen | 30.200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.02.1.01.03 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai | 16 Dokumen | 7.624.500.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.02.1.01.07 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun | 8 Titik | 33.150.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.02.1.01.08 | Pembangunan Unit Air Baku | Panjang Unit Air Baku yang Dibangun | 0.050 KM | 15.550.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.02.1.01.18 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun | 2.8 KM | 87.850.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.02.1.01.46 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 4.22 KM | 44.300.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.02.1.01.60 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen | 758.995.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.02.1.01.61 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan | 6 Lembaga | 6.855.736.980 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.02.1.01.62 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun | 1 Dokumen | 349.956.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.02.1.01.63 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Lembaga | 277.289.700 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|------------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | <i>Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik</i> | 3390,58 meter | 90.150.000.000 | |
| | 1.03.02.1.02.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | 8 Dokumen | 4.400.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.02.1.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 1.78 KM | 81.350.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.02.1.02.16 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi | 0.16 KM | 4.400.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 3 | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | <i>Persentase Penerapan SPM Air Minum Provinsi</i> | 49,58% | 244.043.993.627 | |
| | 1.03.03.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | <i>Capaian akses air minum layak</i> | 79% | 244.043.993.627 | |
| | 1.03.03.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM | 4 Dokumen | 3.500.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.03.1.01.02 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional | 4 Dokumen | 6.900.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.03.1.01.03 | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan | Kapasitas Pembangunan SPAM Regional | 70 Liter/Detik | 232.493.993.627 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.03.1.01.07 | Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM | 5 Kab/Kota | 350.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.03.1.01.08 | Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM | 10 Kab/Kota | 800.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 4 | 1.03.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | <i>Capaian akses penanganan sampah domestik</i> | 74% | 1.000.000.000 | |
| | 1.03.04.1.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | <i>Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</i> | 5 Kelompok Masyarakat | 1.000.000.000 | |
| | 1.03.04.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun | 1 Dokumen | 550.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.04.1.01.08 | Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 5 Kelompok Masyarakat | 450.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 5 | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | <i>Persentase pemenuhan SPM air limbah</i> | 17,5% | 3.500.000.000 | |
| | 1.03.05.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | <i>Capaian akses air limbah domestik layak</i> | 83% | 3.500.000.000 | |
| | 1.03.05.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun | 3 Dokumen | 2.500.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.05.1.01.06 | Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik | 3 Kelompok Masyarakat | 1.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|------------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | <i>Persentase Panjang Drainase yang berfungsi baik</i> | 71,95% | 43.650.000.000 | |
| | 1.03.06.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | <i>Panjang Drainase yang Berfungsi Baik</i> | 787 meter | 43.650.000.000 | |
| | 1.03.06.1.01.02 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | 6 Dokumen | 2.650.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.06.1.01.05 | Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 41.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 7 | 1.03.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | - | - | 10.000.000.000 | |
| | 1.03.07.1.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | | | 10.000.000.000 | |
| | 1.03.07.1.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 1 Sistem Jaringan | 10.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 8 | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | <i>Persentase jumlah gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang ditangani Persentase jumlah gedung diluar kepentingan strategis provinsi yang ditangani</i> | 40,55 % 33,33 % | 810.170.761.131 | |
| | 1.03.08.1.01 | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | <i>Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai</i> | 4 Unit | 810.170.761.131 | |
| | 1.03.08.1.01.01 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 11 Dokumen | 100.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.08.1.01.02 | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai | 11 Unit | 709.370.761.131 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.08.1.01.04 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi | Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi | 3 Dokumen | 500.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.08.1.01.09 | Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara | Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) | 25 Unit | 100.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.08.1.01.10 | Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara | 1 Dokumen | 100.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.08.1.01.11 | Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek | Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang | 10 Dokumen | 100.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 9 | 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | <i>Persentase jumlah kawasan yang ditata</i> | 40% | 40.000.000.000 | |
| | 1.03.09.1.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang selesai di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya</i> | 3 Kawasan | 40.000.000.000 | |
| | 1.03.09.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun | 2 Dokumen | 1.600.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.09.1.01.02 | Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 3 Kawasan | 7.300.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|--------------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.09.1.01.03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 3 Kawasan | 30.700.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.09.1.01.06 | Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota | Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota | 1 Dokumen | 100.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.09.1.01.07 | Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | 1 Dokumen | 300.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 10 | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | <i>Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi</i> | 80,58% | 1.115.966.543.207 | |
| | 1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | <i>Panjang jalan dengan kondisi mantap</i> | 671,5 km | 1.115.966.543.207 | |
| | 1.03.10.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian | 25 Dokumen | 22.300.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.10.1.01.02 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan | 120270.58 M2 | 50.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.10.1.01.03 | Pengelolaan Leger Jalan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan | 1 Dokumen | 1.500.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.10.1.01.04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan | 2 Dokumen | 2.900.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.10.1.01.05 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 17.5 KM | 417.400.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.10.1.01.06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar | 6 KM | 45.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.10.1.01.08 | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan | 32 KM | 467.966.543.207 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.10.1.01.12 | Pembangunan Jembatan | Panjang Jembatan yang Dibangun | 90 M | 68.900.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.10.1.01.23 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 24 Dokumen | 40.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 11 | 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | <i>Capaian sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli</i> | 88,79% | 21.500.000.000 | |
| | 1.03.11.1.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | <i>Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat</i> | 10576 orang | 14.680.000.000 | |
| | 1.03.11.1.01.01 | Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli | 1 Dokumen | 100.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.11.1.01.02 | Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan | Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli | 96 Orang | 1.280.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.11.1.01.03 | Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | - | - | 100.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.11.1.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan | 1500 Orang | 6.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.11.1.01.05 | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | 1 Dokumen | 150.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.11.1.01.06 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi | 1500 Orang | 5.700.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.11.1.01.07 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | - | - | 1.200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.11.1.01.08 | Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli | 1 Dokumen | 150.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.11.1.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | <i>Jumlah layanan yang disediakan</i> | 1 Layanan | 750.000.000 | |
| | 1.03.11.1.02.01 | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi | 1 Laporan | 100.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.11.1.02.02 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | 1 Dokumen | 150.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.11.1.02.03 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI | 60 Orang | 200.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.11.1.02.04 | Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU | Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU | 1 Dokumen | 150.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.11.1.02.05 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi | 1 Dokumen | 150.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.11.1.03 | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | <i>Jumlah NSPK yang diterapkan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi</i> | 1 Dokumen | 6.070.000.000 | |
| | 1.03.11.1.03.01 | Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan | 1 Dokumen | 3.820.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.11.1.03.02 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | 1 Laporan | 1.500.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.11.1.03.03 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota | 1 Laporan | 750.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 12 | 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | <i>Skoring penyelenggaraan penataan ruang</i> | 86,04 Skor | 13.500.000.000 | |
| | 1.03.12.1.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | <i>Jumlah Dokumen Kebijakan Penataan Ruang yang Ditetapkan atau Disosialisasikan</i> | 3 Dokumen | 2.200.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.12.1.01.03 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi | 1 Dokumen | 1.800.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.12.1.01.04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | 2 Dokumen | 400.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.12.1.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | <i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</i> | 12 Dokumen | 2.350.000.000 | |
| | 1.03.12.1.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | - | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.12.1.02.03 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota | 9 Dokumen | 1.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.12.1.02.04 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat | 3 Laporan | 1.350.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.12.1.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | <i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</i> | 22 Dokumen | 4.600.000.000 | |
| | 1.03.12.1.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 17 Dokumen | 3.350.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.12.1.03.02 | Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang | 5 Dokumen | 1.250.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|------------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.12.1.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | 8 Dokumen | 4.350.000.000 | |
| | 1.03.12.1.04.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.12.1.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | 4 Dokumen | 1.550.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.03.12.1.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 3 Dokumen | 1.800.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1,04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
| 1 | 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | <i>Persentase penyelenggaraan SPM perumahan</i> | 25% | 2.099.123.830 | |
| | 1.04.02.1.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | <i>Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang Terbangun</i> | 0 unit | 2.099.123.830 | |
| | 1.04.02.1.03.02 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi | 2 Dokumen | 2.099.123.830 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2 | 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | <i>Persentase pengurangan permukiman kumuh kewenangan provinsi</i> | 51,58% | 180.000.000.000 | |
| | 1.04.03.1.01 | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | <i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman</i> | 4 Laporan | 1.761.706.400 | |
| | 1.04.03.1.01.09 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2 Laporan | 1.761.706.400 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.04.03.1.02 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | <i>Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani</i> | 86,18% | 178.238.293.600 | |
| | 1.04.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 2 Dokumen | 2.171.200.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.04.03.1.02.03 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki | 1000 Unit Rumah | 29.301.156.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.04.03.1.02.07 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar | 35 Ha | 146.765.937.600 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 3 | 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | <i>Persentase penanganan PSU permukiman</i> | 26,92% | 51.000.000.000 | |
| | 1.04.05.1.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | <i>Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman</i> | 10 Lokasi | 51.000.000.000 | |
| | 1.04.05.1.01.01 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman | 5 Dokumen | 2.437.510.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1.04.05.1.01.02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman | 7 Lokasi | 48.562.490.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 7,07 indeks | 9.357.178.000 | |
| | 1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu</i> | 100% | 342.240.000 | |
| | 1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 342.240.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian</i> | 100% | 221.000.000 | |
| | 1.03.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | 50.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang | 171.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum</i> | 100% | 3.205.348.000 | |
| | 1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 50.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 2.161.277.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 34.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 9.600.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 950.400.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 71.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i> | 100% | 1.380.000.000 | |
| | 1.03.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 80.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.01.1.07.03 | Pengadaan Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 1 Unit | 100.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 Paket | 500.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 21 Unit | 500.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 200.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Operasional Perangkat Daerah</i> | 100% | 2.248.530.000 | |
| | 1.03.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 10.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 322.622.080 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.915.907.920 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i> | 100% | 1.960.060.000 | |
| | 1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 17 Unit | 167.800.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.01.1.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 17 Unit | 1.000.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 76 Unit | 85.120.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 707.140.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| 2 | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | <i>Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Persentase penyediaan kapasitas air baku Persentase pengurangan luas genangan banjir perkotaan ersentase panjang pantai kritis yang ditangani</i> | 62,39 % 80,08 % 64,58 % 88,72 % | 10.000.000.000 | |
| | 1.03.02.1.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | <i>Panjang segmen sungai yang ditangani Panjang pantai kritis yang ditangani Kapasitas air baku yang tersedia</i> | 2667,7 meter 317 meter 144 liter/detik | 3.000.000.000 | |
| | 1.03.02.1.01.21 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi | 2 Unit | 500.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.02.1.01.27 | Rehabilitasi Kanal Banjir | Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi | 1,25 KM | 2.000.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.02.1.01.53 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | 0,5 KM | 500.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | <i>Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik</i> | 3390,58 meter | 7.000.000.000 | |
| | 1.03.02.1.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 787,944 KM | 7.000.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| 3 | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | <i>Persentase jumlah gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang ditangani Persentase jumlah gedung diluar kepentingan strategis provinsi yang ditangani</i> | 40,55 % 33,33 % | 1.000.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.08.1.01 | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai | 4 unit | 1.000.000.000 | |
| | 1.03.08.1.01.02 | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai | 1 Unit | 1.000.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| 4 | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | <i>Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi</i> | 80,58% | 29.642.822.000 | |
| | 1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | <i>Panjang jalan dengan kondisi mantap</i> | 671,5 km | 29.642.822.000 | |
| | 1.03.10.1.01.09 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 5 KM | 7.500.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | 20 KM | 20.142.822.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | 1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | 120 M | 2.000.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I |
| | | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | |
| 1 | 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 7,07 indeks | 6.795.000.000 | |
| | 1.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu</i> | 100% | 468.990.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 468.990.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian</i> | 100% | 212.887.000 | |
| | 1.03.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 140.112.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang | 72.775.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum</i> | 100% | 1.030.386.008 | |
| | 1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 34.686.500 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 49.742.200 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 61.392.500 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 52.515.808 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 57.002.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 47.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 760.800.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 14.200.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i> | 100% | 40.200.000 | |
| | 1.03.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 40.200.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Operasional Perangkat Daerah</i> | 100% | 3.533.250.600 | |
| | 1.03.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 21.169.200 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 226.689.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.03.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1.385.200 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 3.284.007.200 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i> | 100% | 1.509.286.392 | |
| | 1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 47 Unit | 100.300.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 26 Unit | 802.947.300 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 65 Unit | 64.475.100 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 24 Unit | 499.299.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | 42.264.992 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | <i>Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Persentase penyediaan kapasitas air baku Persentase panjang pantai kritis yang ditangani Persentase pengurangan luas genangan banjir perkotaan</i> | 62,39 % 80,08 % 88,72 % 64,58 % | 7.000.000.000 | |
| | 1.03.02.1.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | <i>Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik</i> | 3390,58 meter | 7.000.000.000 | |
| | 1.03.02.1.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 1.3 KM | 2.000.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.02.1.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 32 KM | 5.000.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| 3 | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | <i>Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi</i> | 80,58% | 49.000.000.000 | |
| | 1.03.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | <i>Panjang jalan dengan kondisi mantap</i> | 671,5 km | 49.000.000.000 | |
| | 1.03.10.1.01.09 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 2 KM | 15.000.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | 37 KM | 32.000.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | 1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | 496.5 M | 2.000.000.000 | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | |
| 1 | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Sekretariat Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti</i> | 90 persen 100 persen | 24.254.739.100 | |
| | 1.05.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Document Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Satpol PP</i> | 28 Document | 1.051.315.800 | |
| | 1.05.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 301.696.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 12.965.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 12.965.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16 Laporan | 96.224.800 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | 627.465.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Administrate Keuangan Satpol PP yang terselesaikan</i> | 1 Dokumen | 13.855.299.928 | |
| | 1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 71 Orang/ Bulan | 13.411.663.928 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 349.800.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 88.200.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 3 Dokumen | 5.636.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan d aiD pelatihan</i> | 100 Persen | 772.214.100 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.05.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 669.189.100 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 21.650.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 11 Orang | 81.375.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Pelaksanaan Administrate Umum yang akuntabel</i> | 100 Persen | 1.320.184.450 | |
| | 1.05.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 10.842.400 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 125.810.472 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 32.887.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1.150.644.578 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase jenis pengadaan barang milik Daerah yang diperlukan</i> | 100 Persen | 788.553.400 | |
| | 1.05.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 650.000.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 138.553.400 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase kasa layanan umum kantor yang disediakan</i> | 100 Persen | 5.559.009.422 | |
| | 1.05.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 261.627.182 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 5.297.382.240 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 100 Persen | 908.162.000 | |
| | 1.05.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 60.000.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.05.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 21 Unit | 408.762.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 95 Unit | 29.860.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 409.540.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2 | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | <i>Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</i> | 100 persen | 4.643.810.900 | |
| | 1.05.02.1.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | <i>Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibum dalam Kat/Kota yang ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan</i> | 4 Kasus 120 orang | 3.317.846.700 | |
| | 1.05.02.1.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan | 4 Kasus | 1.048.778.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.1.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | 2 Dokumen | 377.050.900 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.1.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2 Dokumen | 997.594.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.1.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 120 Orang | 852.405.600 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.1.01.09 | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | 2 Laporan | 42.018.200 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.1.02 | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | <i>Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan</i> | 4 Perda dan Perkada | 1.045.888.150 | |
| | 1.05.02.1.02.01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 4 Laporan | 440.993.100 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.1.02.02 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 4 Laporan | 239.984.500 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.1.02.03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP | 4 Laporan | 364.910.550 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.1.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | <i>Jumlah Polisi Pamongpraja yang memiliki kualitas PPNS</i> | 1 orang | 280.076.050 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.05.02.1.03.01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda | 1 Laporan | 120.050.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.1.03.02 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS | Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP | 1 Dokumen | 160.026.050 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 3 | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | <i>Persentase Penanganan Pencegahan Kebakaran</i> | 100 persen | 601.450.000 | |
| | 1.05.04.1.01 | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | <i>Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran</i> | 4 Dokumen | 601.450.000 | |
| | 1.05.04.1.01.01 | Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran | Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal | 1 Dokumen | 170.650.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.1.01.02 | Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal | 1 Dokumen | 151.400.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.1.01.03 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 94.550.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.04.1.01.04 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | 5 Dokumen | 184.850.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | |
| 1 | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</i> | 100 persen | 20.300.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN JAWAB |
|----|-----------------|---|---|---|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.05.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Laporan | 1.638.044.500 | |
| | 1.05.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 338.799.500 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 76.430.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 75.760.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3.620.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3.540.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 575.345.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 564.550.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD</i> | 12 Dokumen 45 Orang / Bulan 3 Dokumen 12 Dokumen | 11.217.803.165 | |
| | 1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang/ Bulan | 10.600.723.165 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 305.280.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 162.500.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD | 12 Dokumen | 149.300.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | 1 Paket 1 Orang 2 Orang | 46.428.175 | |
| | 1.05.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 25.750.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 18.178.175 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 Orang | 2.500.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | 21 Paket 145 Laporan 10 Paket 6 Dokumen | 1.284.022.700 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|----|-----------------|---|---|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 159.897.100 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 22 Paket | 317.900.600 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 145 Laporan | 801.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 6 Dokumen | 5.225.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> | 1 Unit 4 Unit | 1.854.802.000 | |
| | 1.05.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 4 Unit | 1.362.192.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 492.610.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | 12 Laporan 12 Laporan | 3.459.925.460 | |
| | 1.05.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 571.038.900 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.888.886.560 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | 44 Unit 172 Unit 1 Unit | 798.974.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.05.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 44 Unit | 479.209.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 173 Unit | 66.822.500 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 252.942.500 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2 | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | <i>Presentase Penanganan Pra Bencana</i> | 100% | 7.000.000.000 | |
| | 1.05.03.1.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | <i>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</i> | 100% | 200.000.000 | |
| | 1.05.03.1.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota | 20 Orang | 200.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | <i>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i> | 100 % 30 Orang 12 Laporan | 1.800.000.000 | |
| | 1.05.03.1.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 20 Orang | 200.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 12 Dokumen | 600.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana | 0 Unit | 1.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 2 Kawasan | 499.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.05.03.1.02.08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana | 30 Orang | 300.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.02.10 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi | 2 Laporan | 200.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i> | 20 Orang 10 Laporan 10 Laporan | 1.600.000.000 | |
| | 1.05.03.1.03.02 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | 10 Laporan | 500.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.03.03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | 20 Laporan | 300.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 10 Orang | 800.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | <i>Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i> | 100% | 3.400.000.000 | |
| | 1.05.03.1.04.01 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | 1 Dokumen | 200.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04.02 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah | 2 Dokumen | 200.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04.03 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | 1 Dokumen | 100.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.05.03.1.04.04 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan | 1 Dokumen | 100.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04.05 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi | 3 Laporan | 600.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04.06 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 60 Keluarga | 200.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.1.04.07 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun | 5 Dokumen | 2.000.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | DINAS SOSIAL | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | |
| 1 | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | - | 46.516.830.431 | |
| | 1.06.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | 2.909.067.350 | |
| | 1.06.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 2.559.067.350 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 250.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan | 100.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 33.993.070.889 | |
| | 1.06.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 165 Orang/ Bulan | 29.519.460.417 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 Dokumen | 4.373.610.472 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi | 1 Laporan | 100.000.000 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| | 1.06.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 162.000.000 | |
| | 1.06.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 160 Paket | 100.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 50.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 12.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.486.358.880 | |
| | 1.06.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 167.903.450 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 342.674.200 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 324.111.150 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1.601.670.080 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 50.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.650.707.912 | |
| | 1.06.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 Unit | 4.050.707.912 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 250.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 27 Unit | 350.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 552.830.300 | |
| | 1.06.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 66.556.600 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 486.273.700 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.762.795.100 | |
| | 1.06.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | 77.161.700 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 33.330.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 200 Unit | 825.746.900 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.06.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 826.556.500 | DINAS SOSIAL |
| 2 | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | - | - | 1.402.683.180 | |
| | 1.06.02.1.01 | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 100.000.000 | |
| | 1.06.02.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 9 Kab/Kota Dokumen | 100.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.1.02 | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | - | - | 1.302.683.180 | |
| | 1.06.02.1.02.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | 40 Orang | 184.122.300 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.1.02.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya | 105 Orang | 630.844.280 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.1.02.03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi | 40 Keluarga | 284.424.050 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.1.02.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi | 20 Lembaga | 203.292.550 | DINAS SOSIAL |
| 3 | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | - | - | 22.095.939.579 | |
| | 1.06.04.1.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | - | - | 4.790.939.579 | |
| | 1.06.04.1.01.01 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 170 Orang | 2.002.700.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | 30 Orang | 691.739.579 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.04 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | 100 Orang | 600.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | 30 Orang | 15.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | 30 Orang | 75.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | 30 Orang | 228.250.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.01.11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | 30 Orang | 228.250.000 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.06.04.1.01.12 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | 5 Dokumen | 950.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | - | - | 10.972.000.000 | |
| | 1.06.04.1.02.02 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 5186 Orang | 10.372.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | 20 Orang | 150.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | 20 Orang | 150.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.02.13 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | 7 Dokumen | 300.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | - | - | 5.308.000.000 | |
| | 1.06.04.1.03.01 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 2304 Orang | 4.608.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.04 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | 100 Orang | 300.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | 20 Orang | 100.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | 20 Orang | 100.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.03.13 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi | 5 Dokumen | 200.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.04 | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | - | - | 525.000.000 | |
| | 1.06.04.1.04.01 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 50 Orang | 75.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.04.10 | Pemulangan ke Daerah Asal | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi | 50 Orang | 150.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.04.11 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | 6 Dokumen | 300.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.05 | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PmKs) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | | | 500.000.000 | |
| | 1.06.04.1.05.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | 50 Orang | 150.000.000 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.06.04.1.05.10 | Pemulangan ke Daerah Asal | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal | 50 Orang | 150.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.1.05.11 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | 4 Dokumen | 200.000.000 | DINAS SOSIAL |
| 4 | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | - | 18.375.516.000 | |
| | 1.06.05.1.01 | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | | | 658.711.000 | |
| | 1.06.05.1.01.01 | Pengangkatan Anak antar WNI | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi | 15 Orang | 508.711.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.1.01.02 | Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi | 3 Orang | 150.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.1.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | - | - | 17.716.805.000 | |
| | 1.06.05.1.02.01 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi | 5000 Keluarga | 12.955.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.1.02.02 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota | 1000 Keluarga | 2.261.805.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.1.02.03 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi | 2000 Orang | 2.500.000.000 | DINAS SOSIAL |
| 5 | 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | - | 11.986.306.500 | |
| | 1.06.06.1.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | - | - | 11.986.306.500 | |
| | 1.06.06.1.01.01 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi | 17870 Orang | 7.077.752.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.1.01.02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi | 1000 Orang | 405.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.1.01.03 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi | 1000 Unit | 1.971.021.500 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.1.01.04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi | 900 Orang | 1.100.365.500 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.1.01.05 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi | 600 Orang | 1.432.167.500 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | - | - | 637.332.310 | |
| | 1.06.07.1.01 | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | - | - | 637.332.310 | |
| | 1.06.07.1.01.01 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 6 Dokumen | 296.332.310 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.1.01.02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 1 Makam | 185.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.1.01.03 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 1 Laporan | 156.000.000 | DINAS SOSIAL |
| | | UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | |
| 1 | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 3.745.162.930 | |
| | 1.06.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 2.125.968.240 | |
| | 1.06.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Laporan Dokumen | 2.125.968.240 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |
| | 1.06.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 59.980.690 | |
| | 1.06.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 59.980.690 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |
| | 1.06.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 774.959.320 | |
| | 1.06.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 16.565.010 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |
| | 1.06.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 504.909.130 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.06.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 32.385.180 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |
| | 1.06.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 221.100.000 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |
| | 1.06.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | |
| | 1.06.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Paket | - | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |
| | 1.06.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 269.916.680 | |
| | 1.06.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 263.161.800 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |
| | 1.06.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 6.754.880 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |
| | 1.06.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 514.338.000 | |
| | 1.06.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | 122.545.500 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |
| | 1.06.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 305 Unit | 171.792.500 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |
| | 1.06.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 220.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |
| 2 | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | - | - | 3.281.612.070 | |
| | 1.06.04.1.03 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | - | 3.281.612.070 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.06.04.1.03.01 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 110 Orang | 2.579.934.500 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |
| | 1.06.04.1.03.02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | 110 Orang | 28.248.000 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |
| | 1.06.04.1.03.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | 110 Orang | 93.778.300 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |
| | 1.06.04.1.03.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | 110 Orang | 162.529.070 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |
| | 1.06.04.1.03.07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi | 110 Orang | 336.270.000 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |
| | 1.06.04.1.03.12 | Pemulasaraan | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | 110 Orang | 80.852.200 | UPTD PANTI SOSIAL TRESNAWERDHA NIRWANA PURI |
| | | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | |
| 1 | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | " | - | 2.675.436.000 | |
| | 1.06.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 1.381.561.192 | |
| | 1.06.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 1.381.561.192 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | 1.06.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 73.500.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.06.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 64.500.000 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | 1.06.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 43 Orang | 9.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | 1.06.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 360.867.108 | |
| | 1.06.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 11.000.550 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | 1.06.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 140.370.230 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | 1.06.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 9.016.328 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | 1.06.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 200.480.000 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | 1.06.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 127.000.000 | |
| | 1.06.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | 55.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | 1.06.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 50.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | 1.06.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 22.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | 1.06.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 329.200.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.06.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 2.200.000 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | 1.06.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 327.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | 1.06.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 403.307.700 | |
| | 1.06.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | 154.942.700 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | 1.06.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 70 Unit | 68.365.000 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | 1.06.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 180.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| 2 | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | - | - | 2.563.000.000 | |
| | 1.06.04.1.02 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | - | - | 2.563.000.000 | |
| | 1.06.04.1.02.02 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 80 Orang | 1.766.600.000 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | 1.06.04.1.02.03 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | 80 Orang | 543.290.000 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | 1.06.04.1.02.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | 80 Orang | 83.490.000 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | 1.06.04.1.02.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | 80 Orang | 84.810.000 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.06.04.1.02.09 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | 80 Orang | 84.810.000 | UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA |
| | | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | |
| 1 | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 3.115.917.000 | |
| | 1.06.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 1.707.800.000 | |
| | 1.06.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 1.707.800.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | 1.06.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 150.917.000 | |
| | 1.06.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 150.917.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | 1.06.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 512.200.000 | |
| | 1.06.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 20.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | 1.06.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 150.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | 1.06.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 23.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | 1.06.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 319.200.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | 1.06.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 75.500.000 | |
| | 1.06.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 55.500.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | 1.06.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 20.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | 1.06.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 299.500.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.06.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 6.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | 1.06.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 200.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | 1.06.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 93.500.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | 1.06.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 370.000.000 | |
| | 1.06.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | 110.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | 1.06.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 60.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | 1.06.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 200.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| 2 | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | - | - | 2.650.957.000 | |
| | 1.06.04.1.02 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | - | - | 2.650.957.000 | |
| | 1.06.04.1.02.02 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 80 Orang | 1.843.457.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | 1.06.04.1.02.03 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | 80 Orang | 348.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | 1.06.04.1.02.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | 80 Orang | 199.500.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | 1.06.04.1.02.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | 80 Orang | 110.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | 1.06.04.1.02.09 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | 80 Orang | 150.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
| | | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 2.815.062.654 | |
| | 1.06.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 1.272.156.480 | |
| | 1.06.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Laporan Dokumen | 1.272.156.480 | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA |
| | 1.06.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 91.699.560 | |
| | 1.06.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 37 Stel Paket | 91.699.560 | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA |
| | 1.06.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 756.607.478 | |
| | 1.06.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Tahun Paket | 64.225.332 | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA |
| | 1.06.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Tahun Paket | 282.182.900 | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA |
| | 1.06.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Laporan Paket | 26.013.006 | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA |
| | 1.06.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan Laporan | 384.186.240 | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA |
| | 1.06.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 166.560.136 | |
| | 1.06.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan Laporan | 10.819.008 | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA |
| | 1.06.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Tahun Laporan | 155.741.128 | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA |
| | 1.06.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 528.039.000 | |
| | 1.06.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit Unit | 89.002.800 | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA |
| | 1.06.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit Unit | 73.481.040 | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA |
| | 1.06.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit Unit | 365.555.160 | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA |
| 2 | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | - | - | 1.726.377.346 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.06.04.1.02 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | - | - | 1.726.377.346 | |
| | 1.06.04.1.02.02 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 60 Orang Orang | 706.036.500 | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA |
| | 1.06.04.1.02.03 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | 75 Orang Orang | 114.933.600 | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA |
| | 1.06.04.1.02.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | 60 Orang Orang | 24.937.200 | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA |
| | 1.06.04.1.02.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | 60 Orang Orang | 726.462.046 | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA |
| | 1.06.04.1.02.10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | 60 Orang Orang | 154.008.000 | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA |
| | | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 1,06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | |
| 1 | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | - | 1.279.931.000 | |
| | 1.06.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 747.752.000 | |
| | 1.06.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 747.752.000 | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
| | 1.06.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 228.520.000 | |
| | 1.06.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 5.154.000 | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
| | 1.06.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 49.126.000 | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
| | 1.06.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 174.240.000 | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.06.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 64.478.000 | |
| | 1.06.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 64.478.000 | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
| | 1.06.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 239.181.000 | |
| | 1.06.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 31.735.000 | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
| | 1.06.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | 42.446.000 | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
| | 1.06.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 165.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
| 2 | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | - | - | 576.609.000 | |
| | 1.06.04.1.05 | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PmKs) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | | | 576.609.000 | |
| | 1.06.04.1.05.01 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 35 Orang | 313.830.000 | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
| | 1.06.04.1.05.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | 35 Orang | 220.000.000 | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
| | 1.06.04.1.05.09 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | 35 Orang | 5.874.000 | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
| | 1.06.04.1.05.10 | Pemulangan ke Daerah Asal | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PmKs) Lainnya di Luar HIV/AiDs Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal | 10 Orang | 36.905.000 | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
| | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | |
| 1 | 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Reformasi Birokrasi</i> | 65 Poin | 43.587.438.250 | |
| | 2.07.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi</i> | 10 Dokumen | 2.449.905.100 | |
| | 2.07.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 1.936.649.500 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 177.780.200 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 335.475.400 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Keuangan</i> | 1 Laporan | 33.305.884.810 | |
| | 2.07.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn | 155/12 Orang/ Bulan | 32.444.637.810 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 500.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 27.490.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 310.032.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 23.725.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian</i> | 1 Dokumen | 440.000.000 | |
| | 2.07.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 190 Paket | 190.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 50.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.07.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 150.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | 50.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 1 Dokumen | 1.919.094.700 | |
| | 2.07.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 20.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | 500.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 314.094.700 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 11 Paket | 55.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 20 Dokumen | 30.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 98 Laporan | 850.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 150.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Terlaksananya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 1 Dokumen | 195.000.000 | |
| | 2.07.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | 70.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 50.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 75.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 1 Dokumen | 4.226.183.640 | |
| | 2.07.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 240 Laporan | 6.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.07.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 481.905.800 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 70.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 3.668.277.840 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 1 Dokumen | 1.051.370.000 | |
| | 2.07.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 55.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | 196.370.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | 50.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 50.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 650.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 50.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2 | 2.07.02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | <i>Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)</i> | 75 Persen | 1.000.000.000 | |
| | 2.07.02.1.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | <i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga kerja Daerah</i> | 9 Dokumen | 1.000.000.000 | |
| | 2.07.02.1.01.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 1 Dokumen | 750.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.02.1.01.02 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro | 20 Orang | 250.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 3 | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | <i>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</i> | 285.05 Juta/Orang | 2.243.647.800 | |
| | 2.07.03.1.01 | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | <i>Persentase Lulusan Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja</i> | 70 Persen | 1.960.924.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.07.03.1.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n | 240 Orang | 1.890.924.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.1.01.02 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | 15 Lembaga | 70.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.1.02 | Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja | <i>Jumlah Laporan LPK Yang Terakreditasi</i> | 25 LPK | 70.000.000 | |
| | 2.07.03.1.02.01 | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi | 10 LPK | 70.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.1.03 | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah | <i>Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Produktivitas</i> | 1 Laporan | 100.000.000 | |
| | 2.07.03.1.03.01 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas | 20 Perusahaan | 100.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.1.04 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi | <i>Jumlah laporan hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing tenaga kerja tingkat Daerah</i> | 1 Laporan | 112.723.800 | |
| | 2.07.03.1.04.01 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah | 1 Dokumen | 112.723.800 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 4 | 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | <i>Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri</i> | 12384 Orang | 2.525.764.900 | |
| | 2.07.04.1.01 | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan</i> | 180 Orang | 702.744.000 | |
| | 2.07.04.1.01.01 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja | Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya | 240 Orang | 70.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.1.01.03 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | 180 Orang | 150.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.1.01.04 | Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL | 10000 Orang | 100.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.1.01.05 | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja | 160 Orang | 382.744.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.1.02 | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin</i> | 15 Lembaga | 50.000.000 | |
| | 2.07.04.1.02.02 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku | 15 Lembaga | 50.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.1.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | <i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i> | 1 Dokumen | 1.700.980.900 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.07.04.1.03.01 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | 1 Dokumen | 45.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.1.03.02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) | 5000 Orang | 198.228.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.1.03.03 | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | 200 Orang | 1.457.752.900 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.1.05 | Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Jumlah Dokumen TKA yang diterbitkan Notifikasinya Dalam Satu Daerah Provinsi</i> | 1 Dokumen | 72.040.000 | |
| | 2.07.04.1.05.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA | 20 Orang | 72.040.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 5 | 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | <i>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</i> | 15 Persen | 2.762.600.050 | |
| | 2.07.05.1.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan</i> | 100 SK | 670.658.750 | |
| | 2.07.05.1.01.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online | 40 Perusahaan | 377.842.400 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.1.01.02 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online | 40 Perusahaan | 202.922.550 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.1.01.03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek | 1 Laporan | 89.893.800 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.1.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)</i> | 1 Dokumen | 790.516.500 | |
| | 2.07.05.1.02.01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 1 Perkara | 274.500.900 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.1.02.02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan | 10 Perkara | 127.309.800 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.07.05.1.02.03 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 89.509.800 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.1.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | 7 Lembaga | 199.196.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.1.02.05 | Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi | Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi | 20 Perusahaan | 100.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.1.03 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) | <i>Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota</i> | 11 SK | 1.301.424.800 | |
| | 2.07.05.1.03.01 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) | Jumlah Penetapan UMP | 1 Surat Keputusan | 634.079.700 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.1.03.03 | Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) | Jumlah penetapan UMK | 9 Surat Keputusan | 517.345.100 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.1.03.05 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 10000 Orang | 150.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 6 | 2.07.06 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | <i>Persentase Perusahaan yang diperiksa dan diawasi</i> | 21.32 Persen | 3.500.000.000 | |
| | 2.07.06.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | <i>Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi</i> | 3800 Perusahaan | 3.500.000.000 | |
| | 2.07.06.1.01.01 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) | 3339 Perusahaan | 1.700.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.06.1.01.02 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan | 1 Kasus | 600.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.06.1.01.03 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 | 520 Perusahaan | 1.200.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | |
| 1 | 3.32.02 | PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI | <i>Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Ditetapkan</i> | 1 Kawasan Transmigrasi | 477.054.000 | |
| | 3.32.02.1.01 | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | <i>Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan</i> | 1 Dokumen | 477.054.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.32.02.1.01.01 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakamkan dengan Daerah Lain | 1 Dokumen | 100.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.02.1.01.02 | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan | Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi | 1 Kawasan Transmigrasi | 119.196.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.02.1.01.03 | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | 10947.55 Hektar | 180.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.02.1.01.04 | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | 1 Dokumen | 77.858.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2 | 3.32.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | <i>Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Terbangun</i> | 1 Kawasan Transmigrasi | 545.791.300 | |
| | 3.32.03.1.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | <i>Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi</i> | 1 Dokumen | 545.791.300 | |
| | 3.32.03.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Laporan | 128.598.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.1.01.02 | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) | 0 Dokumen | 10.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.1.01.04 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan | 0 Kepala Keluarga | 10.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.1.01.06 | Pelatihan Transmigrasi | Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan | 40 Orang | 100.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.1.01.13 | Pelayanan Kesehatan Transmigran | Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran | 10 KK | 100.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.1.01.18 | Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi | Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi | 1 Lokasi | 197.193.300 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 3 | 3.32.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | <i>Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Mandiri</i> | 1 Kawasan Transmigrasi | 477.154.700 | |
| | 3.32.04.1.01 | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan | <i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitasi, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan</i> | 1 Dokumen | 477.154.700 | |
| | 3.32.04.1.01.01 | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina | 60 Kepala Keluarga | 327.154.700 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.32.04.1.01.02 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan | 1 Satuan Permukiman | 150.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | |
| 1 | 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Reformasi Birokrasi</i> | 65 Pion | 5.476.509.000 | |
| | 2.07.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Keuangan</i> | 1 Dokumen | 650.000.000 | |
| | 2.07.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 500.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 150.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian</i> | 1 Dokumen | 30.000.000 | |
| | 2.07.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 30 Paket | 30.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Terselenggaranya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 1 Dokumen | 1.462.486.400 | |
| | 2.07.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 13 Paket | 8.556.500 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 488.869.400 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 20.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.07.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 350.060.500 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 20 Paket | 95.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | 500.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 1 Dokumen | 770.000.000 | |
| | 2.07.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 70.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 500.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 200.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 1 Dokumen | 1.909.139.100 | |
| | 2.07.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 Laporan | 5.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 390.641.500 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 50 Laporan | 304.350.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.07.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.209.147.600 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 1 Dokumen | 654.883.500 | |
| | 2.07.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 55.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 49.883.500 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | 150.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 Unit | 100.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | 300.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| 2 | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | <i>Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang ditempatkan</i> | 75 Persen | 22.900.000.000 | |
| | 2.07.03.1.01 | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | <i>Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten</i> | 75 Persen | 22.900.000.000 | |
| | 2.07.03.1.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n | 1040 Orang | 21.900.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.03.1.01.02 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | 20 Lembaga | 250.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |
| | 2.07.03.1.01.03 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja | 20 Unit | 750.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | |
| 1 | 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Reformasi Birokrasi</i> | 65 Poin | 6.748.881.950 | |
| | 2.07.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Keuangan</i> | 1 Dokumen | 1.142.940.000 | |
| | 2.07.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 1.142.940.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | 2.07.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian</i> | 1 Dokumen | 81.800.000 | |
| | 2.07.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 30 Paket | 81.800.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | 2.07.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 847.733.100 | |
| | 2.07.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 99.274.100 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | 2.07.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 40.795.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | 2.07.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 40.244.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | 2.07.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 20 Paket | 17.420.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | 2.07.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | 650.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | 2.07.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.092.408.850 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.07.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 Laporan | 22.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | 2.07.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 423.600.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | 2.07.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 853.868.850 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | 2.07.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.792.940.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | 2.07.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 1 Dokumen | 1.584.000.000 | |
| | 2.07.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 54.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | 2.07.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | - | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | 2.07.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | 200.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | 2.07.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 950.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | 2.07.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 380.000.000 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| 2 | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | <i>Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang ditempatkan</i> | 60 Pesen | 20.957.116.050 | |
| | 2.07.03.1.01 | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | <i>Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten</i> | 60 Persen | 20.957.116.050 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.07.03.1.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n | 512 Orang | 8.061.045.250 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | 2.07.03.1.01.02 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | 20 Lembaga | 239.367.500 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | 2.07.03.1.01.03 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja | 10 Unit | 12.656.703.300 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG |
| | | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | |
| 1 | 2.08.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 20.741.193.081 | |
| | 2.08.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 756.190.000 | |
| | 2.08.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 265.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 145.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.08.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 10.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 5.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 126.190.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 200.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 11.125.727.081 | |
| | 2.08.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn | 50 Orang/ Bulan | 11.025.727.081 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 45.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | 35.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.08.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | 20.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 1.150.000.000 | |
| | 2.08.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 85 Paket | 216.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 85 Orang | 784.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 30 Orang | 150.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.740.513.600 | |
| | 2.08.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 15.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 210.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 150.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.08.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 96 Dokumen | 15.513.600 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 300.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Laporan | 1.900.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 150.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 900.000.000 | |
| | 2.08.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 300.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 30 Unit | 600.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.969.769.200 | |
| | 2.08.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 10.885.200 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.08.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 458.884.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 100.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 2.400.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 1.098.993.200 | |
| | 2.08.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 10.203.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | 260.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 828.790.200 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2 | 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | 12.459.543.000 | |
| | 2.08.02.1.01 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | | | 10.766.515.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.08.02.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen | 10.350.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.1.01.03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi | 30 Perangkat Daerah | 178.257.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.1.01.04 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) | 30 Perangkat Daerah | 238.258.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.1.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi | | | 791.514.000 | |
| | 2.08.02.1.02.01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen | 433.257.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.1.02.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota | 10 Organisasi | 358.257.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.1.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | | | 901.514.000 | |
| | 2.08.02.1.03.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | 10 Lembaga | 285.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.08.02.1.03.02 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 300 Orang | 368.257.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.1.03.03 | Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia | 1 Dokumen | 248.257.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 3 | 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | - | - | 1.556.925.600 | |
| | 2.08.03.1.01 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | 967.537.600 | |
| | 2.08.03.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | 3 Dokumen | 567.537.600 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.1.01.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | 0 Perangkat Daerah | 400.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.1.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | 589.388.000 | |
| | 2.08.03.1.02.01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat | 30 Orang | 250.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.1.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | 40 Layanan | 339.388.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 4 | 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | - | - | 1.068.365.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.08.05.1.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | | | 1.068.365.000 | |
| | 2.08.05.1.01.01 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia | 2 Dokumen | 718.365.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.05.1.01.02 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | 2 Dokumen | 350.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 5 | 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | - | - | 1.117.500.000 | |
| | 2.08.06.1.01 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | | | 717.500.000 | |
| | 2.08.06.1.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 30 Organisasi | 350.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen | 367.500.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.1.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | | | 400.000.000 | |
| | 2.08.06.1.02.03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen | 150.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.1.02.04 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 250.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | - | - | 2.056.963.319 | |
| | 2.08.07.1.01 | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | 700.000.000 | |
| | 2.08.07.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen | 700.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.1.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi | | | 1.356.963.319 | |
| | 2.08.07.1.02.01 | Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan | 30 Orang | 250.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.1.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | 40 Layanan | 339.388.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.1.02.03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen | 767.575.319 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2,12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | |
| 1 | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | - | - | 800.000.000 | |
| | 2.12.02.1.02 | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | - | - | 350.000.000 | |
| | 2.12.02.1.02.01 | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | 300.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.12.02.1.02.02 | Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | 50.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.12.02.1.03 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan | - | - | 450.000.000 | |
| | 2.12.02.1.03.01 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | 300.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.12.02.1.03.02 | Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | 150.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2 | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | - | - | 458.118.000 | |
| | 2.12.03.1.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi | - | - | 250.000.000 | |
| | 2.12.03.1.02.01 | Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | 1 Laporan | 200.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.12.03.1.02.02 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | 1 Laporan | 50.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.12.03.1.03 | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | - | - | 208.118.000 | |
| | 2.12.03.1.03.01 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil | 1 Laporan | 100.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.12.03.1.03.02 | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | 1 Laporan | 108.118.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 3 | 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | 450.000.000 | |
| | 2.12.04.1.02 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | | | 250.000.000 | |
| | 2.12.04.1.02.01 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | 150.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.12.04.1.02.02 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | 50.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.12.04.1.02.05 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan | 1 Dokumen | 50.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.12.04.1.03 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | | | 200.000.000 | |
| | 2.12.04.1.03.01 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | 50.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.12.04.1.03.02 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 50 Orang | 150.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 4 | 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | - | - | 100.000.000 | |
| | 2.12.05.1.01 | Penyediaan Profil Kependudukan | - | - | 100.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.12.05.1.01.01 | Penyediaan Data Kependudukan Provinsi | Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia | 1 Dokumen | 100.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2,14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | |
| 1 | 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | - | - | 600.000.000 | |
| | 2.14.02.1.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | 600.000.000 | |
| | 2.14.02.1.01.03 | Advokasi dan Sosialisasi GDPK | Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK | 0 Laporan | 300.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.02.1.01.08 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | 0 Laporan | 300.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2 | 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | - | - | 500.000.000 | |
| | 2.14.03.1.01 | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | 500.000.000 | |
| | 2.14.03.1.01.05 | Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 0 Dokumen | 200.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.03.1.01.07 | Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | 0 Dokumen | 150.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.14.03.1.01.08 | Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi | 0 Laporan | 150.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 3 | 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | 906.858.000 | |
| | 2.14.04.1.01 | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | 600.000.000 | |
| | 2.14.04.1.01.03 | Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 0 Dokumen | 300.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.04.1.01.08 | Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB | Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB | 0 Organisasi | 300.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.14.04.1.02 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | 306.858.000 | |
| | 2.14.04.1.02.02 | Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 0 Laporan | 306.858.000 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | |
| 1 | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | 3.775.000.000 | |
| | 2.09.03.1.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | 1.000.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.09.03.1.01.01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 13 Laporan | 250.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 2.09.03.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 1 Laporan | 500.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 2.09.03.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 12 Dokumen | 250.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 2.09.03.1.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | - | - | 600.000.000 | |
| | 2.09.03.1.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi | 12 Laporan | 280.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 2.09.03.1.02.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | 1 Laporan | 150.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 2.09.03.1.02.04 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara | 300 Ton | 170.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 2.09.03.1.04 | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | | | 2.175.000.000 | |
| | 2.09.03.1.04.01 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Dokumen | 951.562.500 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 2.09.03.1.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | 4 Laporan | 622.920.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 2.09.03.1.04.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | 1 Laporan | 600.517.500 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 2 | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | - | - | 1.900.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.09.04.1.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi | | | 300.000.000 | |
| | 2.09.04.1.01.01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan | 2 Dokumen | 300.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 2.09.04.1.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | - | - | 1.600.000.000 | |
| | 2.09.04.1.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi | 1 Dokumen | 300.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 2.09.04.1.02.02 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Dokumen | 1.300.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 3 | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | - | - | 1.325.000.000 | |
| | 2.09.05.1.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.325.000.000 | |
| | 2.09.05.1.01.01 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi | Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina | 1 Dokumen | 581.012.500 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 2.09.05.1.01.02 | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 11 Sertifikat | 137.800.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 2.09.05.1.01.03 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 4 Dokumen | 130.247.500 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 2.09.05.1.01.04 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 115.937.500 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 2.09.05.1.01.05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan | 1 Dokumen | 360.002.500 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3,27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | |
| 1 | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 62.974.646.000 | |
| | 3.27.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 1.160.253.000 | |
| | 3.27.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 821.117.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 8.800.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 8.800.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan | 93.960.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 227.576.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 54.557.750.000 | |
| | 3.27.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 200 Orang/ Bulan | 53.700.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 495.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 200.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 3 Dokumen | 6.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 156.750.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 45.500.000 | |
| | 3.27.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 4.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 41.500.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 335.000.000 | |
| | 3.27.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 200.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 35.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 17 Orang | 100.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.150.000.000 | |
| | 3.27.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 25.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 150.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 30 Paket | 20.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 14 Dokumen | 25.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 177 Laporan | 830.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 4 Dokumen | 100.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.734.688.680 | |
| | 3.27.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 1.070.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 80 Unit | 664.688.680 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.970.854.320 | |
| | 3.27.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 35.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 470.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.465.854.320 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.020.600.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 175.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 28 Unit | 375.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 72 Unit | 150.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | 268.600.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 52.000.000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 2 | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | - | - | 18.000.000.000 | |
| | 3.27.02.1.01 | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | - | - | 18.000.000.000 | |
| | 3.27.02.1.01.01 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | 2 Laporan | 15.748.901.250 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.02.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | 2 Dokumen | 2.251.098.750 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 3 | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | - | - | 3.200.000.000 | |
| | 3.27.03.1.01 | Penataan Prasarana Pertanian | - | - | 3.200.000.000 | |
| | 3.27.03.1.01.01 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 2 Dokumen | 1.200.773.500 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.03.1.01.02 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 2 Dokumen | 1.480.389.850 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.03.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | 2 Dokumen | 133.002.600 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.03.1.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | 2 Dokumen | 133.321.600 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.03.1.01.09 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 2 Laporan | 252.512.450 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | |
| 1 | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | " | - | 1.950.000.000 | |
| | 3.27.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 81.000.000 | |
| | 3.27.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 81.000.000 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 156.120.000 | |
| | 3.27.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 25 Orang | 156.120.000 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 151.400.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 50 Paket | 3.500.000 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 3.500.000 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 16.000.000 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7 Laporan | 122.400.000 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 6.000.000 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 90.000.000 | |
| | 3.27.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 32 Unit | 90.000.000 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.101.824.160 | |
| | 3.27.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 4.000.000 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 162.992.000 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 934.832.160 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 369.655.840 | |
| | 3.27.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit | 66.614.000 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | 70.000.000 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | 233.041.840 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 2 | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | - | - | 1.300.000.000 | |
| | 3.27.02.1.02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | - | - | 1.237.474.962 | |
| | 3.27.02.1.02.01 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | Jumlah Sertifikat Benih | 90 Sertifikat | 526.506.640 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.02.1.02.02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura | 44 Laporan | 362.699.072 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.02.1.02.03 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan | Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran | 60 Dokumen | 348.269.250 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.02.1.03 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | | | 62.525.038 | |
| | 3.27.02.1.03.02 | Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai | 3 Varietas Unggul Baru (VUB) | 62.525.038 | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | |
| 1 | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 3.302.250.000 | |
| | 3.27.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 85.000.000 | |
| | 3.27.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 85.000.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 290.000.000 | |
| | 3.27.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 86 Paket | 200.000.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 90.000.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 666.250.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 35.000.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 75.000.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 15 Paket | 12.150.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 2.100.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 542.000.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 150.000.000 | |
| | 3.27.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 150.000.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.625.000.000 | |
| | 3.27.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 5.000.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 170.000.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.450.000.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 486.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 86.000.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | 400.000.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 2 | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | - | - | 495.000.000 | |
| | 3.27.02.1.01 | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | - | - | 220.000.000 | |
| | 3.27.02.1.01.01 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | 40 Laporan | 220.000.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.02.1.03 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | | | 275.000.000 | |
| | 3.27.02.1.03.04 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | 3 Laporan | 275.000.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 3 | 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | 2.202.750.000 | |
| | 3.27.05.1.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | | - | 2.202.750.000 | |
| | 3.27.05.1.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 15000 Ha | 2.042.750.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.05.1.01.02 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | 50 Ha | 160.000.000 | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | |
| 1 | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 4.200.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 115.680.000 | |
| | 3.27.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 115.680.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 295.900.000 | |
| | 3.27.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 70 Paket | 61.000.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 12 Orang | 234.900.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 342.500.000 | |
| | 3.27.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 10.000.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 10.000.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 2.500.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 320.000.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 430.000.000 | |
| | 3.27.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 100.000.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 330.000.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.440.920.000 | |
| | 3.27.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 3.000.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 228.920.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 9.000.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.200.000.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 575.000.000 | |
| | 3.27.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | 200.000.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | 30.000.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 250.000.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | 95.000.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 2 | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | - | - | 2.000.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.02.1.02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | - | 2.000.000.000 | |
| | 3.27.02.1.02.02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura | 1 Laporan | 1.300.000.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | 3.27.02.1.02.03 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan | Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran | 1 Dokumen | 700.000.000 | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| | | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | |
| 1 | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 2.650.500.000 | |
| | 3.27.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 88.560.000 | |
| | 3.27.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 88.560.000 | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 203.523.600 | |
| | 3.27.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 16.323.600 | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
| | 3.27.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 187.200.000 | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
| | 3.27.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 59.700.810 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1870000 Unit | 59.700.810 | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.687.814.390 | |
| | 3.27.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 15.958.550 | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
| | 3.27.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 169.438.000 | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
| | 3.27.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 34.000.000 | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
| | 3.27.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1.468.417.840 | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 610.901.200 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit | 121.877.200 | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
| | 3.27.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 489.024.000 | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
| 2 | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | - | - | 2.849.500.000 | |
| | 3.27.07.1.01 | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian | - | - | 1.398.590.000 | |
| | 3.27.07.1.01.01 | Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN | Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan | 240 Orang | 1.264.590.000 | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
| | 3.27.07.1.01.02 | Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta | Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi | 30 Orang | 134.000.000 | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
| | 3.27.07.1.02 | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | - | - | 1.010.000.000 | |
| | 3.27.07.1.02.01 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | 5 Dokumen | 850.000.000 | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.07.1.02.02 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan | 6 Kelompok | 160.000.000 | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
| | 3.27.07.1.03 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | - | - | 440.910.000 | |
| | 3.27.07.1.03.01 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani | Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi | 1 Unit | 70.000.000 | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
| | 3.27.07.1.03.02 | Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani | Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani | 4 Laporan | 170.910.000 | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
| | 3.27.07.1.03.04 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | 4 Unit | 200.000.000 | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
| | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | |
| 1 | 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</i> | 88,0 Indeks 100 Persen | 28.120.000.000 | |
| | 2.11.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan</i> | 100 Persen | 1.500.000.000 | |
| | 2.11.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 500.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.11.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen | 100.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 300.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 600.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Penatausahaan Keuangan</i> | 100 Persen | 15.700.000.000 | |
| | 2.11.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 831 Orang/ Bulan | 14.500.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 Dokumen | 1.200.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan</i> | 100 Persen | 50.000.000 | |
| | 2.11.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 50.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian</i> | 100 Persen | 700.000.000 | |
| | 2.11.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 230 Paket | 200.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 35 Orang | 500.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase pelaksanaan administasi umum</i> | 100 Persen | 2.700.000.000 | |
| | 2.11.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | 700.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | 250.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | 5.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | 1.745.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.11.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase barang milik daerah yang diadakan</i> | 100 Persen | 820.000.000 | |
| | 2.11.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Paket | - | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 820.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Presentase Pelayanan Jasa Kantor</i> | 100 Persen | 6.000.000.000 | |
| | 2.11.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 Laporan | 1.700.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 4.300.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i> | 84 Persen | 650.000.000 | |
| | 2.11.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 Unit | 450.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 54 Unit | 200.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 2.11.02 | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP | <i>Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah</i> | 100 Persen | 2.000.000.000 | |
| | 2.11.02.1.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | <i>Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH</i> | 100 Persen | 800.000.000 | |
| | 2.11.02.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi | Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun | 1 Dokumen | 400.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.1.01.02 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi | 1 Dokumen | 400.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.1.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | <i>Persentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis</i> | 100 Persen | 1.200.000.000 | |
| | 2.11.02.1.02.01 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun | 1 Dokumen | 400.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.1.02.02 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun | 1 Dokumen | 400.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|---|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.11.02.1.02.04 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun | 1 Dokumen | 400.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 3 | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | <i>Indeks Standar Pencemar Udara Indeks Pencemaran</i> | 48 (baik) Indeks "d 5 (Tercemar Ringan) Indeks | 9.062.247.305 | |
| | 2.11.03.1.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | <i>Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i> | 5 Dokumen | 6.428.109.750 | |
| | 2.11.03.1.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 216 Dokumen | 2.400.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.1.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan | 2 Dokumen | 4.028.109.750 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.1.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | <i>Persentase Penurunan beban pencemar</i> | 4 Persen | 1.400.000.000 | |
| | 2.11.03.1.02.01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 2 Laporan | 200.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.1.02.02 | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi | 275 Lokasi | 1.200.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.1.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | <i>Persentase Penurunan Kerusakan Lingkungan</i> | 40 Persen | 1.234.137.555 | |
| | 2.11.03.1.03.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar | 1 Dokumen | 200.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.1.03.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi | 1 Dokumen | 50.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.1.03.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 9 Dokumen | 200.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.1.03.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi | 3 Dokumen | 784.137.555 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 4 | 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | <i>Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan</i> | 532 Ha | 850.000.000 | |
| | 2.11.04.1.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | <i>Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi</i> | 4 Laporan | 850.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.11.04.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | 1 Dokumen | 450.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.1.01.05 | Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya | Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi | 532,143 Ha | 200.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.1.01.06 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati | 60 Orang | 200.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.1.01.07 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragam Hayati | Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola | 0 Unit | - | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 5 | 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | <i>Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)</i> | 35 Persen | 700.000.000 | |
| | 2.11.05.1.01 | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha</i> | 24 Usaha | 700.000.000 | |
| | 2.11.05.1.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 4 Dokumen | 300.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | 7 Dokumen | 400.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 6 | 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | <i>Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi</i> | 40 Persen | 2.730.000.000 | |
| | 2.11.06.1.01 | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | <i>Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan</i> | 4 Laporan | 2.730.000.000 | |
| | 2.11.06.1.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan | 48 Dokumen | 800.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.1.01.02 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD | 35 Orang | 150.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.1.01.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 125 Laporan | 1.430.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.11.06.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 20 Dokumen | 350.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 7 | 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | <i>Jumlah Kelompok masyarakat/ lembaga yang meningkat kualitasnya terkait lingkungan hidup</i> | 110 Lembaga | 2.000.000.000 | |
| | 2.11.08.1.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Jumlah laporan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga / lembaga terkait lingkungan hidup</i> | 3 Laporan | 2.000.000.000 | |
| | 2.11.08.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan | Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH | 30 Lembaga | 1.600.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.1.01.02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 133 Dokumen | 400.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 8 | 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | <i>Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha dari hasil pembinaan</i> | 84,42 Persen | 850.000.000 | |
| | 2.11.09.1.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | <i>Laporan hasil pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi</i> | 2 Dokumen | 850.000.000 | |
| | 2.11.09.1.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 60 Entitas | 850.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 9 | 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | <i>Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan</i> | 100 Persen | 2.050.000.000 | |
| | 2.11.10.1.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | <i>Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti</i> | 100 Persen | 2.050.000.000 | |
| | 2.11.10.1.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi | Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani | 20 Dokumen | 1.200.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan | 8 Dokumen | 850.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 10 | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | <i>Persentase Pengelolaan Sampah</i> | 88 Persen | 2.449.999.695 | |
| | 2.11.11.1.01 | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | <i>Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim</i> | 71 Persen | 2.449.999.695 | |
| | 2.11.11.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan | 1 Dokumen | 300.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.1.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus | 7 Dokumen | 1.799.999.695 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.11.11.1.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 350.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | |
| 1 | 2.13.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan</i> | 100 % 75 Indeks | 21.300.469.200 | |
| | 2.13.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 3 Dokumen | 1.282.251.000 | |
| | 2.13.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 598.251.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 684.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</i> | 80 Orang | 9.854.968.200 | |
| | 2.13.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang/ Bulan | 8.885.298.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 356.760.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 76.421.200 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 20.511.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.13.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 515.978.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu</i> | 1 Dokumen | 35.750.000 | |
| | 2.13.01.1.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 35.750.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi</i> | 25 Orang | 686.500.000 | |
| | 2.13.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 66.500.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 500.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 25 Orang | 120.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 150 buah | 2.670.000.000 | |
| | 2.13.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 55.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 130.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 40.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 550.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.13.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 170.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1.700.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 25.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 3 unit | 1.400.000.000 | |
| | 2.13.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 500.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 400.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | 500.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 2 jenis | 3.576.000.000 | |
| | 2.13.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 6.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 450.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 500.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.13.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 2.620.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 20 unit | 1.795.000.000 | |
| | 2.13.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | 100.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 575.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 750.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 25 Unit | 370.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| 2 | 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | <i>Persentase Kabupaten yang telah difasilitasi penataan Desanya</i> | 100% | 530.000.000 | |
| | 2.13.02.1.01 | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</i> | undefined undefined | 530.000.000 | |
| | 2.13.02.1.01.01 | Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 30.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.02.1.01.03 | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | 1 Dokumen | 500.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| 3 | 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | <i>Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju</i> | 2,38% | 2.916.912.000 | |
| | 2.13.03.1.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi | <i>Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi</i> | 5 Dokumen | 2.916.912.000 | |
| | 2.13.03.1.01.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | 2.235.912.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.13.03.1.01.02 | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 91.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.03.1.01.03 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 1 Dokumen | 590.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| 4 | 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | <i>Persentase Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal</i> | 2,38% | 6.156.522.300 | |
| | 2.13.04.1.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | <i>Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa Jumlah Bumdes Aktif dan berbadan hukum</i> | 1 Dokumen 50 bumdes | 6.156.522.300 | |
| | 2.13.04.1.01.01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa | 1 Dokumen | 54.772.800 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.04.1.01.04 | Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa | jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | 1.517.749.500 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.04.1.01.05 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 1 Dokumen | 700.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.04.1.01.06 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 1 Dokumen | 250.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.04.1.01.07 | Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 167 Orang | 75.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.04.1.01.08 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 1 Dokumen | 500.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.04.1.01.10 | Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa | jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina | 45 Orang | 700.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.13.04.1.01.11 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 45 Orang | 425.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.04.1.01.15 | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 3 Dokumen | 1.234.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.04.1.01.16 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 Dokumen | 700.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| 5 | 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | <i>Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa dan kelurahan, masyarakat hukum adat serta kelompok masyarakat</i> | 2,38% | 6.617.125.500 | |
| | 2.13.05.1.01 | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i> | 1 Dokumen | 6.617.125.500 | |
| | 2.13.05.1.01.01 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen | 1.610.083.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.05.1.01.02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen | 787.509.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.05.1.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya | 30 Lembaga | 342.540.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.05.1.01.04 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 3 Unit | 500.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.05.1.01.06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 1.036.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.13.05.1.01.07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 1 Laporan | 47.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.05.1.01.08 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | 1 Dokumen | 30.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.05.1.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Laporan | 2.203.993.500 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.05.1.01.10 | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 30 Keluarga | 30.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | 2.13.05.1.01.11 | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah | 30 Keluarga | 30.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | | DINAS PERHUBUNGAN | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | |
| 1 | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 70 Poin | 24.945.000.000 | |
| | 2.15.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu</i> | 84% | 1.032.000.000 | |
| | 2.15.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 400.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | 178.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 154.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Laporan | 300.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu</i> | 100% | 15.460.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.15.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 88 Orang/ Bulan | 14.600.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 860.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | 17% | 250.000.000 | |
| | 2.15.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 24 Orang | 250.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum</i> | 100% | 2.200.000.000 | |
| | 2.15.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 50.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 70 Paket | 150.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | 150.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1.700.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 50.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 100.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i> | 65% | 502.000.000 | |
| | 2.15.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 352.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 49 Unit | 150.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Operasional Perangkat Daerah</i> | 100% | 4.435.000.000 | |
| | 2.15.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 35.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1.000.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 3.400.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i> | 66% | 1.066.000.000 | |
| | 2.15.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 196.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 200.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.15.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 250 Unit | 170.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 500.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | <i>Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP</i> | 0,006 Poin 82 % | 9.092.000.000 | |
| | 2.15.02.1.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | <i>Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan</i> | 80% | 4.200.000.000 | |
| | 2.15.02.1.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia | 249 Unit | 4.200.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | <i>Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun</i> | 53% | 850.000.000 | |
| | 2.15.02.1.03.01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B | 1 Dokumen | 850.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.05 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | <i>Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLJ Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi</i> | 4 Dokumen | 900.000.000 | |
| | 2.15.02.1.05.01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | 11 Laporan | 400.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.05.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | 8 Laporan | 500.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.07 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | <i>Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji</i> | 72% | 960.000.000 | |
| | 2.15.02.1.07.02 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 9 Laporan | 90.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.07.04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | 2 Laporan | 220.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.07.05 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 11 Laporan | 650.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.08 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia</i> | 15 Unit | 375.000.000 | |
| | 2.15.02.1.08.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 15 Unit | 300.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.08.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi | 4 Laporan | 75.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.15.02.1.09 | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia</i> | 1 Dokumen | 850.000.000 | |
| | 2.15.02.1.09.01 | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen | 750.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.09.02 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen | 100.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.13 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan</i> | Unit 100 | 635.000.000 | |
| | 2.15.02.1.13.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan | 100 Unit | 300.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.13.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi | 4 Laporan | 335.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan</i> | 300 Unit | 322.000.000 | |
| | 2.15.02.1.14.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan | 300 Unit | 150.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.1.14.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi | 4 Laporan | 172.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 3 | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | <i>Persentase Layanan Pelabuhan Laut dan SDP</i> | 61% | 3.375.000.000 | |
| | 2.15.03.1.03 | Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan | <i>Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan</i> | 100 Unit | 350.000.000 | |
| | 2.15.03.1.03.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan | 100 Unit | 200.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.1.03.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi | 1 Laporan | 150.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.15.03.1.05 | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia</i> | 2 Dokumen | 900.000.000 | |
| | 2.15.03.1.05.01 | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | 2 Dokumen | 900.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.1.06 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | <i>Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan</i> | 60 Badan Usaha | 275.000.000 | |
| | 2.15.03.1.06.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 60 Dokumen | 125.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.1.06.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | 2 Laporan | 150.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.1.09 | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | <i>Persentase Perencanaan/Pembangunan Fasilitas Pelabuhan yang di Bangun/Pelihara</i> | 55% | 1.850.000.000 | |
| | 2.15.03.1.09.02 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun | 2 Unit | 1.850.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 4 | 2.15.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | <i>Presentase Kajian Pelayanan Multimoda</i> | 68% | 1.100.000.000 | |
| | 2.15.05.1.01 | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | <i>Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian</i> | 50% | 1.100.000.000 | |
| | 2.15.05.1.01.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian | Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.05.1.01.02 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian | Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian | 1 Dokumen | 100.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | UPTD TERMINAL | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 70% | 3.845.000.000 | |
| | 2.15.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum</i> | 100% | 545.000.000 | |
| | 2.15.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 25.000.000 | UPTD TERMINAL |
| | 2.15.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 31 Paket | 40.000.000 | UPTD TERMINAL |
| | 2.15.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | 80.000.000 | UPTD TERMINAL |
| | 2.15.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 400.000.000 | UPTD TERMINAL |
| | 2.15.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i> | 50% | 285.000.000 | |
| | 2.15.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | 75.000.000 | UPTD TERMINAL |
| | 2.15.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 29 Unit | 210.000.000 | UPTD TERMINAL |
| | 2.15.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Terselenggaranya Operasional Perangkat Daerah</i> | 100% | 2.735.000.000 | |
| | 2.15.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 9.000.000 | UPTD TERMINAL |
| | 2.15.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 126.000.000 | UPTD TERMINAL |
| | 2.15.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.600.000.000 | UPTD TERMINAL |
| | 2.15.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</i> | 30% | 280.000.000 | |
| | 2.15.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | 35.000.000 | UPTD TERMINAL |
| | 2.15.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 70 Unit | 25.000.000 | UPTD TERMINAL |
| | 2.15.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 Unit | 220.000.000 | UPTD TERMINAL |
| 2 | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | <i>Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan</i> | 82 % 0,006 Poin | 7.704.000.000 | |
| | 2.15.02.1.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | <i>Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun</i> | 53% | 7.704.000.000 | |
| | 2.15.02.1.03.02 | Pembangunan Gedung Terminal | Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun | 3 Unit | 7.500.000.000 | UPTD TERMINAL |
| | 2.15.02.1.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan | 1 Unit | 100.000.000 | UPTD TERMINAL |
| | 2.15.02.1.03.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 15 Orang | 104.000.000 | UPTD TERMINAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|---|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | |
| 1 | 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Diskominfo Prov Kaltim (Nilai/Predikat) Indeks Kepuasan Masyarakat pada Diskominfo Prov Kaltim</i> | 100 % 72 Nilai/Pre dikat 85 Indeks | 34.366.942.000 | |
| | 2.16.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu (dokumen)</i> | 3 Dokumen | 630.000.000 | |
| | 2.16.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 100.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 230.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 300.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)</i> | 53 Orang | 12.625.000.000 | |
| | 2.16.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn | 53 Orang/ Bulan | 11.800.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 825.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)</i> | 50 Orang | 650.000.000 | |
| | 2.16.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 350.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang | 300.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah</i> | 4 Jenis Pengadaan | 2.749.713.200 | |
| | 2.16.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 20.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.16.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 100.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 129.713.200 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 2.500.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor</i> | 4 Jenis Pengadaan | 9.792.228.800 | |
| | 2.16.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 900.513.500 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 1.000.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 100 Unit | 7.890.715.300 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</i> | 4 Jasa | 6.620.000.000 | |
| | 2.16.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 20.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 600.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 2.000.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 4.000.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor</i> | 3 Jenis Pengadaan | 1.300.000.000 | |
| | 2.16.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit | 600.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 200.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.16.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 500.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | <i>Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah sesuai Strategi Komunikasi</i> | 60% | 19.750.000.000 | |
| | 2.16.02.1.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | <i>Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas</i> | 80% | 19.750.000.000 | |
| | 2.16.02.1.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 1 Dokumen | 500.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.1.01.02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 1 Dokumen | 800.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.1.01.03 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 300.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.1.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 1 Dokumen | 1.500.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.1.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 1 Dokumen | 4.500.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.1.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 1 Dokumen | 5.300.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.1.01.07 | Layanan Hubungan Media | Jumlah Layanan Hubungan Media | 12 Layanan | 1.500.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.1.01.08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 1 Dokumen | 750.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.1.01.09 | Manajemen Komunikasi Krisis | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis | 1 Dokumen | 300.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.1.01.10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya | 30 Orang | 350.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.1.01.11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 1 Dokumen | 3.000.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.16.02.1.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 1 Dokumen | 650.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.1.01.13 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | 1 Unit | 300.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 3 | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | <i>Persentase tatakelola SPBE</i> | 90% | 23.600.000.000 | |
| | 2.16.03.1.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | <i>persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim</i> | 100% | 7.950.000.000 | |
| | 2.16.03.1.01.01 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | 1 Domain | 200.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.1.01.02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1 Dokumen | 750.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.1.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 1 Unit | 7.000.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.1.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | <i>persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim</i> | 80% | 15.650.000.000 | |
| | 2.16.03.1.02.01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1 Dokumen | 1.250.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.1.02.02 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 1 Dokumen | 800.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.1.02.03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | 1 Unit | 6.100.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.1.02.04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 750.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.1.02.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | 1 Dokumen | 300.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.1.02.06 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 37 Perangkat Daerah | 500.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.1.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 6 Unit | 1.500.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.16.03.1.02.08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Pehubung Layanan Pemerintah Daerah | 1 Layanan | 500.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.1.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City | 1 Dokumen | 250.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.1.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 3.100.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.1.02.11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | 1 Dokumen | 400.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.1.02.12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | 1 Dokumen | 200.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2,20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | |
| 1 | 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | <i>Persentase Perangkat Daerah yang Berbagi Pakai Data melalui Portal Satu Data Kalimantan Timur</i> | 80% | 5.500.000.000 | |
| | 2.20.02.1.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | <i>Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur</i> | 80% | 5.500.000.000 | |
| | 2.20.02.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 Dokumen | 700.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.1.01.02 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 8 Orang | 300.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.1.01.03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dokumen | 1.100.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.1.01.04 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS | 37 Orang | 1.500.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.1.01.05 | Pengembangan Infrastruktur | Jumlah Infrastruktur Statistik | 2 Unit | 1.900.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2,21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | |
| 1 | 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | <i>Persentase Keamanan Informasi Pemerintah</i> | 90% | 1.900.000.000 | |
| | 2.21.02.1.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | <i>Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi</i> | 100% | 1.600.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.21.02.1.01.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan | 1 Dokumen | 200.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.1.01.02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 1 Laporan | 550.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.1.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan | 500.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.1.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 37 Perangkat Daerah | 350.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.1.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | <i>Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi</i> | 80% | 300.000.000 | |
| | 2.21.02.1.02.01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 37 Perangkat Daerah | 300.000.000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | |
| 1 | 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 91 Indeks | 19.956.262.000 | |
| | 2.18.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu</i> | 100 Persen | 500.000.000 | |
| | 2.18.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 300.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | 200.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</i> | 100 Persen | 13.815.000.000 | |
| | 2.18.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/ Bulan | 10.000.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.18.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 85 Dokumen | 3.600.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1000 Dokumen | 215.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah</i> | 1 Orang | 16.000.000 | |
| | 2.18.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 24 Laporan | 16.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i> | 100 Persen | 435.000.000 | |
| | 2.18.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 6 Paket | 350.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 9 Orang | 85.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana</i> | 439 Laporan | 1.789.000.000 | |
| | 2.18.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 26.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 15.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 310.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 120 Dokumen | 20.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.18.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 270 Laporan | 1.368.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 33 Dokumen | 50.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana</i> | 87 Unit/Tahun | 1.275.000.000 | |
| | 2.18.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Paket | 200.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 84 Unit | 1.075.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana</i> | 86 Laporan | 1.326.262.000 | |
| | 2.18.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 48 Laporan | 450.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 356.262.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 36 Laporan | 520.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 100 Persen | 800.000.000 | |
| | 2.18.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 29 Unit | 350.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 125 Unit | 250.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.18.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 200.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | - | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | <i>Potensi Investasi yang direncanakan</i> | 2 Potensi Investasi | 2.700.000.000 | |
| | 2.18.02.1.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi | <i>Potensi dan Peluang Investasi yang siap ditawarkan</i> | 2 Buku | 2.700.000.000 | |
| | 2.18.02.1.02.01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi | 1 Dokumen | 700.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.1.02.02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi | 2 Dokumen | 2.000.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3 | 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | <i>Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur</i> | 11 Minat | 2.600.000.000 | |
| | 2.18.03.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | <i>Jumlah Kegiatan Promosi</i> | 11 Kegiatan | 2.600.000.000 | |
| | 2.18.03.1.01.01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi | 5 Dokumen | 1.100.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.1.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi | 6 Dokumen | 1.500.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 4 | 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | <i>Persentase Penyelesaian Perizinan</i> | 100 Persen | 2.750.000.000 | |
| | 2.18.04.1.02 | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | <i>Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan</i> | 5000 Izin & Non Izin | 2.750.000.000 | |
| | 2.18.04.1.02.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi | 100 Pelaku Usaha | 500.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.18.04.1.02.02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi | 4 Kegiatan Usaha | 1.000.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.1.02.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi | 10 Orang | 700.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.1.02.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi | 7 Kegiatan usaha | 550.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5 | 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | <i>Persentase Peningkatan Investasi PMA-PMDN</i> | 1 Persen | 2.700.000.000 | |
| | 2.18.05.1.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM</i> | 1598 Laporan | 2.700.000.000 | |
| | 2.18.05.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 7.788 Kegiatan usaha | 1.000.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 400 Pelaku Usaha | 700.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | 105 Kegiatan usaha | 1.000.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 6 | 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | <i>Persentase Layanan Informasi yang dimanfaatkan pengguna layanan</i> | 100 Persen | 600.000.000 | |
| | 2.18.06.1.01 | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi | <i>Penyajian data terhadap informasi</i> | 200 Data | 600.000.000 | |
| | 2.18.06.1.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 6 Dokumen | 600.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | |
| 1 | 2.19.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | " | - | 32.149.000.000 | |
| | 2.19.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | 635.000.000 | |
| | 2.19.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 400.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 50.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 25.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 60.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 100.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 16.451.000.000 | |
| | 2.19.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 88 Orang/ Bulan | 15.500.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 480.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 40.500.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 30.500.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 400.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 150.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.19.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 30.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 20.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 100.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 960.000.000 | |
| | 2.19.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 600.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 20.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 50 Orang | 260.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 88 Orang | 40.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 88 Orang | 40.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 4.859.750.000 | |
| | 2.19.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 50.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 1.500.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 50.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 600.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 200.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | 100.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.19.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 400.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 85 Laporan | 1.700.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 159.750.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 100.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.701.250.000 | |
| | 2.19.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 6 Unit | 1.710.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 641.250.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 Paket | 200.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 150.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | - | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.500.000.000 | |
| | 2.19.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 500.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 3.000.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.892.000.000 | |
| | 2.19.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 18 Unit | 100.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 130.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.19.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 10 Unit | 150.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 150.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 100 Unit | 512.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 50.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 500.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 500.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 800.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| 2 | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | 21.475.000.000 | |
| | 2.19.02.1.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | | | 19.475.000.000 | |
| | 2.19.02.1.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi | Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 630 Orang | 2.750.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.1.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi | Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 3500 Orang | 11.350.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 600 Orang | 1.250.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.1.01.05 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan | 7 Unit | 100.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.1.01.06 | Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi | Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan | 20 Dokumen | 750.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.1.01.08 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | 4 Dokumen | 2.275.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.19.02.1.01.09 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan dari Seluruh Kabupaten/Kota | 750 Orang | 1.000.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.02.1.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | | | 2.000.000.000 | |
| | 2.19.02.1.02.02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi | 150 Dokumen | 2.000.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| 3 | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | - | - | 124.590.297.400 | |
| | 2.19.03.1.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | 4.500.000.000 | |
| | 2.19.03.1.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan | 2 Unit | 3.000.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.1.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus | 1 Dokumen | 500.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan | 10 Unit | 1.000.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.1.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | - | - | 10.590.297.400 | |
| | 2.19.03.1.02.01 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi | 9 Dokumen | 4.590.297.400 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.1.02.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi | 1 Dokumen | 3.000.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.1.02.03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event | 765 Orang | 3.000.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.1.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | - | - | 10.500.000.000 | |
| | 2.19.03.1.03.02 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | 2 Pelatda | 3.000.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.1.03.03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi | Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | 430 Orang | 3.000.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.1.03.04 | Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi | Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan | 200 Orang | 3.000.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.19.03.1.03.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan | 1 Dokumen | 1.500.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.1.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | - | 99.000.000.000 | |
| | 2.19.03.1.04.01 | Standardisasi Organisasi Keolahragaan | Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan | 4 Dokumen | 1.000.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.1.04.02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 5000 Dokumen | 3.000.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.1.04.03 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | 3 Dokumen | 94.000.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | 2.19.03.1.04.04 | Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi | Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan | 2 Organisasi | 1.000.000.000 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| 4 | 2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | 9.193.569.600 | |
| | 2.19.04.1.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | - | 9.193.569.600 | |
| | 2.19.04.1.01.05 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi | 40 Laporan | 9.193.569.600 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | |
| 1 | 2.19.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 24.500.000.000 | |
| | 2.19.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.304.206.400 | |
| | 2.19.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 410.101.800 | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.000.000.000 | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 104.736.900 | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 80.367.700 | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.19.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 20.500.000 | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 688.500.000 | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 140.000.000 | |
| | 2.19.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 140.000.000 | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 9.347.162.300 | |
| | 2.19.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 3.824.498.200 | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 543.971.300 | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 4.978.692.800 | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 12.708.631.300 | |
| | 2.19.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 105.969.200 | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 18.706.300 | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | 3.500.000.000 | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA |
| | 2.19.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 9.083.955.800 | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA |
| | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | |
| 1 | 2.23.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 82 Indek | 28.371.499.000 | |
| | 2.23.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Nilai Akuntabilitas Kinerja PD</i> | 67 Skor | 950.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.23.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 350.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 350.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 250.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Pelaksanaan fungsi penatausahaan keuangan</i> | 12 Bulan | 18.650.000.000 | |
| | 2.23.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn | 94 Orang/ Bulan | 18.000.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 450.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 100.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 100.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i> | 12 Bulan | 100.000.000 | |
| | 2.23.01.1.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan | 100.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 12 Bulan | 416.919.000 | |
| | 2.23.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 84.378.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 3 Dokumen | 182.541.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | 150.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Pelaksanaan Pelayanan Umum Perangkat Daerah</i> | 12 Bulan | 3.051.840.000 | |
| | 2.23.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 50.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.23.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 500.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 20 Paket | 75.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | 75.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 7 Dokumen | 51.840.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 2.300.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Penyediaan dan Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah</i> | 12 Bulan | 3.727.740.000 | |
| | 2.23.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 27.740.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 950.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 2.750.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor</i> | 85 Unit | 1.475.000.000 | |
| | 2.23.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 33 Unit | 350.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 900.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 50 Unit | 225.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| 2 | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | <i>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)</i> | 35 Indek 46 Skor | 5.650.000.000 | |
| | 2.23.02.1.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | <i>Peningkatan Perpustakaan Sesuai dengan SNP Peningkatan Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno</i> | 170 Perpustakaan 230000 Orang 2600 Eksemplar | 3.900.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.23.02.1.01.01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service | 3 Perpustakaan | 500.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.1.01.02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya | 30 Perpustakaan | 700.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.1.01.03 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan | 600 Eksemplar | 300.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.1.01.05 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi | Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan | 5 Perpustakaan | 200.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.1.01.06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | 35 Orang | 500.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.1.01.07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi | 5 Layanan | 400.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.1.01.08 | Pengembangan Perpustakaan Deposit | Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan | 5 Perpustakaan | 100.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.1.01.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 2000 Eksemplar | 1.000.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.1.01.10 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | 4 Dokumen | 200.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.1.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | <i>Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif</i> | 10 Kegiatan | 1.750.000.000 | |
| | 2.23.02.1.02.01 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus | 5 Lokus | 250.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.1.02.02 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | 8 Perpustakaan | 400.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.1.02.03 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 5 Orang | 250.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.1.02.04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan | 3 Perpustakaan | 550.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.1.02.05 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya | 3 Orang | 300.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2,24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | |
| 1 | 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | <i>Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"</i> | 5 OPD/LKD | 3.300.000.000 | |
| | 2.24.02.1.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi | <i>Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib</i> | 70% | 2.050.000.000 | |
| | 2.24.02.1.01.01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 2262 Berkas | 50.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.1.01.02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 2000 Berkas | 50.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.1.01.03 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi | 17 Laporan | 1.950.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.1.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi | <i>Peningkatan Khasanah Arsip Statis Provinsi</i> | 2262 Arsip | 250.000.000 | |
| | 2.24.02.1.02.01 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI | 100 Arsip | 50.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.1.02.02 | Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses | 250 Arsip | 200.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.1.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | <i>Prosentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN</i> | 5% | 1.000.000.000 | |
| | 2.24.02.1.03.01 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | 1100 Pengguna | 200.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.1.03.02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | 1 Laporan | 800.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| 2 | 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | <i>Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</i> | 3,5 Skor | 625.000.000 | |
| | 2.24.03.1.01 | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | <i>Peningkatan penyusutan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip</i> | 5000 Berkas | 150.000.000 | |
| | 2.24.03.1.01.01 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 5000 Arsip | 75.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.03.1.01.02 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | 2000 Berkas | 75.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.24.03.1.02 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi | <i>Pelaksanaan tanggap arsip akibat bencana</i> | 5 Kegiatan | 80.000.000 | |
| | 2.24.03.1.02.01 | Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | 1000 Arsip | 45.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.03.1.02.02 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | 1000 Arsip | 35.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.03.1.03 | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota | <i>Tersedianya daftar pencarian arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran</i> | 3 DPA | 105.000.000 | |
| | 2.24.03.1.03.01 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi | 3 Daftar | 35.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.03.1.03.02 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi | 2 Arsip | 35.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.03.1.03.03 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota | 10 Arsip | 35.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.03.1.04 | Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi | <i>Pelaksanaan Penilaian Arsip Statis dan alih media</i> | 3 Kegiatan | 185.000.000 | |
| | 2.24.03.1.04.01 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 250 Arsip | 35.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.03.1.04.02 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 5000 Arsip | 150.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.03.1.05 | Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang | <i>Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi yang Sesuai NSPK</i> | 1 Laporan | 105.000.000 | |
| | 2.24.03.1.05.01 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan | 10 Arsip | 35.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.03.1.05.02 | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | 1000 Arsip | 35.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.03.1.05.03 | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman | 5 Arsip | 35.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | |
| 1 | 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 43.900.860.000 | |
| | 3.25.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | 2.080.000.000 | |
| | 3.25.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | 700.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 225.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 225.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 655.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 275.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 25.150.000.000 | |
| | 3.25.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 123 Orang/ Bulan | 23.850.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 700.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 300.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 200.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 100.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 694.820.000 | |
| | 3.25.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 394.820.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.25.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 50 Orang | 300.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.736.290.000 | |
| | 3.25.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 32.500.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 150.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 195.908.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 50.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 25.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 2.282.882.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.600.000.000 | |
| | 3.25.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 600.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 1.000.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 9.428.750.000 | |
| | 3.25.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 28.750.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 2.500.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 6.900.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 2.211.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.25.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 Unit | 550.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 161.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 1.500.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 2 | 3.25.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | 4.711.502.000 | |
| | 3.25.02.1.01 | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | - | 1.492.302.000 | |
| | 3.25.02.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K | 1 Dokumen | 268.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.01.02 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola | 293030,78 Ha | 745.302.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.01.03 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi | 5 Ha | 372.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.01.04 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 30 Orang | 107.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.02 | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | - | 2.090.000.000 | |
| | 3.25.02.1.02.01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi | 2 Rekomendasi | 420.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.02.02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan | 2 Rekomendasi | 450.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.02.03 | Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional | Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan | 1 Rekomendasi | 676.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.02.04 | Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir | Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan | 1 Rekomendasi | 100.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.25.02.1.02.05 | Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut | Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut | 1 Dokumen | 444.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.03 | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | - | - | 1.129.200.000 | |
| | 3.25.02.1.03.01 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | 60 Orang | 231.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.03.02 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 1 Kelompok | 175.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.03.03 | Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 90 Orang | 262.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.02.1.03.04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 5 Kelompok | 461.200.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | - | - | 9.700.000.000 | |
| | 3.25.03.1.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | - | - | 2.970.000.000 | |
| | 3.25.03.1.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 1 Dokumen | 150.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.1.01.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 28 Unit | 2.820.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.1.02 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 620.000.000 | |
| | 3.25.03.1.02.01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | 1 Dokumen | 120.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.1.02.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | 10 Unit | 500.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.1.03 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | | 1.300.000.000 | |
| | 3.25.03.1.03.03 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | 180 Dokumen | 1.300.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.25.03.1.05 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 1.760.000.000 | |
| | 3.25.03.1.05.02 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan | 810 Dokumen | 1.760.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.1.06 | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | 3.000.000.000 | |
| | 3.25.03.1.06.02 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia | 6 Unit | 2.200.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.1.06.03 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana | 6 Layanan | 800.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.03.1.09 | Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | | - | 50.000.000 | |
| | 3.25.03.1.09.02 | Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan | 10 Rekomendasi | 50.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 4 | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | - | - | 7.461.359.000 | |
| | 3.25.04.1.02 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | | 200.000.000 | |
| | 3.25.04.1.02.01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | 3 Rekomendasi | 200.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.04.1.05 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | - | - | 3.251.359.000 | |
| | 3.25.04.1.05.01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 351.359.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.04.1.05.02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | 2 Unit | 600.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.04.1.05.04 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | 3 Unit | 1.070.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.04.1.05.06 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat | 80 Dokumen | 780.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.04.1.05.07 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Pembudidaya | 70 Orang | 450.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.25.04.1.06 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | - | - | 4.010.000.000 | |
| | 3.25.04.1.06.01 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit | 1.100.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.04.1.06.02 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit | 2.910.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 5 | 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | - | - | 3.299.287.000 | |
| | 3.25.05.1.01 | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | - | - | 2.098.104.180 | |
| | 3.25.05.1.01.01 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | 3 Dokumen | 835.516.680 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.05.1.01.02 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | 153 Dokumen | 652.282.500 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.05.1.01.03 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | 13 Dokumen | 371.055.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.05.1.01.04 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif | 18 Kelompok | 239.250.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.05.1.02 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 1.201.182.820 | |
| | 3.25.05.1.02.01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | 6 Dokumen | 312.765.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.05.1.02.02 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | 27 Dokumen | 387.367.500 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.05.1.02.03 | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 65 Dokumen | 501.050.320 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | - | - | 1.723.064.000 | |
| | 3.25.06.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 650.000.000 | |
| | 3.25.06.1.01.03 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | 3 Dokumen | 650.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.06.1.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | 773.064.000 | |
| | 3.25.06.1.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 15 Unit Usaha | 773.064.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.06.1.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | 300.000.000 | |
| | 3.25.06.1.03.02 | Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi | 1 Unit Usaha | 150.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 3.25.06.1.03.03 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir | 1 Dokumen | 150.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | |
| 1 | 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>m</i> | - | 1.381.757.169 | |
| | 3.25.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 69.480.000 | |
| | 3.25.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 69.480.000 | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 255.294.000 | |
| | 3.25.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang | 255.294.000 | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 412.535.175 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.25.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 4.505.125 | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 31.200.750 | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 5.035.800 | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 18.129.500 | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 2.016.000 | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 351.648.000 | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 21.615.000 | |
| | 3.25.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 21.615.000 | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 497.338.504 | |
| | 3.25.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 4.070.000 | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 121.185.384 | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 372.083.120 | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 125.494.490 | |
| | 3.25.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 60.494.490 | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | 3.25.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | 65.000.000 | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| 2 | 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | - | - | 500.949.831 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.25.06.1.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | 500.949.831 | |
| | 3.25.06.1.02.02 | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | 10 Unit Usaha | 500.949.831 | UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN |
| | | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | |
| 1 | 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 3.656.214.150 | |
| | 3.25.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 98.760.000 | |
| | 3.25.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 98.760.000 | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR |
| | 3.25.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 91.873.000 | |
| | 3.25.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | 91.873.000 | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR |
| | 3.25.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 654.426.200 | |
| | 3.25.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 8.146.950 | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR |
| | 3.25.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 50.000.000 | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.25.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 27.156.150 | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR |
| | 3.25.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 10.741.500 | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR |
| | 3.25.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 4.032.000 | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR |
| | 3.25.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 554.349.600 | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR |
| | 3.25.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 687.194.750 | |
| | 3.25.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 2.237.550 | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR |
| | 3.25.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 272.322.000 | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR |
| | 3.25.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 412.635.200 | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR |
| | 3.25.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 2.123.960.200 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.25.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 101.323.950 | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR |
| | 3.25.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | 215.746.650 | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR |
| | 3.25.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1.806.889.600 | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR |
| 2 | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | <i>m</i> | - | 4.994.285.850 | |
| | 3.25.04.1.06 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | - | - | 4.994.285.850 | |
| | 3.25.04.1.06.01 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 2 Unit | 2.220.000.000 | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR |
| | 3.25.04.1.06.02 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 2 Unit | 2.774.285.850 | UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR |
| | | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | |
| 1 | 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | " | - | 4.525.425.360 | |
| | 3.25.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 99.280.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.25.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 99.280.000 | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU |
| | 3.25.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 231.201.000 | |
| | 3.25.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 18 Orang | 231.201.000 | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU |
| | 3.25.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 886.750.000 | |
| | 3.25.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 45.500.000 | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU |
| | 3.25.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 196.750.000 | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU |
| | 3.25.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 55.500.000 | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU |
| | 3.25.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 25.000.000 | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU |
| | 3.25.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 564.000.000 | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU |
| | 3.25.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 599.000.000 | |
| | 3.25.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 500.000.000 | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU |
| | 3.25.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 99.000.000 | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.25.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.634.737.600 | |
| | 3.25.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1.000.000 | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU |
| | 3.25.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 182.400.000 | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU |
| | 3.25.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1.451.337.600 | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU |
| | 3.25.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.074.456.760 | |
| | 3.25.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 144.160.000 | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU |
| | 3.25.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | 49.780.000 | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU |
| | 3.25.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 880.516.760 | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU |
| 2 | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | - | | 1.675.718.640 | |
| | 3.25.04.1.06 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | - | - | 1.675.718.640 | |
| | 3.25.04.1.06.01 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 2 Unit | 638.839.500 | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU |
| | 3.25.04.1.06.02 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit | 1.036.879.140 | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU |
| | | DINAS PARIWISATA | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | |
| 1 | 3.26.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan terhadap Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur</i> | 81% | 16.707.000.000 | |
| | 3.26.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu</i> | 90% | 1.000.000.000 | |
| | 3.26.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | 500.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 200.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 300.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</i> | 82% | 9.056.920.000 | |
| | 3.26.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn | 39 Orang/ Bulan | 8.500.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 556.920.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i> | 70% | 50.000.000 | |
| | 3.26.01.1.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 6 Dokumen | 50.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</i> | 12 Laporan | 1.993.080.000 | |
| | 3.26.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 16 Paket | 30.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 11 Paket | 520.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 230.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 210.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 90 Laporan | 1.003.080.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i> | 12 Bulan | 4.467.000.000 | |
| | 3.26.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 310.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Laporan | 1.230.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.927.000.000 | DINAS PARIWISATA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.26.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 80% | 140.000.000 | |
| | 3.26.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 34 Unit | 140.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| 2 | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | <i>Persentase DTW (Daya Tarik Wisata) Pengembangan Pariwisata yg difasilitasi (DTW)</i> | 81.82 % | 10.673.000.000 | |
| | 3.26.02.1.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi | <i>Persentase Lokasi Daya Tarik Wisata yang dikelola</i> | 33.33 % | 3.100.000.000 | |
| | 3.26.02.1.01.02 | Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | 4 Dokumen | 1.600.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.01.03 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi) | 2 Lokasi | 1.500.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | <i>Persentase Kawasan Strategis yang dikelola</i> | 100% | 4.523.000.000 | |
| | 3.26.02.1.02.04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 4 Unit | 3.950.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.02.06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 3 Laporan | 573.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | <i>Persentase Destinasi yang Dikelola</i> | 100% | 2.450.000.000 | |
| | 3.26.02.1.03.04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara | 3 Unit | 1.000.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.03.05 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | 1 Dokumen | 350.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.03.06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | 4 Laporan | 1.100.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | <i>Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan</i> | 100% | 600.000.000 | |
| | 3.26.02.1.04.03 | Pengelolaan Investasi Pariwisata | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata | 1 Laporan | 200.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.04.04 | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | 1 Laporan | 200.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.1.04.05 | Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata | Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi | 3 Unit Usaha | 200.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| 3 | 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | <i>Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Nusantara</i> | 2,70 Hari 1,65 Hari | 4.900.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.26.03.1.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | <i>Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana</i> | 100% | 4.900.000.000 | |
| | 3.26.03.1.01.01 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 6 Dokumen | 1.130.916.700 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.03.1.01.02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 4 Laporan | 1.460.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.03.1.01.03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri | 8 Dokumen | 693.829.500 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.03.1.01.04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 5 Dokumen | 1.615.253.800 | DINAS PARIWISATA |
| 4 | 3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | <i>Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang</i> | 100% | 5.720.000.000 | |
| | 3.26.04.1.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | <i>Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan baik</i> | 50 Sarpras Kota Kreatif | 2.905.000.000 | |
| | 3.26.04.1.01.01 | Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia | 1 Unit | 155.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.04.1.01.02 | Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik | 14 Laporan | 2.500.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.04.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif | 10 Laporan | 250.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.04.1.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | <i>Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan</i> | 60% | 2.815.000.000 | |
| | 3.26.04.1.02.04 | Penyediaan Infrastruktur | Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia | 1 Unit | 500.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.04.1.02.05 | Pengembangan Sistem Pemasaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif | 1 Dokumen | 150.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.04.1.02.07 | Fasilitasi Kekayaan Intelektual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif | 4 Dokumen | 125.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.04.1.02.09 | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | 2 Dokumen | 70.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.04.1.02.10 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 10 Dokumen | 1.970.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| 5 | 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | <i>Persentase SDM Parekray yang Tersertifikasi</i> | 100% | 5.500.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.26.05.1.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | <i>Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya</i> | 100% | 4.900.000.000 | |
| | 3.26.05.1.01.01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya | 140 Orang | 460.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.1.01.02 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 150 Orang | 1.500.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.1.01.03 | Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan | Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan | 200 Orang | 560.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.1.01.04 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 60 Orang | 780.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.1.01.08 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 5 Laporan | 500.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.1.01.09 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 80 Orang | 1.000.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.1.01.10 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 4 Dokumen | 100.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.1.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | <i>Persentase Pelaku Ekraf yang berkembang Kapasitasnya</i> | 100% | 600.000.000 | |
| | 3.26.05.1.02.01 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 80 Orang | 600.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | | DINAS PERKEBUNAN | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | |
| 1 | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 78,93 Skor | 30.442.505.100 | |
| | 3.27.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</i> | 100% | 3.228.702.000 | |
| | 3.27.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 2.156.320.100 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | 1.072.381.900 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</i> | 100% | 16.042.897.400 | |
| | 3.27.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 64 Orang/ Bulan | 15.568.093.400 | DINAS PERKEBUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 474.804.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i> | 35,71% | 594.050.000 | |
| | 3.27.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 130.050.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang | 464.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu</i> | 4 Unit | 2.325.482.100 | |
| | 3.27.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 50.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 245.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 465.693.200 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 54.123.300 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 10.665.600 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1.500.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah</i> | 13 Jenis | 2.684.056.820 | |
| | 3.27.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 Unit | 1.500.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 650.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 67 Unit | 534.056.820 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah</i> | 4 Jenis | 4.095.538.520 | |
| | 3.27.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 34.331.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 571.703.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 629.160.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 2.860.344.520 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 90% | 1.471.778.260 | |
| | 3.27.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 21 Unit | 340.193.260 | DINAS PERKEBUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 960.865.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 Unit | 170.720.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| 2 | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | <i>Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan</i> | 25,36% | 19.552.056.400 | |
| | 3.27.02.1.01 | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | <i>Produktivitas komoditas perkebunan strategis</i> | 13 Ton/Ha | 19.552.056.400 | |
| | 3.27.02.1.01.01 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | 1 Laporan | 19.552.056.400 | DINAS PERKEBUNAN |
| 3 | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | <i>Luas kebun yang dibangun</i> | 50702 Ha | 600.000.000 | |
| | 3.27.03.1.01 | Penataan Prasarana Pertanian | <i>Jumlah luas kebun yang diperluas</i> | 445 Ha | 600.000.000 | |
| | 3.27.03.1.01.01 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 1 Dokumen | 600.000.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| 4 | 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | <i>Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Perkebunan)</i> | 40% | 5.499.080.100 | |
| | 3.27.05.1.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | <i>Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)</i> | 200 Pelaku Usaha | 5.499.080.100 | |
| | 3.27.05.1.01.02 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | 6000 Ha | 3.422.547.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.05.1.01.03 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 725 Ha | 2.076.533.100 | DINAS PERKEBUNAN |
| 5 | 3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | <i>Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)</i> | 40 Perusahaan | 1.626.421.100 | |
| | 3.27.06.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan</i> | 65 Pelaku Usaha | 1.626.421.100 | |
| | 3.27.06.1.01.03 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi | 2 Laporan | 1.626.421.100 | DINAS PERKEBUNAN |
| 6 | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | <i>Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya; Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkatkan</i> | 32,5 % 81,08 % | 5.026.179.200 | |
| | 3.27.07.1.01 | Pengembangan Ketenagaan Penyuluh Pertanian | <i>Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan</i> | 2 Kegiatan | 1.074.912.500 | |
| | 3.27.07.1.01.01 | Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN | Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan | 40 Orang | 1.074.912.500 | DINAS PERKEBUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.07.1.02 | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | <i>Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian</i> | 412 Orang | 1.923.719.700 | |
| | 3.27.07.1.02.01 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | 1 Dokumen | 1.330.733.700 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.1.02.02 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan | 20 Kelompok | 592.986.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.1.03 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | <i>Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)</i> | 16 Lembaga | 2.027.547.000 | |
| | 3.27.07.1.03.01 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani | Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi | 1 Unit | 670.921.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.1.03.02 | Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani | Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani | 1 Laporan | 1.120.166.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | 3.27.07.1.03.04 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | 1 Unit | 236.460.000 | DINAS PERKEBUNAN |
| | | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | |
| 1 | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 85,7 Skor | 1.731.871.000 | |
| | 3.27.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</i> | 100% | 84.960.000 | |
| | 3.27.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 84.960.000 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i> | 59% | 183.600.000 | |
| | 3.27.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 183.600.000 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu</i> | 1 Unit | 532.171.100 | |
| | 3.27.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 4.055.500 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 118.678.800 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 51.936.000 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 7.744.000 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 7.756.800 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 342.000.000 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah</i> | 2 Jenis | 50.000.000 | |
| | 3.27.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 50.000.000 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah</i> | 4 Jenis | 667.823.900 | |
| | 3.27.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 5.000.000 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 131.683.200 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 323.400.000 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 207.740.700 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 55% | 213.316.000 | |
| | 3.27.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 24.406.000 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 149.000.000 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 Unit | 39.910.000 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |
| 2 | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | <i>Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya</i> | 600000 Benih | 1.054.463.000 | |
| | 3.27.02.1.02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | <i>Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</i> | 1 Laporan | 1.054.463.000 | |
| | 3.27.02.1.02.01 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | Jumlah Sertifikat Benih | 150 Sertifikat | 559.543.000 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |
| | 3.27.02.1.02.04 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan | 1 Laporan | 494.920.000 | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | |
| 1 | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 79 Skor | 1.822.937.800 | |
| | 3.27.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</i> | 100% | 84.960.000 | |
| | 3.27.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 84.960.000 | UPTDPENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i> | 35% | 93.960.000 | |
| | 3.27.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | 93.960.000 | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu</i> | 1 Unit | 405.610.200 | |
| | 3.27.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 9.081.300 | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 55.611.500 | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 41.088.000 | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 21.151.000 | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 3.878.400 | UPTDPENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 274.800.000 | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah</i> | 14 Jenis | 593.188.320 | |
| | 3.27.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 383.097.600 | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 210.090.720 | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah</i> | 4 Jenis | 521.213.280 | |
| | 3.27.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 5.200.000 | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 178.912.800 | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 129.360.000 | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 207.740.480 | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 65% | 124.006.000 | |
| | 3.27.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 12.203.000 | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 10.203.000 | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 101.600.000 | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |
| 2 | 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | <i>Jumlah Luas Lahan yang di kendalikan dan di tanggulangi akibat serangan OPT</i> | 1000 Ha | 1.504.783.300 | |
| | 3.27.05.1.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | <i>Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT</i> | 25 Pelaku Usaha | 1.504.783.300 | |
| | 3.27.05.1.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 3320 Ha | 1.504.783.300 | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN |
| | | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | |
| 1 | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 80 Skor | 2.621.529.000 | |
| | 3.27.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</i> | 100% | 84.960.000 | |
| | 3.27.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 84.960.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i> | 40% | 77.067.000 | |
| | 3.27.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | 77.067.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu</i> | 1 Unit | 388.734.000 | |
| | 3.27.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 8.000.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 75.000.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 33.500.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 25.000.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 3.000.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 244.234.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah</i> | 4 Jenis | 1.199.465.000 | |
| | 3.27.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 1.086.500.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | - | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 112.965.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah</i> | 4 Jenis | 754.100.000 | |
| | 3.27.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 4.800.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 102.500.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 258.720.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 388.080.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 60% | 117.203.000 | |
| | 3.27.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 12.203.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 80.000.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| | 3.27.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 25.000.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| 2 | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | <i>Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat</i> | 95% | 4.500.000.000 | |
| | 3.27.02.1.02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | <i>Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</i> | 1 Laporan | 4.500.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.02.1.02.04 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan | 2 Laporan | 4.500.000.000 | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| | | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | |
| 1 | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 93.30 Skor | 28.005.826.463 | |
| | 3.27.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu</i> | 90% | 1.827.179.740 | |
| | 3.27.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | 365.435.948 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 365.435.948 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 365.435.948 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 365.435.948 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Laporan | 365.435.948 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran</i> | 90% | 21.667.823.089 | |
| | 3.27.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 81 Orang/ Bulan | 20.206.079.295 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 803.959.086 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 73.087.190 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 73.087.190 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 438.523.138 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 12 Dokumen | 73.087.190 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Tingkat Pengelolaan administrasi BMD</i> | 80% | 730.871.896 | |
| | 3.27.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 146.174.379 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 4 Dokumen | 438.523.138 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 146.174.379 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Tingkat Pengelolaan kepegawaian</i> | 80 Score | 730.871.897 | |
| | 3.27.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 73.087.190 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 219.261.569 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 219.261.569 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 219.261.569 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum</i> | 80% | 871.900.098 | |
| | 3.27.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 36.543.595 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 146.174.379 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 146.174.379 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 36.543.595 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 506.464.150 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</i> | 80% | 365.435.948 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 182.717.974 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 182.717.974 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 80% | 1.080.871.898 | |
| | 3.27.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 73.087.190 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 528.892.354 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 478.892.354 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 80% | 730.871.897 | |
| | 3.27.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 49 Unit | 146.174.379 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 180 Unit | 292.348.759 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 292.348.759 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 2 | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | <i>Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis</i> | 96.88 Skor | 24.475.549.970 | |
| | 3.27.02.1.01 | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | <i>Peningkatan jumlah produk unggulan peternakan yang dipromosikan Peningkatan nilai pengeluaran komoditas ternak Peningkatan Jumlah Unit pengolahan pupuk asal KOHE Peningkatan Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan Peningkatan pemanfaatan Jumlah Biogas Peningkatan Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi Peningkatan produksi pupuk asal KOHE Jumlah Komoditas ternak yang berpotensi dan berpeluang pengeluaran</i> | 12 Produk 916,3 Rupiah 15 Unit 25.58 % 37.04 % 614.90 KK 402957 Ton 3 Jenis | 3.086.450.186 | |
| | 3.27.02.1.01.01 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | 4 Laporan | 1.543.225.093 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | 2 Dokumen | 1.543.225.093 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|---|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.02.1.04 | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | <i>Peningkatan jumlah bibit sapi ber-SKLB Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah) Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar Peningkatan Calving Rate Peningkatan pembudidaya Ayam Ras Layer Pertumbuhan Upgrade Closed house Peningkatan pembudidaya unggas lokal Calving Interval Peningkatan Akseptor IB dari Indukan</i> | 150 Ekor 110 Unit Usaha 1.80 % 62 % 201 RTUP 55.20 % 49109 RTUP 17.11 Bulan 12.74 % | 7.993.905.979 | |
| | 3.27.02.1.04.01 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen | 3.456.824.207 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.1.04.02 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 3 Laporan | 4.537.081.772 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.1.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | <i>Jumlah unit pengolahan pakan mini Jumlah identifikasi bahan baku pakan Luasan HPT Peningkatan Jumlah Bank Pakan</i> | 8 Unit 13 Jenis 1179 Ha 18 Unit | 5.401.287.825 | |
| | 3.27.02.1.05.01 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi | 2 Laporan | 2.808.669.669 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.1.05.02 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan | Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar | 165066 Ton | 2.592.618.156 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.1.06 | Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor | <i>Peningkatan Jumlah unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman</i> | 29.59 % | 432.103.026 | |
| | 3.27.02.1.06.01 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar | 1 Laporan | 432.103.026 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.1.07 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | <i>Peningkatan Jumlah Pengadaan Ternak</i> | 2754 Indukan/Bibit | 7.561.802.954 | |
| | 3.27.02.1.07.01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | 800 Ekor | 7.561.802.954 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3 | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | <i>Tingkat pemenuhan prasarana peternakan</i> | 93.75 Skor | 6.172.900.371 | |
| | 3.27.03.1.01 | Penataan Prasarana Pertanian | <i>Tersedianya kawasan pemanfaatan untuk peternakan Peningkatan Akses pembiayaan Peningkatan jumlah Investasi</i> | 134 Kawasan 112 Rupiah/ Milyar 3 Unit | 6.172.900.371 | |
| | 3.27.03.1.01.01 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 1 Dokumen | 6.172.900.371 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | <i>Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ</i> | 91,79 Skor | 10.926.033.657 | |
| | 3.27.04.1.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Peningkatan jumlah pelayanan kesehatan hewan Peningkatan wilayah tidak terjadi kasus PhMsZ Tingkat kesembuhan GANGREP</i> | 43.50 % 63 Kecamatan 76.50 % | 4.753.133.286 | |
| | 3.27.04.1.01.01 | Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 1 Laporan | 2.160.515.130 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.1.01.03 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | 1 Laporan | 2.592.618.156 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.1.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi | <i>Menurunnya resiko masuknya PHMSZ Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/ atau pengeluaran hewan</i> | 3.20 % 72 % | 2.160.515.130 | |
| | 3.27.04.1.02.02 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | 1 Laporan | 1.728.412.104 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.1.02.03 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi | Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi | 1 Laporan | 432.103.026 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.1.03 | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | <i>persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/ atau pengeluaran produk hewan Peningkatan jumlah zona/ kompartemen bebas kasus PHMSZ</i> | 58 % 23 unit | 1.419.767.085 | |
| | 3.27.04.1.03.01 | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit | Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi | 8 Unit | 864.206.052 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.1.03.02 | Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan | Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner | 1 Laporan | 555.561.033 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.1.04 | Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | <i>Peningkatan mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis Peningkatan konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting Peningkatan jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan hygiene sanitasi Persentase produk telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu</i> | 81 % 20 % 27.5 Gram/hari 30 % 90 % | 1.481.496.089 | |
| | 3.27.04.1.04.01 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan | Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan | 66 Sertifikat | 962.972.458 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.04.1.04.02 | Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis | Jumlah Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 20 Orang | 518.523.631 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.1.05 | Kesejahteraan Hewan | <i>Peningkatan jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan Penurunan jumlah pemotongan ternak sapi betina produktif</i> | 1.32 % 24.80 % | 1.111.122.067 | |
| | 3.27.04.1.05.01 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | 1 Sertifikat | 185.187.011 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.1.05.02 | Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya | Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani | 100 Kasus | 925.935.056 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 5 | 3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | <i>Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan</i> | 99,35 Skor | 1.117.290.037 | |
| | 3.27.06.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Peningkatan unit usaha/kelp. Yang melakukan integrasi Peningkatan Peran BUMN dan Swasta Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice</i> | 114 Unit 10 % 32.90 undefined | 586.425.535 | |
| | 3.27.06.1.01.02 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota | 395 Dokumen | 123.458.007 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.06.1.01.03 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi | 2 Laporan | 462.967.528 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.06.1.03 | Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan | <i>Persentase unit usaha obat hewan yang memiliki komitmen izin usaha</i> | 34% | 530.864.502 | |
| | 3.27.06.1.03.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen | 1 Laporan | 265.432.251 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.06.1.03.02 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi | 1 Laporan | 265.432.251 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 6 | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | <i>Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan</i> | 99,58% | 2.469.160.148 | |
| | 3.27.07.1.02 | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | <i>Peningkatan jumlah peternak millennial Rasio SD komoditas/ produk peternakan Data Informasi pasar tepat waktu</i> | 75 % 1.15 Rasio 19.73 % | 987.664.059 | |
| | 3.27.07.1.02.01 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | 2 Dokumen | 987.664.059 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.07.1.03 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | <i>Jumlah Desa Korporasi Ternak Jumlah Petugas/peternak yang di latih</i> | 8 Unit 345 Orang | 1.481.496.089 | |
| | 3.27.07.1.03.01 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani | Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi | 8 Unit | 1.481.496.089 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | |
| 1 | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 93.30 Skor | 2.789.199.883 | |
| | 3.27.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran</i> | 90 Score | 156.195.193 | |
| | 3.27.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 139.459.994 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 16.735.199 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Tingkat Pengelolaan administrasi BMD</i> | 80 Score | 52.994.798 | |
| | 3.27.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 27.891.999 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 4 Dokumen | 11.156.800 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 13.945.999 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Tingkat Pengelolaan kepegawaian</i> | 80 Score | 270.552.389 | |
| | 3.27.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 33.470.399 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 237.081.990 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum</i> | 80% | 485.320.780 | |
| | 3.27.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 11.156.800 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 111.567.995 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 27.891.999 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 22.313.599 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 312.390.387 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</i> | 80% | 195.243.992 | |
| | 3.27.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 55.783.998 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 139.459.994 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 80% | 1.288.610.345 | |
| | 3.27.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 5.578.400 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 223.135.990 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.059.895.955 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 80% | 340.282.386 | |
| | 3.27.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 Unit | 58.573.198 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 70 Unit | 167.351.993 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 114.357.195 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| 2 | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | <i>Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</i> | 88.54 Skor | 1.975.328.118 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.02.1.03 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | <i>Peningkatan produksi pakan tambahan Peningkatan Jumlah ternak yang ber-SKLB Peningkatan Jumlah pupuk Peningkatan angka kelahiran Peningkatan Jumlah Populasi Plasma Nutfah Peningkatan jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi Peningkatan Jumlah Populasi Ternak/ Hewan Peningkatan Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak Peningkatan jumlah PAD Penurunan Jumlah Mortalitas/Kematian Ternak/ Hewan Peningkatan Calving Interval</i> | 5314 kg 0 % 10 Ton 26.35 % 43.81 ST 10000 Stek/pols 135.53 ST 1500 Ton 117904500 Rupiah 2.06 % 16.46 Bulan | 1.975.328.118 | |
| | 3.27.02.1.03.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | 1 Laporan | 1.086.430.465 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | 3.27.02.1.03.04 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | 1 Laporan | 888.897.653 | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK |
| | | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | |
| 1 | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 93.30 Skor | 2.275.382.249 | |
| | 3.27.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran</i> | 90 Score | 131.362.273 | |
| | 3.27.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 117.287.744 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 14.074.529 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Tingkat Pengelolaan administrasi BMD</i> | 80 Score | 44.569.343 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 23.457.549 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 4 Dokumen | 9.383.020 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 11.728.774 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Tingkat Pengelolaan kepegawaian</i> | 80 Score | 227.538.225 | |
| | 3.27.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 5 Paket | 28.149.059 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 199.389.166 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum</i> | 80% | 396.432.578 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 9.383.020 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 19 Paket | 93.830.196 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 18.766.039 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 4.691.510 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 211.117.941 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 58.643.872 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</i> | 80% | 164.202.843 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 46.915.098 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 117.287.745 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 80% | 1.083.738.762 | |
| | 3.27.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 4.691.510 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 187.660.392 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 891.386.860 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 80% | 227.538.225 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|---|------------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.27.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | 14.074.529 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 57 Unit | 117.287.745 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | 3.27.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 96.175.951 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| 2 | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | <i>Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat</i> | 98.68 Skor | 1.728.412.104 | |
| | 3.27.04.1.03 | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | <i>Peningkatan Jumlah PAD Peningkatan Ruang lingkup pengujian Peningkatan Kepuasan pelanggan</i> | 190000000 Rupiah 39 Absolut 84 Score | 1.728.412.104 | |
| | 3.27.04.1.03.03 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 400 Dokumen | 1.728.412.104 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| | | DINAS KEHUTANAN | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 90 % 84 % | 163.871.894.529 | |
| | 3.28.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</i> | 13 Dokumen | 2.813.200.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | 1.167.800.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 1.645.400.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 12 Dokumen | 101.629.051.887 | |
| | 3.28.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn | 550 Orang/ Bulan | 99.911.995.887 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 735.480.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 981.576.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i> | 5 Laporan | 550.000.000 | |
| | 3.28.01.1.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | 550.000.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 12 Laporan | 1.099.353.700 | |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | 625.953.500 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | 302.466.200 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 12 Orang | 170.934.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 12 Laporan | 3.253.582.700 | |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 23.982.500 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 91.866.500 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 181.955.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 98.620.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 11.635.200 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1.913.969.600 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 202.610.700 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 5 Dokumen | 728.943.200 | DINAS KEHUTANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 180 Unit | 48.111.798.062 | |
| | 3.28.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 126 Unit | 48.111.798.062 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Laporan | 3.730.134.880 | |
| | 3.28.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 8.340.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 817.739.600 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 194.916.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.709.139.280 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 261 Unit | 2.684.773.300 | |
| | 3.28.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | 291.092.400 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 64 Unit | 704.154.200 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 170 Unit | 149.526.700 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1.540.000.000 | DINAS KEHUTANAN |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | <i>Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi</i> | 1,45 juta ton CO2e 1 % 0,47 % | 52.635.043.182 | |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 1.298.128.971 | |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 Dokumen | 1.298.128.971 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 5153407,17 Hektar | 10.651.796.000 | |
| | 3.28.03.1.03.01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | 4 Dokumen | 2.157.264.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.03.02 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala | 2 Dokumen | 239.000.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan BPBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 77 Dokumen | 5.403.736.000 | DINAS KEHUTANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.03.06 | Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan | 50 Dokumen | 2.851.796.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | <i>Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara</i> | 1200 Hektare | 13.962.798.000 | |
| | 3.28.03.1.04.01 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 550.000.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 435 Ha | 9.473.173.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.04.05 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun | 100 Unit | 1.200.000.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.04.08 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | 20 Laporan | 2.739.625.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | <i>Luas Kerusakan Kawasan Hutan</i> | 7497170,178 Hektar | 19.980.065.411 | |
| | 3.28.03.1.05.03 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan | Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan | 6 Operasi | 2.435.342.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 6 Dokumen | 5.904.589.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 7 Laporan | 11.640.134.411 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.07 | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | <i>Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif</i> | 21000 M3 | 3.220.630.000 | |
| | 3.28.03.1.07.01 | Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah | 9 Unit Manajemen | 774.590.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.07.02 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi | 11 Dokumen | 774.080.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.07.03 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani | 15 Unit Manajemen | 1.671.960.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.09 | Perbenihan Tanaman Hutan | <i>Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan</i> | 105 Jumlah SK | 3.521.624.800 | |
| | 3.28.03.1.09.01 | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar | Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi | 25 Unit Usaha | 1.257.422.000 | DINAS KEHUTANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.09.02 | Sertifikasi Sumber Benih | Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan | 20 Sertifikat | 900.000.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.03.1.09.05 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar | 80 Laporan | 1.364.202.800 | DINAS KEHUTANAN |
| 3 | 3.28.04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | <i>Penurunan Emisi GRK berbasis hutan di KBEP dan Konservasi Provinsi Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola</i> | 0,68 juta ton CO2e 545726 Hektar | 5.826.687.000 | |
| | 3.28.04.1.03 | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | <i>Luas KBEP yang dikelola</i> | 6000 Hektar | 5.826.687.000 | |
| | 3.28.04.1.03.05 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan | 450 Orang | 1.739.530.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.04.1.03.06 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola | 100000 Ha | 4.087.157.000 | DINAS KEHUTANAN |
| 4 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | <i>Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya Penurunan Emisi GRK berbasis hutan dari Perhutanan Sosial (Juta Ton CO2e)</i> | 20000 Hektar 20 Kelompok 0,13 juta ton CO2e | 34.924.564.841 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | <i>Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat</i> | 90 kelompok | 34.924.564.841 | |
| | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 124 Orang | 18.423.556.191 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 17 Kelompok | 3.650.760.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 35000 Ha | 12.850.248.650 | DINAS KEHUTANAN |
| 5 | 3.28.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | <i>Penurunan Emisi GRK berbasis hutan di wilayah DAS dan Sub DAS yang dikelola Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola</i> | 0,03 juta ton CO2e 10104 Hektar | 3.728.275.000 | |
| | 3.28.06.1.01 | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Jumlah DAS yang dikelola</i> | 1 DAS | 3.728.275.000 | |
| | 3.28.06.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan | 1 Dokumen | 650.000.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.06.1.01.02 | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS | 6 Dokumen | 850.000.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | 3.28.06.1.01.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | 300 Orang | 1.928.275.000 | DINAS KEHUTANAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.06.1.01.05 | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS | Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS | 1 Lembaga | 300.000.000 | DINAS KEHUTANAN |
| | | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</i> | 81 -90 % | 3.445.146.000 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i> | 12 Laporan | 175.692.000 | |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 175.692.000 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i> | 12 Laporan | 547.681.500 | |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | 247.681.500 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | 300.000.000 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 12 Bulan | 311.538.300 | |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12.157.750 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 12.889.250 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 40.622.050 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 11.557.250 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 4.312.000 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 230.000.000 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah</i> | 2 Unit | 160.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 160.000.000 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 12 Bulan | 933.147.380 | |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 216.158.800 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 716.988.580 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Unit barang yang diperlihara</i> | 120 Unit | 1.317.086.820 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 62 Unit | 174.199.300 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 44 Unit | 80.421.000 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1.062.466.520 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | <i>Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi</i> | 1,45 juta ton CO2e 1 % 0,47 % | 280.000.000 | |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | <i>Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun</i> | 1 Dokumen | 280.000.000 | |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 280.000.000 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| 3 | 3.28.04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | <i>Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola Penurunan Emisi GRK berbasis hutan di KBEP dan Konservasi Provinsi</i> | 545726 hektare 0,68 juta ton CO2e | 12.529.347.800 | |
| | 3.28.04.1.01 | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi | <i>Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola</i> | 64915 hektare | 12.113.505.000 | |
| | 3.28.04.1.01.02 | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi | Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi | 12 Operasi | 6.000.000.000 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.04.1.01.03 | Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi | Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi | 64914.98 Ha | 300.000.000 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.04.1.01.05 | Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi | Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem | 400 Ha | 5.000.000.000 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|---|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.04.1.01.08 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi | Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif | 5 Desa | 813.505.000 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.04.1.03 | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | <i>Luas KBEP yang dikelola</i> | 1 hektare | 415.842.800 | |
| | 3.28.04.1.03.03 | Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah | Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah | 1 Dokumen | 415.842.800 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| 4 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | <i>Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya Penurunan Emisi GRK berbasis hutan dari Perhutanan Sosial (Juta Ton CO2e)</i> | 20000 hektare 20 kelompok 0,13 juta ton CO2e | 2.598.066.700 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | <i>Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat</i> | 2 kelompok | 2.598.066.700 | |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 2 Kelompok | 1.098.066.700 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 20 Ha | 1.500.000.000 | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>m</i> | - | 3.362.642.200 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 152.880.000 | |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 152.880.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 186.363.500 | |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 30 Paket | 41.353.500 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 145.010.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 644.495.640 | |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 8.087.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 85.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 8.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 543.408.640 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 133.059.200 | |
| | 3.28.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 133.059.200 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 541.829.240 | |
| | 3.28.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 120.039.800 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 409.789.440 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.704.014.620 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 Unit | 150.328.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | 45.900.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 20.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1.487.786.620 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | - | 10.923.289.767 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | 4.240.713.000 | |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 2 Unit | 4.240.713.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | 692.750.000 | |
| | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 22 Dokumen | 692.750.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | 3.334.450.900 | |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 50 Ha | 2.942.150.900 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.03.1.04.08 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | 8 Laporan | 392.300.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | 2.655.375.867 | |
| | 3.28.03.1.05.02 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 0 Ha | 350.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 12 Dokumen | 1.122.960.967 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 1.182.414.900 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| 3 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | 2.185.969.000 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | 2.185.969.000 | |
| | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 3 Orang | 201.499.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 11 Kelompok | 843.509.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 3000 Ha | 1.140.961.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 3.782.271.100 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 148.800.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 148.800.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 220.000.000 | |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 125.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 95.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.512.481.800 | |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 15.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 11 Paket | 846.750.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 36.375.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 40.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 48 Dokumen | 7.756.800 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 65 Laporan | 566.600.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.057.696.300 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 15.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 185.180.611 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 97.500.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 760.015.689 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 843.293.000 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 29 Unit | 450.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 19 Unit | 43.293.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 350.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | - | 11.088.176.100 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | 1.003.976.100 | |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 4 Unit | 1.003.976.100 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | 180.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 180.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | | - | 1.150.000.000 | |
| | 3.28.03.1.03.01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | 4 Dokumen | 650.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 3 Dokumen | 500.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | 2.300.000.000 | |
| | 3.28.03.1.04.01 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 100.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 50 Ha | 2.200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | - | 3.754.200.000 | |
| | 3.28.03.1.05.02 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 335746 Ha | 685.200.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 2 Dokumen | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 50 Laporan | 2.869.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.03.1.06 | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | - | - | 1.000.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.06.03 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi | 1 Unit Managemen | 1.000.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.03.1.09 | Perbenihan Tanaman Hutan | - | - | 1.700.000.000 | |
| | 3.28.03.1.09.01 | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar | Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi | 3 Unit Usaha | 1.700.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| 3 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | 1.577.138.000 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | 1.577.138.000 | |
| | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 4 Orang | 100.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 6 Kelompok | 620.991.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 1600 Ha | 856.147.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 3.794.329.300 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 298.800.000 | |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 Dokumen | 148.800.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 150.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 40.044.200 | |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 40.044.200 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.111.136.200 | |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 6.876.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 160.121.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 27.999.200 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 10.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 906.140.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 193.281.000 | |
| | 3.28.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | 193.281.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 890.803.840 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 10.680.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 125.358.400 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 45.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 709.765.440 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.260.264.060 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 46 Unit | 907.390.560 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 44 Unit | 74.940.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 277.933.500 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | - | 13.694.230.450 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | 4.000.000.000 | |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 35 Unit | 4.000.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | 1.250.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 Dokumen | 1.250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | | - | 1.078.000.000 | |
| | 3.28.03.1.03.01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | 2 Dokumen | 450.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 3 Dokumen | 628.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | 4.209.604.550 | |
| | 3.28.03.1.04.02 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara | 200 Ha | 3.759.604.550 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 8 Ha | 450.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | - | 3.156.625.900 | |
| | 3.28.03.1.05.02 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 150 Ha | 284.400.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 3 Dokumen | 920.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 4 Laporan | 1.952.225.900 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| 3 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | 1.367.300.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | 1.367.300.000 | |
| | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 10 Orang | 350.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 8 Kelompok | 300.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 30 Ha | 717.300.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 90 % 81 - | 3.685.434.000 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i> | 12 Laporan | 139.200.000 | |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 139.200.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i> | 12 Laporan | 144.022.500 | |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 45.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.01.1.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2 Dokumen | 22.200.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 22.200.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | 54.622.500 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 12 Bulan | 642.211.500 | |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 15.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 75.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 25.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 25.272.300 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 1.939.200 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 500.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah</i> | 25 Unit | 650.000.000 | |
| | 3.28.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Paket | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 400.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 12 Bulan | 1.235.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 175.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 45.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.015.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Unit barang yang dipelihara</i> | 61 Unit | 875.000.000 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 Unit | 350.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 25.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 500.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | <i>1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi 3). Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan</i> | 0,47 % 1,45 juta ton CO2e 1 % | 9.841.155.650 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | <i>Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun</i> | 1 Dokumen | 3.451.155.650 | |
| | 3.28.03.1.01.02 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok | 4 Unit | 150.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 30 Unit | 3.301.155.650 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | <i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i> | 1 Dokumen | 500.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 3 Dokumen | 500.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | <i>Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan</i> | 5153407,17 Hektar | 245.000.000 | |
| | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 1 Dokumen | 245.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | <i>Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara</i> | 55 Hektar | 3.000.000.000 | |
| | 3.28.03.1.04.01 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 50.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 50 Ha | 2.500.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.03.1.04.08 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | 1 Laporan | 450.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | <i>Luas Kerusakan Kawasan Hutan</i> | 7497170,178 Hektar | 1.545.000.000 | |
| | 3.28.03.1.05.01 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 100 Ha | 245.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 10 Dokumen | 450.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 20 Laporan | 850.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.03.1.06 | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | <i>Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan</i> | 5153407,17 Ton | 1.100.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|---|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.06.03 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi | 1 Unit Managemen | 1.100.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| 3 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | <i>1) . Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) . Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 3) . Penurunan Emisi GRK berbasis hutan dari Perhutanan Sosial (Juta Ton CO2e)</i> | 20000 Hektar 1 Kelompok 0,13 juta ton CO2e | 1.702.225.900 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | <i>Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat</i> | 3 Kelompok | 1.702.225.900 | |
| | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 3 Orang | 150.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 10 Kelompok | 500.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 200 Ha | 1.052.225.900 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>1) . Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2) . Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</i> | 81 % 90 % | 3.323.997.000 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 12 Laporan | 155.520.000 | |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 155.520.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 12 Laporan | 360.021.100 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 211.281.100 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 148.740.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 10 Laporan | 1.151.083.860 | |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 47.126.600 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 477.748.500 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | 3.28.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 12.300.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 18.968.760 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 594.940.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 4 Laporan | 1.218.575.840 | |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 126.398.400 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | 3.28.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 29.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.063.177.440 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 115 Unit | 438.796.200 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 56 Unit | 374.243.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 63 Unit | 64.553.200 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | <i>1) . Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi 2) . Presentase Luas kerusakan kawasan hutan 3) . Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan</i> | 0.47 % 1 % 1.45 juta ton CO2e | 20.680.469.050 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | <i>Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun</i> | 1 Dokumen | 3.662.468.450 | |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 1 Unit | 3.662.468.450 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | <i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i> | 1 Dokumen | 452.460.000 | |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 Dokumen | 452.460.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | <i>Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan</i> | 5153407.17 Ha | 178.050.000 | |
| | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 11 Dokumen | 178.050.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | <i>Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara</i> | 50 Ha | 13.451.033.600 | |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 55 Ha | 2.773.766.100 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|---|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.04.08 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | 4 Laporan | 10.677.267.500 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | <i>Luas Kerusakan Kawasan Hutan</i> | 7497170.178 Ha | 2.936.457.000 | |
| | 3.28.03.1.05.02 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 267068 Ha | 325.502.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 12 Dokumen | 592.963.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 2.017.992.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| 3 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | <i>1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 3). Penurunan Emisi GRK berbasis hutan dari Perhutanan Sosial (Juta Ton CO2e)</i> | 20000 Ha 1 Kelompok 0.13 juta ton CO2e | 860.307.400 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | <i>Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat</i> | 10 Kelompok | 860.307.400 | |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 1000 Ha | 860.307.400 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 3.841.476.000 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 141.240.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 141.240.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 100.000.000 | |
| | 3.28.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 100.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 400.000.000 | |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.050.236.000 | |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 9.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 585.236.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 6.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 50.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 400.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.200.000.000 | |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.000.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 950.000.000 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 52 Unit | 350.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 400.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | - | 12.883.709.900 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | 4.283.709.900 | |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 10 Unit | 4.283.709.900 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | 350.000.000 | |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 Dokumen | 350.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | 450.000.000 | |
| | 3.28.03.1.03.01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | 1 Dokumen | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 3 Dokumen | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | 3.550.000.000 | |
| | 3.28.03.1.04.01 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 130 Ha | 3.350.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | - | 3.750.000.000 | |
| | 3.28.03.1.05.02 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 998370 Ha | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 3 Dokumen | 500.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 3 Laporan | 3.000.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.03.1.09 | Perbenihan Tanaman Hutan | - | - | 500.000.000 | |
| | 3.28.03.1.09.01 | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar | Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi | 3 Unit Usaha | 500.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| 3 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | 2.063.601.900 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | 2.063.601.900 | |
| | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 5 Orang | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 3 Kelompok | 600.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 1000 Ha | 1.263.601.900 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 3.650.305.500 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 229.700.000 | |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 139.200.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 90.500.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 380.152.700 | |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | 100.902.700 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 39 Orang | 279.250.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 933.172.240 | |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 8.488.600 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 24.683.640 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 650.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 365.000.000 | |
| | 3.28.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 100.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 265.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 872.280.560 | |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 247.039.600 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 70.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 555.240.960 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 870.000.000 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 33 Unit | 450.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | 70.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 350.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | <i>1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi 3). Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan</i> | 0,47 % 1,45 juta ton CO2e 1 % | 12.428.145.200 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | <i>Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun</i> | 1 Dokumen | 2.278.145.200 | |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 2 Unit | 2.278.145.200 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | <i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i> | 1 Dokumen | 500.000.000 | |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 Dokumen | 500.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | <i>Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan</i> | 5.153.407,17 Ha | 450.000.000 | |
| | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 2 Dokumen | 450.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | <i>Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara</i> | 1.200 Ha | 5.500.000.000 | |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 405 Ha | 5.500.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | <i>Luas Kerusakan Kawasan Hutan</i> | 7.497.170,18 Ha | 3.700.000.000 | |
| | 3.28.03.1.05.01 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 641969 Ha | 400.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 4 Dokumen | 450.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 6 Laporan | 2.850.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| 3 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | 1.634.142.600 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | 1.634.142.600 | |
| | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 3 Orang | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 5 Kelompok | 784.142.600 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 1000 Ha | 650.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</i> | 81 -90 % | 3.614.866.800 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 12 Dokumen | 240.800.000 | |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 140.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan | 37.800.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 7 Laporan | 63.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i> | 12 laporan | 93.800.000 | |
| | 3.28.01.1.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen | 35.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 3 Laporan | 25.200.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 33.600.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 12 laporan | 238.200.000 | |
| | 3.28.01.1.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 15.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 85.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 7 Dokumen | 42.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | 35.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 6 Orang | 61.200.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 12 laporan | 782.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | 25.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 30 Paket | 120.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 15 Paket | 12.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 15.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | 550.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 60.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 15 unit | 190.400.000 | |
| | 3.28.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 18 Unit | 55.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 60.400.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 75.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 12 laporan | 1.283.226.800 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 36 Laporan | 15.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 175.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 8.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 13 Laporan | 1.085.226.800 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 63 unit | 786.440.000 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit | 510.220.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 2 Unit | 15.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 36 Unit | 75.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 60.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 66.220.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 60.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | <i>Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan Presentase Luas kerusakan kawasan hutan</i> | 0,47 % 1 % 1,45 juta ton CO2e | 10.021.482.600 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | <i>Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun</i> | 1 Dokumen | 2.913.089.700 | |
| | 3.28.03.1.01.01 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun | 3 Dokumen | 225.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.03.1.01.02 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok | 1 Unit | 300.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 55 Unit | 2.100.089.700 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.03.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi | 6 Dokumen | 288.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | <i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i> | 20 Dokumen | 295.000.000 | |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 295.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | 858.609.300 | |
| | 3.28.03.1.03.01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | 2 Dokumen | 350.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.03.1.03.02 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala | 2 Dokumen | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 8 Dokumen | 308.609.300 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|---|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | <i>Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara</i> | 1.200 hektar | 4.089.000.000 | |
| | 3.28.03.1.04.01 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 199.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 60 Ha | 3.680.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.03.1.04.08 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | 6 Laporan | 210.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | <i>Luas Kerusakan Kawasan Hutan</i> | 7497170,178 hektar | 1.865.783.600 | |
| | 3.28.03.1.05.01 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 1500 Ha | 215.783.600 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.03.1.05.02 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 2000 Ha | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 13 Dokumen | 600.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 29 Laporan | 800.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| 3 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | <i>Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Penurunan Emisi GRK berbasis hutan dari Perhutanan Sosial (Juta Ton CO2e) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</i> | 20.000 hektar 0,13 juta ton CO2e 20 kelompok | 700.000.000 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | <i>Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat</i> | kelompok 90 | 700.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 8 Orang | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 6 Kelompok | 300.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 2000 Ha | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>m</i> | - | 3.547.192.200 | |
| | 3.28.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 81.640.000 | |
| | 3.28.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 81.640.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 93.600.000 | |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 93.600.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.600.000.000 | |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 1.250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 50.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 50.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 450.000.000 | |
| | 3.28.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | - | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 833.992.000 | |
| | 3.28.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 3.992.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 130.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 700.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 487.960.200 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 22 Unit | 367.960.200 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 32 Unit | 60.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 60.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | - | 8.604.401.800 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | 1.555.098.600 | |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 6 Unit | 1.555.098.600 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | 192.270.000 | |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 192.270.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | 323.760.000 | |
| | 3.28.03.1.03.01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | 1 Dokumen | 115.560.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 7 Dokumen | 208.200.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | 3.486.398.200 | |
| | 3.28.03.1.04.01 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 145.660.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 115 Ha | 2.940.738.200 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.03.1.04.05 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun | 0 Unit | 400.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | - | 2.956.035.000 | |
| | 3.28.03.1.05.01 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 44126 Ha | 857.555.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 12 Dokumen | 350.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 70 Laporan | 1.748.480.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.03.1.07 | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | 90.840.000 | |
| | 3.28.03.1.07.02 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi | 7 Dokumen | 90.840.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| 3 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | 1.234.321.000 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | 1.234.321.000 | |
| | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 10 Orang | 102.261.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 3 Kelompok | 487.880.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 200 Ha | 644.180.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>m</i> | - | 3.167.896.200 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 232.560.000 | |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 119.520.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 113.040.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 86.640.000 | |
| | 3.28.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 86.640.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 313.248.000 | |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 93.381.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 12 Orang | 219.867.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 618.159.760 | |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 44.296.360 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 44.013.400 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 529.850.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 390.000.000 | |
| | 3.28.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Paket | 140.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 921.179.440 | |
| | 3.28.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 8.370.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 94.090.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 818.719.440 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 606.109.000 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 Unit | 425.529.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 180.580.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | - | 8.886.193.800 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | 2.700.000.000 | |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 5 Unit | 2.700.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | 293.328.000 | |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 293.328.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | 683.180.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.03.01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | 1 Dokumen | 196.460.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 1 Dokumen | 486.720.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | 3.077.389.800 | |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 75 Ha | 3.077.389.800 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | - | 1.847.896.000 | |
| | 3.28.03.1.05.02 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 300 Ha | 357.996.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 12 Dokumen | 389.900.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 1.100.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.03.1.06 | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | - | - | 284.400.000 | |
| | 3.28.03.1.06.03 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi | 1 Unit Managemen | 284.400.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | 1.774.620.000 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | 1.774.620.000 | |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 6 Kelompok | 726.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 1000 Ha | 1.048.620.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBERAU TENGAH |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | " | - | 3.214.992.200 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 147.000.000 | |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 147.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 189.000.000 | |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 63.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang | 126.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 547.992.200 | |
| | 3.28.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Paket | 42.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 43.992.200 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | 462.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.150.800.000 | |
| | 3.28.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Paket | 84.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 13 Unit | 168.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 898.800.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 760.200.000 | |
| | 3.28.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 4.200.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 105.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Laporan | 21.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 630.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 420.000.000 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit | 210.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 210.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | - | 7.479.454.000 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | 1.360.054.000 | |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 20 Unit | 1.360.054.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | 672.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 3 Dokumen | 672.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | | - | 428.400.000 | |
| | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 6 Dokumen | 428.400.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | 2.205.000.000 | |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 50 Ha | 2.205.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | - | 2.814.000.000 | |
| | 3.28.03.1.05.02 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 158000 Ha | 210.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 12 Dokumen | 1.134.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 1.470.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| 3 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | 2.905.020.400 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | 2.905.020.400 | |
| | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 15 Orang | 105.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 6 Kelompok | 252.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 158000 Ha | 2.548.020.400 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>1) . Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2) . Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</i> | 81 % 90 % | 3.100.305.500 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 12 Laporan | 200.000.000 | |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 2 Laporan | 171.009.300 | |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 74.409.300 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 13 Orang | 96.600.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 5 Laporan | 1.013.096.760 | |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 20.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 65.153.004 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| | 3.28.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 24.943.756 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| | 3.28.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 22.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 881.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 1 Unit | 202.000.000 | |
| | 3.28.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 52.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| | 3.28.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 150.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 4 Laporan | 964.199.440 | |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 195.781.200 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 768.418.240 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Unit | 550.000.000 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 31 Unit | 300.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 41 Unit | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | <i>2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan 1). Presentase Luas Lahan yang direhabilitasi 3). Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan</i> | 1 % 0.47 % 1.45 juta ton CO2e | 9.305.688.750 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun | 1 Dokumen | 3.384.232.700 | |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 2 Unit | 3.384.232.700 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 848.035.500 | |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 4 Dokumen | 848.035.500 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | <i>Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara</i> | 50 Ha | 1.867.469.000 | |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 50 Ha | 1.867.469.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | | 3.205.951.550 | |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 1 Dokumen | 750.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 2.455.951.550 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|---|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 3). Penurunan Emisi GRK berbasis hutan dari Perhutanan Sosial (Juta Ton CO2e) | 1 Kelompok 20000 Ha 0.13 juta ton CO2e | 1.257.632.250 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat | 1 Kelompok | 1.257.632.250 | |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 4 Kelompok | 995.319.900 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 30 Ha | 262.312.350 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 3.125.009.000 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 180.000.000 | |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 180.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 204.000.000 | |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 84.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.01.1.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 120.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.046.009.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 400.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 50.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 596.009.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 300.000.000 | |
| | 3.28.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 Paket | 100.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 950.000.000 | |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 300.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 650.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 445.000.000 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 32 Unit | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 Unit | 195.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | - | 12.694.598.600 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | 1.509.598.600 | |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 8 Unit | 1.509.598.600 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | 560.000.000 | |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 560.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | 650.000.000 | |
| | 3.28.03.1.03.01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | 1 Dokumen | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.03.1.03.02 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala | 1 Dokumen | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 1 Dokumen | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | 6.900.000.000 | |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 100 Ha | 6.900.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | - | 2.925.000.000 | |
| | 3.28.03.1.05.02 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 2500 Ha | 375.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 1 Dokumen | 350.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 42 Laporan | 2.200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.03.1.07 | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | 150.000.000 | |
| | 3.28.03.1.07.02 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen | 150.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| 3 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | 1.635.611.200 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | 1.635.611.200 | |
| | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 5 Orang | 300.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 3 Kelompok | 220.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 1000 Ha | 1.115.611.200 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 90 % 81 - | 3.947.595.000 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i> | 12 Laporan | 200.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i> | 12 Laporan | 197.595.000 | |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 117.595.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | 80.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 12 Bulan | 610.000.000 | |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 25.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 35 Paket | 60.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 25.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 500.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah</i> | 40 Unit | 400.000.000 | |
| | 3.28.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Paket | 150.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 30 Unit | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 12 Bulan | 1.360.000.000 | |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 160.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Unit barang yang dipelihara</i> | 48 Unit | 1.180.000.000 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit | 60.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 320.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 800.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | <i>Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan</i> | 0,47 % 1 % 1,45 juta ton CO2e | 8.330.000.000 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | <i>Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun</i> | 1 Dokumen | 1.200.000.000 | |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 60 Unit | 1.200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | <i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i> | 1 Dokumen | 500.000.000 | |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 500.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | <i>Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan</i> | 37578 hektare | 500.000.000 | |
| | 3.28.03.1.03.01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | 1 Dokumen | 300.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 1 Dokumen | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | 2.058.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.04.01 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 78.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 100 Ha | 1.980.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | - | 1.672.000.000 | |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 2 Dokumen | 500.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 4 Laporan | 1.172.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.03.1.06 | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | <i>Luas PBPHH Bukan Kayu</i> | 1 hektare | 2.400.000.000 | |
| | 3.28.03.1.06.03 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi | 1 Unit Managemen | 2.400.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| 3 | 3.28.04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | <i>Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola Penurunan Emisi GRK berbasis hutan di KBEP dan Konservasi Provinsi</i> | 545726 hektare 0,68 juta ton CO2e | 100.000.000 | |
| | 3.28.04.1.03 | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | <i>Luas KBEP yang dikelola</i> | 1 hektare | 100.000.000 | |
| | 3.28.04.1.03.04 | Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah | Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani | 50 Ha | 100.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|---|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | <i>Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Penurunan Emisi GRK berbasis hutan dari Perhutanan Sosial (Juta Ton CO2e)</i> | 20 Kelompok 20000 hektare 0,13 juta ton CO2e | 4.507.766.622 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | <i>Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat</i> | 1 Kelompok | 4.507.766.622 | |
| | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 10 Orang | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 1000 Ha | 4.257.766.622 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 3.753.654.000 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 203.520.000 | |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 148.800.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 54.720.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 54.720.000 | |
| | 3.28.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 54.720.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 226.950.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 105.750.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 121.200.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 838.164.300 | |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 11.100.900 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 60.463.400 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 34 Paket | 120.819.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 51.359.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 594.422.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 324.060.500 | |
| | 3.28.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 324.060.500 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 990.262.800 | |
| | 3.28.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 13.336.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 103.356.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 873.570.800 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.115.976.400 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit | 495.813.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 620.163.400 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | - | 9.106.385.000 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | 2.878.343.500 | |
| | 3.28.03.1.01.02 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok | 1 Unit | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 5 Unit | 2.678.343.500 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | 340.044.000 | |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 340.044.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | 707.997.500 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.03.01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | 1 Dokumen | 107.997.500 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 13 Dokumen | 600.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | 2.150.000.000 | |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 115 Ha | 1.900.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.03.1.04.08 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | 1 Laporan | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | - | - | 2.830.000.000 | |
| | 3.28.03.1.05.02 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 554253 Ha | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 13 Dokumen | 1.040.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 15 Laporan | 1.540.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.03.1.07 | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | 200.000.000 | |
| | 3.28.03.1.07.02 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi | 15 Dokumen | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| 3 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | 2.459.274.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | 2.459.274.000 | |
| | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 10 Orang | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 10 Kelompok | 659.274.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 1000 Ha | 1.550.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>m</i> | - | 3.481.254.000 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 377.600.000 | |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 140.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 237.600.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 76.200.000 | |
| | 3.28.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 76.200.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 297.000.000 | |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 42.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.01.1.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 105.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 12 Orang | 150.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.175.454.000 | |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 10.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 350.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | 40.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 28.654.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 746.800.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 350.000.000 | |
| | 3.28.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 350.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 780.000.000 | |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 95.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 685.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 425.000.000 | |
| | 3.28.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 Unit | 150.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 25.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | - | 9.200.748.000 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | 3.072.400.000 | |
| | 3.28.03.1.01.02 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok | 1 Unit | 270.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 2 Unit | 2.572.400.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.03.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi | 1 Dokumen | 230.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | 450.000.000 | |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen | 450.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | - | 900.000.000 | |
| | 3.28.03.1.03.01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | 1 Dokumen | 500.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 2 Dokumen | 400.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | - | - | 3.014.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.04.01 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 65 Ha | 2.310.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.03.1.04.08 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | 3 Laporan | 454.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | 1.764.348.000 | |
| | 3.28.03.1.05.02 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 410738.46 Ha | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 3 Dokumen | 340.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 5 Laporan | 1.174.348.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| 3 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | 1.882.508.000 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | 1.882.508.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 4 Orang | 196.508.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 5 Kelompok | 706.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 1000 Ha | 980.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 90 % 81 - | 6.050.434.000 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i> | 12 Laporan | 255.720.000 | |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3 Dokumen | 148.800.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 106.920.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i> | 12 Laporan | 43.920.000 | |
| | 3.28.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 43.920.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i> | 12 Laporan | 226.864.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 32.944.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 4 Dokumen | 43.920.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 60 Orang | 150.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 12 Bulan | 414.700.000 | |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 10.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 46.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 35.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 18.700.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 5.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 300.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</i> | 27 Unit | 3.100.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 500.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Paket | 300.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 300.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2.000.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 12 Bulan | 1.360.000.000 | |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 160.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 1.200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Unit barang yang dipelihara</i> | 62 Unit | 649.230.000 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 Unit | 170.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 20.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 459.230.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | <i>Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan Presentase Luas Lahan yang direhabilitasi</i> | 1 % 1,45 juta ton CO2e 0,47 % | 7.452.544.838 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | <i>Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun</i> | 1 Dokumen | 2.038.355.838 | |
| | 3.28.03.1.01.02 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok | 2 Unit | 350.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 4 Unit | 1.688.355.838 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | <i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i> | 2 Dokumen | 200.000.000 | |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 Dokumen | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | <i>Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan</i> | 96298 hektare | 470.000.000 | |
| | 3.28.03.1.03.01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | 2 Dokumen | 300.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 2 Dokumen | 170.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | <i>Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara</i> | 55 hektare | 2.744.189.000 | |
| | 3.28.03.1.04.01 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 2 Dokumen | 150.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 50 Ha | 2.394.189.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|---|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.04.08 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | 4 Laporan | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | <i>Luas Kerusakan Kawasan Hutan</i> | 200 hektare | 2.000.000.000 | |
| | 3.28.03.1.05.02 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 249.964.69 Ha | 600.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 8 Dokumen | 300.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 10 Laporan | 1.100.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| 3 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | <i>Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Penurunan Emisi GRK berbasis hutan dari Perhutanan Sosial (Juta Ton CO2e) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</i> | 20000 hektare 0,13 juta ton CO2e 20 kelompok | 1.350.000.000 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | <i>Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat</i> | 3 Kelompok | 1.350.000.000 | |
| | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 10 Orang | 100.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 3 Kelompok | 150.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 2000 Ha | 1.100.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 3.652.271.100 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 254.760.000 | |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 149.760.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 105.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 218.526.000 | |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 105 Paket | 88.926.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 129.600.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.084.571.740 | |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 20.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 14 Paket | 240.332.740 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 8.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 23.899.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 792.340.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 239.712.300 | |
| | 3.28.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 31 Unit | 239.712.300 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.210.406.660 | |
| | 3.28.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 10.223.500 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 263.121.600 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 63.500.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 873.561.560 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 644.294.400 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 41 Unit | 377.294.400 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 67.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | - | - | 10.762.788.921 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | | | 8.212.788.921 | |
| | 3.28.03.1.01.02 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok | 1 Unit | 425.500.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 15 Unit | 7.787.288.921 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | | | 550.000.000 | |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 Dokumen | 550.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | - | | 150.000.000 | |
| | 3.28.03.1.03.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung | 1 Dokumen | 150.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | 1.300.000.000 | |
| | 3.28.03.1.05.02 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 100000 Ha | 500.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 12 Dokumen | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 12 Laporan | 550.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.03.1.09 | Perbenihan Tanaman Hutan | - | - | 550.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.09.01 | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar | Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi | 1 Unit Usaha | 550.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| 3 | 3.28.04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | | | 100.000.000 | |
| | 3.28.04.1.02 | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | 100.000.000 | |
| | 3.28.04.1.02.01 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | 1 Laporan | 100.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| 4 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | 600.000.000 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | 600.000.000 | |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 2 Kelompok | 400.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 1500 Ha | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| 5 | 3.28.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | - | - | 561.000.000 | |
| | 3.28.06.1.01 | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | 561.000.000 | |
| | 3.28.06.1.01.02 | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS | 2 Dokumen | 561.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
| | | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3,28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| 1 | 3.28.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</i> | 81 -90 % | 3.623.854.000 | |
| | 3.28.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen / Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 12 Dokumen | 294.560.000 | |
| | 3.28.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 137.160.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 24 Laporan | 157.400.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i> | 12 laporan | 216.000.000 | |
| | 3.28.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 216.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 12 laporan | 689.471.600 | |
| | 3.28.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 187.471.600 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.01.1.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 2 Dokumen | 184.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 62 Orang | 318.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 12 laporan | 950.830.000 | |
| | 3.28.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 20.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 180.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 75.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 44.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | 631.830.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 1 unit | 250.000.000 | |
| | 3.28.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 250.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 12 laporan | 887.992.400 | |
| | 3.28.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 60.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 198.368.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 629.624.400 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 51 unit | 335.000.000 | |
| | 3.28.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 Unit | 200.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 33 Unit | 25.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 70.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 40.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| 2 | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | <i>Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi</i> | 1,45 juta ton CO2e 1 % 0,47 % | 10.148.236.950 | |
| | 3.28.03.1.01 | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | <i>Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun</i> | 20 Dokumen | 3.304.236.950 | |
| | 3.28.03.1.01.02 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok | 2 Unit | 600.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.03.1.01.03 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH | Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun | 35 Unit | 2.704.236.950 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | <i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i> | 20 Dokumen | 675.000.000 | |
| | 3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 Dokumen | 675.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | <i>Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan</i> | 5.153.407,17 hektar | 1.870.000.000 | |
| | 3.28.03.1.03.02 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala | 3 Dokumen | 720.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|---|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.03.1.03.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung | 3 Dokumen | 1.150.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | <i>Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara</i> | 1.200 hektar | 2.500.000.000 | |
| | 3.28.03.1.04.01 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 1 Dokumen | 150.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 50 Ha | 1.950.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.03.1.04.08 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | 1 Laporan | 400.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | <i>Luas Kerusakan Kawasan Hutan</i> | 7.497.170,18 hektar | 1.799.000.000 | |
| | 3.28.03.1.05.01 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 1000 Ha | 299.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 6 Dokumen | 500.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 10 Laporan | 1.000.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| 3 | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | <i>Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Penurunan Emisi GRK berbasis hutan dari Perhutanan Sosial (Juta Ton CO2e)</i> | 20 kelompok 20.000 hektar 0,13 juta ton CO2e | 1.443.648.200 | |
| | 3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | <i>Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat</i> | 90 kelompok | 1.443.648.200 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 2 Orang | 400.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 4 Kelompok | 473.648.200 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | 3.28.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial | 1000 Ha | 570.000.000 | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| | | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | |
| 1 | 3.29.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>m</i> | - | 32.122.000.000 | |
| | 3.29.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | 1.560.000.000 | |
| | 3.29.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 500.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 10.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 10.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 10.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 10.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 20.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Laporan | 1.000.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.29.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 16.600.000.000 | |
| | 3.29.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 73 Orang/ Bulan | 16.000.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 600.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 400.000.000 | |
| | 3.29.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 150.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 40 Orang | 250.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.772.000.000 | |
| | 3.29.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 35.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 80.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 20.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 30.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 25.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 6 Paket | 7.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 75.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 Laporan | 1.500.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 130.000.000 | |
| | 3.29.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 65.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.29.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 65.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.775.000.000 | |
| | 3.29.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 25.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 250.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 3.500.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 7.885.000.000 | |
| | 3.29.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit | 275.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 11 Unit | 110.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 7.500.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 2 | 3.29.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN | - | - | 3.020.000.000 | |
| | 3.29.02.1.01 | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | ~ | - | 2.195.000.000 | |
| | 3.29.02.1.01.01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.02.1.01.02 | Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi | 3 Dokumen | 95.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.02.1.01.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 0 Laporan | 1.100.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.02.1.03 | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | - | - | 825.000.000 | |
| | 3.29.02.1.03.01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul | 1 Dokumen | 125.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.29.02.1.03.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 30 Laporan | 700.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 3 | 3.29.03 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | <i>m</i> | - | 2.750.000.000 | |
| | 3.29.03.1.01 | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | 750.000.000 | |
| | 3.29.03.1.01.01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah | 1 Dokumen | 500.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.03.1.01.02 | Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan | 1 Dokumen | 250.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.03.1.03 | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | 1.000.000.000 | |
| | 3.29.03.1.03.05 | Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 40 Laporan | 1.000.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.03.1.07 | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | - | - | 1.000.000.000 | |
| | 3.29.03.1.07.01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah | 20 Dokumen | 300.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.03.1.07.02 | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan | 1 Dokumen | 200.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.03.1.07.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam | 20 Laporan | 500.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 4 | 3.29.05 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | " | - | 6.500.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.29.05.1.01 | Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan | | | 500.000.000 | |
| | 3.29.05.1.01.02 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan | Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan | 10 Dokumen | 500.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.05.1.03 | Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun | | | 6.000.000.000 | |
| | 3.29.05.1.03.02 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | 10 Dokumen | 650.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.05.1.03.04 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun | Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun | 1 Laporan | 5.350.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 5 | 3.29.06 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | " | - | 55.743.953.000 | |
| | 3.29.06.1.01 | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | 1.000.000.000 | |
| | 3.29.06.1.01.02 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | 40 Dokumen | 500.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.06.1.01.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | 40 Laporan | 500.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.06.1.05 | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri | | | 500.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|-----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.29.06.1.05.02 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | 20 Dokumen | 500.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.06.1.06 | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | 54.243.953.000 | |
| | 3.29.06.1.06.03 | Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 1 Laporan | 1.000.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.06.1.06.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 1 Laporan | 300.000.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 3.29.06.1.06.06 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 5 Unit | 52.943.953.000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | |
| 1 | 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 88.5 % | 34.000.000.000 | |
| | 2.17.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu</i> | 29 Dokumen | 1.566.945.160 | |
| | 2.17.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 731.715.710 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 Dokumen | 148.500.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.17.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen | 65.450.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11 Laporan | 446.379.450 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 174.900.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</i> | 75 orang | 17.077.480.000 | |
| | 2.17.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn | 75 Orang/ Bulan | 16.000.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 498.360.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 15.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 265.200.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.17.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 3 Dokumen | 223.520.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan | 75.400.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah</i> | 18 Dokumen | 145.800.000 | |
| | 2.17.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 67.200.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 16 Laporan | 15.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.03.07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 63.600.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi</i> | 189 orang | 1.649.505.000 | |
| | 2.17.01.1.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 224.800.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 286.335.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.17.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 3 Dokumen | 256.450.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | 219.840.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang | 662.080.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 12 Laporan | 3.352.630.540 | |
| | 2.17.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 75.020.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 171.957.400 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 53.660.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 314.562.600 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.17.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 581.125.140 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 23.270.400 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 Laporan | 59.410.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1.883.625.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 190.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 100 paket | 2.350.203.400 | |
| | 2.17.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 500.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Paket | 100.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.17.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 61 Unit | 833.435.400 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 5 Unit | 205.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 500.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 119.056.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 92.712.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 12 kegiatan | 4.829.381.500 | |
| | 2.17.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | 4.722.300 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 1.139.400.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.17.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 3.685.259.200 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 200 Unit | 3.028.054.400 | |
| | 2.17.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | 40.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit | 437.340.400 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 105 Unit | 238.960.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 160 Unit | 171.500.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 49.920.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 1.335.600.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.17.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 661.438.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.01.1.09.12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | 1 Ha | 93.296.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 2 | 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | <i>Jumlah Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat</i> | 20 Koperasi | 1.068.670.000 | |
| | 2.17.03.1.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi</i> | 29,79% | 1.068.670.000 | |
| | 2.17.03.1.01.01 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat | 25 Dokumen | 534.335.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.03.1.01.02 | Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel | Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel | 25 Unit Usaha | 534.335.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 3 | 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | <i>Jumlah Koperasi Modern</i> | 4 Koperasi | 1.965.315.000 | |
| | 2.17.06.1.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</i> | 59,65% | 1.965.315.000 | |
| | 2.17.06.1.01.01 | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha | 30 Unit Usaha | 1.581.095.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.06.1.01.02 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 180 Unit Usaha | 384.220.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 2.17.07 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | <i>Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital</i> | 5% | 968.165.000 | |
| | 2.17.07.1.01 | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | <i>Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra</i> | 7,5% | 968.165.000 | |
| | 2.17.07.1.01.01 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 115 Unit Usaha | 598.180.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.07.1.01.02 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | 150 Orang | 369.985.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 5 | 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | <i>Jumlah UKM Potensial Ekspor</i> | 20 UKM | 2.197.850.000 | |
| | 2.17.08.1.01 | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | <i>Jumlah UKM yang di fasilitasi pendampingan</i> | 455 UKM | 2.197.850.000 | |
| | 2.17.08.1.01.01 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 40 Unit Usaha | 1.713.260.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 2.17.08.1.01.02 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM | Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum | 258 Orang | 484.590.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | |
| 1 | 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | <i>Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu persentase pelaku yang tertib niaga</i> | 100 % 30 % | 406.798.600 | |
| | 3.30.02.1.03 | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar | <i>jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%) jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan</i> | 100 % 9 pelaku usaha | 250.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.30.02.1.03.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission | 1 Dokumen | 100.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.30.02.1.03.03 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | 3 Laporan | 150.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.30.02.1.04 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | <i>Jumlah Eksporir yang Aktif Menggunakan SKA</i> | 260 Eksporir | 156.798.600 | |
| | 3.30.02.1.04.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal | 3800 Dokumen | 156.798.600 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 2 | 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | <i>terbentuknya food station</i> | % 100 | 500.000.000 | |
| | 3.30.03.1.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | <i>jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station</i> | 5 kegiatan | 500.000.000 | |
| | 3.30.03.1.01.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | 5 Unit | 500.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 3 | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | <i>Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk</i> | 16 % 85 % | 1.245.000.000 | |
| | 3.30.04.1.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi | <i>persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag</i> | 100% | 420.000.000 | |
| | 3.30.04.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | 240 Laporan | 320.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.30.04.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | 48 laporan | 100.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.30.04.1.02 | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | <i>persentase komoditi bapokting yang di pantau</i> | 74% | 575.000.000 | |
| | 3.30.04.1.02.01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 375.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.30.04.1.02.02 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 14 Laporan | 200.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.30.04.1.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | <i>Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</i> | 10 Laporan | 250.000.000 | |
| | 3.30.04.1.03.03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 5 Laporan | 200.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.30.04.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida | 5 Laporan | 50.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 4 | 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | <i>persentase keberhasilan produk potensial ekspor menembus pasar ekspor</i> | 2% | 1.570.000.000 | |
| | 3.30.05.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | <i>jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir</i> | 10 Pelaku Usaha | 1.570.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.30.05.1.01.01 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 3 Pelaku Usaha | 350.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.30.05.1.01.02 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal | 4 Pelaku Usaha | 250.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.30.05.1.01.03 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | 5 Pelaku Usaha | 260.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.30.05.1.01.04 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi | 10 Produk | 360.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.30.05.1.01.05 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina | 20 Pelaku Usaha | 350.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 5 | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | <i>Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan'</i> | 77% | 5.000.000.000 | |
| | 3.30.06.1.01 | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | <i>jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi</i> | 1000 orang | 3.669.145.260 | |
| | 3.30.06.1.01.01 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif | 3 BPSK | 1.819.145.260 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.30.06.1.01.02 | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen | Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif | 1 LPKSM | 450.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.30.06.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani | 15 Pengaduan | 1.400.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.30.06.1.03 | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan</i> | 5% | 1.330.854.740 | |
| | 3.30.06.1.03.01 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi | 3 Laporan | 1.330.854.740 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 6 | 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | <i>jumlah jenis produk dalam negeri yang berhasil masuk pasar</i> | 3 pondok | 1.078.201.400 | |
| | 3.30.07.1.01 | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | - | - | 278.384.300 | |
| | 3.30.07.1.01.01 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh uMkM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri | 6 UMKM | 278.384.300 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.30.07.1.02 | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | <i>Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang</i> | 13.51 % | 349.817.100 | |
| | 3.30.07.1.02.01 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh uMkM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | 10 UMKM | 349.817.100 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.30.07.1.03 | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | <i>jumlah yang di sosialisasi</i> | 800 orang | 450.000.000 | |
| | 3.30.07.1.03.02 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 7 Laporan | 450.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3,31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | |
| 1 | 3.31.02 | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | <i>Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara</i> | 5.20 % | 2.820.000.000 | |
| | 3.31.02.1.01 | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | <i>Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi</i> | 4 Dokumen | 2.820.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.31.02.1.01.01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | 150.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.31.02.1.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 3 Dokumen | 300.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.31.02.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 Dokumen | 120.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.31.02.1.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 10 Dokumen | 400.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.31.02.1.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 7 Dokumen | 1.700.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.31.02.1.01.06 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | 150.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 2 | 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | <i>Persentase Peningkatan Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri</i> | 5% | 680.000.000 | |
| | 3.31.03.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | <i>Presentase jumlah hasil pemantauan</i> | 25% | 680.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.31.03.1.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 0 | 0 | 200.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.31.03.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi | 2 Dokumen | 480.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 3 | 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | <i>Persentase Peningkatan Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas</i> | 32% | 500.000.000 | |
| | 3.31.04.1.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | <i>Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS</i> | 3 industri | 500.000.000 | |
| | 3.31.04.1.01.01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 1 Dokumen | 150.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.31.04.1.01.02 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | 1 Dokumen | 100.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | 3.31.04.1.01.03 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | 2 Dokumen | 250.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| | | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| | 3,30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | |
| 1 | 3.30.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 3.002.800.000 | |
| | 3.30.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan</i> | 100% | 88.540.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.30.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 13 Dokumen | 88.540.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek</i> | 20 Orang | 206.000.000 | |
| | 3.30.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 26.000.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | 180.000.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 12 Bulan | 595.414.320 | |
| | 3.30.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 12.000.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 43.500.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 24 Paket | 57.000.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 11 Paket | 46.581.200 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 2.133.120 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 19.200.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.30.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 14 Laporan | 415.000.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop</i> | 10 Unit | 70.000.000 | |
| | 3.30.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | - | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 70.000.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop</i> | 12 Bulan | 1.790.631.680 | |
| | 3.30.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 10.000.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 14 Laporan | 189.000.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.591.631.680 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop</i> | 12 Bulan | 252.214.000 | |
| | 3.30.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 75.000.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 135.000.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 42.214.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | <i>nilai mutu dari rata-rata capaian IKM Layanan UPTD BPSMB</i> | A indeks | 1.797.200.000 | |
| | 3.30.06.1.02 | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | <i>persentase capaian penerbitan sertifikat layanan</i> | 100% | 1.797.200.000 | |
| | 3.30.06.1.02.01 | Verifikasi Mutu Produk | Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau | 5 Komoditi | 133.000.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.06.1.02.02 | Pengembangan Layanan Pengujian | Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang | 165 Dokumen | 528.000.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.06.1.02.03 | Pengembangan Layanan Sertifikasi | Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan | 1 Sertifikat | 347.100.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | 3.30.06.1.02.04 | Pengembangan Layanan Kalibrasi | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan | 2400 Sertifikat | 789.100.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |
| | | UPTD PELATIHAN KOPERASI | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | 2,17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | |
| 1 | 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | - | 3.500.000.000 | |
| | 2.17.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun</i> | 12 Dokumen | 90.000.000 | |
| | 2.17.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 90.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah Pegawai yang dilayani</i> | 12 Dokumen | 145.000.000 | |
| | 2.17.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 31 Paket | 60.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 12 Orang | 85.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.17.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 12 Bulan | 492.000.000 | |
| | 2.17.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 25.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 70 Paket | 70.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 30.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 25.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 40.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 2.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 24 Paket | 100.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | 200.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 12 Dokumen | 400.000.000 | |
| | 2.17.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 150.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 250.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 12 Dokumen | 1.570.000.000 | |
| | 2.17.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50 Laporan | 5.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 220.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 45.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.17.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.300.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 12 Bulan | 803.000.000 | |
| | 2.17.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 15.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 30.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 15 Unit | 25.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | 33.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | 450.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | 2.17.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 250.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| 2 | 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | - | - | 850.000.000 | |
| | 2.17.05.1.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan</i> | 210 Koperasi | 850.000.000 | |
| | 2.17.05.1.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 210 Orang | 850.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| 3 | 2.17.07 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | 850.000.000 | |
| | 2.17.07.1.01 | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | <i>Jumlah Pelaku UKM yang Mengikuti Pelatihan</i> | 450 UKM | 850.000.000 | |
| | 2.17.07.1.01.02 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | 450 Orang | 850.000.000 | UPTD PELATIHAN KOPERASI |
| | | BIRO UMUM | | | | |
| | 4 | UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4,01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| 1 | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan terhadap Pelayanan Biro Umum Sekretariat Daerah Prov Kaltim</i> | 84 Indeks | 228.986.724.000 | |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik</i> | 100% | 82.450.665.774 | |
| | 4.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 373 Orang/Bulan | 80.932.238.274 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 1.518.427.500 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah</i> | 100% | 1.165.320.000 | |
| | 4.01.01.1.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 522.000.000 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 643.320.000 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum</i> | 100% | 3.241.204.800 | |
| | 4.01.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 9 Paket | 1.021.980.000 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4 Dokumen | 1.331.568.000 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 135 Orang | 887.656.800 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum</i> | 100% | 40.261.914.550 | |
| | 4.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 270.249.500 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 497.466.100 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 415 Paket | 20.085.758.000 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 14 Paket | 733.290.000 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 1.265.361.000 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1920 Laporan | 16.937.196.650 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 Dokumen | 210.828.800 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 4 Dokumen | 261.764.500 | BIRO UMUM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah</i> | 100% | 23.080.078.849 | |
| | 4.01.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 20 Unit | 8.440.470.000 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 20 Unit | 7.630.000.000 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 150 Unit | 7.009.608.849 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah</i> | 100% | 26.808.206.440 | |
| | 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 83.700.000 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 9.774.001.000 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 2.659.168.400 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 14.291.337.040 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah</i> | 100% | 27.989.971.045 | |
| | 4.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 200 Unit | 7.241.459.200 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 447 Unit | 856.184.000 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 Unit | 19.660.077.845 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 325 Unit | 232.250.000 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | <i>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> | 100% | 6.688.989.842 | |
| | 4.01.01.1.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 Orang/Bulan | 125.126.116 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.11.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 4 Paket | 94.738.000 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.11.03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 4 Orang | 435.000.000 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.11.04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 Orang/Bulan | 6.034.125.726 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | <i>Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i> | 100% | 17.300.372.700 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.01.01.1.12.01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 17 Paket | 7.534.010.900 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 8 Paket | 2.640.703.500 | BIRO UMUM |
| | 4.01.01.1.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 28 Paket | 7.125.658.300 | BIRO UMUM |
| | | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | | | | |
| | 4 | UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 4,01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| 1 | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 18.170.682.000 | |
| | 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | 849.152.500 | |
| | 4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9 Dokumen | 563.940.000 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 285.212.500 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 514.441.000 | |
| | 4.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 514.441.000 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 434.507.900 | |
| | 4.01.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2 Dokumen | 309.668.000 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | 124.839.900 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.702.754.287 | |
| | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 150 Paket | 282.099.853 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 50 Paket | 82.882.800 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 15 Paket | 12.049.491 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 Laporan | 1.325.722.143 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 621.716.450 | |
| | 4.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 621.716.450 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.909.113.700 | |
| | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 29.489.220 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.879.624.480 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 61.406.550 | |
| | 4.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit | 51.019.750 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | 10.386.800 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.13 | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | - | - | 9.727.598.013 | |
| | 4.01.01.1.13.01 | Penyiapan Materi Pimpinan | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan | 12 Dokumen | 558.383.600 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.13.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 12 Laporan | 4.648.067.213 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.13.03 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | 12 Laporan | 4.521.147.200 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.14 | Fasilitasi Keprotokolan | - | - | 2.349.991.600 | |
| | 4.01.01.1.14.01 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 4 Laporan | 1.445.160.800 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.14.02 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Laporan | 600.880.800 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.1.14.03 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 2 Laporan | 303.950.000 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | BIRO HUKUM | | | | |
| | 4 | UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 4,01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| 1 | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | - | 1.777.098.880 | |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 103.920.000 | |
| | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 103.920.000 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 7.680.000 | |
| | 4.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 7.680.000 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 25.000.000 | |
| | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 25.000.000 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 859.006.436 | |
| | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | 129.130.100 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 15 Paket | 20.000.000 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | 709.876.336 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 134.693.884 | |
| | 4.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 134.693.884 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 626.798.560 | |
| | 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 5.000.000 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 621.798.560 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 20.000.000 | |
| | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 20.000.000 | BIRO HUKUM |
| 2 | 4.01.05 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | - | - | 4.475.079.120 | |
| | 4.01.05.1.01 | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | - | - | 2.675.079.120 | |
| | 4.01.05.1.01.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun | 10 Dokumen | 829.954.400 | BIRO HUKUM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.01.05.1.01.02 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun | 750 Dokumen | 300.000.000 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.01.03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya | 1000 Dokumen | 684.715.720 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.01.04 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi | 350 Dokumen | 860.409.000 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | - | - | 1.800.000.000 | |
| | 4.01.05.1.02.01 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan | 10 Kasus | 1.200.000.000 | BIRO HUKUM |
| | 4.01.05.1.02.02 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan | 25 Kasus | 600.000.000 | BIRO HUKUM |
| | | BIRO ORGANISASI | | | | |
| | 4 | UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 4,01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| 1 | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</i> | 82 Poin 100 % | 2.088.046.000 | |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase realisasi anggaran</i> | 100% | 115.440.200 | |
| | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 115.440.200 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i> | 100% | 10.230.000 | |
| | 4.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 10.230.000 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah</i> | 100% | 85.217.500 | |
| | 4.01.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 60.217.500 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | 25.000.000 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 90% | 1.185.674.800 | |
| | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 37.473.800 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 278.350.000 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 16.500.000 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 47.700.000 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 707.250.000 | BIRO ORGANISASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.01.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 98.401.000 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</i> | 100% | 191.559.000 | |
| | 4.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | 191.559.000 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu</i> | 100% | 419.330.500 | |
| | 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1.000.000 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 418.330.500 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i> | 100% | 80.594.000 | |
| | 4.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 Unit | 61.812.000 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 21 Unit | 18.782.000 | BIRO ORGANISASI |
| 2 | 4.01.02 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | <i>Indeks Kelembagaan Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)</i> | 72 Poin 70 % 44 Poin 85 % | 5.400.000.000 | |
| | 4.01.02.1.01 | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | <i>Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan</i> | 100 % 100 % | 2.200.000.000 | |
| | 4.01.02.1.01.01 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 750.000.000 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.01.02 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 700.000.000 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.01.03 | Penataan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan | 2 Dokumen | 750.000.000 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02 | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | <i>Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</i> | 100 % 90 % | 3.200.000.000 | |
| | 4.01.02.1.02.01 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 1 Dokumen | 900.000.000 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.02 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 3 Dokumen | 900.000.000 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.03 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | 1 Laporan | 300.000.000 | BIRO ORGANISASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.01.02.1.02.04 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan | 3 Dokumen | 500.000.000 | BIRO ORGANISASI |
| | 4.01.02.1.02.05 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | 3 Dokumen | 600.000.000 | BIRO ORGANISASI |
| | | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | | |
| | 4 | UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 4,01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| 1 | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 4.179.414.720 | |
| | 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | 48.700.000 | |
| | 4.01.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 24.350.000 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 24.350.000 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 151.800.000 | |
| | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 Dokumen | 151.800.000 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 79.891.500 | |
| | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang | 79.891.500 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.530.000.000 | |
| | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 80.000.000 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 50.000.000 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | 2.400.000.000 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 499.690.500 | |
| | 4.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 29 Unit | 499.690.500 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 799.832.720 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 800 Laporan | 8.000.000 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 791.832.720 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 69.500.000 | |
| | 4.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit | 9.500.000 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | 60.000.000 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| 2 | 4.01.03 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | - | - | 8.828.849.280 | |
| | 4.01.03.1.01 | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | - | - | 2.863.504.480 | |
| | 4.01.03.1.01.02 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 3 Dokumen | 2.277.983.960 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.01.03 | Fasilitasi Penataan Wilayah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah | 3 Dokumen | 585.520.520 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.02 | Pelaksanaan Otonomi Daerah | - | - | 3.865.344.800 | |
| | 4.01.03.1.02.01 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | 3 Dokumen | 800.000.000 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.02.02 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan | 4 Dokumen | 2.300.000.000 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.02.03 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 3 Laporan | 765.344.800 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.03 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | - | - | 2.100.000.000 | |
| | 4.01.03.1.03.01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi | 30 Dokumen | 962.000.000 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.03.02 | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi | 30 Dokumen | 464.000.000 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| | 4.01.03.1.03.03 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi | 3 Laporan | 674.000.000 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | |
| | 4 | UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 4,01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| 1 | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP URUSAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT</i> | 83% | 2.505.746.000 | |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Realisasi Keuangan</i> | 93% | 321.000.000 | |
| | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 302.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 19.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu</i> | 100% | 37.000.000 | |
| | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | 37.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum</i> | 12 bulan | 1.105.266.000 | |
| | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 150.266.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 57.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 898.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang</i> | 12 bulan | 922.480.000 | |
| | 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 20.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12.480.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 890.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100% | 120.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | 85.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 18 Unit | 35.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 2 | 4.01.04 | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | <i>Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi</i> | 100% | 5.850.000.000 | |
| | 4.01.04.1.01 | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | <i>Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang disiapkan</i> | 100% | 1.750.000.000 | |
| | 4.01.04.1.01.01 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola | 25 Unit | 950.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.01.02 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi | 10 Lembaga | 800.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.02 | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | <i>Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar</i> | 100% | 2.100.000.000 | |
| | 4.01.04.1.02.01 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 12 Dokumen | 700.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.02.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | 12 Dokumen | 700.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.02.03 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | 12 Dokumen | 700.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.03 | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | <i>Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar</i> | 100% | 2.000.000.000 | |
| | 4.01.04.1.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | 12 Dokumen | 650.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.03.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 12 Dokumen | 700.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.04.1.03.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | 12 Dokumen | 650.000.000 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | BIRO PEREKONOMIAN | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4 | UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 4,01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| 1 | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</i> | 90% | 2.495.711.527 | |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Realisasi Keuangan</i> | 95% | 126.054.000 | |
| | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3 Dokumen | 126.054.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah</i> | 100% | 70.667.500 | |
| | 4.01.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 41 Paket | 20.000.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 25 Dokumen | 18.000.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | 32.667.500 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah</i> | 100% | 1.123.183.362 | |
| | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 50 Paket | 50.000.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 25 Paket | 45.300.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 18.016.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 96 Dokumen | 7.756.800 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 1.002.110.562 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 100% | 234.275.200 | |
| | 4.01.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Paket | 36.075.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 14 Unit | 198.200.200 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100% | 842.112.465 | |
| | 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 4.200.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 837.912.465 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik</i> | 100% | 99.419.000 | |
| | 4.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 53.709.000 | BIRO PEREKONOMIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | 18.250.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.01.1.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 27.460.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| 2 | 4.01.06 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | <i>Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang Difasilitasi Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian</i> | 100 % 90 % | 14.945.769.473 | |
| | 4.01.06.1.01 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | <i>Persentase Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Mikro</i> | 100% | 1.595.000.000 | |
| | 4.01.06.1.01.01 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | 3 Dokumen | 1.200.000.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.01.02 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | 3 Dokumen | 395.000.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.02 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | <i>Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i> | 100% | 11.542.769.473 | |
| | 4.01.06.1.02.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 5 Dokumen | 10.744.369.473 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.02.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 2 Dokumen | 400.000.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.02.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 2 Dokumen | 398.400.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.03 | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | <i>Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i> | 100% | 1.808.000.000 | |
| | 4.01.06.1.03.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 10 Dokumen | 1.000.000.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.03.02 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 1 Dokumen | 363.000.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | 4.01.06.1.03.04 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | 1 Dokumen | 445.000.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | |
| | 4 | UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 4,01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| 1 | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>m</i> | - | 5.800.000.000 | |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 260.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 260.000.000 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 145.377.520 | |
| | 4.01.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 80.000.000 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang | 50.000.000 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang | 15.377.520 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 3.530.000.000 | |
| | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 20.000.000 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 10.000.000 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 3.500.000.000 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 100.000.000 | |
| | 4.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 100.000.000 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.631.105.480 | |
| | 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 2.000.000 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 208.359.800 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1.420.745.680 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 133.517.000 | |
| | 4.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 11.499.000 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | 102.018.000 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 20.000.000 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| 2 | 4.01.08 | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | <i>m</i> | - | 6.700.000.000 | |
| | 4.01.08.1.01 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | - | - | 4.500.000.000 | |
| | 4.01.08.1.01.01 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | 4 Laporan | 600.000.000 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.08.1.01.02 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | 4 Laporan | 600.000.000 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.08.1.01.03 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 6 Laporan | 3.300.000.000 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.08.1.02 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | - | - | 2.200.000.000 | |
| | 4.01.08.1.02.01 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan | 1 Dokumen | 600.000.000 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.08.1.02.02 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1 Laporan | 1.000.000.000 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.08.1.02.03 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 600.000.000 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | |
| | 4 | UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 4,01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| 1 | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Biro PBJ yang ditindaklanjuti</i> | 90% | 2.833.969.100 | |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan</i> | 85% | 134.278.000 | |
| | 4.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 134.278.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi</i> | 50% | 222.220.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.01.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 71.040.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 85.780.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | 65.400.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan</i> | 80% | 785.000.000 | |
| | 4.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 90.000.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 45.000.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | 650.000.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Presentase prasarana kantor yang terpenuhi</i> | 85% | 165.345.465 | |
| | 4.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 40 Unit | 165.345.465 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Meningatnya pelayanan Administarsi Umum</i> | 80% | 1.466.427.635 | |
| | 4.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 5.222.400 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 82.470.700 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.378.734.535 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 80% | 60.698.000 | |
| | 4.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 13.499.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 13.499.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | 33.700.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| 2 | 4.01.07 | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | <i>Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPEJ) Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia</i> | PKP - PBJ Pro Aktif Level 30 % | 7.463.901.900 | |
| | 4.01.07.1.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | <i>Variabel Domain Proses yang dilaksanakan</i> | 4 Variabel | 2.275.962.000 | |
| | 4.01.07.1.01.01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 417.852.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.01.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 879.570.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.01.03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 978.540.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | <i>Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan</i> | 1 Variabel | 2.633.982.900 | |
| | 4.01.07.1.02.01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 1 Laporan | 1.184.267.900 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.02.02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 755.300.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.02.03 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Laporan | 694.415.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | <i>Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan</i> | 4 Variabel | 2.553.957.000 | |
| | 4.01.07.1.03.01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | 250 Orang | 894.522.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.03.02 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Dokumen | 971.875.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4.01.07.1.03.03 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Dokumen | 687.560.000 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | | SEKRETARIAT DPRD | | | | |
| | 4 | UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 4,02 | SEKRETARIAT DPRD | | | | |
| 1 | 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks kualitas layanan kesekretariatan</i> | 85 Nilai Bobot | 157.185.405.334 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i> | 100% | 1.462.737.448 | |
| | 4.02.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 336.828.748 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 132.819.600 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 128.241.600 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 23.106.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 37.224.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 389.563.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 414.954.500 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah</i> | 100% | 15.749.846.719 | |
| | 4.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 980 Orang/Bulan | 13.675.554.669 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 1.040.204.200 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 286.452.250 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 3 Dokumen | 376.051.200 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 371.584.400 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara</i> | 100% | 1.105.384.400 | |
| | 4.02.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 138.660.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 4 Dokumen | 843.124.400 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 123.600.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i> | 100% | 1.742.467.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.02.01.1.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 300 Unit | 66.100.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 195.200.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2 Dokumen | 300.528.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 61.050.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 326.230.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 41 Orang | 347.650.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 Orang | 291.575.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang | 154.134.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</i> | 100% | 4.822.445.400 | |
| | 4.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | 199.735.100 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 1.289.250.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | 1.750.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 296.677.300 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 478.335.500 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 5.200.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 570.912.500 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 3 Dokumen | 232.335.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i> | 100% | 28.929.375.500 | |
| | 4.02.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 4 Unit | 2.908.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 2.263.800.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 1.000.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 70 Unit | 5.957.575.500 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.02.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 16.800.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</i> | 100% | 20.806.714.800 | |
| | 4.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 74.360.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 6.075.760.800 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 105.120.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 14.551.474.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</i> | 100% | 9.072.179.300 | |
| | 4.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 10 Unit | 745.898.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 75 Unit | 1.765.034.200 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1 Unit | 9.750.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1396 Unit | 2.548.407.900 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | 1.862.822.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | 1.760.267.200 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 200.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 180.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | <i>Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</i> | 100% | 54.672.559.567 | |
| | 4.02.01.1.15.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 770 Orang/Bulan | 52.413.607.567 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.15.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 6 Paket | 1.645.460.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.15.03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 55 Orang | 613.492.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.16 | Layanan Administrasi DPRD | <i>Persentase layanan administrasi DPRD</i> | 100% | 18.821.695.200 | |
| | 4.02.01.1.16.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | 4 Dokumen | 860.155.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.16.02 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD | 12 Laporan | 195.108.000 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.02.01.1.16.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 12 Laporan | 11.718.312.200 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.1.16.04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | 4 Paket | 6.048.120.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 2 | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | <i>Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</i> | 83 Indeks 100 % | 197.814.594.666 | |
| | 4.02.02.1.01 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | <i>Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi</i> | 100% | 40.981.684.300 | |
| | 4.02.02.1.01.01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 1 Dokumen | 38.967.200.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.01.02 | Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda | 10 Dokumen | 493.859.200 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.01.03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 3 Dokumen | 656.509.100 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.01.04 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 3 Dokumen | 592.536.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.01.05 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | 271.580.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | <i>Persentase rapat pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi</i> | 100% | 8.098.774.000 | |
| | 4.02.02.1.02.01 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Dokumen | 1.183.880.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.02.02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen | 1.183.360.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.02.03 | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | 2.559.526.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.02.04 | Pembahasan Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD | 1 Dokumen | 2.390.240.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.02.05 | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | 1 Dokumen | 235.036.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.02.06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | 546.732.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | <i>Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi</i> | 100% | 21.458.819.000 | |
| | 4.02.02.1.03.01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 12 Laporan | 3.556.442.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.03.02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 12 Laporan | 4.676.931.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.03.03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 12 Laporan | 3.064.131.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.03.04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 12 Laporan | 3.769.731.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.03.06 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen | 411.360.000 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.02.02.1.03.07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 1 Dokumen | 4.139.712.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.03.08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen | 1.840.512.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | <i>Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapaitas</i> | 100% | 52.105.394.641 | |
| | 4.02.02.1.04.01 | Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | 1 Dokumen | 1.146.420.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.04.02 | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 9 Dokumen | 4.411.780.041 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.04.03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 12 Dokumen | 10.026.654.600 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.04.04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 16 Orang | 1.040.520.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.04.05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 8 Orang | 520.260.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.04.06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 1 Dokumen | 33.346.760.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.04.07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 Dokumen | 1.613.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | <i>Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi</i> | 100% | 28.446.418.000 | |
| | 4.02.02.1.05.01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 48 Laporan | 4.418.400.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.05.02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | 1.010.570.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.05.03 | Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 Dokumen | 23.017.448.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | <i>Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi</i> | 100% | 1.870.919.000 | |
| | 4.02.02.1.06.01 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | 1 Dokumen | 317.536.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.06.02 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Laporan | 1.553.383.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | <i>Persentase kerjasama daerah yang dibahas</i> | 100% | 1.420.554.000 | |
| | 4.02.02.1.07.01 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 4 Dokumen | 431.686.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.07.02 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | 12 Dokumen | 988.868.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | <i>Persentase pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi</i> | 100% | 43.432.031.725 | |
| | 4.02.02.1.08.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 12 Dokumen | 28.443.185.525 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.08.02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 3 Laporan | 59.400.000 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4.02.02.1.08.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 6 Dokumen | 5.670.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.08.04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 12 Dokumen | 393.743.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.1.08.05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | 4 Dokumen | 8.865.703.200 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 5,01 | PERENCANAAN | | | | |
| 1 | 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 80 Indeks | 39.317.496.900 | |
| | 5.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu</i> | 97% | 1.299.953.000 | |
| | 5.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 800.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 48.332.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 48.905.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 167.190.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 235.526.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</i> | 100% | 16.380.921.000 | |
| | 5.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 90 Orang/ Bulan | 15.300.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 1.060.921.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 10.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 10.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu</i> | 3 Dokumen | 265.000.000 | |
| | 5.01.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 15.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 150.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 100.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i> | 100% | 1.875.181.000 | |
| | 5.01.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 700.181.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 50.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 50.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 50.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.05.07 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | 1 Laporan | 25.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 60 Orang | 1.000.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu</i> | 96% | 3.031.033.000 | |
| | 5.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 22 Paket | 100.035.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 182.595.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 100.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 475.919.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 187.368.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 60.116.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 50.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1.500.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 250.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 125.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | 1 Dokumen | 2.210.000.000 | |
| | 5.01.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 50.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1.500.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 Unit | 135.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 500.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 25.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</i> | 100% | 7.388.046.000 | |
| | 5.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 15.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1.612.311.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 5.760.735.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 90% | 6.867.362.900 | |
| | 5.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 50.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 31 Unit | 852.300.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 Unit | 19.200.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 144.448.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 50.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 5.548.914.900 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 Unit | 202.500.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 2 | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | <i>Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti</i> | 100% | 13.088.713.100 | |
| | 5.01.02.1.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | <i>Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu</i> | 3 Dokumen | 6.703.000.000 | |
| | 5.01.02.1.01.01 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.01.03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 2 Berita Acara | 590.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.01.05 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi | 2 Berita Acara | 750.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.01.06 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 2 Dokumen | 4.360.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | <i>Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah</i> | 115 Data dan Informasi | 1.800.000.000 | |
| | 5.01.02.1.02.01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 3 Dokumen | 800.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.01.02.1.02.02 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | 80 Orang | 450.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.02.03 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 40 Orang | 400.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.02.04 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | 1 Buku | 150.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | <i>Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis</i> | 3 Dokumen | 4.585.713.100 | |
| | 5.01.02.1.03.01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 5 Laporan | 2.205.644.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.03.03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 3 Laporan | 1.463.733.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.1.03.04 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi | 3 Dokumen | 916.336.100 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 3 | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | <i>Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Waktu</i> | 100% | 16.137.945.000 | |
| | 5.01.03.1.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | <i>Persentase program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</i> | 100% | 4.810.000.000 | |
| | 5.01.03.1.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 4 Dokumen | 500.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.01.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 10 Laporan | 500.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.01.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 10 Laporan | 610.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 500.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.01.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 4 Dokumen | 1.100.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.01.03.1.01.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 10 Laporan | 600.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.01.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 10 Laporan | 500.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.01.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 2 Laporan | 500.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | <i>Persentase keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD)</i> | 100% | 7.827.945.000 | |
| | 5.01.03.1.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 2 Dokumen | 500.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.02.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 9 Laporan | 180.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.02.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 9 Laporan | 315.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.02.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 2 Laporan | 1.010.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.02.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 400.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.02.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 3 Laporan | 130.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.02.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 3 Laporan | 201.790.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.02.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 0 Laporan | 5.091.155.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | <i>Jumlah Dokumen Koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berkualitas</i> | 4 Dokumen | 3.500.000.000 | |
| | 5.01.03.1.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 4 Dokumen | 1.100.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.03.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 2 Laporan | 500.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|------------------------|--------------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.01.03.1.03.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 2 Laporan | 1.100.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.1.03.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 800.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | BADAN PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 5,02 | KEUANGAN | | | | |
| 1 | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>m</i> | - | 228.482.220.700 | |
| | 5.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | 799.012.500 | |
| | 5.02.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 220.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 16 Dokumen | 64.487.500 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 16 Dokumen | 64.157.500 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 16 Dokumen | 10.147.500 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 16 Dokumen | 7.397.500 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 Laporan | 314.985.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 117.837.500 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 163.872.924.410 | |
| | 5.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn | 309 Orang/ Bulan | 163.645.404.520 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 70.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 19 Laporan | 157.519.890 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 304.964.000 | |
| | 5.02.01.1.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 20 Laporan | 175.164.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 36 Laporan | 129.800.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | - | 1.608.876.500 | |
| | 5.02.01.1.04.01 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 2 Dokumen | 464.244.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.04.02 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 372.212.500 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.04.05 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 3 Laporan | 281.820.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.04.06 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | 3 Dokumen | 254.100.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 4 Laporan | 236.500.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 1.792.348.800 | |
| | 5.02.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 563.200.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 10 Dokumen | 507.548.800 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 70 Orang | 721.600.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 7.908.004.500 | |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 110.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 1.100.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 4.476.884.500 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 72 Dokumen | 21.120.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 63 Laporan | 2.200.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 39.292.339.000 | |
| | 5.02.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 500.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 Paket | 550.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 197 Unit | 4.950.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 29.522.339.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 3.770.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 10.880.653.790 | |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 11.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1.870.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 8.999.653.790 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.023.097.200 | |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 17 Unit | 416.891.200 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 150 Unit | 756.206.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 850.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 2 | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | <i>m</i> | - | 1.485.000.000 | |
| | 5.02.02.1.03 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | - | - | 385.000.000 | |
| | 5.02.02.1.03.05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 4 Dokumen | 385.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.1.05 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | - | 1.100.000.000 | |
| | 5.02.02.1.05.10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | 4 Laporan | 1.100.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 3 | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | <i>m</i> | - | 14.451.099.300 | |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | 14.451.099.300 | |
| | 5.02.04.1.01.01 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 2 Dokumen | 746.577.700 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.1.01.02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Laporan | 719.070.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.1.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 9 Laporan | 1.041.480.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.1.01.06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 13 Laporan | 880.305.800 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.1.01.07 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 3 Dokumen Ketetapan | 1.100.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 2 Laporan | 7.400.800.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.1.01.09 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 4 Dokumen | 271.700.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.04.1.01.11 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti | 4 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan | 163.240.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.1.01.12 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 4 Laporan | 925.760.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.1.01.13 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 3 Laporan | 321.860.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.1.01.14 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 20 Laporan | 880.305.800 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 5,02 | KEUANGAN | | | | |
| 1 | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 8.301.415.400 | |
| | 5.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | 58.080.608 | |
| | 5.02.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 30.360.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | 5.02.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 27.720.608 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | 5.02.01.1.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | - | 69.484.800 | |
| | 5.02.01.1.04.04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 19.958.400 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | 5.02.01.1.04.05 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 4 Laporan | 19.958.400 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 29.568.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | 5.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 29.040.000 | |
| | 5.02.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | 29.040.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 612.343.424 | |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.610.460 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 282.362.740 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 57.372.304 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 2.133.120 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10 Laporan | 262.864.800 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 484.540.760 | |
| | 5.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 104.729.700 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | 5.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 379.811.060 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 6.551.550.258 | |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 3.300.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1.112.829.630 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 5.435.420.628 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 496.375.550 | |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit | 171.283.750 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 150.000.280 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 175.091.520 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| 2 | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | - | - | 668.377.600 | |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | 668.377.600 | |
| | 5.02.04.1.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan | 167.590.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 4 Laporan | 184.706.400 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 84 Dokumen SSPD | 316.081.200 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
| | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 5,02 | KEUANGAN | | | | |
| 1 | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 6.995.810.850 | |
| | 5.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | 23.100.974 | |
| | 5.02.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 13.860.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 9.240.974 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.01.1.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | - | 76.560.000 | |
| | 5.02.01.1.04.04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 28.380.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.01.1.04.05 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 4 Laporan | 19.140.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.01.1.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 29.040.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 38.280.000 | |
| | 5.02.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | 38.280.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 909.810.660 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 6.657.200 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 613.001.620 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 4.266.240 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 14 Laporan | 285.885.600 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 231.462.550 | |
| | 5.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 70.631.660 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 13 Unit | 160.830.890 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.082.098.406 | |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 2.780.910 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1.174.925.620 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 3.904.391.876 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 634.498.260 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit | 432.012.680 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 61 Unit | 92.012.580 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 110.473.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| 2 | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | - | - | 588.767.960 | |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | 588.767.960 | |
| | 5.02.04.1.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan | 174.405.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 4 Laporan | 62.700.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 75 Dokumen SSPD | 351.662.960 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | X | - | | | | |
| | X.XX | - | | | | |
| 1 | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 27.305.190 | |
| | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 27.305.190 | |
| | X.XX.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 27.305.190 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
| | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR | | | | |
| 5 | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5,02 | KEUANGAN | | | | |
| 1 | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>m</i> | - | 4.347.158.000 | |
| | 5.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 45.650.086 | |
| | 5.02.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 22.825.086 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 22.825.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.01.1.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | - | 170.236.000 | |
| | 5.02.01.1.04.04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 66.440.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.01.1.04.05 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 4 Laporan | 50.996.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.01.1.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 52.800.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 48.180.000 | |
| | 5.02.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | 48.180.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 473.140.250 | |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 24.304.500 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 159.183.750 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 34.854.600 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 11.021.120 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 23 Laporan | 243.776.280 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 413.222.150 | |
| | 5.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 107.876.560 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 305.345.590 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.582.194.824 | |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 5.500.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 806.570.160 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 1.770.124.664 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 614.534.690 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit | 308.542.850 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 54 Unit | 139.616.840 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 166.375.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| 2 | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | <i>m</i> | - | 263.835.000 | |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | 263.835.000 | |
| | 5.02.04.1.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan | 147.015.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 4 Laporan | 36.025.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 271 Dokumen SSPD | 80.795.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
| | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 5,02 | KEUANGAN | | | | |
| 1 | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>m</i> | - | 4.297.274.200 | |
| | 5.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | 33.440.865 | |
| | 5.02.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 14.410.865 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 19.030.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.01.1.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | - | 89.760.000 | |
| | 5.02.01.1.04.04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 41.580.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.01.1.04.05 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 4 Laporan | 19.800.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.01.1.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 28.380.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 46.200.000 | |
| | 5.02.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | 46.200.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 475.351.360 | |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 6.600.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 165.946.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 22.242.990 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 3.910.720 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19 Laporan | 276.651.650 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 247.148.300 | |
| | 5.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 74.699.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 172.449.300 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.905.701.219 | |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 5.500.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 633.546.763 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 2.266.654.456 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 499.672.456 | |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit | 252.999.656 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 57 Unit | 81.895.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 164.777.800 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | " | - | 467.266.800 | |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | 467.266.800 | |
| | 5.02.04.1.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan | 192.368.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 4 Laporan | 82.412.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 760 Dokumen SSPD | 192.486.800 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
| | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 5,02 | KEUANGAN | | | | |
| 1 | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>m</i> | - | 6.963.163.000 | |
| | 5.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 19.672.204 | |
| | 5.02.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 9.904.204 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | 5.02.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 9.768.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | 5.02.01.1.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | - | 45.540.000 | |
| | 5.02.01.1.04.04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 25.740.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | 5.02.01.1.04.05 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 4 Laporan | 10.560.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 9.240.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | 5.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 22.440.000 | |
| | 5.02.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | 22.440.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 736.709.820 | |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 6.440.500 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 191.151.620 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 20.102.500 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 11.000.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | 508.015.200 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 494.932.020 | |
| | 5.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 55.000.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | 5.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 13 Unit | 439.932.020 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.587.054.736 | |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 1.650.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1.313.239.400 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 3.272.165.336 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.056.814.220 | |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit | 485.023.220 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 114 Unit | 132.561.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 439.230.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| 2 | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | - | - | 352.627.000 | |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | 352.627.000 | |
| | 5.02.04.1.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan | 42.867.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 4 Laporan | 82.830.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|---|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 103 Dokumen SSPD | 226.930.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
| | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 5,02 | KEUANGAN | | | | |
| 1 | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 4.037.078.000 | |
| | 5.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 29.040.857 | |
| | 5.02.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKpD | 1 Dokumen | 14.520.857 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 14.520.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.01.1.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | - | 27.720.000 | |
| | 5.02.01.1.04.04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 9.240.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.01.1.04.05 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 4 Laporan | 9.240.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.01.1.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 9.240.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 48.840.000 | |
| | 5.02.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | 48.840.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 859.163.690 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 6.868.400 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 312.955.500 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 59.556.750 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 4.266.240 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19 Laporan | 475.516.800 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 215.134.139 | |
| | 5.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 27.500.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 187.634.139 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.335.254.614 | |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 3.300.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 347.124.030 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 1.984.830.584 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 521.924.700 | |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 201.384.700 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 67 Unit | 40.150.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 280.390.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| 2 | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | - | - | 389.774.000 | |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | 389.774.000 | |
| | 5.02.04.1.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan | 117.034.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 4 Laporan | 92.560.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 497 Dokumen SSPD | 180.180.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG |
| | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 5,02 | KEUANGAN | | | | |
| 1 | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 3.879.305.200 | |
| | 5.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | 28.512.827 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 19.008.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | 5.02.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 9.504.827 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | 5.02.01.1.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | - | 42.372.000 | |
| | 5.02.01.1.04.04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 14.124.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | 5.02.01.1.04.05 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 4 Laporan | 14.124.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | 5.02.01.1.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 14.124.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | 5.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 56.100.000 | |
| | 5.02.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | 56.100.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 788.118.043 | |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 15.786.870 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 370.895.633 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 20.441.300 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 4.266.240 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | 376.728.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 76.802.440 | |
| | 5.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 6.022.060 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | 5.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 70.780.380 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.376.870.200 | |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 10.367.500 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 434.047.153 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 1.932.455.547 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 510.529.690 | |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit | 246.723.180 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 48 Unit | 66.180.510 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 197.626.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| 2 | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | - | - | 527.117.800 | |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | 527.117.800 | |
| | 5.02.04.1.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan | 122.320.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 4 Laporan | 121.190.800 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 1272 Dokumen SSPD | 283.607.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
| | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 5,02 | KEUANGAN | | | | |
| 1 | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | - | 3.933.785.000 | |
| | 5.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | 22.880.882 | |
| | 5.02.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 11.440.882 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 11.440.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.01.1.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | - | 27.720.000 | |
| | 5.02.01.1.04.04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 9.240.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.01.1.04.05 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 4 Laporan | 9.240.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.01.1.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 9.240.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 45.540.000 | |
| | 5.02.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | 45.540.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 985.619.800 | |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 17.821.100 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 331.123.980 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 113.919.080 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 2.279.640 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | 520.476.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 77.657.250 | |
| | 5.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 22.657.250 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 55.000.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.311.258.048 | |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 5.456.880 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 666.144.380 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 1.639.656.788 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 463.109.020 | |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit | 181.300.790 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 112 Unit | 67.308.230 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 214.500.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| 2 | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | - | - | 572.902.000 | |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | 572.902.000 | |
| | 5.02.04.1.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan | 181.260.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 4 Laporan | 104.265.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 106 Dokumen SSPD | 287.377.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER |
| | | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 5,02 | KEUANGAN | | | | |
| 1 | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 4.105.216.800 | |
| | 5.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | 45.620.050 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 22.810.450 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 22.809.600 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.01.1.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | - | 109.982.400 | |
| | 5.02.01.1.04.04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 43.989.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.01.1.04.05 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 4 Laporan | 32.993.400 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.01.1.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 33.000.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 44.000.000 | |
| | 5.02.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | 44.000.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 569.252.640 | |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 6.597.800 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 137.500.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 90.548.480 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 3.732.960 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35 Laporan | 330.873.400 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 512.679.420 | |
| | 5.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 77.077.660 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 435.601.760 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.264.849.510 | |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 17.590.760 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 359.878.310 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 1.887.380.440 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 558.832.780 | |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 17 Unit | 195.405.980 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 96 Unit | 82.478.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 280.948.800 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| 2 | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | - | - | 467.491.200 | |
| | 5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | - | 467.491.200 | |
| | 5.02.04.1.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan | 192.500.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 4 Laporan | 82.500.000 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | 5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 598 Dokumen SSPD | 192.491.200 | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU |
| | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 5,02 | KEUANGAN | | | | |
| 1 | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>m</i> | - | 87.999.356.000 | |
| | 5.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | 2.030.000.000 | |
| | 5.02.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen | 700.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 Dokumen | 210.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 Dokumen | 90.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 0 Dokumen | 220.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 0 Dokumen | 110.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan | 350.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Laporan | 350.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 38.019.356.000 | |
| | 5.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/ Bulan | 34.724.356.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 0 Dokumen | 2.000.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 Dokumen | 560.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 0 Dokumen | 120.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 Laporan | 150.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 0 Dokumen | 280.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 0 Laporan | 110.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 Dokumen | 75.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.000.000.000 | |
| | 5.02.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | 1.000.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 2.100.000.000 | |
| | 5.02.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | 300.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 0 Dokumen | 150.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang | 1.350.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 Orang | 300.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 11.950.000.000 | |
| | 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | 250.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | 3.000.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0 Paket | 3.000.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | 500.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 Laporan | 700.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | 2.000.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 0 Dokumen | 2.500.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.600.000.000 | |
| | 5.02.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 1.600.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 1.000.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 12.600.000.000 | |
| | 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | 100.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan | 5.000.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|--------------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | 500.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | 7.000.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 17.700.000.000 | |
| | 5.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 0 Unit | 200.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0 Unit | 1.500.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | 1.000.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 15.000.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 2 | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | <i>m</i> | - | 6.707.422.666.000 | |
| | 5.02.02.1.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | - | - | 8.540.000.000 | |
| | 5.02.02.1.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 0 Dokumen | 200.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 0 Dokumen | 250.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 0 Dokumen | 1.350.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.02.1.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 0 Dokumen | 1.000.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.01.05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi | 0 Dokumen | 160.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.01.06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 0 Dokumen | 160.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 0 Dokumen | 330.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 0 Dokumen | 220.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 0 Dokumen | 270.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.01.11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 0 Dokumen | 4.500.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.01.13 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi | 0 Orang | 100.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.02 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.200.000.000 | |
| | 5.02.02.1.02.02 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | 0 Laporan | 300.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.02.03 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | 0 Laporan | 300.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.02.1.02.04 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 0 Laporan | 400.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.02.06 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan | 0 Laporan | 200.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.03 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | - | - | 6.750.000.000 | |
| | 5.02.02.1.03.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 0 Dokumen | 320.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.03.02 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 0 Laporan | 80.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.03.03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 0 Dokumen | 100.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.03.04 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 0 Dokumen | 100.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.03.05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 0 Dokumen | 1.700.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.03.06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0 Dokumen | 650.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.03.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 0 Laporan | 1.250.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.02.1.03.08 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 0 Dokumen | 350.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.03.09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 0 Dokumen | 650.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.03.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 0 Dokumen | 800.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.03.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 0 Orang | 750.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | - | - | 6.550.000.000 | |
| | 5.02.02.1.04.01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 0 Laporan | 220.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.04.02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 0 Dokumen | 2.000.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.04.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 0 Laporan | 140.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.04.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 0 Laporan | 220.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.04.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | 0 Dokumen | 1.000.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.02.1.04.06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 0 Dokumen | 400.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.04.08 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 0 Dokumen | 270.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.04.09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 0 Dokumen | 250.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.04.10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 0 Dokumen | 200.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.04.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | 0 Orang | 1.300.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.04.12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi | Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina | 0 Lembaga | 550.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.05 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | - | - | 6.682.782.666.000 | |
| | 5.02.02.1.05.02 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah | 0 Laporan | 210.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.05.08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 0 Laporan | 1.300.750.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.05.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 0 Laporan | 793.322.666.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.1.05.10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | 0 Laporan | 4.588.500.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.02.1.06 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | 1.600.000.000 | |
| | 5.02.02.1.06.02 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 0 Dokumen | 1.600.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 3 | 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | " | - | 11.850.000.000 | |
| | 5.02.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | 11.850.000.000 | |
| | 5.02.03.1.01.01 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 0 Dokumen | 850.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.02 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 0 Dokumen | 150.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.03 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 0 Dokumen | 200.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 0 Dokumen | 700.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 0 Laporan | 800.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 0 Laporan | 500.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 0 Laporan | 3.000.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 0 Laporan | 1.000.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.02.03.1.01.09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 0 Laporan | 150.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 0 Dokumen | 3.000.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 0 Laporan | 600.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 0 Laporan | 200.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.1.01.13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 0 Orang | 700.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 5,03 | KEPEGAWAIAN | | | | |
| 1 | 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>m</i> | - | 24.277.000.000 | |
| | 5.03.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | 680.000.000 | |
| | 5.03.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 170.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 510.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 15.400.000.000 | |
| | 5.03.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 85 Orang/ Bulan | 15.400.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 680.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.03.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 600.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 17 Orang | 80.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 2.995.000.000 | |
| | 5.03.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 30 Paket | 1.500.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 30.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Laporan | 1.465.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.922.000.000 | |
| | 5.03.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 22.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 900.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 2.000.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 1.600.000.000 | |
| | 5.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 400.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 1.200.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| 2 | 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - | 17.370.000.000 | |
| | 5.03.02.1.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | - | 3.920.000.000 | |
| | 5.03.02.1.01.02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 2 Dokumen | 300.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.02.1.01.03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 2 Dokumen | 1.200.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.03.02.1.01.06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 1 Dokumen | 500.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.02.1.01.08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Lembaga | 1.400.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.02.1.01.10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 120.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.02.1.01.11 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 1 Dokumen | 400.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.02.1.02 | Mutasi dan Promosi ASN | - | - | 1.410.000.000 | |
| | 5.03.02.1.02.01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah | 2 Dokumen | 400.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.02.1.02.02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 2 Laporan | 360.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.02.1.02.03 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 2 Dokumen | 650.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.02.1.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | - | - | 6.250.000.000 | |
| | 5.03.02.1.03.03 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | 1 Dokumen | 800.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.02.1.03.04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola | 2 Dokumen | 5.000.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.02.1.03.14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 1 Dokumen | 450.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.02.1.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | - | - | 5.790.000.000 | |
| | 5.03.02.1.04.02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Dokumen | 110.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.02.1.04.04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | 130 Orang | 5.000.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.02.1.04.05 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | 350 Orang | 175.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.03.02.1.04.07 | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 1 Orang | 270.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.02.1.04.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 1 Laporan | 115.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | 5.03.02.1.04.09 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | 1 Dokumen | 120.000.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 5,03 | KEPEGAWAIAN | | | | |
| 1 | 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | - | 1.985.000.000 | |
| | 5.03.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 65.000.000 | |
| | 5.03.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 35.000.000 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | 5.03.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 30.000.000 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | 5.03.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 580.000.000 | |
| | 5.03.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 500.000.000 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | 5.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 80.000.000 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | 5.03.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 965.000.000 | |
| | 5.03.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 3.000.000 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | 5.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 162.000.000 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | 5.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 800.000.000 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | 5.03.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | - | 375.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 25.000.000 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | 5.03.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 350.000.000 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| 2 | 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - | 700.000.000 | |
| | 5.03.02.1.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | - | - | 700.000.000 | |
| | 5.03.02.1.03.02 | Pengelolaan Assessment Center | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | 2 Dokumen | 700.000.000 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI |
| | | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 5,04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | |
| 1 | 5.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | - | 31.550.000.000 | |
| | 5.04.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | - | 1.040.040.000 | |
| | 5.04.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen | 650.000.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan | 125.040.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Laporan | 265.000.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 14.977.030.000 | |
| | 5.04.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn | 0 Orang/ Bulan | 14.500.000.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 0 Dokumen | 432.850.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 0 Dokumen | 44.180.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 6.310.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.04.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 Laporan | 6.310.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | - | 45.210.000 | |
| | 5.04.01.1.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 0 Laporan | 45.210.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 507.553.800 | |
| | 5.04.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | 200.839.800 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang | 306.714.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 1.970.825.300 | |
| | 5.04.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 0 Paket | 60.005.500 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | 75.560.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 0 Paket | 316.505.800 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 0 Laporan | 24.040.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 Laporan | 1.336.000.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 0 Dokumen | 8.774.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 Dokumen | 149.940.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.973.426.200 | |
| | 5.04.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Paket | 1.467.394.300 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.04.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 1.506.031.900 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.522.584.890 | |
| | 5.04.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 Laporan | 6.709.200 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan | 1.527.654.690 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan | 1.988.221.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 6.507.019.810 | |
| | 5.04.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 0 Unit | 59.769.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0 Unit | 127.981.600 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | 400.000.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit | 2.083.200.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit | 3.836.069.210 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2 | 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | - | - | 25.000.000.000 | |
| | 5.04.02.1.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | - | - | 7.450.000.000 | |
| | 5.04.02.1.01.03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 1400 Orang | 7.450.000.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | - | - | 17.550.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|---|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.04.02.1.02.01 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, | 10 Dokumen | 300.000.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02.02 | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi | Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi | 3 Dokumen | 300.000.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02.03 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi | 130 Orang | 600.000.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02.04 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | 53 Laporan | 3.000.000.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02.05 | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga | 20 Dokumen | 350.000.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5.04.02.1.02.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 7093 Orang | 13.000.000.000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 5,05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | |
| 1 | 5.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Akuntabilitas Kinerja</i> | 83 Indeks 75 Nilai | 23.765.000.000 | |
| | 5.05.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Program Kegiatan Yang Konsisten Dengan Target Yang di Tetapkan Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</i> | 80% | 375.000.000 | |
| | 5.05.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 50.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 50.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 50.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 50.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.05.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 50.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 21 Laporan | 75.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 50.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan</i> | 0,18% | 10.573.000.000 | |
| | 5.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 45 Orang/ Bulan | 10.500.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 10.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 10.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 3.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 30 Laporan | 50.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah</i> | 20% | 24.000.000 | |
| | 5.05.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 3.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 3.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 3.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 3.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.05.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan</i> | 20% | 355.000.000 | |
| | 5.05.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 160.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 10.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 25 Orang | 125.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 30 Orang | 60.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase pelayanan umum berbasis elektronik</i> | 20% | 2.590.000.000 | |
| | 5.05.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 50.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 50.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 20.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 30.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 90.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 80.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 2.000.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 20.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 250.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi</i> | 30% | 5.903.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.05.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 500.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 1.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 370.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 380.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 4.502.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - | 100.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 50.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi</i> | 100% | 3.290.000.000 | |
| | 5.05.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 30.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 400.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 60.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 13 Laporan | 2.800.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik</i> | 60% | 655.000.000 | |
| | 5.05.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 75.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | 100.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 70 Unit | 140.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.05.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 250.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 40.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 50.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 2 | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | <i>Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran</i> | 4% | 7.235.000.000 | |
| | 5.05.02.1.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | <i>Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota</i> | 2% | 1.193.000.000 | |
| | 5.05.02.1.01.01 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 1 Laporan | 150.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.02 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | 1 Laporan | 150.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.03 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | 1 Laporan | 150.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.04 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | 1 Laporan | 1.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.05 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | 2 Laporan | 110.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.06 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 Laporan | 1.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.07 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa | 1 Laporan | 175.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.08 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa | 1 Laporan | 1.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.09 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa | 1 Laporan | 1.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.10 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa | 1 Laporan | 1.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.05.02.1.01.11 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | 1 Laporan | 250.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola | 1 Dokumen | 1.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.13 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan | 4 Rekomendasi | 200.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.14 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | 1 Laporan | 1.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.01.15 | Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang | Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan | 1 Rekomendasi | 1.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | <i>Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota</i> | 2% | 1.382.000.000 | |
| | 5.05.02.1.02.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 1 Dokumen | 325.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.02.02 | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 Dokumen | 201.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.02.03 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | 2 Dokumen | 350.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.02.04 | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | 1 Dokumen | 1.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.02.05 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | 1 Dokumen | 1.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.02.06 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | 1 Dokumen | 225.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.02.07 | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1 Dokumen | 1.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.02.08 | Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 Dokumen | 1.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.02.09 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | 1 Dokumen | 275.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.05.02.1.02.10 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | 1 Dokumen | 1.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.02.11 | Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi | 1 Dokumen | 1.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | <i>Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota</i> | 2% | 2.100.000.000 | |
| | 5.05.02.1.03.01 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1 Dokumen | 125.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.02 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | 1 Dokumen | 200.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.03 | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | 1 Dokumen | 50.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.04 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 2 Dokumen | 200.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.05 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | 1 Dokumen | 150.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.06 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | 6 Dokumen | 200.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.07 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | 1 Dokumen | 200.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.08 | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | 1 Dokumen | 150.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.09 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | 1 Dokumen | 200.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.10 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | 1 Dokumen | 125.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.11 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1 Dokumen | 200.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.03.12 | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | 1 Dokumen | 200.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|--|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.05.02.1.03.13 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | 1 Dokumen | 100.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | <i>Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota</i> | 11% | 2.560.000.000 | |
| | 5.05.02.1.04.01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 2 Dokumen | 760.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.04.02 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 2 Laporan | 200.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.04.03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 3 Laporan | 1.150.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.04.04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 3 Laporan | 300.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.1.04.05 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 1 Laporan | 150.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 5,07 | PENGELOLAAN PENGHUBUNG | | | | |
| 1 | 5.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 82,5 Poin | 17.564.456.601 | |
| | 5.07.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu</i> | 100% | 613.660.700 | |
| | 5.07.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9 Dokumen | 166.187.400 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 64.220.000 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | 64.220.000 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 55.220.000 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | 55.220.000 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.07.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 208.593.300 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</i> | 100% | 7.254.748.500 | |
| | 5.07.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/ Bulan | 2.965.137.700 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 61 Dokumen | 4.289.610.800 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i> | 74,04% | 572.234.900 | |
| | 5.07.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 337.252.500 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 77 Orang | 234.982.400 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan</i> | 100% | 1.974.143.901 | |
| | 5.07.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 103.686.975 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 16 Paket | 521.580.526 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 92.200.000 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 103.622.900 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 112 Laporan | 1.153.053.500 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</i> | 100% | 1.057.349.500 | |
| | 5.07.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | - | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 35.000.000 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.07.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 23 Unit | 249.800.000 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 91.840.000 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 102 Unit | 680.709.500 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan</i> | 100% | 1.839.142.800 | |
| | 5.07.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 11.560.000 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 62 Laporan | 1.827.582.800 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 90% | 4.253.176.300 | |
| | 5.07.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | 461.047.635 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 43 Unit | 744.804.478 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 733 Unit | 432.905.000 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 11 Unit | 2.614.419.187 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| 2 | 5.07.02 | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | <i>Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Mess Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitasi Promosi dan Informasi Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga</i> | 91,8 Poin 100 % 95 Poin 84 Poin | 4.935.543.399 | |
| | 5.07.02.1.01 | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | <i>Persentase Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan</i> | 100% | 4.935.543.399 | |
| | 5.07.02.1.01.01 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan | 2 Laporan | 876.700.000 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.02.1.01.02 | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat | 3 Laporan | 824.844.410 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5.07.02.1.01.03 | Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan | 2 Laporan | 956.209.789 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.02.1.01.04 | Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | 3 Laporan | 1.728.024.000 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | 5.07.02.1.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 6 Laporan | 549.765.200 | BADAN PENGHUBUNG PROVINSI |
| | | INSPEKTORAT | | | | |
| | 6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | 6,01 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | |
| 1 | 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti</i> | 100% | 43.527.478.000 | |
| | 6.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Predikat Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah</i> | BB Predikat | 1.850.000.000 | |
| | 6.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 250.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 150.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 150.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 350.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 950.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP</i> | 100% | 17.900.000.000 | |
| | 6.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 80 Orang/ Bulan | 17.000.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 650.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 250.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diadministrasikan dengan baik</i> | 100% | 100.000.000 | |
| | 6.01.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 100.000.000 | INSPEKTORAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 6.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat sesuai jenjangnya Persentase ASN Pengawasan yang memiliki Standar Kompetensi</i> | 100 % 100 % | 8.200.000.000 | |
| | 6.01.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 108 Paket | 550.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 85 Orang | 7.400.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 110 Orang | 250.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan</i> | 100% | 2.150.000.000 | |
| | 6.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 150.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 550.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | 150.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 300.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 250.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 Laporan | 750.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah</i> | 100% | 9.900.000.000 | |
| | 6.01.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 1.100.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 122 Paket | 7.000.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 1.250.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 550.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Jasa penunjang urusan pada perangkat daerah yang tersedia</i> | 100% | 2.364.000.000 | |
| | 6.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 14.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 850.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 150.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.350.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik</i> | 100% | 1.063.478.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 6.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 250.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit | 450.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 150.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | 213.478.000 | INSPEKTORAT |
| 2 | 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | <i>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota</i> | 100% | 16.862.522.000 | |
| | 6.01.02.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | <i>Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP</i> | 100 % 100 % | 6.516.308.000 | |
| | 6.01.02.1.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 82 Laporan | 1.983.808.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 2 Laporan | 850.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 30 Laporan | 850.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.05 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | 30 Laporan | 1.982.500.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4 Dokumen | 850.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | <i>Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti</i> | 100 % 100 % | 10.346.214.000 | |
| | 6.01.02.1.02.01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 12 Laporan | 550.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.1.02.02 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 86 Laporan | 9.796.214.000 | INSPEKTORAT |
| 3 | 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | <i>Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)</i> | 85 Skor | 3.700.000.000 | |
| | 6.01.03.1.02 | Pendampingan dan Asistensi | <i>Persentase Perangkat Daerah yang Ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/ WBBM Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKpN dan LHKASN Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang tindaklanjuti Persentase Laporan Penerimaan/ Penolakan Gratifikasi yang ditangani Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani Persentase Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah</i> | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % | 3.700.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 6.01.03.1.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 20 Perangkat Daerah | 850.000.000 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.1.02.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 20 Kegiatan | 2.850.000.000 | INSPEKTORAT |
| | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | |
| | 8 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| | 8,01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | |
| 1 | 8.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> | 79.63 Indeks | 18.628.479.000 | |
| | 8.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</i> | 100% | 706.375.500 | |
| | 8.01.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | 400.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.137.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.137.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.137.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.137.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 1.825.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 300.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase realisasi anggaran</i> | 96% | 10.649.887.500 | |
| | 8.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn | 45 Orang/ Bulan | 10.000.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 400.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8.01.01.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | 1.977.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1.977.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 1.977.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 241.977.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 1.977.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | 50% | 31.242.500 | |
| | 8.01.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Dokumen | 1.977.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1.977.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan | 1.977.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1.977.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 19.377.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 1.977.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.03.07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1.977.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i> | 33% | 203.955.000 | |
| | 8.01.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 100.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8.01.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 60 Dokumen | 1.977.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 60 Dokumen | 1.977.500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang | 100.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase pelaksanaan administrasi umum</i> | 98% | 2.974.896.300 | |
| | 8.01.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 75.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 150.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 75.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 75.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 16.635.200 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6 Laporan | 2.433.261.100 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 50.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 100.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase barang milik daerah yang terpenuhi</i> | 95% | 1.305.419.000 | |
| | 8.01.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Paket | 400.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 400.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 505.419.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i> | 100% | 1.363.181.200 | |
| | 8.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 15.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 300.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 13 Laporan | 1.048.181.200 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</i> | 100% | 1.393.522.000 | |
| | 8.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 110.499.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 255.193.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 43 Unit | 27.830.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 1.000.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2 | 8.01.02 | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | <i>Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i> | 100% | 18.700.000.000 | |
| | 8.01.02.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | <i>Persentase pelaksanaan kebijakan</i> | 100% | 18.700.000.000 | |
| | 8.01.02.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 2000 Orang | 18.130.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 4 Laporan | 420.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.1.01.06 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 1 Dokumen | 150.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------|---|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | <i>Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik</i> | 1.30 % | 288.338.302.963 | |
| | 8.01.03.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | <i>Persentase pelaksanaan kebijakan</i> | 100% | 288.338.302.963 | |
| | 8.01.03.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1380 Orang | 287.338.302.963 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 4 Laporan | 1.000.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4 | 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | <i>Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif</i> | 90% | 80.961.724.037 | |
| | 8.01.04.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | <i>Persentase pelaksanaan kebijakan</i> | 100% | 80.961.724.037 | |
| | 8.01.04.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 562 Orang | 80.751.724.037 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 4 Laporan | 210.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5 | 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | <i>Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya</i> | 100% | 1.850.000.000 | |
| | 8.01.05.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | <i>Persentase pelaksanaan kebijakan</i> | 100% | 1.850.000.000 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------------------|---|--|--|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8.01.05.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 673 Orang | 1.640.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 4 Laporan | 210.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6 | 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | <i>Persentase potensi konflik sosial yang ditangani</i> | 100% | 6.700.000.000 | |
| | 8.01.06.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | <i>Persentase pelaksanaan kebijakan</i> | 100% | 6.700.000.000 | |
| | 8.01.06.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 640 Orang | 3.280.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 4 Laporan | 420.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.1.01.06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | 1 Dokumen | 3.000.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | J U M L A H | | | | 20.000.000.000.000 | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*. Indikator *impact* dan *outcome* ini dianggap mampu mewakili dan menggambarkan hasil capaian kinerja pembangunan yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta turunannya, yakni tujuan dan sasaran pembangunan. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan

dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja daerah ini selanjutnya dirumuskan kedalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan sebagai ukuran utama pencapaian kinerja pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Pada subbab ini memuat beberapa indikator kinerja yang menjadi komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2024. Rincian masing-masing indikator kinerja disajikan sebagai berikut:

8.1. Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja makro dan indikator kinerja utama (IKU) memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dalam membangun Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja makro dapat diartikan sebagai indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Pencapaian indikator makro didorong oleh pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah dengan melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan.

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Makro Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian 2022 | Target 2024 |
|-----|--|--------|--------------|-------------|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 77,44 | 78,32 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 5,71 | 5,46 |
| 3 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Persen | 4,48 | 4,10-4,90 |
| 4 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 6,31 | 5,78 |
| 5 | Indeks Gini | Poin | 0,327 | 0,316 |
| 6 | Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU) | Persen | 70,73 | 31,05 |

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja daerah pada tingkat tertinggi yang menggambarkan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome*. Indikator kinerja tujuan dan sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Tabel VII.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Capaian 2022 | Target 2024 |
|--|--|--------|--------------|-------------|
| INDIKATOR KINERJA TUJUAN | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 77,44 | 78,32 |
| 2 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Persen | 4,48 | 4,10-4,90 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 6,31 | 5,78 |
| 4 | Indeks Gini | Indeks | 0,327 | 0,316 |
| 5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 74,46 | 75,00 |
| 6 | Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU) | Persen | 70,73 | 31,05 |
| 7 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 67,70 (B) | 69,00 (B) |
| INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | | | | |
| 8 | Prevalensi Stunting | Persen | 23,90 | 12,83 |
| 9 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 5,71 | 5,46 |
| 10 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 66,84 | 67,31 |
| 11 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) | Indeks | 6,74 | 7,74 |
| 12 | Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) | Persen | 7,27 | 10,39 |

Sumber: hasil proyeksi, 2023

8.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut juga Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) merupakan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang termasuk ke dalam Indikator Kinerja Urusan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Adapun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel VII.3
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Satuan | Capaian 2022 | Target 2024 |
|-------|--|--------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | |
| 01.01 | Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | % | 92,31 | 100 |
| 01.02 | Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus | % | 81,36 | 82,5 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | |
| 02.01 | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi | % | 1,73 | 1,86 |
| 02.02 | Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi | % | 72,88 | 100.00.00 |
| 02.03 | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | % | 100 | 100 |
| 02.04 | Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi | % | 100 | 100 |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 03.01 | Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | % | 47,66 | 70,78 |
| 03.02 | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi | % | 15,08 | 65,29 |
| 03.03 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi | % | 57,86 | 60,45 |
| 03.04 | Rasio kemantapan jalan | % | 77,52 | 73 |
| 03.05 | Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli | % | 74,61 | 62,62 |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| 04.01 | Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani | % | 100 | 56,26 |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | |
| 05.01 | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | % | 100 | 100 |
| 05.02 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | % | 72,73 | 100 |
| 05.03 | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | % | 100 | 100 |
| 05.04 | Persentase penanganan pra bencana | % | 70 | 100 |
| 05.05 | Persentase penanganan tanggap darurat bencana | % | 100 | 100 |

| No | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Satuan | Capaian 2022 | Target 2024 |
|-------|--|--------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | |
| 06.01 | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | % | 100 | 100 |
| 06.02 | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti | % | 95,97 | 100 |
| 06.03 | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | % | 64,97 | 100 |
| 06.04 | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | % | 100 | 100 |
| 06.05 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | % | 100 | 100 |
| 7 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | |
| 07.01 | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja | % | 60 | 90 |
| 07.02 | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | % | 51 | 50 |
| 07.03 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | % | 7.512,81 | 07.00 |
| 07.04 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | % | 20,52 | 20 |
| 07.05 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | % | 26,1 | 27.20.00 |
| 07.06 | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan | % | 86,26 | 85,00, |
| 8 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| 08.01 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | % | 11,38 | 14 |
| 08.02 | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak | % | 1,07 | 02.00 |
| 08.03 | Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 anak | % | 2,46 | 23.46 |
| 9 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | |
| 09.01 | Persentase Cadangan Pangan | % | 70,52 | 88,83 |
| 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 10.01 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi | % | 74,46 | 75,00 |
| 10.02 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | % | 96,34 | 97 |

| No | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Satuan | Capaian 2022 | Target 2024 |
|-------|--|--------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| 11.01 | Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun | % | 100 | 100 |
| 11.02 | Pemanfaatan data kependudukan | % | 26,47 | 38,23 |
| 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| 12.01 | Persentase pengentasan desa tertinggal | % | 68,52 | 59 |
| 12.02 | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | % | 92,25 | 6,27 |
| 13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| 13.01 | TFR (Angka Kelahiran Total) | % | 02,18 | 2,04 |
| 13.02 | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | % | 55,5 | 67,98 |
| 13.03 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) | % | 29,7 | 7,54 |
| 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | |
| 14.01 | Rasio konektivitas provinsi | Poin | 0,816 | 0,846 |
| 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | |
| 15.01 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | % | 68,42 | 100 |
| 15.02 | Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi | % | 53,66 | 55 |
| 15.03 | Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi | % | 61,67 | 63 |
| 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | |
| 16.01 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | % | 30,59 | 39 |
| 16.02 | Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha | % | 77,38 | 75 |
| 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | |
| 17.01 | Persentase peningkatan investasi di provinsi | % | 40,29 | 1 |
| 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| 18.01 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | 0,12 | 1,02 |
| 18.02 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | % | 9,5 | 20,49 |
| 18.03 | Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali) | Medali | 10 | 100 |
| 19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | |
| 19.01 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | 100 | 100 |
| 19.02 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik | % | 100 | 100 |

| No | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Satuan | Capaian 2022 | Target 2024 |
|----------|---|--------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | | | |
| 20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | |
| 20.01 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | % | 38,76 | 53 |
| 21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | |
| 21.01 | Terlestariannya Cagar Budaya | % | 59,92 | 62 |
| 22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | |
| 22.01 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | skor | 46,27 | 46 |
| 22.02 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | indeks | 34,16 | 35 |
| 23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | |
| 23.01 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | % | 74,65 | 76 |
| 23.02 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | % | 3,34 | 3,5 |
| 24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| 24.01.00 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) | Ton | 339.631 | 370.000 |
| 24.02.00 | Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku | % | 59,09 | 100 |
| 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | |
| 25.01.00 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | % | -7,53 | 11,82 |
| 25.02.00 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi | % | 67,47 | 62 |
| 25.03.00 | Tingkat hunian akomodasi | % | 1,67 | 1,65 |
| 25.04.00 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | % | 0,82 | 0,83 |
| 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | |
| 26.01.00 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Ton/Ha | 3,63 | 3,67 |
| 26.02.00 | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular | % | 83,67 | -2,74 |
| 27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | |
| 27.01.00 | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial | % | 76,19 | 75 |
| 27.02.00 | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) | % | 0,12 | 1 |
| 27.03.00 | Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi | % | 80,86 | 89 |

| No | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Satuan | Capaian 2022 | Target 2024 |
|----------|---|--------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | |
| 28.01.00 | Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda | % | 86,17 | 100 |
| 28.02.00 | Persentase Desa Yang Teraliri Listrik | % | 100 | 100 |
| 29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | |
| 29.01.00 | Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas | % | 55,71 | 55 |
| 29.02.00 | Persentase penanganan pengaduan konsumen | % | 100 | 100 |
| 29.03.00 | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | % | 72,22 | 73 |
| 29.04.00 | Tertib Usaha | % | 100 | 100 |
| 29.05.00 | Persentase kinerja realisasi pupuk | % | 92,67 | 85 |
| 29.06.00 | Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan | % | 76,04 | 77 |
| 29.07.00 | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | % | 1,17 | 1,15 |
| 30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | |
| 30.01.00 | Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi | % | 20,7 | 17 |
| 30.02.00 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | % | 124,25 | 117 |
| 30.03.00 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait | % | 23,61 | 25 |
| 30.04.00 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | % | 220 | 95 |
| 31 | PERENCANAAN DAN KEUANGAN | | | |
| 31.01.00 | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | % | 5,44 | 9,65 |
| 31.02.00 | Rasio PAD | % | 53,54 | 50,45 |
| 31.03.00 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer <i>expenditures</i>) | % | 62,58 | 65,05 |
| 31.04.00 | Opini Laporan Keuangan | Opini | WTP | WTP |
| 31.05.00 | <i>Budget execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | % | 15,57 | 100 |
| 31.06.00 | <i>Revenue mobilization</i> : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | % | 27,18 | 100 |
| 31.07.00 | <i>Assets Management</i> | Aspek | 4 | 4 |
| 31.08.00 | <i>Cash Management</i> : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya | % | 54,01 | 15,49 |
| 32 | PENGADAAN | | | |
| 32.01.00 | Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif | % | 4,35 | 3,9 |

| No | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | Satuan | Capaian 2022 | Target 2024 |
|----------|---|--------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32.02.00 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | % | 63 | 75 |
| 32.03.00 | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | % | - | 30 |
| 33 | KEPEGAWAIAN | | | |
| 33.01.00 | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 157,53 | 90 |
| 33.02.00 | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 17,53 | 86 |
| 33.03.00 | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 18,27 | 86 |
| 34 | TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK | | | |
| 34.01.00 | Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | Level 3 | Level 3 |
| 34.02.00 | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP) | Level | Level 3 | Level 3 |

Sumber: hasil proyeksi, 2023

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Tema Pembangunan RKPD tahun 2024 adalah “Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan”. Tema ini mengandung substansi pokok pembangunan tahun 2024 yaitu menguatkan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal melalui percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Penyusunan RKPD tahun 2024, dilakukan melalui berbagai tahapan dan dibahas dalam forum koordinasi dan konsultasi, baik antar pemerintah kabupaten/kota, Perangkat Daerah, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, tergantung pada kesesuaian asumsi-asumsi yang dibangun pada saat penyusunan RKPD tahun 2024 ini. Salah satu asumsi yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD tahun 2024 ini adalah adanya kerjasama semua pelaku pembangunan dalam memberikan kontribusi sesuai peran serta kemauan untuk turut mengawal dan mengendalikan pelaksanaan semua rencana program/kegiatan yang telah direncanakan.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2024 yang menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen ini antara lain :

1. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;

2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;
3. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
4. Setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan mempedomani RKPD Tahun 2024 serta melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renja K/L 2024 dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota tahun 2024;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan, dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
7. Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah secara berkala, untuk selanjutnya menjadi bahan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (jika dilakukan perubahan);

8. Kepala Bappeda melakukan evaluasi hasil di akhir tahun pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
9. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahun 2024.

Samarinda, 30 Juni 2023
Gubernur Kalimantan Timur,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

BAPPEDA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123,
Telp : 0541 - 741044, <https://bappeda.kaltimprov.go.id>,